



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PADANG TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beserta peraturan pelaksanaannya tidak sesuai lagi dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 memberikan dampak terhadap pencapaian target indikator kinerja pembangunan, pendapatan daerah, baik dari pendapatan transfer maupun dari pendapatan asli daerah mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan sehingga perlu perencanaan ulang;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2019-2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 – 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 adalah menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan daerah peraturan perundang-undangan guna memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota secara berkesinambungan.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 adalah sebagai :

- a. untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program pembangunan dalam jangka waktu lima tahun agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah;
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD setiap tahunnya;
 - c. pedoman penyusunan Rencana Strategis SKPD dan RKPD; dan
 - d. untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat, Daerah dengan Kabupaten/Kota sekitar.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018.
 - (2) RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) RPJMD Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah;

- g. Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. Bab IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2021

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA



Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ARFIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 8

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PROPINSI SUMATERA BARAT :
(8/126/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Penyusunan RPJMD Kota Padang periode 2019-2024 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi para pelaku pembangunan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dalam melakukan kegiatan untuk mendorong proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Disamping itu, penyusunan RPJMD Kota Padang juga dimaksudkan untuk dapat melakukan koordinasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar terwujud keterpaduan dan sinergi kegiatan pembangunan antar sektor dan antar wilayah dalam Kota Padang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka Walikota bersama DPRD Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat 6 bulan setelah Walikota dilantik.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, RPJM Daerah disusun dengan mekanisme pembahasan dalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dengan melibatkan unsur masyarakat, SKPD, dan pihak legislatif. Oleh karena itu, sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah tersebut disampaikan kepada DPRD, terlebih dahulu telah dilakukan musyawarah dan pembahasan secara substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dikonsultasikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mendapatkan klarifikasi dan masukan.

Secara substantif perubahan RPJMD memuat :

- a) Bab I : Pendahuluan;
- b) Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c) Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d) Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- e) Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f) Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah;
- g) Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h) Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i) Bab IX : Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019-2024



BAB I PENDAHULUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD KOTA
PADANG TAHUN 2019-2024

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rankir Perubahan RPJMD) Kota Padang Tahun 2019 – 2024 sebagai Rancangan atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 telah disusun dan disempurnakan sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024.

Dasar Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 ini antara lain terjadinya perubahan mendasar pada kebijakan di tingkat nasional. Perubahan kebijakan tersebut antara lain Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Permendagri nomor 13 tahun 2006 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Selain itu dengan Terjadinya Pandemi *Corona Virus disease* 2019 (Covid-19) membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pencapaian target-target pembangunan Kota Padang sampai dengan tahun 2024. Serta menyinkronkan dengan perencanaan pembangunan Nasional dan propinsi yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

Perubahan RPJMD Kota Padang 2019-2024 ini sebagai lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 dan menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang.

Padang, Desember 2021
Walikota Padang,

dto

Hendri Septa, B.Bus (Acc), M.IB

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap periode penyusunan dan penerapannya, pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan menjamin keadilan dan tata kelola yang mampu menjaga kualitas hidup dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian rencana pembangunan 5 (lima) tahun berada dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang sering disebut dengan *SDG's* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Ada 17 (tujuh belas) tujuan TPB yang disepakati negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan indikator *SDG's* yang menjadi kewenangan kota sejumlah 222 indikator TPB.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah sesuai periode jabatannya.

Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah Kota Padang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024 dan telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021. Dalam pelaksanaannya terjadi beberapa hal yang mendasari perubahan terhadap RPJMD tersebut antara lain:

1. Hasil Pengendalian dan Evaluasi RPJMD menunjukkan bahwa secara substansi RPJMD Kota Padang dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 perlu segera diubah dengan memprioritaskan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19, pencapaian visi, misi, dan program prioritas kepala daerah, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan mendukung prioritas nasional.
2. Terkait dengan peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan berubahnya Peraturan Pemerintah tersebut berdampak pada diterbitkannya beberapa peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pokok penting pada perubahan Permendagri tersebut adalah berubahnya nomenklatur program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah.

3. Selain itu dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan, Pengendalian dan Penataan Perangkat Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan tugas dan fungsi yang mengharuskan perubahan nomenklatur pada beberapa OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang. Sehingga ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD.
4. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah Kemudian dengan mewabahnya pandemi Corona Virus Disease 2019 yang menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan pendapatan daerah, meningkatnya angka kemiskinan, terdampaknya UMKM, meningkatnya pengangguran, serta kurangnya kesiapan masyarakat menghadapi pola hidup baru, menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan sebagaimana yang sudah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024.

Berdasarkan Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila 1). hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, 2). hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan 3). terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Mengacu kepada Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan perubahan RPJMD bersifat Mutatis Mutandis terhadap penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 ini disusun tetap dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*) agar mampu memahami semua persoalan pembangunan dan menyerap aspirasi semua pihak untuk perbaikan di masa datang dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antar stakeholders menjadi penting dan salah satu penentu keberhasilan penyelenggaraan pembangunan jangka menengah yang dijalankan oleh pemerintah untuk periode lima tahun.

Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah dan bersifat indikatif serta menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang tahun 2022, 2023 dan 2024. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi seluruh alur pembangunan dan berkaitan dengan seluruh stakeholders di Kota Padang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

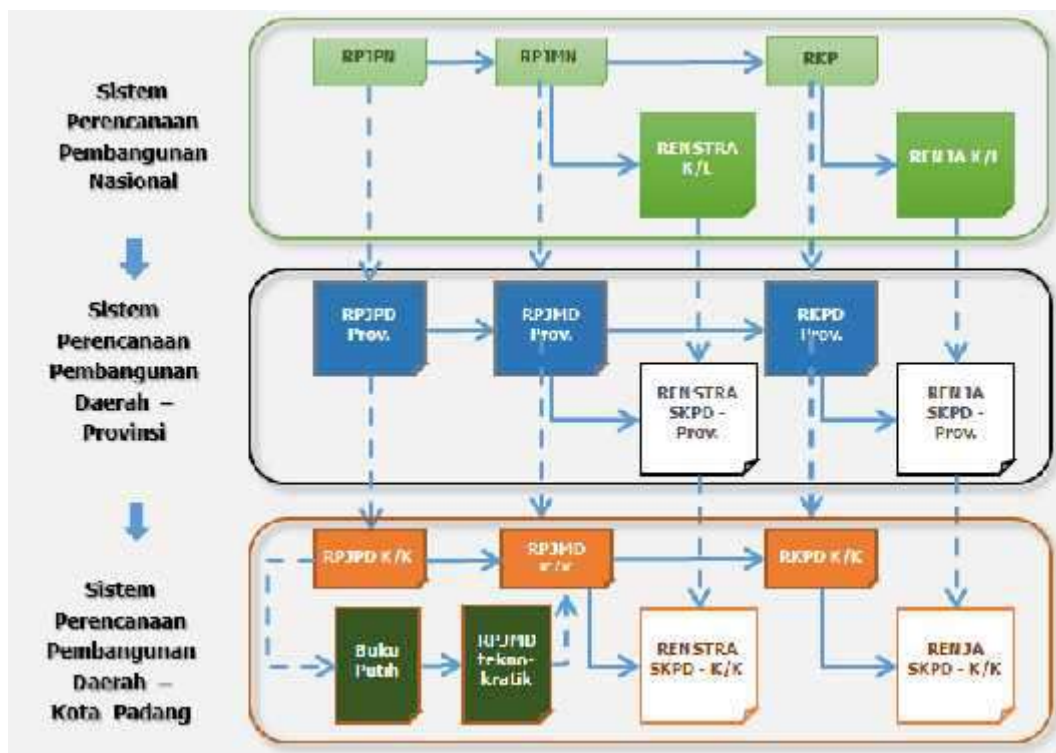
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJPN, RPJMN, dan RPJPD serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat pada periode yang sama. Tujuan pembangunan yang direncanakan di setiap tingkat pemerintahan tersebut merupakan langkah pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan amanat UUD 1945, yaitu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Tujuan pembangunan tersebut juga perlu diarahkan untuk dapat memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang disepakati bersama PBB yang terdiri dari 17 tujuan, meliputi tujuan pembangunan ekonomi, sosial, fisik dan lingkungan hidup. Rencana pembangunan juga perlu diintegrasikan dengan rencana penganggaran untuk efisiensi pembangunan, sehingga program prioritas yang dipilih dapat optimal dalam mencapai tujuan pembangunan.

Perubahan RPJMD menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkup wilayah pemerintahan daerah, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD. **Gambar 1-1** memperlihatkan hubungan rencana pembangunan nasional, daerah dan OPD yang diatur Undang-undang.



Gambar 1-1 Diagram Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan antara Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

I. Perubahan RPJMD Kota Padang dengan RPJPD Kota Padang

Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 adalah pelaksanaan RPJPD 2005-2025 tahap IV. Penyusunan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang periode 2019-2024.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Padang Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Program pembangunan daerah dalam RPJMD harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD, tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

II. Perubahan RPJMD Kota Padang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Padang berpedoman pada RTRW Kota Padang yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota. Penyusunan perubahan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun yang asumsi-asumsinya, meliputi : 1) struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun perubahan RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

III. *Perubahan RPJMD Kota Padang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Padang perlu memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Maka dari itu visi misi daerah yang mencakup arah kebijakan, strategi dan sasaran harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Pusat. Koordinasi yang dilakukan harus bisa mensinergikan setiap hal yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Padang dengan yang ada di RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2020 merupakan panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Unggul. Selanjutnya RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Hal inilah yang harus menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Padang.

Selanjutnya dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Pemerintah Daerah menyelaraskan Dokumen RPJMD dengan RPJMN antara lain dalam bentuk penyelarasan target Indikator Makro Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional sebagaimana dicantumkan pada Lampiran 1.

IV. *Perubahan RPJMD Kota Padang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026*

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dinyatakan bahwa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk Kabupaten dan Kota di wilayah Sumatera Barat harus berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat. Begitupun halnya dengan dokumen Perubahan RPJMD Kota Padang disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Adapun Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” dengan agenda misi, sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing; 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/tenaga menengah serta ekonomi berbasis digital; 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan; 6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan; 7. Mewujudkan

tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

V. *Perubahan RPJMD Kota Padang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024*

Prinsip penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 antara lain transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dua prinsip terakhir menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dokumen RPJMD. Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 menyediakan rumusan skenario pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan kajian terhadap kondisi daerah Kota Padang dan capaian indikator TPB di Kota Padang pada saat ini. Hasil rumusan tersebut selanjutnya diintegrasikan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD ke dalam setiap Bab di dokumen Perubahan RPJMD. Pengintegrasian Rumusan KLHS tersebut dapat diilustrasikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 1-2 Integrasi Muatan Laporan KLHS RPJMD ke Dalam RPJMD

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan nasional, provinsi dan perubahan mendasar yang diakibatkan oleh bencana non alam Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dokumen Perubahan RPJMD ini selanjutnya menjadi arah dan pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan

cita-cita masyarakat Kota Padang sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Padang.

1.4.2 Tujuan

Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024, bertujuan antara lain:

1. Memberikan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2019-2024.
2. Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode 2019-2024.
3. Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan sebagai bahan lebih lanjut untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Menetapkan program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2019-2024.
5. Menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Padang periode 2019-2024.
6. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan Perubahan RPJMD Kota Padang .

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Padang secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (1) geografi dan demografi, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) pelayanan umum, serta (4) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (1) kinerja keuangan masa lalu, (2) kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta (3) kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Padang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Padang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kota Padang dalam jangka menengah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam mengimplementasikan perubahan RPJMD secara terpadu dan berkelanjutan.

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019-2024



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD KOTA
PADANG TAHUN 2019-2024

Daftar Isi

2	BAB III GAMBARAN kondisi umum DAERAH	2-5
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	2-5
2.1.1	Letak, Luas dan Batas Wilayah	2-5
2.1.2	Kondisi Topografi	2-6
2.1.3	Kondisi Klimatologi	2-9
2.1.4	Kondisi Geologi	2-11
2.1.5	Kondisi Hidrologi	2-11
2.1.6	Penggunaan Lahan	2-18
2.1.7	Potensi Pengembangan Wilayah	2-20
2.1.8	Wilayah Rawan Bencana	2-22
2.1.9	Aspek Demografi	2-37
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-40
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	2-40
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	2-45

Daftar Tabel

Tabel 2-1 Luas Kota Padang berdasarkan Kecamatan	2-6
Tabel 2-2 Kondisi Kemiringan Lahan Kota Padang Menurut Kelurahan	2-7
Tabel 2-3 Jumlah curah hujan dan hari hujan Tahun 2020.....	2-10
Tabel 2-4 Nama Sungai, Panjang dan Daerah Yang Dilaluinya Di Kota Padang.....	2-12
Tabel 2-5 Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Padang, Tahun 2016 – 2020.....	2-18
Tabel 2-6 Sebaran Wilayah Rawan Gempa Bumi Menurut Kelurahan di Kota Padang	2-23
Tabel 2-7 Wilayah Rawan Bencana Tsunami Menurut Kelurahan di Kota Padang.....	2-27
Tabel 2-8 Wilayah Rawan Bencana Likuifaksi Kota Padang	2-31
Tabel 2-9 Wilayah Rawan Banjir Kota Padang Menurut Kelurahan	2-35
Tabel 2-10 Tingkat Resiko Bencana Kota Padang	2-37
Tabel 2-11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Padang	2-38

Daftar Gambar

Gambar 2-1 Peta Administrasi Kota Padang.....	2-5
Gambar 2-2 Suhu Udara dan Kelembaban Kota Padang Tahun 2016-2020.....	2-10
Gambar 2-3 Daerah Aliran Sungai di Kota Padang.....	2-18

Gambar 2-4 Sebaran Wilayah Rawan Gempa Bumi Menurut Kelurahan di Kota Padang	2-26
Gambar 2-5 Wilayah Rawan Bencana Tsunami Menurut Kelurahan di Kota Padang ..	2-30
Gambar 2-6 Wilayah Rawan Bencana Likuifaksi Kota Padang	2-33
Gambar 2-7 Wilayah Rawan Banjir Kota Padang Menurut Kelurahan	2-36
Gambar 2-8 Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020 (jiwa)	2-38
Gambar 2-9 Laju pertumbuhan Penduduk (%) Tahun 2016-2020	2-38
Gambar 2-10 Piramida Penduduk Kota Padang Tahun 2020	2-39
Gambar 2-11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	2-40

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Padang pada awalnya memiliki luas 33 km², yang terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Selatan dan Padang Timur dan 15 buah kampung. Seiring berkembangnya pembangunan dan tuntutan memajukan wilayah, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 wilayah Kota Padang diperluas menjadi 694,96 km², yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 193 Kelurahan.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah tanggal 1 Januari 2001, Kota Padang mengalami restrukturisasi wilayah administratif menjadi 11 Kecamatan dengan 104 Kelurahan. Batas wilayah administratif Kota Padang, adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Solok.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia



Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2021

Gambar 2-1 Peta Administrasi Kota Padang

Luas Kota Padang berdasarkan kecamatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2-1 Luas Kota Padang berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km2)	% luas	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) (meter)	Jarak ke Ibukota Padang
1	Bungus Teluk Kabung	6	100,78	14,50	0 - 850	33,00
2	Lubuk Kilangan	7	85,99	12,37	25 - 1853	15,00
3	Lubuk Begalung	15	30,91	4,45	8 - 400	14,00
4	Padang Selatan	12	10,03	1,44	0 - 322	17,00
5	Padang Timur	10	8,15	1,17	4 - 10	13,00
6	Padang Barat	10	7,00	1,01	0 - 8	12,00
7	Padang Utara	7	8,08	1,16	0 - 25	11,00
8	Nanggalo	6	8,07	1,16	3 - 8	8,00
9	Kuranji	9	57,41	8,26	8 - 1000	9,00
10	Pauh	9	146,29	21,05	10 - 1600	16,00
11	Koto Tangah	13	232,25	33,42	0 - 1600	13,40
TOTAL		104		100,00		

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2021

2.1.2 Kondisi Topografi

Wilayah Kota Padang memiliki topografi yang bervariasi, perpaduan daratan yang landai dan perbukitan bergelombang yang curam. Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat kelerengan lahan rata-rata >40%. Ketinggian wilayah Kota Padang dari permukaan laut juga bervariasi, mulai 0 m dpl sampai >1.000 m dpl. Topografi Kota Padang terdiri dari dataran tinggi/perbukitan, dataran rendah, daerah aliran sungai serta mempunyai pulau-pulau dan pantai. Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat kemiringan lahan rata-rata > 40 %. Ketinggian wilayah Kota Padang dari permukaan laut juga bervariasi, mulai dari 0 di atas permukaan laut (dpl) sampai > 1.000 m dpl.

Berdasarkan posisi wilayahnya, Kota Padang secara fisik mempunyai ciri yang menonjol:

- Wilayah Pantai; seluruhnya berhadapan dengan Samudera Hindia.
- Wilayah Dataran Rendah; sebagian besar sudah berkembang sebagai daerah pusat kota.
- Wilayah Dataran tinggi; berupa lereng Bukit Barisan melingkari Kota Padang.

Kondisi kemiringan lereng di Kota Padang umumnya didominasi oleh kemiringan lereng antara >40% yaitu dengan luasan 20.763,72 hektar atau sebesar 29,87%. Kelurahan dengan tingkat kemiringan >40% paling luas adalah Kelurahan Lambung Bukit dan Kelurahan Limbau Manis yang terdapat di

Kecamatan Pauh. Kawasan dengan kelerengan lahan >40% ini merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

Kemiringan lereng lainnya yang cukup dominan di Kota Padang adalah kemiringan lereng 25-40% yaitu seluas 16.709,01 hektar atau sebesar 24,04%. Kelurahan dengan tingkat kemiringan 25-40% yang paling luas terdapat di Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh dan Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pada umumnya kemiringan lereng di Kota Padang dapat dikatakan memiliki kemiringan yang cukup tinggi dengan dominasi kemiringan sebesar 15% sampai dengan >40% yaitu seluas 45.787,83 hektar atau sebesar 65,87% dari luas Kota Padang.

Dalam perencanaan permukiman umumnya kemiringan lereng yang aman untuk dapat dimanfaatkan adalah kemiringan lereng antara 0-15%, saat ini di Kota Padang kemiringan lereng tersebut seluas 23.722,85 hektar atau sebesar 34,14% dari luas Kota Padang. Kelurahan dengan tingkat kemiringan yang cukup landai tersebut paling luas berada di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah, dan pada umumnya hampir seluruh kelurahan di Kecamatan Koto Tangah merupakan daerah dengan tingkat kemiringan lereng sebesar 0-3%. Kelurahan lainnya yang memiliki kemiringan lereng yang cukup landai adalah Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, serta beberapa kelurahan lainnya di Kecamatan Kuranji umumnya memiliki kemiringan lereng yang cukup landai. Untuk lebih jelasnya terkait dengan kemiringan lereng di Kota Padang Menurut Kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2-2 dibawah ini.

Tabel 2-2 Kondisi Kemiringan Lahan Kota Padang Menurut Kelurahan

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan (%)					
		> 40 %	0 - 3 %	15 - 25 %	25 - 40 %	3 - 8 %	8 - 15 %
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	533,42	183,26	200,10	346,47	171,61	99,36
	Bungus Selatan	64,61	102,21	92,23	189,51	12,05	44,65
	Bungus Timur	1.056,20	184,52	390,24	644,27	261,71	221,64
	Teluk Kabung Selatan	608,29	131,09	369,43	774,20	75,04	87,31
	Teluk Kabung Tengah	642,52	84,11	351,08	759,18	105,52	109,27
	Teluk Kabung Utara	160,52	60,30	263,49	312,87	55,85	80,92
Bungus Teluk Kabung Total		3.065,56	745,50	1.666,57	3.026,51	681,77	643,15
Kototangah	Air Pacah	-	471,86	-	-	15,15	-
	Balai Gadang	1.971,06	582,01	1.375,30	2.295,84	422,79	399,81
	Batang Kabung	-	240,34	-	-	-	-
	Batipuh Panjang	0,58	752,35	5,89	3,74	94,30	29,37
	Bungo Pasang	-	404,18	-	-	6,36	-
	Dadok Tunggul Hitam	-	366,67	-	-	-	-
	Koto Panjang Ikua Koto	-	592,85	-	-	54,68	-
	Koto Pulai	-	266,26	-	-	15,30	-
	Lubuk Buaya	-	483,16	-	-	-	-
	Lubuk Minturun	3.940,97	220,01	1.366,09	2.972,41	245,58	386,38
	Padang Sarai	-	513,90	-	-	-	-
	Parupuk Tabing	-	489,35	-	-	-	-
	Pasir Nan Tigo	-	364,45	-	-	-	-
Koto tangah Total		5.912,61	5.747,37	2.747,28	5.272,00	854,17	815,56
Kuranji	Ampang	-	132,81	-	-	-	-
	Anduring	-	114,60	-	-	-	-
	Gunung Sarik	28,95	547,32	84,90	113,77	65,07	49,00

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan (%)					
		> 40 %	0 - 3 %	15 - 25 %	25 - 40 %	3 - 8 %	8 - 15 %
	Kalumbuk	-	246,14	-	-	6,85	-
	Korong Gadang	-	383,76	9,27	3,51	44,09	15,45
	Kuranji	1.134,59	570,72	528,73	828,66	193,72	266,13
	Lubuk Lintah	-	179,98	-	-	9,68	-
	Pasar Ambacang	-	296,49	-	-	38,71	2,68
	Sungai Sapih	-	554,60	6,11	-	4,05	5,32
Kuranji Total		1.163,54	3.026,42	629,01	945,94	362,17	338,59
Lubukbegalung	Banuaran Nan XX	-	54,11	-	-	15,99	-
	Batung Taba Nan XX	-	143,76	-	-	3,17	2,70
	Cangkeh Nan XX	-	76,05	-	-	-	-
	Gates Nan XX	331,05	17,55	63,40	230,15	11,87	8,43
	Gurun Laweh Nan Dua Puluh	-	64,61	-	-	-	-
	Kampung Baru Nan XX	-	31,34	-	-	16,25	0,02
	Kampung Jua Nan XX	31,68	107,48	84,03	87,80	21,28	12,32
	Koto Baru Nan XX	-	13,67	2,16	-	39,54	5,67
	Lubuk Begalung Nan XX	-	97,33	-	-	10,39	0,93
	Pagambiran Ampalu Nan XX	173,69	191,93	70,82	195,89	45,83	19,80
	Pampangan Nan XX	50,28	88,49	6,92	36,31	18,25	2,49
	Parak Laweh Pulau Air Nan XX	-	93,06	-	-	0,66	-
	Tanah Sirah Nan XX	-	78,23	-	-	6,15	5,12
	Tanjung Aur	-	2,82	0,72	-	9,13	-
	Tanjung Saba Pitameh Nan XX	-	88,75	-	-	16,82	5,74
Lubuk Begalung Total		586,70	1.149,18	228,05	550,15	215,33	63,22
Lubuk Kilangan	Bandar Buat	-	229,22	0,68	-	167,21	7,54
	Batu Gadang	1.649,25	28,74	616,55	768,37	256,78	353,69
	Beringin	102,54	62,14	80,31	115,44	29,59	50,21
	Indarung	1.437,26	14,84	231,42	680,53	302,63	530,54
	Koto Lalang	-	176,78	21,65	8,50	64,86	11,94
	Padang Besi	-	19,67	-	-	51,07	10,37
	Tarantang	80,08	62,88	82,49	108,13	26,63	21,19
Lubuk Kiangnan Total		3.269,12	594,27	1.033,10	1.680,96	898,77	985,49
Nanggalo	Gurun Laweh	-	132,43	-	-	-	-
	Kampung Lapai Baru	-	117,40	-	-	-	-
	Kampung Olo	-	91,42	0,17	-	5,25	1,92
	Kurao Pagang	-	300,28	-	-	-	-
	Surau Gadang	-	199,42	-	-	1,79	-
	Tabing Bandar adang	-	90,64	1,53	2,53	9,51	-
Nanggalo Total		-	931,58	1,70	2,53	16,55	1,92
Padang Barat	Belakang Tangsi	-	38,01	-	-	22,91	-
	Berok Nipah	-	41,29	-	-	4,81	0,12
	Flamboyan Baru	-	51,09	-	-	-	-
	Kampung Jao	-	66,36	-	-	-	-
	Kampungp Ondok	-	31,34	-	-	18,03	-
	Olo	-	52,10	-	-	-	-
	Padang Pasir	-	62,54	-	-	-	-
	Purus	-	54,13	-	-	-	-
	Rimbo Kaluang	-	62,16	-	-	-	-
	Ujung Gurun	-	39,63	-	-	-	-
Padang Barat Total		-	498,65	-	-	45,75	0,12
Padang Selatan	Air Manis	61,75	82,00	14,29	76,43	24,92	11,16
	Alang Laweh	-	21,80	-	-	0,29	-

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan (%)					
		> 40 %	0 - 3 %	15 - 25 %	25 - 40 %	3 - 8 %	8 - 15 %
	Batang Arau	7,57	7,57	9,21	28,49	7,22	3,12
	Belakang Pondok	-	27,79	-	-	5,32	-
	Bukit Gado-Gado	39,84	15,39	50,44	47,73	-	11,04
	Mata Air	97,61	17,55	24,23	55,09	69,53	14,94
	Pasa Gadang	-	29,92	0,01	0,68	10,87	-
	Ranah Parak Rumbio	-	16,83	-	-	6,60	-
	Rawang	21,66	74,82	7,52	36,27	17,61	5,24
	Seberang Padang	6,09	50,81	0,98	11,92	3,31	-
	Seberang Palinggam	59,42	8,07	14,46	20,99	-	-
	Teluk Bayur	23,65	33,12	6,23	70,31	6,70	0,30
Padang Selatan Total		317,59	385,68	127,38	347,91	152,36	45,79
Padang Timur	Andalas	-	123,38	-	-	-	-
	Ganting Parak Gadang	-	81,46	-	-	0,52	-
	Jati	-	90,85	-	-	-	-
	Jati Baru	-	76,52	-	-	-	-
	Kubu Marapalam	-	76,08	-	-	-	-
	Kubu Parak Karakah	-	228,74	-	-	-	-
	Parak Gadang Timur	-	69,85	0,04	-	4,61	-
	Sawahana	-	53,89	-	-	-	-
	Sawahana Timur	-	72,02	-	-	-	-
	Simpang Haru	-	40,56	-	-	-	-
Padang Timur Total		-	913,35	0,04	-	5,14	-
Padang Utara	Air Tawar Barat	-	148,15	-	-	-	-
	Air Tawar Timur	-	68,11	-	-	-	-
	Alai Parak Kopi	-	162,30	-	-	-	-
	Gunung Pangilun	-	118,65	11,51	20,21	30,15	2,31
	Lolong Belanti	-	115,23	-	-	-	-
	Ulak Karang Selatan	-	90,53	-	-	-	-
	Ulak Karang Utara	-	85,22	-	-	-	-
Padang Utara Total		-	788,18	11,51	20,21	30,15	2,31
Pauh	Binuang Kampung Dalam	-	151,77	-	-	7,53	-
	Cupak Tengah	-	146,50	-	-	61,79	1,58
	Kapala Koto	-	102,44	2,18	3,62	149,86	6,87
	Koto Luar	65,34	24,42	71,24	145,10	116,62	41,83
	Lambung Bukit	3.763,06	66,06	1.134,83	3.360,93	144,30	400,44
	Limau Manis	2.043,92	19,86	411,85	983,26	222,50	248,03
	Limau Manis Selatan	576,28	47,68	250,37	369,89	143,55	258,66
	Piai Tengah	-	234,31	-	-	4,24	-
	Pisang	-	183,53	-	-	-	-
Pauh Total		6.448,60	976,56	1.870,47	4.862,80	850,39	957,41
KOTA PADANG TOTAL		20.763,72	15.756,74	8.315,11	16.709,01	4.112,54	3.853,56

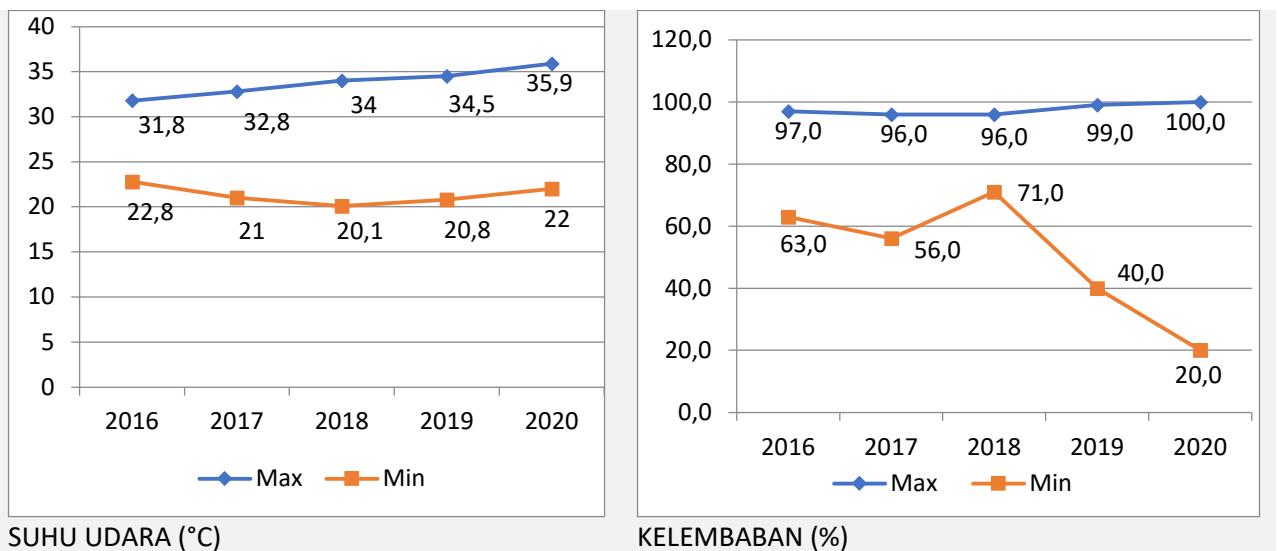
Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2021

2.1.3 Kondisi Klimatologi

Secara geografis, Kota Padang yang terletak di pesisir pantai barat pulau Sumatera, memiliki suhu dan kelembapan yang cukup tinggi. Akibat dari pemanasan global, mempengaruhi meningkatnya suhu udara Kota Padang dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2016, rata-rata suhu udara maksimum adalah sebesar 31,8⁰ C meningkat sekitar 4,1⁰ C menjadi 35,9⁰ C pada tahun 2020. Sementara itu, rata-rata suhu minimum mengalami penurunan dari 22,8⁰ C di

tahun 2016 menjadi 22^o C di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa suhu udara Kota Padang mengalami peningkatan pada siang hari dan penurunan suhu pada malam hari dalam 5 (lima) tahun terakhir. Rata-rata kelembapan Kota Padang juga mengalami peningkatan. Di tahun 2016 rata-rata kelembapan 97% naik sebesar 3 % menjadi 100 % di tahun 2020. Data lengkap perubahan suhu dan kelembapan Kota Padang dapat di lihat pada Gambar 2-2.

Kota Padang memiliki rata-rata curah hujan yang cukup tinggi sebesar 374,6 mm³ dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 18 hari sepanjang tahun 2020. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah pada bulan Juni. Hari hujan terbanyak terjadi pada bulan April, September dan November. Sedangkan hari hujan terkecil terjadi pada bulan Februari. Jumlah curah hujan dan hari hujan selama tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2-3.



Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2021

Gambar 2-2 Suhu Udara dan Kelembaban Kota Padang Tahun 2016-2020

Tabel 2-3 Jumlah curah hujan dan hari hujan Tahun 2020

Bulan	Tahun 2020	
	Curah hujan (mm3)	Hari hujan (hari)
Januari	443,9	16
Februari	208,5	11
Maret	374,2	17
April	294,6	23
Mei	392,5	18
Juni	199,2	15
Juli	333,1	20
Agustus	201,8	15
September	685,6	23
Oktober	482,7	18

Bulan	Tahun 2020	
	Curah hujan (mm3)	Hari hujan (hari)
November	626,5	23
Desember	248,5	18
Rata-Rata	374,26	18,08

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2021

2.1.4 Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kota Padang yang menjadi ibukota Provinsi Sumatera Barat berdasarkan peta Geologi Lembang Padang, Sumatera (Kastowo, Gerhard W.Leo, S.Gafoer & T.C.Amin, 1996), ditutupi oleh batuan dari umur muda ke Tua sebagai berikut:

1. Aluvium (Qal) : terdiri dari Lanau, pasir dan kerikil umumnya terdapat di dataran pantai, termasuk endapan rawa disebelah utara Tiku, sebelah barat daya Lubuk Kalung dan sebelah Timur Padang, setempat kadang-kadang terdapat sisa-sisa batu apung tuf.
2. Kipas Aluvium (Qf) : Kebanyakan terdiri dari hasil rombakan andesit berasal dari gunungapi strato, Qtau. Permukaannya ditutupi oleh bongkah-bongkah andesit. Kipas-kipas alluvium yang terdapat pada lereng-lereng gunungapi Kwarter dipetakan sebagai hasil-hasil dari gunungapi tersebut.
3. Aliran yang tak teruraikan (QTau) : Lahar, fanglomerat dan endapan-endapan koluvium yang lain.
4. Andesit dan Tuf (QTia) : berselingan dan/atau andesit sebagai inklusi didalam tuf.
5. Tuf Kristal yang telah mengeras (QTi) : Terdapat dibagian selatan, pejal dan tersemen baik. Didekat sungai Buluh berwarna muda dan terdiri dari matriks yang banyak mengandung serabut-serabut gelas dengan fragmen-fragmen kuarsa, plagioklas dan fragmen-fragmen batuan gunungapi yang berkomposisi menengah hingga asam dengan garis tengah sampai 10 Cm. Lebih ke selatan berwarna kelabu muda sampai kelabu tua kehijauan yang komposisinya lebih mafik, matriks umumnya klontik dan tuf mengandung fragmen-fragmen batuan berkomposisi menengah sampai mafik disamping kuarsa dan plagioklas, terdapat kontak selaras maupun kontak sesar antara tuf dan andesit dimana sumber tuf tidak diketahui.
6. Batu Gamping Jura (R) : terdiri dari batu gamping kompak putih sampai kelabu kebiruan, pejal dan berongga berumur Jura. Dapat dikorelasikan dengan Anggota Batu gamping Formasi Siguntur (Jsl) di lembah Painan dan bagian Timur Laut Muara Siberut.

2.1.5 Kondisi Hidrologi

Wilayah Kota Padang dilalui oleh banyak aliran sungai besar dan kecil. Terdapat tidak kurang dari 23 aliran sungai yang mengalir di wilayah Kota Padang dengan total panjang mencapai 155,40 km (10 sungai besar dan 13 sungai kecil).

Umumnya sungai-sungai besar dan kecil yang ada di wilayah Kota Padang ketinggiannya tidak jauh berbeda dengan tinggi permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan cukup banyak bagian wilayah Kota Padang yang rawan terhadap banjir/genangan. Karakteristik sungai yang terdapat di wilayah Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2-4 Nama Sungai, Panjang dan Daerah Yang Dilaluinya Di Kota Padang

Sungai	Kecamatan/Kelurahan	Panjang
Aia Batung	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk kabung Tengah, Teluk kabung Utara	439,90
Aia Cindakir	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Bungus Selatan, Bungus Timur, dan Teluk Kabung Utara	756,29
Air Dingin	Kecamatan Koto Tengah : Air Pacah, Balai Gadang, Batang Kabung, Bungo Pasang, Koto Panjang, Ikua Koto, Koto Pulai, Lubuk Minturun, Parupuk Tabing, Pasir Nan Tigo. Kecamatan Kuranji : Kuranji Kecamatan Pauh : Lambung Bukit	13.238,17
Air Manis	Kecamatan Padang Selatan : Air Manis, Rawang, Teluk Bayur	184,98
Anai	Kecamatan Koto Tengah : Balai Gadang, Lubuk Minturun, Padang Sarai, Pasir Nan Tigo	389,79
Arau	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Bungus Barat, Bungus Timur Kecamatan Kuranji : Ampang, Gunung Sarik, Lubuk Lintah, Pasar Ambacang Kecamatan Lubuk Begalung : Banuaran Nan Duapuluh, Batung Taba Nan Duapuluh,	17186,02

Sungai	Kecamatan/Kelurahan	Panjang
	Cangkeh Nan Duapuluh, Gates Nan Duapuluh, Gurun Laweh Nan Dua Puluh, Kampung Baru Nan Duapuluh, Kampung Jua Nan Duapuluh, Koto Baru Nan Duapuluh, Lubuk Begalung Nan Duapuluh, Pagambiran Ampalu Nan Duapuluh, Pampangan Nan Duapuluh, Parak Laweh Pulau Air Nan Duapuluh, Tanah Sirah Nan Duapuluh, Tanjung Aur, Tanjung Saba Pitameh Nan Duapuluh. Kecamatan Lubuk Kilangan : Bandar Buat, Batu Gadang, Beringin, Indarung, Koto Lalang, Padang Besi, Tarantang Kecamatan NanggaloTabing : Bandar Gadang Kecamatan Padang Barat : Belakang Tangsi, Berok Nipah, Flamboyan Baru, Kampung Jao, Kampung Pondok, Olo, Padang Pasir, Purus, Rimbo Kaluang, Ujung Gurun Kecamatan Padang Selatan : Air Manis, Alang Laweh, Batang Arau, Belakang Pondok, Bukit Gado-Gado, Mata Air, Pasa Gadang, Ranah Parak Rumbio, Rawang, Seberang Padang, Seberang Palinggam, Teluk Bayur Kecamatan Padang Timur : Andalas, Ganting Parak Gadang, Jati,	

Sungai	Kecamatan/Kelurahan	Panjang
	Jati Baru, Kubu Marapalam, Kubu Parak Karakah, Parak Gadang Timur, Sawahan, Sawahan Timur, Simpang Haru Kecamatan Padang Utara : Alai Parak Kopi, Gunung Pangilun, Lolong Belanti Kecamatan Pauh : Binuang Kampung Dalam, Cupak Tengah, Kapala Koto, Koto Luar, Limau Manis, Limau Manis Selatan, Piai Tengah, Pisang	
Batang Arau	Kecamatan Padang Selatan : Teluk Bayur	0,91
Batang	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Utara	86,35
Bungus	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Bungus Barat, Bungus Selatan, Bungus Timur, Teluk Kabung Utara Kecamatan Lubuk Begalung : Gates Nan Duapuluh, Pagambiranam Palu Nan Duapuluh Kecamatan Lubuk Kilangan : Batu Gadang, Beringin, Tarantang	4.206,30
Cindakir	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Bungus Selatan, Teluk Kabung Utara	138,81
Indragiri	Kecamatan Koto Tengah : Lubuk Minturun Kecamatan Lubuk Kilangan : Indarung Kecamatan Pauh : Lambung Bukit, Limau Manis	175,29
Kandis	Kecamatan Koto Tengah : Balai Gadang, Batang Kabung,	6.230,97

Sungai	Kecamatan/Kelurahan	Panjang
	Batipuh Panjang, Koto Pulai, Lubuk Buaya Padang Sarai, Pasir Nan Tigo	
Kuranji	Kecamatan Koto Tengah : Air Pacah, Bungo Pasang, Dadok Tunggul Hitam, Koto Panjang Ikua Koto, Lubuk Minturun, Parupuk Tabing Kecamatan Kuranji : Ampang, Gunung Sarik, Kalumbuk, Korong Gadang, Kuranji, Lubuk Lintah, Pasar Ambacang, Sungai Sapih Kecamatan Lubuk Kilangan : Indarung Kecamatan Nanggalo : Gurun Laweh, Kampung Lapai Baru, Kampung Olo, Kurao Pagang, Surau Kecamatan Padang Utara : Gadang, Tabing Bandar Gadang, Air Tawar Barat, Air Tawar Timur, Gunung Pangilun, Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Ulak Karang Utara Kecamatan Pauh : Binuang Kampung Dalam, Kapala Koto, Lambung Bukit, Lima Manis, Lima Manis Selatan	21.286,04
Langsano	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Selatan, Teluk Kabung Tengah	1.063,23
Panasahan	Kecamatan Bungus Teluk Kabung :	529,71

Sungai	Kecamatan/Kelurahan	Panjang
	Bungus Barat Kecamatan Lubuk Begalung : Gates Nan Duapuluh	
Panasahan 2	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Bungus Selatan	0,35
Pinang	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Selatan	53,91
Pisang	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Selatan, Teluk Kabung Tengah	1.120,69
Pisang Kecil	Kecamatan Padang Selatan : Air Manis	2,54
Pulau Air	Kecamatan Koto Tengah : Pasir Nan Tigo	4,45
Pulau Bindalang	Kecamatan Padang Selatan : Bukit Gado-Gado	13,32
Pulau Bindalang 2	Kecamatan Padang Selatan : Air Manis	26,28
Pulau Bintango	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Selatan	52,28
Pulau Pandan	Kecamatan Koto Tengah : Pasir Nan Tigo	14,83
Pulau Pasir	Kecamatan Padang Selatan : Teluk Bayur	0,60
Pulau Pasumpahan	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Selatan	11,74
Pulau Pisang Besar	Kecamatan Padang Selatan : Air Manis	24,08
Pulau Sauh	Kecamatan Koto Tengah : Pasir Nan Tigo	3,57
Pulau Setan	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Selatan	5,71
Pulau Sibuntar Gadang	Kecamatan Padang Selatan : Bukit Gado-Gado	1,49
Pulau Sibuntar Ketek	Kecamatan Padang Selatan: Bukit Gado-Gado	0,58
Pulau Sinayru	Kecamatan Padang Selatan : Air Manis	4,16
Pulau Sirandah	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Selatan	15,12
Pulau Sironjong	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Selatan	8,69
Siboko	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Selatan	326,92
Sikuai	Kecamatan Bungus Teluk Kabung :	41,55

Sungai	Kecamatan/Kelurahan	Panjang
	Teluk Kabung Selatan	
Sungai Baramas	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Bungus Barat Kecamatan Lubuk Begalung : Gates Nan Duapuluh, Pagambiran Ampalu Nan Duapuluh	341,38
Taeh	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Selatan	106,22
Tarusan	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Bungus Timur, Teluk Kabung Selatan, Teluk Kabung Tengah, Teluk Kabung Utara Kecamatan Lubuk Kilangan : Batu Gadang, Indarung	220,04
Teluk Sirih	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Selatan, Teluk Kabung Tengah	413,47
Telukbayur	Kecamatan Lubuk Begalung : Gates Nan Duapuluh Kecamatan Padang Selatan: Air Manis, Rawang, Teluk Bayur	212,14
Teluk Kabung	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Tengah	124,04
Teluk Pandan	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Tengah	343,36
Teluk Pinang	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Selatan	19,01
Ujung kandis	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Tengah	85,08
Ular	Kecamatan Bungus Teluk Kabung : Teluk Kabung Selatan	0,27

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2021



Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2021. Keterangan: - Daerah Aliran Sungai

Gambar 2-3 Daerah Aliran Sungai di Kota Padang

2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Padang berdasarkan jenisnya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak berubah. Hanya saja luas tanah mengalami perubahan yakni penurunan luas pada jenis penggunaan kebun campuran, sawah beririgasi teknis, semak, ladang, sawah non irigasi dan tanah kosong. Sementara itu, peningkatan luas tanah yang sangat besar terjadi pada jenis penggunaan perumahan dari 7.006,72 Ha (10,0813%) tahun 2016 menjadi 7.246,18 Ha (10,4268%) tahun 2020 atau terjadi peningkatan sekitar 0,3703%. Hal ini merupakan dampak dari pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di Kota Padang sehingga menyebabkan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana dasar perkotaan yang salah satunya adalah kebutuhan terhadap perumahan.

**Tabel 2-5 Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaannya di Kota Padang
Tahun 2016 – 2020**

No.	Jenis Penggunaan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Hutan Lebat	35.448,00	51,0028	35.448,00	51,0073	35.448,00	51,0073	35.448,00	51,0073	35.448,00	51,0073

No.	Jenis Penggunaan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
2	Kebun Campuran	13.695,61	19,7053	13.645,60	19,6351	13.634,74	19,6195	13.625,50	19,6062	13.625,50	19,6062
3	Perumahan	7.006,72	10,0813	7.108,93	10,2293	7.141,63	10,2763	7.182,43	10,3350	7.246,18	10,4268
4	Sawah beririgrasi teknis	4.934,00	7,0991	4.934,00	7,0997	4.934,00	7,0997	4.932,90	7,0981	4.868,90	7,0060
5	Perkebunan Rakyat	2.147,50	3,0898	2.147,50	3,0901	2.147,50	3,0901	2.147,50	3,0901	2.147,50	3,0901
6	Semak	1.491,58	2,1461	1.439,52	2,0714	1.431,62	2,0600	1.415,10	2,0362	1.415,10	2,0362
7	Kebun Sayuran	1.343,00	1,9323	1.343,00	1,9325	1.343,00	1,9325	1.343,00	1,9325	1.343,00	1,9325
8	Ladang	936,12	1,3469	942,21	1,3558	941,95	1,3554	926,51	1,3332	926,51	1,3332
9	Jasa	716,42	1,0308	715,25	1,0292	715,25	1,0292	716,31	1,0307	716,31	1,0307
10	Industri	702,25	1,0104	702,25	1,0105	702,25	1,0105	702,25	1,0105	702,50	1,0108
11	Sungai dll	379,45	0,5460	379,45	0,5460	379,45	0,5460	379,45	0,5460	379,45	0,5460
12	Perusahaan	261,06	0,3756	261,00	0,3756	261,06	0,3756	262,80	0,3782	262,80	0,3782

No.	Jenis Penggunaan	2016		2017		2018		2019		2020	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
13	Kolam Ikan	100,80	0,1450	100,80	0,1450	100,80	0,1450	100,80	0,1450	100,80	0,1450
14	Jalan Arteri dan Kolektor	135,00	0,1942	135,00	0,1943	135,00	0,1943	135,00	0,1943	135,00	0,1943
15	Rawa	120,00	0,1727	120,00	0,1727	120,00	0,1727	120,00	0,1727	120,00	0,1727
16	Sawah non irigasi	35,52	0,0511	26,24	0,0378	12,00	0,0173	10,70	0,0154	10,70	0,0154
17	Peternakan	26,83	0,0386	26,83	0,0386	27,33	0,0393	27,33	0,0393	27,33	0,0393
18	Tanah Kota	16,00	0,0230	16,00	0,0230	16,00	0,0230	16,00	0,0230	16,00	0,0230
19	Tanah kosong	3,89	0,0056	2,17	0,0031	2,17	0,0031	2,17	0,0031	2,17	0,0031
20	Danau Buatan	2,25	0,0032	2,25	0,0032	2,25	0,0032	2,25	0,0032	2,25	0,0032
	Jumlah	69.502,00	100,00	69.496,00	100,00	69.496,00	100,00	69.496,00	100,00	69.496,00	100,00

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2021

2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah kota Padang dapat dilihat dari aktivitas ekonomi di wilayah ini, yaitu:

1. Wilayah Potensi Perikanan.

Wilayah Pelabuhan Bungus dalam RPJPD akan dikembangkan sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), dalam skala pelayanan regional dan

internasional. PPS ini akan dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Bungus. PPS Bungus sudah dilengkapi prasarana penunjang. Selain itu, ada juga pelabuhan Muara Anai yang direncanakan untuk pengembangan pelabuhan nelayan, aktivitas penangkapan ikan di sekitar kawasan perairan setempat dengan bobot kapal dibawah 30 DWT.

II. Wilayah Potensi Pertanian.

Ruang untuk pengembangan budi daya pertanian kota diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki saluran-saluran irigasi teknis, antara lain Kecamatan Pauh, Kuranji, Bungus Teluk kabung, dan Koto Tangah. Upaya untuk mempertahankan kawasan pertanian kota tidak hanya dalam rangka ketahanan pangan namun juga sebagai bagian penataan lanskap kota, membatasi terjadinya urbanisasi penduduk atau tidak terjadinya perpindahan mata pencaharian penduduk dari pertanian ke lainnya, sehingga pertanian tetap terjaga antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Hutan Lindung dan Hutan Suaka di Kota Padang juga harus dijaga kelestariannya sebagai kawasan penyangga dan pembatas antara kawasan lindung dan kawasan budi daya.

III. Wilayah Potensi Pariwisata.

Potensi wisata yang ada meliputi wisata alam, budaya, bahari, belanja, kuliner, sejarah dan wisata konveksi. Pengembangan wisata kuliner, belanja dan konveksi direncanakan terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa. Sedangkan wisata alam budaya dan sejarah direncanakan terintegrasi pada wisata kuliner. Rincian kawasan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kawasan pariwisata alam.

Pantai Padang, Gunung Padang dan Pantai Air Manis, Sungai Pisang, Pantai Pasir Jambak, dan pulau-pulau kecil, dan Taman Hutan Raya (THR) Bung Hatta.

B. Kawasan pariwisata budaya :

Kawasan kota lama yaitu kawasan Pondok dan kawasan Muaro, permukiman tradisional/adat nagari adat di Kecamatan Bungus, Koto Tangah, Pauh dan Kuranji;

C. Kawasan Agrowisata :

Kecamatan Koto Tangah, Pauh.

IV. Wilayah Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Potensi IKM di kota Padang dikembangkan untuk menampung kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah. Sentra IKM yang ada di Kota Padang terpusat di Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Koto Tangah.

V. Wilayah Potensi Pertambangan.

Pengembangan area tambang skala besar berlokasi di Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai penghasil semen (PT. Semen Indonesia). Potensi tambang lainnya seperti galian non logam skala kecil berada pada sebagian besar Kecamatan.

VI. Wilayah potensi perdagangan.

Sebagai ibukota propinsi, Kota Padang berada pada posisi strategis sebagai pusat perdagangan karena memiliki pelabuhan laut Teluk Bayur, Terminal tipe A di Anak Aia dan Bandara Internasional Minangkabau yang tidak jauh dari Kota Padang. Kota Padang memiliki 1 unit Pasar Raya dan 16 unit pasar rakyat serta beberapa pusat perbelanjaan modern.

VII. Wilayah potensi pendidikan.

Kota Padang memiliki beberapa Perguruan Tinggi Negeri diantaranya, Universitas Andalas di Kecamatan Pauh, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol di Kecamatan Koto Tangah dan Universitas Negeri Padang di Kecamatan Padang Utara serta Perguruan Tinggi Swasta yang tersebar di beberapa kecamatan. Dengan demikian Kota Padang telah menjadi kota tujuan pendidikan secara nasional, yang juga diminati oleh calon mahasiswa dari negara lain.

2.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kota Padang terletak pada pertemuan dua lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang menyebabkan daerah ini rawan gempa bumi dan tsunami. Selain itu bencana yang sering terjadi adalah kebakaran, pohon tumbang, longsor, abrasi pantai dan banjir karena hujan atau naiknya permukaan air laut.

I. Gempa Bumi.

Data kegempaan dari BMKG memperlihatkan lokasi pusat-pusat gempa di perairan Kota Padang tersebar merata, dengan pusat gempa lebih banyak di perairan antara Pulau Enggano dan daratan Pulau Sumatera. Frekuensi kejadian gempa pada periode tahun 1963 hingga 2009 terjadi peningkatan, dengan jumlah gempa terjadi 3 sampai 16 kali pertahun dalam kurun 1963-1975, frekuensi hingga 2 kali kejadian dalam tahun 1984 hingga 1995, frekuensi hingga 4 kali kejadian dalam kurun 1995 hingga 2009. Kebanyakan sumber-sumber gempa tersebut berada pada kedalaman 33 hingga 100 km, dengan magnitudo terbesar 7,9 Skala Richter. Zona tektonik aktif yang terbentuk dari penujaman lempeng di sebelah Barat Pulau Sumatera juga dapat dilihat dari adanya gunung api aktif yang muncul di sepanjang jalur patahan aktif di bagian sisi Barat Pulau Sumatera yang bergerak geser kanan (dextral strike slip fault). Jalur patahan Sumatera yang juga biasa disebut dengan Patahan Semangko sepanjang 1.650 Km, menyebabkan blok sebelah Barat Sumatera bergerak ke Utara sedangkan yang di sebelah Timur bergerak ke Selatan serta melahirkan kepulauan busur dalam (inner island arc) seperti Pulau Nias, Mentawai dan Enggano. Gempa vulkanik yang terjadi di Kota Padang disebabkan posisi kota berada di dekat 3 gunung api aktif, yaitu Gunung Talang, Merapi dan Tandikek.

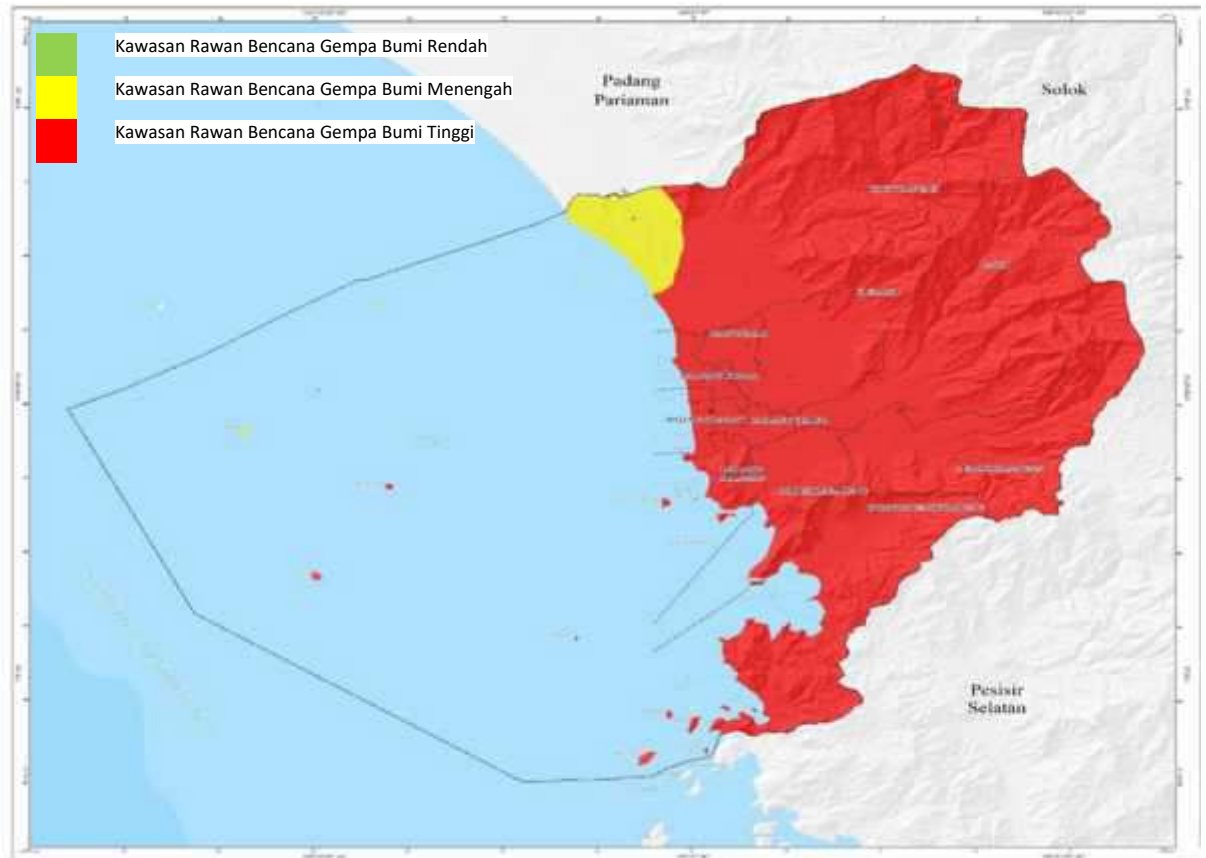
Tabel 2-6 Sebaran Wilayah Rawan Gempa Bumi Menurut Kelurahan di Kota Padang

Kecamatan	Kelurahan	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Menengah (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Tinggi (Ha)
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	-	1.534,23
	Bungus Selatan	-	505,26
	Bungus Timur	-	2.758,57
	Teluk Kabung Selatan	-	2.045,37
	Teluk Kabung Tengah	-	2.051,68
	Teluk Kabung Utara	-	933,95
Bungus Teluk Kabung Total		-	9.829,07
Koto Tangah	Air Pacah	-	487,00
	Balai Gadang	88,11	6.958,70
	Batang Kabung	203,58	36,76
	Batipuh Panjang	791,89	94,34
	Bungo Pasang	19,58	390,97
	Dadok Tunggul Hitam	-	366,67
	Koto Panjang Ikua Koto	-	647,53
	Koto Pulai	112,28	169,28
	Lubuk Buaya	483,16	-
	Lubuk Minturun	-	9.131,45
	Padang Sarai	513,90	-
	Parupuk Tabing	-	489,35
	Pasir Nan Tigo	364,45	-
Koto Tangah Total		2.576,95	18.772,04
Kuranji	Ampang	-	132,81
	Anduring	-	114,60
	Gunung Sarik	-	889,01
	Kalumbuk	-	252,98
	Korong Gadang	-	456,08
	Kuranji	-	3.522,55
	Lubuk Lintah	-	189,66
	Pasar Ambacang	-	337,88
	Sungai Sapih	-	570,08
Kuranji Total		-	6.465,66
Lubuk Begalung	Banuaran Nan Duapuluh	-	70,11
	Batung Taba Nan Duapuluh	-	149,63
	Cangkeh Nan Duapuluh	-	76,05
	Gates Nan Duapuluh	-	662,46
	Gurun Laweh Nan Dua Puluh	-	64,61
	Kampung Baru Nan Duapuluh	-	47,60
	Kampung Jua Nan Duapuluh	-	344,59
	Koto Baru Nan Duapuluh	-	61,05
	Lubuk Begalung Nan Duapuluh	-	108,65

Kecamatan	Kelurahan	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Menengah (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Tinggi (Ha)
	Pagambiran Ampalu Nan Duapuluh	-	697,97
	Pampangan Nan Duapuluh	-	202,74
	Parak Laweh Pulau Air Nan Duapuluh	-	93,71
	Tanah Sirah Nan Duapuluh	-	89,49
	Tanjung Aur	-	12,66
	Tanjung Saba Pitameh Nan Duapuluh	-	111,31
Lubuk Begalung Total		-	2.792,64
Lubuk Kilangan	Bandar Buat	-	404,65
	Batu Gadang	-	3.673,38
	Beringin	-	440,22
	Indarung	-	3.197,22
	Koto Lalang	-	283,72
	Padang Besi	-	81,11
	Tarantang	-	381,40
Lubuk Kilangan Total		-	8.461,70
Nanggalo	Gurun Laweh	-	132,43
	Kampung Lapai Baru	-	117,40
	Kampung Olo	-	98,75
	Kurao Pagang	-	300,28
	Surau Gadang	-	201,21
	Tabing Bandar Gadang	-	104,21
Nanggalo Total		-	954,28
Padang Barat	Belakang Tangsi	-	60,92
	Berok Nipah	-	46,22
	Flamboyan Baru	-	51,09
	Kampung Jao	-	66,36
	Kampungp Ondok	-	49,37
	Olo	-	52,10
	Padang Pasir	-	62,54
	Purus	-	54,13
	Rimbo Kaluang	-	62,16
	Ujung Gurun	-	39,63
Padang Barat Total		-	544,52
Padang Selatan	Air Manis	-	270,55
	Alang Laweh	-	22,08
	Batang Arau	-	63,20
	Belakang Pondok	-	33,11
	Bukit Gado-Gado	-	164,44
	Mata Air	-	278,95
	Pasa Gadang	-	41,47
	Ranah Parak Rumbio	-	23,44
	Rawang	-	163,10

Kecamatan	Kelurahan	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Menengah (Ha)	Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi Tinggi (Ha)
	Seberang Padang	-	73,11
	Seberang Palinggam	-	102,94
	Teluk Bayur	-	140,32
Padang Selatan Total		-	1.376,71
Padang Timur	Andalas	-	123,38
	Ganting Parak Gadang	-	81,99
	Jati	-	90,85
	Jati Baru	-	76,52
	Kubu Marapalam	-	76,08
	Kubu Parak Karakah	-	228,74
	Parak Gadang Timur	-	74,51
	Sawahen	-	53,89
	Sawahen Timur	-	72,02
	Simpang Haru	-	40,56
Padang Timur Total		-	918,53
Padang Utara	Air Tawar Barat	-	148,15
	Air Tawar Timur	-	68,11
	Alai Parak Kopi	-	162,30
	Gunung Pangilun	-	182,82
	Lolong Belanti	-	115,23
	Ulak Karang Selatan	-	90,53
	Ulak Karang Utara	-	85,22
Padang Utara Total		-	852,35
Pauh	Binuang Kampung Dalam	-	159,29
	Cupak Tengah	-	209,86
	Kapala Koto	-	264,97
	Koto Luar	-	464,55
	Lambung Bukit	-	8.869,63
	Limau Manis	-	3.929,42
	Limau Manis Selatan	-	1.646,42
	Piai Tengah	-	238,55
	Pisang	-	183,53
Pauh Total		-	15.966,22
KOTA PADANG TOTAL		2.576,95	66.933,72

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2021



Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2021

Gambar 2-4 Sebaran Wilayah Rawan Gempa Bumi Menurut Kelurahan di Kota Padang

II. Gelombang Tsunami

Letak Kota Padang yang berada di Pantai Barat Sumatera, yang berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Hindia) dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Padang salah satu kota paling rawan bahaya gelombang Tsunami. Gempa tektonik sepanjang daerah subduksi dan adanya seismik aktif, dapat mengakibatkan gelombang yang luar biasa dahsyat. Dari catatan sejarah bencana, gelombang tsunami pernah melanda Sumatera Barat pada tahun 1797 dan 1833.

Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi ditetapkan pada kawasan sepanjang pantai yang meliputi wilayah:

1. Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Aie Pacah, Balai Gadang, Batang Kabung, Batipuh Panjang, Bungo Pasang, Dadok Tunggul Hitam, Koto Panjang Ikua Koto, Koto Pulai, Lubuk Buaya, Padang Sarai, Parupuk Tabing, Pasir Nan Tigo
2. Kecamatan Nanggalo Kelurahan Gurun Laweh, Kampung Lapai Baru, Kampun Golo, Kurao Pagang, Surau Gadang, Tabing Banda Gadang
3. Kecamatan Padang Utara Kelurahan Air Tawar Barat, Air Tawar Timur, Alai Parak Kopi, Gunung Pangilun, Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Ulak Karang Utara

4. Kecamatan Padang Barat Kelurahan Belakang Tangsi, Berok Nipah, Flamboyan Baru, Kampung Jao, Kampung Pondok, Olo, Padang Pasir, Purus, Rimbo Kaluang, Ujung Gurun
5. Kecamatan Padang Timur Kelurahan Andalas, Ganting Parak Gadang, Jati, Jati Baru, Kubu Marap Alam, Kubu Parak Karakah, Parak Gadang Timur, Sawahan, Sawahan Timur, Simpang Haru
6. Kecamatan Padang Selatan Air Manis, Alang Laweh, Batang Arau, Belakang Pondok, Bukit Gado-Gado, Mata Air, Ranah Parak Rumbio, Rawang, Seberang Padang, Teluk Bayur
7. Kecamatan Lubuk Begalung Banuaran Nan XX, Batung Tabanan XX, Gates Nan XX, Gurun Laweh Nan XX, Lubuk Begalung Nan XX, Pagambiran Ampalu Nan XX, Pampangan Nan XX, Parak Laweh Pulau Aie Nan XX.
8. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, kelurahan Bungus Barat, Bungus Selatan, Bungus Timur, Telukkabung Selatan, Teluk Kabung Tengah, Teluk Kabung Utara

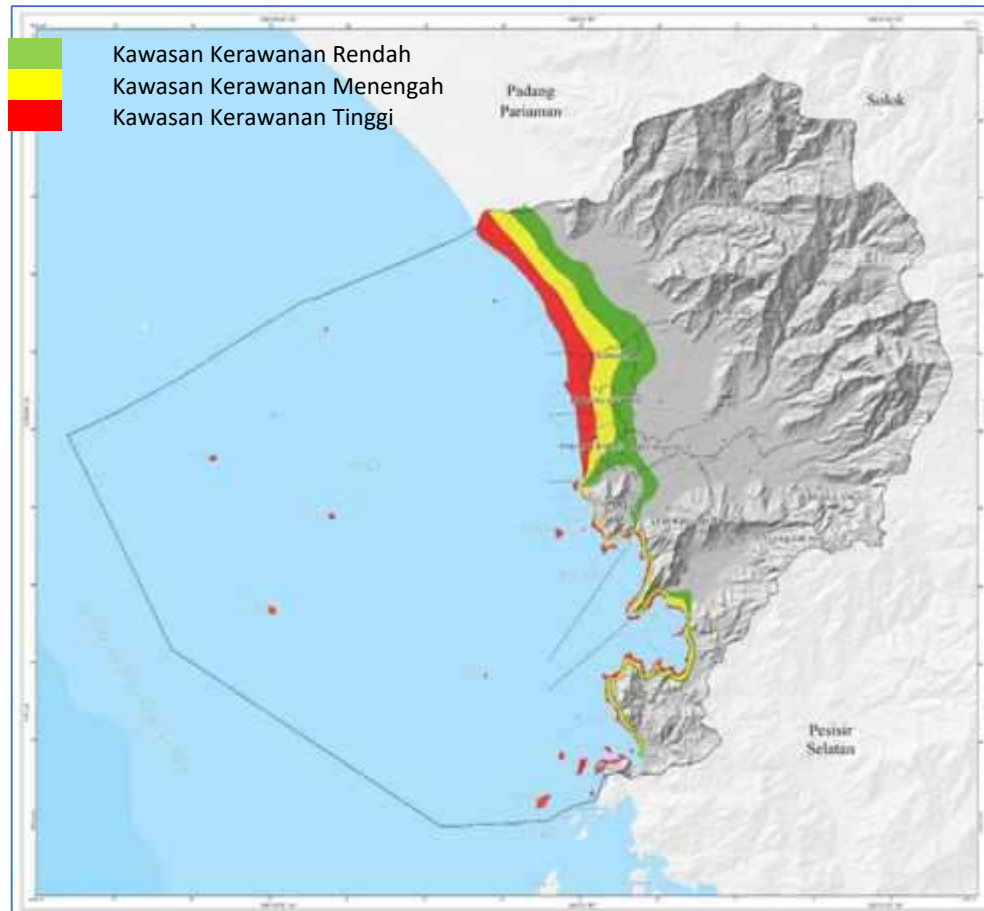
Tabel 2-7 Wilayah Rawan Bencana Tsunami Menurut Kelurahan di Kota Padang

Kecamatan	Kelurahan	Zona Kerawanan Menengah (Ha)	Zona Kerawanan Rendah (Ha)	Zona Kerawanan Tinggi (Ha)
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	76,05	98,10	56,50
	Bungus Selatan	57,99	41,84	22,74
	Bungus Timur	-	0,75	-
	Teluk Kabung Selatan	45,38	37,08	219,21
	Teluk Kabung Tengah	174,99	135,77	166,14
	Teluk Kabung Utara	47,02	34,08	33,55
Bungus Teluk Kabung Total		401,43	347,61	498,15
Koto Tangah	Air Pacah	4,59	181,80	-
	Balai Gadang	-	27,66	-
	Batang Kabung	142,66	-	97,68
	Batipuh Panjang	81,93	389,86	-
	Bungo Pasang	200,91	106,13	103,51
	Dadok Tunggul Hitam	201,89	164,77	-
	Koto Panjang Ikua Koto	-	302,97	-
	Koto Pulai	51,28	205,55	-
	Lubuk Buaya	283,19	89,77	110,21
	Lubuk Minturun	195,86	45,05	272,99
	Padang Sarai	127,87	-	361,48
	Parupuk Tabing	-	-	364,45
Koto Tangah Total		2.580,32	3.027,12	2.620,64
Kuranji	Ampang	-	13,30	-
	Anduring	-	19,36	-
	Gunung Sarik	-	22,57	-

Kecamatan	Kelurahan	Zona Kerawanan Menengah (Ha)	Zona Kerawanan Rendah (Ha)	Zona Kerawanan Tinggi (Ha)
	Kalumbuk	-	310,76	-
	Korong Gadang	-	485,84	-
	Kuranji	-	42,47	-
	Lubuk Lintah	-	1,65	-
	Pasar Ambacang	94,02	57,51	102,35
	Sungai Sapih	-	52,17	-
Kuranji Total		94,02	1.005,63	102,35
Lubuk Begalung	Banuaran Nan Duapuluh	-	3,11	-
	Batung Taba Nan Duapuluh	-	15,36	-
	Cangkeh Nan Duapuluh	-	80,39	-
	Gates Nan Duapuluh	94,02	252,65	102,35
	Gurun Laweh Nan Dua Puluh	-	114,47	-
	Kampung Baru Nan Duapuluh	77,48	-	39,92
	Kampung Jua Nan Duapuluh	78,49	20,26	-
	Koto Baru Nan Duapuluh	101,30	172,80	26,18
	Lubuk Begalung Nan Duapuluh	121,00	80,21	-
	Pagambiran ampalu Nan Duapuluh	2,55	101,66	-
	Pampangan Nan Duapuluh	380,82	489,40	66,10
	Parak Laweh Pulau Air Nan Duapuluh	28,79	1,06	31,07
	Tanah Sirah Nan Duapuluh	11,25	23,30	3,20
	Tanjung Aur	4,53	-	46,57
	Tanjung Saba Pitameh Nan Duapuluh	55,65	2,10	8,61
Lubuk Begalung Total		955,88	1.356,77	324,00
Lubuk Kilangan	Bandar Buat	2,13	-	49,97
	Batu Gadang	15,30	-	47,23
	Beringin	-	-	54,13
	Indarung	4,82	-	57,34
	Koto Lalang	5,35	-	34,28
	Padang Besi	136,63	58,44	332,40
	Tarantang	30,68	-	93,02
Lubuk Kilangan Total		194,92	58,44	668,38
Nanggalo	Gurun Laweh	11,90	-	16,54

Kecamatan	Kelurahan	Zona Kerawanan Menengah (Ha)	Zona Kerawanan Rendah (Ha)	Zona Kerawanan Tinggi (Ha)
	Kampung Lapai Baru	4,27	25,61	-
	Kampung Olo	17,02	-	26,24
	Kurao Pagang	-	12,19	-
	Surau Gadang	-	10,46	-
	Tabing Bandar Gadang	-	47,09	-
Nanggalo Total		33,18	95,34	42,78
Padang Barat	Belakang Tangsi	29,06	-	44,79
	Berok Nipah	92,92	129,16	180,59
	Flamboyan Baru	-	84,73	-
	Kampung Jao	-	79,50	-
	Kampung Ondok	81,19	9,66	-
	Olo	76,52	-	-
	Padang Pasir	-	64,39	-
	Purus	-	14,28	-
	Rimbo Kaluang	-	31,92	-
	Ujung Gurun	17,77	36,12	-
Padang Barat Total		297,46	449,75	225,38
Padang Selatan	Air Manis	-	40,56	-
	Alang Laweh	177,42	431,23	-
	Batang Arau	-	-	148,15
	Belakang Pondok	-	-	68,11
	Bukit Gado-Gado	72,89	89,40	-
	Mata Air	174,34	7,90	0,59
	Pasa Gadang	24,54	-	90,68
	Ranah Parak Rumbio	1,06	-	89,47
	Rawang	-	-	85,22
	Seberang Padang	272,84	97,30	482,22
	Seberang Palinggam	2.846,25	3.805,19	2.972,13
Padang Selatan Total		3.569,35	4.471,58	3.936,56

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2021



Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2021

Gambar 2-5 Wilayah Rawan Bencana Tsunami Menurut Kelurahan di Kota Padang

III. Likuifaksi

Likuifaksi terjadi pada daerah yang tersusun dari endapan alluvium dimana batuanannya bersifat material lepas (loose unconsolidated), jenuh airtanah, dengan kemiringan lereng memadai, sehingga bila mendapat guncangan kuat akibat gempa bumi, maka tegangan air pori akan meningkat dan mengakibatkan lapisan pasir tersebut akan cenderung menjadi bubur dan mengakibatkan daya dukung tanah menjadi berkurang dan meluncur mengikuti bidang lengsernya.

Rawan bencana likuifaksi di Kota Padang dibagi menjadi 2 (dua) tingkatan, yaitu likuifaksi tinggi dan likuifaksi sedang. Rawan bencana likuifaksi yang terdapat di Kota Padang Umumnya merupakan rawan bencana likuifaksi sedang. Kelurahan dengan kerawanan likuifaksi paling luas adalah kelurahan Batipuh Panjang, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto yang berada di Kecamatan Koto Tengah. Sedangkan kelurahan dengan tingkat rawan likuifaksi paling rendah adalah Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan. adapun sebaran rawan likuifaksi di Kota Padang menurut kelurahan dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini:

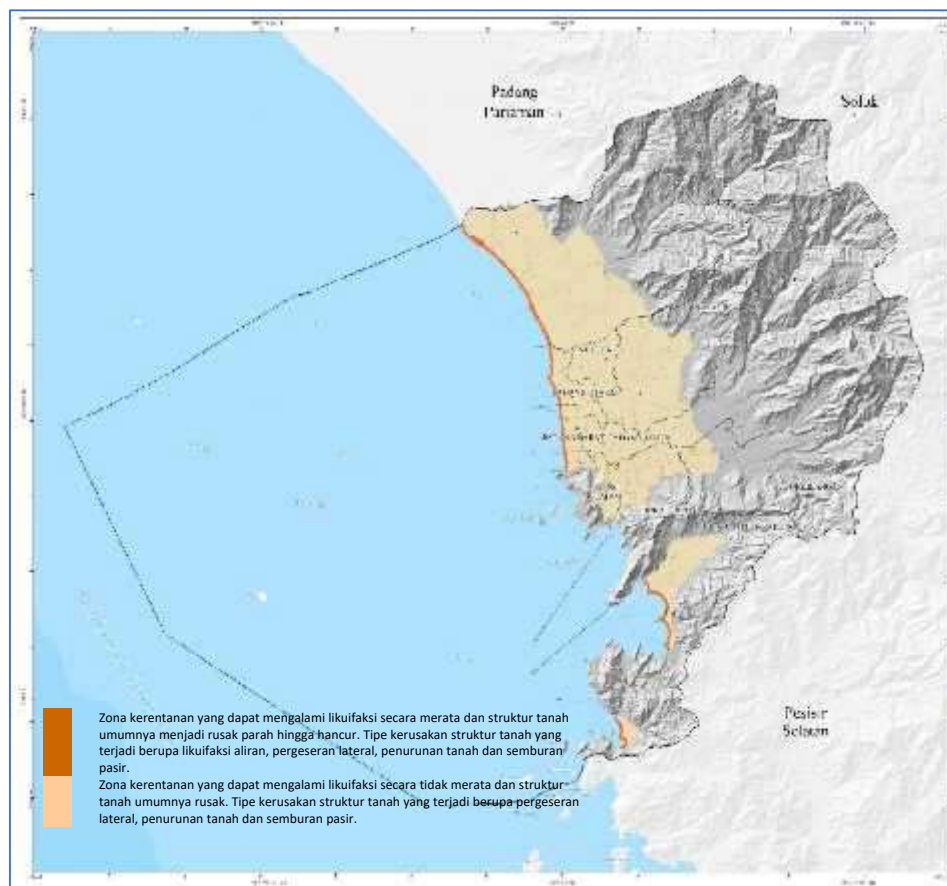
Tabel 2-8 Wilayah Rawan Bencana Likuifaksi Kota Padang

Kecamatan	Kelurahan	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	400,82	11,87
	Bungus Selatan	114,74	48,79
	Bungus Timur	494,98	-
	Teluk Kabung Selatan	157,76	53,36
	Teluk Kabung Tengah	4,90	7,47
	Teluk Kabung Utara	67,11	60,19
Bungustelukkabung Total		1.240,30	181,68
Koto Tengah	Aie Pacah	486,96	-
	Balai Gadang	502,96	-
	Batang Kabung	240,34	-
	Batipuh Panjang	867,14	-
	Bungo Pasang	387,84	22,70
	Dadok Tunggul Hitam	366,67	-
	Koto Panjang Ikua Koto	641,98	-
	Koto Pulai	281,56	-
	Lubuk Buaya	483,16	-
	Lubuk Minturun	231,15	-
	Padang Sarai	510,15	3,75
	Parupuk Tabing	447,88	41,47
	Pasir Nan Tigo	165,46	176,14
Kotot Angah Total		5.613,26	244,05
Kuranji	Ampang	132,81	-
	Anduring	114,60	-
	Gunung Sarik	579,54	-
	Kalumbuk	252,98	-
	Korong Gadang	445,07	-
	Kuranji	487,37	-
	Lubuk Lintah	189,66	-
	Pasaram Bacang	337,88	-
	Sungai Sapih	570,08	-
Kuranji Total		3.110,01	-
Lubuk Begalung	Banuaran Nan Duapuluh	70,11	-
	Batung Taba Nan Duapuluh	149,63	-
	Cangkeh Nan Duapuluh	76,05	-
	Gates Nan Duapuluh	11,86	-
	Gurun Laweh Nan Duapuluh	64,61	-
	Kampung Baru Nan Duapuluh	47,60	-
	Kampung Jua Nan Duapuluh	99,78	-
	Koto Baru Nan Duapuluh	61,05	-
	Lubuk Begalung Nan Duapuluh	108,65	-
	Pagambiran ampalu Nan Duapuluh	172,40	-
	Pampangan Nan Duapuluh	104,98	-
	Paraklaweh Pulau Aie Nan Duapuluh	93,71	-
	Tanah Sirah Nan Duapuluh	89,49	-

Kecamatan	Kelurahan	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)
	Tanjung Aua	12,66	-
	Tanjung Sabapitameh Nan Duapuluh	111,31	-
Lubuk Begalung Total		1.273,91	-
Lubuk Kilangan	Bandar Buat	116,77	-
	Beringin	3,40	-
	Koto Lalang	211,04	-
	Tarantang	87,93	-
Lubuk Kilangan Total		419,14	-
Nanggalo	Gurun Laweh	132,43	-
	Kampung Lapai Baru	117,40	-
	Kampun Golo	98,75	-
	Kurao Pagang	300,28	-
	Surau Gadang	201,21	-
	Tabing Banda Gadang	104,21	-
Nanggalo Total		954,28	-
Padang Barat	Belakang Tangsi	41,55	19,37
	Berok Nipah	8,12	3,35
	Flamboyan Baru	41,84	9,25
	Kampung Jao	66,36	-
	Kampung Pondok	32,86	-
	Olo	32,95	19,15
	Padang Pasir	62,54	-
	Purus	25,88	28,25
	Rimbo Kaluang	52,57	9,59
	Ujung Gurun	39,63	-
Padang Barat Total		404,30	88,96
Padang Selatan	Alang Laweh	22,08	-
	Batang Arau	0,13	-
	Belakang Pondok	33,09	-
	Mata Air	229,76	-
	Pasa Gadang	26,47	-
	Ranah Parak Rumbio	23,44	-
	Rawang	137,72	-
	Seberang Padang	72,40	-
	Seberang Palinggam	27,46	-
	Teluk Bayur	16,21	-
Padang Selatan Total		588,77	-
Padang Timur	Andalas	123,38	-
	Ganting Parak Gadang	81,99	-
	Jati	90,85	-
	Jatibaru	76,52	-
	Kubu Marapalam	76,08	-
	Kubu Parakkarakah	228,74	-
	Parak Gadang Timur	74,51	-
	Sawahan	53,89	-
	Sawahan Timur	72,02	-

Kecamatan	Kelurahan	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)
	Simpang Haru	40,56	-
Padang Timur Total		918,53	-
Padang Utara	Air Tawar Barat	107,54	40,61
	Air Tawar Timur	68,11	-
	Alai Parak Kopi	162,30	-
	Gunung Pangilun	182,82	-
	Lolong Belanti	102,09	13,14
	Ulak Karang Selatan	75,60	14,93
	Ulak Karang Utara	63,15	22,07
Padang Utara Total		761,61	90,75
Pauh	Binuang Kampung Dalam	150,22	-
	Cupak Tengah	56,08	-
	Kapala Koto	7,03	-
	Lambung Bukit	0,65	-
	Piaitangah	238,55	-
	Pisang	183,53	-
Pauh Total		636,08	-
KOTA PADANG TOTAL		15.920,18	605,44

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2021



Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2021

Gambar 2-6 Wilayah Rawan Bencana Likuifaksi Kota Padang

IV. Longsoran Lahan

Sebagian besar daerah Kota Padang berada pada lokasi yang memiliki tingkat bahaya longsoran pada karakteristik lahan dengan kemiringan lahan berkisar 23 – 99 %. Bentuk lereng umumnya tidak beraturan (*irreguler*), dengan panjang lereng yang bervariasi, mulai dari 12 hingga 150 meter. Ketinggian daerah yang sebagian besar berupa kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik dengan ketinggian relief berkisar antara 500-1.000 meter dari permukaan laut. Tingkat bahaya longsoran lahan tinggi hampir terdapat pada setiap Kecamatan di Kota Padang, kecuali Kecamatan Padang Utara dan Padang Timur yang daerahnya cenderung datar sehingga diindikasikan tingkat bahaya longsoran lahan rendah pada daerah tersebut. Tingkat risiko longsoran lahan tinggi yang memiliki luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Padang Selatan dengan luas 16 Ha.

V. Abrasi Pantai.

Abrasi pantai merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan terjadinya pengikisan pada pantai sehingga luas daerah pantai menjadi berkurang. Abrasi pantai banyak terjadi pada pantai di Kota Padang karena pantai-pantai tersebut berhubungan langsung dengan Samudera Hindia, terkecuali Pantai Bungus, karena pantai ini terletak pada daerah teluk, maka kecepatan arus sepanjang pantainya cenderung menjadi rendah. Salah satu faktor penyebab tingginya laju abrasi pantai, khususnya di daerah Pasir Parupuk dan Pantai Air Manis.

VI. Banjir.

Kota Padang berpotensi mengalami banjir sedang, tinggi bahkan terdapat potensi banjir bandang. Banjir ringan sering terjadi pada musim hujan. Banjir sedang sering terjadi pada wilayah bagian timur yang merupakan daerah perbukitan yang dilalui oleh sungai seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin serta masih ada lagi 18 sungai lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun. Selain itu, terdapat beberapa wilayah di Kota Padang yang memiliki bentangan wilayah landai sehingga ketika durasi hujan cukup tinggi dan terjadi pasang laut tinggi, akan mengakibatkan banjir dan genangan air

Kota Padang merupakan daerah yang mempunyai curah hujan yang relatif tinggi dengan rata-rata curah hujan 354,75 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 19 hari per bulan, sehingga terjadi luapan sungai dan banjir bandang. Tingkat bahaya banjir ringan bersifat genangan terbesar terdapat pada Kecamatan Koto Tangah dengan luas daerah 790 ha umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kejadian pasang surut air laut. Kejadian banjir di Kota Padang sering bertepatan dengan kejadian pasang naik, sehingga air yang akan mengalir ke laut terhambat karena bertemunya dua massa air, yaitu massa air tawar dan massa air laut ini yang sering menyebabkan banjir ringan yang bersifat genangan.

Kelurahan rawan banjir paling luas berada di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah, yaitu 797,81 hektar sedangkan kelurahan rawan bencana banjir paling kecil adalah Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang

Selatan yaitu dengan luas 0,17 hektar dan Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Kato Tengah dengan luas 0,79 hektar. Adapun sebaran wilayah rawan banjir dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini

Tabel 2-9 Wilayah Rawan Banjir Kota Padang Menurut Kelurahan

Kecamatan	Kelurahan	Rawan Banjir (Ha)
Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	275,77
	Bungus Selatan	68,04
	Bungus Timur	122,97
	Teluk Kabung Tengah	59,96
	Teluk Kabung Utara	103,47
Bungus Teluk Kabung Total		630,21
Koto Tengah	Aie Pacah	238,05
	Balai Gadang	178,86
	Batan Gkabung	102,01
	Batipuh Panjang	797,81
	Bungo Pasang	213,70
	Dadok Tunggul Hitam	271,02
	Koto Panjang Ikua Koto	125,99
	Koto Pulai	225,91
	Lubuk Buaya	63,91
	Lubuk Minturun	135,10
	Padang Sarai	118,85
	Parupuk Tabing	34,51
	Pasir Nan Tigo	0,79
Koto Tengah Total		2.506,52
Kuranji	Ampang	68,97
	Anduring	11,63
	Gunung Sarik	343,36
	Kalumbuk	108,67
	Kuranji	25,66
	Lubuk Lintah	14,40
	Sungai Sapih	519,40
Kuranji Total		1.092,09
Lubuk Begalung	Gates Nan Duapuluh	28,82
	Pagambiran Ampalu Nan Duapuluh	71,91
	Pampangan Nan Duapuluh	89,83
Lubuk Begalung Total		190,56
Nanggalo	Gurun Laweh	121,79
	Kampung Lapai Baru	24,39
	Kampung Olo	29,17
	Kurao Pagang	246,40
	Surau Gadang	130,14
	Tabing Banda Gadang	97,38
Nanggalo Total		649,27
Padang Selatan	Air Manis	2,65
	Alang Laweh	0,17

Kecamatan	Kelurahan	Rawan Banjir (Ha)
	Mata Air	67,84
	Pasa Gadang	19,49
	Ranah Parak Rumbio	7,91
	Rawang	133,80
	Seberang Padang	58,75
	Seberang Palinggam	22,30
	Teluk Bayur	28,37
Padang Selatan Total		341,29
Padang Timur	Andalas	43,77
	Ganting Parak Gadang	54,75
	Jati	90,85
	Jatibaru	13,36
	Sawahen	17,24
	Sawahen Timur	71,15
	Simpang Haru	7,84
Padang Timur Total		298,96
Padang Utara	Alai Parak Kopi	127,25
	Gunung Pangilun	19,31
Padang Utara Total		146,56
KOTA PADANG TOTAL		5.855,47

Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2021



Sumber: RDTR Kota Padang Tahun 2021

Gambar 2-7 Wilayah Rawan Banjir Kota Padang Menurut Kelurahan

Dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kota Padang, tingkat resiko bencana di Kota Padang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2-10 Tingkat Resiko Bencana Kota Padang

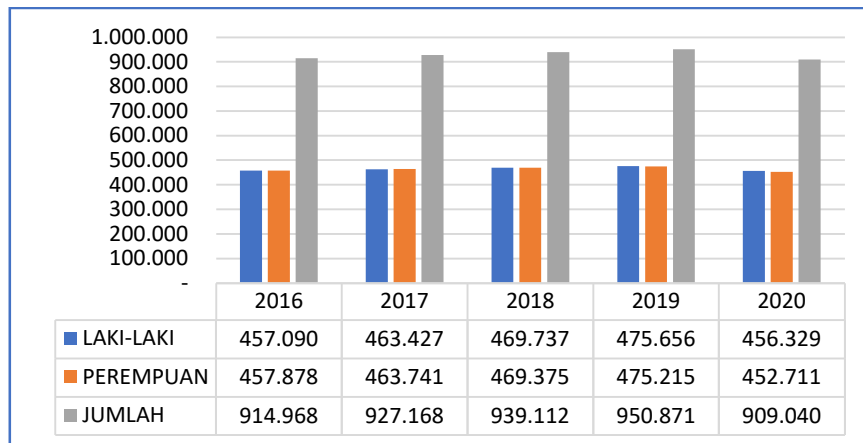
No.	Jenis Bahaya	Tingkat Bahaya		Tingkat Kerentanan		Tingkat Kapasitas		TINGKAT RESIKO	
		Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas
1.	Banjir	0,755	Tinggi	0,727	Tinggi	0,445	Sedang	0,670	Tinggi
2.	Gempa bumi	0,537	Sedang	0,806	Tinggi	0,442	Sedang	0,622	Sedang
3.	Tsunami	0,729	Tinggi	0,735	Tinggi	0,409	Sedang	0,667	Tinggi
4.	Tanah Longsor	0,567	Sedang	0,556	Sedang	0,335	Sedang	0,590	Sedang
5.	Kekeringan	0,654	Sedang	0,785	Tinggi	0,470	Sedang	0,647	Sedang
6.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,791	Tinggi	0,726	Tinggi	0,342	Sedang	0,722	Tinggi
7.	Cuaca Ekstrim	0,861	Tinggi	0,806	Tinggi	0,427	Sedang	0,723	Tinggi
8.	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,516	Sedang	0,689	Tinggi	0,414	Sedang	0,582	Sedang
9.	Epidemi dan Wabah Penyakit	0,333	Rendah	0,773	Tinggi	0,302	Rendah	0,564	Sedang
10.	Gagal Teknologi	0,770	Tinggi	0,770	Tinggi	0,302	Rendah	0,742	Tinggi

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

Memperhatikan peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kota Padang, khususnya untuk peta jasa pengaturan perlindungan dan pencegahan bencana alam, bahwa sebagian besar wilayah kota Padang memiliki daya dukung dan daya tampung yang tinggi atas jasa perlindungan dan pencegahan bencana alam. Akan tetapi, bagian wilayah yang jasa perlindungan terhadap bencana kategori tinggi tersebut adalah berada pada kawasan lindung, sementara pada kawasan budidaya, terutama pada bagian Timur yang memiliki kemiringan lahan yang tinggi, jasa perlindungan dan pencegahan bencana adalah sedang dan rendah

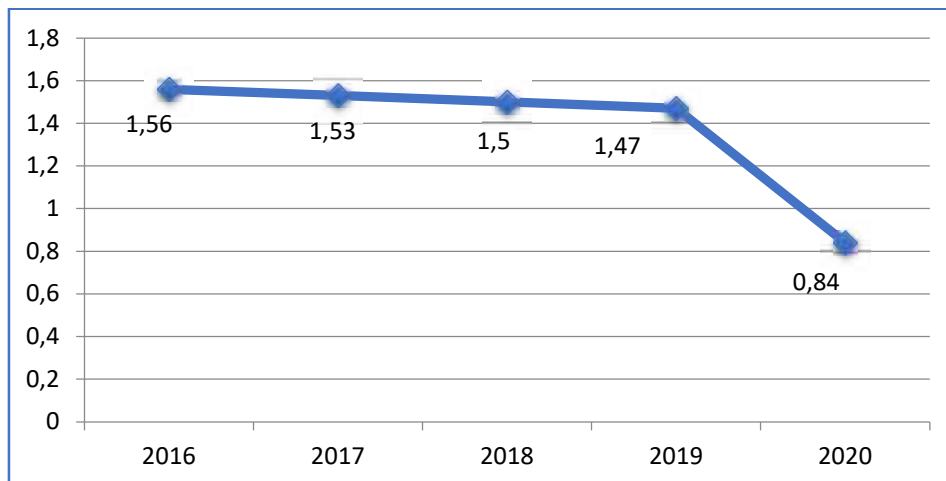
2.1.9 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Padang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Di tahun 2020, dilakukan sensus penduduk sehingga jumlah penduduk Kota Padang mencapai 909.040 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,84 %. Perkembangan jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya ditunjukkan pada gambar berikut



Sumber: Padang Dalam Angka, Tahun 2021

Gambar 2-8 Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020 (jiwa)



Sumber: Padang Dalam Angka, Tahun 2021

Gambar 2-9 Laju pertumbuhan Penduduk (%) Tahun 2016-2020

Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Jumlah penduduk Kota Padang berdasarkan kecamatan dan kepadatan penduduk secara rinci disajikan pada tabel berikut

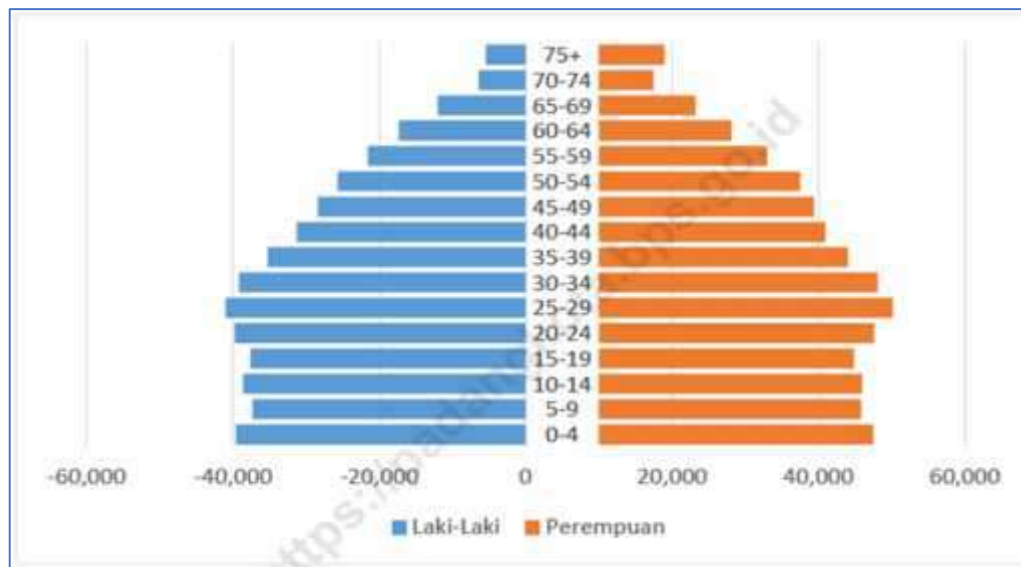
Tabel 2-11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Padang

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase	Kepadatan Penduduk (jiwa /Km ²)
1	Bungus Teluk Kabung	100,78	27.408	3,02	272
2	Lubuk Kilangan	85,99	57.489	6,32	669
3	Lubuk Begalung	30,91	122.593	11,49	3.966
4	Padang Selatan	10,03	60.996	6,71	6.081
5	Padang Timur	8,15	77.755	8,55	9.540
6	Padang Barat	7,00	42.957	4,73	6.137
7	Padang Utara	8,08	55.171	6,07	6.828
8	Nanggalo	8,07	58.535	6,44	7.253

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase	Kepadatan Penduduk (jiwa /Km ²)
9	Kuranji	57,41	146.111	16,07	2.545
10	Pauh	146,29	62.228	6,85	425
11	Koto Tengah	232,25	197.797	21,76	852
	Total	694,96	909.040	100	1.308

Sumber: Padang Dalam Angka, Tahun 2021

Berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 452.711 jiwa atau 49,80 persen dan penduduk laki-laki 456.329 jiwa atau 50,20 persen. Dari piramida penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa kelompok usia 25-29 tahun populasinya tertinggi dari kelompok usia lainnya. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Padang Dalam Angka, Tahun 2021

Gambar 2-10 Piramida Penduduk Kota Padang Tahun 2020

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan merupakan cermin dari keberhasilan pencapaian indikator pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, pembangunan yang merata di berbagai bidang terutama bidang pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik (infrastruktur).

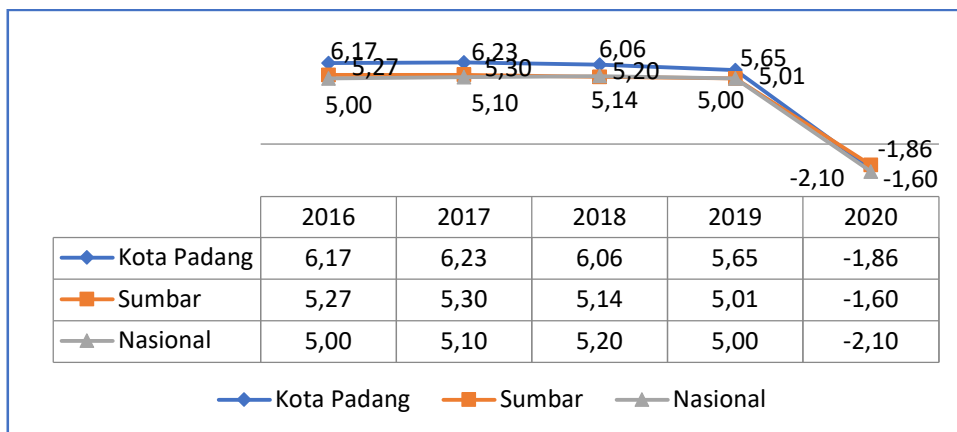
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi tergambar melalui:

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha disajikan pada gambar berikut ini



Sumber: Padang Dalam Angka, Tahun 2021

Gambar 2-11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2016 trend pertumbuhan ekonomi Kota Padang cenderung lebih tinggi dibanding angka propinsi maupun nasional. Namun trend tersebut juga menunjukkan penurunan terutama sejak tahun 2017 sampai 2019. Penurunan yang sama juga terlihat pada

angka pertumbuhan ekonomi propinsi. Trend pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Padang tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang kurun waktu 2016-2020 didukung oleh empat kategori utama, yaitu Transportasi dan Pergudangan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Empat kategori ini memiliki peranan penting dan sangat berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Adanya gejolak pada kategori ini akan mempengaruhi perekonomian Kota Padang.

Tabel 2-12 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Padang Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

Kode	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,16	5,91	5,9	3,41	1,51
B	Pertambangan dan Penggalian	3,53	5,1	7,93	5,51	-1,19
C	Industri Pengolahan	3,05	3,47	-0,8	-3,25	-1,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,72	4,25	4,28	2,56	-7,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,14	2,08	9,11	1,85	2,02
F	Konstruksi	8,48	7,09	7,36	6,83	-493
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,53	6,08	6,18	6,18	-2,09
H	Transportasi dan Pergudangan	7,21	8,43	9,88	8,39	-11,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,73	10,3	7,6	7,87	-21,15
J	Informasi dan Komunikasi	8	9,54	10,57	11,01	11,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,37	0,34	0,55	1,6	1,99
L	Real Estate	4,76	3,16	3,83	6,2	0,2
M,N	Jasa Perusahaan	7,29	5,32	4,37	6,42	-4,12
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,98	4,67	6,12	7,69	-1,9
P	Jasa Pendidikan	9,59	9,05	6,83	7,54	7,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,44	8,28	8,29	7,81	11,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11,07	10,17	9,51	9,84	-9,83
Produk Domestik Regional Bruto		6,17	6,23	6,06	5,65	-1,86

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang Menurut Lapangan Usaha , 2016-2020. BPS Kota Padang, 2021.

Badan Pusat Statistik mencatat laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 di Kota Padang mengalami kontraksi pertumbuhan yang negatif. Jika persentase pertumbuhan ekonomi yang diperoleh positif dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, maka perekonomian tumbuh dan berkembang. Persentase pertumbuhan ekonomi menurun bahkan negatif, artinya perekonomian di suatu daerah mengalami kemunduran atau penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang negatif mengindikasikan bahwa pendapatan daerah

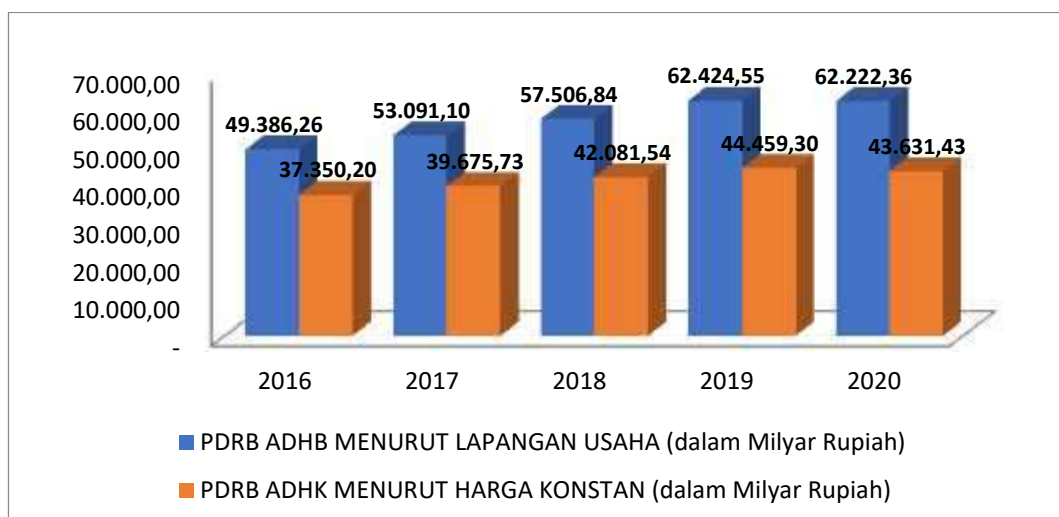
riil yang diperoleh daerah pada periode tertentu lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan periode yang lalu.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2020 tercatat sebesar -1,86 atau berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sebesar -1,60 dan di atas pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar -2,10. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak terkonfirmasi kasus pertama kali pada bulan Februari 2020 yang lalu.

II. Struktur Ekonomi

Untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar tersebut umumnya ditetapkan selama periode 10 (sepuluh) tahunan. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi/deflasi akibat fluktuasi harga barang.

PDRB harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Perkembangan nilai PDRB Kota Padang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2021

Gambar 2-12 Perkembangan nilai PDRB Kota Padang tahun 2016-2020

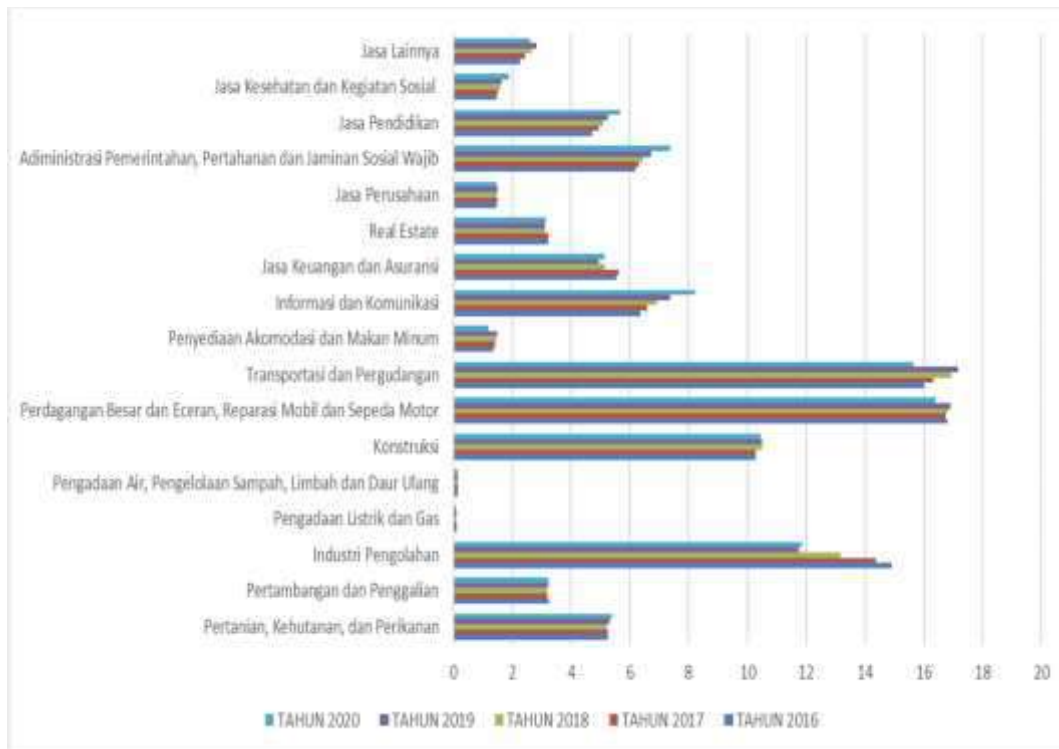
PDRB Kota Padang didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor yang paling sedikit berkontribusi terhadap perekonomian Kota Padang adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Kontribusi lapangan usaha lainnya sebagai penyangga struktur ekonomi Kota Padang selama periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-13 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Kode	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,27	5,27	5,22	5,30	5,41
B	Pertambangan dan Penggalian	3,26	3,20	3,20	3,22	3,22
C	Industri Pengolahan	14,9	14,37	13,15	11,75	11,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,10	0,11	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15
F	Konstruksi	10,29	10,27	10,52	10,51	10,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,79	16,76	16,84	16,93	16,41
H	Transportasi dan Pergudangan	16,01	16,31	16,95	17,16	15,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,36	1,42	1,44	1,50	1,20
J	Informasi dan Komunikasi	6,35	6,57	6,93	7,38	8,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,53	5,63	5,15	4,96	5,14
L	Real Estate	3,23	3,23	3,11	3,11	3,15
M,N	Jasa Perusahaan	1,48	1,50	1,47	1,51	1,46
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,20	6,29	6,44	6,72	7,37
P	Jasa Pendidikan	4,72	4,94	5,08	5,25	5,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,46	1,50	1,58	1,63	1,89
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,26	2,43	2,67	2,82	2,61
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2021

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Padang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan dan Industri Pengolahan. Sementara itu sektor yang memberikan kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB Kota Padang adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kontribusi PDRB Kota Padang dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat dari gambar berikut:



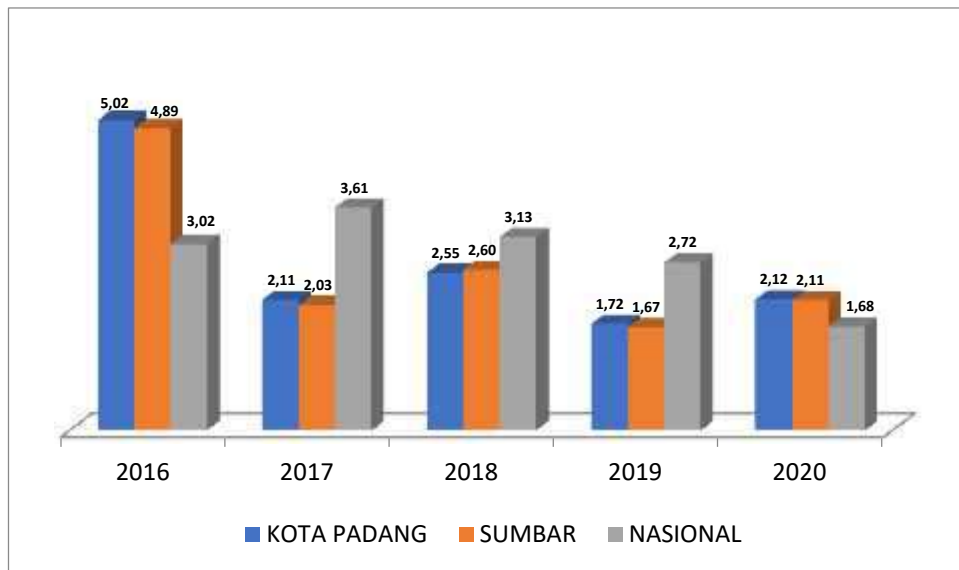
Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2021

Gambar 2-13 Kontribusi PDRB Kota Padang Tahun 2016-2020

III. Laju Inflasi

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply (cost push inflation)*, dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara *partner* dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh *output* riil yang melebihi *output* potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Dari tingkat keparahannya, Kota Padang berada pada tingkat inflasi ringan dimana harga barang masih di bawah angka 10 % dalam setahun. Inflasi Kota Padang selama periode 2016-2020 ditunjukkan oleh gambar berikut ini:



Sumber : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

Gambar 2-14 Inflasi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

Inflasi Kota Padang pada tahun 2016-2020 sangat fluktuatif khususnya pada tahun 2017 dimana inflasi tahunan menurun drastis dari 5,02 di tahun 2016 menjadi 2,11 di tahun 2017, naik menjadi 2,55 di tahun 2018 dan mengalami penurunan kembali menjadi 1,72 di tahun 2019. Sementara itu inflasi di tahun 2020 naik menjadi 2,12. Pergerakan inflasi Kota Padang di tahun 2020 berada sedikit di atas Provinsi Sumbar dan inflasi Nasional.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial tergambar melalui:

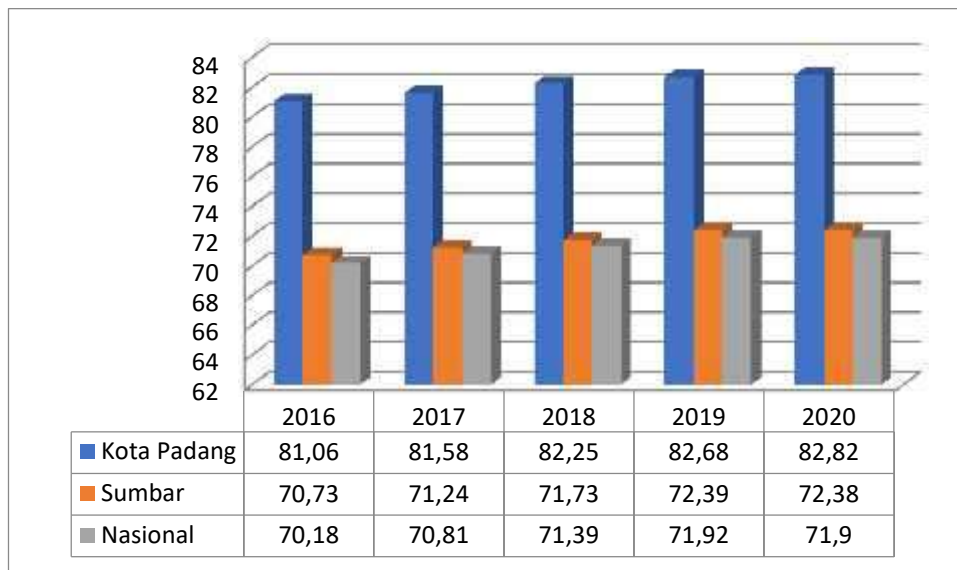
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator keberhasilan suatu daerah dalam proses pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahun Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (Angka Harapan Hidup), pengetahuan (Rata – Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah) dan standar hidup layak (Pengeluaran Per Kapita).

Berdasarkan konsep Pembangunan Manusia, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

- Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
- Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
- Rendah : IPM kurang dari 50,0

Perkembangan nilai IPM Kota Padang, dibandingkan dengan kondisi Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2021, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021, Statistik Indonesia 2021

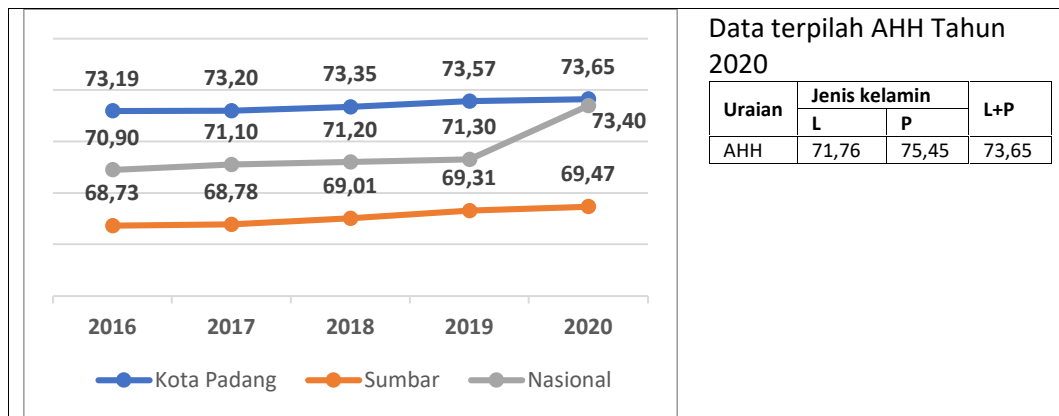
Gambar 2-15 Nilai IPM Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia

Pencapaian IPM Kota Padang dalam 5 tahun terakhir masuk ke dalam kategori Tinggi dengan angka capaian > 80. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Dari pencapaian di tahun 2020, Kota Padang menduduki peringkat ke-1 (satu) tingkat Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Barat dan peringkat ke 8 (delapan) tingkat Kota se Indonesia

A. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup Kota Padang menunjukkan perbaikan setiap tahunnya. Dilihat dari indikator angka harapan hidup, tampak bahwa usia penduduk Kota Padang semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah berhasil dicapai. Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan kesehatan adalah dalam bentuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas seperti pelayanan preventif (pengendalian kesehatan lingkungan, pengawasan obat tradisional, pencegahan penyakit menular dan tidak menular) dan pelayanan promotif (PHBS = Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit baik untuk tindakan kuratif maupun rehabilitatif.

Data tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk Kota Padang yang memiliki angka harapan hidup lebih tinggi adalah penduduk perempuan dengan angka harapan hidup sebesar 75,45 dibandingkan dengan penduduk laki-laki dengan angka harapan hidup sebesar 71,76.



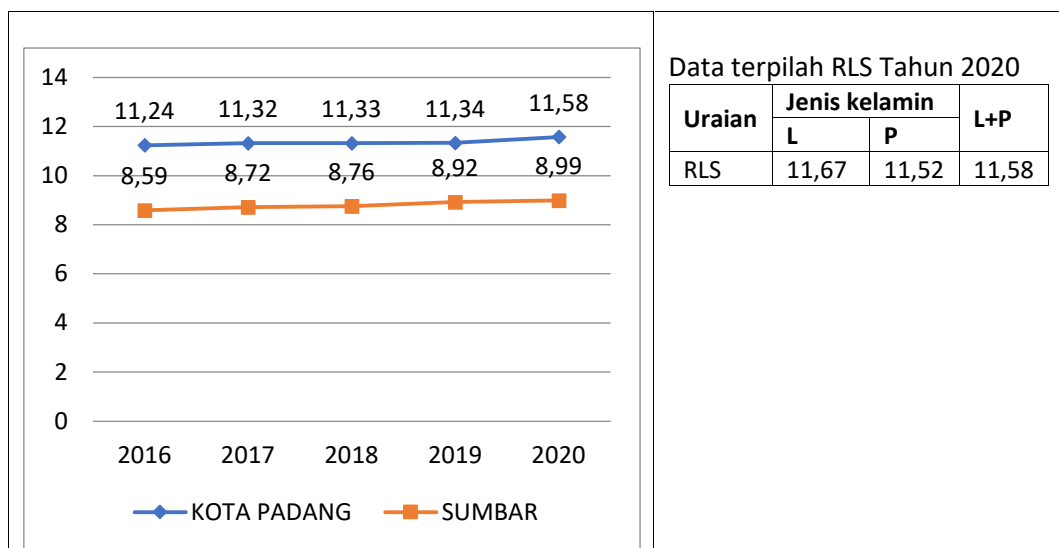
Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2021

Gambar 2-16 Angka Harapan Hidup Kota Padang 2016-2020

B. Rata – Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan, dan menjadi indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Rata-rata lama sekolah di Kota Padang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 11,24 pada tahun 2016 menjadi 11,58 pada tahun 2020. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



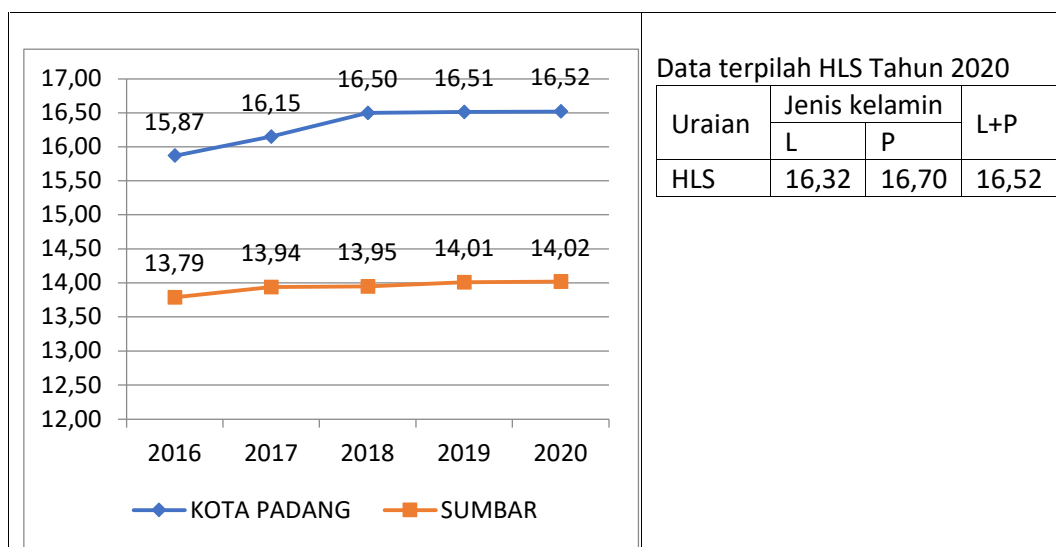
Sumber : Kota Padang Dalam Angka, 2021

Gambar 2-17 Rata-rata Lama Sekolah Kota Padang Tahun 2016-2020

Data tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kota Padang yang lebih tinggi adalah penduduk laki-laki dengan rata-rata lama sekolah sebesar 11,67 dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan rata-rata lama sekolah sebesar 11,52.

Indikator lain yang terkait pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) yang semakin tinggi menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh. Harapan Lama Sekolah (HLS) ini dihitung pada anak usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Padang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebesar 15,87 menjadi 16,52 pada tahun 2020, hal ini berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 16 - 17 tahun. Dengan kata lain, dalam kondisi normal, seseorang berumur 7 tahun ke atas diharapkan dapat bersekolah sampai dengan memasuki perguruan tinggi. Harapan Lama Sekolah ini mengindikasikan meningkatnya kemampuan masyarakat dan fasilitas pendidikan di Kota Padang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing individu. Kondisi Angka Harapan Lama Sekolah dalam kurun 5 tahun terakhir disajikan dalam gambar berikut:



Sumber : Kota Padang Dalam Angka, 2021

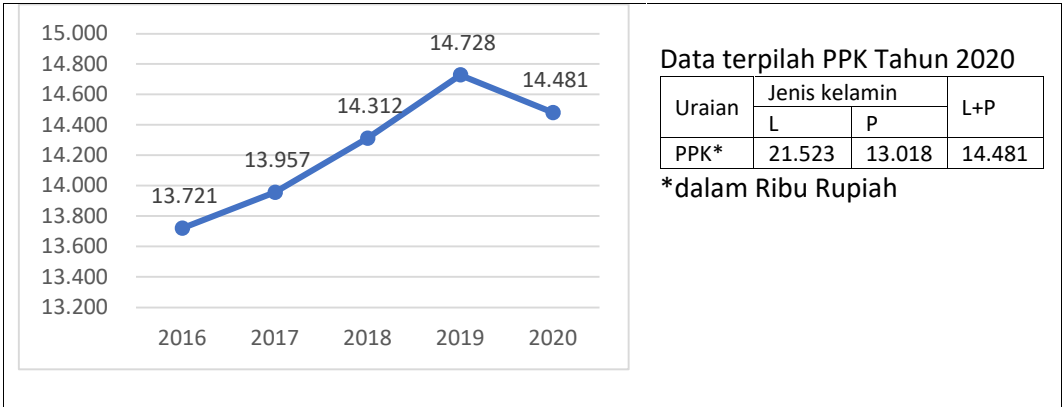
Gambar 2-18 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Padang tahun 2016-2020

Data tahun 2020 menunjukkan bahwa harapan lama sekolah penduduk laki-laki lebih tinggi dari penduduk perempuan dengan perbandingan angka sebesar 16,32 untuk harapan lama sekolah laki-laki dan 16,70 untuk harapan lama sekolah perempuan.

C. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Perkembangan pengeluaran Rata-Rata Per Kapita penduduk Kota Padang dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan. Akibat pandemi Covid-19 yang melanda secara global juga mengakibatkan pada menurunnya pengeluaran Rata-Rata Per Kapita penduduk Kota Padang di tahun 2020. Pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Kota Padang Tahun 2016-2020 secara lengkap disajikan pada tabel berikut:



Sumber : Statistik Kunci BPS Kota Padang

Gambar 2-19 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Setahun yang Disesuaikan (Ribu Rupiah) Tahun 2016-2020

Data tahun 2020 menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita penduduk laki-laki lebih tinggi dari penduduk perempuan dengan perbandingan angka sebesar 21.523 untuk pengeluaran per kapita laki-laki dan 13.018 untuk pengeluaran per kapita perempuan.

II. *Tingkat Kemiskinan*

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Salah satu alat ukur untuk menentukan jumlah penduduk miskin adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dari data yang diterbitkan oleh BPS Kota Padang, dapat dilihat bahwa garis kemiskinan Kota Padang terjadi kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 menjadi Rp 570.857. Sementara itu, jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 42.170 jiwa atau 4,40 % dari jumlah penduduk di tahun 2020

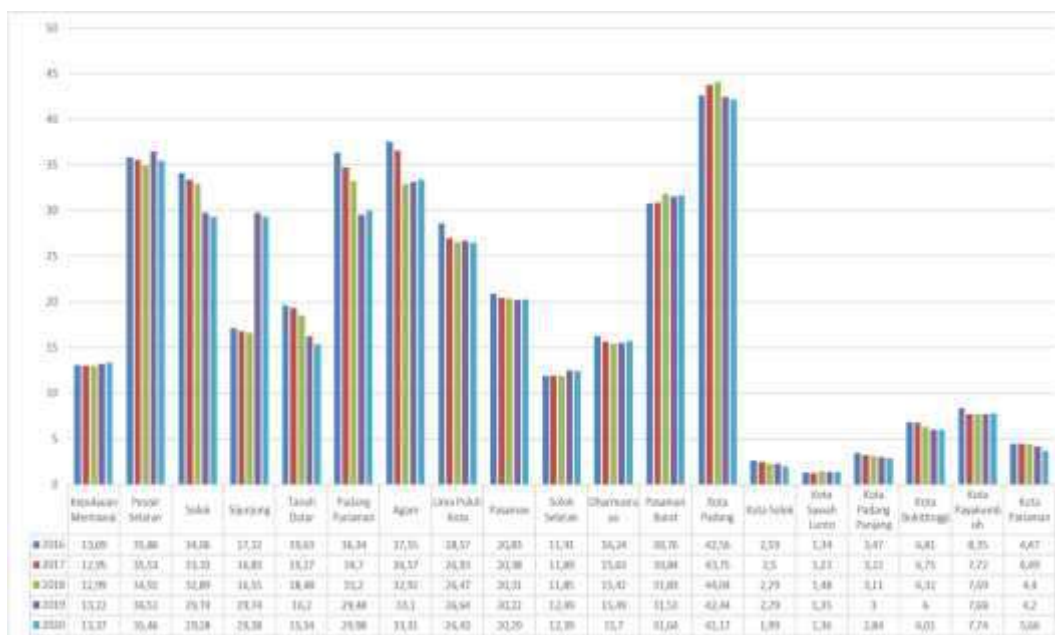
Tabel 2-14 Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin di Kota Padang 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk miskin	
		Jumlah (ribu orang)	% dari jumlah penduduk
2016	449.658	42,56	4,68
2017	482.763	43,75	4,74

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk miskin	
		Jumlah (ribu orang)	% dari jumlah penduduk
2018	507.042	44,04	4,66
2019	537.857	42,44	4,48
2020	570.654	42,17	4,40

Sumber : Kota Padang Dalam Angka 2021

Meskipun Kota Padang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Barat, namun jumlah penduduk miskinnya juga terbanyak di Sumatera Barat. Gambar berikut memperlihatkan posisi Kota Padang diantara Kota dan Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat

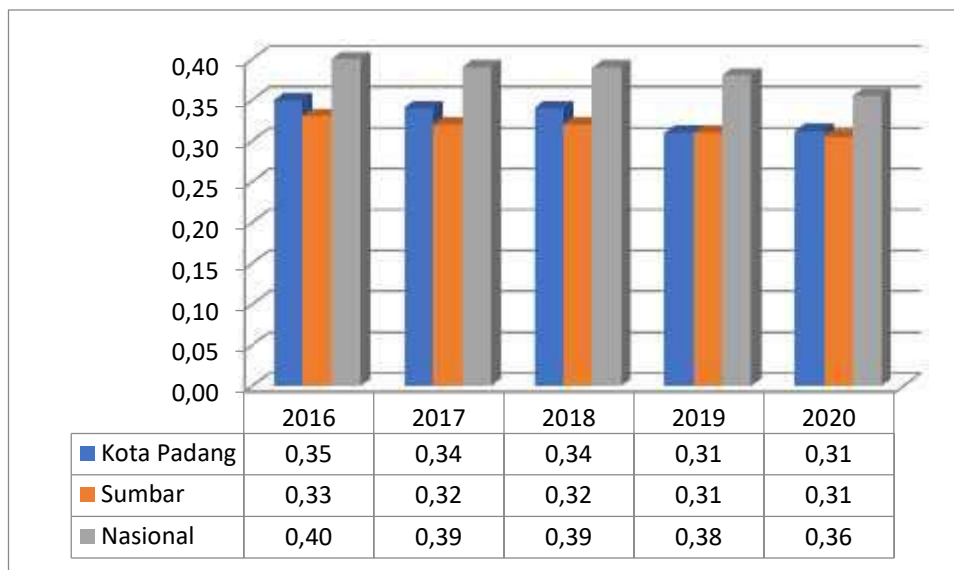


Sumber : Kota Padang Dalam Angka 2021

Gambar 2-20 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Ribu orang)

III. Pemerataan Pembangunan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan pembangunan adalah indeks gini atau Rasio Gini. Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Indikator ini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah, dimana nilainya adalah 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai Rasio Gini suatu daerah mendekati nilai 1 maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin tidak merata, sedangkan jika nilainya mendekati nol, maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30. Berikut perbandingan indeks gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.



Sumber : Padang Dalam Angka 2021

Gambar 2-21 Index Gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

Nilai Gini Ratio Kota Padang selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,35 – 0,31 yang tergolong dalam kategori sedang. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

Kota Padang merupakan salah satu kota yang menjunjung seni dan budaya, yang ditunjukkan oleh pengembangan pariwisata di Kota Padang berbasis kebudayaan yang bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kebudayaan Ranah Minang dan adat Minangkabau. Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Padang perlu terus ditingkatkan agar bisa berkontribusi lebih banyak terhadap sektor pariwisata. Di Kota Padang penyelenggaraan festival seni dan budaya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid 19 di tahun 2020, penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya terselenggara sebanyak 2 kali. Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan seni budaya dan cagar budaya di Kota Padang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2-15 Kegiatan Seni Budaya dan Cagar Budaya 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	5	7	8	2
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	32 %	33 %	74
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	12	12	12	12	40

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang 2021

II. Pemuda dan Olahraga

Kesadaran akan pentingnya aspek pemuda dan olahraga memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang memperlihatkan pembangunan kelompok pemuda. Pembangunan kepemudaan dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari persentase organisasi pemuda yang aktif, atlet berprestasi dan lain-lain, dimana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Kondisi Kepemudaan dan Olahraga Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-16 Kondisi Kepemudaan dan Olahraga Kota Padang 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	85,37%	90,24%	90,24%	91,30%	79,69 %
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	0,14 %	0,14 %	0,14 %	0,14 %	17,65 %
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	37,50 %	62,50 %	62,50 %	65 %	67,50 %
4	Cakupan Pembinaan atlit muda	9,72	9,33	9,72	9,72	9,72
	Pelajar	3,89%	1,94%	0,07%	2,91%	2,91 %
	Lainnya	5,83%	7,39%	8,75%	6,80%	6,50 %
5	Jumlah atlet berprestasi	17	21	24	27	30
6	Jumlah Prestasi Olahraga	4	6	7	8	8
7	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	72,25%	75,75%	75,75%	76,14%	79,7 %

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang

2.2.4 Daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Padang terhadap Aspek Kesejahteraan Masyarakat

I. Analisis TPB dengan DDDTLH Jasa Ekosistem

Analisis TPB dengan pertimbangan DDDTLH Jasa Ekosistem terdiri dari 4 langkah sebagai berikut:

1. Mengkaji keterkaitan TPB dengan DDDTLH
2. Analisis data tabular DDDTLH
3. Analisis pengaruh keterkaitan
4. Penyusunan skenario dengan pertimbangan DDDTLH.

A. Mengkaji Keterkaitan TPB dengan DDDTLH

Setelah dilakukan pengkajian terhadap keterkaitan terhadap 230 indikator TPB Kota Padang dengan 20 jasa ekosistem pada DDDTLH, terdapat 43

indikator TPB yang terkait dengan 9 jasa ekosistem DDDTLH. Jasa ekosistem tersebut adalah:

1. Penyediaan pangan (P1);
2. Penyediaan air (P2);
3. Pengaturan Iklim (R1);
4. Tata Kelola Air dan Banjir (R2);
5. Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam (R3);
6. Pemurnian air (R4);
7. Pengolahan dan penguraian limbah (R5);
8. Pemeliharaan kualitas udara (R6); dan
9. Biodiversitas (perlindungan plasma nutfah) (S4).

Indikator TPB yang mempunyai jumlah keterkaitan terbanyak terhadap DDDTLH jasa ekosistem adalah TPB No.6 Air Bersih dan Sanitasi Layak seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2-17 Indikator TPB yang Memiliki Keterkaitan dengan DDDTLH

No	No TPB	Uraian TPB	Indikator TPB yang memiliki Keterkaitan dengan DDDTLH	
			Jumlah	Rincian
1	1	Tanpa Kemiskinan	4	1.5.1*, 1.5.1.(a), 1.5.1.(e), 1.5.2.(a)
				2.1.1*, 2.1.1.(a), 2.1.2*, 2.1.2.(a),
2	2	Tanpa Kelaparan	5	2.3.1*
				6.1.1.(a), 6.1.1.(b), 6.1.1.(c),
				6.2.1.(b), 6.2.1.(c), 6.2.1.(d),
3	6	Air bersih dan sanitasi layak	16	6.2.1.(e), 6.2.1.(f), 6.3.1.(a),
				6.3.1.(b), 6.3.2.(a), 6.3.2.(b),
				6.4.1.(b), 6.5.1.(a), 6.5.1.(f),
				6.5.1.(g)
				11.2.1.(a), 11.5.1*, 11.5.1.(a),
4	11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	9	11.5.1.(b), 11.5.1.(c), 11.5.2.(a),
				11.6.1.(a), 11.6.1.(b), 11.7.1.(a)
5	12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	4	12.4.2.(a), 12.5.1.(a), 12.6.1.(a),
				12.7.1.(a)
6	13	Penanganan perubahan iklim	2	13.1.1*, 13.1.2*

No	No TPB	Uraian TPB	Indikator TPB yang memiliki Keterkaitan dengan DDDTLH	
			Jumlah	Rincian
7	14	Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim	1	14.5.1*
8	15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	2	15.1.1.(a), 15.3.1.(a)
		Jumlah	43	

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

II. Analisis Data Tabular DDDTLH

Analisis dilakukan dengan memperhatikan persentase jasa ekosistem dengan kategori sangat tinggi dan tinggi. Berdasarkan persentase tersebut dilakukan pemberian bobot sesuai dengan area yang akan terdampak dengan ketentuan sebagai berikut:

-) 5 (Sangat Besar), Jika area yg akan terdampak > 80%
-) 4 (Besar), Jika area yg akan terdampak 60 - 80%
-) 3 (cukup), Jika area yg akan terdampak 40 - 60%
-) 2 (kecil), Jika area yg akan terdampak 20 - 40%
-) 1 (Sangat kecil), Jika area yg akan terdampak <20%

Hasil analisis data tabular DDDTLH Kota Padang dapat dilihat pada Tabel 5.16. Jasa penyediaan pangan dan air bersih mempunyai bobot jasa ekosistem 1. Sedangkan untuk jasa pengaturan dan jasa pendukung biodiversitas rata-rata mempunyai bobot jasa ekosistem 4.

Tabel 2-18 Analisis Data Tabular DDDTLH

No	Nama Jasa Ekosistem	Sangat Tinggi & Tinggi	Bobot Jasa Ekosistem
	JASA PENYEDIAAN		
1	Pangan (P1)	9,31%	1
2	Air Bersih (P2)	0,97%	1
3	Serat (P3)	58,28%	3
4	Bahan Bakar (P4)	57,29%	3
5	SD Genetik (P5)	53,69%	3
	JASA PENGATURAN		
6	Iklim (R1)	55.41%	3
7	Tata Aliran Air dan Banjir (R2)	51.61%	3
8	Perlindungan Bencana (R3)	51.75%	3
9	Pemurnian Air (R4)	51.32%	3
10	Penguraian Limbah (R5)	4,10%	1
11	Kualitas Udara (R6)	52,58%	3
12	Penyerbukan Alami (R7)	52,71%	3
	JASA BUDAYA		

No	Nama Jasa Ekosistem	Sangat Tinggi & Tinggi	Bobot Jasa Ekosistem
13	Pengendalian Hama (R8)	60,13%	4
14	Tempat Tinggal (C1)	13,96%	1
15	Rekreasi (C2)	49,75%	3
16	Estetika (Alam) (C3)	49,76%	3
	JASA PENDUKUNG		
17	Pembentukan Tanah (S1)	52,16%	3
18	Siklus Hara (S2)	51,16%	3
19	Produksi Primer (S3)	52,27%	4
20	Biodiversitas (S4)	51,53%	4

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

III. Analisis Skenario TPB dengan Pertimbangan DDDTLH

Analisis skenario TPB dengan pertimbangan DDDTLH Jasa Ekosistem telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Dari 43 indikator TPB yang memiliki keterkaitan dengan DDDTLH Jasa Ekosistem 15 indikator diantaranya telah mencapai target sedangkan 28 indikator sisanya tidak mencapai target perpres baik dengan kategori sudah terlaksana tetapi belum mencapai target (SB), target tidak tertera di perpres (TT) maupun tidak ada data (NA)

Berdasarkan evaluasi data tabular DDDTLH Jasa Ekosistem, terdapat 19 indikator yang tidak mencukupi dalam mendukung pencapaian TPB. TPB tersebut adalah 5 indikator pada TPB 2, 9 indikator pada TPB 6, 1 indikator pada TPB 11, dan 4 indikator pada TPB 12 terutama berkaitan dengan jasa penyediaan pangan dan jasa penyediaan air bersih. Skenario pencapaian TPB berdasarkan DDDTLH Jasa Ekosistem secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu tanpa upaya tambahan dan dengan upaya tambahan dengan ketentuan seperti terlihat pada gambar berikut:

SKENARIO PENCAPAIAN TPB

No	DDOT		Target TPB		Pembagian Peran	SKENARIO
	Mencukupi	Tidak mencukupi	Tercapai	Tidak Tercapai		
1	✓		✓		• Pemerintah :	Tanpa Upaya Tambahan
2	✓		✓		• Pemerintah daerah :	Tanpa Upaya Tambahan
3	✓		✓		• Swasta :	Tanpa Upaya Tambahan
4	✓		✓		• Dit...	Tanpa Upaya Tambahan
5		✓	✓		• Pemerintah :	Tanpa Upaya Tambahan
6		✓	✓		• Pemerintah daerah :	Tanpa Upaya Tambahan
7		✓	✓		• Swasta :	Tanpa Upaya Tambahan
8		✓	✓		• Dit...	Tanpa Upaya Tambahan
9	✓			✓	• Pemerintah :	Dengan Upaya Tambahan
10	✓			✓	• Pemerintah daerah :	Dengan Upaya Tambahan
11	✓			✓	• Swasta :	Dengan Upaya Tambahan
12	✓			✓	• Dit...	Dengan Upaya Tambahan
13		✓	✓		• Pemerintah :	Dengan Upaya Tambahan
14		✓	✓		• Pemerintah daerah :	Dengan Upaya Tambahan
15		✓	✓		• Swasta :	Dengan Upaya Tambahan
16		✓	✓		• Dit...	Dengan Upaya Tambahan
17		✓		✓	• Pemerintah :	Dengan Upaya Tambahan
18		✓		✓	• Pemerintah daerah :	Dengan Upaya Tambahan
19		✓		✓	• Swasta :	Dengan Upaya Tambahan
20		✓		✓	• Dit...	Dengan Upaya Tambahan

SKENARIO 1

SKENARIO 2

SKENARIO 3

SKENARIO 4

SKENARIO 5

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

Gambar 2-22 Skenario Pencapaian TPB

Berdasarkan analisis keterkaitan pencapaian TPB dengan pertimbangan DDDTLH Jasa Ekosistem, disimpulkan bahwa terdapat 28 indikator membutuhkan upaya tambahan dan 15 indikator tidak membutuhkan upaya tambahan.

Tabel 2-19 Evaluasi Keterkaitan TPB dengan DDDTLH

No	No TP B	Uraian TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi TPB		Evaluasi DDDTLH		Evaluasi Skenario	
				Tercapai	Tidak Tercapai	Mencukupi	Tidak Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan	Tanpa Upaya Tambahan
1	1	Tanpa Kemiskinan	4	0	4	4	0	4	0
2	2	Tanpa Kelaparan	5	3	2	0	5	2	3
3	6	Air bersih dan sanitasi layak	16	4	12	7	9	12	4
4	11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	9	4	5	8	1	5	4
5	12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	4	2	2	0	4	2	2
6	13	Penanganan perubahan iklim	2	0	2	2	0	2	0
7	14	Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim	1	1	0	1	0	0	1
8	15	Pelestarian dan pemanfaatan Berkelanjutan ekosistem darat	2	1	1	2	0	1	1
		Jumlah	43	15	28	24	19	28	15

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

Tabel 2-20 Rincian Analisis Skenario TPB dengan Pertimbangan DDDTLH

NO · TP B	NO. INDIKATO R	INDIKATOR TPB	Evalua si TPB	DDDTLH	Bobot DDDTL H	Evaluasi DDDTLH	Evaluasi Pengu r h DDDTLH
1	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Tidak Tercapai	Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	3	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
1	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Tidak Tercapai	Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	3	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
1	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Tidak Tercapai	Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	3	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
1	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Tidak Tercapai	Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	3	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
2	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Tercapai	Penyediaan pangan	1	Tidak Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan
2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Tercapai	Penyediaan pangan	1	Tidak Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan
2	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Tidak Tercapai	Penyediaan pangan	1	Tidak Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
2	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Tidak Tercapai	Penyediaan pangan	1	Tidak Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
2	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Tidak Tercapai	Penyediaan pangan	1	Tidak Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Tercapai	Penyediaan air	1	Tidak Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan
6	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Tidak Tercapai	Pemurnian air	3	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan

NO · TP B	NO. INDIKATO R	INDIKATOR TPB	Evalua si TPB	DDDTLH	Bobot DDDTL H	Evaluasi DDDTLH	Evaluasi Pengeru h DDDTLH
6	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Tercap ai	Penyediaan air	1	Tidak Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan
6	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Tercap ai	Pengolahan dan penguraian limbah	1	Tidak Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan
6	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Tercap ai	Pengolahan dan penguraian limbah	1	Tidak Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan
6	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Tidak Tercap ai	Pengolahan dan penguraian limbah	1	Tidak Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
6	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Tidak Tercap ai	Pengolahan dan penguraian limbah	1	Tidak Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
6	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Tercap ai	Pengolahan dan penguraian limbah	1	Tidak Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan
6	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Tidak Tercap ai	Pengolahan dan penguraian limbah	1	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
6	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Tidak Tercap ai	Pengolahan dan penguraian limbah	1	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
6	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Tidak Tercap ai	Pemurnian air	3	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
6	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Tercap ai	Pemurnian air	3	Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan

NO · TP B	NO. INDIKATO R	INDIKATOR TPB	Evalua si TPB	DDDTLH	Bobot DDDTL H	Evaluasi DDDTLH	Evaluasi Pengar uh DDDTLH
6	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Tidak Tercapai	Tata Kelola Air dan Banjir	3	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
6	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Tidak Tercapai	Tata Kelola Air dan Banjir	3	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
6	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Tidak Tercapai	Penyediaan air	1	Tidak Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
6	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Tidak Tercapai	Penyediaan air	1	Tidak Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
11	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Tercapai	Pemeliharaan Kualitas Udara	3	Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan
11	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Tidak Tercapai	Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	3	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
11	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Tidak Tercapai	Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	3	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
11	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Tidak Tercapai	Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	3	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
11	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tercapai	Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	3	Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan
11	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Tidak Tercapai	Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	3	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
11	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Tercapai	Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	3	Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan

NO · TP B	NO. INDIKATO R	INDIKATOR TPB	Evalua si TPB	DDDTLH	Bobot DDDTL H	Evaluasi DDDTLH	Evaluasi Pengeru h DDDTLH
11	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Tercapai	Pengolahan dan penguraian limbah	1	Tidak Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan
11	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Tercapai	Pemeliharaan Kualitas Udara	3	Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan
12	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Tercapai	Pengolahan dan penguraian limbah	1	Tidak Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan
12	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Tercapai	Pengolahan dan penguraian limbah	1	Tidak Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan
12	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Tidak Tercapai	Pengolahan dan penguraian limbah	1	Tidak Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
12	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Tidak Tercapai	Pengolahan dan penguraian limbah	1	Tidak Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
13	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Tercapai	Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	3	Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan
13	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Tidak Tercapai	Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	3	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
14	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Tercapai	Jasa Pendukung Biodiversiti	4	Mencukupi	Tanpa Upaya Tambahan
15	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Tidak Tercapai	Pengaturan Iklim	3	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan
15	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Tercapai	Pemurnian Air	3	MMencukupi	Tanpa Upaya Tambahan

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

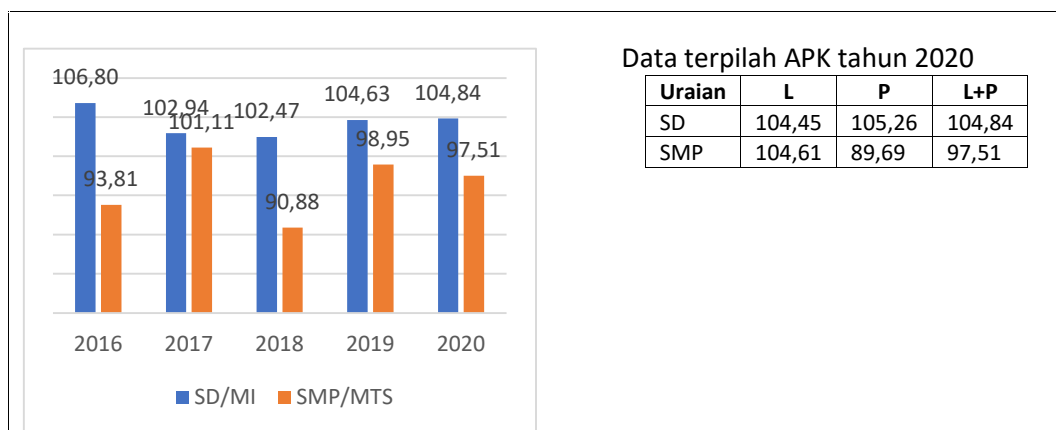
1. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk menyiapkan sumber daya manusia dari aspek kecerdasan, akhlak, serta keterampilan. Kemajuan pendidikan bisa dilihat dari berapa banyak anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukkan jumlah penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan formal tanpa melihat batasan umur usia sekolahnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Data APK SD/MI dan SMP/MTS dalam 5 tahun menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Untuk APK SD/MI, dari rata-rata terdapat 4 persen penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun bersekolah di SD. Sementara itu, untuk APK SMP/MTS, dari rata-rata terdapat 3 persen penduduk yang tidak berusia 13- 15 tahun yang bersekolah di SMP. Data perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTS ditunjukkan dari gambar berikut:



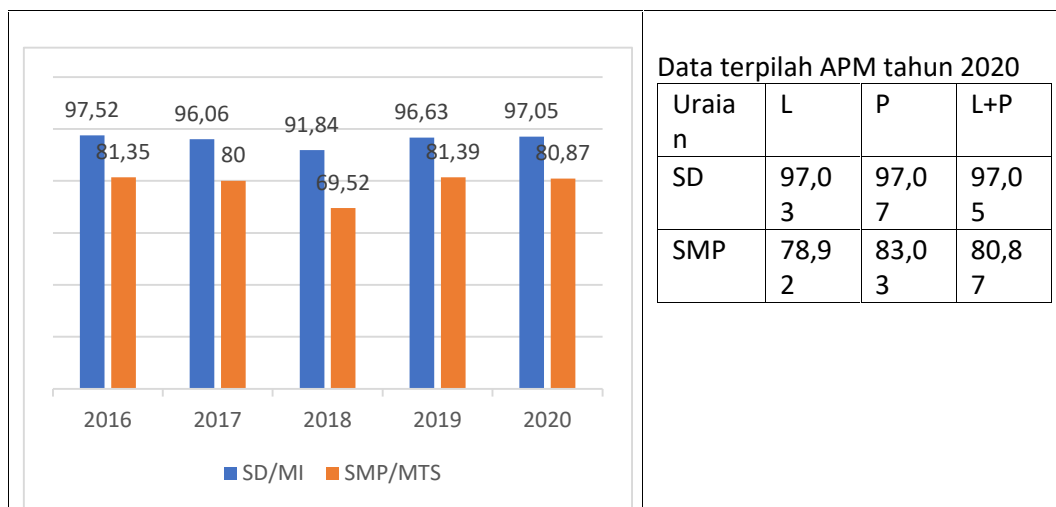
Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2-23 Angka Partisipasi Kasar Kota Padang Tahun 2016-2020

Data tahun 2020 menunjukkan bahwa APK SD penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan APK SD penduduk laki-laki. Sementara itu, APK SMP penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan APK SMP penduduk perempuan.

Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun. Data perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTS ditunjukkan dari gambar berikut:



Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2-24 Angka Partisipasi Murni Kota Padang Tahun 2016-2020

Data tahun 2020 menunjukkan bahwa APM SD penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan APM SD penduduk laki-laki. Sementara itu, APM SMP penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.

Pelaksanaan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, tentu saja harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana belajar dan mengajar yang bermutu dan berkualitas. Berikut sarana penunjang utama pendidikan yakni guru

dan sekolah beserta rasionya terhadap total murid di Kota Padang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-21 Sarana Pendidikan Kota Padang Tahun 2016-2020

	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap sekolah
Sekolah Dasar Negeri					
2016/2017	341	76161	3882	19,62	223,35
2017/2018	341	75511	4255	17,75	221,44
2018/2019	339	74594	4202	17,75	220,04
2019/2020	340	75226	4151	18,12	221,25
2020/2021	340	73789	4372	16,88	217,03
Sekolah Dasar Swasta					
2016/2017	67	15167	1000	15,17	226,37
2017/2018	68	16005	1125	14,23	235,37
2018/2019	68	17044	1100	15,49	250,65
2019/2020	70	17599	1093	16,10	251,41
2020/2021	69	17702	1153	15,35	256,55
Madrasah Ibtidaiyah Negeri					
2016/2017	7	3345	172	19,45	477,86
2017/2018	7	3511	216	16,25	501,57
2018/2019	7	3666	162	22,63	523,71
2019/2020	7	3666	162	22,63	523,71
2020/2021	7	3593	195	18,43	513,29
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta					
2016/2017	4	570	50	11,40	142,50
2017/2018	6	628	58	10,83	104,67
2018/2019	6	636	62	10,26	106,00
2019/2020	6	636	55	11,56	106,00
2020/2021	6	587	58	10,12	97,83
SMP Negeri					
2016/2017	43	27185	1803	15,08	632,21
2017/2018	43	27044	1854	14,59	628,93
2018/2019	43	27227	1797	15,15	633,19
2019/2020	43	27309	1726	15,82	635,09
2020/2021	43	28025	1827	15,34	651,74
SMP Swasta					
2016/2017	53	11036	857	12,88	208,23
2017/2018	54	10792	907	11,90	199,85
2018/2019	54	10658	849	12,55	197,37
2019/2020	54	10805	835	12,94	200,09
2020/2021	55	9596	875	10,97	174,47

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri					
2016/2017	13	6016	421	14,29	462,77
2017/2018	7	5898	421	14,01	842,57
2018/2019	7	5814	387	15,02	830,57
2019/2020	7	5814	387	15,02	830,57
2020/2021	7	5714	463	12,34	816,29
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta					
2016/2017	13	1787	198	9,03	137,46
2017/2018	13	1787	218	8,20	137,46
2018/2019	13	2047	224	9,14	157,46
2019/2020	13	2047	224	9,14	157,46
2020/2021	13	1987	247	8,04	152,85

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Jumlah tenaga pendidik untuk tingkat SD dan SMP di Kota Padang untuk Tahun 2020 sebanyak 7.898 dengan tingkat pendidikan tertinggi S2. Komposisi guru berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin dan status kepegawaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-22 Jumlah Guru Berdasarkan Pendidikan di Kota Padang Tahun 2020

Guru	Jenis Kelamin	Jumlah																
			S2		S1		D4		D3		D2		D1		SMA		Lain-lain	
			ASN	Non ASN/ Honor	ASN	Non ASN/ Honor	ASN	Non ASN/ Honor	ASN	Non ASN/ Honor	ASN	Non ASN/ Honor	ASN	Non ASN/ Honor	ASN	Non ASN/ Honor	ASN	Non ASN/ Honor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Guru SD Negeri	Laki-laki	670	29	6	342	256	0	1	2	1	13	7	0	0	8	3	1	1
	Perempuan	3509	823	2	1865	1295	2	0	5	6	111	40	1	0	46	23	5	5
Guru SD Swasta	Laki-laki	249	1	18	8	210	0	0	0	2	0	3	0	0	0	4	0	3
	Perempuan	847	2	24	40	714	0	3	1	8	2	17	0	0	4	24	0	8
Guru SMP Negeri	Laki-laki	362	33	10	164	147	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	2	0

	Perempuan	1443	104	23	895	348	1	1	35	0	13	0	15	0	2	2	3	1
Guru SMP Swasta	Laki-laki	205	4	23	6	163	0	0	0	2	0	3	0	0	0	2	0	2
	Perempuan	613	5	39	43	505	0	0	5	4	3	1	2	1	0	2	0	3

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Sampai dengan tahun 2021, kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah di Kota Padang masih menggunakan metode dua shift. Artinya satu gedung sekolah dapat digunakan oleh dua sekolah dengan sistem pagi dan siang. Berikut disajikan data rekap sekolah dengan metode dua shift.

Tabel 2-23 Rekap Sekolah SD 2 (dua) Shift

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah 2 Shift	Kekurangan Ruang Kelas
1	PADANG BARAT	13 SEKOLAH	34
2	PADANG TIMUR	17 SEKOLAH	84
3	PADANG SELATAN	16 SEKOLAH	24
4	PADANG UTARA	4 SEKOLAH	24
5	BUNGUS TELUK KABUNG	4 SEKOLAH	12
6	KOTO TANGAH	9 SEKOLAH	49
7	LUBUK KILANGAN	7 SEKOLAH	27
8	PAUH	3 SEKOLAH	16
9	LUBUK BEGALUNG	5 SEKOLAH	27
10	KURANJI	30 SEKOLAH	125
11	NANGGALO	10 SEKOLAH	55
	TOTAL	118 SEKOLAH	477

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Tabel 2-24 Rekap Sekolah SMP 2 (dua) Shift

No	Uraian	Kekurangan Ruang Kelas
1	SMP NEGERI 32	2
2	SMP NEGERI 15	8
3	SMP NEGERI 38	6
4	SMP NEGERI 39	6
5	SMP NEGERI 41	4
6	SMP NEGERI 43	8
7	SMP NEGERI 3	4
	TOTAL	38

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Disamping penyelenggaraan pendidikan ditingkat SD dan SMP, penyiapan kualitas sumber daya yang unggul juga harus dimulai sejak dini yaitu melalui pendidikan anak usia dini. Pemerintah Kota Padang sangat memperhatikan

terhadap kebutuhan dan pelaksanaan pendidikan anak usia dini ini. Hal ini terlihat dari jumlah sarana dan prasarana TK yang ada di Kota Padang.

Tabel 2-25 Jumlah TK menurut Kecamatan di Kota Padang

No	Kecamatan	Jumlah TK
1	Padang Barat	20
2	Padang Timur	33
3	Padang Selatan	10
4	Padang Utara	24
5	Bungus Teluk Kabung	4
6	Koto Tengah	95
7	Lubuk Kilangan	23
8	Pauh	17
9	Lubuk Begalung	40
10	Kuranji	35
11	Nanggalo	19
	JUMLAH	320

Selain itu, dari jalur pendidikan non formal Pemerintah Daerah juga memfasilitasi dan melaksanakan program pendidikan kesetaraan melalui pelaksanaan program paket A, program paket B dan program paket C yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan kesetaraan. Sampai saat ini di Kota Padang terdapat 28 lembaga pelaksana program kesetaraan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2-26 Data Lembaga Pelaksana Program Kesetaraan Tahun 2021

NO URUT	KECAMATAN	Jumlah Lembaga	JUMLAH ANAK		
			PAKET A	PAKET B	PAKET C
1	BUNGUS TELUK KABUNG	2	8	31	81
2	LUBUK BEGALUNG	1	15	83	99
3	PADANG TIMUR	2	71	192	210
4	LUBUK KILANGAN	3	41	165	205
5	PAUH	1	12	46	85
6	KURANJI	3	60	60	58
7	NANGGALO	3	74	164	192
8	PADANG SELATAN	3	15	66	73
9	PADANG BARAT	2	2	127	228
10	PADANG UTARA	1	5	6	24
11	KOTO TANGAH	7	117	192	199
	JUMLAH	28	420	1132	1454

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Dalam hal pendidikan anak berkebutuhan khusus (pendidikan inklusif), Pemerintah Kota Padang juga sangat memberikan perhatian. Beberapa sekolah yang ada di Kota Padang sudah memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut. Pada tahun 2021, jumlah sekolah yang menerima siswa anak berkebutuhan khusus yaitu :

- a. Tingkat TK/PAUD sebanyak 65 siswa pada 57 sekolah dari 320 sekolah.
- b. Tingkat SD sebanyak 1029 siswa pada 189 sekolah dari 409 sekolah.
- c. Tingkat SMP sebanyak 265 siswa pada 42 sekolah dari 98 sekolah.

Selain beberapa sekolah umum yang menerima siswa anak berkebutuhan khusus diatas, Kota Padang juga memiliki UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif yang memberikan pelayanan profesional dan terpadu bagi anak berkebutuhan khusus.

**Tabel 2-27 Sekolah Reguler Yang Melaksanakan Pendidikan Inklusif
Tahun Pelajaran 2021/2022**

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Reguler Yang Melaksanakan Pendidikan Inklusif		
		TK/PAUD	SD	SMP
1	Padang Selatan	1	5	2
2	Padang Timur	4	31	4
3	Padang Barat	4	10	3
4	Kuranji	16	33	7
5	Bungus Teluk Kabung	3	15	2
6	Lubuk Begalung	4	17	5
7	Padang Utara	4	10	5
8	Pauh	2	18	2
9	Nanggalo	8	11	3
10	Lubuk Kilangan	7	16	3
11	Koto Tangah	4	23	6
	JUMLAH	57	189	42

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Tabel 2-28 Guru Pendidikan Khusus / Koordinator Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun Pelajaran 2021/2022

No	Kecamatan	Jumlah Guru Pendidikan Khusus/Koordinator Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif		
		TK/PAUD	SD	SMP
1	Padang Selatan	1	1	1
2	Padang Timur	0	27	5
3	Padang Barat	4	0	1
4	Kuranji	19	30	11
5	Bungus Teluk Kabung	0	3	0
6	Lubuk Begalung	0	5	7
7	Padang Utara	2	6	4
8	Pauh	0	19	5
9	Nanggalo	0	2	1

10	Lubuk Kilangan	0	9	5
11	Koto Tengah	3	11	2
	JUMLAH	29	113	42

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Kinerja urusan Pendidikan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-29 Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020

N O	BIDANG URUSAN/INDIKAT OR	SATUA N	Realisasi					PD Penanggun g Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	62,20	62,25	62,3	26,86	12,76	Dinas Pendidikan
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	106,80	102,94	102,47	101,01	104,84	Dinas Pendidikan
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	93,81	101,11	90,88	91,73	97,51	Dinas Pendidikan
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,52	96,06	91,84	90,73	97,05	Dinas Pendidikan
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	81,35	80,00	69,52	70,82	80,87	Dinas Pendidikan
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	Dinas Pendidikan
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	Dinas Pendidikan
8	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	99,22	100	98,66	100	Dinas Pendidikan
9	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	99,83	100	99,96	100	Dinas Pendidikan
10	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	95,67	100	Dinas Pendidikan
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100	100	109,66	100	Dinas Pendidikan
12	Ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik	%	48,24	95,47	100	69,95	69,95	Dinas Pendidikan
13	Ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	41	92	100	83,61	83,61	Dinas Pendidikan
14	Rasio siswa/guru sekolah SD	rasio	18,66	16,92	17,36	17,79	16,56	Dinas Pendidikan
15	Rasio siswa/guru sekolah SMP/MI	rasio	14,04	13,39	14,05	14,49	13,28	Dinas Pendidikan

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

II. Urusan Kesehatan

Perkembangan bidang kesehatan suatu daerah menjadi salah satu urusan wajib dan tujuan pokok pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehat jasmani dan rohani. Untuk itu diperlukan fasilitas dan tenaga medis pendukung kesehatan.

Kota Padang sebagai ibu kota Propinsi memiliki jenis sarana kesehatan yang cukup beragam dan kepemilikannya juga beragam. Jumlah Rumah Sakit di Kota Padang tahun 2020 sebanyak 26 rumah sakit, terdapat 1 unit Rumah Sakit Khusus yang sudah tidak beroperasi lagi. Rumah Sakit dikategorikan atas rumah sakit umum berjumlah 14 buah dengan kepemilikan terdiri dari 2 buah milik Kemenkes/ Dikti, 1 buah Pemerintah Kota, 2 buah TNI/POLRI, 1 buah BUMN dan 8 buah swasta dan Rumah Sakit khusus sebanyak 12 buah (1 merupakan kepemilikan pemerintah Provinsi dan 11 rumah sakit swasta. Jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Padang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2-30 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Padang tahun 2016-2020

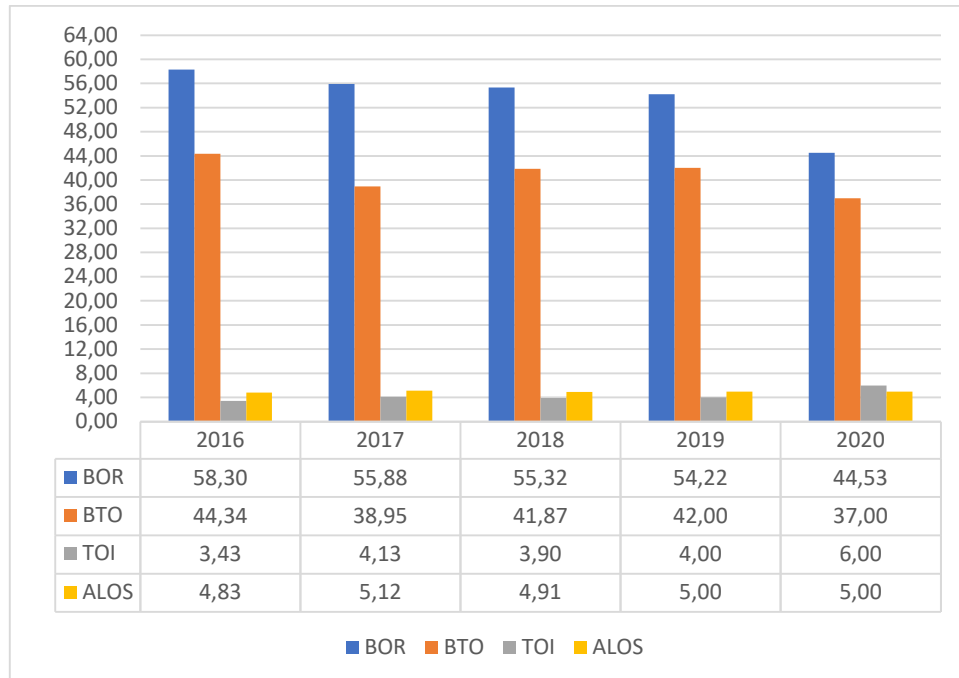
No	Fasilitas Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Sakit Umum	20	21	20	21	14
2	Rumah Sakit Bersalin	9	6	6	6	5
3	Rumah Sakit Khusus	NA	7	13	13	7
4	Puskesmas	22	22	23	23	23
5	Puskesmas Pembantu	NA	61	61	61	59
6	Klinik/Balai Kesehatan	105	119	116	109	89
7	Posyandu	898	739	914	918	918
8	Apotik	NA	207	213	213	215
9	Toko Obat	NA	21	24	24	24
10	Laboratorium	NA	5	5	6	6

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Indikator kinerja pelayanan di Rumah Sakit dapat dinilai dengan 4 indikator, yaitu BOR, BTO, TOI dan ALOS. BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun), indikator ini memberikan tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. TOI adalah rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. ALOS adalah rata-rata lama rawat (dalam satuan hari) seorang pasien.

BOR Rumah Sakit di Kota Padang tahun 2020 adalah 44,5%, angka ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu sebesar 54,2%. Sementara nilai parameter BOR yang ideal adalah 60-85%. Indikator BTO Tahun 2020 adalah 37 kali, angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2019 (42 kali). Angka ideal dalam satu tahun yaitu satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Indikator TOI pada Tahun 2020 yaitu 6 hari, terjadi peningkatan jumlah rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati jika dibandingkan dengan

Tahun 2019 (4 hari). Angka ideal tempat tidur kosong tidak terisi adalah pada kisaran 1-3 hari. Indikator ALOS pada Tahun 2020 adalah 5 hari, jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya sedangkan secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang (data diolah) Tahun 2021

Gambar 2-25 Nilai BOR, BTO, TOI dan ALOS Rumah Sakit di Kota Padang Tahun 2016-2020

Jumlah tenaga kesehatan tahun 2016-2020 ditampilkan pada tabel berikut:

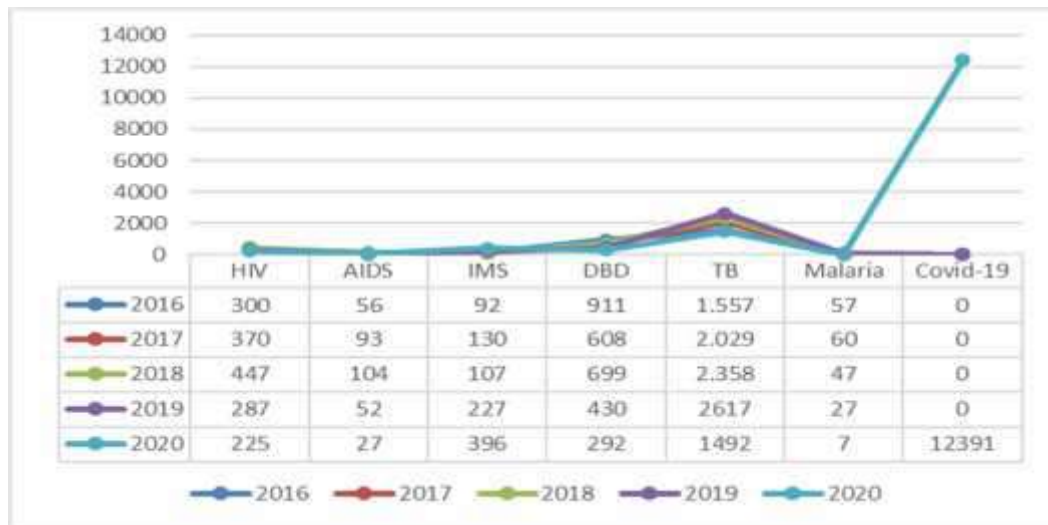
Tabel 2-31 Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Padang tahun 2016-2020

No	Tenaga Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokter	108	114	1780	71	89
2	Dokter Gigi	NA	NA	NA	56	61
3	Perawat	275	255	2825	2611	240
4	Bidan	275	280	874	717	326
5	Farmasi	67	59	475	474	55
6	Tenaga Kesehatan Lainnya	181	159	2013	2056	160

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Di lihat dari jumlah penyakit menular di Kota Padang, terdapat jenis penyakit menular baru di tahun 2020 yang jumlah kasusnya cukup besar yakni kasus Covid-19 yang mencapai 12.391 kasus. Selanjutnya, disusul oleh kasus penyakit TB yang mencapai jumlah kasus sebanyak 1.492 kasus di tahun 2020. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan kasus di tahun 2019. Sementara itu, jumlah kasus HIV juga mengalami penurunan kasus di tahun 2020 menjadi 225

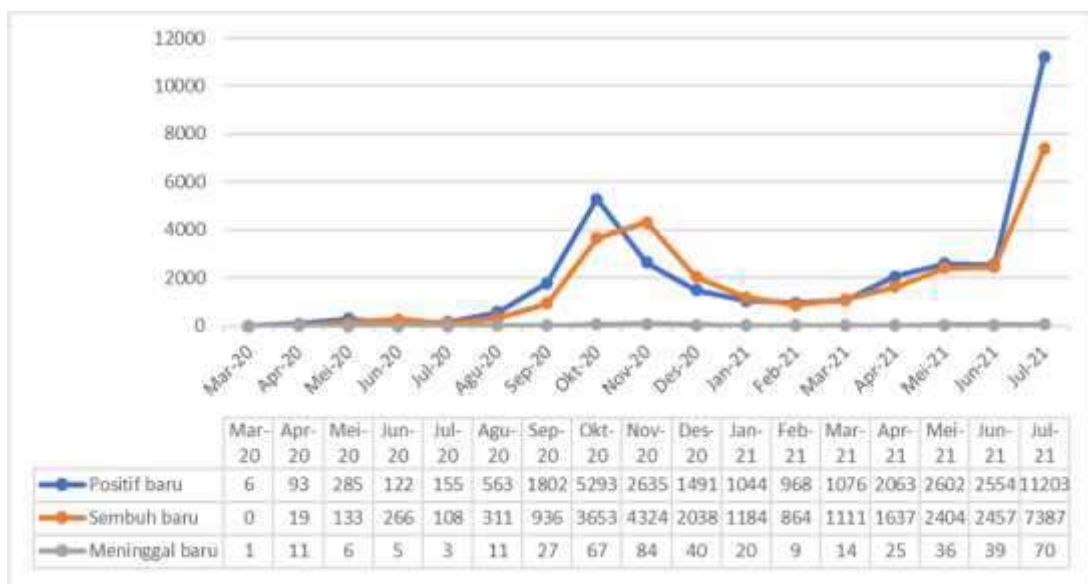
kasus. Jumlah kasus penderita penyakit menular di Kota Padang tahun 2016-2020 disajikan secara lengkap pada gambar berikut:



Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2-26 Jumlah Kasus Penderita Penyakit Menular di Kota Padang

Sejak terkonfirmasi pada bulan Maret 2020, perkembangan kasus Covid-19 di Kota Padang terus mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan Maret 2020, kasus positif yang ditemukan di Kota Padang berjumlah 6 kasus dengan kasus meninggal sebanyak 1 kasus. Terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang cukup signifikan pada bulan Oktober 2020 sebanyak 5.293 kasus positif, 3.653 kasus sembuh dan 67 kasus meninggal. Penurunan kasus terjadi pada bulan November 2020 dan kemudian naik lagi pada bulan Juli 2021. Perkembangan kasus Covid-19 di Kota Padang mulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan Juli 2021 ditampilkan pada gambar berikut:



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2021

Gambar 2-27 Perkembangan kasus Covid-19 di Kota Padang bulan Maret 2020 s.d Juli 2021

Dilihat dari jumlah kasus penderita penyakit tidak menular, kasus hipertensi mendominasi kasus penyakit tidak menular dari tahun 2016-2020. Data jumlah kasus penderita penyakit tidak menular ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2-32 Jumlah Kasus Penderita Penyakit Tidak Menular Tahun 2016-2020

Tahun	Hipertensi	Diabetes Melitus
2016	NA	NA
2017	NA	NA
2018	108.104	33.439
2019	32.831	9.722
2020	36.038	9.471

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2021

Untuk mengantisipasi penularan Covid-19, selain mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan secara ketat, Pemerintah Kota Padang juga melakukan vaksinasi secara massal. Vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin.

Sasaran dari vaksinasi ini diawali dengan pemberian vaksin kepada tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid ini. Kemudian dilanjutkan pemberian vaksin untuk lansia, petugas publik, masyarakat umum dan remaja. Cakupan pemberian vaksin Covid-19 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2-33 Cakupan Vaksinasi Covid-19 s.d September 2021

NO	SASARAN	TARGET	REALISASI																				
			JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER		
			V1	V2	V1	V2	V1	V2	V1	V2	V1	V2	V1	V2	V1	V2	V3	V1	V2	V3	V1	V2	V3
1	SDIM KESEHATAN	9128	3.028	43	8.480	5.309	8.633	7.637	9.067	8.001	9.158	8.272	9.307	8.422	9.728	8.712	131	9.961	9.160	2.766	12.081	11.039	5.010
2	LANSIA	73.589					3.826	208	5.250	3.816	5.560	4.722	6.156	4.988	9.804	5.377		11.135	8.235		12.869	9.547	
3	PETUGAS PUBLIK	110.167					28.899	10.514	46.065	28.371	50.251	39.112	75.490	42.263	128.469	52.521		140.405	91.888		86.895	63.282	
4	MASYARAKAT UMUM	445.505													30.966	10.668		41.779	21.539		122.155	68.440	
5	REMAJA	88.226													1352	3		8978	6266		48883	10550	
	JUMLAH	726.615	3.028	43	8.480	5.309	41.358	18.359	60.382	40.188	64.969	52.106	90.953	55.673	180.319	77.281	131	212.258	137.088	2.766	282.883	162.858	5.010

Sumber data : <https://pen-prod.udata.id/>

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Persentase balita stunting di Kota Padang disajikan pada gambar berikut:

Tabel 2-34 Persentase Balita Stunting Tahun 2016-2020

Tahun	% Balita Stunting
2016	NA
2017	20,05
2018	13,40
2019	9,13
2020	9,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2021

Angka balita stunting di Kota Padang masih berada di atas 9 % dari kurun waktu 5 tahun terakhir. Sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang melanda dunia secara global, pemerintah pusat menetapkan Kota Padang sebagai salah satu lokus stunting karena diperkirakan angkanya akan naik akibat pandemi ini.

Kinerja urusan Kesehatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-35 Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	angka	6,64	5,25	5,65	6,67	5,6	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	angka	7,59	6,37	6,51	7,30	6,3	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	angka	20	16	17	16	21	Dinas Kesehatan
4	Rasio posyandu per satuan balita	rasio	11,07	11,07	11,21	11,31	11,4	Dinas Kesehatan
5	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	Dinas Kesehatan
6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	0,031	0,029	0,02	0,010	0,015	Dinas Kesehatan
7	Rasio dokter per satuan penduduk	rasio	0,69	1,37	2,14	1,74	0,16	Dinas Kesehatan
8	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	rasio	0,84	1,60	3,43	3,71	0,6	Dinas Kesehatan
9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	70,01	44,41	44,6	46,65	61,3	Dinas Kesehatan
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	95,23	96,71	93,23	91,72	99,2	Dinas Kesehatan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
11	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	68,27	95,19	89,42	90,38	10,6	Dinas Kesehatan
12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100	100,00	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	76,56	87,61	91,85	90,70	60,9	Dinas Kesehatan
14	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	2,10	3,35	4,16	5,00	5	Dinas Kesehatan
15	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	94,26	85,08	100	85,84	41,2	Dinas Kesehatan
16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	61,48	26,79	48,4	39,07	41,2	Dinas Kesehatan
17	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	nilai	170,20	218,80	251,1	275,22	170,4	Dinas Kesehatan
18	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	nilai	2,00	3,70	6,07	7,99	7,8	Dinas Kesehatan
19	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	9,38	6,40	14,4	11,93	13,7	Dinas Kesehatan
20	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	81,31	76,63	76,05	75,04	90,3	Dinas Kesehatan
21	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100,00	100,00	100	100,00	100	Dinas Kesehatan
22	Penderita diare yang ditangani	%	38,23	31,16	34,3	36,82	16,5	Dinas Kesehatan
23	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,040	0,050	0,06	0,04	0,03	Dinas Kesehatan
24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	14,18	12,40	17,76	18,53	13,8	Dinas Kesehatan
25	Cakupan kunjungan bayi	%	92,73	88,94	90,01	86,99	56,8	Dinas Kesehatan
26	Cakupan puskesmas	%	22,00	22,00	23	23,00	23	Dinas Kesehatan
27	Cakupan pembantu puskesmas	%	61,00	61,00	61	61,00	58	Dinas Kesehatan
28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	96,30	95,61	92,48	90,23	94,4	Dinas Kesehatan
29	Cakupan pelayanan nifas	%	90,68	93,98	89,57	88,76	99,4	Dinas Kesehatan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	62,83	66,38	59,37	58,91	55,3	Dinas Kesehatan
31	Cakupan pelayanan anak balita	%	91,38	92,95	83,14	79,57	81,3	Dinas Kesehatan
32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
33	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	93,85	94,89	94,15	74,26	95,3	Dinas Kesehatan
34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	84,28	90,38	112,6	112,80	74,1	Dinas Kesehatan
35	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100,00	100,00	100	100,00	100	Dinas Kesehatan
36	Persentase balita gizi buruk	%	0,08	0,08	0,07	0,18	0,15	Dinas Kesehatan
37	Prevalensi balita gizi kurang	%	0,001	0,370	1,04	6,73	6,2	Dinas Kesehatan
38	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100,00	100	Dinas Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2021

III. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Jalan dan Jembatan

Jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Sarana jalan di Kota Padang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sepanjang 624,691 Km dengan kondisi yang relatif baik. Berikut disajikan panjang jalan menurut kondisi dan status di Kota Padang.

Tabel 2-36 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kota Padang Tahun 2020

No	Jenis Permukaan	Kondisi Jalan (Km)			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
1	Aspal Beton	76,656	39,016	30,947	146,619
2	Aspal	235,968	120,102	95,264	451,334
3	Kerikil	-	-	4,336	4,336
4	Macadam	11,712	5,962	4,728	22,402
	Jumlah	324,336	165,080	135,275	624,691

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2-37 Panjang Jalan menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kota Padang

No	Kecamatan	Kondisi Jalan			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
1	Bungus Teluk Kabung	15,552	3,739	10,569	29,860
2	Lubuk Kilangan	4,056	0,778	2,276	7,110
3	Lubuk Begalung	40,952	13,787	9,821	64,560
4	Padang Selatan	15,069	12,859	6,102	34,030
5	Padang Timur	31,939	11,981	3,56	47,480
6	Padang Barat	22,017	10,406	3,547	35,970
7	Padang Utara	16,789	14,992	7,209	38,920
8	Nanggalo	13,566	5,581	8,273	27,420
9	Kuranji	77,065	35,499	33,876	146,440
10	Pauh	18,995	20,486	9,329	48,810
11	Koto Tangah	74,033	34,742	35,316	144,091
	Jumlah	330,33	164,780	129,878	624,691

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas tergambar bahwa proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (kondisi mantap) di Kota Padang sekitar 52,87% dari total panjang jalan yang ada dan jalan yang ada belum semuanya memiliki trotoar yang ramah terhadap penjalan kaki dan drainase/saluran pembuangan air.

Jaringan jalan yang ada di Kota Padang jika dilihat dari sisi fungsinya, terbagi menjadi sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder, serta lingkungan. Sistem jaringan jalan primer merupakan jaringan jalan yang menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai dengan pusat kegiatan lingkungan. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan anatar kawasan di dalam perkotaan yang secara menerus menghubungkan kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke persil.

Berdasarkan fungsi jalan tersebut, di Kota Padang terdapat jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder dan lingkungan. Berikut ini disajikan panjang jalan menurut fungsi di Kota Padang:

Tabel 2-38 Panjang Jalan Menurut Fungsi di Kota Padang Tahun 2020

No.	Fungsi	Kondisi Permukaan (Km)			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
1.	Arteri Sekunder	13.090	44.818	8.089	65,997
2.	Kolektor Sekunder	33.507	92.986	45,415	171,908,
3.	Lokal Sekunder	274.945	32.976	78.865	386.786
	Jumlah	321.542	170.780	132.369	624.691

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jalan arteri primer yang menjadi kewenangan Kota Padang tidak ada. Jalan arteri primer yang ada di Kota Padang adalah jalan arteri yang merupakan kewenangan pusat berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 248 Tahun 2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor. Jalan yang termasuk jalan arteri primer dan jalan kolektor primer di Kota Padang, yaitu :

- a. jalan Adinegoro;
- b. jalan Prof. DR. Hamka;
- c. jalan Padang By Pass I;
- d. jalan Padang By Pass II;
- e. batas Kota Padang - Jalan Simpang Haru;
- f. jalan Bukit Putus - Teluk Bayur; dan

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat dan kota inti dari Metropolitan Palapa serta bagian dari Kawasan Strategis Propinsi Sumatera Barat (berdasarkan RTRW Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032). Secara ekonomis, Kota Padang berperan dalam meningkatkan daya saing (competitiveness) kegiatan industri untuk pasar global, serta sebagai pusat perdagangan dan jasa. Kondisi ini mendorong tingginya tingkat intensitas perkembangan kota di Kota Padang, sehingga kebutuhan peningkatan dan pengembangan jaringan jalan internal kota serta jalan penghubung Kota Padang dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu kebutuhan yang diprioritaskan beberapa tahun ke depan untuk mencapai kondisi mantap.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pada jaringan jalan tertentu khususnya di beberapa titik terjadi ketidakseimbangan antara tingkat pertumbuhan jalan di satu sisi dengan tingkat pertumbuhan kendaraan di sisi yang lain, dimana pertumbuhan jalan jauh lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan kendaraan, hal ini berarti menunjukkan terjadinya pembebanan yang berlebihan pada jalan. Kondisi semacam ini mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas, kenyamanan perjalanan terganggu, kelelahan perjalanan, kebosanan perjalanan, pemborosan waktu dan materi. Dimana kesemuanya itu menjurus ke arah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Beberapa ruas jalan yang menghubungkan pusat pelayanan dan pusat kegiatan antar kawasan di Kota Padang perlu dilakukan peningkatan kondisi dan kapasitas jalan untuk mempermudah mobilisasi penduduk dan arus keluar masuk barang seperti peningkatan Jalan By Pass, Jalan akses menuju Terminal Tipe A Anak Air, dan Jalan Maransi serta Jalan Lingkar Timur (By Pass – Air Dingin – Lubuk Minturun – Gunung Sarik – Limau Manis – Bandar Buat – Bungus). Disamping peningkatan kapasitas jaringan jalan, juga perlu dilakukan pengembangan jaringan jalan yang dilakukan dengan pendekatan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, dan membentuk struktur ruang yang teratur sesuai dengan amanat dari rencana tata ruang.

Memperhatikan pola jaringan jalan Kota Padang yang berbentuk ‘setengah radial’ dengan sumbu utama utara-selatan dan tengah-timur, akan banyak dijumpai persimpangan jalan pada kedua sumbu utama tersebut. Pembangunan fly-over (jalan layang) pada persimpangan-persimpangan jalan dengan volume lalu-lintas tinggi akan sangat membantu untuk mengurangi beban lalu-lintas pada persimpangan jalan tersebut.

Disamping itu, Kota Padang merupakan daerah rawan bencana yang salah satunya adalah rawan bencana tsunami. Salah satu upaya mitigasi bencana tsunami yang perlu menjadi perhatian Kota Padang adalah membuka dan membangun akses jalur evakuasi bencana dari arah barat ke timur seperti Jalan Adinegoro (Kayu Kalek) – SMPN 26 dan SMA 8 – By Pass . Kondisi saat ini jalur jalan evakuasi bencana di Kota Padang belum secara optimal terbuka dan kondisi jalan masih belum mantap.

Sarana dan prasarana penghubung transportasi darat selain jalan adalah jembatan. Pembangunan jembatan mempunyai beragam manfaat yang bisa dilihat dari berbagai segi. Salah satu manfaat dari pembangunan jembatan yang dapat dirasakan secara langsung yakni kemudahan akses dari satu tempat ketempat lain dimana diantara kedua tersebut terdapat penghalang seperti sungai, jurang, danau, bahkan laut. Kota Padang yang dilintasi oleh 21 sungai didukung oleh keberadaan 163 jembatan dengan total panjang 4.085 meter. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan panjang jembatan di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-39 Jumlah dan Panjang Jembatan di Kota Padang

Tahun	Jembatan Gantung		Jembatan Rangka Baja		Jembatan Leger INP		Jembatan Beton		Jembatan Nasional		Jumlah	
	Jml	Pjg (m)	Jml	Pjg (m)	Jml	Pjg (m)	Jml	Pjg (m)	Jml	Pjg (m)	Jmbtn	Pjg (m)
2016	9	323,45	20	926	6	126	67	660	57	1920	159	3955,45
2017	7	321,45	22	927	6	125	69	662	57	1920	161	3955,45
2018	7	321	22	927	6	125	69	662	57	1920	161	3955
2019	7	321	23	977	6	125	70	683	57	1920	163	4026
2020	7	321	23	997	6	125	70	722	57	1920	163	4085

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Untuk kedepannya, masih dirasakan perlunya Pemerintah Kota Padang meningkatkan kualitas jembatan yang ada dan membangun jembatan baru sebagai sarana penghubung antar daerah yang terpisah oleh sungai di Kota Padang. Kelayakan sarana dan prasarana transportasi di Kota Padang harus benar-benar diperhatikan agar mobilitas yang dilakukan masyarakat menjadi lancar. Jadi, Pemerintah Kota Padang benar-benar mengamati dan memperhatikan kerusakan-kerusakan pada jembatan di Kota Padang secara detail agar terdapat kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jembatan di Kota Padang dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

B. Drainase Perkotaan

Sistem drainase Kota Padang yang telah berkembang hingga saat ini terdiri dari saluran alami (sungai), saluran buatan, dan kolam tandon. Umumnya sistem drainase yang berkembang merupakan sistem drainase yang masih menggunakan paradigma konvensional, sedangkan sistem drainase ramah lingkungan yang berkembang masih terbatas penggunaan kolam tandon. Kolam tandon yang sudah ada di Kota Padang meliputi:

- a. Kolam tandon Cimpago (Danau Cimpago) muara sungai Banda Bakali (kanal Banda Bakali) terletak di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat. Luas Tandon Cimpago 2,45 Ha dengan keliling 1,25 Km. Kolam Tandon Cimpago termasuk areal drainase Ujung Gurun. Kondisi muara Banda Bekali dipengaruhi oleh pasang surut Pantai Purus.
- b. Baung Panjalinan Ponds terletak pada muara Sungai Batang Air Dingin di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah. Baung Panjalinan Ponds merupakan tampungan yang terbentuk dari alam. Luas Baung Panjalinan Ponds 19,67 Ha dengan keliling: 4,41 km.
- c. Kolam Tandon Ulak Karang terletak pada muara Sungai Batang Kuranji atau Batang Muar, sebelah kiri aliran sungai tersebut. Terletak di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara.
- d. Kolam Tandon Parkit terletak pada muara Sungai Batang Kuranji atau Batang Muar, sebelah kanan aliran sungai tersebut. Terletak di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara. Kolam Tandon Parkit berhubungan dengan areal drainase Baung Panjalinan Ponds.

Kondisi kolam tandon yang ada sekarang masih berfungsi, tetapi tidak dipelihara dengan baik, sehingga menurunkan fungsi sebagai penampung air ketika pasang naik. Dilihat dari kondisi banjir beberapa tahun ini yang disebabkan limpasan air dari wilayah hulu, maka dibutuhkan pengembangan kolam penampung air di wilayah hulu dan tengah. Kolam yang perlu dikembangkan adalah kolam detensi dan kolam retensi. Termasuk penambahan kolam tandon di beberapa tempat lainnya. Kolam yang dikembangkan, perlu dilengkapi dengan sistem polder.

Jaringan drainase di Kota Padang pada umumnya merupakan drainase pasangan batu dan drainase alam yang pembuangan akhirnya terkumpul pada sungai, dimana sistem ini bertumpu pada 10 saluran/badan penerima utama dengan luas tangkapan 3.986 Ha, yaitu :

- a. Batang Air Dingin.
- b. Batang Tabing.
- c. Batang Balimbiang.
- d. Baung Panjalinan Pond.
- e. Batang Kuranji.
- f. Saluran Lolong.
- g. Banjir Kanal.
- h. Batang Arau.
- i. Batang Jirak.

Sistem drainase di Kota Padang dibagi atas 19 (sembilan belas) areal sistem drainase. Untuk lebih jelasnya mengenai areal sistem drainase di Kota Padang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2-40 Areal Sistem Drainase Kota Padang

No.	Areal Drainase	Luas Tangkapan (Ha)	Badan Air Penerima	Penggunaan Lahan
1	Air Pacah	426	Batang Balimbiang	Pertanian dan Pemukiman
2	Pasir putih	60	Batang Air Dingin	Pemukiman
3	Tabing	307	Batang Tabing	Bandara
4	Airport	352	Batang Balimbiang	Pemukiman
5	Baung Penjalinan	291	Baung Panjalinan Pond	Pemukiman
6	Siteba	128	Batang Balimbiang	Pemukiman
7	Sawah Liat	174	Batang Kuranji	Pemukiman
8	Kandis	85	Batang Kuranji	Pemukiman
9	Lapai	164	Batang Kuranji	Pemukiman
10	Ulak Karang	223	Batang Kuranji	Perkantoran, Perdagangan dan Pemukiman
11	Lolong	304	Saluran Lolong	Pemukiman dan Perdagangan
12	Purus	136	Banjir Kanal	Pemukiman dan Perkantoran
13	Jati	120	Banjir Kanal	Pemukiman dan Perdagangan
14	Alai	322	Batang Arau	Pertanian
15	Ujung Gurun	303	Banjir Kanal	Pemukiman, Pemukiman dan Perkantoran
16	Aur Duri	271	Batang Arau	Pemukiman
17	Olo Nipah	197	Batang Arau	Perdagangan dan Pemukiman
18	Kali Mati	50	Batang Arau	Pemukiman
19	Rawang Barat	73	Batang Jirak	Pemukiman
	Total	3.986		

Sumber : Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) Padang

Pengelolaan drainase merupakan tugas utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas PUPR bertugas mengelola sepanjang 49.275 M drainase primer dan 29.395 M

drainase sekunder. Sedangkan area layanan pengelolaan drainase oleh Dinas LH mencakup drainase lingkungan dan 5 (lima) buah banjir kanal dengan total panjang 24.850 M. Drainase di Kota Padang tidak hanya diperuntukkan sebagai penyaluran air hujan namun juga sebagai pengendali banjir di wilayah perkotaan dan berfungsi juga sebagai saluran pembuangan air limbah.

Kondisi drainase pada pusat-pusat permukiman dan kawasan pasar, banyak yang tidak berfungsi dengan baik akibat tumbukan sedimen, sampah dan jaringan utilitas kota seperti pipa PDAM, drainase yang ada belum terintegrasi dan banyak terputus, serta kapasitas/dimensi jaringan drainase kota yang tidak memadai karena terjadinya penyempitan drainase. Kondisi ini menyebabkan lambatnya laju air menjadi sehingga terjadi banjir dan genangan. Banjir dan genangan yang terjadi di Kota Padang, cenderung merupakan pola yang berulang pada kawasan yang sama dan jenis ancaman yang relatif permanen dikala musim penghujan tiba. Berdasarkan Data Kajian Resiko Bencana Tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, luas kawasan rawan banjir di Kota Padang yaitu seluas $\pm 5.855,47$ Ha. Banjir terjadi di sepanjang jalan utama Kota Padang dan kawasan sekitarnya termasuk permukiman dan rumah sakit. Beberapa wilayah yang dilanda banjir adalah daerah By Pass, Palarik, Lubuk Minturun, Jundul Rawang, Berok Siteba, Air Dingin dan Dadok Tunggul Hitam.

C. Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi acuan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota. RTRW adalah dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Kota Padang telah memiliki Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Padang. Adapun rencana program pembangunan wilayah menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 mencakup rencana struktur ruang kota dan rencana pola ruang kota.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 tersebut merupakan rencana umum yang belum mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang pada skala persil sehingga masih memerlukan perincian/pendetailan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan penyusunan peraturan zonasi agar lebih operasional digunakan dalam perizinan.

Dikarenakan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) masih dalam tahap proses penyusunan saat ini maka Kota Padang dalam memberikan izin

pemanfaatan ruang masih berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, sehingga persentase ketaatan terhadap tata ruang 100 %.

Dari luasan 694, 96 km² wilayah daratan Kota Padang, hanya 25 % yang merupakan wilayah efektif perkotaan, sedangkan 75 % merupakan kawasan lindung yang terdiri dari hutan suaka, hutan lindung, kawasan sabuk hijau/green belt, sempadan pantai, sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau kota. Kondisi ini menyebabkan Kota Padang memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung ruang yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perkotaan.

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit sebesar 30% dari luas wilayah kota yang dibagi menjadi RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat sebesar 10%. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, ditargetkan hingga tahun 2030 penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang mencapai $\pm 24,70\%$, yang direncanakan terdistribusi sesuai dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan.

Namun faktanya, penyediaan RTH publik dalam lingkup perkotaan masih terbilang minim, terutama di kawasan perumahan. Dimana prioritas pembangunan di kawasan perumahan, fokus pada penyediaan hunian dan fasilitas penunjang hunian lainnya (fasos dan fasum) yang tidak diikuti dengan penyediaan ruang terbuka hijau publik secara kuantitas maupun kualitas.

Hal ini mengakibatkan semakin minimnya ketersediaan RTH Publik di kawasan perumahan yang secara tidak langsung akan berdampak kepada semakin terbatasnya tempat bagi masyarakat untuk melakukan interaksi/sosialisasi dengan sahabat dan teman diluar rutinitas sehari-hari dan berkurangnya tempat untuk bermain bagi anak-anak. Kondisi ini cenderung menyebabkan dijadikannya ruang milik jalan sebagai area bermain bagi anak-anak atau anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget di rumah.

D. Sanitasi

Berdasarkan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sanitasi (Air Limbah Domestik) Kota Padang Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat didapatkan angka capaian seperti pada Tabel 2-41. Dari tabel tersebut terlihat bahwa penduduk Kota Padang yang masih melakukan BABS sebesar 6,93% yang telah akses layak sebesar 73,33% dan tangki septik telah disedot sebanyak 10,99% (akses aman), serta yang tidak akses layak (cubluk di perkotaan) sebesar 19,74% pada tahun 2020.

Angka capaian akses layak sebesar 73,33% tersebut sesuai dengan target yang SPM bidang sanitasi (air limbah domestik) untuk kota Padang Tahun 2020, sehingga untuk pelaporan SPM menjadi 100%.

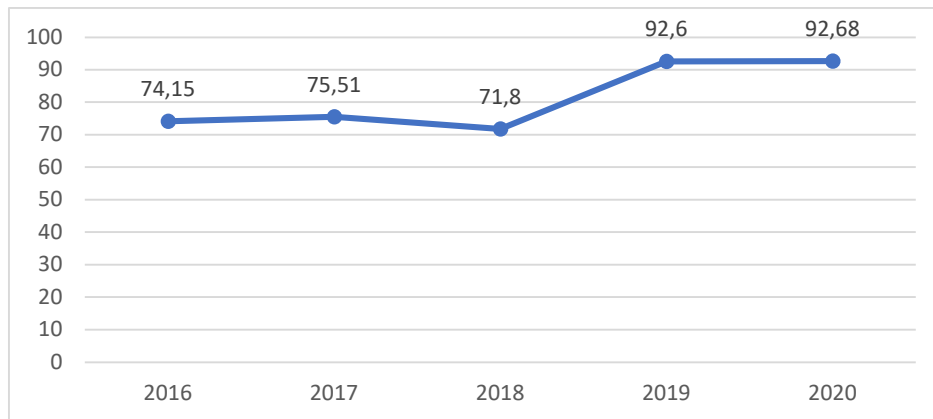
Tabel 2-41 Capaian Air Limbah Domestik Kota Padang Tahun 2016 – 2020

No	URAIAN		PROSENTASE TAHUN				
			2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
I	TANPA AKSES		31,79	28,42	27,14	27,31	26,67
	1.1	Buang Air Besar Sembarangan (BABs)					
	a.	Kawasan Perkotaan	11,30	7,16	7,09	8,25	6,49
	b.	Kawasan Perdesaan	0,69	0,61	0,59	0,57	0,44
	1.2.	Cubluk					
	a.	Kawasan Perkotaan	19,80	20,65	19,46	18,49	19,74
II	AKSES		68,22	71,58	72,86	72,69	73,33
1	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik - Setempat (SPALD-S)						
	1.1.	Cubluk (Akses Dasar)					
	a.	Kawasan Perdesaan	1,59	1,52	1,53	1,45	1,45
	1.2.	Tangki Septik Layak					
	a.	Kawasan Perkotaan	60,20	60,51	61,53	60,54	59,32
	b.	Kawasan Perdesaan	0,60	0,83	0,88	1,23	1,66
	1.3.	Tangki Septek Aman (Yang Disedot)					
	a.	Kawasan Perkotaan	5,62	7,52	7,60	8,03	9,63
	b.	Kawasan Perdesaan	0,21	0,23	0,35	0,37	0,38
2	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik - Terpusat (SPALD-T)						
	2.1.	IPALD-T					
	a.	Kawasan Perkotaan	0,00	0,97	0,97	1,07	0,89
	b.	Kawasan Perdesaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			100,01	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Kepala Keluarga (KK)			205.626	207.320	209.011	210.702	212.393

Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kota Padang Tahun 2020

E. Air Minum

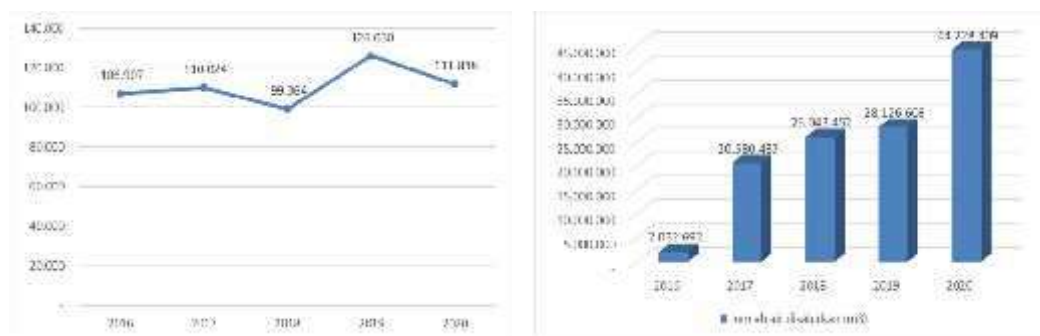
Persentase penduduk berakses air minum dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2020, persentase penduduk berakses air minum sudah mencapai 92,68 %. Data perkembangan penduduk berakses air minum dalam kurun 5 tahun terakhir disajikan oleh tabel berikut:



Sumber : Dinas Perkim, 2021

Gambar 2-28 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Padang Tahun 2016-2020

Secara umum, penyediaan air bersih di Kota Padang disediakan oleh PDAM Kota Padang. Data jumlah pelanggan dan jumlah air yang disalurkan dalam 5 tahun terakhir disajikan dalam gambar berikut:



Jumlah Pelanggan

Jumlah air disalurkan (m3)

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2021

Gambar 2-29 Jumlah Pelanggan Dan Jumlah Air Yang Disalurkan PDAM Tahun 2016-2020

Sumber-sumber air yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku pada sistem penyediaan air bersih PDAM Kota Padang saat ini bersumber dari air permukaan. Total kapasitas sumber yang dimiliki dari 12 sungai adalah 1.455 l/dtk. Angka capaian 92,68% pada tahun 2020 sesuai dengan target pencapaian SPM, sehingga didalam dalam aplikasi SPM kemendagri dilaporkan 100%.

Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-42 Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020

N O	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Proporsi panjang jaringan jalan	Km	1374,80	1381,70	1.372,60	1375,20	13139,00	Dinas PUPR

N O	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	SATUA N	Realisasi					PD Penanggu ng Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
	dalam kondisi baik							
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	rasio	465,90	465,90	465,9	465,80	465,10	Dinas PUPR
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	70,00	70,30	69,9	69,90	59,08	Dinas PUPR
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	12,10	12,10	12,1	12,10	11,5	Dinas PUPR
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	74,68	69,46	92,4	92,88	73,33	Dinas PRKPP/ Dinas PUPR
6	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	2,36	2,36	2,36	2,36	2,00	Dinas PUPR
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	69,20	71,00	71,8	71,80	72,50	Dinas PUPR
8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	0,63	0,45	0,31	0,31	0,30	Dinas PUPR
9	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	62,00	67,00	67	67,00	84,89	Dinas PUPR
10	Rasio Jaringan Irigasi	rasio	90,00	90,00	90	90,00	85,00	Dinas PUPR
11	Persentase penduduk berakses air minum	%	74,15	75,51	71,8	92,60	92,68	Dinas PRKPP
12	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	74,15	75,51	75,85	92,6	92,68	Dinas PRKPP

N O	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
13	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,175	0,081	61,19	0,00	0,18	Dinas PRKPP
14	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	85,19	83,99	82,1	20,00	20,00	Dinas Lingkungan Hidup
15	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	1	1	0,81	0,88	0,88	Dinas Lingkungan Hidup
16	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	rasio	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	Bag. Kesra
17	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	0,20	0,20	0,2	0,20	0,10	Dinas PUPR
18	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	rasio	0,06	1,00	1,01	1,01	0,70	Dinas PUPR
19	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0,40	0,35	0,35	0,35	0,17	Dinas PUPR
20	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	Dinas PUPR

Sumber : Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Kesra Tahun 2021

IV. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

A. Rumah layak huni

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, telah ditetapkan kriteria rumah tidak layak huni. Pada Tahun 2014 berdasarkan kriteria tersebut telah didata rumah tidak layak huni di Kota Padang berjumlah sebanyak 16.508 unit. Data rumah layak huni yang telah direhab dari tahun 2016 s.d tahun 2020 berjumlah 4.934 rumah. Kegiatan rehab rumah ini didanai dari bantuan dari APBN dan APBD Kota Padang. Sampai dengan tahun 2020, masih terdapat rumah tidak layak huni sebesar 10.279 unit. Melihat masih banyaknya data Rumah Tidak Layak Huni tersebut, maka pemerintah kota Padang akan tetap berupaya menjadikan rehab rumah tidak huni menjadi salah satu yang mendapat perhatian dalam pembangunan.



Sumber : Dinas PRKPP Kota Padang Tahun 2021

Gambar 2-30 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab dan Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020 (unit)

B. Perumahan dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan SK Walikota Padang Nomor 163 Tahun 2014, kawasan kumuh Kota Padang adalah seluas 107,96 Ha. Untuk penanganan fisik kawasan kumuh ini telah dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2017 dengan luas kawasan kumuh yang ditangani seluas 57,86 Ha. Capaian ini sesuai dengan target pengurangan luasan kawasan kumuh di tahun 2017, yakni sebesar 60 %. Selanjutnya, pada tahun 2018 ditargetkan pengurangan luasan kawasan kumuh sebesar 48,4 Ha atau sebesar $\pm 40\%$, sehingga luas kawasan kumuh pada tahun 2018 menjadi 9,46 Ha dan akhir tahun 2019 menjadi 0 Ha.

Pada tahun 2020 ditetapkan lokasi kawasan kumuh baru melalui SK Walikota Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang No. 519 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 122,33 Ha yang tersebar di 22 lokasi. Dan akan dilakukan penanganan pada Kawasan Kumuh tersebut menjadi 0 Kumuh pada tahun 2024. Dimana Sebaran lokasi kawasan kumuh tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2-43 Sebaran Kawasan Kumuh Kota Padang

Lokasi Kawasan Kumuh		Luas (Ha)	Kecamatan	Total Luas per Kecamatan (Ha)	Kategori Kumuh
1.	Pasar Ambacang	2,52	Kuranji	11,00	Kumuh Ringan
2.	Anduring	8,48			Kumuh Ringan
3.	Balai Gadang	11,90	Koto Tengah	36,35	Kumuh Ringan
4.	Padang Sarai	13,60			Kumuh Ringan

5.	Batipuh Panjang	6,30	Bungus Teluk Kabung	29,02	Kumuh Ringan
6.	Batang Kabung Ganting	4,55			Kumuh Ringan
7.	Teluk Kabung Selatan	16,68			Kumuh Ringan
8.	Bungus Barat	10,66			Kumuh Ringan
9.	Bungus Timur	1,68	Lubuk Begalung	16,47	Kumuh Ringan
10.	Koto Baru	2,84			Kumuh Ringan
11.	Banuaran	11,05			Kumuh Ringan
12.	Lubuk Begalung	2,58			Kumuh Ringan
13.	Tabing Banda Gadang	3,00	Nanggalo	3,00	Kumuh Ringan
14.	Flamboyan Baru	3,56	Padang Barat	3,56	Kumuh Ringan
15.	Bandar Buat	2,27	Lubuk Kilangan	8,86	Kumuh Ringan
16.	Tarantang	2,83			Kumuh Ringan
17.	Padang Besi	2,36			Kumuh Ringan
18.	Koto Lalang	1,40			Kumuh Ringan
19.	Binuang Kampung Dalam	6,03	Pauh	14,07	Kumuh Ringan
20.	Pisang	1,06			Kumuh Ringan
21.	Piai Tengah	5,28			Kumuh Ringan
22.	Limau Manis	1,70			Kumuh Ringan
Total		122, 33	122,33		

Sumber : JDIH Kota Padang

Disamping itu, tiap tahunnya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditargetkan untuk memberikan fasilitasi rumah bersubsidi bagi masyarakat sebanyak 1000 unit/tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatasi tingkat kebutuhan kepemilikan rumah yang cenderung terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kepala keluarga di Kota Padang.

Kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-44 Kinerja Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020

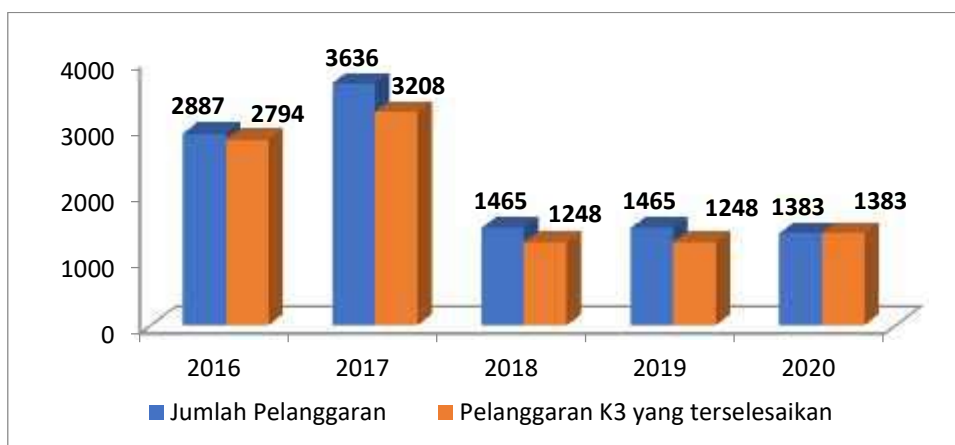
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Rasio rumah layak huni	rasio	0,216	0,214	0,21	0,21	0,23	Dinas PRKPP
2	Rasio permukiman layak huni	rasio	0,990	0,992	1	1	0,99	Dinas PRKPP
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	93,95	94,43	92,52	92,90	88,13	Dinas PRKPP
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	1,00	1,35	1,68	2,07	2,41	Dinas PRKPP
5	Persentase pemukiman yang tertata	%	0,31	0,39	0,47	0,64	0,64*	Dinas PRKPP

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	100	81,85	25,18	0,1	0,17	Dinas PRKPP
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	0,97	0,79	0,24	0	8,40	Dinas PRKPP

Sumber : Dinas PRKPP Tahun 2021

C. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kriminalitas merupakan salah satu penghambat bagi kota untuk mewujudkan rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Selain angka kriminalitas, masalah ketertiban, ketenteraman, dan keindahan (K3) juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena masih banyak terjadi pelanggaran terhadap K3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Satpol PP Tahun 2021

Gambar 2-31 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) 2016-2020

Kinerja urusan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-45 Kinerja Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	40,00	40,00	40	40,00	40,00	Satpol PP
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Tibum & Tranmas	%	2,860	0,750	80	87,00	100	Satpol PP

3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	17,70	32,75	40,56	48,88	48,88	Dinas Pemadam Kebakaran
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	63,47	81,51	82,89	87,94	90,04	Dinas Pemadam Kebakaran
5	Persentase Penegakan PERDA	%	3,26	0,85	1	3,40	10,4	Satpol PP

Sumber : Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Tahun 2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwa cakupan petugas perlindungan masyarakat cakupannya masih cukup rendah yaitu 40 %. Meskipun demikian persentase penyelesaian pelanggaran dapat diselesaikan 100 %. Sementara itu, cakupan pelayanan bencana kebakaran masih di bawah 50 % dari luas wilayah Kota Padang. Dengan wilayah yang cukup luas, terkait dengan pelayanan bidang kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran menyediakan mobil Damkar yang *stand by* di setiap Kecamatan sehingga tingkat waktu tanggap kebakaran yang ditangani < 15 menit atau tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK sudah mencapai 90% pada tahun 2020.

D. Urusan Sosial

Urusan sosial erat kaitannya dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Di Kota Padang ada 26 (dua puluh enam) jenis PMKS/PPKS yang sudah terdata sebagaimana data pada tabel berikut:

Tabel 2-46 Data PMKS/PPKS Kota Padang Tahun 2016-2020

No.	Jenis PMKS/PPKS	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Balita Terlantar	Anak	2	7	3	1	4
2	Anak Terlantar	Anak	1.120	1.018	1.260	1.300	1.264
3	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum	Anak	95	115	105	128	40
4	Anak Jalanan	Anak	45	78	117	122	123
5	Anak Dengan Kedisabilitas	Anak	1.491	1.524	1.630	1.630	1.630
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak	95	98	95	128	40
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak	65	95	98	128	98
8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	110	350	263	275	3.888
9	Penyandang Disabilitas	Orang	2.045	2.135	2.283	3.230	2.281
10	Tuna Susila	Orang	143	72	30	21	6
11	Gelandangan	Orang	10	46	65	3	65
12	Pengemis	Orang	65	29	35	25	35
13	Pemulung	Orang	40	40	87	88	87
14	Kelompok Minoritas	Orang	237	408	408	0	10
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	770	921	797	217	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS	Orang	300	370	500	375	10

17	Korban Penyalahgunaan Napza	Orang	210	161	146	13	146
18	Korban Trafikiing	Orang	2	6	-	5	6
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	145	69	38	4	38
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Orang	-	-	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	Orang	78	56	29	-	2.199
22	Korban Bencana Sosial	Orang	98	49	30	2	303
23	Perempuan Rawan Sosial	Orang	695	665	590	5050	590
24	Fakir Miskin	KK	42.560	43.750	44.040	42.440	42.170
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	KK	59	45	38	290	16
26	Komunitas Adat Terpencil	KK	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2021

Data di atas menjelaskan bahwa PMKS/PPKS di Kota Padang didominasi oleh jenis fakir miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia terlantar. Selain itu, angka korban penyalahgunaan napza dan perempuan rawan sosial masih cukup tinggi yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Padang dalam penanganan PMKS/PPKS ini.

Kinerja urusan Sosial Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-47 Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	72,34	76,15	76,74	85,65	93,41	Dinas Sosial
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	75,91	78,82	79,28	86,00	93,41	Dinas Sosial
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	72,34	76,15	76,74	86,90	82,96	Dinas Sosial
4	Persentase KUBE PMKS yang dapat berkembang secara mandiri	%	44,00	68,54	68,54	78,00	28,57	Dinas Sosial
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	7,41	7,41	7,14	6,25	5,88	Dinas Sosial

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	19,26	12,47	14,44	16,43	8,42	Dinas Sosial

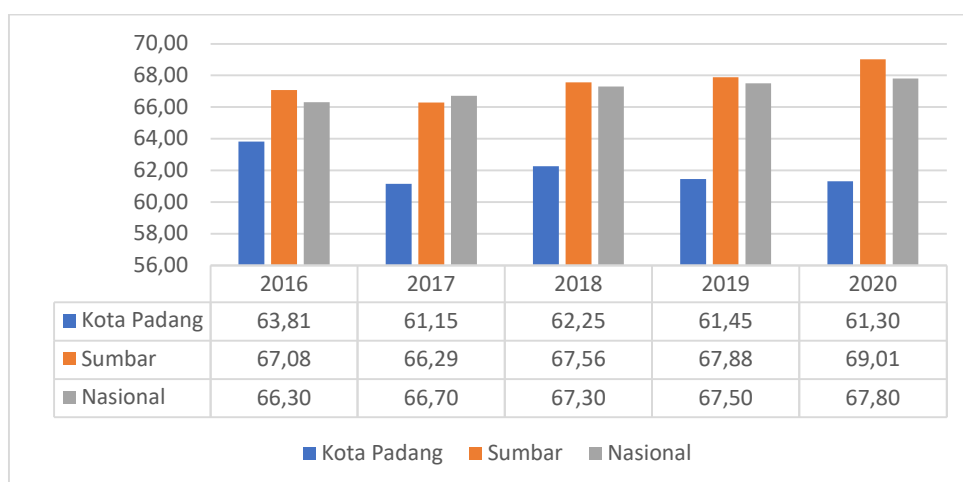
Sumber : Dinas Sosial Tahun 2021

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan kualitas dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Semakin menurun tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan semakin baik, dan diasumsikan produktivitas juga meningkat.

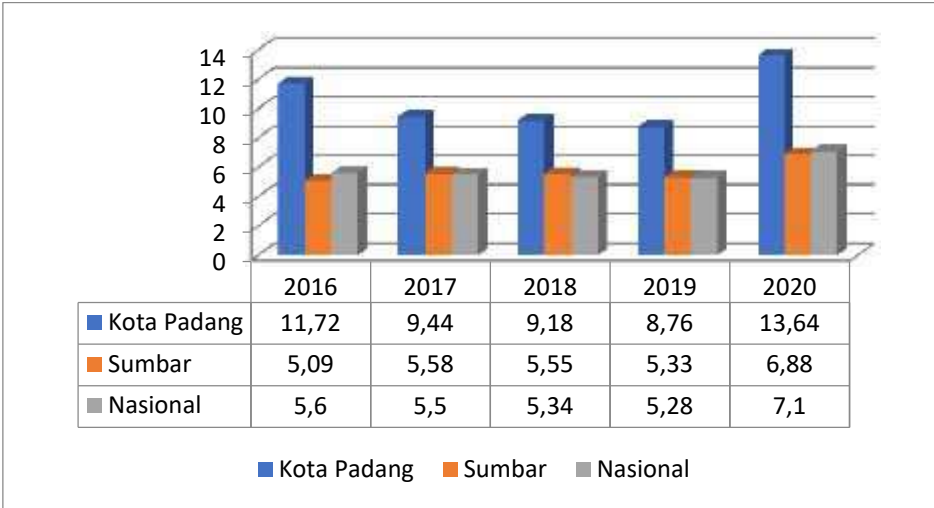
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Semakin tinggi TPAK menggambarkan semakin luas kesempatan kerja. TPAK Kota Padang terlihat sebagaimana tabel berikut :



Sumber : Kota Padang Dalam Angka 2021

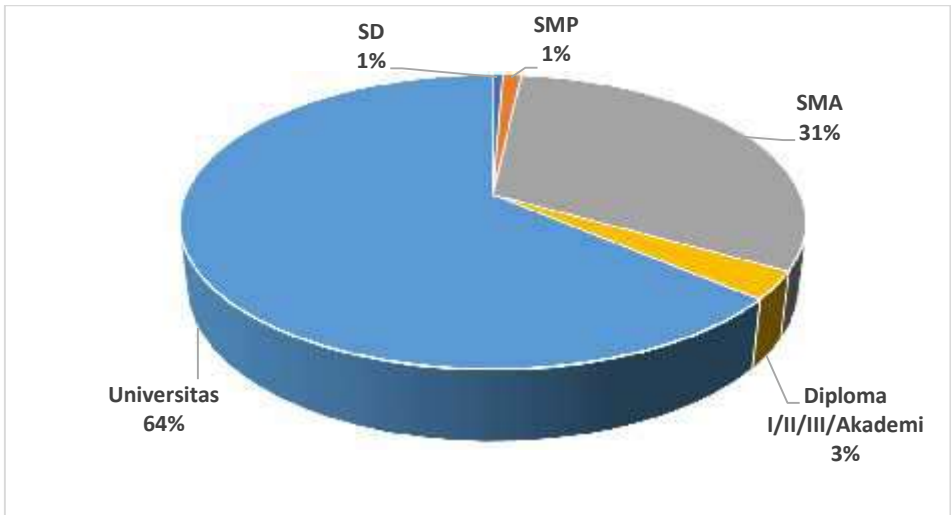
Gambar 2-32 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Padang Tahun 2016-2020

Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang memiliki tren fluktuatif dalam setiap periodenya. Namun pada tahun 2020 terjadi Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19), mengakibatkan perekonomian Kota Padang menurun drastis, sehingga banyak lapangan usaha yang tutup dan melakukan efisiensi tenaga kerja mengakibatkan tenaga kerja banyak yang dirumahkan dan di PHK. Pada akhirnya tingkat pengangguran terbuka Kota Padang menjadi 13,64 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021
Gambar 2-33 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang, Propinsi Sumbar dan Nasional Tahun 2016-2020 (persen)

Sebagian besar pencari kerja di Kota Padang menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan lulusan Universitas yang mencapai 63,78 persen dan disusul oleh SMA sebesar 31,41 persen. Tingginya pengangguran dari lulusan universitas, diploma/akademi dan SMA perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan lulusan tersebut merupakan lulusan yang siap kerja.



Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021
Gambar 2-34 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kota Padang, Tahun 2020

Kinerja urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-48 Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020

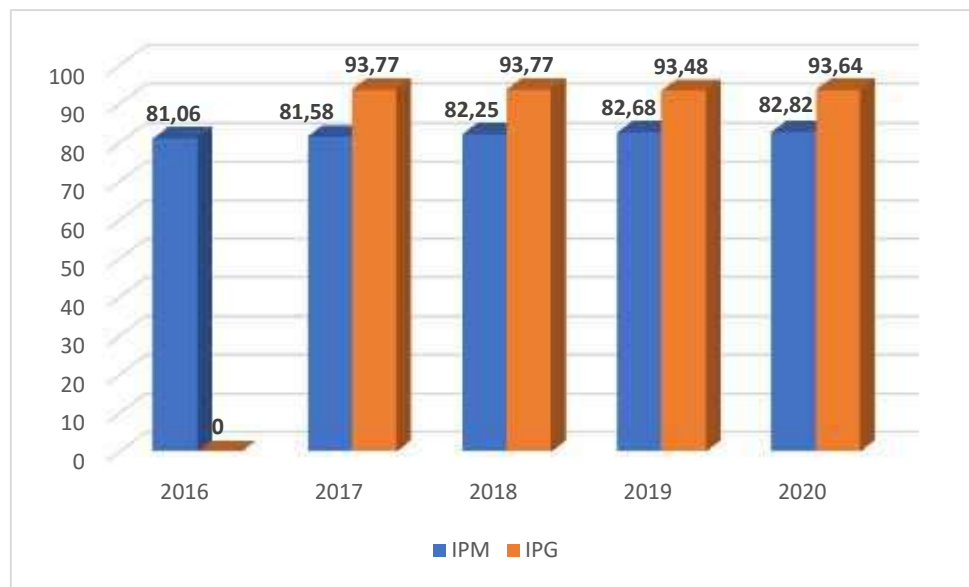
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	angka	78,80	68,20	49,31	37,00	28,96	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	49,20	43,90	77,33	52,78	46,34	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	11,72	12,61	11,12	10,80	3,74	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	angka	101440	112900	92.902	93652	95,51	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0	-	1	1,00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	87,36	74,58	88,13	74,60	71,43	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	90,32	73,58	-	0,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	96	90	96,15	84,44	9,76	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
9	Rasio lulusan S1/S2/S3	rasio	13,05	13,12	17,93	16,54	16,25	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,81	61,15	62,25	61,45	61,30	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
11	Tingkat pengangguran terbuka	%	11,72	9,44	9,18	8,76	13,64	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
12	Rasio penduduk yang bekerja	rasio	N/A	90,56	90,82	91,24	86,36	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2021

II. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, urusan pemberdayaan perempuan dan anak wajib menjadi perhatian pemerintah daerah. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan

variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Dilihat dari data 5 tahun terakhir, nilai IPG Kota Padang menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai IPM. Hal ini menunjukkan kesetaraan gender di Kota Padang cukup baik. Kota Padang juga berada dalam tingkat Nindya pada capaian kota Layak Anak, yang artinya berada pada tingkatan baik menuju Kota Layak Utama sebagai tingkatan akhir.



Sumber: BPS Kota Padang Tahun 2021

Gambar 2-35 Perbandingan capaian IPM dan IPG Kota Padang Tahun 2016-2020

Peningkatan kualitas hidup perempuan juga membutuhkan perlindungan dari tindak kekerasan. Data tiga tahun terakhir menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang dimana pada tahun 2014 terdapat 115 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 28 orang perempuan sebagai pelaku dan 87 orang perempuan sebagai korban. Di tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu 130 kasus dengan 18 orang perempuan sebagai pelaku dan 112 orang perempuan sebagai korban dan di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 91 kasus dengan 35 orang perempuan sebagai pelaku dan 56 orang perempuan sebagai korban(Sumber :DPPPA Prov Sumbar). Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh P2TP2A Kota Padang sejak tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2-49 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Tahun	Jenis Kekerasan							Jumlah
	KDRT	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksploritasi	Lainnya	
2016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2017	5	5	3	5	2	1	1	22
2018	6	3	3	5	3	2	2	24
2019	5	1	1	1	1	0	2	11

2020	5	2	4	2	5	0	33	51

Sumber: Pusat Pelayanan Teradu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang

Kualitas hidup anak juga ditentukan dari perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan. Data kekerasan terhadap anak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus meningkat dimana tahun 2014 terdapat 10 orang anak mengalami tindak kekerasan dengan 2 orang anak sebagai pelaku dan 8 orang anak sebagai korban. Pada tahun 2015 jauh meningkat menjadi 55 orang dimana 10 orang anak sebagai pelaku dan 45 orang anak sebagai korban, sedangkan di tahun 2016 masih berkisar diangka 57 orang dengan 8 orang anak sebagai pelaku dan 49 orang anak sebagai korban (Sumber :DPPPA Prov Sumbar). Kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh P2TP2A Kota Padang sejak tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-50 Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Tahun	Jenis Kekerasan							Jumlah
	KDRT	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksplorasi	Lainnya	
2016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2017	4	7	6	10	3	2	3	35
2018	5	9	20	20	1	2	23	80
2019	3	1	10	23	3	1	92	133
2020	2	3	8	20	1	1	189	224

Sumber: Pusat Pelayanan Teradu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang

Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-51 Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	7,59	5,13	4,9	4,70	7,18	DP3AP2KB
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	15,55	15,55	15,55	13,00	13,00	DP3AP2KB
3	Persentase partisipasi perempuan di lingkup pemerintah Kota Padang	%	68,96	69,71	70	69,86	70,73	DP3AP2KB
4	Rasio KDRT	rasio	0,05	0,01	0,06	0,06	0,08	DP3AP2KB
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	55,57	49,55	49,55	73,20	47,72	DP3AP2KB
6	Cakupan perempuan dan anak korban	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
	kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu							
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	NA	NA	100	100	100	DP3AP2KB
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	-	-	100	100	100	DP3AP2KB
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	jumlah	-	-	100	100	100	DP3AP2KB
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	-	-	100	100	100	DP3AP2KB
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	-	-	100	100	100	DP3AP2KB

Sumber : Dinas Sosial, Dinas P3AP2KB Tahun 2021

III. Urusan Pangan

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 pasal 18 point a dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;.

Data dari 2016-2020 menunjukkan terjadi alih fungsi penggunaan lahan yakni perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian, baik secara tetap maupun sementara. Untuk mendukung peningkatan pangan ini dibutuhkan lahan non irigasi. Berikut data luas lahan sawah non irigasi yang memiliki kecenderungan turun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

Tabel 2-52 Luas Lahan Sawah Non Irigasi Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Lahan sawah Non Irigasi (Ha)
2016	35,52
2017	26,24
2018	12,00
2019	10,70
2020	10,70

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa luas lahan sawah irigasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan secara terus menerus. Pada Tahun 2016 luas lahan 35,52 Ha, di tahun 2017 berkurang signifikan menjadi 26,24 Ha. Tahun 2018, berkurang lebih dari 50% dari tahun sebelumnya menjadi 12,00 Ha. Terakhir di tahun 2019 dan 2020 berada pada luasan 10,70 Ha. Hal ini terjadi karena makin meningkatnya penggunaan lahan untuk tanah perumahan

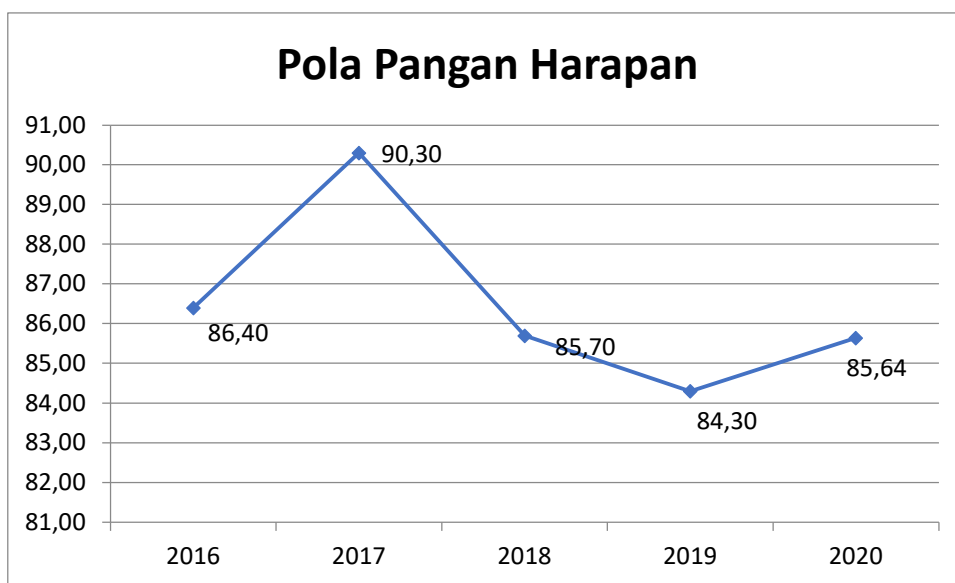
Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan (UU Pangan No.18 tahun 2012) . Padi masih merupakan bahan pokok pangan bagi sebagian besar masyarakat di Kota Padang. Untuk itu lahan pertanian pangan di Kota Padang, khususnya lahan padi sawah, perlu dijaga keberlanjutannya agar Kota Padang dapat terjamin ketahanan pangan dan juga berdaulat atas pangannya. Hal ini merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan kedua, yaitu tidak ada kelaparan.

Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Tercapainya penganeekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut yang selama ini kita kenal dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Melalui pendekatan PPH ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal sebesar 100.

Mengacu pada PPH tersebut, keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat memenuhi tidak hanya kecukupan

gizi (*nutritional adequacy*) akan tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) yang didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

Pada periode 2016 - 2020, skor pola pangan harapan Kota Padang menunjukkan angka yang terus membaik dari tahun ke tahun, skor pola pangan harapan pada tahun 2016 adalah 86,4 dan terus mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 90,3 pada tahun 2017, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 85,7 dan terus mengalami penurunan menjadi 84,3 pada tahun 2019, terakhir di 2020 berada pada posisi angka 85,64. Secara kuantitas, konsumsi penduduk Kota Padang dikatakan baik/cukup namun secara kualitas belum baik karena kurang beragam, yang ditunjukkan oleh Skor PPH 85,64 (ideal 100). Hal tersebut disebabkan karena terjadinya penurunan konsumsi kacang-kacangan menjadi 4,2 serta sayuran dan buah menjadi 23,4. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Tahun 2021

Gambar 2-36 Pola Pangan Harapan Kota Padang Tahun 2016 – 2020

Sesuai dengan definisi ketahanan pangan, bahwa pangan yang cukup tidak hanya tentang kuantitas dan mutu/kualitas, melainkan harus aman. Keamanan pangan erat kaitannya dengan status gizi dan kesehatan. Konsumsi pangan tidak aman akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diare/infeksi yang semakin mempersulit pemanfaatan gizi oleh tubuh.

Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota KWT dalam memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga dalam rangka menunjang tercapainya konsumsi pangan aman, beragam, bergizi, berimbang sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.

Kota Padang mendapatkan dana pemanfaatan pekarangan sejak Tahun 2012 sampai 2016, dengan total kelompok penerima sebanyak 67 kelompok dengan sumber dana dari APBN dan APBD Provinsi Sumatera Barat.

IV. *Urusan Pertanahan*

Jumlah luas tanah negara yang sudah disertifikat meningkat di tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 tanah yang disertifikasi sebanyak 89 sertifikat dengan luas 52.489 m2 menjadi 146 sertifikat dengan luas 269.620 m2.

Tabel 2-53 Jumlah dan Luas Tanah Negara yang sudah disertifikatkan Kota Padang

Tahun	Jumlah Sertifikat	Luas (m2)
2016	147	294.943
2017	47	466.751
2018	2	46.095
2019	89	52.489
2020	146	269.620

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Sementara itu jumlah tanah masyarakat yang sudah disertifikatkan pada tahun 2019 berjumlah 3.624 sertifikat dengan luas tanah 1.469.088 m2. Jumlah ini meningkat di tahun 2020 berjumlah 5.171 sertifikat dengan luas tanah 4.661.057 m2.

Tabel 2-54 Jumlah dan Luas Tanah Masyarakat yang sudah disertifikatkan

Tahun	Jumlah Sertifikat	Luas (m2)
2016	6.418	2.769.604
2017	7.638	4.224.846
2018	4.770	2.741.894
2019	3.624	1.469.088
2020	5.171	4.661.057

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Kinerja urusan Pertanahan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

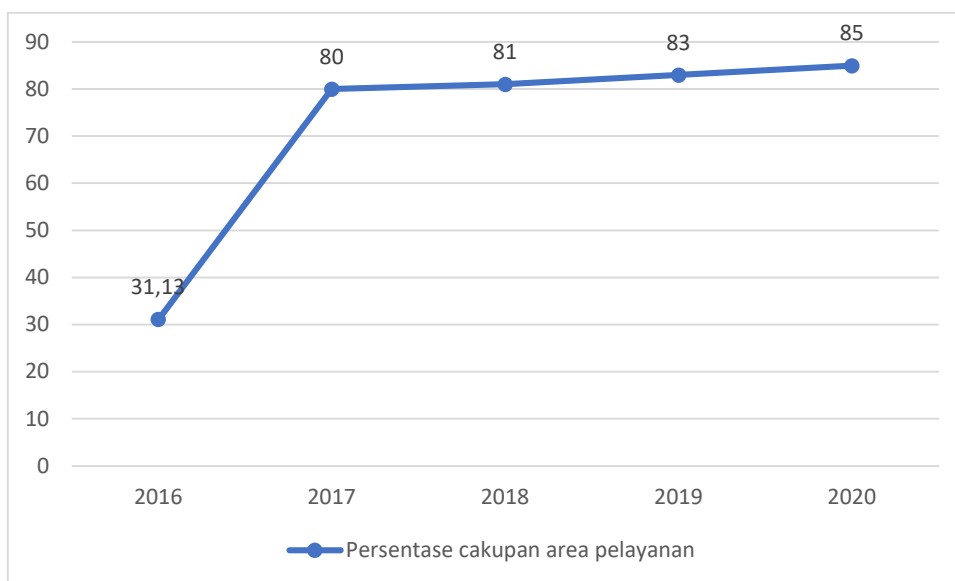
Tabel 2-55 Kinerja Daerah Urusan Pertanahan Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase luas lahan bersertifikat dalam satu tahun	%	21,15	6,76	0,29	12,81	21,01	Dinas PRKPP
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	-	-	100	80	100	Dinas PRKPP

Sumber : Dinas PRKPP Tahun 2021

V. *Urusan Lingkungan Hidup*

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur yang diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan yang dinamis atau bisa disebut pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu kinerja dalam pencapaian urusan lingkungan hidup adalah diperolehnya penghargaan Adipura dari Pemerintah Pusat. Penghargaan ini diberikan kepada Kota Padang sebagai kota yang bersih serta telah melakukan pengelolaan lingkungan perkotaan untuk kategori kota besar. Piala Adipura kategori Kota Besar ini merupakan yang kedua kalinya diraih Kota Padang berturut-turut dari 2017 dan 2018 setelah pasca gempa tahun 2009 lalu. Hanya saja untuk penilaian tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan di tahun 2020. Area pelayanan persampahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Gambar berikut menyajikan persentase cakupan area pelayanan dari tahun 2016-2020:



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Gambar 2-37 Persentase cakupan area pelayanan tahun 2016-2020

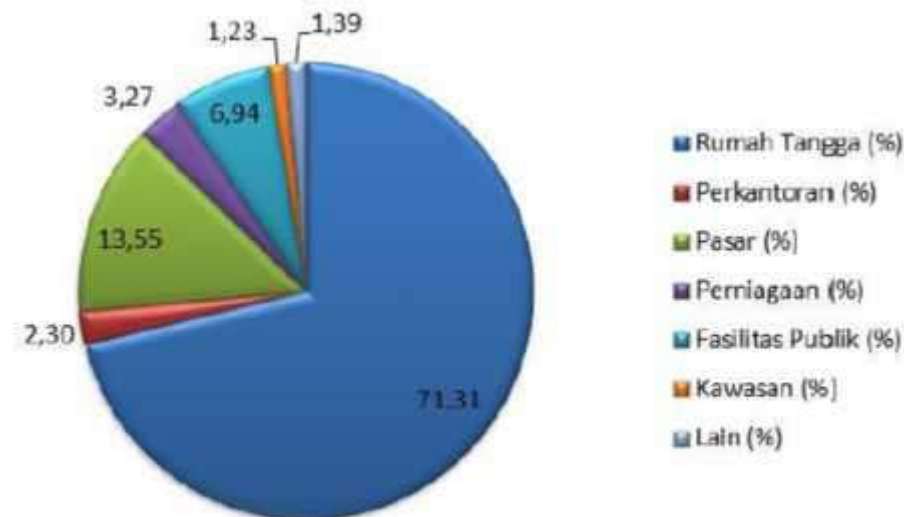
Kota Padang memiliki satu lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Air Dingin Kec. Koto Tangah dengan luas 19,3 Ha. TPA ini dilengkapi dengan sistem sanitary landfill, memiliki kapasitas 723.600 m³ dan sudah terpakai sebesar 482.800 m³. Timbulan sampah direduksi melalui program 3R (Reuse, reduce, recycle).

Tabel 2-56 Timbulan Sampah Kota Padang dan Jumlah TPS

No.	Tahun	Timbulan Sampah (ton/hari)	3R (ton/hari)	% 3R	Jumlah TPS
1	2016	520	76.96	14.8	640
2	2017	612	97.18	17.3	710
3	2018	640	129.31	20.19	741
4	2019	640	23,11	20.40	531
5	2020	665	37,40	15,39	480

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2021

Sementara itu jumlah sampah yang dihasilkan penduduk Kota Padang selalu meningkat setiap tahunnya dengan komposisi jenis sampah yang beragam. Tahun 2020, total timbunan yang dihasilkan Kota Padang adalah 650,00 ton/hari atau rata-rata 0,72 kg/orang/hari dengan komposisi 71,31% sampah dihasilkan oleh domestik (rumah tangga), perkantoran 2,30%, komersil 16,82%, fasilitas publik 6,94%, dan lainnya 2,62%.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2021

Gambar 2-38 Komposisi Jenis Sampah tahun 2020

Kualitas Udara disuatu perkotaan tidak lepas dari tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH), berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa Pemerintah Kota harus menyediakan minimal RTH publik 20 % dari luas wilayah perkotaan, yaitu seluas 13.899 ha. Kota Padang sudah memenuhi ketentuan ini, namun secara fungsi, ketersediaan RTH ini belum optimal baik itu untuk fungsi ekologi, sosial dan ekonomi serta arsitektural kota. Lebih lengkap lokasi RTH Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-57 Data Ruang Terbuka Hijau Tahun 2021

No.	Jenis RTH	Nama RTH	Penanggung Jawab	Lokasi	Luas RTH (ha)	Persentase Luas RTH (%)
1.	Hutan Kota	Hutan Suaka Alam	Dinas Pertanian	Kec. Koto Tengah, Pauh, Luki, Lubeg, Kuranji dan Bungus Teluk Kabung	25.611,40	36,85
		Hutan Lindung	Dinas Pertanian	Kec. Koto Tengah, Pauh, Luki, Lubeg, Kuranji, Pauh, dan Bungus Teluk Kabung	10.995,50	15,82

No.	Jenis RTH	Nama RTH	Penanggung Jawab	Lokasi	Luas RTH (ha)	Persentase Luas RTH (%)
2.	Taman Kota	Taman Kota, Median Jalan, Hutan Kota, Pemakaman	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Tersebar diseluruh Kecamatan Di Kota Padang	779,00	1,12
		Sempadan Sungai	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Sepanjang Sungai-Sungai Utama yang memiliki DAS	1.996,7	14,37
		Sempadan Pantai	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Kec. Koto Tengah, Padang Utara, Padang Barat, Padang Selatan, Lubuk Begalung, dan Bungus Teluk Kabung	105,37	0,15
		Pertanian	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Kec. Koto Tengah, Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung	4.380,40	6,3
		Sabuk Hijau (Green Belt)	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Kec. Koto Tengah, Pauh, Kuranji, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, dan Bungus Teluk Kabung	11.932,90	17,17
3.	Tempat Pembibitan	Pembibitan Tanaman Hias	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Jln. Dr. Hamka Kec. Padang Utara Padang	1.682,67	-

Sumber : DLH Kota Padang Tahun 2021

Sedangkan gambaran untuk kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan dapat dilihat pada tabel dibawah :

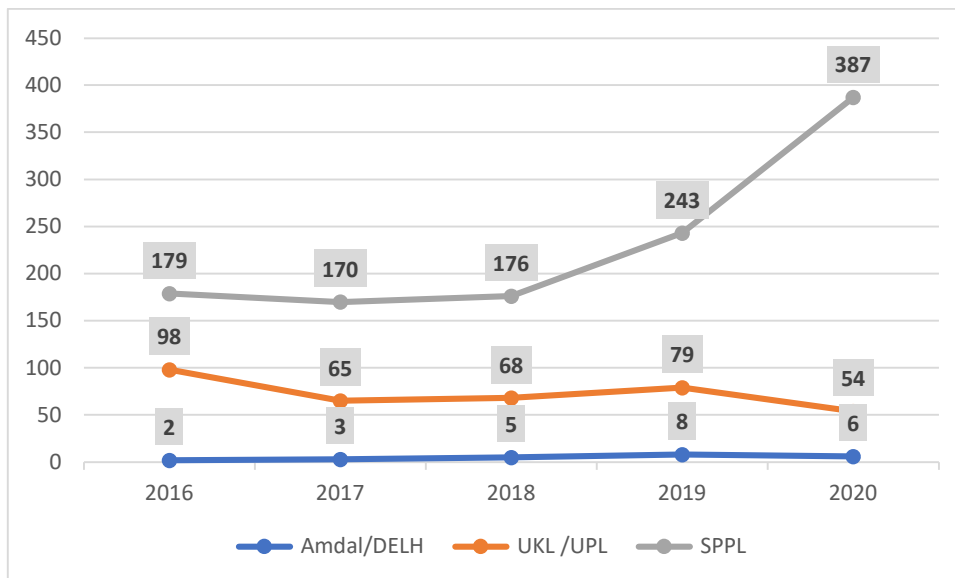
Tabel 2-58 IKLH, IKU, IKA dan IKTL tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	N/A	N/A	68,69	68,70	71,53
Indek Kualitas Udara (IKU)	N/A	N/A	69,08	73,76	74,51
Indek Kualitas Air (IKA)	N/A	65	61,25	57,92	66,55
Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	N/A	68,25	72,98	72,80	73,02

Sumber : DLH Kota Padang Tahun 2021

Data terkait IKLH tahun 2017 tidak tersedia (N/A), karena belum ada pedoman perhitungannya, pedoman perhitungan baru ada pada tahun 2017, sehingga data IKLH baru ada pada tahun 2018, Demikian juga dengan data Tahun 2016 terkait data IKLH, IKU, IKA dan IKTL otomatis tidak tersedia (N/A).

Layanan AMDAL/UKL/UPL dan SPPL yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha yang membutuhkan rekomendasi dokumen lingkungan bagi kegiatan usaha yang akan dibangun. Selama kurun waktu 2016 – 2020, rekomendasi dokumen lingkungan yang telah dikeluarkan dengan rincian sebagai berikut:



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2021

Gambar 2-39 Layanan AMDAL/UKL/UPL dan SPPL Tahun 2016-2020

Kota Padang memiliki Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota yang tersebar di 11 Kecamatan antara lain disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2-59 Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota di Kota Padang

No	Kecamatan	Nama Taman	Tema yang diusulkan	Lokasi
1	Padang Barat	Taman Rimbo Kaluang* Taman Juanda RTH Imam Bonjol Taman Naval Komodo & Muaro Lasak Taman Grand Zuri Taman Dipo Taman Tugu Jong Soematera Taman Monumen Gempa	Taman Sehat, untuk masyarakat (komunitas) melakukan olahraga, (Outdoor exercise Park)	Jl. Raden Saleh Jl. Juanda Jl. Imam Bonjol Muaro Lasak Simpang Kantor Pos Jl. Diponegoro Jl. Gereja Jl. Gereja
2	Padang Timur	Taman Tan Malaka Taman Jati Gaung Taman Dr. Sutomo Taman Tugu Padang Area Taman Sisingamangaraja Taman Depan RST Taman Perempatan Gantiang Taman Samping SPBU Lama Sawahan	Taman Sejarah Perjuangan	Jl. Tan Malaka Jati Gaung Marapalam Simpang Haru Gantiang Gantiang Gantiang Sawahan

No	Kecamatan	Nama Taman	Tema yang diusulkan	Lokasi
3	Padang Utara	Taman Digital Taman Buah dan Bibit Taman Tugu Selamat Datang Taman Tugu Adipura	Taman Edukasi	Telkom Padang Baru Jl. Polonia Air Tawar Timur Jl. HAMKA Jl. HAMKA
4	Padang Selatan	Taman Kapal Siti Nurbaya Taman Batang Arau	Taman Fotografi	Batang Arau
5	Nanggalo	Taman Nanggalo	Taman Keluarga	Berok Siteba
6	Kuranji	Taman Perumahan Astek	Taman Medan Nan Bapaneh	Kompleks Perumahan Astek
7	Lubuk Begalung	Taman Balai Basuo	Taman silaturahmi	Balai Basuo
8	Lubuk Kilangan	Taman Hutan Raya Bung Hatta	Taman hutan raya	
9	Pauh			
10	Koto Tangah	Taman BWSS Taman Gerbang Batas Kota Taman Apeksi	Taman Sehat, untuk masyarakat (komunitas) melakukan olahraga, (Outdoor exercise Park)	Muaro Panjalinan Gerbang Batas Kota Kompleks Balaikota Padang Aie Pacah
11	Bungus Teluk Kabung	Taman Sungai Pisang Taman Kantor Camat	Taman Persinggahan	Sungai Pisang Kantor Camat Bungus Teluk Kabung

Sumber : Bappeda Kota Padang (data diolah) Tahun 2021

Kinerja urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2-60 Kinerja urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	ada	Dinas Lingkungan Hidup
2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	indeks	N/A	65,00	61,25	57,92	66,55	Dinas Lingkungan Hidup
3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	indeks	N/A	N/A	69,08	73,77	74,51	Dinas Lingkungan Hidup
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks	N/A	68,25	72,98	72,98	73,02	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan	%	70,60	75,90	79	82,00	100	Dinas Lingkungan Hidup

N O	BIDANG URUSAN/INDIKATO R	SATUAN	Realisasi					PD Penanggun g Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
	penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota							
6	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota		0	0	-	1	0	Dinas Lingkungan Hidup
7	Monitoring Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	jumlah	6,00	6,00	6	6,00	6	Dinas Lingkungan Hidup
8	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	jumlah	40,00	20,00	14	10,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup
10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100,00	100,00	100	100,00	100	Dinas Lingkungan Hidup
11	Timbulan sampah yang ditangani	%	443,04	437,50	26,2	80,00	74,99	Dinas Lingkungan Hidup
12	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	14,80	17,30	20,19	1,27	0,35	Dinas Lingkungan Hidup
13	Persentase cakupan area pelayanan	%	31,13	80,00	81	83,00	85	Dinas Lingkungan Hidup
14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	85,19	83,99	73	80,00	75,12	Dinas Lingkungan Hidup
15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten / kota	nilai	73,02	73,08	73	80,00	Tidak ada penilaia	Dinas Lingkungan Hidup

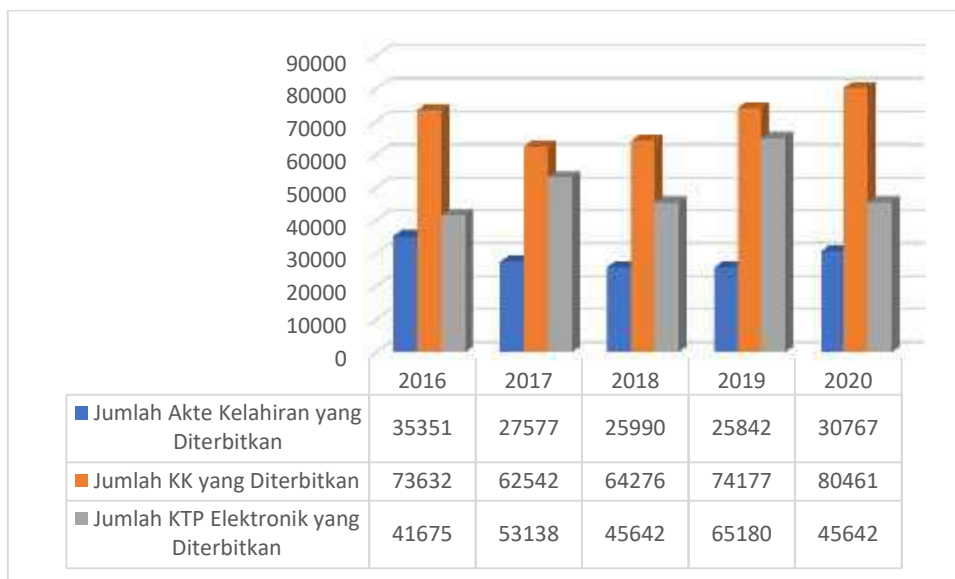
N O	BIDANG URUSAN/INDIKATO R	SATUAN	Realisasi					PD Penanggun g Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
							n Program Adipura Tahun 2020	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2021

VI. *Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasanya urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan yang termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren. Lebih lanjut ditegaskan bahwa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan pasal 12 ayat 2 undang-undang dimaksud.

Salah satu administrasi yang harus dimiliki penduduk adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang merupakan sistem pencatatan KTP terintegrasi berbasis teknologi informasi. Berikut disajikan data jumlah akte kelahiran, KK dan KTP elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kota Padang dari tahun 2016-2020:



Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2-40 Jumlah Akte kelahiran, KK dan KTP Elektronik yang Diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Tahun 2016-2020

Kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2-61 Kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2016-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	rasio	98,50	98,59	98,71	99,24	97,40	Dinas Dukcapil
2	Rasio bayi berakte kelahiran	rasio	9,47	12,76	15,92	18,85	20,25	Dinas Dukcapil
3	Rasio pasangan berakte nikah	rasio	7,08	8,31	9,91	11,47	48,43	Dinas Dukcapil
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	100	100	100	Dinas Dukcapil
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,50	98,59	98,71	99,24	97,40	Dinas Dukcapil
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	20,24	21,23	23,62	25,48	88,38	Dinas Dukcapil

Sumber : Dinas Dukcapil Tahun 2021

VII. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kota Padang saat ini berbasis RT dan RW yang berada dibawah koordinasi kecamatan dan kelurahan. Wadah pemberdayaan yang sudah berkembang diantaranya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), badan keswadayaan masyarakat (BKM), majelis taklim dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Urusan pemberdayaan berada pada beberapa instansi terkait tergantung bentuk dan jenis kegiatannya. Berikut kondisi pemberdayaan masyarakat Kota Padang dari tahun 2016 sampai dengan 2020:

Tabel 2-62 Pemberdayaan Masyarakat Kota Padang 2016-2020

No.	Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Kota Padang	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100	100	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	6	6	6	6	6
3	Persentase LPM aktif	100	100	100	100	100
4	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100
5	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Tahun 2021

VIII. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tingkat kepadatan penduduk Kota Padang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Akan tetapi sebaran kepadatan penduduk tidak merata dimana konsentrasi penduduk masih di pusat kota, yaitu Kecamatan Padang Barat,

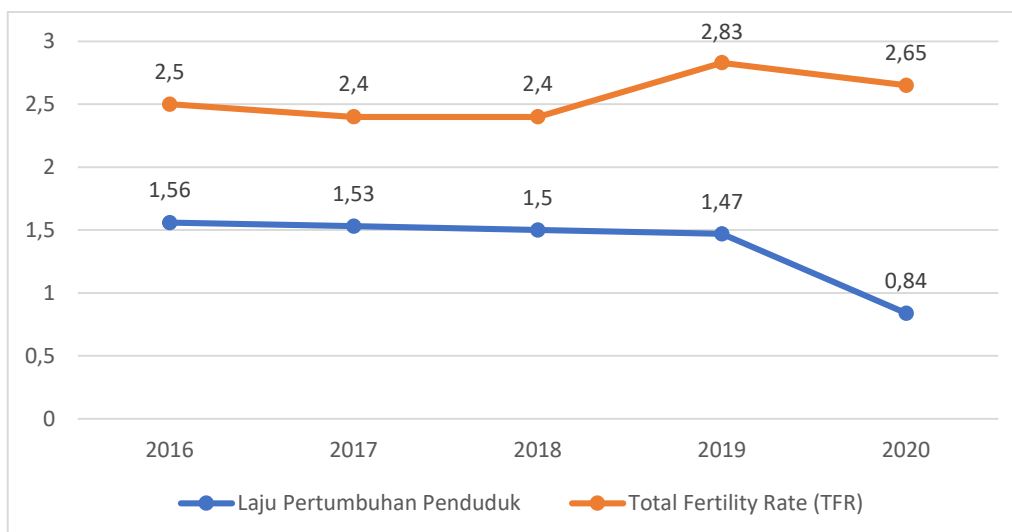
Padang Timur, Padang Utara, Padang Selatan dan Nanggalo. Sementara kecamatan Koto Tangah walaupun memiliki populasi penduduk terbesar namun karena luas wilayahnya sangat luas sehingga kepadatannya masing tergolong rendah.

Tabel 2-63 Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km2	Kepadatan Penduduk (jiwa /km2)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Bungus Teluk Kabung	100,78	245	247	250	252	272
2	Lubuk Kilangan	85,99	634	644	654	663	669
3	Lubuk Begalung	30,91	3860	3923	3985	4045	3966
4	Padang Selatan	10,03	5934	5957	5978	5999	6081
5	Padang Timur	8,15	9732	9751	9768	9786	9540
6	Padang Barat	7,00	6566	6573	6579	6586	6137
7	Padang Utara	8,08	8741	8762	8781	8801	6828
8	Nanggalo	8,07	7515	7572	7628	7683	7253
9	Kuranji	57,41	2509	2555	2601	2645	2545
10	Pauh	146,29	480	492	504	515	425
11	Koto Tangah	232,25	801	817	833	848	852

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Beberapa indikator pengendalian penduduk Kota Padang antara lain laju pertumbuhan penduduk, Total Fertility Rate dan aspek pengendalian penduduk dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021 (Data diolah)

Gambar 2-41 Indikator pengendalian penduduk Kota Padang

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Padang tetap menjadi perhatian sampai saat ini, dengan tujuan pengendalian kependudukan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga. Sebagian besar akseptor perempuan usia produktif yang pernah kawin, sebagian besar menggunakan suntikan sebagai alat kontrasepsi. Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Padang 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-64 Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan Di Kota Padang 2020

No	Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB aktif						
			IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil
1	Bungus Teluk Kabung	4.000	99	130	25	19	233	1639	350
2	Lubuk Kilangan	8349	610	259	16	414	422	2158	1126
3	Lubuk Begalung	11650	957	201	32	146	281	3830	1620
4	Padang Selatan	7219	487	176	63	133	649	2391	529
5	Padang Timur	8682	976	593	74	365	177	2287	707
6	Padang Barat	4499	518	204	27	89	183	1491	349
7	Padang Utara	6514	577	150	33	184	279	2174	1144
8	Nanggalo	6683	593	212	31	249	176	1986	941
9	Kuranji	10062	699	290	26	311	455	4258	1110
10	Pauh	7796	353	215	11	241	278	2921	697
11	Koto Tengah	26930	3021	628	58	817	1729	7424	5090
TOTAL		102384	8890	3058	396	2968	4862	13663	66396

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2-65 Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2016-2020**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,37	1,29	1,29	1,47	0,84	DP3AP2KB
2	Total Fertility Rate (TFR)	anak	2,50	2,40	2,4	2,83	2,65	DP3AP2KB
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 aspek	dokumen	2,00	2,00	1	0,00	0	DP3AP2KB
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	11	12	12	12	12	DP3AP2KB
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	angka	-	7,00	7	7,00	7,00	DP3AP2KB
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	angka	-	1,00	1	3,00	0	DP3AP2KB
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	angka	2,80	2,80	2,8	2,80	2,80	DP3AP2KB
8	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	angka	54,75	61,98	65,68	62,28	64,85	DP3AP2KB
9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0,28	0,1	0,1	0,1	0,1	DP3AP2KB
10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	18,57	20,24	16,8	20,55	22,92	DP3AP2KB
11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	10,89	10,03	11,05	26,83	25,91	DP3AP2KB
12	Persentase tingkat keberlangsungan	%	21,82	38,42	31,33	37,98	54,2	DP3AP2KB

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
	pemakaian kontrasepsi							
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	72,10	72,03	70,52	69,01	70,16	DP3AP2KB
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	64,23	71,33	66,14	66,98	64,2	DP3AP2KB
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	57,88	57,07	57,27	58,76	50,87	DP3AP2KB
16	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	angka	8,00	8,00	8	8,00	8,00	DP3AP2KB
17	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	angka	48,00	66,00	65,5	73,00	73,00	DP3AP2KB
18	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100,00	100,00	100	100,00	100,00	DP3AP2KB
19	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	64,67	67,31	62,23	64,60	65,00	DP3AP2KB
20	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	18,9	18,9	28,84	27,88	28,84	DP3AP2KB
21	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota	%	1,21	0,88	1,46	1,88	2	DP3AP2KB
22	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	%	1,21	0,88	1,46	1,88	2	DP3AP2KB
23	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan	%	100	100	100	100	100	DP3AP2KB

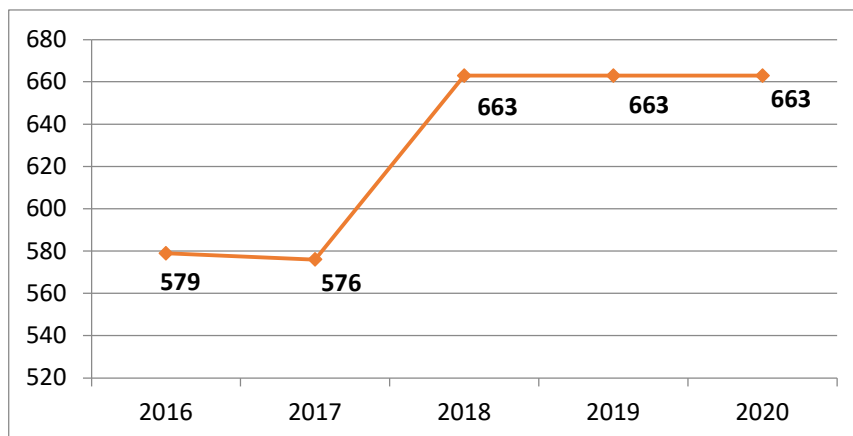
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
	memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan							
24	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	angka	30	39	40	45	50	DP3AP2KB
25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	22,00	23,00	23,5	24,00	24,00	DP3AP2KB
26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,01	0,02	0,02	0,35	0,04	DP3AP2KB

Sumber : Dinas P3AP2KB Tahun 2021

IX. *Urusan Perhubungan*

Urusan perhubungan tidak terlepas dari sektor transportasi. Transportasi menjadi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal dengan mengikuti perkembangan untuk memberikan pelayanan transportasi yang terbaik dan ramah terhadap lingkungan. Pemanfaatan Trans Padang sebagai transportasi massal di Kota Padang menjadi salah satu solusi dari permasalahan transportasi di perkotaan. Sampai dengan tahun 2020 ini Trans Padang sudah melayani 2 koridor yakni koridor 1: Pasar Raya – Lubuk Buaya dan koridor 2: Teluk Bayur – Terminal Type A Anak Aia.

Untuk mengetahui sejauh mana pembangunan di bidang perhubungan ini, jumlah kecelakaan lalu lintas digunakan sebagai ukuran keberhasilan. Semakin sedikit jumlah kecelakaan lalu lintas terjadi, maka pembangunan di bidang perhubungan sudah berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Padang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, terdapat 663 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota Padang. Hal ini perlu mendapat perhatian Pemerintah kota untuk melakukan evaluasi kelayakan jalan dan kendaraan. Selain itu tindakan tegas dan pengawasan yang ketat terhadap pengguna jalan oleh aparat kepolisian juga diperlukan, agar warga masyarakat lebih tertib dalam berkendara di jalan raya.



Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2-42 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2016-2020

Terkait dengan kelancaran dan kenyamanan lalu lintas di Kota Padang, masih banyak terjadi gangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Hal ini terjadi disebabkan antara lain karena banyaknya titik – titik rawan kemacetan khususnya pada saat jam-jam sibuk (peak hours). Peak hours terjadi pada pukul 06.00 – 08.00 di pagi hari, pukul 12.00 – 14.00 di siang hari dan pukul 16.00 – 18.00 WIB pada sore hari. Titik – titik rawan kemacetan ini berada pada lokasi :

1. Kawasan Pasar Lubuk Buaya
2. Kawasan Simpang Jembatan Babuai Mata Air Padang
3. Kawasan Simpang Balai Baru By Pass
4. Kawasan Ketaping By Pass
5. Kawasan BPJS
6. Kawasan Simpang AKPER Siteba
7. Kawasan Simpang Tabing
8. Kawasan Simpang Durian Taruang
9. Kawasan Simpang SMA 6 Padang
10. Kawasan Trans Mart
11. Kawasan Basko
12. Kawasan Plaza Andalas
13. Kawasan Kampung Kalawi
14. Kawasan Simpang Anduring
15. Kawasan Khatib Sulaiman
16. Kawasan Jati (Perintis Kemerdekaan)

Kecepatan rata-rata di jalan utama pada jam sibuk (survey tahun 2017) sebesar 31,65 Km/jam. Kinerja urusan Perhubungan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-66 Kinerja urusan Perhubungan Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Uji KIR angkutan umum	angka	11192	13681	14.585,00	9340	13017	Dinas Perhubungan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
2	Jumlah dermaga	angka	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
3	Jumlah uji kir angkutan umum	angka	11192	13681	14.585	9340	13017	Dinas Perhubungan
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	angka	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
5	Persentase layanan angkutan darat (load factor)	%	69,20	69,69	40,2	41,00	21,0	Dinas Perhubungan
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	68,65	87,00	91	75,00	90	Dinas Perhubungan
7	Pemasangan Rambu-rambu	%	50,00	40,00	26	32,00	11,9	Dinas Perhubungan
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Perhubungan
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	angka	97230810	89780379	92.436.000	92485000	46815000	Dinas Perhubungan
10	Jumlah orang melalui dermaga	angka	61995	61995	62.005	62014	48000	Dinas Perhubungan
11	Jumlah barang melalui dermaga	angka	1379	1381	1.381,00	1380	1384	Dinas Perhubungan

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2021

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Penerangan Jalan Umum (PJU) termasuk ke dalam urusan Perhubungan. PJU adalah singkatan dari Penerangan Jalan Umum yang dapat juga diartikan sebagai lampu penerangan yang dipasang untuk kepentingan umum/bersama/bersifat publik. Ketersediaan PJU akan memberikan kontribusi penting dalam pemenuhan fasilitas kota. Secara umum pelayanan PJU Kota Padang baru hanya melayani pada ruas jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, sebahagian besar lokal sekunder. Sementara pada ruas jalan lingkungan masih menggunakan lampu swadaya yang belum memenuhi standar lampu PJU dan belum terakomodir pada ID pelanggan PJU.

Hingga tahun 2020, jumlah sambungan PJU yang ada di Kota Padang ± 40.134 titik diluar lampu taman dengan rincian sebagai berikut:

1. Sambungan yang memiliki ID Pelanggan : 18.015 titik
2. Sambungan Non ID Pelanggan : 17.170 titik
3. Tanpa ID pelanggan : 3.257Titik
4. Lampu swadaya : 13.913 Titik

Dari jumlah sambungan yang ada, kinerja pelayanan PJU Kota Padang baru mencapai 66,98 %, Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar wilayah di Kota Padang belum terlayani oleh PJU.

X. *Urusan Komunikasi dan Informatika*

Dalam rangka mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang telah melakukan pemasangan jaringan internet ke seluruh SKPD, 11 Kecamatan, 104 Kelurahan, 23 Puskesmas, 4 UPT dan 24 titik Wifi gratis di tempat publik.

Pemerintah Kota Padang memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://padang.go.id/>. Selain halaman utama, juga terdapat beberapa sub domain yang dikelola oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sub domain tersebut ada yang berupa aplikasi dan ada juga yang berupa halaman website dari masing-masing SKPD. Data dari halaman site dari masing-masing sub domain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-67 Alamat Sub Domain Pemerintah Kota Padang Tahun 2020

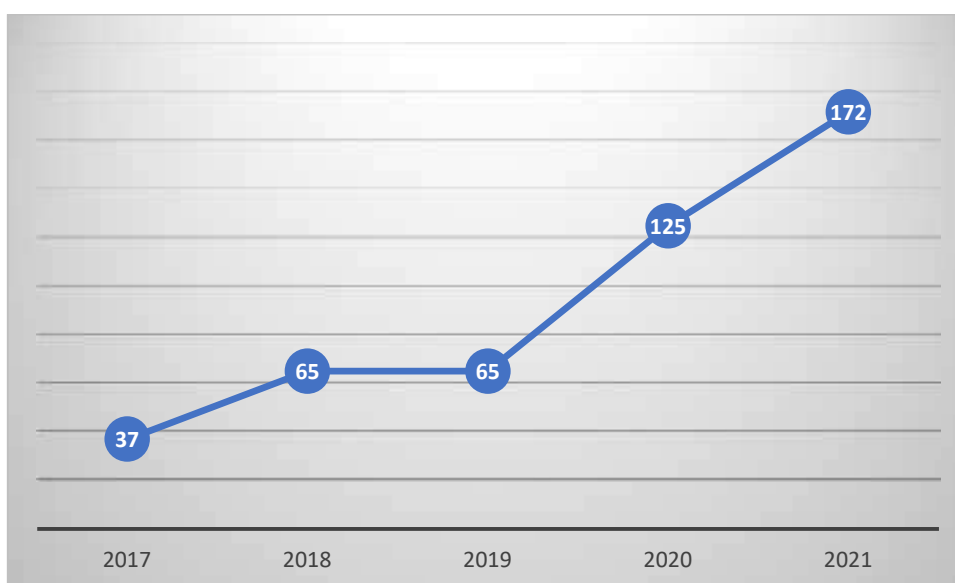
No	Laman Akses	Jenis
1	api.padangreport.padang.go.id.	Aplikasi
2	atcs.dishub.padang.go.id.	Aplikasi
3	atcs.padang.go.id.	Aplikasi
4	bphbtb.bapenda.padang.go.id.	Aplikasi
5	db.disnakerin.padang.go.id.	Aplikasi
6	eabsensi.padang.go.id.	Aplikasi
7	ekelurahan.padang.go.id.	Aplikasi
8	e-planning.padang.go.id.	Aplikasi
9	eplanning.padang.go.id.	Aplikasi
10	geoportal.padang.go.id.	Aplikasi
11	helpdesk.padang.go.id.	Aplikasi
12	jdihi.padang.go.id.	Aplikasi
13	lakisip.padang.go.id.	Aplikasi
14	lpse.padang.go.id.	Aplikasi
15	mail.padang.go.id.	Aplikasi
16	mantra.padang.go.id.	Aplikasi
17	saporancak.padang.go.id.	Aplikasi
18	simbangda.padang.go.id.	Aplikasi
19	simdkp.padang.go.id.	Aplikasi
20	simpeg.bkd.padang.go.id.	Aplikasi
21	skp.padang.go.id.	Aplikasi
22	smartreport.padang.go.id.	Aplikasi
23	surat.padang.go.id.	Aplikasi
24	umkm.padang.go.id.	Aplikasi
25	vidcon.padang.go.id.	Aplikasi
26	vipreport.padang.go.id.	Aplikasi
27	vr.padang.go.id.	Aplikasi
28	www.ekelurahan.padang.go.id.	Aplikasi
29	databasekukm.diskop.padang.go.id.	Aplikasi

No	Laman Akses	Jenis
30	edatabase.padang.go.id.	Aplikasi
31	e-regkontrak1.padang.go.id.	Aplikasi
32	e-regkontrak.padang.go.id.	Aplikasi
33	fasosum.padang.go.id.	Aplikasi
34	ppid.padang.go.id.	Aplikasi
35	ppidp.padang.go.id.	Aplikasi
36	rekonsiupti.padang.go.id.	Aplikasi
37	siapkeren.disdag.padang.go.id.	Aplikasi
38	sikat-pel.dlh.padang.go.id.	Aplikasi
39	silatih.disnakerin.padang.go.id.	Aplikasi
40	simpelpedas.padang.go.id.	Aplikasi
41	sipangka.dishub.padang.go.id.	Aplikasi
42	sipedas.disnakerin.padang.go.id.	Aplikasi
43	siskom.diskominfo.padang.go.id.	Aplikasi
44	corona.padang.go.id	Aplikasi
45	balapan.padang.go.id.	Website
46	bapenda.padang.go.id.	Website
47	bappeda.padang.go.id.	Website
48	bkd.padang.go.id.	Website
49	bnk.padang.go.id.	Website
50	bpbd.padang.go.id.	Website
51	bpka.padang.go.id.	Website
52	dinkes.padang.go.id.	Website
53	dinsos.padang.go.id.	Website
54	disdik.padang.go.id.	Website
55	disdukcapil.padang.go.id.	Website
56	dishub.padang.go.id.	Website
57	diskominfo.padang.go.id.	Website
58	disnakerin.padang.go.id.	Website
59	dispertanian.padang.go.id.	Website
60	dispusip.padang.go.id.	Website
61	dpmptsp.padang.go.id.	Website
62	info.padang.go.id.	Website
63	inspektorat.padang.go.id.	Website
64	ldpi.disdik.padang.go.id.	Website
65	lubeg.padang.go.id.	Website
66	luki.padang.go.id.	Website
67	mediacenter.padang.go.id.	Website
68	padang.go.id.	Website
69	padangselatan.padang.go.id.	Website
70	padangutara.padang.go.id.	Website
71	pariwisata.padang.go.id.	Website
72	pauh.padang.go.id.	Website
73	portal.padang.go.id.	Website
74	rsud.padang.go.id.	Website
75	satpolpp.padang.go.id.	Website
76	ulakkarangselatan.padang.go.id.	Website

No	Laman Akses	Jenis
77	belakangtangsi.padang.go.id.	Website
78	bpkad.padang.go.id.	Website
79	bpmptsp.padang.go.id.	Website
80	db.ldpi.disdik.padang.go.id.	Website
81	dinasperdagangan.padang.go.id.	Website
82	dlh.padang.go.id.	Website
83	humas.padang.go.id.	Website
84	jatibawahbuluh.padang.go.id.	Website
85	metrologi.disdag.padang.go.id.	Website
86	organisasi.padang.go.id.	Website
87	pemerintahan.padang.go.id.	Website
88	puskesmasandalas.padang.go.id.	Website
89	puskesmasbungus.dinkes.padang.go.id.	Website
90	timur.padang.go.id.	Website

Sumber: Dinas Kominfo Kota Padang Tahun 2021

Dalam upaya mewujudkan program *Smart City*, salah satunya Pemerintah Kota Padang telah menyediakan akses internet gratis mulai dari tahun 2017 bagi masyarakat umum di kantor-kantor pemerintahan, rumah ibadah dan tempat umum lainnya. Pemasangan titik-titik wifi mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir.



Sumber : Dinas Kominfo Kota Padang, 2021

Gambar 2-43 Jumlah Titik-Titik Wifi Gratis Tahun 2017-2021

Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-68 Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

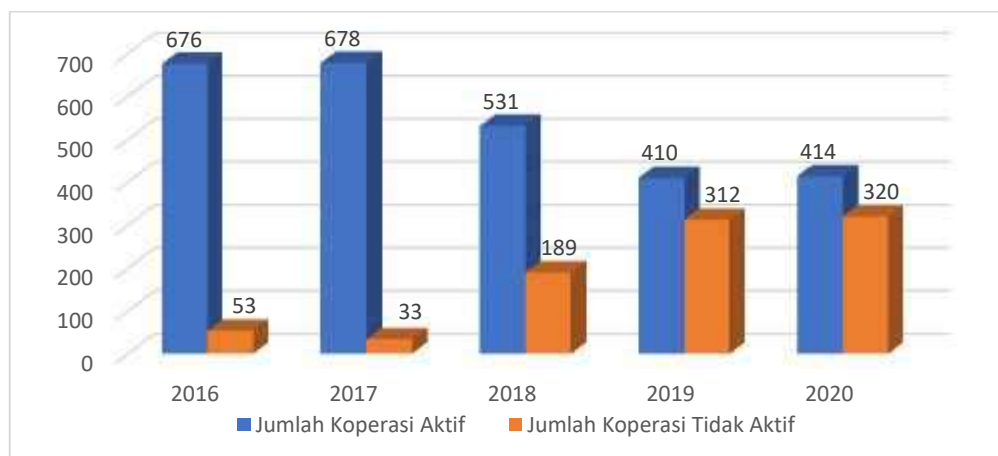
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Cakupan layanan jaringan komunikasi	%	-	50	70	75	100	Dinas Kominfo
2	Persentase penanganan permasalahan jaringan	%	-	100	100	100	100	Dinas Kominfo
3	Cakupan integrasi aplikasi/sistem informasi	%	-	28	34	50	55	Dinas Kominfo
4	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	-	21,00	46,00	44,23	56,73	Dinas Kominfo
5	Persentase penanganan serangan siber	%	-	70	100	100	100	Dinas Kominfo
6	Jumlah akses masyarakat terhadap informasi publik secara digital	angka		750 view	16873 view	109.381 view	876 views*	Dinas Kominfo

Sumber : Dinas Kominfo Tahun 2021

* Website padang.go.id sempat mencapai viewers di atas 800 orang hingga tengah tahun 2020. Namun karena perlu diupgrade nya website tersebut, pada Juni 2020 dilakukan upgrade website dan diperbaharui, akhirnya tampilan website menjadi berubah. Pencatatan jumlah capaian pengunjung website kembali dimulai dari awal. Dan pada akhir tahun tercatat jumlah kunjungan mencapai 76 viewers

XI. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan Salah satu penunjang perekonomian masyarakat, dalam perekonomian mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Meskipun belum sepenuhnya berkembang, namun koperasi di Kota Padang masih menunjukkan eksistensinya dalam meningkatkan pergerakan perekonomian mikro daerah. Berikut disajikan data perkembangan koperasi aktif dan tidak aktif tahun 2016-2020.



Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2-44 Jumlah Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif di Kota Padang Tahun 2016-2020

Tidak semua koperasi yang aktif di Kota Padang adalah koperasi yang sehat. Kriteria koperasi yang sehat diukur dari tujuh aspek koperasi sehat yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek management, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan terakhir aspek jati diri koperasi.

Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah koperasi tidak aktif, yang ini merupakan akumulasi dari koperasi aktif yang tidak sehat pada tahun – tahun sebelumnya yang disebabkan oleh kurangnya modal yang di kelola, macetnya pembayaran kredit dari anggota, belum profesionalnya pengelola koperasi dalam mengurus koperasinya.

Pelayanan Pembinaan usaha mikro, Fasilitas IUMKM, Bantuan Peralatan Produksi UMKM, Pelatihan UMKM, Temu Kemitraan dan Fasilitas Promosi UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2-69 Pelayanan di Bidang Pemberdayaan UMKM Tahun 2016-2020

No	Pelayanan Bidang UMKM	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan	4.167	7.120	10.211	10.211	10.700
2	Jumlah IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) yang telah difasilitasi	2.055	2.497	1.691	1.360	1.010
3	Jumlah Temu Bisnis / Kemitraan yang telah dilakukan	50	50	76	100	105
4	Jumlah Fasilitas Pendaftaran Merk	-	22	25	20	5
5	Jumlah Fasilitas Sertifikasi Halal	-	5	50	55	40
6	Jumlah Fasilitas Sertifikat PIRT	-	47	70	75	75
7	Jumlah Fasilitas Akses Permodalan Usaha mikro yang dilakukan	512	605	472	1.468	616

Sumber Data: Dinas Koperasi dan UKM 2021

Peningkatan Jumlah Milenial Entrepreneur diukur dari Usaha Mikro Kecil yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM.

Tabel 2-70 Jumlah Milenial Entrepreneur yang difasilitasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Usaha Mikro Kecil yang telah difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM.	2.617	3.226	2.384	3.078	1.851

Sumber Data: Dinas Koperasi dan UKM 2021

Kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

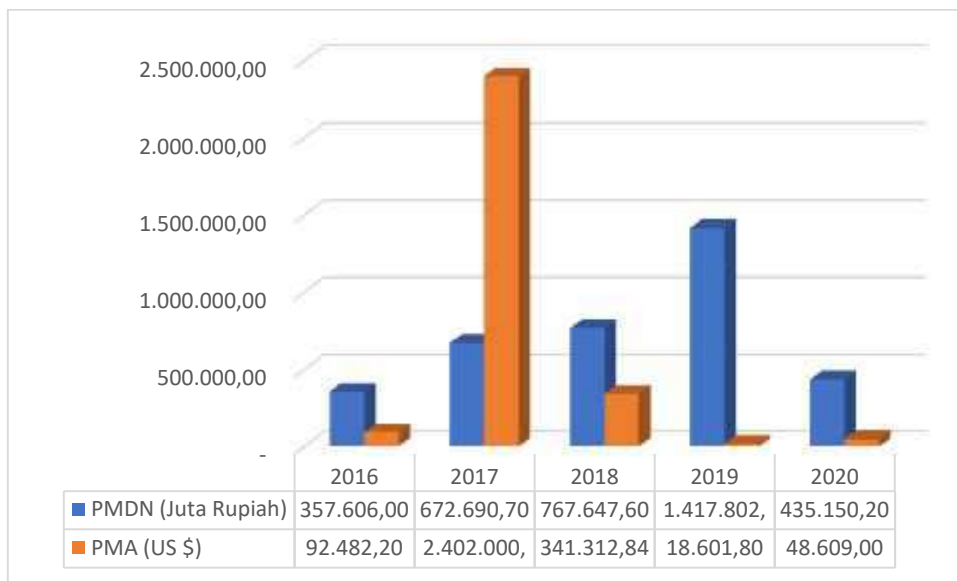
Tabel 2-71 Kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase koperasi aktif	%	92,72	95,22	94,23	56,00	56,40	Dinas Koperasi dan UKM
2	Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan	angka	4.167	7.120	10.211	10.211	10.700	Dinas Koperasi dan UKM

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021

XII. Urusan Penanaman Modal

Iklim investasi di Kota Padang menunjukkan ‘trend positif’ pada tahun 2017. Kota Padang kembali meraih penghargaan “*Indonesia Attractiveness Award 2017*” sebagai kota yang potensial untuk pengembangan investasi. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar Kota Padang untuk dapat menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk turut memajukan perekonomian daerah. Kemudahan berinvestasi di Kota Padang tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Padang untuk menyederhanakan pelayanan perijinan serta mengedepankan pelayanan yang bersih dan bebas pungli.



Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2-45 Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2016 - 2020

Dari gambar diatas, realisasi penanaman modal baik yang bersumber dari dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing dari tahun 2016 s/d 2020 cenderung meningkat tetapi fluktuasinya sangat tajam, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya iklim investasi baik di daerah maupun di Nasional serta perlindungan hukum kepada investasi yang telah ditanamkan oleh investor. Investasi menurun cukup tajam di tahun 2020 akibat Covid 19 yang melanda

secara global. Untuk itu Pemerintah Kota Padang akan terus berupaya untuk menjaga iklim investasi yang kondusif, memberikan kemudahan investasi, perlindungan hukum terhadap investasi yang ditanamkan serta melakukan peningkatan pelayanan investasi di Kota Padang, baik itu kepada investor dalam negeri maupun dari luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, maka sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Jenis-jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan kewenangan adalah 9 urusan/sektor Jenis Pelayanan Perizinan yaitu :

1. Urusan/Sektor Kelautan dan Perikanan
2. Urusan/Sektor Pertanian
3. Urusan/Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Urusan/Sektor Perindustrian
5. Urusan/Sektor Perdagangan
6. Urusan/Sektor Transportasi
7. Urusan/Sektor Kesehatan
8. Urusan/Sektor Pariwisata
9. Urusan/Sektor Ketenagakerjaan

dan 4 Jenis Non Perizinan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Tercatat Ormas
3. Rekomendasi Distributor Obat Hewan
4. Rekomendasi Bibit Tanaman

XIII. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Beberapa tahun terakhir istilah generasi milenial (*millennials generation/ millennials/ generasi Y*) merupakan bagian dari terminologi yang banyak diperbincangkan, sering terdengar, bahkan sudah masuk dalam percakapan masyarakat sehari-hari, tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia.

Dalam berbagai kajian ilmu sosial, generasi milenial merupakan kelompok demografis yang lahir antara tahun 1981 hingga tahun 2000. Generasi milenial memiliki keunikan menonjol dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dan sebagai generasi pertama yang melihat internet sebagai sebuah penemuan hebat yang dapat mengubah segalanya. Generasi milenial lahir dan dibesarkan pada masa teknologi sudah canggih, dengan bantuan teknologi, mereka mahir dalam

mengasimilasi informasi dengan cepat, meraih pengetahuan yang lebih luas, dan kemampuan tinggi.

Dalam menumbuhkan kembangkan kreatifitas kepemudaan digenerasi milineal diperlukan sarana dan prasarana pendukung baik tingkat kota dan disetiap kecamatan berupa pusat kegiatan kepemudaan (*youth center*). *Youth center* harus hadir sebagai suatu solusi kepemudaan (berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda) dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya/kearifan lokal.

Dengan memberikan perhatian pada isu dan dinamika kepemudaan saat ini, maka sama dengan menyelamatkan masa depan bangsa. Untuk bidang olah raga kegiatan yang dilakukan masih pada tahap mengikutsertakan pemuda yang berbakat olah raga pada kejuaraan provinsi dan nasional.

Tabel 2-72 Kondisi Organisasi Kepemudaan dan Olah raga di Kota Padang Tahun 2016–2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cabang olahraga	Unit	35	35	37	37	37
2	Jumlah organisasi pemuda	Unit	34	34	34	34	34
3	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	15	14	14	14	14
4	Jumlah sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	unit	277	283	296	303	305
	Milik Pemerintah Kota	Unit	65	67	70	73	75
	Milik Masyarakat	Unit	139	141	149	153	151
	Milik Swasta	Unit	73	75	77	77	79

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2021

XIV. *Urusan Statistik*

Di Kota Padang terdapat instansi vertikal yang khusus menangani penyediaan data dan informasi pembangunan, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Setiap tahun, BPS mempublikasikan buku Kota Padang Dalam Angka. Namun kedepan, bukan hanya dari aspek ketersediaan data saja yang dipentingkan, tetapi juga kualitas data sesuai kebutuhan dan indikator yang semakin berkembang sesuai perkembangan pembangunan dan kemajuan zaman. Data yang berkualitas adalah data yang dipercaya, data yang valid dan data terkini. Perencanaan tanpa data adalah mustahil, sehingga pendataan perlu mendapat perhatian lebih baik lagi.

Dalam upaya memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mendukung pembangunan nasional, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta

Daerah. Menyikapi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ini, Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan aturan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kota Padang, yaitu:

1. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
2. Keputusan Wali Kota Padang Nomor 154 Tahun 2021 tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Padang Tahun 2021.
3. Keputusan Wali Kota Padang Nomor 155 Tahun 2021 tentang Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Padang Tahun 2021

Kinerja urusan Statistik Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2-73 Kinerja urusan Statistik Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah produk statistik sektoral	dokumen		1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	Dinas Kominfo
2	Buku "Kota Padang Dalam Angka"	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kominfo

Sumber : Dinas Kominfo Tahun 2021

XV. Urusan Persandian

Secara umum, urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan atau melindungi informasi. Dalam upaya untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien, Pemerintah Kota Padang menerapkan tanda tangan elektronik. Dengan tanda tangan elektronik ini, diharapkan terjadi pemangkasan proses birokrasi, dan juga pemangkasan anggaran dalam pelayanan dokumen administrasi.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor : 268.a/Diskominfo-Pdg/2021 tentang Optimalisasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Pada Naskah Dinas tanggal 24 Agustus 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor : 050.227.a/Diskominfo-Pdg/2021 tentang Penggunaan Surat Eletronik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang tanggal 10 September 2021 sebagai salah satu langkah strategis menyelenggarakan jaringan komunikasi sandi berupa email Sanapati sebagai alat komunikasi persuratan elektronik kegiatan kedinasan bagi Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

XVI. Urusan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi

terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari penyelenggaraan tampilan festival seni dan budaya dimana dari tahun ketahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebanyak 59 tampilan dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 68 tampilan, sedangkan pada tahun 2020 penampilan festival seni dan budaya mengalami penurunan yaitu sebanyak 17 tampilan, hal ini disebabkan karena terjadinya Pandemi Covid-19. Gambaran kegiatan kebudayaan di Kota Padang selama kurun waktu 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2-74 Kegiatan kebudayaan di Kota Padang Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan tampilan festival seni dan budaya	Tampilan	59	60	60	68	17
2	Sarana tempat penyelenggaraan seni dan budaya	lokasi	135	146	157	160	163
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	62	62	62	62	64

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Padang Tahun 2021

XVII. Urusan Perpustakaan

Kota Padang memiliki 1 perpustakaan daerah yang berlokasi di kompleks GOR H. Agus Salim Padang yang merupakan eks studio Susi FM. Gedung ini merupakan aset dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan status pinjam pakai. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai SKPD pelaksana urusan perpustakaan memiliki 2 mobil perpustakaan keliling dan 1 kendaraan roda 3.

Tabel 2-75 Perkembangan Perpustakaan di Kota Padang tahun 2016-2020

NO	Uraian	SATUAN	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	6656,00	9984,00	18.769	0,030	3,40
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	23207 eks	25095 eks	28634 eks	0,289	28,90
3	Jumlah perpustakaan yang terkelola dengan baik	angka	60	60	70	42	59
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	angka	6656,00	9984,00	18.769	19245,00	21565
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	angka	5800	5955	8.059	10059	10059

NO	Uraian	SATUAN	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	angka	3	2	2	2	2
7	Jumlah penggiat literasi	Kelompok	4	6	8	9	13

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Tahun 2021

Di lihat dari rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun dan jumlah koleksi judul buku di perpustakaan, jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa minat baca dari masyarakat Kota Padang cukup tinggi. Hanya saja jumlah tersebut kurang didukung dengan sarana dan prasarana perpustakaan serta jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat.

Menurut UNESCO, literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata terutama dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks diperoleh oleh siapa dan dari siapa. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berupaya meningkatkan pembudayaan kegiatan membaca dengan memberdayakan para penggiat literasi yang berperan sebagai fasilitator, provider, dan katalisator peningkatan budaya literasi di keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat. Penggiat literasi adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola gerakan literasi di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Data penggiat literasi Kota Padang dari tahun 2016 sampai tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 penggiat literasi hanya sebanyak 4 kelompok Taman Bacaan Masyarakat (TBM), kemudian pada tahun 2017 menjadi 6 kelompok TBM, tahun 2018 menjadi 8 kelompok TBM, tahun 2019 meningkat menjadi 9 kelompok TBM dan pada tahun 2020 menjadi 13 kelompok TBM. Dari data tersebut terlihat bahwa jika dibandingkan data penggiat literasi pada tahun 2016 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 225 %.

XVIII. *Urusan Kearsipan*

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun kebelakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemeritahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan secara baku.

Dari data tahun 2020, belum seluruh SKPD melaksanakan penerapan arsip secara baku. Kurang tertibnya penanganan arsip dan kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan ilmu kearsipan di SKPD menjadi permasalahan hampir di seluruh SKPD.

Untuk mengatasi permasalahan kearsipan ini, Perangkat Daerah perlu diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (Filing Cabinet, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Kinerja urusan Kearsipan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2-76 Kinerja urusan Kearsipan Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	0,00	5,76	-	38,00	35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	-	1 kegiatan	-	2 kegiatan	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu komoditas yang dikembangkan oleh Kota Padang. Hal ini dikarenakan struktur daerah kota Padang yang sesuai untuk mengembangkan usaha perikanan dan kelautan. Potensi subsektor perikanan laut merupakan lapangan usaha yang mempunyai prospek sangat bagus untuk dikembangkan. Menurut beberapa penelitian, laut di pantai Padang memiliki komunitas ikan tuna dan kerapu terbaik yang sangat diminati importir dari China, Jepang dan Korea.

Kota Padang juga ditetapkan sebagai salah satu kawasan minapolitan di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010. Kawasan Minapolitan Kota Padang adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang berbasis perikanan tangkap dengan kawasan intinya adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus.

Jumlah produksi perikanan tangkap di Kota Padang juga menurun yang berasal dari perikanan laut dan perairan umum. Di tahun 2018 jumlah produksi perikanan tangkap sebanyak 20.193,77 ton sedangkan di tahun 2017 jumlahnya 21.118,17 ton.

Tabel 2-77 Produksi Perikanan Tangkap Kota Padang Tahun 2016-2020 (Ton)

Tahun	Perikanan Laut	Perairan Umum	Jumlah
2016	20.612,80	304,47	55.756,07

2017	20.815,00	303,17	21.118,17
2018	19.896,30	297,67	20.193,97
2019	20.252,60	7,28	20.259,88
2020	19.539,60	7,27	19.546,87

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Kinerja urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-78 Kinerja urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Produksi perikanan	%	100,57	98,09	95,75	92,56	80,41	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Konsumsi ikan	%	102,36	101,82	100,35	100,54	92,15	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	89,04	89,02	90	91,11	89,28	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	88,27	83,47	80,13	80,00	81,04	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	125	125	123	125	116,07	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Nilai tukar nelayan	%	105,24	107,99	105,88	99,08	94,94	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Persentase Peningkatan Industri Hulu Sektor Kelautan Perikanan	%	13,67	14	63,67	66,67	57,73	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Persentase Peningkatan Industri Hilir Sektor Kelautan Perikanan	%	7,35	7,35	6,9	6,8	6,75	Dinas Kelautan dan Perikanan
9	Persentase Peningkatan Pendapatan Nelayan	%	1,06	1,35	1,27	1,11	2	Dinas Kelautan dan Perikanan
10	Persentase Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan	%	1,74	1,78	1,75	2,01	4,5	Dinas Kelautan dan Perikanan
11	Persentase Peningkatan Pendapatan	%	2,77	3,11	2,98	4,54	5,87	Dinas Kelautan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
	Pengolah dan Pemasar Perikanan							dan Perikanan

Sumber : Dinas Kelautan dan Pangan Tahun 2021

II. Urusan Pariwisata

Sesuai hasil kesepakatan bersama Gubernur Sumatera Barat dengan 10 kepala daerah Kabupaten dan Kota dalam pengembangan kawasan wisata prioritas di Sumatera Barat, sudah ditetapkan 10 (sepuluh) kawasan pariwisata prioritas di Sumatera Barat. Kota Padang termasuk salah satu diantaranya, yaitu dengan objek wisata unggulan Gunung Padang yang ditetapkan untuk kawasan Wisata Bahari.

Tabel 2-79 Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis Kota Padang tahun 2016-2020

No	Jenis Objek Wisata	Satuan (Unit)	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Wisata alam	Lokasi	29	28	28	29	29
2	Wisata bahari	lokasi	37	37	37	37	37
3	Wisata budaya	Lokasi	1	1	1	1	1
4	Wisata sejarah	Unit	75	71	73	74	67
5	Wisata belanja	Lokasi	32	32	32	32	29
6	Wisata kuliner	Kawasan	9	9	9	9	9
	Jumlah wisata		183	178	180	182	182

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Padang Tahun 2021

Jumlah destinasi wisata sejarah di Kota Padang menempati urutan pertama dibanding destinasi wisata lainnya di Kota Padang. Pariwisata Kota Padang cukup diminati oleh wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat dari jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang sejak tahun 2016 jumlahnya terus meningkat. Begitu pun dengan aspek daya tarik wisata yang telah mengalami pertambahan di Kota Padang. Menurut survei yang dilakukan tahun 2020 lalu, dari tahun-tahun sebelumnya, terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap jumlah daya tarik wisata.

Kota Padang merupakan destinasi pariwisata dengan keragaman daya tarik wisata, sehingga cakupan terhadap jumlah daya tarik wisata pun mengalami pertambahan untuk kategori yang ada. Sedikitnya, telah terdata sebanyak 172 daya tarik wisata di Kota Padang yang mencakup 29 daya tarik wisata alam, 37 daya tarik wisata bahari (pantai dan kepulauan), serta 68 daya tarik wisata budaya (sejarah/kepurbakalaan) dan 38 wisata belanja dan kuliner. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2019 untuk kategori wisata sejarah dan wisata belanja.

Berdasarkan hasil survey Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat, Wisata sejarah sebelumnya ada 74 objek menurun menjadi 67 objek dikarenakan ada 7 (tujuh) objek wisata sejarah yang tidak ada lagi fisiknya

sehingga dihapuskan. Wisata belanja di tahun 2019 ada 32 objek menjadi 29 objek di tahun 2020 disebabkan 3 (tiga) objek wisata belanja tersebut sudah tutup.

Sektor kepariwisataan tidak terlepas dari dukungan sektor perhotelan. Tahun 2016 jumlah hotel sebanyak 77 dan pada tahun 2019 jumlah hotel sebanyak 115, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah hotel dan kamar yang ada di Kota Padang sehingga dapat menampung wisatawan domestik dan mancanegara untuk lebih lama tinggal di Kota Padang. Gambaran jumlah wisatawan, rata-rata lama tinggal wisatawan, jumlah hotel serta Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD di Kota Padang dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2-80 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota Padang Tahun 2016-2020

Tahun	Wisatawan (orang)	
	M mancanegara	Domestik
2016	58.903	3.632.820
2017	67.286	4.368.375
2018	71.054	5.076.581
2019	88.351	5.384.236
2020	21.660	2.562.966

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Padang Tahun 2021

Tabel 2-81 Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kota Padang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Domestik (Hari)	M mancanegara (Hari)
1.	2016	3.25	1.50
2.	2017	3.25	2.00
3.	2018	3.50	2.00
4.	2019	1.13	3.15
5.	2020	1.50	1.73

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Padang Tahun 2021

Tabel 2-82 Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD Kota Padang Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PAD Pariwisata	Total Realisasi PAD	% dari Total Realisasi PAD
2016	57.191.716.350	391.925.162.546	14,59%
2017	74.005.495.031	454.295.916.658	16,29%
2018	90.212.579.984	487.533.838.745	18,50%
2019	104.989.824.498	546.544.393.948	19,20%
2020	61.451.018.611	346.400.776.362	17.74%

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Padang Tahun 2021

Kinerja urusan Pariwisata Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-83 Kinerja urusan Pariwisata Tahun 2016-2020

N O	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Mancanegara	%	1,60	1,52	1,38	1,61	0,84	Dinas Parbud
	Kunjungan wisata Mancanegara	angka	58.903	67.286	71.054	88.351	21.660	Dinas Parbud
2	Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Nusantara	%	98,40	98,48	98,62	98,39	99,16	Dinas Parbud
	Kunjungan wisata Nusantara	angka	3.632.820	4.368.375	5.076.581	5384236	2.562.966	Dinas Parbud
3	Lama kunjungan Wisatawan Mancanegara	angka	2,61	4,21	4,3	3,15	1,73	Dinas Parbud
	Nusantara	angka	1,62	1,89	1,91	1,13	1,5	Dinas Parbud
4	PAD sektor pariwisata	Rp	57.191.781.800	74.409.705.231	90.132.462.479	104.989.824.498	61.451.018.611	Dinas Parbud
5	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	14,58	13,56	10,9	19,20	17,74	Dinas Parbud

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Padang Tahun 2021

III. Urusan Pertanian

Sektor pertanian bukan merupakan komoditi utama pembentuk pertumbuhan ekonomi di Kota Padang, namun kontribusi sektor pertanian cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian mencapai 5,41 persen, angka tersebut naik sebesar 0,13 persen dari tahun 2016 sebesar 5,27 persen.

Tabel berikut memperlihatkan luas panen, produksi dan produktivitas padi di Kota Padang.

Tabel 2-84 Luas Panen Produksi Padi dan Produktivitas Padi Kota Padang Tahun 2016 - 2020

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2016	16,594	90,645	NA

2017	17,826	99,018	NA
2018	18.022	100.111	NA
2019	15.186	86.541	5,70
2020	14.417	80.092	5,56

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Selain padi, lahan pertanian Kota Padang juga ditanami berbagai macam tanaman palawija, antara lain: ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Diantara berbagai tanaman palawija tersebut, ubi jalar merupakan palawija yang memiliki luas panen terbesar di Kota Padang sebagaimana pada berikut.

Tabel 2-85 Luas Panen, Hasil Per Hektar dan Produksi Padi dan Palawija Kota Padang Tahun 2020

Jenis Tanaman	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Hasil Per Hektar (Kw/Ha)
Padi	14385	80735	56
Palawija:	14450	175940	167,82
Jagung	23	86739	37,74
Ubi Kayu	26	209	20,49
Ubi Jalar	2	8239	41,11
Kacang tanah	14	18	12,48
Kedelai	-	-	-
Kacang Hijau	-	-	-

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Jenis tanaman buah-buahan di Kota Padang cukup beragam. Dari data di atas, luas panen dari yang terbesar adalah durian, rambutan, mangga, pisang, pepaya, nanas, jeruk. Sentra buah-buahan terbesar yaitu di Kecamatan Lubuk Kilangan, Pauh, Koto Tengah, Kuranji dan Bungus Teluk Kabung. Buah-buahan yang potensial untuk dikembangkan saat ini adalah Manggis karena memiliki daya saing dan nilai tambah yang cukup tinggi

Tabel 2-86 Luas Panen Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah (Ha) di Kota Padang, Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Pisang	Durian	Pepaya	Rambutan	Jeruk	Mangga	Nanas
1	Bungus Teluk Kabung	0,90	3,10	0,24	41,20	0,00	8,00	0,39
2	Lubuk Kilangan	2,64	87,00	0,11	8,32	0,00	1,89	-
3	Lubuk Begalung	0,79	8,00	0,02	0,57	0,00	2,15	-
4	Padang Selatan	1,80	29,18	0,23	33,00	0,04	3,50	-
5	Padang Timur	0,22	0,19	0,06	3,00	0,02	2,93	-
6	Padang Barat	0,00	0,00	0,01	0,12	0,00	0,05	-
7	Padang Utara	0,12	0,00	0,17	0,55	0,13	0,72	-
8	Nanggalo	0,70	0,27	0,78	8,45	0,02	1,10	0,04
9	Kuranji	0,32	7,55	0,79	8,85	0,25	2,50	0,46
10	Pauh	2,48	128,07	0,13	27,01	0,02	4,06	-
11	Koto Tengah	0,51	35,55	0,41	25,00	0,00	3,25	-
	Jumlah 2020	10,48	298,91	2,95	156,07	0,48	30,15	0,89
	2019	7,24	35,05	4,24	9,99	0,34	8,23	7,50
	2018	151.61	54,01	306.83	10.53	206,53	57.86	45.54
	2017	151,62	54	306,83	10,53	206,55	57,87	45,54
	2016	15,70	135,20	1,33	4,20	1,08	10,00	0,014

Sumber : Padang Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2-87 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Padang (Ton), Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Kulit Manis	Kopi	Karet	Pala	Cokelat	Pinang	Gambir	Kelapa	Cengkeh
1	Bungus Teluk Kabung	0,40	1,00	12,54	2,00	28,60	5,95	9,20	32,00	0,63
2	Lubuk Kilangan	-	1,51	5,20	0,30	53,70	1,10	-	2,60	0,54
3	Lubuk Begalung	0,85	1,26	4,24	1,46	19,20	2,40	-	2,60	-
4	Padang Selatan	-	-	-	2,80	24,30	8,00	-	52,22	-
5	Padang Timur	-	-	-	-	2,06	1,80	-	22,25	-
6	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Padang Utara	-	-	-	-	1,63	0,67	-	1,70	-
8	Nanggalo	-	-	-	-	5,02	2,43	-	9,56	-
9	Kuranji	9,25	5,50	21,31	2,88	53,50	8,26	-	66,61	2,64
10	Pauh	7,10	0,44	8,43	1,31	17,90	6,26	-	45,50	0,24
11	Koto Tengah	1,50	3,40	34,10	2,75	82,20	8,82	-	30,32	1,85
	Jumlah 2020	19,10	13,11	85,82	13,50	288,11	45,69	9,20	265,36	5,90
	2019	35,45	23,73	107,85	13,50	280,32	63,01	6,60	359,06	8,63
	2018	63,51	53,95	221,23	42,83	700,99	113,20	16,70	922,37	193,22
	2017	33,86	32,12	216,68	27,32	302,84	86,65	4,05	665,66	20,56
	2016	19,65	17,51	79,68	11,84	130,15	26,35	5,58	262,37	10,52

Sumber : Padang Dalam Angka Tahun 2021

Di sektor Perkebunan, jenis tanaman perkebunan yang dihasilkan di Kota Padang adalah kulit manis, kopi, karet, pala, coklat, pinang, gambir, kelapa, cengkeh dengan hasil produksi yang terbanyak pada tahun 2018 adalah kelapa yaitu 922,37 ton. Komoditi yang cukup tinggi nilai tambahnya yaitu kakao dan karet. Di Kec.Bungus Tl. Kabung telah berdiri pabrik mini coklat, bantuan pemerintah untuk Gapoktan dan sudah memproduksi aneka olahan coklat.

Dari data diatas, dapat dilihat beberapa kecamatan yang cukup potensi di sektor perkebunan yaitu Kec. Bungus Keluk Kabung, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Kuranji, Pauh dan Koto Tengah.

Tabel 2-88 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kota Padang (ekor) Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
1	Bungus Teluk Kabung	-	1.675	377	-	1.647	-
2	Lubuk Kilangan	-	1.878	19	-	1.897	-

No	Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
3	Lubuk Begalung	-	444	-	22	400	-
4	Padang Selatan	-	169	-	27	633	-
5	Padang Timur	-	168	-	23	209	-
6	Padang Barat	-	-	-	-	618	-
7	Padang Utara	6	375	-	4	818	420
8	Nanggalo	-	1.358	104	-	1.189	89
9	Kuranji	-	7.725	316	100	4.282	2.058
10	Pauh	46	2.772	36	-	1.395	-
11	Koto Tangah	38	5.551	1.160	66	3.947	510
	Jumlah 2020	90	22.115	2.012	242	17.035	3.077
	2019	88	21.978	2.994	275	17.587	3.285
	2018	72	21.760	2.839	239	17.294	3.138
	2017	60	21.545	2.784	210	18.599	3.456
	2016	56	22.051	2.798	207	17.882	3.509

Sumber : Padang Dalam Angka Tahun 2021

Pada subsektor peternakan, jenis ternak yang ada di Kota Padang terdiri dari ternak sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas. Sedangkan hasil komoditi peternakan berupa daging, susu dan telur sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan kebutuhannya selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-89 Produksi Daging Ternak di Kota Padang Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
1	Bungus Teluk Kabung	21,44	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00
2	Lubuk Kilangan	316,44	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
3	Lubuk Begalung	218,66	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00
4	Padang Selatan	93,54	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00
5	Padang Timur	406,21	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00
6	Padang Barat	74,46	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00
7	Padang Utara	133,36	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
8	Nanggalo	114,51	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
9	Kuranji	276,15	2,19	0,00	77,19	95,67	0,00
10	Pauh	740,79	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00
11	Koto Tangah	1.470,27	139,65	0,00	2,53	0,00	38,43
	Jumlah 2020	3.865,83	141,84	0,00	95,65	95,67	38,43
	2019	3.047,27	277,12	0,00	91,86	91,26	52,22
	2018	2.942,19	255,71	-	92,16	86,91	62,13
	2017	2.985.295	354.337	-	128.370	95.197	47.963
	2016	2.375,02	257,70	-	102,72	82,81	89,84

Sumber : Padang Dalam Angka Tahun 2021

Dari tabel diatas, produksi daging terbesar adalah ternak sapi potong, kerbau dan kambing. Dengan adanya Rumah Potong Hewan (RPH) dengan standar NKV dan sertifikat halal kedepan diharapkan tidak ada lagi pemotongan liar diluar RPH.

Tabel 2-90 Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kota Padang (Ekor) Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Ayam Petelur	Itik/ Itik Manila
1	Bungus Teluk Kabung	35.529	66.075	0	16.902
2	Lubuk Kilangan	8.215	1.038	625	1.834
3	Lubuk Begalung	3.632	16.279	0	1.051
4	Padang Selatan	10.534	2.108	0	202
5	Padang Timur	6.413	0	0	557
6	Padang Barat	3.390	0	0	-
7	Padang Utara	24.129	20.687	0	551
8	Nanggalo	22.931	19.153	0	4.372
9	Kuranji	110.870	517.261	14.111	50.488
10	Pauh	12.742	229.831	31.620	1.155
11	Koto Tangah	60.458	2.706.838	379.432	12.649
	Jumlah 2020	298.843	3.579.270	425.788	89.761
	2019	281.694	1.972.644	273.380	87.285
	2018	268.280	1.878.172	272.020	85.995
	2017	265.624	1.873.488	270.667	84.251
	2016	262.994	1.868.816	269.320	83.006

Sumber : Padang Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa populasi unggas terbesar adalah pada ayam pedaging yaitu 3.579.270 ekor dengan kecamatan penghasil terbesar dari Kecamatan Koto Tangah yaitu 2.706.838 ekor

Tabel 2-91 Produksi Daging Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kota Padang Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Ayam Petelur	Itik/ Itik Manila
1	Bungus Teluk Kabung	41,04	72,67	0,00	8,87
2	Lubuk Kilangan	9,49	1,14	0,38	0,96
3	Lubuk Begalung	4,19	17,90	0,00	0,55
4	Padang Selatan	12.17	2,32	0,00	0,11
5	Padang Timur	7,41	0,00	0,00	0,29
6	Padang Barat	3,92	0,00	0,00	0,00
7	Padang Utara	27,87	22,75	0,00	0,29
8	Nanggalo	26,49	21,06	0,00	2,30
9	Kuranji	128,05	568,88	8,61	26,51
10	Pauh	14,72	252,77	19,29	0,61

No	Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Ayam Petelur	Itik/ Itik Manila
11	Koto Tengah	69,83	2.976,98	231,45	6,64
	Jumlah 2020	345,18	3.936,47	259,73	47,13
	2019	325,36	2.085,68	166,76	45,82
	2018	309,86	1.985,79	165,93	45,15
	2017	348,694	1.977,222	164,625	41,284
	2016	282,06	1.495,52	111,09	34,24

Sumber : Padang Dalam Angka Tahun 2021

Produksi daging unggas terbesar tahun 2020 dapat dilihat pada ayam pedaging yaitu sebesar 3.936,47 ton, dan Kecamatan penyumbang terbesar adalah Kecamatan Koto Tengah yaitu sebesar 2.976,98 ton. Produksi ayam pedaging ini terus meningkat dari tahun 2016. Produksi daging yang berasal dari ayam kampung juga cukup besar yaitu 345,18 ton

Tabel 2-92 Produksi Telur Unggas menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kota Padang (Kg) Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Petelur	Itik/ Itik Manila
1	Bungus Teluk Kabung	14.922	0,00	77.073
2	Lubuk Kilangan	3.450	3.975	8.363
3	Lubuk Begalung	1.525	0,00	4.793
4	Padang Selatan	4.424	0,00	921
5	Padang Timur	2.693	0,00	2.540
6	Padang Barat	1.424	0,00	2.513
7	Padang Utara	10.134	0,00	0,00
8	Nanggalo	9.631	0,00	19.936
9	Kuranji	46.564	89.746	230.225
10	Pauh	5.352	201.103	5.267
11	Koto Tengah	25.392	2.413.188	57.679
	Jumlah 2020	125.511	2.708.012	409.310
	2019	118.311,48	1.738.696,80	398.019,60
	2018	112.678	1.730.047	392.138
	2017	111.563	1.721.442	384.184
	2016	110.457	1.712.875	378.507

Sumber : Padang Dalam Angka Tahun 2021

Dari tabel diatas, terlihat produksi telur terbanyak pada ayam petelur pada tahun 2020 yaitu 2.708.012 ton, sedangkan telur ayam buras adalah sebanyak 125.511 ton. Dari produksi telur yang ada, belum mencukupi untuk konsumen di Kota Padang. Sebagian besar kebutuhan telur masih berasal dari Kabupaten/Kota lain. Pengolahan hasil peternakan sangat potensial untuk dikembangkan, karena konsumen terbesar bahan pangan asal hewan untuk Sumatera Barat berada di Kota Padang.

Kinerja urusan Pertanian Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2-93 Kinerja urusan Pertanian Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	5,27	5,27	5,22	5,3	5,41	Dinas Pertanian
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
	Padi	%	54,63	55,50	55,50	56,00	56,00	Dinas Pertanian
	Jagung	%	0,00	0,00	0	0,00	37,74	Dinas Pertanian
	Ubi Kayu	%	189,66	171,00	0	275,44	20,49	Dinas Pertanian
	Ubi Jalar	%	71,43	145,00	0	209,00	41,11	Dinas Pertanian
	Kacang Tanah	%	14,73	25,00	0	12,48	12,48	Dinas Pertanian
	Kedelai	%	0	12,00	0	8,00	0	Dinas Pertanian
	Kacang Hijau	%	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2021

IV. Urusan Kehutanan

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat menempati wilayah sekitar 69.496 Hektar, diantaranya seluas sekitar 36.505 Hektar (52 %) merupakan Kawasan Hutan Konservasi yang terdiri dari Kawasan Hutan Suaka Alam seluas 23.655 Hektar dan Hutan Lindung seluas 12.850 Hektar, yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan sisanya merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas sekitar 32.991 Hektar, yang sama sekali tidak memiliki kawasan hutan produksi, namun hanya memiliki hutan Suaka Alam dan Hutan Lindung yang secara geografis letaknya berada pada rangkaian punggung Bukit Barisan.

Keberadaan Hutan Suaka Alam maupun Hutan Lindung termasuk didalamnya Hutan Taman Hutan Raya Dr. Moh. Hatta atau yang dikenal dengan Taman Hutan Raya Bung Hatta berada di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kelurahan Indarung. berjarak 20 Km sebelah timur dari pusat Kota Padang dan jarak dari Minangkabau International Airport adalah sekitar 50 Km. Luas Taman Hutan Raya Bung Hatta ditetapkan berdasarkan Keppres No. 35 Tahun 1986, dengan luas 240 Ha. Secara geografis Taman Hutan Raya Bung Hatta terletak antara 0032' – 150 5' Lintang Selatan dan 100017' – 1000 42' bujur Timur. Kawasan Hutan Raya sebelah utara dibatasi oleh Sungai Lubuak Paraku, sebelah barat dibatasi oleh Jembatan Lubuak Paraku, sebelah selatan dibatasi oleh Sungai Baliang dan Bukit Karang selanjutnya sebelah timur dibatasi oleh Panorama II.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 beserta lampirannya, bahwa Urusan Kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Untuk itu, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Taman Hutan Raya, di Kota Padang dalam hal ini adalah TAHURA Dr. Muhammad Hatta.

Taman Hutan Raya DR. Mohammad Hatta menjadi penting bagi kehidupan di perkotaan dan merupakan bagian dari penataan tata ruang kota yang berfungsi menciptakan kondisi kota yang serasi, selaras dan seimbang antara pembangunan fisik untuk kegiatan ekonomi dan untuk melindungi ekosistem lingkungan kota .

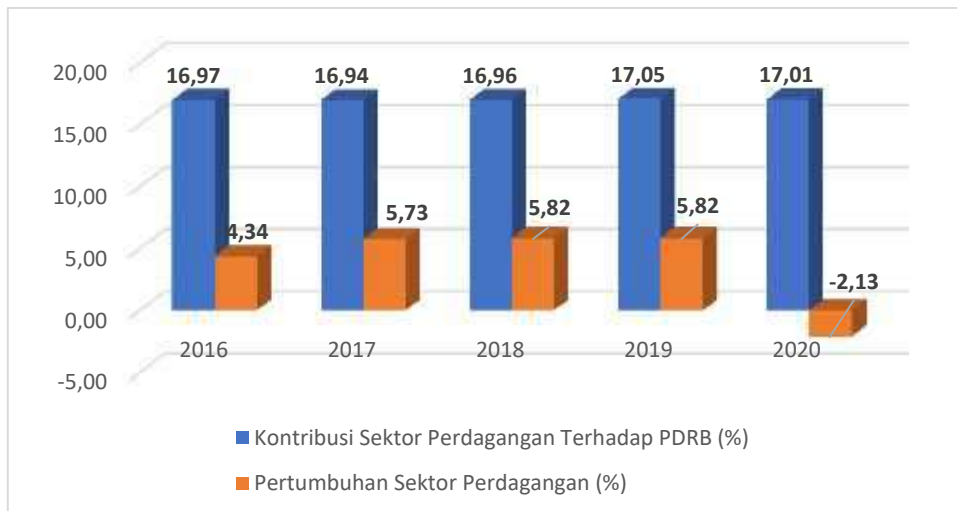
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Taman Hutan Raya DR. Mohammad Hatta di Kota Padang dimaksudkan untuk menciptakan kelestarian lingkungan perkotaan melalui terwujudnya paru-paru hijau Kota.

Sedangkan tujuan Pembangunan dan Pengembangan Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta di Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan Padang sebagai Daerah Go Green dan Clean secara religius untuk tujuan utama wisatawan baik domestik maupun Internasional.
2. Dibidang pendidikan sebagai pusat penelitian ilmu pengetahuan berkaitan dengan keanekaragaman jenis tumbuhan yang berasal dari daerah tropis seluruh dunia. Dalam hal ini mendukung visi Kota Padang bidang pendidikan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah sekitarnya melalui pembangunan sarana dan prasarana Taman Hutan Raya DR. Mohammad Hatta.
4. Menciptakan lapangan kerja dan investasi daerah.
5. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui kunjungan Wisata Lingkungan dan Jasa Ilmiah Penelitian.
6. Pemerataan pembangunan Kota Padang daerah kawasan Timur dan Barat dan sekaligus membuka daerah pinggiran menjadi daerah utama kunjungan.

V. *Urusan Perdagangan*

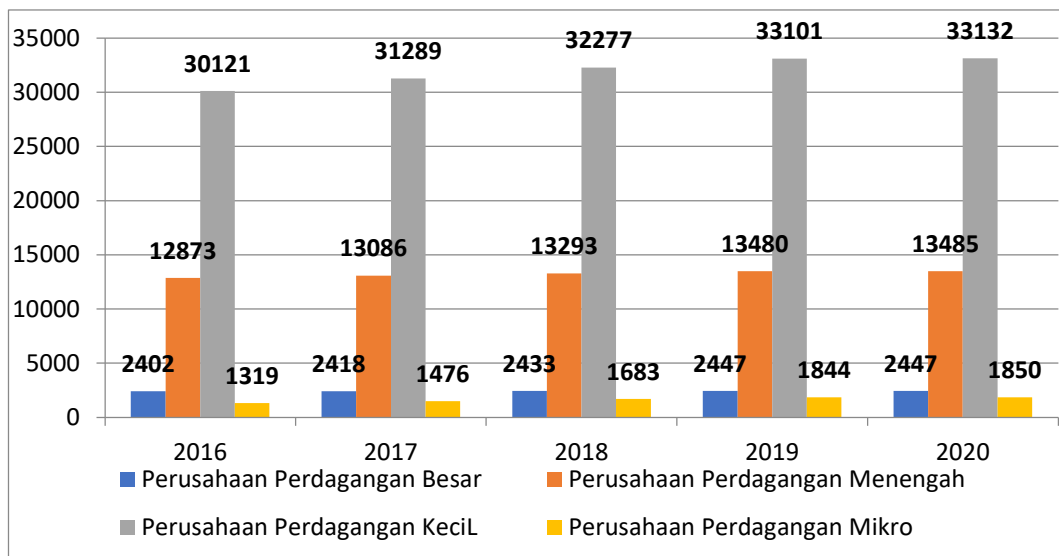
Kota Padang terkenal sebagai pusat perdagangan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan kota Padang merupakan pintu gerbang perdagangan dari Eropa maupun Asia. Perdagangan merupakan salah satu sektor yang mempunyai andil dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Kota Padang. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Padang cenderung stabil dan pertumbuhannya juga cenderung stabil dan sangat mempengaruhi PDRB Kota Padang. Ketika sektor perdagangan melemah pada Tahun 2020 akibat pandemi Covid19 dengan pertumbuhan -2,13 juga mengakibatkan PDRB Kota Padang Tahun 2020 juga mengalami pertumbuhan -1,86.



Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2-46 Kontribusi perdagangan terhadap PDRB Kota Padang dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan di Kota Padang Tahun 2016-2020

Perusahaan perdagangan di Kota Padang dibagi kedalam empat kelompok, yaitu perusahaan perdagangan besar, menengah, kecil dan mikro. Dari keempat jenis perusahaan perdagangan tersebut, perusahaan perdagangan kecil mempunyai jumlah yang paling banyak. Jumlah perusahaan perdagangan kecil meningkat dari jumlah 30.121 di tahun 2016 meningkat menjadi 33.132 di tahun 2020. Jumlah pedagang yang meningkat ini menandakan bahwa iklim dagang ber gejolak di masyarakat Kota Padang. Jumlah perusahaan perdagangan menurut skala di Kota Padang disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2-47 Jumlah Perusahaan Perdagangan Menurut Skala Usaha di Kota Padang Tahun 2016-2020

Selain jumlah pedagang yang meningkat, jumlah sarana perdagangan juga turut meningkat. Jenis sarana perdagangan antara pasar, toko, kios, dan warung. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan tidak terlepas dari upaya memantapkan posisi Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat. Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-94 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Kota Padang Tahun 2016-2020

No	Sarana Perdagangan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasar	21	21	21	21	21
2	Toko	2.424	2.478	2.478	2.488	2.491
3	Kios	4.824	4.824	4.824	4.824	4.824
4	Warung	1.108	1.108	1.258	1.308	1.308
	Jumlah	4.057	8.377	8.431	8.581	8.644

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Kinerja urusan Perdagangan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2-95 Kinerja urusan Perdagangan Tahun 2016-2020

N O	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp	1362887,40	1600005,00	1.548.805,00	1.052.272,64	1.632.278,23	Dinas Perdagangan
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	1,00	1,00	4	4,00	4	Dinas Perdagangan

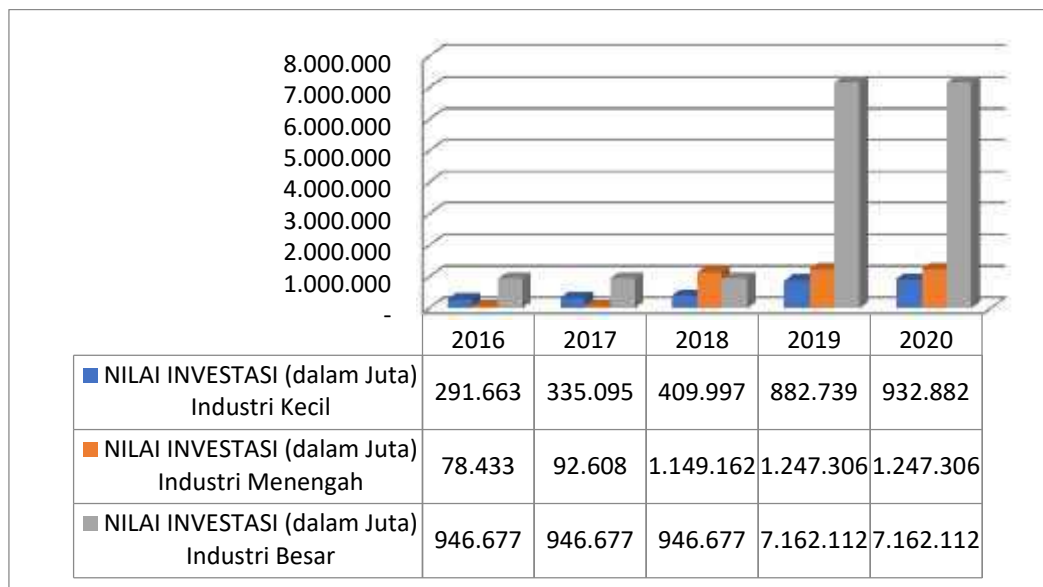
Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2021

VI. Urusan Perindustrian

Sektor industri menjadi andalan ekonomi Kota Padang, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan sektor industri dalam tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan, namun merupakan satu diantara tiga besar sektor yang menunjang perekonomian di Kota Padang setelah sektor perdagangan dan transportasi. Sektor industri terbagi ke dalam tiga jenis, antara lain industri kecil, industri menengah dan industri besar.

Karakteristik masyarakat Padang yang ulet menyebabkan tumbuhnya sektor industri di Kota Padang. Sektor industri kecil merupakan sektor industri yang mempunyai banyak unit usaha dan menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan industri menengah dan besar. Unit usaha industri kecil dan menengah menunjukkan masyarakat tidak terpaku dalam harapan menjadi pegawai dan bekerja, namun membuka usaha dan memberikan lapangan kerja.

Kota Padang juga memiliki potensi besar untuk menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk turut memajukan perekonomian daerah. Potensi besar ini juga diikuti dengan kemudahan berinvestasi di Kota Padang dari segi pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kota Padang. Nilai investasi menunjukkan trend positif setiap tahunnya. Perkembangan nilai investasi tahun 2016-2020 di Kota Padang dapat dilihat dari gambar berikut:



Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2-48 Nilai Investasi Pada Industri Kecil, Menengah Dan Besar di Kota Padang Tahun 2016-2020 (Dalam Juta)

Kota Padang mempunyai 4 (empat) komoditi industri unggulan yaitu industri pangan, sandang dan kulit, kerajinan, serta semen. Industri semen merupakan industri yang paling banyak memiliki jumlah hasil produksi terbesar di Kota Padang sebesar 6.000.000 ton pada Tahun 2016 dan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2020 produksi semen menjadi 11.000.000 Ton. Kota Padang berupaya untuk memaksimalkan potensi industri yang dimiliki daerah itu dengan mengolah bahan baku yang berasal dari daerah terdekat guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Komoditi industri unggulan Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-96 Komoditi Industri Unggulan Kota Padang Tahun 2016-2020

No	Klasifikasi Industri	Satuan	Kapasitas Produksi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pangan						
	Makanan ringan	Ton	1.368	1.929	2.200	2.300	2.944
	Pengolahan ikan	Ton	156	156	160	165	178
2	Sandang dan kulit						
	Sulaman benang emas dan bordir	Helai	6.587	8.036	8.250	8.300	9.960
	Sepatu	Pasang	64.800	72.576	75.000	76.250	83.875
3	Kerajinan						

No	Klasifikasi Industri	Satuan	Kapasitas Produksi				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Perabotan dan perlengkapan rumah tangga dari rotan	Set	19.350	22.253	25.000	25.500	27.540
4	Semen	ton	6.000.000	8.100.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

2.3.4 Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2-97 Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kota Padang	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai LPPD Tingkat Nasional	Angka	3,13	3,17	3,15	3,15	3,18
2	Persentase policy brief bidang pemerintahan yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase produk hukum daerah yang berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
4	Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100
5	Persentase Loi/Moi yang diimplementasikan	Persen	-	1	28	45	92,5
6	Persentase permasalahan perjanjian kerjasama yang diselesaikan	Persen	-	-	100	100	100
7	Persentase policy brief bidang perekonomian yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100
8	Persentase policy brief bidang pembangunan yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100
9	Persentase policy brief bidang kesra yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100
10	Level kematangan ULP (UKPBJ)	Level	-	2	2	3	3
11	Persentase sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Persen	78	95,66	83	-	100
12	Persentase policy brief bidang organisasi yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100
13	Persentase perangkat daerah yang melaporkan LKJIP sesuai ketentuan	Persen	61,54	64,28	71,43	65	70

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Setda Kota Padang	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
14	Persentase perangkat daerah yang nilai survei kepuasan masyarakatnya minimal 80	Persen	36,00	16,27	49,09	65	70
15	Persentase policy brief bidang kehumasan yang dimanfaatkan	Persen	63	73,3	83	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Tahun 2021

II. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggara administrasi keuangan DPRD.
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Tabel 2-98 Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota Dewan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	%	80	80	85	85	90
2	Tingkat Penetapan ranperda tepat waktu yang sudah masuk dalam Bapemperda	%	80	80	85	85	90

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2021

2.3.5 Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

I. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pondasi awal pemerintah daerah melaksanakan setiap program dan kegiatan pembangunannya untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban. Dalam fungsi perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Kinerja urusan Perencanaan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-99 Kinerja urusan Perencanaan Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	Bappeda
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	Bappeda
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	Bappeda

Sumber : Bappeda Kota Padang Tahun 2021

Sebagai bentuk apresiasi dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas, pencapaian target-target pembangunan daerah, dan juga inovasi pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menganugerahkan kepada pemerintah daerah terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Secara berturut-turut, Pemerintah Kota Padang berhasil meraih penghargaan tersebut untuk kategori kota sebagai peringkat terbaik ke-3 pada PPD tahun 2020 dan peringkat terbaik ke-2 pada PPD tahun 2021. Keberhasilan ini merupakan kerja keras dan kontribusi dari seluruh stakeholder dalam pencapaian penghargaan ini.

II. Keuangan

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajiban penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L). Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintah Kota Padang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah

daerah di wilayah Kota Padang memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

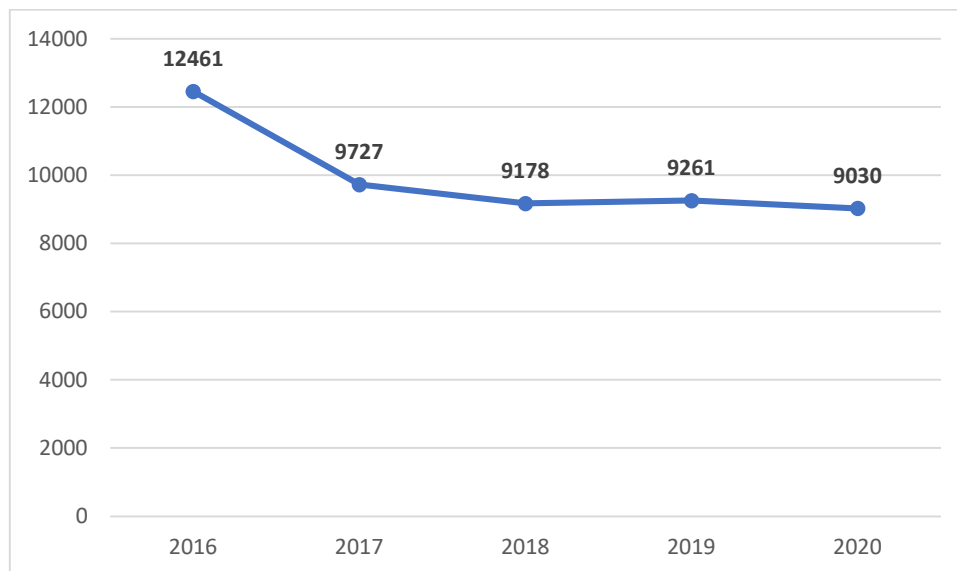
Tabel 2-100 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang, Tahun 2016-2020

No	Tahun	Opini Publik
1	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPK Kota Padang Tahun 2021

III. Kepegawaian serta Pendidikan Pelatihan

Jumlah PNS secara umum di Kota Padang mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pensiun, PNS Guru SMA/ sederajat yang dipindahkan status kepegawaian kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, dan mutasi PNS ke daerah lain baik mutasi dalam propinsi maupun keluar propinsi. Setelah dilakukannya moratorium sementara, Pemerintah Kota Padang baru dapat melakukan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2018, akan tetapi hal ini tidak begitu berpengaruh terhadap penambahan pegawai secara keseluruhan. Jumlah PNS Pemerintah Kota Padang masih dapat diprediksi akan tetap mengalami penurunan sampai 5 tahun kedepan. Perkembangan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Padang dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BKPSDM Kota Padang Tahun 2021

Gambar 2-49 Perkembangan Jumlah PNS Kota Padang Tahun 2016 – 2020

Pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah pegawai yang sangat drastis, yang disebabkan karena terjadinya perpindahan status PNS Guru SMA sederajat dari Pemerintah Kota/Kabupaten kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Kota Padang telah mengakomodir penerimaan CPNS untuk Pemerintah Daerah dari Penyandang Disabilitas sejak tahun 2018 sebanyak 13 (tiga belas) orang yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah.

Penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dilaksanakan dari pengembangan aparatur dalam bentuk diklat jenjang karier dan diklat teknis fungsional. Pelaksanaan diklat aparatur yang telah dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagai berikut :

Tabel 2-101 Pelaksanaan Diklat Aparatur yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN					JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Diklat Jenjang Karier :	91	133	92	609	7	1.390
	- Diklatpim Tk. II						
	- Diklatpim Tk. III	5	5	2	-	-	15
	- Diklatpim Tk. IV	26	28	26	3	7	99
	- Diklat Pra Jab	60	60	59	30	-	269
		-	40	5	576	-	1.007
2	Diklat Teknis Fungsional	242	298	577	615	144	2.087

Sumber : BKPSDM Kota Padang Tahun 2021

Dalam upaya memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional, dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN digunakan sistem manajemen kepegawaian yang dikenal dengan Sistem Merit. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Point penting yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam penerapan sistem Merit antara lain:

1. Pertama, tentang pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian penyesuaian arah kebijakan nasional,
2. Kedua, rekrutmen berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan dan sertifikasi.
3. Ketiga, Pengembangan kapasitas dalam mengarungi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam pertahun bagi tiap PNS,
4. Keempat, Penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk tim penilai kinerja,
5. Kelima, Promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara talent mapping (melalui *assesment*) dan career planing (*Open recruitment*),
6. Keenam, mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai.

Kinerja urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-102 Kinerja urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	tahun	20 JP/Tahun	20 JP/Tahun	20 JP/Tahun	20 JP/Tahun	20 JP/Tahun	BKPSDM
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,54	0,87	0,93	2,70	1,67	BKPSDM
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	65,45	72,22	76,5	59,10	30,79	BKPSDM
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	angka	33	36	34	36	33	BKPSDM
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	angka	169	156	178	178	166	BKPSDM
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	angka	8210	7926	5.553	5124	4.915	BKPSDM

Sumber : BKPSDM Kota Padang Tahun 2021

IV. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan mempunyai peranan penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah. Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan keluarnya Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menguatkan peran lembaga kelitbangan sebagai lembaga yang berperan dalam melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan dan regulasi berbasis kelitbangan guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 2-103 Perkembangan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2019

NO	Perkembangan Penelitian dan Pengembangan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	Perkembangan Penelitian dan Pengembangan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	25 %	30%	30%	30 %	30 %

Sumber : Bappeda Kota Padang Tahun 2021

Kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-104 Kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	1	1	1	100	100	Bappeda
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	0	0	0,3	20	20	Bappeda
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	-	-	1	100	100	Bappeda
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	-	-	-	15	15	Bappeda

Sumber : Bappeda Kota Padang Tahun 2021

2.3.6 Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pengawasan

Pengawasan memegang peranan penting dalam memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah dilaksanakan dengan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan seperti yang diharapkan. Agar pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal, pengawasan yang tepat dan relevan diterapkan sesuai dengan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan. Kinerja urusan Pengawasan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-105 Kinerja urusan Pengawasan Tahun 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Opini atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
2	Indeks RB	Indeks	55,48 (CC)	62,05 (B)	68,08 (B)	69,58 (B)	69,87 (B)	Inspektorat
3	Nilai SAKIP	Nilai	60,06 (B)	70,46 (BB)	73,27 (BB)	74,23 (BB)	75,83 (BB)	Inspektorat
4	Level Kapabilitas APIP	level	2	2	2+	2+	2+	Inspektorat

2.3.7 Fokus Layanan Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan-Kecamatan didukung oleh ketersediaan anggaran melalui berbagai program kegiatan. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan dan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan guna memenuhi kebutuhan wilayah dan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan tugas dan wewenang dari Walikota, Kecamatan Kuranji sesuai Peraturan Daerah Nomor 08/2005 melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

1. Permohonan Kartu Keluarga Baru;
 2. Penggantian Kartu Keluarga;
 3. Permohonan Kartu tanda Penduduk (KTP);
 4. Surat Keterangan Kematian;
 5. Surat Keterangan Pindah;
 6. Surat Keterangan Domisili;
 7. Pengurusan IMB s.d agustus 2021 dilaksanakan oleh Kecamatan, tahun berikutnya melalui aplikasi SMBG dinas PUPR dan DPMPSTP. Berdasarkan SE perizinan dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 11/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pada poin A (Penyelenggaraan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha di Daerah)
- A. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :
1. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah kelurahan yang ada di Kecamatan untuk membuat taat azaz aturan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.
 2. Memberikan kesempatan kepada aparat kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota maupun pihak lainnya;
 3. Pembinaan kelengkapan administrasi kelurahan.
 4. Pembinaan secara rutin ke kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 5. Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Pindah).
- B. Kinerja Pelayanan di Bidang Perizinan dan Pendapatan :
1. Memberikan rekomendasi dan perizinan di Kelurahan dan Kecamatan
 2. Melakukan Pengawasan ke setiap kelurahan, memonitor bangunan yang tumbuh didirikan masyarakat.

3. Melakukan monitoring dan sosialisasi kepada masyarakat bagi yang mendirikan bangunan untuk segera mengurus persetujuan bangunan gedung (PBG) sesuai dengan luasnya secara online.
- C. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana
1. Memberikan teguran I dan II terhadap bangunan yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hasil monitoring kasi PP
 2. Melakukan penataan dan penertiban Bangunan Liar dan Bangunan Lainnya di wilayah Kecamatan;
 3. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan.
 4. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah - langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 5. Mengkoordinir bantuan - bantuan penanggulangan bencana
 6. Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di kecamatan
- D. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial
1. Menindaklanjuti program kegiatan kota terkait keagamaan, kepemudaan, budaya, dan sosial kemasyarakatan di Kecamatan
 2. Melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kecamatan
 3. Menindaklanjuti program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan
 4. Mengkoordinasikan program kegiatan keagamaan dengan lembaga keagamaan di Kecamatan.
- E. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan
 2. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial atau kemasyarakatan, RT, RW, dan Lembaga Swadaya Masyarakat,
 3. Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan dan kelurahan
 4. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perekonomian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan.
 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat
 6. Monitoring pelaksanaan musrenbang kelurahan dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
 7. Monitoring pelaksanaan manunggal (BBGRM)
 8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK, Posyandu, dan PAUD

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan mulai Tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2-106 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	PD Penanggung Jawab
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	%	70	78	80	-	-	Kecamatan
2	Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	%	70	80	82	-	-	Kecamatan
3	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	%	75	80	85	-	-	Kecamatan
4	Persentase peningkatan kontribusi swadaya masyarakat	%	70	80	85	-	-	Kecamatan

2.3.8 Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan hasil analisa terhadap pencapaian indikator kinerja diketahui bahwa pada umumnya memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi, dan sebagian lagi memiliki kinerja tinggi. Hanya sebagian kecil yang memiliki tingkat capaian kinerja yang sedang. Hal ini disajikan pada tabel berikut yang memuat capaian kinerja Kantor Kesbangpol Kota Padang lima tahun terakhir.

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Capaian Tahun					PD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik	%	100	100	100	-	-	Kantor Kesbangpol
2	Rata-rata lama penanganan potensi konflik	jam	4	4	4	-	-	Kantor Kesbangpol
3	Jumlah Ormas terdaftar yang dibina	ormas	85	92	120	-	-	Kantor Kesbangpol
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	%	-	-	65	-	65	Kantor Kesbangpol

Sumber : Kantor Kesbangpol Kota Padang Tahun 2021

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia yang dijabarkan sebagai berikut :

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan gambaran secara mikro bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Asumsinya jika pendapatan masyarakat meningkat maka pengeluaran konsumsi rumah tangga juga akan meningkat. Secara umum, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Padang mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019. Seiring terjadinya pandemi Covid-19 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita mengalami penurunan di tahun 2020. Data lengkap pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2-107 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Padang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Rp Miliar)	25.487,87	27.253,33	29.259,73	32.020,81	31.496,77
2	Jumlah RT	213.815	216.629	219.457	222.354	212.669
3	Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Rp Miliar)	0,119	0,126	0,133	0,144	0,148

Sumber : PDRB Kota Padang menurut pengeluaran Tahun 2016-2020

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Aksesibilitas Daerah

Kota Padang selain merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, juga ditetapkan sebagai salah-satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan Rencana Sistem Perkotaan Nasional (PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN). Selanjutnya di dalam Rencana Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat (Perda No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032), Kota Padang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan sekaligus menjadi bagian dari Kawasan Metropolitan Padang yang juga mencakup Lubuk Alung (Kab. Padang Pariaman), Kota Pariaman, Aro Suka (Kab. Solok), Kota Solok, dan Painan (Kab. Pesisir Selatan).

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung Kota Padang sebagai PKN dan salah satu upaya mewujudkan visi Kota Padang sebagai kota perdagangan unggul dan berdaya saing antara lain:

Sarana jalan di Kota Padang terdiri dari jalan Nasional, Provinsi dan Kota dengan panjang total sepanjang 2.096,99 Km. Panjang jalan menurut jenis permukaan dan kondisi di Kota Padang tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2-108 Panjang Jalan Menurut Fungsi di Kota Padang Tahun 2020

No.	Fungsi	Kondisi Permukaan (Km)			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
1.	Arteri Primer	-	-	-	-
2.	Arteri Sekunder	13.090	44.818	8.089	65,997
3.	Kolektor Primer	-	-	-	-
4.	Kolektor Sekunder	33.507	92.986	45,415	171,908,
5.	Lokal Primer	-	-	-	-
6.	Lokal Sekunder	274.945	32.976	78.865	386.786
7.	Lingkungan	-	-	-	-
	Jumlah	321.542	170.780	132.369	624.691

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Pelabuhan Teluk Bayur yang merupakan pelabuhan pelayaran internasional yang melayani bongkar muat barang dan penumpang domestik maupun luar negeri. Pelabuhan Teluk Bayur sebelumnya bernama Emmahaven yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda antara tahun 1888 sampai 1893. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang antar pulau serta pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor-impor dari dan ke Sumatera Barat. Aktivitas di pelabuhan Teluk Bayur yang terjadi selama tahun 2020 antara lain:

Tabel 2-109 Aktivitas di pelabuhan Teluk Bayur yang terjadi selama Tahun 2020

No	Aktivitas	Jumlah
1.	Penumpang Jumlah kapal Naik Turun	306 kapal 29.021 orang 20.036 orang
2.	Bongkar muat kapal luar negeri Jumlah kapal Bongkar/impor Muat/ekspor	341 kapal 440.429 ton 4.394.307 ton
3.	Bongkar muat kapal interinsuler Jumlah kapal Bongkar Muat	1.320 kapal 2.467.194 ton 2.511.880 ton
4.	Bongkar muat kapal rakyat Jumlah kapal Bongkar Muat	590 kapal 5.460 ton 29.757 ton
5.	Angkutan khusus peti kemas Bongkar Muat	44.499 ton 52.949 ton

Sumber: Kota Padang Dalam Angka Tahun 2021

Stasiun kereta api di Kota Padang melayani angkutan penumpang dari stasiun Padang ke stasiun di Kota Pariaman. Sejak tahun 2018, kereta api ini juga melayani perjalanan dari stasiun Padang (simpang haru) ke Bandara Internasional

Minangkabau. Stasiun Pulau Air, Padang, kembali beroperasi setelah mati selama 44 tahun. Stasiun tertua di Ranah Minang itu melayani rute Bandara Internasional Minangkabau-Pulau Air.

II. Penataan Wilayah

Penataan wilayah Kota Padang sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030 dibagi menjadi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan peruntukan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan rawan bencana alam, kawasan cagar budaya, dan RTH kota.

Sementara itu, pengelolaan kawasan peruntukan budidaya meliputi segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Pengembangan kawasan peruntukan budi daya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Dalam mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan perizinan pemanfaatan ruang berpedoman pada rencana tata ruang yang telah diperdakan yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010 – 2030. Sehingga ketaatan pelaksanaan pembangunan terhadap RTRW yaitu 100% pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

2.4.3 Fokus Fasilitas Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu peluang yang besar untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya peluang investasi juga sangat dipengaruhi oleh kondusifnya suatu daerah, sehingga para investor akan merasa aman dan nyaman pada saat menanamkan investasi. Kekondusifan daerah yang mendukung dalam hal investasi dapat dilihat dengan beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 2-110 Capaian Indikator Pendukung Investasi Daerah (2016 – 2020)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	40 %	40 %	45 %	40 %	40 %
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Tribum & Tranmas	2,86 %	0,75 %	NA	87 %	88 %
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	17,70 %	32,75 %	60 %	48,88 %	55 %

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kabakaran (WMK)	63,47 %	81,51 %	82,50 %	83,54 %	83,54 %
5	Persentase Penegakan Perda	3,26 %	0,85 %	NA	3,40 %	3,50 %

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Tahun 2021 dan Kantor Satpol PP Kota Padang Tahun 2021

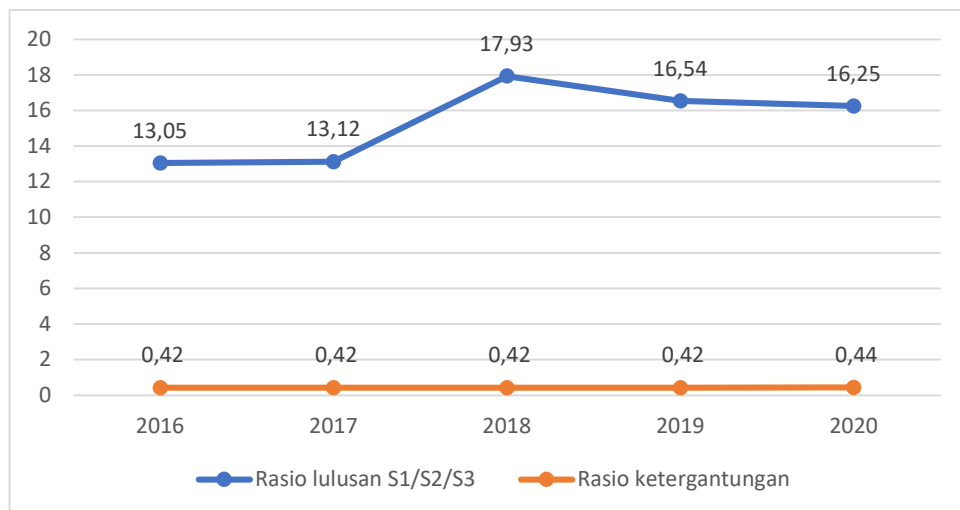
Cakupan petugas dalam memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat dari tahun 2016 hingga 2020 sebesar 40 %. Hal ini perlu mendapat perhatian agar aparaturnya (Linmas) dapat ditingkatkan kapasitasnya baik kualitas dan kuantitas, karena akan mempengaruhi kinerja aparaturnya dalam memberikan pelayanan yang maksimal dalam melindungi masyarakat, diantaranya kebakaran.

Kota Padang memiliki potensi bencana yang cukup banyak dan ini perlu dikelola secara baik agar tidak menimbulkan dampak negative yang lebih besar. Kota Padang perlu memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa menciptakan masyarakat yang sadar, peduli dan Tangguh dalam menghadapi potensi bencana.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Sehingga kualitas SDM tersebut sangat menentukan kualitas pembangunan daerah tersebut. Kualitas SDM ditentukan salah satunya oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Korelasinya adalah, semakin tinggi tingkat pendidikan SDM maka semakin tinggi juga kualitas SDM di suatu wilayah, sehingga semakin berkualitas tenaga kerja di dalam wilayah tersebut. Rasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif.

Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Padang selama kurun waktu 2016-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal serupa juga terjadi pada rasio ketergantungan pada kurun waktu yang sama. Perkembangan rasio lulusan dan rasio ketergantungan disajikan dalam gambar berikut:



Sumber Padang Dalam Angka Tahun 2021, data diolah

Gambar 2-50 Perkembangan Rasio Lulusan dan Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2020

2.4.5 Inovasi Daerah

Inovasi menjadi salah satu indikator penting untuk meningkatkan daya saing daerah, karena mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kemampuan daya saing daerah juga akan berpengaruh besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi".

Pelaksanaan inovasi daerah menjadi tolok ukur oleh pemerintah pusat untuk mengukur daya saing daerah dan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pemberian dana insentif kepada daerah. tersebut diharapkan menjadi budaya yang sudah melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1. *Innovative Government Award melalui Indeks Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri*

Salah satu bentuk penilaian daya saing daerah adalah melalui pengukuran indeks inovasi daerah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Indeks inovasi daerah merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian dilakukan melalui pelaporan inovasi daerah dengan cara menginputkan data inovasi oleh daerah pada aplikasi indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id.

Pemerintah Kota Padang telah berpartisipasi dalam pengukuran indeks inovasi daerah sejak tahun 2018. Pada tahun 2018 Kota Padang telah

menginputkan sebanyak 17 inovasi kedalam aplikasi dengan memperoleh score 2.530 dan berada pada urutan ke-18 untuk tingkat kota. Untuk tahun 2019, inovasi Kota Padang yang telah masuk kedalam aplikasi indeks inovasi daerah sebanyak 67 buah dengan score 6.550, dengan kategori sangat inovatif. Tahun 2020, Kota Padang telah melaporkan melalui penginputan aplikasi indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id sebanyak 100 inovasi dengan score 3.799. Untuk Tahun 2021, terjadi penurunan dalam pelaporan inovasi melalui Indeks Inovasi Daerah. Recofusing anggaran dan pandemi Covid 19 menjadi faktor utama penyebab terhambatnya pelaksanaan inovasi di kota padang. Selain itu perubahan penilaian dan pelaporan dalam indeks inovasi daerah menyebabkan inovasi yang berhasil dikirimkan melalui aplikasi indeks inovasi daerah relatif cukup rendah yaitu 39 inovasi dari 89 inovasi yang berhasil dihimpun.

Sebagian besar dari inovasi yang dilaporkan merupakan inovasi yang di lingkup Dinas Kesehatan terutama inovasi yang berada pada Puskesmas - puskesmas di Kota Padang yang mencakup 23 Puskesmas. Dengan score tersebut Kota Padang sudah masuk kategori inovatif, namun capaian dinilai belum maksimal.

II. Inovasi Daerah Kota Padang Tahun 2019-2020

Inovasi daerah merupakan terobosan adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Jika sudah berjalan lebih dari 2 tahun, Inovasi tersebut diharapkan menjadi budaya yang sudah melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, kriteria penilaian dan pelaporan inovasi melalui aplikasi Indeks Inovasi daerah adalah inovasi yang dilaksanakan 2 tahun terakhir. Berikut ini adalah Inovasi yang berhasil dihimpun melalui Aplikasi Indeks Inovasi Daerah periode 2019-2020.

Tabel 2-111 Inovasi Daerah Kota Padang Tahun 2019-2020

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	NILAI KEMATANGAN
1	Ayo Ceting (Ayo Cegah Stunting)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Andalas)	137.00
2	Rehabilitasi Layanan Khusus Untuk Perlindungan Disabilitas Agar Menjadi Unggul	Dinas Sosial	137.00
3	Absensi Online Berbasis Android	BKPSDM	132.00
4	Oce Kk (Oto Cek Kesehatan Keliling) Puskesmas Ulak Karang	Dinas Kesehatan (Puskesmas Ulak Karang)	127.00
5	E-Pengaduan Masyarakat	Inspektorat	122.00
6	E-Monev PPD (Aplikasi E-Monev Perencanaan Pembangunan Daerah)	Bappeda	121.00
7	Ketapel Dewa (Paket Pelayanan Adminduk Dengan Memakai Aplikasi Whatsapp)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	114.00
8	Posrem Bapers (Posyandu Remaja Binaan Asuhan Kelompok Edukasi Remaja Sehat) Puskesmas Lubuk Buaya	Dinas Kesehatan (Puskesmas Lubuk Buaya)	111.00
9	Sistem Informasi Adminstrasi Kependudukan (Sidak) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Kota Padang	Dinas Sosial	108.00
10	Simanis Lawas	Inspektorat	105.00

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	NILAI KEMATANGAN
11	Evaluasi Dan Uji Kelayakan Bangunan Shelter/Potensial Shelter	BPBD	105.00
12	Si Walija (Penggunaan Aplikasi Whatsapp Messenger Peduli Remaja) Puskesmas Alai	Dinas Kesehatan Puskesmas Alai	104.00
13	Kerjasama Info Arus Lalu Lintas Antara Dinas Perhubungan Kota Padang Dengan TVRI Stasiun Sumatera Barat	Dinas Perhubungan	103.00
14	Sistem Penerima Pesan Informasi Peringatan Dini Gempa Dan Tsunami (WRS Pusdalops PB BPBD Kota Padang)	BPBD	102.00
15	E-Surat Keterangan Bebas Temuan Asn	Inspektorat	100.00
16	Pembangunan Pedestrian Ramah Disabilitas Kota Padang	Dinas PUPR	99.00
17	Sistem Informasi Rekapitulasi Kasus Dan Temuan	Inspektorat	98.00
18	Berlian Ptm (Bersama Kendalikan Penyakit Tidak Menular)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Andalas)	94.00
19	D'MENSI Beb Lady (Database Management System Berbasis Web Layanan Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif)	Dinas Pendidikan	94.00
20	Q-Ris Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	93.00
21	CHATING DIA (Cegah Stunting Dini Pada Anak)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Kuranji)	91.00
22	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut	Inspektorat	89.00
23	Kasturi Muter Sore (Pangkas Waktu Antrian Ketemu Dokter Sore)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Andalas)	89.00
24	E-Retribusi Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	89.00
25	Siap Keren (Sistim Informasi Administrasi Pelayanan Kemetrolgian Elektronik) Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	86.00
26	Sidindang (Sistem Informsasi Dinas Perdagangan) Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	85.00
27	Presensi Online	Inspektorat	84.00
28	Menara Langka(Menjadikan Anak Ramah Lingkungan)	Dinas Pendidikan	83.00
29	E-Surat Tugas	Inspektorat	80.00
30	GULA LUKI (Gerakan Penanggulangan Diabetes Mellitus Di Lubuk Kilangan) Puskesmas Lubuk Kilangan	Dinas Kesehatan (Puskesmas Lubuk Kilangan)	80.00
31	Katrol Si Dia (Kartu Kontrol Hipertensi Diabetes), Puskesmas Ambacang	Dinas Kesehatan (Puskesmas Ambacang)	79.00
32	Kelas Penting (Kelompok Masyarakat Peduli Stunting) Puskesmas Pegambiran	Dinas Kesehatan (Puskesmas Pegambiran)	75.00
33	MESRA (Masyarakat Peduli Kanker Serviks Dan Pemeriksaan IVA) Puskesmas Lubuk Kilangan	Dinas Kesehatan (Puskesmas Lubuk Kilangan)	74.00
34	TASTIBUM (Pengamanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum) Oleh SATPOL PP	Satpol PP	73.00
35	Duta Anemia (Pusk. Air Tawar)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Air Tawar)	73.00
36	Kelas Penting (Kelompok Masyarakat Peduli Stunting) Puskesmas Pegambiran	Dinas Kesehatan (Puskesmas Pegambiran)	73.00
37	Pengawasan Kebersihan Berbasis Netizen (Wasinet)	DLH	71.00

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	NILAI KEMATANGAN
38	Klinik Konsultasi Hubungan Industri Keliling	Dinas Tenaga Kerja dan Industri	71.00
39	Website Kecamatan Padang Utara	Kecamatan Padang Utara	71.00
40	Sistem Informasi Geografis Bangunan Gedung	Dinas PUPR	70.00
41	Bang Palo Non Beri (Pengembangan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu)	Dinas Perikanan dan Pangan	69.00
42	Freenet (Free Internet/Internet Gratis) Untuk Warga Kota Padang	Dinas Kominfo	69.00
43	Iva Angel (Penyelamat Wanita) Puskesmas Andalas	Dinas Kesehatan (Puskesmas Andalas)	68.00
44	Lopa (Login Page) Hotspot Untuk Informasi Wifi Gratis	Dinas Kominfo	63.00
45	Sikelay (Optimalisasi Kinerja Layanan) Rsud Dr. Rasidin	RSUD	62.00
46	Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	58.00
47	Sigitaru (Sistem Informasi Geografis) Tata Ruang Kota Padang	Dinas PUPR	58.00
48	Pasarami (Pasar Padang Dalam Sistem Informasi) Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	57.00
49	Awas Diri (Pengawasan Diri Sendiri)	DLH	56.00
50	Sukamas (Suka Pakai Masker) Kecamatan Padang Selatan	Kecamatan Padang Selatan	54.00
51	Reputasi(Remaja Putri Peduli Tablet Besi)	Dinas Kesehatan	50.00
52	Posbindu Ptm Perkantoran (Puskesmas Rawang)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Rawang)	48.00
53	Aplikasi Kinerja Koperasi Dan Usaha Mikro / Sistim Informasi Kinerja Koperasi Usaha Mikro (SISFOKIMKUM)	Dinas Kop & UKM	43.00
54	Sistem Informasi Pendataan Dan Kearsipan Dokumen IMB	Dinas PUPR	42.00
55	Koto Lalang Kampung Cyber	Kecamatan Lubuk Kilangan	40.00
56	Sistem Informasi Berbasis Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala (Sibagala)	Kecamatan Lubug Begalung	39.00
57	Sistem Informasi Pertanggung Jawaban Keuangan (Simanjaku)	Inspektorat	38.00
58	Peta Tuan Rasul (Penyusunan Data Dan Pembentukan Ruang Konsultasi) Umkm Di Kecamatan Nanggalo	Kecamatan Nanggalo	36.00
59	Persaudaraan Madani	Kecamatan Padang Utara	36.00
60	Pembangunan Jembatan B 70 M' Tanpa Pilar	Dinas PUPR	35.00
61	Rido Sikum (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Setwan)	Sekretariat DPRD	32.00
62	ULAH DBD (Sampul Buku Cegah DBD)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Padang Pasir)	31.00
63	Almun (Alaram Imunisasi)	Dinas Kesehatan	29.00
64	Sistem Informasi Petugas Pajak Daerah (Sipadeh)	Bapenda	24.00
65	Aplikasi Lokasi Penyimpanan Arsip Pegawai Kecamatan Lubuk Kilangan	Kecamatan Lubuk Kilangan	20.00
66	Sistem Pendataan Industri Kota Padang (Sipedati Padang)	Dinas Tenaga Kerja dan Industri	17.00

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	NILAI KEMATANGAN
67	Sistem Informasi Manajemen Registrasi Kelompok Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan Kota Padang (SIMREKOM-KP)	Dinas Perikanan dan Pangan	15.00
68	ARISAN BU KADER (Aktualisasi Refresh Ilmu Sehat Anak Dan IBU Bersama KADER) Puskesmas Lubuk Begalung	Dinas Kesehatan (Puskesmas Lubuk Begalung)	12.00
69	" NASI PADANG" (Pembinaan Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum Nanggalo)	Dinas Kesehatan (Puskesmas Nanggalo)	12.00
70	Isabelia (Ingat Masa Berlaku Izin Anda)	DPMPTSP	10.00
71	Mandiri Jamban Bersih Sehat Dan Rapi (Manja Berseri)	Dinas Kesehatan	9.00
72	Gitar Denting	Sekretariat DPRD	8.00
73	Sabtu Melayani	DPMPTSP	6.00
74	Segar Sesi (Sehat Bugar Dan Sosialisasi Izin)	DPMPTSP	6.00
75	AWAK KAMEH BANA (Ajak Warga Agar Konsisten, Kumpul Amankan Sampah Anorganik Enam Hari Melalui Bank Sampah Atau Nanti Akan Dijemput)	DLH	0.00
76	Nelayan Pintar Kota Padang Melalui Sistem Informasi Bmkg	Dinas Perikanan dan Pangan	0.00
77	Balai Benih Ikan (BBI) Bungus Pusat Edukasi Dan Wisata / BBI'S Pesta Tahun 2020	Dinas Perikanan dan Pangan	0.00
78	KETUPAT SEHATI (K1 Sampai K4 Sehat Sampai Persalinan Nanti) PUSKESMAS SEBERANG PADANG	Dinas Kesehatan (Puskesmas Seberang Padang)	0.00
79	SATLAKAR (Satuan Relawan Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	0.00
80	Penerapan Cashless / Non Tunai Pada Objek Wisata Pantai Air Manis (Bri Brizzi)	Dinas Pariwisata dan Budaya	0.00
81	Pengelolaan Objek Wisata Air Manis Oleh Perumda Padang Sejahtera Mandiri	Dinas Pariwisata dan Budaya	0.00
82	Balawisata Kota Padang	Dinas Pariwisata dan Budaya	0.00
83	Sms Gateway	Kecamatan Nanggalo	0.00
84	Kongsi Covid	Kecamatan Lubuk Kilangan	0.00
85	Lay Sapintu (Layanan Hiv Satu Pintu) Puskesmas Seberang Padang	Dinas Kesehatan (Puskesmas Seberang Padang)	0.00
86	" Pauh Berseri " (Berdaya, Edukasi, Relasi, Sehat, Evaluasi, Religi Dan Ikhlas)	Kecamatan Pauh	0
87	Kgb Online	DLH	0
88	Kings Luki - Aplikasi Tracking Surat Lubuk Kilangan	Kecamatan Lubuk Kilangan	0
89	E-Kelurahan Kota Padang	Dinas Kominfo	0

Sumber : Bappeda Kota Padang Tahun 2021

III. SINOVIK (Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

SINOVIK (Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik) adalah Sistem Inovasi Pelayanan Publik milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi sebagai digitalisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). KIPP merupakan langkah strategis untuk menjaring inovasi pelayanan yang

dilahirkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pelayanan publik adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi. Dengan inovasi pelayanan publik, persepsi masyarakat tentang pelayanan yang berbelit akan berubah. Perubahan sistem pelayanan yang semakin modern menempatkan masyarakat sebagai subjek dan prioritas.

Pada tahun 2018 lalu, Pemerintah Kota Padang mendapat penghargaan dari SINOVIK Kemenpan RB pada Top 40 Inovasi Pelayanan Publik melalui program inovasi kelas Ibu Muda (IMUD) yang digagas Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat. Sementara di Tahun 2019, Inovasi Rasa Sejiwa dari Puskesmas Nanggalo berhasil mendapatkan penghargaan dari SINOVIK Kemenpan RB pada Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Untuk Tahun 2020, Inovasi AYO CETING dari Puskesmas Andalas juga berhasil masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik.

IV. Penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah Kota Padang

Dalam rangka memotivasi dan memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah dalam berinovasi, pada tahun 2019 Pemerintah Kota Padang menyelenggarakan Lomba Inovasi untuk 2 kategori, yakni Inovasi yang Berdampak Tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Inovasi yang Berdampak Tingkat Kota Padang. Sementara bentuk inovasi yang dinilai terdiri dari inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya sesuai urusan daerah.

Pelaksanaan Lomba inovasi daerah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota dalam mendukung efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang. Dari pelaksanaan lomba ini, setelah dilakukan evaluasi, terdapat sebanyak 45 inovasi yang dianggap layak yaitu inovasi yang telah berjalan 6 (enam) bulan dan telah dilengkapi dengan data dukung. Selanjutnya ditetapkan 5 peringkat terbaik masing kategori dan melalui tahap presentasi dan wawancara dengan Tim Penilai maka ditetapkan 3 peringkat terbaik untuk setiap kategori. Terhadap peringkat I s/d III diberikan penghargaan dan hadiah yang diserahkan pada Rapat Staf Pemko Padang bulan Desember 2019.

Tabel 2-112 Pemenang Penilaian Inovasi Daerah Kota Padang Tahun 2019

No	Nama Inovasi	SKPD Pengusul Inovasi	Juara
I.	Kategori Tingkat Perangkat Daerah		
1.	SIMREKOM-KP (Sistem Informasi Registrasi Kelompok Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan)	Dinas Kelautan dan Perikanan	I
2.	SIMANIS LAWAS (Sistem informasi Pengadministrasian Laporan Hasil Pengawasan)	Inspektorat	II
3.	SIBALAGA (Sistem Informasi Berbasis Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala)	Kecamatan Lubuk Begalung	III
II.	Kategori Tingkat Kota		

1.	TRC ANKERBA (Tim Reaksi Cepat Anti Kekerasan dan Narkoba)	Dinas Pendidikan	I
2.	RASAILAH DAKU (Rangkul Sayangi Latihlah Dengan Pendidikan Terpadu)	Dinas Sosial	II
3.	ISY BOM (Isyarat Berkomunikasi)	UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan	III

Sumber : Bappeda Kota Padang Tahun 2021

2.5 Capaian Indikator Pembangunan Kota Padang

2.5.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang Tahun 2020

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang diukur dari indikator tujuan dan sasaran kota. Berikut disajikan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang Tahun 2020:

Tabel 2-113 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang Tahun 2020:

N o	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target 2020	Realisasi 2020
1	Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing	Tujuan: Mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	82,68	82,40	82,82
		Sasaran : Meningkatkan kualitas pendidikan Dasar	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,34	11,45	11,58
			Harapan lama Sekolah	Tahun	16,51	16,70	16,52
		Sasaran : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,57	73,37	73,65
		Sasaran : Meningkatkan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,48	94,82	93,64
		Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat *	Pengeluaran perkapita	Rp.(juta)	14,72	-	14,48
2	Mewujudkan	Tujuan: Terwujudnya Kota Padang	Indeks Kota Layak huni	Angka	-	57,00	67,98

N o	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal	yang layak huni.					
		Sasaran : Meningkatnya layanan transportasi perkotaan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan	Poin	82,00	83,00	79,00
		Sasaran : Menurunnya luas kawasan banjir dan genangan	Persentase luas kawasan bebas banjir	%	53,49	57,22	55,10
		Sasaran : Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan didalam masyarakat.	Angka Kriminalitas (Angka Pelanggaran Yustisial)	Angka	3.500	3.300	3.300
		Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sanitasi	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	68	68,2	68,41
			Luas Kawasan kumuh yang ditangani	Ha	27,18	6,12	10,29
		Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman layak *	Persentase perumahan dan permukiman yang layak	persen	73,20	-	74,16
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Padang yang inklusif	Tujuan: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	%	5,65	6,15	-1,86
			Gini Ratio	Poin	0,31	0,330	0,307
		Sasaran : Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,76	9,1	13,64
		Sasaran : Meningkatnya tingkat perekonomian penduduk	Tingkat kemiskinan	%	4,48	4,65	4,40
			PDRB per-kapita (ADHB)	Rp.(juta)	65,65	67,50	64,66
		Sasaran : Meningkatnya investasi	Peningkatan nilai PMA, PMDN *				
			PMA	US \$	18.601,8	48.609	48.609
			PMDN	Juta Rupiah	1.417.802,6	435.150,2	435.150,2

N o	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target 2020	Realisasi 2020
4	Mewujudkan kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif	Tujuan: Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat.	Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	%	6,23	6,50	6,20
		Sasaran: Menjadikan sektor perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian .	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	16,97	17,06	16,41
		Sasaran : Menjadikan kota Padang sebagai pusat Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (e-kraf)	%	8,0	8,5	8,5
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata Yang Nyaman Dan Berkesan	Tujuan: Meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	19,30	20,40	15,00
		Sasaran: Mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan Pariwisata yang unggul dan berdaya saing	Kontribusi sektor pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata Propinsi Sumatera Barat	%	27,73	28,00	20,00
		Sasaran: Meningkatkan Kualitas pengelolaan destinasi	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang/tahun	73.284	76.956	21.650
			Jumlah kunjungan wisatawan domestik	Orang/tahun	5.184.590	5.590.810	2.562.966
			Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara *	Hari	3,15	-	1,73
			Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik *	Hari	1,13	-	1,50

N o	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target 2020	Realisasi 2020
6	Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana	Tujuan : Meningkatkan kapasitas Kota Padang dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah *	Level	3,00	-	3,05
		Sasaran: Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam penanggulana n bencana	Persentase peningkatan kelurahan tangguh bencana	%	0	3	2
		Sasaran: Meningkatkan kemampuan penanggulanga n bencana	Persentase bencana yang ditangani	%	100	100	100
7	Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik Yang Prima	Tujuan: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	69,58	82,00	69,87
		Sasaran: Meningkatkan Kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kinerja birokrasi	Nilai AKIP	Predikat	BB	BB	BB
			Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kota	Nilai	3,15	3,18	3,18
		Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (IKM)	Angka	79,83	80,75	82,66
			Indeks Kemudahan Perizinan Daerah *	Angka	NA	92,26	92,26
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,73	2,78	2,78

Keterangan : * Indikator Baru

2.5.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pelayanan Dasar yang dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal yang dimaksud dalam hal ini adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dimana yang dimaksud dengan Pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengacu pada definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa pelaksanaan SPM tersebut harus didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pelayanan Dasar yang dilakukan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Padang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat: (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; (2) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan (3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Standar teknis yang dimaksud di atas, ditetapkan oleh Kementerian terkait setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, misalnya bidang pendidikan mengacu terhadap standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Secara rinci akan dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut :

I. *Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020*

Tabel 2-114 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Capaian (%)	PD Penanggung Jawab
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	80,20	Dinas Pendidikan
2.	Pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTS)	100	90,54	Dinas Pendidikan
3.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara usi 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100	76,89	Dinas Pendidikan

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> (pelaporan SPM Kota Padang)

II. *Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020*

Tabel 2-115 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Capaian (%)	PD Penanggung Jawab
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	94,36	Dinas Kesehatan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	99,25	Dinas Kesehatan
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	93,76	Dinas Kesehatan
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	81,27	Dinas Kesehatan
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	82,65	Dinas Kesehatan
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	80,33	Dinas Kesehatan
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	52,90	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Capaian (%)	PD Penanggung Jawab
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	60,71	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	76,21	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	100	100	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	Dinas Kesehatan

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> (pelaporan SPM Kota Padang)

III. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020

Tabel 2-116 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Capaian (%)	PD Penanggung Jawab
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	Dinas PRKPP
2.	Penyediaan Pelayanan	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan	100	100	Dinas PRKPP

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Capaian (%)	PD Penanggung Jawab
	Pengolahan Air Limbah Domestik	pengolahan air limbah domestik			

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> (pelaporan SPM Kota Padang)

IV. *Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020*

Tabel 2-117 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Capaian (%)	SKPD
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni	100	100	Dinas PRKPP
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	Dinas PRKPP

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> (pelaporan SPM Kota Padang)

V. *Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020*

Tabel 2-118 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Capaian (%)	SKPD
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada	100	100	Satpol PP
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	BPBD
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	BPBD
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	BPBD

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Capaian (%)	SKPD
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	Dinas Kebakaran

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> (pelaporan SPM Kota Padang)

VI. Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020

Tabel 2-119 Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Capaian (%)	SKPD
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	Dinas Sosial
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	Dinas Sosial
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	Dinas Sosial
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	100	Dinas Sosial
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	Dinas Sosial

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> (pelaporan SPM Kota Padang)

2.5.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4)

Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dari 94 target/sasaran global dan 17 *goals*. Dari 319 indikator TPB Indonesia 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum, sehingga setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya. Indikator-indikator TPB dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi :

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat : 308
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi : 235
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten : 220
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota : 222

TPB dengan indikator terbanyak adalah TPB No.3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera yaitu total 34 indikator (15%) dan diikuti dengan TPB No.1 Tanpa Kemiskinan dengan jumlah indikator 25 (11%) dan TPB No.16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh dengan 21 indikator (9%). Rincian TPB Kota Padang terkait target, indikator dan jenis urusan TPB Kota Padang dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2-120 Jumlah Indikator TPB Kota Padang

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Persentase
1	Tanpa Kemiskinan	25	11
2	Tanpa kelaparan	11	5
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	15
4	Pendidikan berkualitas	13	6
5	Kesetaraan gender	14	6
6	Air bersih dan sanitasi layak	18	8
7	Menjamin akses energi	2	1
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	8
9	Infrastruktur, industri dan inovasi	13	6
10	Mengurangi kesenjangan	6	3
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	20	9
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	2
13	Penanganan perubahan iklim	2	1

14	Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim	8	3
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	2
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	9
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	7
	TOTAL	230	100 %

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

Beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah :

1. Wewenang;
2. Kekhususan indikator;
3. Kondisi geografis; dan
4. Ketentuan indikator RPJMD.

Oleh karena itu, pembahasan capaian TPB Kota Padang dibagi menjadi 3 pokok bahasan utama yaitu :

1. *Capaian TPB menurut kategori capaian;*

Kota Padang telah mulai melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat) kategori:

1. Indikator TPB yang **SUDAH** dilaksanakan dan **SUDAH** mencapai target/SS;
2. Indikator TPB yang **SUDAH** dilaksanakan tetapi **BELUM** mencapai target/SB;
3. Indikator TPB **BELUM** dilaksanakan dan **BELUM** mencapai target/BB;
4. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA;

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Padang yang telah dilaksanakan dan mencapai target baru mencapai 46 % (107 indikator) dari total 230 indikator yang menjadi kewenangan Kota.

Berikut komposisi secara keseluruhan terhadap capaian TPB Kota Padang seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2-121 Proporsi Capaian TPB Kota Padang Tahun 2021

Sudah dilaksanakan dan sudah tercapai target (SS)	Sudah dilaksanakan tetapi belum tercapai target (SB)	Bukan Kewenangan (BK)	Data tidak tersedia (NA)
46 %	19%	8%.	27%

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

II. Capaian TPB Menurut Pilar

TPB dapat dikelompokkan berdasarkan 4 pilar yaitu pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi serta pilar hukum dan tata kelola. Pilar yang indikator sudah terlaksana dan tercapai terbanyak adalah pilar sosial (97 indikator) seperti tergambar pada tabel berikut:

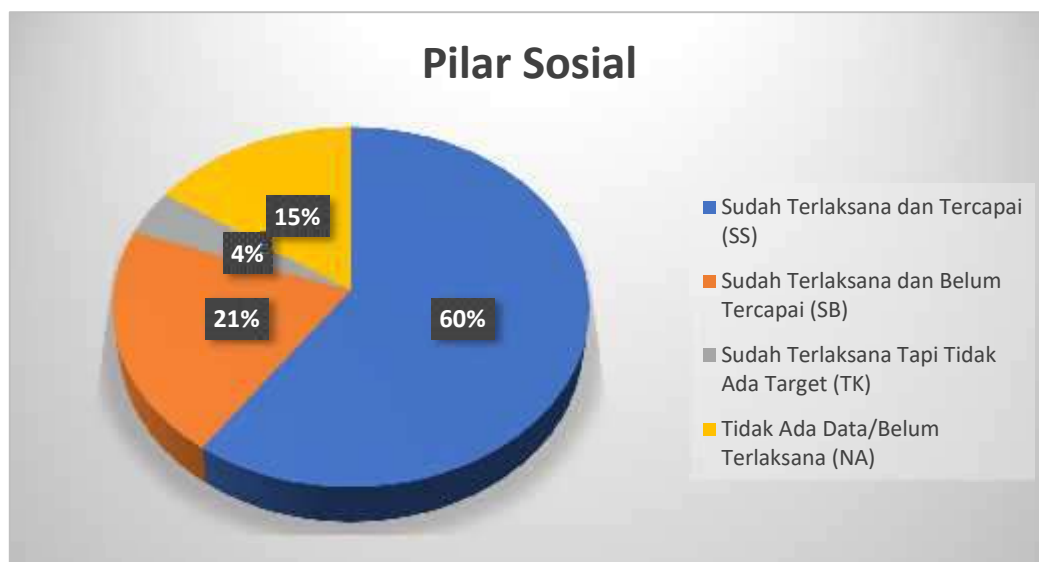
Tabel 2-122 Rincian Pencapaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar

No	Nama Pilar	Jumlah Indikator	Sudah Terlaksana dan Tercapai (SS)	Sudah Terlaksana dan Belum Tercapai (SB)	Sudah Terlaksana Tapi Tidak Ada Target (TK)	Tidak Ada Data/Belum Terlaksana (NA)
1	Sosial	97	58	20	4	15
2	Lingkungan	57	18	14	5	20
3	Ekonomi	55	21	6	7	21
4	Hukum dan Tata Kelola	21	10	3	2	6
	Jumlah	222	107	43	18	62

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

A. Pilar Sosial

Evaluasi komposisi pilar sosial tertinggi adalah kategori sudah terlaksana dan sudah tercapai, yaitu mencapai 58 (60%) indikator dari total indikator pilar sosial. Jenis urusan pada pilar sosial yang terbanyak dengan kategori tidak ada data adalah bidang kehidupan sehat dan sejahtera kemudian diikuti oleh bidang tanpa kemiskinan dan kesetaraan gender. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

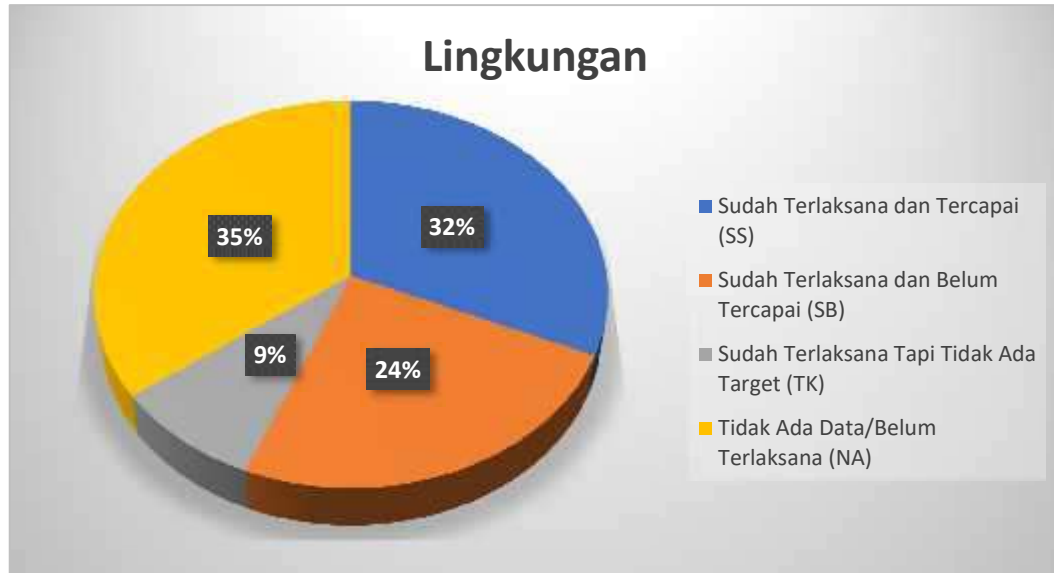


Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

Gambar 2-51 Evaluasi Pelaksanaan TPB Pilar Sosial

B. Pilar Lingkungan

Evaluasi komposisi pilar lingkungan tertinggi adalah kategori belum ada data, yaitu mencapai 20 indikator atau sekitar 35% dari total indikator pilar lingkungan. Gambaran umum indikator dengan kategori tidak ada data adalah mengenai Kota pemukiman dan berkelanjutan dan air bersih dan sanitasi layak, seperti terlihat pada gambar berikut:

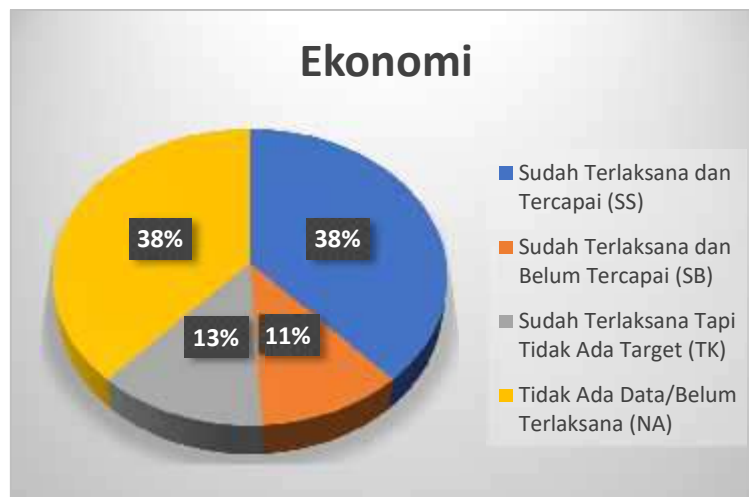


Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

Gambar 2-52 Evaluasi Pelaksanaan TPB Pilar Lingkungan

C. Pilar Ekonomi

Persentase kategori tidak ada data pada pilar ekonomi mempunyai capaian yang sama antara persentase yang tercapai dan terlaksana dengan persentase tidak ada data, yaitu sama-sama pada kategori 21 indikator atau 35%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kategori tidak ada data ini menjadi dominan dalam evaluasi pelaksanaan TPB di Kota Padang, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jenis urusan dengan kategori tidak ada data terbanyak adalah urusan infrastruktur industry dan inovasi, indikator yang tidak ada data mencapai 6 indikator.

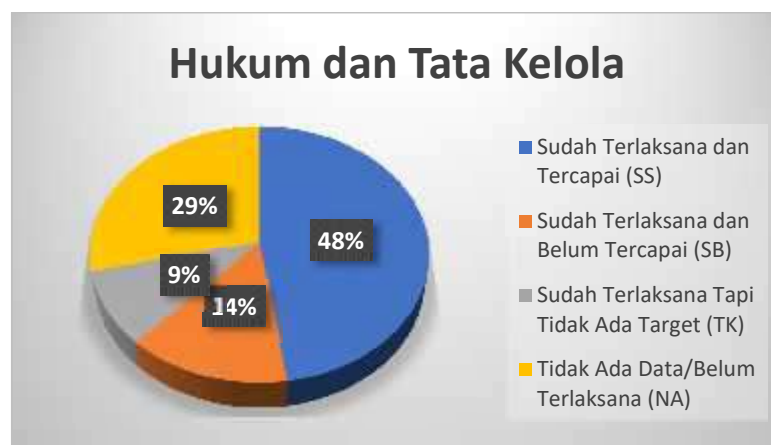


Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

Gambar 2-53 Evaluasi Pelaksanaan TPB Pilar Ekonomi

D. Hukum dan Tata Kelola

Pilar hukum dan tata kelola, dimana indikator terlaksana dan sudah tercapai mempunyai peringkat tertinggi sekitar 10 indikator atau berada pada 48%, sedangkan indikator tidak ada data menduduki urutan ke 2. Evaluasi Pelaksanaan TPB pilar hukum dan tata kelola dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

Gambar 2-54 Evaluasi Pelaksanaan TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

III. **Capaian** TPB Menurut Jenis Urusan dan SPM

Berdasarkan kategori urusan bidang kesehatan mempunyai jumlah indikator terbesar sekaligus mempunyai jumlah indikator terbanyak untuk kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (15 indikator) serta katagori tidak ada data (12 indikator).

Diantara jenis urusan tersebut terdapat 6 jenis urusan yang tergolong SPM seperti yang telah dibahas sebelumnya. SPM Kesehatan memiliki indikator

TPB yang terbanyak mencapai target. Evaluasi pelaksanaan TPB berdasarkan SPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-123 Evaluasi Pelaksanaan Indikator TPB Berdasarkan SPM

No	Nama SPM	Jumlah Indikator	SS	SB	TT	NA
1	Kesehatan	26	15	3	4	4
2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12	2	2	6	2
3	Pekerjaan Umum	7	0	3	0	4
4	Pendidikan	13	3	5	2	3
5	Perumahan Rakyat	1	0	0	0	1
6	Sosial	4	2	2	0	0
Total		63	22	15	12	14

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019-2024



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD KOTA
PADANG TAHUN 2019-2024

Daftar Isi

3	BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	3-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	3-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	3-2
3.1.2	Neraca Daerah	3-19
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	3-23
3.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	3-23
3.2.2	Kebijakan Belanja Daerah	3-24
3.2.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah	3-25
3.3	Kerangka Pendanaan	3-28
3.3.1	Proyeksi Pendapatan Daerah	3-28
3.3.2	Proyeksi Belanja Daerah	3-31
3.3.3	Proyeksi Defisit dan Pembiayaan	3-34
3.3.4	Perhitungan Kerangka Pendanaan	3-39
3.3.5	Kebijakan Keuangan Di Masa Mendatang	3-41

Daftar Tabel

Tabel 3-1 Realisasi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021(%).....	3-2
Tabel 3-2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021..	3-5
Tabel 3-3 Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021.....	3-6
Tabel 3-4 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2017-2020	3-6
Tabel 3-5 Target dan Realisasi PAD Kota Padang Tahun 2017-2021	3-7
Tabel 3-6 Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021.....	3-7
Tabel 3-7 Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Realisasi Pendapatan Transfer Kota Padang Tahun 2017-2021	3-8
Tabel 3-8 Realisasi Pendapatan Transfer Kota Padang Tahun 2017-2020	3-9
Tabel 3-9 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021.....	3-9
Tabel 3-10 Target dan Realisasi Belanja Kota Padang Tahun 2017-2021	3-10
Tabel 3-11 Kontribusi Komponen Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021	3-11
Tabel 3-12 Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2017-2020 dan Prognosis APBD Tahun 2021	3-12
Tabel 3-13 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021	3-13
Tabel 3-14 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Tahun 2017-2021	3-15
Tabel 3-15 Perhitungan Analisa Rasio Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2016-2019.....	3-19
Tabel 3-16 Perkembangan Pos-Pos Neraca Kota Padang Tahun 2016-2019 (Dalam Rupiah)	3-20
Tabel 3-17 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024	3-29
Tabel 3-18 Kerangka Pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2024	3-30
Tabel 3-19 Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024	3-33
Tabel 3-20 Proyeksi Pembiayaan Pemerintah Kota Padang Tahun 2020-2024.....	3-36
Tabel 3-21 Kerangka Pendanaan Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 ...	3-37
Tabel 3-22 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024	3-40

Daftar Gambar

Gambar 3-1 Struktur APBD Kota Padang	3-3
Gambar 3-2 Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kota Padang Tahun 2017-2021.....	3-4
Gambar 3-3 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah.....	3-4
Gambar 3-4 Jenis-Jenis Pendapatan Transfer.....	3-5
Gambar 3-5 Belanja Daerah Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019	3-10
Gambar 3-6 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah.....	3-28
Gambar 3-7 Kerangka Pemikiran Proyeksi Belanja Daerah	3-32
Gambar 3-8 Analisa Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	3-34

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah Pemerintah Kota Padang merupakan semua hak dan kewajiban Pemerintah Kota Padang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Pemerintah Kota Padang sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Terkait dengan hal tersebut serta dalam rangka perwujudan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat maka perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Perubahan RPJMD pada aspek keuangan daerah dilakukan akibat perubahan terhadap regulasi keuangan daerah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan keuangan daerah Kota Padang.

Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pada bab ini terkait pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi APBD dan laporan keuangan selama 5 (lima) tahun sebelumnya yakni Realisasi 2017-2020 serta prognosis APBD Tahun 2021.

Selain itu juga terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah juga memberikan pengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*).

Pada Bab ini juga disajikan gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam lima tahun terakhir dan kerangka proyeksi perubahan pendanaan mendatang selama periode RPJMD Tahun 2019-2024.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kondisi realisasi kinerja keuangan daerah Kota Padang tahun 2017-2020, diwarnai oleh dinamika perubahan sistem pemerintah daerah. PP Nomor 18 Tahun 2016 yang menjadi dasar pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan secara efektif oleh Pemerintah Kota Padang melalui perubahan struktur organisasi pemerintah daerah Kota Padang berdasarkan pada Peraturan Daerah. Kinerja keuangan daerah pada masa lalu memberikan gambaran kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi

PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kota Padang periode tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel 3-1 sebagai berikut.

Tabel 3-1 Realisasi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021(%)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	DOFD (%)	Pertumbuhan DOFD (%)
2017	548.653.179.266,03	2.092.277.707.122,03	26,22	31,77
2018	487.937.882.411,61	2.160.375.621.454,61	22,59	(13,87)
2019	546.108.570.689,61	2.350.116.615.606,61	23,24	2,89
2020	499.824.154.809,67	2.167.553.674.655,67	23,06	(0,77)
2021	889.902.818.000,00	2.613.882.968.640,00	34,05	47,64
Rata-Rata			25,83	13,53

Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2020 dan APBD Tahun 2021

Dari tabel 3-1 tampak bahwa Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kota Padang selama periode tahun 2017-2021 rata-rata 25,83 persen. Secara keseluruhan, DOFD Kota Padang pada periode tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang cenderung meningkat kecuali untuk tahun 2018 yang turun dari tahun 2017 dan tahun 2020 yang menurun akibat Pandemi Covid-19 dibanding tahun 2019. Secara rata-rata pertumbuhan DOFD selama tahun 2017-2021 adalah sebesar 13,53%.

Melihat perkembangan nilai DOF Kota Padang tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa sedang terjadi perkembangan ekonomi yang membaik serta komitmen kuat dari Pemerintah Kota Padang untuk memberikan kemudahan berinvestasi dan membangun iklim dan ekosistem berusaha di Kota Padang. Namun demikian, tingkat ketergantungan Kota Padang terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi namun menunjukkan trend positif dalam aspek kemandirian. Kondisi seperti ini sebenarnya masih bisa dianggap wajar khususnya bagi daerah yang sedang berkembang yang membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah mampu meningkatkan derajat kemandirian, meskipun demikian tantangan terbesar Kota Padang ke depan adalah bagaimana meningkatkan DOFD daerah sehingga bisa lebih mandiri dalam perekonomian daerah khususnya dan pembangunan dalam arti luas.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 ini penyajian komponen APBD Pemerintah Kota Padang mengacu kepada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah yakni terdiri dari 3 kelompok yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan komponen belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja

Tidak terduga dan Belanja Transfer. Lebih lengkap struktur APBD Kota Padang dapat dilihat pada gambar 3-1 berikut:



Gambar 3-1 Struktur APBD Kota Padang

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Padang dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Padang tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 3-2 berikut ini.



Gambar 3-2 Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kota Padang Tahun 2017-2021

Sumber: LRA Kota Padang, 2017-2020 dan APBD Tahun 2021

I. Kinerja Pendapatan Daerah

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, komponen pendapatan daerah Kota Padang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut digambarkan jenis-jenis sumber pendapatan asli daerah.



Gambar 3-3 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer dibagi menurut beberapa jenis meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana desa, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Berikut digambarkan jenis-jenis pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer.



Gambar 3-4 Jenis-Jenis Pendapatan Transfer

Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah Kota Padang selama 5 tahun (2017-2021) terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pertumbuhan rata-rata pertahun pendapatan daerah Kota Padang tahun 2017 hingga tahun 2021 mencapai 6,2%, atau meningkat dari Rp. 2.092.277.707.122 pada tahun 2017 menjadi Rp. 2.613.882.968.640 pada tahun 2021. Tingkat realisasi pendapatan daerah Kota Padang selama tahun 2017-2021 dibandingkan dengan target secara rata-rata mencapai 92%.

Tabel 3-2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2017	2.177.091.356.188,00	2.092.277.707.122,03	96,10		
2018	2.327.874.779.500,00	2.160.375.621.454,61	92,80	6,93	3,25
2019	2.692.438.463.837,32	2.350.116.615.606,61	87,29	15,66	8,78
2020	2.363.880.109.857,00	2.167.553.674.655,67	91,69	(12,20)	(7,77)
2021	2.613.882.968.640,00			10,58	
Rata-rata			91,97	5,24	1,42

Sumber: LRA Kota Padang, 2017-2020 dan APBD Tahun 2021

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2017-2021 didominasi oleh sumber dalam bentuk pendapatan transfer dengan porsi rata-rata 70,3%, disusul oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 25,8% dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar 3,9%. Walaupun kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah terus meningkat namun masih menunjukkan struktur pendapatan daerah masih belum kokoh karena tingkat ketergantungan cukup tinggi terhadap pendapatan transfer yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah tinggi. Berikut disajikan dalam tabel 3.3 kontribusi masing-masing komponen dalam pendapatan daerah Kota Padang tahun 2017-2021.

Tabel 3-3 Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
Pendapatan Asli Daerah	26,2%	22,6%	23,2%	23,1%	34,0%	25,8%
Pendapatan Transfer	73,5%	72,7%	72,2%	71,6%	61,3%	70,3%
Lain-Lain Pendapatan Daerah	0,3%	4,7%	4,6%	5,3%	4,7%	3,9%

Sumber: LRA dan APBD Kota Padang TA 2017-2021

Realisasi penerimaan daerah selama tahun 2017-2020 disajikan dalam Tabel 3-4 berikut ini. Sedangkan pada tahun 2021 masih dalam bentuk APBD sehingga tidak disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3-4 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN	2.092.277.707.122,03	2.160.375.621.454,61	2.350.116.615.606,61	2.167.553.674.655,67
Pendapatan Asli Daerah	548.653.179.266,03	487.937.882.411,61	546.108.570.689,61	499.824.154.809,67
Pajak Daerah	327.916.583.327,00	348.898.074.970,35	388.095.396.286,00	344.680.260.161,00
Retribusi Daerah	35.291.295.602,00	41.586.714.336,00	48.243.550.480,00	37.157.893.443,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.643.528.973,00	10.255.166.800,00	11.711.218.378,00	12.326.936.083,00
Lain-Lain PAD yang sah	172.801.771.364,03	87.197.926.305,26	98.058.405.545,61	105.659.065.122,67
Pendapatan Transfer	1.538.206.578.021,00	1.570.187.030.067,00	1.696.988.903.351,00	1.551.955.503.097,00
Transfer Pemerintah	1.413.043.330.177,00	1.456.179.632.546,00	1.576.511.032.667,00	1.458.585.538.356,00
Dana Perimbangan	1.360.290.810.177,00	1.427.929.632.546,00	1.524.369.871.667,00	1.414.136.103.356,00
Dana Transfer	1.166.545.253.053,00	1.164.898.671.442,00	1.223.594.595.526,00	1.134.703.936.865,00
Dana Alokasi Umum	1.100.370.559.000,00	1.100.370.559.000,00	1.176.301.985.000,00	1.061.387.887.000,00
Dana Bagi Hasil	66.174.694.053	64.528.112.442,00	47.292.610.526,00	73.316.049.865,00
Dana Transfer	193.745.557.124,00	263.030.961.104,00	300.775.276.141,00	279.432.166.491,00
Dana Alokasi Khusus	193.745.557.124,00	263.030.961.104,00	300.775.276.141,00	279.432.166.491,00
Dana Insentif Daerah	52.752.520.000,00	28.250.000.000,00	52.141.161.000,00	44.449.435.000,00
Transfer Antar Daerah	125.163.247.844,00	114.007.397.521,00	120.477.870.684,00	93.369.964.741,00
Pendapatan Bagi Hasil	111.146.247.844,00	114.007.397.521,00	108.375.673.684,00	93.169.964.741,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota	14.017.000.000,00	0,00	12.102.197.000,00	200.000.000,00
Lain-lain Pendapatan	5.417.949.835,00	102.250.708.976,00	107.019.141.566,00	115.774.016.749,00
Dana Darurat				
Hibah	5.417.949.835,00	102.250.708.976,00	107.019.141.566,00	115.774.016.749,00
Lain-lain Pendapatan				

Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2020

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan sumber Pendapatan Daerah Kota Padang lainnya. Selama kurun waktu tahun 2017-2021, PAD Kota Padang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,09% atau peningkatan realisasi Rp. 548.653.179.266,03 pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 499.824.154.809,67 pada tahun 2020.

Tingkat realisasi PAD selama tahun 2017-2020 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut secara rata-rata mencapai 78,85% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 8,09%. Diperlukan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan tingkat capaian realisasi PAD.

Berikut disajikan tabel 3-5 perbandingan antara target dengan realisasi PAD, tingkat capaian dan tingkat pertumbuhan anggaran serta pertumbuhan realisasi selama tahun 2017-2020.

Tabel 3-5 Target dan Realisasi PAD Kota Padang Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2017	600.028.948.782,00	548.653.179.266,03	91,44	25,80	39,99
2018	601.248.595.500,00	487.937.882.411,61	81,15	0,20	(11,07)
2019	808.267.778.199,32	546.108.570.689,61	67,57	34,43	11,92
2020	664.266.307.878,00	499.824.154.809,67	75,24	(17,82)	(8,48)
2021	889.902.818.000,00			33,97	
Rata-Rata			78,85	15,32	8,09

Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2020 dan APBD Tahun 2021

Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah selama tahun 2016-2019 secara rata-rata baru mencapai 25,8% yang menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah baik pusat maupun provinsi masih cukup tinggi. Tingkat Kemandirian dalam membiayai pendanaan kebutuhan pembangunan daerah yang masih rendah tersebut harus ditingkatkan melalui upaya penggalan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga diharapkan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi tidak terlalu besar.

Tabel 3-6 menjelaskan kontribusi masing-masing komponen realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang serta rata-rata proporsi/kontribusi selama tahun 2017-2021. Untuk tahun 2021 menggunakan data APBD tahun anggaran 2021.

Tabel 3-6 Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021

Uraian	Kontribusi Terhadap PAD (%)					
	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
Pajak Daerah	59,77	71,50	71,07	68,96	75,35	69,33
Retribusi Daerah	6,43	8,52	8,83	7,43	10,83	8,41

Uraian	Kontribusi Terhadap PAD (%)					
	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,30	2,10	2,14	2,47	2,25	2,25
Lain-Lain PAD yang sah	31,50	17,87	17,96	21,14	11,58	20,01
Lain-Lain PAD yang sah	31,50	17,87	17,96	21,14	11,58	20,01

Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2020 dan APBD Tahun 2021

Pajak daerah merupakan komponen yang berkontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2017-2021 yakni sebesar 69,33% dan diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 20,01% dan Retribusi Daerah sebesar 8,41% dan terendah adalah dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yakni sebesar 2,25% rata-rata per tahunnya selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah merupakan sumber utama terhadap pendapatan asli daerah. Besarnya kontribusi PAD dari pajak daerah juga menunjukkan keberhasilan pembangunan di Kota Padang.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer mengalami pertumbuhan rata-rata selama tahun 2017-2021 adalah sebesar 6,8% pertahun atau meningkat dari Rp.1.538.206.578.021,00 pada tahun 2017 menjadi Rp.1.601.633.950.640,00 pada tahun 2021. Kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan Daerah selama tahun 2017-2021 sangat besar yakni rata-rata per tahunnya sebesar 70,3% dari total pendapatan daerah.

Komponen penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat yakni rata-rata sebesar 92,8% sedangkan transfer antar daerah adalah rata-rata sebesar 7,13%. Rata-rata pertumbuhan transfer pemerintah pusat untuk Pemerintah Kota Padang selama tahun 2017-2021 adalah sebesar 0,77% sedangkan rata-rata pertumbuhan transfer antar daerah untuk Pemerintah Kota Padang selama tahun 2017-2021 adalah sebesar 0,80%. Berikut diuraikan dalam tabel 3-7 tingkat kontribusi dan pertumbuhan komponen dari pendapatan transfer.

Tabel 3-7 Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Realisasi Pendapatan Transfer Kota Padang Tahun 2017-2021

Tahun	Kontribusi (%)		Pertumbuhan (%)	
	Transfer Pemerintah Pusat	Transfer Antar Daerah	Transfer Pemerintah Pusat	Transfer Antar Daerah
2017	91,86	8,14	(1,94)	7,28
2018	92,74	7,26	3,05	(8,91)
2019	92,90	7,10	8,26	5,68
2020	93,98	6,02	(7,48)	(22,50)
2021	92,86	7,14	1,97	22,45
Rata-Rata	92,87	7,13	0,77	0,8

Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2020 dan APBD Tahun 2021

Penerimaan dari dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri atas Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Dana Transfer Khusus bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Berikut diuraikan rincian realisasi pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer tahun 2017-2020. Tahun 2021 tidak disajikan karena masih dalam tahun berjalan.

Tabel 3-8 Realisasi Pendapatan Transfer Kota Padang Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Transfer	1.538.206.578.021,00	1.570.187.030.067,00	1.696.988.903.351,00	1.551.955.503.097,00
Transfer Pemerintah	1.413.043.330.177,00	1.456.179.632.546,00	1.576.511.032.667,00	1.458.585.538.356,00
Dana Perimbangan	1.360.290.810.177,00	1.427.929.632.546,00	1.524.369.871.667,00	1.414.136.103.356,00
Dana Transfer	1.166.545.253.053,00	1.164.898.671.442,00	1.223.594.595.526,00	1.134.703.936.865,00
Dana Alokasi Umum	1.100.370.559.000,00	1.100.370.559.000,00	1.176.301.985.000,00	1.061.387.887.000,00
Dana Bagi Hasil	66.174.694.053	64.528.112.442,00	47.292.610.526,00	73.316.049.865,00
Dana Transfer	193.745.557.124,00	263.030.961.104,00	300.775.276.141,00	279.432.166.491,00
Dana Alokasi Khusus	193.745.557.124,00	263.030.961.104,00	300.775.276.141,00	279.432.166.491,00
Dana Insentif Daerah	52.752.520.000,00	28.250.000.000,00	52.141.161.000,00	44.449.435.000,00
Transfer Antar Daerah	125.163.247.844,00	114.007.397.521,00	120.477.870.684,00	93.369.964.741,00
Pendapatan Bagi Hasil	111.146.247.844,00	114.007.397.521,00	108.375.673.684,00	93.169.964.741,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota	14.017.000.000,00	0,00	12.102.197.000,00	200.000.000,00

Sumber: Data LRA Kota Padang Tahun 2017-2020

C. Lain-lain pendapatan daerah

Rata-rata Lain-lain pendapatan daerah selama tahun 2017-2021 berkontribusi sebesar 3,9% terhadap total pendapatan daerah. Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, lain-lain pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2017-2021, lain-lain pendapatan daerah hanya bersumber dari pendapatan hibah. Berikut disajikan nilai realisasi pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah selama tahun 2017-2020 dan target APBD tahun 2021.

Tabel 3-9 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
2017	6.487.955.000,00	5.417.949.835,00	83,50
2018	125.446.200.000,00	102.250.708.976,00	81,51
2019	129.533.000.000,00	107.019.141.566,00	82,62
2020	119.346.200.000,00	115.774.016.749,00	97,01
2021	122.346.200.000,00		

Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2020 dan APBD Tahun 2021

II. Kinerja Belanja Daerah

Analisis belanja daerah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah Kota Padang pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Padang, di aspek belanja dititikberatkan pada kebijakan belanja yang sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah yang tercermin pada APBD. Melalui belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi yang bermanfaat langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Perubahan RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024, penyajian belanja daerah dilakukan dengan mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 yakni pengelompokkan belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Berikut diuraikan rincian belanja daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019.



Gambar 3-5 Belanja Daerah Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019

Selama tahun 2017-2020 realisasi belanja daerah Kota Padang mengalami peningkatan dari Rp.2.077.455.348.192,00 pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp.2.139.909.477.473,78 pada tahun 2020, dan anggaran belanja pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.2.636.882.968.640,00 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2.8%. Tingkat realisasi penyerapan belanja daerah selama tahun 2016-2019 dengan memperbandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi belanja secara rata-rata mencapai 89,6%. Berikut disajikan target dan realisasi serta tingkat capaian dan pertumbuhan belanja daerah tahun 2017-2021.

Tabel 3-10 Target dan Realisasi Belanja Kota Padang Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (Rp)
2017	2.339.522.587.754,21	2.077.455.348.192,00	88,80		
2018	2.387.533.525.597,00	2.177.972.844.481,00	91,22	2,05	4,84
2019	2.748.605.226.492,32	2.351.499.268.939,71	85,55	15,12	7,97
2020	2.380.998.545.068,08	2.139.909.477.473,78	89,87	(13,37)	(9,00)
2021	2.636.882.968.640,00			10,75	
Rata-Rata			88,86	3,64	1,27

Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2020 dan APBD Tahun 2021

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuk belanja daerah pada tahun 2017-2021, belanja daerah didominasi untuk pemenuhan belanja operasi dengan proporsi rata-rata sebesar 80,4%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pengalokasian belanja daerah sebagian besar masih diarahkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan lainnya. Namun demikian secara proporsi belanja operasi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016, proporsi belanja tidak langsung sebesar 81,17% dan menurun sampai pada angka 79,07% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang berkomitmen kuat mengalokasikan peningkatan belanja yang berdampak pada pembangunan daerah dan bersifat jangka panjang di Kota Padang dengan meningkatkan distribusi belanja pada komponen belanja modal.

Tabel 3-11 menyajikan informasi kontribusi komponen realisasi belanja daerah Kota Padang tahun 2017-2020 dan prognosis pada APBD tahun 2021.

Tabel 3-11 Kontribusi Komponen Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021

Uraian	Kontribusi Terhadap Belanja Daerah (%)					
	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
Belanja Operasi	80,82	80,72	78,93	79,18	82,50	80,43
Belanja Pegawai	55,95	56,15	57,51	60,34	57,21	57,43
Belanja Barang dan Jasa	38,26	36,70	36,99	37,76	37,12	37,36
Belanja Bunga	0,27	0,30	0,23	0,10	0,00	0,18
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,17
Belanja Hibah	5,49	6,64	4,84	1,77	4,09	4,57
Belanja Bantuan Sosial	0,04	0,21	0,43	0,04	0,75	0,29
Belanja Modal	19,15	19,28	20,88	14,25	17,06	18,12
Belanja Tidak Terduga	0,03	0,00	0,18	6,56	0,41	1,44
Belanja Transfer	0	0	0	0	0	0,00

Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2020 dan APBD Tahun 2021

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah untuk manfaat jangka pendek (kurang dari 1 tahun). Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Berdasarkan realisasi belanja operasi, komponen belanja pegawai memiliki proporsi terbesar yakni rata-rata sebesar 57,43% dari total belanja operasi dan diikuti oleh belanja barang dan jasa sebesar 37,36%.

Berikut diuraikan lebih detail realisasi belanja daerah Kota Padang pada tahun 2017-2020 dan prognosis pada APBD Tahun 2021.

Tabel 3-12 Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2017-2020 dan Prognosis APBD Tahun 2021

Uraian	2017 Realisasi	2018 Realisasi	2019 Realisasi	2020 Realisasi	Tahun 2021 APBD
BELANJA DAERAH	2.077.455.348.192,00	2.177.972.844.481,00	2.351.499.268.939,71	2.139.909.477.473,78	2.636.882.968.640,00
Belanja Operasi	1.678.967.448.254,00	1.758.064.106.949,00	1.856.148.418.660,87	1.694.452.872.832,52	2.175.518.643.599,00
Belanja Pegawai	939.303.976.490,00	987.239.787.259,00	1.067.507.780.938,00	1.022.368.138.151,00	1.244.514.541.676,00
Belanja Barang dan Jasa	642.366.696.366,00	645.130.224.138,00	686.566.245.666,55	639.809.762.518,52	807.544.058.591,00
Belanja Bunga	4.546.933.296,00	5.272.577.971,00	4.198.402.972,00	1.619.535.715,00	
Belanja Subsidi	-			0,00	18.317.979.112,00
Belanja Hibah	92.135.315.102,00	116.776.717.581,00	89.864.999.084,32	29.990.936.448,00	88.891.214.220,00
Belanja Bantuan Sosial	614.527.000,00	3.644.800.000,00	8.010.990.000,00	664.500.000,00	16.250.850.000,00
Belanja Modal	397.843.408.958,00	419.839.593.968,00	491.009.055.949,84	304.984.047.898,61	449.925.036.932,00
Belanja Modal	397.843.408.958	419.839.593.968,00	491.009.055.949,84	304.984.047.898,61	449.925.036.932,00
Belanja Tidak Terduga	644.490.980,00	69.143.564,00	4.341.794.329,00	140.472.556.742,65	10.929.288.109,00
Belanja Tidak Terduga	644.490.980,00	69.143.564,00	4.341.794.329,00	140.472.556.742,65	10.929.288.109,00
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan					510.000.000,00

Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2020 dan APBD Tahun 2021

III. Kinerja Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan daerah dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah baik terjadi defisit atau surplus anggaran Kebijakan yang dibuat dalam penganggaran adalah kebijakan anggaran berimbang. Hal ini berarti semua SiLPA tahun sebelumnya direncanakan digunakan untuk menggerakkan pembangunan pada tahun berikutnya. SiLPA juga menunjukkan adanya upaya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Padang pada tahun anggaran tersebut.

Berikut disajikan nilai realisasi pembiayaan daerah Kota Padang tahun 2017-2021.

Tabel 3-13 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD
PENDAPATAN	2.092.277.707.122,03	2.160.375.621.454,61	2.350.116.615.606,61	2.167.553.674.655,67	2.613.882.968.640,00
BELANJA DAERAH	2.077.455.348.192,00	2.177.972.844.481,00	2.351.499.268.939,71	2.139.909.477.473,78	2.636.882.968.640,00
Surplus/Defisit	14.822.358.930,03	(17.597.223.026,39)	(1.382.653.333,10)	27.644.197.181,89	(23.000.000.000,00)
PEMBIAYAAN	136.368.478.356,21	126.593.985.681,57	56.167.525.607,18	17.118.435.211,08	23.000.000.000,00
Penerimaan Pembiayaan	141.868.478.356,21	171.592.653.974,57	108.996.762.655,18	53.947.672.274,08	50.000.000.000,00
SiLPA	116.180.840.566,21	151.190.837.219,57	108.996.762.655,18	53.947.672.274,08	50.000.000.000,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	25.687.637.790,00	20.401.816.755,00	0,00		0,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.500.000.000,00	44.998.668.293,00	52.829.237.048,00	36.829.237.063,00	27.000.000.000,00
Penyertaan Modal	5.500.000.000,00	20.000.000.000,00	26.000.000.000,00	10.000.000.000,00	27.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		24.998.668.293,00	26.829.237.048,00	26.829.237.063,00	0,00
Pembiayaan Neto	136.368.478.356,21	126.593.985.681,57	56.167.525.607,18	17.118.435.211,08	23.000.000.000,00
SILPA	151.190.837.286,24	108.996.762.655,18	54.784.872.274,08	44.762.632.392,97	0,00

Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2020 dan APBD Tahun 2021

Pada Tahun 2017-2021 kecuali tahun 2017, APBD Kota Padang mengalami defisit sedangkan pada tahun 2017 dan 2020 memperoleh surplus. Dari tabel diatas terlihat bahwa defisit yang terjadi mampu ditutupi oleh pembiayaan daerah khususnya yang bersumber dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Selain itu, Pengeluaran Pembiayaan juga dilakukan melalui penyertaan modal pada BUMD serta pembayaran atas pokok pinjaman. Setiap tahunnya bahkan terdapat SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun berkenaan.

Secara umum kinerja realisasi keuangan Pemerintah Kota Padang pada tahun 2017-2020 menunjukkan peningkatan kinerja baik dari aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan rekapitulasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang tahun 2017-2020 dan APBD tahun 2021.

Tabel 3-14 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Tahun 2017-2021

Uraian					2017	2018	2019	2020	2021
					Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD
PENDAPATAN					2.092.277.707.122,03	2.160.375.621.454,61	2.350.116.615.606,61	2.167.553.674.655,67	2.519.934.973.332,00
	Pendapatan Asli Daerah				548.653.179.266,03	487.937.882.411,61	546.108.570.689,61	499.824.154.809,67	808.184.679.649,00
	Pajak Daerah				327.916.583.327,00	348.898.074.970,35	388.095.396.286,00	344.680.260.161,00	640.526.276.598,00
	Retribusi Daerah				35.291.295.602,00	41.586.714.336,00	48.243.550.480,00	37.157.893.443,00	69.307.060.256,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				12.643.528.973,00	10.255.166.800,00	11.711.218.378,00	12.326.936.083,00	12.747.769.449,00
	Lain-Lain PAD yang sah				172.801.771.364,03	87.197.926.305,26	98.058.405.545,61	105.659.065.122,67	85.603.573.346,00
	Pendapatan Transfer				1.538.206.578.021,00	1.570.187.030.067,00	1.696.988.903.351,00	1.551.955.503.097,00	1.575.943.393.683,00
	Transfer Pemerintah Pusat				1.413.043.330.177,00	1.456.179.632.546,00	1.576.511.032.667,00	1.467.289.885.817	1.487.299.902.000,00
			Dana Perimbangan		1.360.290.810.177,00	1.427.929.632.546,00	1.441.907.890.817	1.414.136.103.356,00	1.441.907.890.817,00
			Dana Transfer Umum		1.166.545.253.053,00	1.102.183.826.817	1.223.594.595.526,00	1.134.703.936.865,00	1.102.183.826.817,00
			Dana Alokasi Umum		1.044.871.353.000	1.100.370.559.000,00	1.176.301.985.000,00	1.061.387.887.000,00	1.044.871.353.000,00
			Dana Bagi Hasil		57.312.473.817	64.528.112.442,00	47.292.610.526,00	73.316.049.865,00	57.312.473.817 ,00

Uraian					2017	2018	2019	2020	2021
					Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD
				Dana Transfer Khusus	193.745.557.124,00	339.724.064.000	300.775.276.141,00	279.432.166.491,00	339.724.064.000,00
				Dana Alokasi Khusus	339.724.064.000	263.030.961.104,00	300.775.276.141,00	279.432.166.491,00	339.724.064.000 ,00
				Dana Insentif Daerah	52.752.520.000,00	28.250.000.000,00	118.740.033.000	44.449.435.000,00	25.381.995.000,00
				Transfer Antar Daerah	125.163.247.844,00	114.007.397.521,00	120.477.870.684,00	220.984.031.000	108.653.507.866,00
				Pendapatan Bagi Hasil	111.146.247.844,00	25.381.995.000	108.375.673.684,00	93.169.964.741,00	106.653.507.866,00
				Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota	14.017.000.000,00	108.653.507.866	12.102.197.000,00	200.000.000,00	2.000.000.000,00
				Lain-lain Pendapatan Daerah	5.417.949.835,00	102.250.708.976,00	107.019.141.566,00	115.774.016.749,00	106.653.507.866
				Dana Darurat				2.000.000.000	
				Hibah	5.417.949.835,00	102.250.708.976,00	107.019.141.566,00	135.806.900.000	15.000.000.000,00
				Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan					120.806.900.000,00

Uraian						2017	2018	2019	2020	2021
						Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD
					Perundang-undangan					
					BELANJA DAERAH	2.077.455.348.192,00	2.177.972.844.481,00	2.351.499.268.939,71	2.139.909.477.473,78	2.590.820.702.112,00
					Belanja Operasi	1.678.967.448.254,00	1.758.064.106.949,00	1.856.148.418.660,87	1.694.452.872.832,52	2.133.958.553.643,00
					Belanja Pegawai	939.303.976.490,00	987.239.787.259,00	1.067.507.780.938,00	1.022.368.138.151,00	1.158.202.297.656,00
					Belanja Barang dan Jasa	642.366.696.366,00	645.130.224.138,00	686.566.245.666,55	639.809.762.518,52	858.662.266.677,00
					Belanja Bunga	4.546.933.296,00	5.272.577.971,00	4.198.402.972,00	1.619.535.715,00	274.240.551,00
					Belanja Subsidi	-			0,00	17.208.143.843,00
					Belanja Hibah	92.135.315.102,00	116.776.717.581,00	89.864.999.084,32	29.990.936.448,00	89.350.004.916,00
					Belanja Bantuan Sosial	614.527.000,00	3.644.800.000,00	8.010.990.000,00	664.500.000,00	10.261.600.000,00
					Belanja Modal	397.843.408.958,00	419.839.593.968,00	491.009.055.949,84	304.984.047.898,61	437.290.134.807,00
					Belanja Modal	397.843.408.958	419.839.593.968,00	491.009.055.949,84	304.984.047.898,61	437.290.134.807,00
					Belanja Tidak Terduga	644.490.980,00	69.143.564,00	4.341.794.329,00	140.472.556.742,65	19.572.013.662,00
					Belanja Tidak Terduga	644.490.980,00	69.143.564,00	4.341.794.329,00	140.472.556.742,65	19.572.013.662,00
					Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Belanja Bantuan Keuangan					0,00

Uraian		2017	2018	2019	2020	2021
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD
Surplus/Defisit		14.822.358.930,03	(17.597.223.026,39)	(1.382.653.333,10)	27.644.197.181,89	(70.885.728.780,00)
PEMBIAYAAN		136.368.478.356,21	126.593.985.681,57	56.167.525.607,18	17.118.435.211,08	70.885.728.780,00
	Penerimaan Pembiayaan	141.868.478.356,21	171.592.653.974,57	108.996.762.655,18	53.947.672.274,08	102.486.728.780,00
	SiLPA	116.180.840.566,21	151.190.837.219,57	108.996.762.655,18	53.947.672.274,08	44.824.375.310,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	25.687.637.790,00	20.401.816.755,00	0,00		57.662.353.470 ,00
	Pengeluaran Pembiayaan	5.500.000.000,00	44.998.668.293,00	52.829.237.048,00	36.829.237.063,00	31.601.000.000,00
	Penyertaan Modal	5.500.000.000,00	20.000.000.000,00	26.000.000.000,00	10.000.000.000,00	31.601.000.000,00
	Pembayaran Pokok Utang		24.998.668.293,00	26.829.237.048,00	26.829.237.063,00	0,00
Pembiayaan Neto		136.368.478.356,21	126.593.985.681,57	56.167.525.607,18	17.118.435.211,08	70.885.728.780,00
SILPA		151.190.837.286,24	108.996.762.655,18	54.784.872.274,08	44.762.632.392,97	0,00

Sumber: LRA Kota Padang Tahun 2017-2020 dan APBD Tahun 2021

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, pencairan dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Jika ditinjau dari analisa atas laporan keuangan neraca Pemerintah Kota Padang dengan pendekatan rasio lancar, quick rasio, serta rasio hutang terhadap aset dan terhadap modal semuanya menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berikut disajikan hasil analisa atas laporan keuangan neraca Pemerintah Kota Padang tahun 2016-2019.

Tabel 3-15 Perhitungan Analisa Rasio Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2016-2019

No	Uraian	Tahun (%)			
		2016	2017	2018	2019
1	Rasio Lancar (aktiva Lancar/utang lancar)	9,96	5,58	7,29	5,34
2	Cash Ratio (Kas/utang lancar)	5,36	3,07	3,32	1,59
3	Quick Ratio ((Aktiva lancar-persediaan)/utang lancar)	9,33	5,18	6,52	4,65
4	Solvabilitas Ratio (Utang/Aset)	0,84	1,51	0,84	0,44
5	Debt to Equity Ratio (Utang/Modal)	0,85	1,53	0,84	0,44

Sumber: Data Neraca APBD Kota Padang TA 2016-2019

Dari tabel 3-15 terlihat rasio kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang pada tahun 2016-2019 berkinerja baik. Analisa rasio dilakukan dengan menggunakan analisa likuiditas dan solvabilitas dengan berbagai instrument pengukurannya. Aset lancar Pemerintah Kota Padang berkinerja sangat baik yakni setiap 1 (satu) rupiah pada utang lancar mampu ditutup dengan 5 (lima) rupiah aktiva lancar di tahun 2019. Kekayaan Kota Padang 99,56% bersumber dari modal sendiri dan utang hanya membiayai sebesar 0,44%. Berikut disajikan neraca dan rata-rata pertumbuhan masing-masing komponen dalam neraca Pemerintah Kota Padang tahun 2016-2019.

Tabel 3-16 Perkembangan Pos-Pos Neraca Kota Padang Tahun 2016-2019 (Dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH (Rp)			
	2016	2017	2018	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Kas Daerah	106.880.183.339,54	141.854.487.790,57	100.462.021.749,18	48.566.950.028,08
Kas Di Kas BLUD	9.268.527.910,00	8.016.080.228,00	7.852.770.227,00	2.893.696.034,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	89.353.223,00	8.008.873,00	4.346.970,00	30.769.888,00
Kas di bendahara Penerimaan	14.033.000,00	98.815.500,00	25.798.000,00	19.803.500,00
Kas BOS			677.623.709,00	3.315.726.212,00
Kas Lainnya	18.832.819.469,00	1.330.551.385,00	-	
Piutang Pajak	196.820.018.854,00	210.880.732.018,00	221.705.990.656,00	233.248.485.648,00
Piutang Retribusi	6.517.462.445,00	6.399.457.642,00	7.702.656.837,00	8.652.450.899,00
Piutang Lainnya	34.161.773.351,00	27.398.114.984,00	29.186.281.775,00	27.331.517.769,00
Penyisihan Piutang Pajak	(132.058.479.119,72)	(134.923.313.913,73)	(147.233.408.552,94)	(156.513.436.475,19)
Penyisihan Piutang Retribusi	(5.148.230.883,11)	(5.731.885.581,00)	(6.647.642.707,00)	(7.195.754.699,97)
Penyisihan Piutang Lainnya	(503.148.825,00)	(597.461.300,00)	(649.973.150,00)	(734.200.350,00)
Belanja Dibayar Dimuka	105.267.406,33	262.366.441,67	640.756.566,46	481.880.540,20
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	255.058.094,00	24.050.891,00	20.339.327,00	13.406.750,00
Persediaan	15.649.613.052,01	19.658.171.373,97	25.383.719.341,78	23.662.404.333,81
Jumlah Aset Lancar	250.884.251.316,05	274.678.176.332,48	239.131.280.748,48	183.773.700.076,93
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Non Permanen				
Investasi Dana Bergulir	890.766.175,00	917.929.370,00	879.589.620,00	910.300.620,00
Investasi Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	88.974.102.602,67	145.780.593.619,42	162.701.506.682,13	179.079.177.585,16

URAIAN	JUMLAH (Rp)			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah Investasi Jk. Panjang	89.864.868.777,67	146.698.522.989,42	163.581.096.302,13	179.989.478.205,16
ASET TETAP				
Tanah	3.889.875.228.925,33	3.983.181.081.282,71	4.075.949.344.169,31	4.224.581.343.719,31
Peralatan dan Mesin	549.001.209.104,25	639.040.483.355,19	679.245.992.845,10	803.424.506.219,15
Gedung dan Bangunan	1.382.446.120.991,72	1.600.828.394.069,31	1.427.598.698.724,34	1.549.000.765.470,86
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.248.449.152.125,77	2.424.378.141.679,77	2.579.743.276.283,93	2.832.511.841.372,15
Aset Tetap Lainnya	79.256.975.830,33	96.069.684.489,62	107.494.008.895,38	131.086.584.543,40
Kontruksi dalam Pengerjaan	97.331.587.348,30	104.546.935.323,63	173.652.745.858,37	183.535.093.898,72
Akumulasi Penyusutan	(2.020.515.064.832,79)	(2.223.047.846.594,19)	(2.591.039.897.508,38)	(2.535.470.830.274,83)
Jumlah Aset Tetap	6.225.845.209.492,91	6.624.996.873.606,04	6.452.644.169.268,05	7.188.669.304.948,76
ASET LAINNYA				
Tuntutan Perbendaharaan	402.409.629,00	311.285.933,00	311.285.933,00	274.571.345,00
Tuntutan Ganti Rugi	169.602.116,00	413.483.208,00	404.130.772,00	381.599.431,00
Aset Tak Berwujud	2.873.932.500,00	3.006.646.870,00	4.293.452.896,80	4.287.095.373,04
Aset Lain-lain	256.343.558.846,14	19.795.159.786,00	210.186.616.537,07	200.676.211.431,96
Kas yang Dibatasi Penggunaanya	418.630.000,00	523.262.416,00	240.813.750,00	507.867.996,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	54.312.026.000,00	54.312.026.000,00	54.312.026.000,00	54.312.026.000,00
Jumlah Aset Lainnya	314.520.159.091,14	78.361.864.213,00	269.748.325.888,87	260.439.371.577,00
JUMLAH ASET	6.881.114.488.677,77	7.124.735.437.140,94	7.125.104.872.207,53	7.812.871.854.807,85
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	57.223.973,00	3.008.873,00	-	22.269.888,00
Utang Bunga	-	-	-	

URAIAN	JUMLAH (Rp)			
	2016	2017	2018	2019
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.909.832.465,20	41.924.661.015,20	5.556.180.406,00	6.991.985.800,62
Pendapatan diterima dimuka	695.955.718,75	250.000.000,00	171.000.000,00	95.000.000,00
Utang Jaminan	418.630.000,00	523.262.416,00	240.813.750,00	507.867.996,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	6.527.758.755,31	6.527.758.755,31	26.829.237.054,00	26.829.237.063,00
Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	25.200.981.440,26	49.228.691.059,51	32.797.231.210,00	34.446.360.747,62
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri	32.543.546.000,00	58.231.183.790,00	26.829.237.057,00	-
Jumlah Kewajiban Jk. Panjang	32.543.546.000,00	58.231.183.790,00	26.829.237.057,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN	57.744.527.440,26	107.459.874.849,51	59.626.468.267,00	34.446.360.747,62
EKUITAS				
Ekuitas	6.823.369.916.237,51	7.017.275.562.291,42	7.065.478.403.940,53	7.778.425.494.060,23
JUMLAH EKUITAS	6.823.369.916.237,51	7.017.275.562.291,42	7.065.478.403.940,53	7.778.425.494.060,23
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.881.114.443.677,77	7.124.735.437.140,93	7.125.104.872.207,53	7.812.871.854.807,85

Sumber: Data Neraca APBD Kota Padang TA 2016-2019

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
3. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- I. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan pemerintah daerah Kota Padang.*

Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi:

1. Insentif pajak dan retribusi daerah bagi yang terdampak Covid-19.
2. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara: membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
3. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB dan BPHTB yang akan menjadi Pajak Daerah.
4. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomian;

5. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
6. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil dan Kecamatan;
8. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
9. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
10. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

II. *Pendapatan Transfer*

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi ataupun Kab/Kota lainnya yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan serta tujuan tertentu lainnya. Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Pendapatan Transfer.
4. Meningkatkan kerjasama antar daerah.

III. *Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang terkait dengan pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan daerah lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Melakukan refocusing anggaran sebagai penanggulangan dampak Pandemi Covid-19.

2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui *analisis cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
4. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;
5. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
8. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
9. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
10. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

I. Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah:

1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
2. Merintis pemanfaatan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.
3. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

II. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD
2. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
3. Kebijakan untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kota Padang. Pengembangan tersebut diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/ masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Kota Padang. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah :
 - a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kota Padang;
 - b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah Kota Padang dengan pihak swasta atau dengan pihak *government*/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
 - c. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal;
 - d. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dan Mal Pelayanan Publik yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan;
 - e. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
 - f. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang

dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian, industri pengolahan dan industri manufaktur.

4. Kebijakan pengelolaan keuangan di masa lalu diarahkan pada upaya meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan Keuangan Daerah pada bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini dapat terlihat dari data yang ditampilkan pada bagian kinerja keuangan masa lalu di atas, dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi peningkatan proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Padang.

3.3 Kerangka Pendanaan

Dalam memproyeksikan pendanaan pada Perubahan RPJMD tahun 2019-2024 digunakan pendekatan yakni untuk kerangka pendanaan tahun 2020 dan 2021 digunakan data yang bersumber dari kesepakatan Pemerintah Kota Padang dengan DPRD Kota Padang yang dituangkan dalam bentuk APBD tahun 2020 dan APBD Tahun 2021 sedangkan untuk pendanaan tahun 2022-2024 diproyeksikan dengan menggunakan acuan format penyajian sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat memengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan di bidang keuangan negara dan daerah.

Atau jika digambarkan dalam memproyeksi pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3-6 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Berikut disajikan proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2019-2024.

Tabel 3-17 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024

Kode	Pendapatan Daerah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	2.350.116.615.607	2.167.554.544.656	2.519.934.973.332	2.585.904.500.866	2.799.821.675.132	2.879.063.551.886
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	546.108.570.690	499.825.024.810	808.184.679.649	989.902.818.000	1.001.015.450.000	1.026.953.140.000
4.1.01	Pajak Daerah	388.095.396.286	344.680.260.161	640.526.276.598	770.526.276.598	783.415.500.000	787.016.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	48.243.550.480	37.157.893.443	69.307.060.256	85.166.283.072	86.599.900.000	85.045.235.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.711.218.378	12.326.936.083	12.747.769.449	20.000.000.000	20.400.000.000	28.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	98.058.405.546	105.659.935.123	85.603.573.346	114.210.258.330	110.600.050.000	126.891.905.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.696.988.903.351	1.551.955.503.097	1.575.943.393.683	1.628.005.442.066	1.676.806.225.132	1.727.110.411.886
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.576.511.032.667	1.458.585.538.356	1.467.289.885.817	1.521.351.934.200	1.566.953.112.030	1.613.961.705.391
4.2.01.x	Dana Perimbangan	1.524.369.871.667	1.414.136.103.356	1.441.907.890.817		1.541.858.196.150	1.588.113.942.035
4.2.01.x.a	Dana Transfer Umum	1.223.594.595.526	1.134.703.936.865	1.102.183.826.817		1.145.504.594.490	1.179.869.732.325
4.2.01.x.a.i	Dana Alokasi Umum	1.176.301.985.000	1.061.387.887.000	1.044.871.353.000	1.044.871.353.000	1.076.217.493.590	1.108.504.018.398
4.2.01.x.a.ii	Dana Bagi Hasil	47.292.610.526	73.316.049.865	57.312.473.817	57.261.143.000	69.287.100.900	71.365.713.927
4.2.01.x.b	Dana Transfer Khusus	300.775.276.141	279.432.166.491	339.724.064.000		396.353.601.660	408.244.209.710
4.2.01.x.b.i	Dana Alokasi Khusus	300.775.276.141	279.432.166.491	339.724.064.000	220.420.044.000	396.353.601.660	408.244.209.710
4.2.01.x.b.i.a	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		68.878.598.492	118.740.033.000		59.432.696.410	61.215.677.302
4.2.01.x.b.i.b	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		210.553.567.999	220.984.031.000		336.920.905.250	347.028.532.408
4.2.01.y	Dana Insentif Daerah	52.141.161.000	44.449.435.000	25.381.995.000	44.449.435.000	25.094.915.880	25.847.763.356
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.477.870.684	93.369.964.741	108.653.507.866	106.653.507.866	109.853.113.102	113.148.706.495
4.2.02.x	Pendapatan Bagi Hasil	108.375.673.684	93.169.964.741	106.653.507.866	106.653.507.866	109.853.113.102	113.148.706.495
4.2.02.y	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota	12.102.197.000	200.000.000	2.000.000.000	0	0	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.019.141.566	115.774.016.749	135.806.900.000	24.749.445.038	122.000.000.000	125.000.000.000
4.3.1	Dana Darurat						
4.3.2	Hibah	107.019.141.566	19.281.498.779	15.000.000.000	24.749.445.038	122.000.000.000	125.000.000.000
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan		96.492.517.970	120.806.900.000	0	0	0

Sumber : Bappeda, Data Olahan, Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa total pendapatan daerah Kota Padang tahun 2019-2024 direncanakan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada APBD Tahun 2021 ditargetkan jumlah pendapatan daerah Kota Padang sebesar Rp. 2.519.934.973.332 dan pada tahun 2024 ditargetkan pendapatan daerah kota Padang sebesar 2.879.063.551.886 atau naik 22,51% dibanding tahun 2019 sebagai tahun awal RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024.

Berikut analisis proyeksi dan kontribusi/proporsi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2019-2024.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang pada tahun 2019-2024 direncanakan bersumber dari 4 (empat) sumber PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah. Berikut disajikan kerangka pendanaan yang bersumber dari PAD Kota Padang tahun 2019-2024.

Tabel 3-18 Kerangka Pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2024

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD yang sah	Total PAD
Tahun 2019	388.095.396.286	48.243.550.480	11.711.218.378	98.058.405.546	546.108.570.690
Tahun 2020	492.017.178.000	66.192.533.286	13.463.632.245	92.592.964.347	664.266.307.878
Tahun 2021	670.526.276.598	96.349.541.402	20.000.000.000	103.027.000.000	889.902.818.000
Tahun 2022	770.526.276.598	96.049.541.402	20.000.000.000	103.327.000.000	989.902.818.000
Tahun 2023	783.415.500.000	86.599.900.000	20.400.000.000	110.600.050.000	1.001.015.450.000
Tahun 2024	787.016.000.000	85.045.235.000	28.000.000.000	126.891.905.000	1.026.953.140.000

Sumber : Bappeda, Data Olahan, Tahun 2021

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahun 2019-2024 ditargetkan mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan persentase berfluktuatif dengan memperhatikan potensi sumber pendapatan asli daerah Kota Padang. Ditargetkan pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah Kota Padang hampir mencapai angka 1 (satu) Trilyun rupiah yakni sebesar Rp. 1.001.015.450.000,- dan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.026.953.140.000,- atau naik sebesar 88,05% dibanding awal RPJMD yakni tahun 2019. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kemandirian keuangannya.

Jika ditinjau dari proporsi sumber PAD, Sektor Pajak dan retribusi daerah masih menjadi andalan utama Pemerintah Kota Padang dalam penerimaan PAD tahun 2019-2024. Pajak diproyeksikan meningkat setiap tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, investasi dan geliat ekonomi masyarakat.

Retribusi daerah pada tahun 2022 diproyeksikan menurun yang disebabkan karena adanya pengalihan pelayanan publik yang selama ini merupakan objek retribusi yakni pengelolaan pasar, pantai air manis, dan trans padang kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Padang.

Sumber PAD terendah masih bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini disebabkan karena investasi Pemerintah Kota Padang masih terbatas pada Perumda PDAM, Bank Nagari, Balairung dan Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) dan BUMD baru yakni BUMD yang bergerak dalam pengelolaan Pasar. Hal ini merupakan bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi penyertaan modal Pemerintah Kota Padang yang mampu berkontribusi terhadap PAD serta meningkatkan Peran pemerintah Kota Padang.

Untuk meningkatkan PAD dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, maka akan dilakukan diversifikasi melalui pembentukan BUMD baru yakni BUMD Pasar. BUMD Pasar yang dibentuk akan mengelola kawasan pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang. Selain itu juga dilakukan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah baru terkait dengan pengelolaan dana bergulir untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kota Padang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

II. Pendapatan Transfer

Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer pada tahun 2019-2024 diproyeksikan meningkat setiap tahunnya seiring dengan semakin meningkatkan perekonomian daerah dan nasional serta perkiraan kenaikan kesejahteraan bagi pegawai. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) serta Dana Transfer Khusus (DAK) serta Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Provinsi dan Kabupaten Kota lainnya.

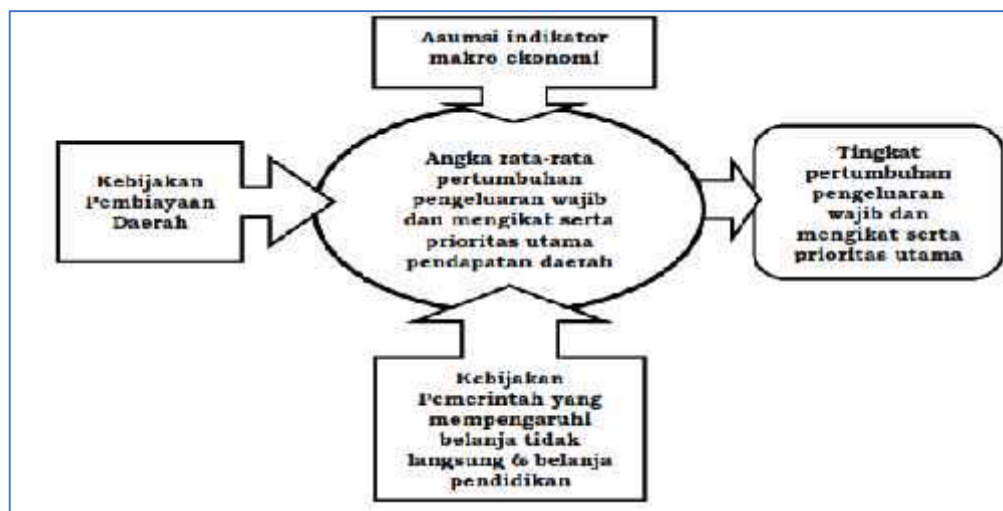
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat masih memiliki kontribusi terbesar sebagai sumber pendapatan. Walaupun secara nilai besarnya dana pendapatan transfer mengalami kenaikan, namun secara proporsi ditargetkan turun setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian keuangan kota Padang.

III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah dan dana darurat. Lain-lain pendapatan daerah juga diproyeksikan meningkat setiap tahunnya.

3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam memproyeksikan belanja daerah diperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, kebijakan pemerintah Kota Padang terkait belanja dan kebijakan pembiayaan. Kerangka pemikiran tersebut dalam analisis proyeksi belanja daerah disajikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 3-7 Kerangka Pemikiran Proyeksi Belanja Daerah

Dalam melakukan proyeksi belanja daerah Kota Padang tahun 2020-2024, dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Setelah diperhitungkan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat dilakukan perhitungan kapasitas riil. Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Tabel 3-19 Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024

Kode	Pendapatan Daerah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	BELANJA	2.351.499.268.940	2.139.909.477.474	2.590.820.702.112	2.786.625.822.659	2.777.471.675.132	2.877.913.551.886
5.1	BELANJA OPERASI	1.856.148.418.661	1.693.588.449.833	2.133.958.553.643	2.224.553.989.920	2.270.501.539.657	2.352.217.597.965
5.1.01	Belanja Pegawai	1.067.507.780.938	1.022.368.138.151	1.158.202.297.656	1.261.812.440.537	1.275.935.029.041	1.376.343.417.048
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	686.566.245.667	639.809.762.519	858.662.266.677	849.111.885.607	845.408.494.322	875.281.582.003
5.1.03	Belanja Bunga	4.198.402.972	1.619.535.715	274.240.551	2.648.725.547	1.942.541.431	2.013.707.860
5.1.04	Belanja Subsidi			17.208.143.843	24.500.000.000	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	89.864.999.084	29.126.513.448	89.350.004.916	32.799.923.249	35.229.702.751	36.520.368.726
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.010.990.000	664.500.000	10.261.600.000	18.488.141.480	11.985.772.112	12.058.522.328
5.2	BELANJA MODAL	491.009.055.950	304.984.047.899	437.290.134.807	463.820.817.984	596.970.135.475	665.695.953.921
5.2.x	Belanja Modal	491.009.055.950	304.984.047.899	437.290.134.807	463.820.817.984	596.970.135.475	665.695.953.921
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.341.794.329	140.472.556.743	19.572.013.662	10.929.288.109	10.000.000.000	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.341.794.329	140.472.556.743	19.572.013.662	10.929.288.109	10.000.000.000	10.000.000.000
5.X	Belanja Transfer	0	864.423.000	0	0	0	0
5.X.0x	Belanja Bantuan Keuangan		864.423.000	0	0	0	0
(4-5)	Surplus/Defisit	(1.382.653.333)	27.645.067.182	(70.885.728.780)	(85.860.405.167)	22.350.000.000	1.150.000.000

Sumber : Bappeda, Data Olahan, Tahun 2021

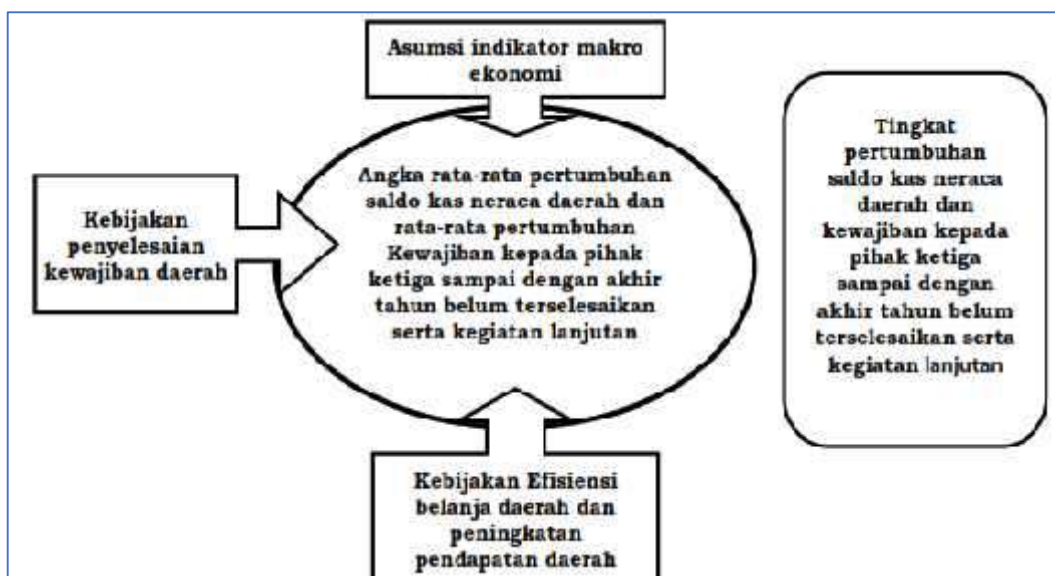
Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja operasi dengan tingkat pertumbuhan 4,8%. Komponen kedua terbesar adalah Belanja Barang dan Jasa.

Pada tahun 2021-2024 belanja bunga dialokasikan seiring dengan telah adanya kewajiban utang daerah Pemerintah Kota Padang kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui Pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain itu, Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Padang memberikan penugasan kepada BUMD Kota Padang yakni Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) untuk mengelola Trans Padang. Atas hal tersebut, dikerangka keuangan dialokasikan belanja subsidi untuk kebutuhan penugasan tersebut. Hibah pada tahun 2024 diperkirakan meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2023 karena adanya Hibah kepada penyelenggara dan pengawas Pemilu dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Belanja Modal diproyeksikan meningkat setiap tahunnya dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di Kota Padang. Sedangkan belanja tidak terduga pada tahun 2020 meningkat signifikan adalah belanja yang dianggarkan untuk penanggulangan Covid-19 dan realisasi atas kebijakan refocusing anggaran. Untuk penanggulangan dampak Covid-19 pada tahun 2022-2024 akan melekat pada program dan kegiatan OPD.

3.3.3 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan

Analisis atas proyeksi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran (SILPA). Analisis ini dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya SILPA dimasa mendatang. Adapun data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya SILPA di masa mendatang digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3-8 Analisa Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pada proyeksi tahun 2019-2024 defisit terjadi pada tahun 2019-2021 sedangkan pada proyeksi 2023-2024 diproyeksikan kebijakan surplus. Hal ini disebabkan karena pengalokasian belanja daerah ke penyertaan modal atas BUMD baru dan yang sedang berjalan ataupun rencana investasi penyertaan modal lainnya. Berikut disajikan proyeksi defisit dan pembiayaan Kota Padang tahun 2019-2024.

Tabel 3-20 Proyeksi Pembiayaan Pemerintah Kota Padang Tahun 2020-2024

Kode	Pembiayaan Daerah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	PEMBIAYAAN	56.167.525.607	17.118.435.211	70.885.728.780	85.860.405.167	(22.350.000.000)	(1.150.000.000)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.996.762.655	53.947.672.274	102.486.728.780	122.860.405.167	30.000.000.000	50.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.996.762.655	53.947.672.274	44.824.375.310	122.860.405.167	30.000.000.000	50.000.000.000
6.1.0x	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	57.662.353.470		0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.829.237.048	36.829.237.063	31.601.000.000	37.000.000.000	52.350.000.000	51.150.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.000.000.000	10.000.000.000	31.601.000.000	37.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
6.2.0x	Pembayaran Pokok Utang	26.829.237.048	26.829.237.063	0	0	17.350.000.000	16.150.000.000
(6.1-6.2)	Pembiayaan Netto	56.167.525.607	17.118.435.211	70.885.728.780	85.860.405.167	(22.350.000.000)	(1.150.000.000)
[(4-5)-(6.1-6.2)]	SILPA	54.784.872.274	44.763.502.393	(0)	0	0	0

Sumber : Bappeda, Data Olahan, Tahun 2021

Tabel 3-21 Kerangka Pendanaan Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

Kode	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	2.350.116.615.607	2.167.554.544.656	2.519.934.973.332	2.585.904.500.866	2.799.821.675.132	2.879.063.551.886
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	546.108.570.690	499.825.024.810	808.184.679.649	989.902.818.000	1.001.015.450.000	1.026.953.140.000
4.1.01	Pajak Daerah	388.095.396.286	344.680.260.161	640.526.276.598	770.526.276.598	783.415.500.000	787.016.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	48.243.550.480	37.157.893.443	69.307.060.256	96.049.541.402	86.599.900.000	85.045.235.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.711.218.378	12.326.936.083	12.747.769.449	20.000.000.000	20.400.000.000	28.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	98.058.405.546	105.659.935.123	85.603.573.346	103.327.000.000	110.600.050.000	126.891.905.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.696.988.903.351	1.551.955.503.097	1.575.943.393.683	1.473.655.482.866	1.676.806.225.132	1.727.110.411.886
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.576.511.032.667	1.458.585.538.356	1.467.289.885.817	1.367.001.975.000	1.566.953.112.030	1.613.961.705.391
4.2.01.x	Dana Perimbangan	1.524.369.871.667	1.414.136.103.356	1.441.907.890.817		1.541.858.196.150	1.588.113.942.035
4.2.01.x.a	Dana Transfer Umum	1.223.594.595.526	1.134.703.936.865	1.102.183.826.817		1.145.504.594.490	1.179.869.732.325
4.2.01.x.a.i	Dana Alokasi Umum	1.176.301.985.000	1.061.387.887.000	1.044.871.353.000	1.044.871.353.000	1.076.217.493.590	1.108.504.018.398
4.2.01.x.a.ii	Dana Bagi Hasil	47.292.610.526	73.316.049.865	57.312.473.817	57.261.143.000	69.287.100.900	71.365.713.927
4.2.01.x.b	Dana Transfer Khusus	300.775.276.141	279.432.166.491	339.724.064.000		396.353.601.660	408.244.209.710
4.2.01.x.b.i	Dana Alokasi Khusus	300.775.276.141	279.432.166.491	339.724.064.000	220.420.044.000	396.353.601.660	408.244.209.710
4.2.01.x.b.i.a	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		68.878.598.492	118.740.033.000		59.432.696.410	61.215.677.302
4.2.01.x.b.i.b	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		210.553.567.999	220.984.031.000		336.920.905.250	347.028.532.408
4.2.01.y	Dana Insentif Daerah	52.141.161.000	44.449.435.000	25.381.995.000	44.449.435.000	25.094.915.880	25.847.763.356
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.477.870.684	93.369.964.741	108.653.507.866	106.653.507.866	109.853.113.102	113.148.706.495
4.2.02.x	Pendapatan Bagi Hasil	108.375.673.684	93.169.964.741	106.653.507.866	106.653.507.866	109.853.113.102	113.148.706.495
4.2.02.y	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota	12.102.197.000	200.000.000	2.000.000.000	0	0	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.019.141.566	115.774.016.749	135.806.900.000	122.346.200.000	122.000.000.000	125.000.000.000
4.3.1	Dana Darurat						
4.3.2	Hibah	107.019.141.566	19.281.498.779	15.000.000.000	15.000.000.000	122.000.000.000	125.000.000.000
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan		96.492.517.970	120.806.900.000	107.346.200.000		
5	BELANJA	2.351.499.268.940	2.139.909.477.474	2.590.820.702.112	2.671.764.906.033	2.777.471.675.132	2.877.913.551.886
5.1	BELANJA OPERASI	1.856.148.418.661	1.693.588.449.833	2.133.958.553.643	2.197.014.799.940	2.270.501.539.657	2.352.217.597.965
5.1.01	Belanja Pegawai	1.067.507.780.938	1.022.368.138.151	1.158.202.297.656	1.281.037.301.595	1.275.935.029.041	1.376.343.417.048
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	686.566.245.667	639.809.762.519	858.662.266.677	840.189.433.616	845.408.494.322	875.281.582.003
5.1.03	Belanja Bunga	4.198.402.972	1.619.535.715	274.240.551		1.942.541.431	2.013.707.860
5.1.04	Belanja Subsidi			17.208.143.843	24.500.000.000	29.000.000.000	35.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	89.864.999.084	29.126.513.448	89.350.004.916	32.799.923.249	35.229.702.751	36.520.368.726
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.010.990.000	664.500.000	10.261.600.000	18.488.141.480	11.985.772.112	12.058.522.328
5.2	BELANJA MODAL	491.009.055.950	304.984.047.899	437.290.134.807	463.820.817.984	567.970.135.475	630.695.953.921
5.2.x	Belanja Modal	491.009.055.950	304.984.047.899	437.290.134.807	463.820.817.984	567.970.135.475	630.695.953.921

Kode	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.341.794.329	140.472.556.743	19.572.013.662	10.929.288.109	10.000.000.000	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.341.794.329	140.472.556.743	19.572.013.662	10.929.288.109	10.000.000.000	10.000.000.000
5.X	Belanja Transfer	0	864.423.000	0	0	0	0
5.X.0x	Belanja Bantuan Keuangan		864.423.000	0	0	0	0
(4-5)	Surplus/Defisit	(1.382.653.333)	27.645.067.182	(70.885.728.780)	(85.860.405.167)	22.350.000.000	1.150.000.000
6	PEMBIAYAAN	56.167.525.607	17.118.435.211	70.885.728.780	85.860.405.167	(22.350.000.000)	(1.150.000.000)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.996.762.655	53.947.672.274	102.486.728.780	122.860.405.167	30.000.000.000	50.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.996.762.655	53.947.672.274	44.824.375.310	122.860.405.167	30.000.000.000	50.000.000.000
6.1.0x	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	57.662.353.470		0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.829.237.048	36.829.237.063	31.601.000.000	37.000.000.000	52.350.000.000	51.150.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.000.000.000	10.000.000.000	31.601.000.000	37.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
6.2.0x	Pembayaran Pokok Utang	26.829.237.048	26.829.237.063	0	0	17.350.000.000	16.150.000.000
(6.1-6.2)	Pembiayaan Netto	56.167.525.607	17.118.435.211	70.885.728.780	85.860.405.167	(22.350.000.000)	(1.150.000.000)
[(4-5)-(6.1-6.2)]	SILPA	54.784.872.274	44.763.502.393	(0)	0	0	0

Sumber : Bappeda, Data Olahan, Tahun 2021

3.3.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Berdasarkan perhitungan atas belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya dilakukan perhitungan kapasitas riil. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas riil selanjutnya dilakukan pengalokasian belanja dengan memperhatikan kebijakan prioritas belanja.

Berikut disajikan perhitungan kapasitas riil tahun 2019-2024.

Tabel 3-22 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
PENDAPATAN	2,350,116,615,607.00	2,167,554,544,656.00	2,519,934,973,332.00	2,585,904,500,866.00	2,799,821,675,132.00	2,879,063,551,886.00
SiLPA	108,996,762,655.00	53,947,672,274.00	44,824,375,310.00	122,860,405,167.00	30,000,000,000.00	50,000,000,000.00
Total Penerimaan	2,459,113,378,262.00	2,221,502,216,930.00	2,564,759,348,642.00	2,708,764,906,033.00	2,829,821,675,132.00	2,929,063,551,886.00
Dikurangi						
Belanja Pegawai	1,067,507,780,938.00	1,022,368,138,151.00	1,158,202,297,656.00	1,281,037,301,595.00	1,275,935,029,041.00	1,376,343,417,048.00
Belanja Bunga	4,198,402,972.00	1,619,535,715.00	274,240,551.00		1,942,541,431.00	2,013,707,860.00
Belanja Subsidi			17,208,143,843.00	24,500,000,000.00	29,000,000,000.00	35,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang	26,829,237,048.00	26,829,237,063.00	-	-	17,350,000,000.00	16,150,000,000.00
Total Pengurangan	1,098,535,420,958.00	1,050,816,910,929.00	1,175,684,682,050.00	1,305,537,301,595.00	1,324,227,570,472.00	1,429,507,124,908.00
Kapasitas riil kemampuan keuangan	1,360,577,957,304.00	1,170,685,306,001.00	1,389,074,666,592.00	1,403,227,604,438.00	1,505,594,104,660.00	1,499,556,426,978.00

Pengalokasian Kapsitas Rill keuangan daerah untuk Prioritas Pertama di alokasikan untuk Belanja Wajib yaitu pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Satpol PP, BPBD, Damkar dan Dinas Sosial, serta untuk belanja mengikat dalam rangka membiayai memenuhi keperluan belanja tiap bulan seperti Belanja Pegawai dan belanja Barang dan Jasa pada setiap Perangkat Daerah.

Prioritas Kedua dialokasikan untuk membiayai Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Program Unggulan Daerah.

Prioritas Ketiga dialokasikan untuk membiayai Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lainnya.

3.3.5 Kebijakan Keuangan Di Masa Mendatang

I. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- A. Penerimaan pajak daerah
- B. Penerimaan retribusi daerah
- C. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- D. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

- A. Pajak Daerah
 - 1. Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
 - 2. Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan Online System dan terintegrasi dengan aplikasi perizinan dan penanaman modal di pemerintah Kota Padang.
 - 3. Pemutakhiran data wajib pajak
 - 4. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
 - 5. Penagihan piutang pajak
 - 6. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah
 - 7. Pemberian *reward* dan *punishmen* kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.
 - 8. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.
 - 9. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
 - 10. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota).
 - 11. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
 - 12. Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.

13. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.
14. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah.
15. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
16. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.
17. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah.
18. Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
19. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.
20. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
21. Mengevaluasi dan memperkuat regulasi dan tata kelola kelembagaan Badan Pendapatan Daerah serta OPD terkait.

B. Retribusi Daerah

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik
2. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
3. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis
4. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah
6. Pemberian *reward* dan *punishmen* kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya
7. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah
8. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Pendirian BUMD Baru yakni BUMD Pasar sebagai bentuk ekstensifikasi penerimaan bagi daerah serta BUMD baru lainnya seiring dengan kebutuhan daerah. Selain itu juga ekstensifikasi terhadap bidang usaha yang dikelola oleh Perumda Air Minum dan Perumda PSM.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Selain itu juga melakukan pembentukan BLUD baru sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Kota Padang.

II. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan pada pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang dan Renstra OPD.
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui *analisis cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
4. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;
5. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan kebudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis 'kelurahan membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;

8. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
9. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
10. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)
11. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
13. Pada tahun 2021, pengelolaan Trans Padang yang selama ini dikelola oleh Dinas Perhubungan telah dialihkelolakan dalam bentuk *Public Services Obligation (PSO)* ke Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Perumda PSM).

III. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

A. Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah:

Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan

diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Pemanfaatan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ataupun lembaga lainnya dalam upaya percepatan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan bayar Pemerintah Kota Padang. Salah satunya pemanfaatan pinjaman PEN (Pemulukan Ekonomi Nasional) sebagai salah satu sumber pembiayaan.

Merintis pemanfaatan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

B. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.

Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan dilihat dari kemampuan keuangan daerah Kota Padang pada 2014-2018 dan proyeksi keuangan tahun 2019-2024, maka Pemerintah Kota Padang dapat dan perlu melakukan inovasi dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi/diversifikasi BUMD dan PAD dari sektor hasil kekayaan dipisahkan. Beberapa BUMD baru yang dapat dibentuk dengan memperhatikan kondisi Kota Padang serta kebutuhan yakni:

1. Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Padang. BUMD ini bergerak dalam bidang pengelolaan pasar di Kota Padang.
2. Selain itu juga dapat dibentuk BUMD-BUMD lainnya yang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan dalam rangka percepatan pembangunan Kota Padang serta peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019-2024



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD KOTA
PADANG TAHUN 2019-2024

Daftar Isi

4	BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	4-1
4.1	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah.....	4-1
4.1.1	Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan	4-2
4.2	Penelaahan Isu Strategis.....	4-29
4.2.1	Telaah Isu Strategis Lingkungan Global/Internasional	4-29
4.2.2	Telaah Isu Strategis terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	4-31
4.2.3	Isu Strategis/ Kebijakan Nasional.....	4-35
4.2.4	Telaah Isu Strategis Terhadap RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024.....	4-38
4.2.5	Isu Strategis /Kebijakan Daerah Tetangga	4-40
4.2.6	Telaah Isu Strategis terhadap RTRW Kota Padang tahun 2010-2030	4-43
4.2.7	Telaah Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2004-2025	4-47
4.2.8	Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang .	4-49

Daftar Tabel

Tabel 4-1	Data Balita Stunting Kota Padang Tahun 2018 s/d 2020	4-7
Tabel 4-2	Jumlah Penduduk Usia Kerja yang terdampak Covid-19 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Keadaan Agustus 2020	4-12
Tabel 4-3	Rumusan Isu Strategis Kota Padang Berdasarkan Evaluasi TPB	4-32
Tabel 4-4	Keselarasan Visi Misi Daerah Tetangga	4-41
Tabel 4-5	Ringkasan Hasil Telaahan Terhadap RPJPD Kota Padang Tahun 2004-2025 Berdasarkan Periode Tahap IV RPJMD Tahun 2019-2024	4-48

Daftar Gambar

Gambar 4-1	RSUD dr. Rasidin Kota Padang sebagai Rumah Sakit Khusus Covid-19 di Sumatera Barat	4-5
Gambar 4-2	Rumah Nelayan Pasie Nan Tigo sebagai tempat Karantina Pasien Covid-19 di Kota Padang	4-6
Gambar 4-3	Penilaian Aplikasi Ayo Ceting oleh KemenPAN-RB sebagai Inovasi Daerah Kota Padang.	4-7
Gambar 4-4	Nawacita Kedua Misi RPJMN 2020-2024.....	4-35
Gambar 4-5	Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024.....	4-36

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Pembangunan bertujuan agar masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas kehidupan dan dapat memperbaiki kesejahteraan dari waktu ke waktu, sehingga pada akhirnya terwujud kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat, secara menyeluruh. Dalam proses pelaksanaan pembangunan, terdapat permasalahan sesuai kondisi daerah. Untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, perlu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan dengan penuh kehati-hatian, hal ini sangat penting dalam upaya perumusan kebijakan publik. Suatu analisis permasalahan pembangunan bertujuan untuk menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah dan memperhatikan dinamika perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Perubahan dinamika lingkungan internal dan eksternal yang terjadi saat ini akan mempengaruhi kemungkinan yang terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, sehingga harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang dimulai Maret 2020 belum bisa diperkirakan kapan akan selesai, telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan terutama kesehatan dan ekonomi serta sosial. Dampak dari pandemi Covid-19 ini diprediksi masih berlanjut pada beberapa tahun kedepan. Adanya beberapa regulasi yang terbit tahun 2020 yang belum diakomodir pada saat penyusunan RPJMD 2019-2024 di tahun 2019 tentu juga harus dipedomani dan diselaraskan dalam penyusunan perubahan RPJMD 2019-2024 ini.

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen Perubahan RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian analisis permasalahan ini akan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam sisa 3 (tiga) tahun mendatang dari periode RPJMD 2019 - 2024. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

4.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan pada dasarnya merupakan kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi saat ini. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Dalam melakukan

perubahan RPJMD 2019-2024, bagian ini bertujuan mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan permasalahan pembangunan daerah Kota Padang sebagai hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan RPJMD 2019 –2024 yang telah berjalan sampai dengan kondisi tahun 2020 serta hal-hal lain terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan beberapa urusan yang berpengaruh.

Banyak masalah pembangunan yang ditemui dalam pembangunan daerah di Kota Padang, dan akan diidentifikasi di bagian ini berdasarkan kriteria: (a) masalah memiliki cakupan yang luas dan berdampak negatif terhadap kualitas kehidupan masyarakat; (b) masalah cenderung meningkat dan menghambat proses dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan; serta (c) merupakan pendorong pembangunan Kota Padang secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Untuk itu, permasalahan akan diidentifikasi berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

1. urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. urusan pemerintah wajib tetapi tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. urusan pilihan; dan
4. urusan penunjang.

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan

1. Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian urusan pendidikan pada RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 dan capaian tahun pertama (2020) RPJMD 2019 - 2024, lingkup permasalahan urusan pendidikan meliputi:

1. Belum memadainya Sarana Prasarana Pendidikan
2. Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan
3. Belum optimalnya kerjasama dunia usaha dengan lembaga pelatihan dan kursus
4. Belum optimalnya pengembangan sekolah inklusif
5. Belum optimalnya pelaksanaan Pendidikan di Masa New Normal

Selengkapnya masing masing permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dijelaskan berikut:

1. Belum memadainya Sarana Prasarana Pendidikan

Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP belum optimal. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah lulusan SD sebanyak 14.836 siswa dan yang tertampung pada SMP Negeri hanya sebanyak 8.697 siswa. Hal ini menunjukkan tingginya angka tamatan SD yang tidak tertampung di SMP Negeri, antara lain disebabkan karena kekurangan jumlah SMP Negeri yang tersebar pada beberapa kecamatan. Jumlah ruang kelas yang ada saat

ini baik untuk tingkat SD maupun tingkat SMP masih terbatas sehingga beberapa sekolah melaksanakan proses belajar mengajar dengan sistem 2 (dua) shift yaitu sekolah pagi dan sekolah siang. Dengan sistem 2 (dua) shift ini, proses belajar mengajar belum bisa memperoleh hasil yang optimal mengingat siswa tidak dapat mengikuti belajar tambahan di sekolah karena ruang kelas akan digunakan pada siang hari.

Dengan pemberlakuan sistem zonasi di Kota Padang diperlukan pemerataan sebaran sekolah beserta Tenaga Pendidik sehingga semua peserta didik dapat terjangkau oleh layanan pendidikan sesuai domisilinya.

2. *Belum terpenuhinya kualitas tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan*

Berdasarkan data tahun 2020, jumlah tenaga pendidik SD minimal tamatan S1 yang berstatus ASN sebanyak 2.369 orang dari 5.275 orang jumlah tenaga pendidik SD dan jumlah tenaga pendidik SMP minimal tamatan S1 yang berstatus ASN sebanyak 1.254 orang dari 2.623 orang jumlah tenaga pendidik SMP. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas jumlah tenaga pendidik dari segi pendidikan dalam mengembangkan potensi peserta didik dan perlunya penambahan jumlah guru yang berstatus ASN.

3. *Belum optimalnya kerjasama dunia usaha dengan lembaga pelatihan dan kursus*

Lembaga pelatihan dan kursus sebagai tempat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sangat diperlukan keberadaannya. Lembaga pelatihan dan kursus dituntut untuk dapat bekerjasama dengan dunia usaha dalam upaya mengembangkan kemampuan peserta didik.

Kerjasama dunia usaha dengan lembaga pelatihan masih belum optimal, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 dari 90 jumlah lembaga pelatihan dan kursus, baru 10 yang telah menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

4. *Belum optimalnya pengembangan sekolah inklusif.*

Sekolah inklusif adalah tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya. Anak berkebutuhan khusus didampingi oleh guru pembimbing khusus selama kegiatan belajar mengajar.

Sistem pembelajaran, pengajaran, sarana dan prasarana, serta sistem penilaian di sekolah inklusif akan mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat beradaptasi dan menerima pendidikan sebaik mungkin.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sekolah inklusif adalah :

- a. Masih ada sekolah yang belum mengirim data jumlah siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah.
 - b. Kurangnya koordinasi Kepala Sekolah dalam pemahaman bahwa semua sekolah wajib menerima siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan semua sekolah merupakan sekolah inklusif
 - c. Banyak sekolah yang belum memiliki Koordinator Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
5. *Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)*

Ditengah pandemi Covid 19 yang masih belum selesai, maka dapat dipastikan sektor pendidikan akan mengalami perubahan besar. Salah satunya dimana para pendidik harus dapat secara cepat beradaptasi dengan lingkungan yang mengharuskan mereka mengajar dan berinteraksi dengan siswa melalui media online. Di era new normal saat ini dunia pendidikan harus beradaptasi dengan cepat. Penerapan physical distancing sebagai faktor utama new normal menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, yang biasanya mempertemukan pendidik dengan siswa dalam proses belajar mengajar tatap muka.

Metode pembelajaran online dengan memanfaatkan teknologi yang diterapkan pemerintah menjadi tantangan tersendiri karena banyak dari pendidik dan siswa yang masih belum terbiasa dengan penggunaan teknologi. Disamping itu, masalah jaringan internet juga mempengaruhi dimana jaringan terkadang tidak stabil karena faktor lokasi tempat tinggal siswa.

Hal ini mempengaruhi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Pendidikan. Selengkapannya permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya target Pelayanan SPM ini antara lain:

- a. *Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :*
 1. Karena sebahagian masyarakat masih beranggapan Paud belum penting karena tanpa masuk Paud pun bisa diterima di SD.
 2. Karena dimasa covid-19 pembelajaran dilaksanakan secara daring, maka sebagian orang tua tidak memasukkan anaknya ke Paud.
 3. Faktor ekonomi yang terdampak covid-19.
- b. *Untuk Pendidikan Dasar :*
 1. Siswa baru pada jenjang SD karena keterlambatan mendaftar sekolah ada yang belum terdata pada Dapodik.
 2. Siswa pindah sekolah ke luar kota karena mengikuti orang tua datanya belum dikeluarkan dari Dapodik.
- c. *Untuk Pendidikan Kesetaraan :*
 - 1) Tidak semua usia putus sekolah mendaftar di Pendidikan Kesetaraan.
 - 2) Sebagian ada juga yang pindah domisili ke luar Kota Padang.

B. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang penting dan mendapat prioritas dalam pembangunan. Pelaksanaan urusan kesehatan masih menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan menjadi makin kompleks dan berat dengan terjadinya pandemi covid-19 yang dimulai Maret 2020. Permasalahan pada urusan kesehatan ini antara lain:

1. *Pandemi Covid-19 yang harus ditangani*

Tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19 di dunia, Indonesia dan khususnya Kota Padang yang mempengaruhi semua perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kesehatan. Sejak ditemukannya kasus pertama Covid 19 di Kota Padang pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan kondisi tanggal 16 November 2020 telah mencapai 9.802 kasus. Kondisi ini mengharuskan semua aspek dikerahkan untuk melawan pandemi ini baik program yang terkait langsung dalam penanggulangan maupun bersifat mendukung, baik dukungan dana maupun pelaksanaan program. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan prioritas penurunan kasus Covid19 serta dampaknya pada masyarakat mengakibatkan bertambahnya fokus dan prioritas pembangunan kesehatan yang akan berpengaruh besar kepada perencanaan kesehatan di Kota Padang. Pencapaian indikator pelayanan kesehatan dalam standar pelayanan minimal tetap menjadi perhatian seperti pelayanan ibu hamil, balita, penyakit menular, penyakit tidak menular karena target pencapaian semua indikator SPM bidang kesehatan (12 indikator) adalah 100% merupakan tantangan dalam perencanaan kedepannya.



Sumber: RSUD dr. Rasidin

Gambar 4-1 RSUD dr. Rasidin Kota Padang sebagai Rumah Sakit Khusus Covid-19 di Sumatera Barat



Sumber: <https://www.antaranews.com/video/2232986/kampung-nelayan-padang-kini-tampung-105-pasien-covid-19>

Gambar 4-2 Rumah Nelayan Pasie Nan Tigo sebagai tempat Karantina Pasien Covid-19 di Kota Padang

2. *Stunting*

Stunting atau kerdil atau pendek merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang konvergen, untuk menanggulangi faktor penyebab langsung dan tidak langsung. Untuk itu kehadiran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya hingga dapat memenuhi standar pelayanan kesehatan.

Idealnya 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk. Kota Padang dengan jumlah penduduk sebanyak 939.112 jiwa dibutuhkan sebanyak 31 unit puskesmas, sementara tahun 2020 Kota Padang baru memiliki 23 unit puskesmas. Berdasarkan data ini maka butuh penambahan sekitar 8 unit puskesmas untuk melayani masyarakat Kota Padang.

Namun demikian satu terobosan telah dilakukan dalam inovasi daerah Kota Padang yaitu meluncurkan aplikasi Ayo Ceting. Ayo Ceting adalah aplikasi yang di gunakan di 23 Puskesmas di Kota Padang yang terdiri dari tiga program utama. Program pertama adalah pembentukan grup WhatsApp ibu hamil sebagai media komunikasi dan diskusi mengenai kesehatan gizi kehamilan yang didampingi bidan dan dokter. Program kedua adalah pembentukan Rumah Gizi secara swadaya oleh masyarakat untuk mengintervensi bayi balita dengan gizi kurang dan gizi buruk agar tidak berkelanjutan menjadi stunting. Ketiga, aplikasi Ayo Ceting media edukasi digital mengenai pencegahan stunting yang didukung fitur pencatatan dan pemantauan gizi ibu hamil dan bayi/balita.

Dalam penerapannya, ternyata kontribusi masyarakat luar biasa, mereka secara mandiri mengumpulkan dana, membawa bahan makanan, memasak, dan makan di rumah gizi. Diharapkan dengan penerapan aplikasi dan peran masyarakat kedepan diharapkan permasalahan stunting dapat segera teratasi di Kota Padang.



Sumber: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/ayo-ceting-cegah-stunting-di-kota-padang>

Gambar 4-3 Penilaian Aplikasi Ayo Ceting oleh KemenPAN-RB sebagai Inovasi Daerah Kota Padang.

Pengukuran data balita stunting telah dilakukan pada Riset Kesehatan Daerah (RISKESDA) pada tahun 2018. Untuk tahun 2019 data ini kemudian diukur pada Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI). Selanjutnya di tahun 2020 data diperoleh dari Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Namun untuk tahun 2021 dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 pengukuran data balita stunting yang harusnya dilakukan bulan juli, baru dilakukan pada bulan November. Tabel 4-1 memperlihatkan hasil pengukuran data balita stunting pada tahun 2018 s/d 2020.

Tabel 4-1 Data Balita Stunting Kota Padang Tahun 2018 s/d 2020

No	2018	2019	2020
	RISKESDA	SSGBI	e-PPGBM
	22,4	20,92	7,85

3. *Kualitas kinerja aparatur medis dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat belum optimal.*
4. *Kasus penyakit menular di Kota Padang masih tinggi seperti TB sekitar 2.617 kasus, DBD sekitar 430 kasus, HIV sekitar 287 kasus, dan AIDS sekitar 52 kasus.*
5. *Kasus kematian ibu masih tinggi yaitu 17 kasus di tahun 2018, dan 16 kasus di tahun 2019.*
6. *Belum semua kelurahan yang mendeklarasikan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), dari 104 kelurahan di Kota Padang*

Sejak ditemukannya kasus pertama Covid 19 di Kota Padang pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan kondisi tanggal 16 November 2020 telah mencapai 9.802 kasus. Kondisi ini mengharuskan semua aspek dikerahkan untuk melawan pandemi ini baik program yang terkait langsung dalam penanggulangan maupun bersifat mendukung, baik dukungan dana maupun pelaksanaan program. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan prioritas penurunan kasus Covid19 serta dampaknya pada masyarakat mengakibatkan bertambahnya fokus dan prioritas pembangunan kesehatan yang akan berpengaruh besar kepada perencanaan kesehatan di Kota Padang. Dari pencapaian SPM tahun 2020 ada beberapa SPM yang tidak tercapai 100 % yaitu Pelayanan Kesehatan Ibu hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan Kesehatan pada usia produktif, Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus. Hal ini dikarena di masa pandemic pelayanan Kesehatan masih focus pada pelayanan covid -19. Namun pencapaian indikator pelayanan kesehatan dalam standar pelayanan minimal dengan 12 indikator mencapai 100% akan tetap menjadi perhatian .

C. *Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memegang peranan penting dalam penyediaan infrastruktur jalan, drainase kota dan penataan ruang kota dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan evaluasi terhadap kondisi dan capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang RPJMD periode 2014-2019 dan capaian tahun pertama RPJMD 2019-2024, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pekerjaan umum dan penataan ruang yakni:

1. *Kondisi permukaan jalan di Kota Padang masih ada yang dalam kondisi rusak dan sedang yaitu sekitar $\pm 35,12\%$ dari total panjang jalan yang ada di Kota Padang.*

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat, sehingga tingkat intensitas perkembangannya cukup tinggi. Berdasarkan RTRW Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 dijelaskan bahwa Kota Padang

merupakan kota inti dari Metropolitan Palapa dan bagian dari Kawasan Strategis Propinsi Sumatera Barat. Secara ekonomis, Kota Padang berperan dalam meningkatkan daya saing (*competitiveness*) kegiatan industri untuk pasar global, serta sebagai pusat perdagangan dan jasa. Berdasarkan kondisi tersebut, maka keberadaan dari kondisi jalan yang mantap adalah suatu hal yang perlu diprioritaskan dan dikembangkan di Kota Padang.

2. *Ketidakseimbangan tingkat pertumbuhan jalan dengan jumlah kendaraan*

Dibeberapa titik terjadi ketidakseimbangan antara tingkat pertumbuhan jalan disatu sisi dengan tingkat pertumbuhan kendaraan disisi yang lain, dimana pertumbuhan jalan jauh lebih kecil dari pada tingkat pertumbuhan kendaraan, hal ini berarti menunjukkan terjadinya pembebanan yang berlebihan pada jalan.

3. *Masih terdapat kawasan yang terdampak banjir dan genangan.*

Masih luasnya kawasan yang terdampak banjir dan genangan, yaitu sekitar 42,78 % dari luas daerah genangan di Kota Padang. Hal ini disebabkan karena:

- a. Tingginya intensitas curah hujan yang berakibat besarnya volume banjir.
- b. Beda elevasi Kota Padang dengan permukaan laut terlalu kecil (± 1 m) sehingga drainase di Kota Padang sangat dipengaruhi oleh pasang air laut.
- c. Penyumbatan saluran oleh jaringan utilitas kota seperti pipa PDAM dan sampah.
- d. Sistem drainase perkotaan belum terintegrasi karena banyak yang tidak terbentuk atau terputus serta kapasitas/dimensi jaringan drainase kota yang tidak memadai karena terjadinya penyempitan drainase. Saat ini banyak kondisi drainase cukup sempit, tidak dalam dan tidak lebar serta banyaknya sedimen pada drainase yang menghambat lajunya air sehingga durasi waktu genangan terjadi lebih lama ± 1 s/d 2 jam.
- e. Meningkatnya lahan terbangun di Kota Padang terutama perumahan sehingga angka resapan air/infiltrasi semakin menurun dan limpasan/*run off* semakin meningkat sementara kapasitas saluran belum cukup untuk mengalirkan beban drainase maksimum.
- f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola dan memelihara drainase dimana ada sebagian masyarakat yang memperkecil atau menutup saluran drainase.

4. *Belum terlayannya seluruh wilayah terbangun di Kota Padang dengan Penerangan Jalan Umum.*

Terdapat beberapa titik lokasi yang tingkat keselamatan dan kenyamanan pemanfaatan jalan di waktu malam sangat minim (rawan kecelakaan dan kriminal). Total Panjang Jalan di Kota Padang $\pm 1.963,761$

Km (diluar jalan nasional), sehingga untuk menuju Padang Terang maka diperlukan ± 60.000 titik lampu, sementara pelayanan titik PJU yang ada saat ini baru sekitar ± 31.410 titik, maka diperlukan penambahan pelayanan titik PJU sebanyak ± 28.590 titik.

5. *Keterbatasan daya dukung dan daya tampung ruang yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perkotaan.*

Dari luasan 694, 96 km² wilayah daratan Kota Padang, hanya 25 % yang merupakan wilayah efektif perkotaan, sedangkan 75 % merupakan kawasan lindung yang terdiri dari hutan suaka, hutan lindung, kawasan sabuk hijau/*green belt*, sempadan pantai, sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau kota

6. *Belum adanya Legalitas yang mengatur Pemanfaatan Ruang Kota secara operasional dan rinci dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota.*

Upaya mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana kota menghadapi kendala karena:

- a. Adanya kepentingan masyarakat yang terkadang berbeda dengan kaidah perencanaan.
- b. Tidak tersampainya informasi tentang peraturan penataan ruang dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang.

7. *Belum meratanya Pembangunan infrastruktur di wilayah kota Padang.*

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai kondisi tahun 2020, maka permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. *Penuntasan kawasan kumuh*

Berdasarkan SK Walikota Nomor 501 Tahun 2019, dijelaskan bahwa kawasan kumuh Kota Padang seluas **122,33** Ha, yang tersebar di 22 lokasi. Dan berdasarkan evaluasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai kondisi tahun 2020 baru sebagian yang tertangani, sehingga sisanya tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam periode 3 tahun kedepan. Penyebab kawasan kumuh tersebut adalah ketidakteraturan bangunan, kurangnya drainase lingkungan, pelayanan persampahan yang belum optimal, pembuangan limbah yang tidak terkendali, jalan lingkungan yang tidak memadai dan kurangnya proteksi terhadap bahaya kebakaran

2. *Belum terpenuhi secara merata ketersediaan sarana dan prasarana umum yang baik dan cukup.*

Prasarana umum yang perlu ditingkatkan antara lain:

- a. akses jalan lingkungan permukiman perlu ditingkatkan melalui betonisasi
 - b. akses drainasi lingkungan perlu ditingkatkan
 - c. sanitasi untuk air limbah domestik yang capaiannya sampai tahun 2019 sebesar 92,80 persen,
 - d. layanan akses air minum yang layak yang masih sekitar 92,59 persen
 - e. belum meratanya sarana gedung pertemuan / gedung serbaguna di daerah permukiman.
3. *Masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni.*

E. **Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum perlu ditindaklanjuti dengan upaya untuk mengatasinya karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan standar pelayanan umum. Untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran, permasalahan yang ada, antara lain:

1. *Masih rendahnya cakupan layanan kebakaran.*

Beberapa faktor yang menentukan besaran cakupan kebakaran antara lain:

a. *Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran /WMK*

Pengembangan dimana terkendalanya Legalitas Tanah yang sudah termanfaatkan untuk Pos, selanjutnya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pos WMK.

b. *Akses tanki air kebakaran (reservoir kebakaran) di lokasi permukiman padat penduduk*

Pengadaan Reservoir Kebakaran (Tangki Air Kebakaran) di lokasi Pemukiman Padat Penduduk. (Pengadaan Lahan untuk Reservoir dan Pengadaan Sumber Air untuk Reservoir)

c. *Pipa Penyalur Air Kebakaran di Gang-gang Sempit*

Pembangunan pipa penyalur air kebakaran khususnya di gang sempit di kawasan permukiman merupakan bagian dari Pengadaan Sarana Pendukung di Lokasi Pengisian Air Kebakaran melalui Sumber Air Mengalir (Saluran), berupa Perkerasan bahu jalan di lokasi dan Penempatan plang penunjuk lokasi pengisian.

- d. Masih kurangnya sarana mobil pemadam kebakaran
- e. Masih kurangnya petugas pemadam kebakaran
2. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
3. Belum adanya sistem informasi kebakaran berbasis *Geographic Information System (GIS)*

F. Urusan Sosial

Permasalahan bidang urusan sosial perlu ditindaklanjuti dengan upaya untuk mengatasinya karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan standar pelayanan umum. Permasalahan yang ada di Bidang Urusan Sosial antara lain:

1. PPKS yang memperoleh bantuan sosial belum mencapai target
2. PPKS yang tertangani belum mencapai target
3. PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar belum mencapai target

II. Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintah Wajib yang Bukan Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Data pada Bab II menggambarkan jumlah pengangguran di Kota Padang pada tahun 2020 meningkat menjadi 13,64 persen yang pada tahun sebelumnya (2019) tingkat pengangguran di Kota Padang sebesar 8,76 persen. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19), yang mengakibatkan banyaknya lapangan usaha yang tutup dan melakukan efisiensi tenaga kerja (Pemutusan Hubungan Kerja dan karyawan yang dirumahkan. Berdasarkan data dari Berita Resmi Statistik (Keadaan Ketenagakerjaan Sumatera Barat Agustus 2020 jumlah tenaga kerja di Kota Padang yang menganggur akibat Covid-19 sebesar 137.262 orang, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4-2 Jumlah Penduduk Usia Kerja yang terdampak Covid-19 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Keadaan Agustus 2020

Kabupaten/ Kota	Pengangguran Karena Covid- 19	BAK Karena Covid-19	Sementara Tidak Bekerja Karena Covid -19	Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	Total
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	116	81	181	6679	7057
Pesisir Selatan	22525	1532	1553	22628	28238

Kabupaten/ Kota	Pengangguran Karena Covid- 19	BAK Karena Covid-19	Sementara Tidak Bekerja Karena Covid -19	Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	Total
Solok	660	1044	743	28989	31436
Sijunjung	525	1023	623	12775	14946
Tanah Datar	1543	677	2228	22557	44265
Padang Pariaman	3933	1273	3575	35484	27005
Agam	1700	799	2435	46073	51007
Lima Puluh Kota	1488	1309	2686	30261	35744
Pasaman	1064	249	482	13419	15214
Solok Selatan	570	288	452	11686	12996
Dharmasraya	1553	278	468	11890	14189
Pasaman Barat	1285	278	1221	27786	30570
Kota					
Padang	13012	3143	5837	115270	137262
Kota Solok	705	173	273	6748	7899
Sawahlunto	625	386	746	7296	9053
Padang Panjang	411	203	632	6410	7656
Bukittinggi	1723	261	1279	19168	22431
Payakumbuh	1551	268	1519	18464	21802
Pariaman	468	657	830	10831	12786
Sumatera Barat	35457	13922	27763	454414	531556

Proporsi pengangguran di Kota Padang pada Tahun 2020 berasal dari tamatan SLTA sederajat sebesar 44,35 persen kemudian dari pendidikan tinggi yaitu 39,94% serta 13,53% dari diploma/akademi. Penyebab dari tingginya angka ini disebabkan oleh:

1. Menurunnya perekonomian Kota Padang akibat pandemi covid-19, yang menyebabkan PHK dan dirumahkannya karyawan yang bekerja.
2. Masih rendahnya permintaan tenaga kerja di Kota Padang.
3. Ketidakcocokan (mismatch) antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
4. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
5. Masih rendahnya kreatifitas dan produktifitas angkatan kerja dalam menciptakan lapangan usah baru.

Rendahnya kreatifitas dan produktivitas angkatan kerja ini antara lain disebabkan:

- a. karena masih kurangnya kesempatan kerja bagi tenaga terdidik dan terampil untuk bekerja disektor formal
- b. Masih rendahnya kemampuan dan kemauan pemuda dalam memasuki dunia usaha (*entrepreneur*).
- c. Kelompok masyarakat penyandang disabilitas memiliki akses informasi terbatas tentang peluang kerja, pelatihan, magang, dan perekrutan secara umum

Stereotip negatif penyandang disabilitas membatasi pilihan karir mereka (mis. Penyandang disabilitas netra hanya sebagai tukang pijat) dan menghalangi mereka untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan, dan mengeksplorasi berbagai peluang yang lebih luas. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para pencari kerja, Pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan Pemerintah pusat, lembaga pelatihan, organisasi profesi, perguruan tinggi, media serta para pelaku usaha dalam bentuk *Skill Development Center (SDC)* Kota Padang dalam bentuk program pelatihan dan pemagangan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja di Kota Padang. Kelompok masyarakat penyandang disabilitas memiliki akses informasi terbatas tentang peluang kerja, pelatihan, magang, dan perekrutan secara umum.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan isu strategi nasional sesuai dengan Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pembangunan Gender dan Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender.

Permasalahan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

1. *Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak terutama untuk memberikan layanan perlindungan dan bantuan hukum yang inklusif.*

Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang didominasi kasus kekerasan seksual, walaupun kasus lainnya juga ada seperti kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak ada yang dilakukan oleh keluarga terdekat sendiri dan ada juga yang dilakukan oleh orang lain. Penyebab terjadinya kasus kekerasan terutama kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat disebabkan oleh faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah. Anak-anak yang berada pada keluarga yang kurang mampu, mereka melakukan interaksi dan melaksanakan aktivitas dalam keluarga pada ruang yang sama atau ruang yang terbatas dalam rumah tangga, sehingga hal ini memunculkan potensi atau peluang perlakuan yang tidak baik terjadi kepada anak dari anggota keluarga yang lain, apalagi sudah ada niat untuk melakukan perbuatan tidak senonoh dan kekerasan seksual tersebut. Kasus kekerasan ini juga karena dipengaruhi oleh kurangnya

pendidikan dan pengetahuan dari keluarga tersebut, baik pengetahuan tentang etika, perilaku, adat budaya, apalagi pengetahuan agama.

Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan juga masih ada terjadi di Kota Padang, namun angkanya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap anak. Terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga juga banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pendidikan/pengetahuan. Sulitnya kehidupan ekonomi keluarga dapat memunculkan pertengkaran dalam rumah tangga, apalagi tidak didukung oleh pengetahuan yang memadai baik bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, serta tidak kuatnya ilmu agama dan iman yang dimiliki. Karena hal tersebutlah sering terjadi pertengkaran dan bahkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

2. *Tidak sebandingnya jumlah petugas dengan kasus yang ditangani. yang minim yang menjadi penyebab terhambatnya penanganan isu - isu yang ada*
3. *Perangkat daerah masih belum memahami Pengarusutamaan Gender, dilihat dari masih rendahnya Indek Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu sebesar 69,30 ditahun 2018 yang turun menjadi 67, 47 ditahun 2019.*

C. Urusan Pangan

Permasalahan dalam hal ketahanan pangan teridentifikasi sebagai berikut:

1. *Lahan non irigasi sebagai lahan sumber pangan berkurang.*
2. *Belum optimalnya pemanfaatan lahan kosong sebagai sumber pangan.*
3. *Belum optimalnya jaminan terhadap pasokan dan harga komoditas pangan yang terintegrasi dan informatif*
4. *Pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman*

Pola konsumsi pangan saat ini terdapat ketimpangan dimana masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras, pangan hewani, minyak dan lemak sebaliknya masih rendahnya konsumsi umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula serta sayur dan buah. Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, sagu dan pangan lokal lainnya masih rendah.

5. *Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan perlu ditingkatkan*
6. *Berkurangnya jumlah cadangan pangan akibat penanganan dampak Covid-19*

D. Urusan Pertanahan

Pemasalahan pada urusan pemerintahan bidang pertanahan di Kota Padang antara lain:

1. *Masalah sosial budaya masyarakat yang sulit melepaskan status tanah ulayatnya untuk pembangunan kepentingan umum walaupun sudah dilakukan ganti kerugian.*
2. *Adanya tanah fasum dan fasos yang belum bersertifikat sehingga memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan liar di lokasi tanah tersebut, sehingga lahan fasum dan fasos tidak berfungsi untuk sarana umum sebagaimana mestinya.*
3. *Masih banyak tanah pemerintah yang belum jelas status kepemilikannya.*
4. *Masih banyaknya konflik-konflik pertanahan yang harus ditindaklanjuti.*
5. *Belum adanya penetapan regulasi tanah ulayat di Kota Padang*

E. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup di Kota Padang antara lain:

1. *Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat kegiatan pembangunan*

Penurunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTL) selengkapny dapat dilihat pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kota Padang yang cenderung menurun tiap tahunnya.

2. *belum optimalnya kualitas penanganan sampah dan air limbah domestik karena jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan.*
3. *Masih rendahnya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam pengolahan sampah.*
4. *Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup*

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan kependudukan dan catatan sipil diantaranya:

1. *Belum tercatatnya jumlah pendatang yang bertujuan melanjutkan pendidikan di Kota Padang mulai dari pendidikan SLTP sampai Perguruan Tinggi.*

Data ini berguna antara lain untuk mendapatkan gambaran persentase penduduk Kota Padang dan luar Kota Padang yang mendapatkan fasilitas pendidikan di Kota Padang.

2. *Belum optimalnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan online.*
3. *Masih rendahnya pemahaman masyarakat untuk mendaftarkan peristiwa penting terkait pencatatan sipil (perkawinan, perceraian, kematian dan kelahiran).*
4. *Cakupan penerbitan KTP perlu ditingkatkan*
5. *Daya tampung sarana dan prasarana untuk pelayanan masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih kurang layak.*
6. *Ketersediaan perangkat teknologi informasi (server, komputer, alat perekaman, alat pencetak KTP elektronik) yang kurang memadai.*

G. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Target Kampung KB untuk mengentaskan kemiskinan belum optimal dalam pelaksanaan programnya karena belum terintegrasinya program/kegiatan lintas sektor. Dari data terlihat bahwa Kampung KB baru menyentuh 0,17% pasangan usia subur di Kota Padang. Untuk itu peran Kampung KB masih perlu ditingkatkan melalui partisipasi masyarakat dan integrasi lintas sektor. Selain itu belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap kampung KB yang ada.

Kampung KB adalah suatu wilayah setingkat RW dimana dimana terdapat program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta program kegiatan lintas sektor baik pemerintah maupun swasta. Adapun permasalahan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
2. Masih rendahnya pencapaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) peserta KB baru dan peserta KB aktif .
3. Masih rendahnya pencapaian peserta KB baru Pria dan pencapaian peserta KB aktifnya
4. Masih rendahnya SDM Kader dalam pengelolaan Poktan di Kampung KB
5. Belum berfungsinya Pokja sebagaimana yang diharapkan
6. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana di Kampung KB
7. Belum terpilahnya data-data di Kampung KB
8. Belum semua SKPD melakukan intervensi di Kampung KB
9. Masih rendahnya partisipasi dari pemerintah di Kecamatan dan kelurahan terhadap program Kampung KB
10. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di beberapa Kampung KB
11. Rumah Data di Kampung KB sebahagian besar masih menumpang di Rumah Masyarakat.
12. Masih kurang terampilnya Ibu-ibu di Kampung KB

H. Urusan Perhubungan

Untuk urusan perhubungan permasalahan yang ada antara lain:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas dalam mewujudkan transportasi aman, nyaman dan ramah lingkungan
2. Masih kurangnya ketersediaan tempat Parkir diluar Badan Jalan (off street) dan secara bertahap menghilangkan parkir di Badan Jalan (On Street) khususnya di Pusat Pusat Kegiatan (CBD).
3. Belum terintegrasinya pelayanan angkutan umum karena belum tersedianya Feeder Trans Padang sebagai angkutan pengumpan Bus Trans Padang di semua koridor.
4. Banyaknya parkir liar di luar kawasan yang telah ditentukan
5. Belum optimalnya pemanfaatan IT untuk pengaturan, pengendalian dan pelayanan Transportasi (smart transportation) berupa Area Traffic Control System (ATCS), Intelegent Transport System (ITS) dll.
6. Masih kurangnya prasarana angkutan umum yg representatif dan terintegrasi, seperti halte dengan stasiun dll.
7. Aksesibilitas transportasi layak disabilitas

Angkutan umum di kota-kota Indonesia termasuk Kota Padang masih sulit diakses bagi penyandang disabilitas yang tentunya punya hak yang sama dengan masyarakat lain untuk menikmati sarana prasarana

transportasi umum. Hambatan mobilitas menjadi salah satu rintangan utama dalam mencapai inklusivitas, karena membatasi gerakan penyandang disabilitas, yang menyebabkan eksklusi sosial lebih lanjut dari masyarakat. Oleh sebab itu meningkatkan aksesibilitas angkutan umum yang dapat digunakan oleh semua masyarakat dengan beragam kondisi dengan menerapkan prinsip universal desain dan pelayanan inklusif berarti meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas dan akses ke sekolah, fasilitas tempat kerja, fasilitas kesehatan, pasar tradisional, rekreasi, dan lainnya. Sebagai contoh, menyediakan moda transportasi umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan meningkatkan dan memperbaiki aksesibilitas layanan bus Trans Padang bagi penyandang disabilitas dengan pengadaan bus *low-deck* dilengkapi ramp kursi roda. Disamping itu juga dapat menyediakan Layanan Mobil Akses Padang *Trans Care* untuk memberikan pilihan layanan transportasi antar jemput dalam kota dengan mobil yang dilengkapi akses ramp manual atau lift hidrolik bagi penyandang disabilitas berat atau lansia pengguna kursi roda yang tidak dapat mengakses transportasi umum biasa atau menggunakan moda transportasi lainnya.

I. Urusan Komunikasi dan Informatika

Untuk urusan komunikasi dan informatika permasalahan yang ada antara lain:

1. *Cakupan layanan jaringan komunikasi belum optimal ($\pm 70\%$).*

Hal ini juga berdampak pada pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah pinggiran (sebagian di daerah Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, dan Pauh). Disamping itu pada Perangkat Daerah juga masih belum optimalnya layanan komunikasi.

2. *Belum optimalnya integrasi sistem aplikasi ($\pm 34\%$).*

Saat ini sistem aplikasi sudah banyak dibangun, namun masih parsial. Contoh sudah ada sistem *e-planning*, *e-budgeting*, dan sistem-sistem lainnya. Namun sistem tersebut belum terintegrasi sehingga masih belum optimal penggunaannya. Suatu sistem yang dibangun, belum dapat dimanfaatkan secara langsung, masih diperlukan lagi input ulang. Sebaiknya suatu sistem yang ada dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Contoh sistem yang ada diperizinan dapat dimanfaatkan untuk keperluan mengontrol pendapatan yang timbul dari adanya perizinan tersebut.

J. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan koperasi, usaha kecil dan menengah yang teridentifikasi adalah:

1. Akibat pandemi Covid-19 banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami penurunan drastis omzet penjualan karena lesunya pasar dan diperparah berkurangnya modal Usaha UMKM.
2. Belum meratanya pembinaan terhadap koperasi dan UMKM. Dari data terlihat bahwa koperasi sehat hanya 15% dari koperasi aktif.
3. UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) belum mendapatkan pembinaan dan belum semuanya bermitra dengan koperasi sehingga daya saing juga menjadi lemah. Lemahnya daya saing ini juga disebabkan oleh skala ekonomi usaha yang belum terpenuhi.
4. Masih kurangnya kemampuan pemasaran dan pangsa pasar UMKM
5. Masih terbatasnya teknologi pengembangan dan kemasan produk dan pemasaran produk.
6. Masih terbatasnya akses kemitraan dan jaringan usaha serta perizinan.
7. Masih terbatasnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya lokal daerah dalam pengembangan usaha.
8. Masih lemahnya kemampuan dan kualitas manajemen kelembagaan Koperasi dan UMKM.

K. **Urusan Penanaman Modal**

Permasalahan penanaman modal yang teridentifikasi adalah:

1. Masih kurangnya kesadaran perusahaan baik PMA maupun PMDN untuk menyampaikan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
2. Masih terdapatnya izin prinsip yang telah dikeluarkan tidak terealisasi sehingga untuk mencapai realisasi investasi belum maksimal,
3. Kurang optimalnya promosi daerah sehingga masih perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama dalam pemprosesan izin melalui Online Single System (OSS)
4. belum lengkapnya standar penyusunan kajian potensi investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor.

L. **Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Permasalahan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kota Padang, diantaranya sebagai berikut:

1. *Belum tersedianya pusat interaksi dan kegiatan untuk memaksimalkan talenta anak muda Kota Padang di berbagai bidang seperti ekonomi (entrepreneur), seni, sosial, budaya, politik, dan lainnya.*
2. *Masih minimnya sarana dan prasarana olah raga sesuai standar.*
3. *Kurangnya pembinaan atlet secara berkesinambungan.*

M. Urusan Statistik

Permasalahan kota padang di Bidang Urusan Statistik dapat diringkas sebagai berikut:

1. *belum optimal Ketersediaan data statistik yang komprehensif dan terkini.*

Kemampuan survey dan kompilasi data statistik yang masih belum memadai menyebabkan pemerintah kota memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pihak ketiga untuk mendapatkan semua data statistik yang akurat.

N. Urusan Persandian

Urusan Pemerintahan bidang Persandian di Kota Padang antara lain:

1. *Belum diimplementasikannya tanda tangan elektronik secara menyeluruh di semua OPD.*
2. *Masih kurangnya kapasitas SDM terkait dengan persandian.*

O. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan adalah urusan wajib yang mesti dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/kota, namun dalam melaksanakan urusan kebudayaan tersebut masih terdapat kendala untuk mewujudkannya yaitu sebagai berikut:

1. *Pemajuan kebudayaan di Kota Padang masih relatif lambat.*

Dari sepuluh objek bidang kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, baru satu dan dua objek kebudayaan tersebut yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang yakni menyangkut kesenian daerah dan olah raga tradisional, sedangkan sisanya seperti ritus, manuscript, bahasa, cagar budaya, permainan anak nagari belum terlaksana secara optimal.

2. *Kota Padang belum memiliki museum yang permanen sebagai tempat para generasi muda melihat sejarah masa lalu Kota Padang dan juga sebagai tempat pusat edukasi bagi pelajar.*
3. *Masih kurangnya promosi kebudayaan Kota Padang untuk mengikuti festival/event ditingkat internasional.*
4. *Kota Padang belum memiliki wadah bagi penggiat seni.*

Sebagai ibu kota Propinsi Sumatera Barat banyak melahirkan seniman-seniman yang sudah mempunyai nama ditingkat Propinsi Sumatera Barat maupun diluar propinsi, namun Kota Padang belum memiliki Dewan Kesenian Kota sebagai wadah berhimpunnya para seniman

P. **Urusan Perpustakaan**

Permasalahan pada urusan perpustakaan di Kota Padang, diantaranya sebagai berikut:

1. *Kota Padang Belum memiliki gedung perpustakaan daerah yang representatif.*

Saat ini Kota Padang memanfaatkan salah satu Gedung di Kawasan Gelanggang Olah Raga H. Agus Salim sebagai gedung perpustakaan Kota Padang. Namun demikian gedung tersebut masih berstatus aset Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan dapat dibangun satu gedung perpustakaan di kawasan pusat pemerintahan di Aie Pacah yang representatif.

2. *Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang belum memenuhi standar nasional, baik perpustakaan daerah maupun di perpustakaan sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).*
3. *Rendahnya minat baca masyarakat, hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah pengunjung perpustakaan pertahun pada Tahun 2019 hanya 2,96%.*
4. *Masih kurangnya peran penggiat literasi.*
5. *Kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur pengelola perpustakaan di Instansi Pemerintah dan sekolah-sekolah*

Q. **Urusan Kearsipan**

Permasalahan pada urusan kearsipan di Kota Padang, diantaranya sebagai berikut:

1. *Kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur pengelola perpustakaan dan kearsipan di Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan OPD.*
2. *Sarana dan Prasarana kearsipan yang belum memenuhi standar nasional.*
3. *Belum optimalnya pengelolaan dan penataan arsip dinamis di OPD dan arsip statis di LKD.*

III. *Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pilihan*

A. *Urusan Pariwisata*

Permasalahan di bidang urusan pariwisata antara lain:

1. *Kerjasama antara industry pariwisata dan stakeholder terkait belum optimal.*
2. *Pengelolaan objek wisata belum dikelola secara optimal baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat seperti objek wisata kurang terpelihara.*
3. *Prasarana dan sarana penunjang pariwisata belum memadai terutama ketiadaan aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus lainnya.*
4. *Sektor pariwisata belum terintegrasi dengan kerarifan lokal Minangkabau dan belum maksimalnya pengelolaan aset-aset budaya daerah.*
5. *Sektor pariwisata belum menarik sektor primer (pertanian) dan mendorong sektor industry lainnya (pengolahan produk primer menjadi produk akhir seperti industry kreatif).*
6. *Peran dan fungsi dari kelompok sadar wisata belum optimal.*

B. *Urusan Pertanian*

Permasalahan urusan pertanian meliputi:

1. *Rendahnya pengembangan olahan produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan*
2. *Belum optimalnya sarpras pendukung aktifitas usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan*
3. *Belum optimalnya pengembangan potensi sektor pertanian dalam arti luas*
4. *Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha pertanian (petani, pekebun dan peternak)*
5. *Masih rendahnya kesejahteraan petani*

C. *Urusan Perdagangan*

Urusan Pilihan Bidang Perdagangan di Kota Padang antara lain Lesunya perekonomian di Kota Padang akibat dari pandemi Covid-19 juga dirasakan pada sektor perdagangan, hal ini ditandai dengan rendahnya nilai transaksi perdagangan di pasar raya dan pasar pembantu yang tersebar di wilayah Kota

Padang. Serta adanya permasalahan lain yang terjadi di urusan perdagangan seperti:

1. *Sistem Distribusi dan Tata Niaga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting belum tertata dengan baik*
2. *Masih adanya kekhawatiran masyarakat untuk berbelanja di pasar Raya dan Pasar Pembantu, karena sulitnya menerapkan protokol kesehatan (pola Hidup Baru) dalam menghadapi wabah Covid-19.*
3. *Masih adanya Resistensi sebagian pedagang untuk dilakukan penataan*
4. *Belum optimalnya penataan Pasar Raya dan pasar-pasar pembantu*
5. *Belum diaturnya secara detail perizinan Pertokoan Modern*
6. *Belum adanya pendampingan untuk mengantisipasi perubahan arah perdagangan ke depan (isu milenial), dimana model distribusi pasar berubah di era industri 4.0*

Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan meningkatkan nilai transaksi perdagangan di Kota Padang, Pemerintah Kota Padang akan membentuk Perusahaan Umum Daerah yang akan mengelola pasar raya dan pasar pembantu di Kota Padang, diharapkan terciptanya pasar raya dan pasar pembantu yang nyaman untuk di kunjungi serta meningkatnya nilai transaksi keuangan.

D. Urusan Perindustrian

Pada urusan perindustrian juga mengalami krisis akibat dari lesunya perekonomian Kota Padang akibat dari pandemi Covid-19, beberapa permasalahan yang dihadapi Kota Padang dalam mengembangkan urusan perindustrian khususnya Industri Kecil Menengah, seperti:

1. *Menurunnya omzet penjualan produk Industri Kecil Menengah (IKM) karena lesunya pasar dan diperparah berkurangnya modal Usaha IKM Kota Padang.*
2. *Masih relatif rendahnya kualitas produk industri kecil dan menengah yang terstandarisasi:*
3. *Masih terbatasnya jumlah produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standarisasi nasional:*
4. *Belum optimalnya inovasi teknologi industri:*
5. *Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri,*

Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri ini meliputi:

- a. *pengelolaan lingkungan,*
- b. *kawasan industri,*
- c. *lahan industri dan infrastruktur penunjang (seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan, dan lainnya):*

6. *Belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya.*

E. **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Pada urusan kelautan dan perikanan permasalahan yang dihadapi adalah:

1. *Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya mengalami penurunan sebagai dampak dari COVID 19*

Walaupun produksi tidak terpengaruh signifikan, nelayan dan pembudidaya ikan tetap memproduksi walaupun ada pandemi Corona. Produksi yang melimpah tetapi tingkat penjualan menurun, oleh sebab itu terjadi excess supply. Sementara itu permintaan ikan di pasar cenderung menurun, tentu hal ini akan berpengaruh terhadap penjualan ikan, kemudian penjualan ikan akan berpengaruh kepada nilai produksi. Bila nilai produksi menurun secara linear kontribusi PDRB sektor kelautan dan perikanan akan mendapat imbas pula. Target 7% pada tahun 2021 sulit tercapai jika kondisi perekonomian tetap seperti ini.

2. *anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi. Sering terjadinya banjir cukup mempengaruhi hasil tangkapan dan budidaya ikan.*
3. *Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Padang mengalami stagnan*

Hal ini disebabkan antara lain:

- a. masyarakat cenderung mencari barang substitusi selain ikan dikarenakan ekonomi masyarakat mulai kesulitan
 - b. tidak adanya promosi makan ikan selama pandemi Corona menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dan hasil olahan ikan
4. *Penurunan nilai produksi sebagai dampak COVID 19*

Nilai produksi merupakan dasar penentuan tingkat pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan. Dengan terjadinya penurunan nilai produksi mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan dan keuntungan usaha yang diperoleh pembudidaya ikan

5. *Masih rendahnya kualitas dan kuantitas induk ikan pada Unit Pembenihan Rakyat*
6. *Masih banyaknya lahan budidaya yang terlantar/tidak produktif*
7. *Masih relatif rendahnya penganekaragaman jenis ikan budidaya*
8. *Masih rendahnya kemampuan manajerial usaha dan kualitas kelembangaan usaha*
9. *Masih rendahnya diversifikasi produk hasil kelautan perikanan.*
10. *Masih rendahnya kualitas kemasan / Packaging Produk Hasil Kelautan dan Perikanan.*

IV. *Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Penunjang*

A. *Pengawasan*

Permasalahan di Bidang Urusan Pengawasan di Kota Padang antara lain:

1. *Masih terbatasnya tenaga profesional yang memiliki kompetensi memadai di bidang pengawasan*
2. *Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan*
3. *Belum tersedianya teknologi informasi dalam bidang pengawasan*
4. *Belum terpenuhinya alokasi anggaran pengawasan sesuai ketentuan*

B. *Perencanaan Pembangunan*

Permasalahan terkait dengan perencanaan pembangunan antara lain:

1. *Belum terintegrasinya aplikasi perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran.*

Pada saat perencanaan, besaran anggaran masih sangat indikatif maka sering disebut sebagai pagu indikatif. Pada posisi pagu indikatif itulah jumlah yang akan disasar sangatlah terbatas dan selektif karena tuntutan proses teknokratis. Namun pada proses berikutnya yaitu penganggaran (KUA PPAS dan APBD) selalu terjadi perubahan kemampuan keuangan daerah (karena adanya kepastian DAU, DAK dan Dana Perimbangan lainnya), sehingga menimbulkan perubahan pagu indikatif menjadi plafon anggaran dan selanjutnya menjadi definitif anggaran (DPA). Perubahan rupiah tentunya memicu perubahan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. *Belum tersedianya aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan yang menyebabkan evaluasi pembangunan belum dapat dilaksanakan secara optimal.*
3. *Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.*

Ketersediaan data informasi yang dikeluarkan oleh OPD dan lembaga diluar pemerintah daerah dalam hal waktu seringkali momennya tidak bertepatan dengan kapan data itu dibutuhkan. Ketika proses perencanaan program/kegiatan membutuhkan data sering data tidak serta merta tersedia. Dari sisi kelengkapan data juga sering mengalami kendala, kebutuhan suatu data untuk proses analisis sangat tergantung dengan pihak lain. Sebagai contoh BPS adalah lembaga di luar pemerintah daerah yang berwenang menyediakan data statistik dasar. Kebutuhan data-data yang dihasilkan BPS sangat tinggi sedangkan ketersediaannya tentunya menunggu release dari BPS.

4. *Terdapat sedikit kendala dalam proses penginputan program dan kegiatan ke aplikasi e-planning tersebut yaitu keterbatasan jaringan dan server sehingga membuat proses penginputan agak lama.*

C. Keuangan

Permasalahan keuangan yang teridentifikasi adalah:

1. *Kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.*
2. *Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah:*
3. *Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.*

D. Kepegawaian serta Pendidikan Pelatihan

1. *Rendahnya kualitas dan produktifitas kerja pegawai*
2. *Jumlah pegawai yang belum terdistribusi sesuai beban kerja di Perangkat Daerah*

E. Penelitian dan Pengembangan

1. *Rendahnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan*

Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian atau penelitian yang dilaksanakan dilingkungan pemerintahan Kota Padang. Belum berjalannya kerjasama dengan Perguruan Tinggi terutama dalam mengaplikasikan hasil penelitian di perguruan tinggi untuk menyelesaikan masalah perkotaan.

F. Sekretariat Daerah

1. *Belum optimalnya pengawasan distribusi barang dan harga sembilan bahan pokok serta barang beredar.*
2. *Belum optimalnya pengendalian inflasi yang dilakukan TPID*
3. *Kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta untuk mengendalikan inflasi daerah*
4. *Masih ditemukannya masalah penyaluran barang bersubsidi yang kurang tepat sasaran*
5. *Belum optimalnya sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Kota Padang dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
6. *Masih kurangnya komitmen perangkat daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik*
7. *Belum adanya kepastian hukum dari pemerintah pusat terkait penatan kelembagaan*
8. *Masih relatif rendahnya komitmen dalam percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi*

G. Kewilayahan

1. *Penyelesaian status kepemilikan pulau-pulau kecil antara Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan yang belum tuntas.*
2. *Pengembangan kota yang belum terintegrasi dengan sarana prasarana transportasi.*

H. Kesatuan Bangsa dan Politik

1. *Belum maksimalnya pendidikan politik di masyarakat*
2. *Masih kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan sehingga masih kurangnya semangat kebersamaan dalam pembangunan di tengah-tengah masyarakat.*

4.2 Penelaahan Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah maupun berjangka panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Penelaahan isu strategis dilakukan dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta pembangunan antar daerah. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD, dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Penelaahan isu strategis juga dilakukan terhadap isu – isu yang ada di tingkat internasional atau global.

4.2.1 Telaah Isu Strategis Lingkungan Global/Internasional

Kondisi lingkungan global menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah di Kota Padang dalam ketiga tahun kedepan. Terjadinya pandemi covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap masalah kesehatan dan perekonomian setiap negara di dunia. Berbagai dampak negatif yang dipicu oleh Covid-19 telah menurunkan kinerja ekonomi dunia pada 2020, bahkan beberapa negara sudah mengalami resesi termasuk Indonesia. Sehingga diperlukan upaya bersama untuk penanganan Covid-19 agar ekonomi kembali pulih.

Pemulihan perekonomian global yang diperkirakan akan mulai membaik secara bertahap mulai tahun 2021, meskipun belum pulih sepenuhnya. Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat. Perekonomian di kawasan Eropa, Jepang, Cina dan negara-negara emerging market lainnya diperkirakan akan tumbuh stabil sekitar 2- 3 persen. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China dan Amerika. Hal lain, perlu tetap diwaspadai potensi terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara sedang berkembang dan Eropa.

1. Pergeseran peran ekonomi Kawasan Asia Pasifik dalam perekonomian global

Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran kekuatan perekonomian global karena ± 41 persen penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50 persen transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, perekonomian Asia Pasifik memperlihatkan kondisi mulai pulih dan membaik, hal ini akan terus mendorong pertumbuhan kawasan ini dengan ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Tren ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahap, seiring

dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat di dunia. Beberapa kerjasama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnerships (TPP)*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*, *East Asia Summit (EAS)*, serta *Expand ASEAN Maritime Forum (EAMF)*.

II. *Masih adanya potensi Ancaman Krisis Ekonomi Global*

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan awal tahun 2017, tidak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena “*Brexit*” atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, propaganda Korea Utara, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

III. *Potensi ketidakpastian ekonomi global juga terjadi di Kawasan Asia-Pasifik*

China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Kota Padang yang berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

IV. *Keterbukaan pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2016*

Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia pada umumnya dan kota Padang khususnya. Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipasinya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia yang memiliki penduduk dengan jumlah terbesar ketiga dunia, merupakan potensi pasar komoditas utama MEA, dan menjadikan masyarakat Indonesia yang konsumtif. Namun disisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.

4.2.2 Telaah Isu Strategis terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

1. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan

Proses identifikasi isu pembangunan berkelanjutan terdiri dari dua tahapan, yaitu:

1. Identifikasi dan perumusan isu untuk setiap pilar TPB melalui konsultasi publik

Hasil perumusan isu pembangunan berkelanjutan setiap pilar melalui konsultasi publik disajikan sebagai berikut:

a. Isu Sosial:

1. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dimasa pandemi	9. Pergaulan bebas, kenakalan remaja, wanita tunawisma, dan LGBT di area-area tertentu
2. Banyaknya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis	10. Banyaknya masyarakat yang berjualan di jalan utama
3. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak-anak	11. Tingkat vaksinasi rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi
4. Meningkatnya jumlah orang dengan gangguan jiwa	12. Kurang pedulinya masyarakat dalam menjaga infrastruktur pemerintah
5. Meningkatnya jumlah parkir liar	13. Perkelahian pada pelajar
6. Tidak meratanya bantuan social untuk keluarga miskin	14. Penculikan anak di bawah umur
7. Tingkat pengangguran dan PHK yang tinggi dimasa pandemi	15. Kompetensi tenaga kerja tidak memenuhi kebutuhan pasar
8. Putus sekolah dan pelaksanaan pendidikan tinggi masa pandemi	16. Penggunaan hp yang tidak efisien dan merusak anak

b. Isu Lingkungan

1. Belum optimalnya sarana lingkungan dan kampung KB	6. Banyaknya depot air minum isi ulang yang belum memiliki sertifikat kesehatan
2. Pengelolaan sampah belum optimal mualia dari pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan	7. Kerusakan hutan yang mengakibatkan banjir
3. Air yang berada dekat dengan kawasan pantai berbau	8. Kerusakan laut dan keanekaragaman hayati
4. Konversi lahan pertanian untuk perumahan dan perdagangan	9. Belum ada lahan parkir di setiap bangunan
5. Pengelolaan sanitasi dan drainase belum optimal	10. Pelepasan hak tanah
	11. Drainase kota mampet
	12. Aspal tambal sulam
	13. Pohon tumbang

c. Isu terkait Ekonomi

1. Transpotasi publik masih belum memadai	8. Kurangnya investasi yang masuk ke kota padang
2. Banyak usaha ayang merosot karena pandemi	9. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro dan kecil masyarakat
3. Perlu peningkatan pendapatan melalui Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP)	10. Sulitnya memasarkan produk UKM dan rendahnya pembiayaan untuk UMKM
4. Peningkatan nilai tambah produk pertanian	11. Kebijakan dan pajak daerah yang belum menjangkau usaha mikro
5. Perlu pelatihan wirausaha di masa pandemi (ekonomi kreatif)	

6. Pembinaan dan pemberian modal usaha untuk pengemis	12. Ketersediaan program pro rakyat seperti penggunaan produk untuk konsumsi belanja pemerintah
7. Aktivitas ekonomi industri pariwisata dan kuliner terdampak level 4 dan menurun	13. Penerapan UMK belum terawasi dan perlu diatur
	14. Masih kurangnya infrastruktur perindustrian
	15. Kurangnya PAD kota padang akibat covid 19

d. Isu terkait permasalahan hukum dan tata kelola

1. Masih terbatas tenaga yang ber kompetensi di bidang pengawasan	8. Penerbitan perda LP2B lahan pertanian
2. Kurangnya pembinaan kepada perangkat daerah dari APIP	9. Perlu razia kendaraan kenalpot bising
3. Masih ada PKL, Pungli dan korupsi, sanksi bagi pelanggar.	10. Razia balap liar setiap malam minggu di khatib
4. Perlu pembinaan untuk meningkatkan kapasitas ASN	11. Perlu sosialisasi terkait pelayanan pembuatan dokumen secara online
5. Kurangnya penghargaan terhadap aparat penegak hukum	12. Perlindungan perempuan dan anak yang masih minim
6. Kurangnya publikasi terhadap hukum yang jelas untuk masyarakat	13. Pengeluaran izin lingkungan di kota padang belum sepenuhnya terpenuhi
7. Tidak adanya kedamaian dan keadilan di masyarakat	14. Penataan PKL belum tuntas

2. Identifikasi dan perumusan isu strategis berdasarkan kondisi baseline lingkungan hidup (Bab 2) yang menghasilkan isu strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah belum optimal
2. Air yang berada dekat dengan kawasan pantai berbau
3. Konversi lahan pertanian
4. Pengelolaan sanitasi dan drainase belum optimal
5. Pertambahan jumlah penduduk
6. Penurunan Debit Air
7. Kerusakan hutan yang mengakibatkan banjir
8. Belum optimal kampung KB
9. Kerusakan laut
10. Daya dukung pangan

3. Tahapan analisis isu dan penapisan isu dilakukan pada rapat Pokja yang dilakukan dengan justifikasi dan pertimbangan tenaga ahli. Kesimpulan rapat tersebut dihasilkan 5 isu strategis Kota Padang yaitu:

1. Aspek Ekonomi, Sosial Dan Ketenagakerjaan
2. Konsistensi Pemanfaatan Ruang
3. Pengelolaan Sampah dan Sanitasi Lingkungan
4. Lemahnya Penegakan Hukum
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Tabel 4-3 Rumusan Isu Strategis Kota Padang Berdasarkan Evaluasi TPB

No	Bidang	Isu Strategis
1.	Kesehatan	SPM 1. Belum tercapainya pemberian imunisasi dasar lengkap kepada anak umur 12-23 bulan 2. Belum tercapainya Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 3. Pendataan stunting pada baduta 4. Penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa pada puskesmas 5. Pendataan kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.

No	Bidang	Isu Strategis
		NON SPM 1. Pendataan eliminasi malaria 2. Pendataan Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun, penyalahgunaan narkoba, konsumsi alkohol dan kematian akibat keracunan 3. Pendataan angka kematian akibat bunuh diri dan keracunan 4. Pendataan Unmet need pelayanan kesehatan. 5. Belum tercapainya cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) 6. Pendataan tingkat pengetahuan PUS terkait kontrasepsi modern
2.	Ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	SPM 1. Penguatan pengurangan risiko bencana daerah 2. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. 3. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). 4. Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.
		NON SPM Pendataan jumlah kasus kejahatan pembunuhan, penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dan penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya padasatu tahun terakhir.
3	Pekerjaan umum & penataan ruang	SPM 1. Belum tercapainya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan 2. Belum tercapainya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 3. Infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal
		NON SPM 1. Rendahnya kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 2. Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP) 3. Penyediaan RTH 4. Pendataan populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air dan jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. 5. Institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.
4	Pendidikan	SPM 1. Belum tercapainya Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat serta Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD/MI dan SMP/MTs 2. Akses sekolah ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).

No	Bidang	Isu Strategis
		3. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. 4. Pendataan angka melek aksara penduduk
		NON SPM 1. Persentase SD/MI dan SMP/MTs berakreditasi minimal B. 2. Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.
5	Sosial	SPM Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial dan Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Misalnya korban bencana gempa
		NON SPM 1. Belum tercapainya Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. 2. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
6	Lingkungan Hidup (Non SPM)	1. Rendahnya Kualitas sumber daya air (air danau dan air sungai sebagai sumber air baku) 2. Penataan kelembagaan sumber daya air. 3. Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. 4. Belum tercapainya Persentase sampah perkotaan dan sampah B3 yang tertangani. 5. Belum mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. 6. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. 7. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. 8. Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. 9. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. 10. Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. 11. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
7	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	1. Belum tercapainya persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. 2. Belum tercapainya proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. 3. Belum tercapainya persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) dan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 4. Belum ada data jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 5. Belum tersedia data kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.

4.2.3 Isu Strategis/ Kebijakan Nasional

1. Telaahan terhadap RPJM Nasional tahun 2020-2024

Pada perubahan RPJMD Kota Padang 2019-2024 ini telaahan RPJMN 2020-2024 dilakukan terhadap RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dimana sebelumnya dalam penyusunan RPJMD 2019-2024 yang ditetapkan melalui Perda No. 6 tahun 2019 masih mengacu kepada dokumen teknokratik RPJMN 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024 visi pembangunan jangka menengah nasional adalah yaitu :

**Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi RPJMN 2020 – 2024 adalah:



Gambar 4-4 Nawacita Kedua Misi RPJMN 2020-2024

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah ditetapkan prioritas pembangunan lima tahun kedepan. Prioritas tersebut dikenal dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Gambar 4-5 Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Isu strategis RPJM Nasional 2020-2024 yang perlu untuk dipedomani dalam perubahan RPJMD Kota Padang 2019-2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia:
2. pelayanan dasar dan perlindungan sosial
3. peningkatan produktivitas
4. pembangunan karakter
5. Pembangunan infrastruktur:
6. infrastruktur pelayanan dasar
7. infrastruktur ekonomi
8. infrastruktur perkotaan
9. energi dan kelistrikan
10. teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital
11. Penyederhaan regulasi:

12. pendekatan omnibus law
13. pendekatan terhadap regulasi yang akan dibuat
14. Penyederhanaan birokrasi:
15. penyelenggaraan e government
16. reformasi birokrasi pelayanan publik
17. Transformasi ekonomi:
18. Industrialisasi
19. pengembangan destinasi unggulan
20. penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dalam RPJMN 2020-2024. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Pembangunan Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

B. Pembangunan infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

C. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

D. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

E. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

4.2.4 Telaah Isu Strategis Terhadap RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024

A. Isu / Kebijakan Propinsi Sumatera Barat

Dalam perubahan RPJMD Kota Padang 2019-2024 ini, yang memprediksi isu strategis tiga tahun kedepan, maka telaahan terhadap isu strategis RPJMD Propinsi Sumatera Barat masih mengacu kepada Perda Provinsi Sumbar No. 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026. Visi dan misi Gubernur Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Propinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun Visi Gubernur Sumatera Barat 2021-2026 adalah:

Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan

Dalam upaya mendukung mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Propinsi tersebut, isu strategis dan target sasaran pembangunan Propinsi tersebut tentu perlu dipedomani dan diselaraskan dalam penyusunan perubahan RPJMD Kota Padang 2019-2024.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

B. Program Unggulan dan Rencana Pengembangan Sektor Strategis Propinsi Sumatera Barat

Program Unggulan

Visi dan Misi pembangunan daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 juga didukung dengan Program Unggulan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Sumbar Sehat dan Cerdas



2. Sumbar Religius dan Berbudaya



3. Sumbar Sejahtera



4. Sumbar Berkeadilan



Rencana Pengembangan Sektor Strategis

Percepatan pengembangan sektor strategis meliputi ;

1. Pertanian
2. Peternakan
3. Industri
4. Pariwisata

4.2.5 Isu Strategis /Kebijakan Daerah Tetangga

Penyusunan RPJMD juga perlu memperhatikan keterkaitan dengan RPJMD daerah lain di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk membangun keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, yang akhirnya akan menyumbang pada pembangunan wilayah provinsi. Keterkaitan bisa berupa keterkaitan yang dimulai dari perencanaan, atau hanya dalam implementasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini Kota Padang secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat, Kota Padang memainkan peran penting dalam menjalankan fungsinya sebagai kota penghubung dari dan keluar propinsi. Kebijakan yang dibuat daerah tetangga dan atau kebijakan pusat terhadap daerah tetangga akan berpengaruh kepada pembangunan kota Padang, baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa kebijakan yang perlu mendapat perhatian adalah:

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan laut antara Pemerintah Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman bahkan dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai walaupun tidak berbatasan langsung dengan kota Padang. Sarana dan prasarana perhubungan udara Kota Padang juga sangat tergantung ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman sehingga perlu mendukung kelancaran transportasi darat (Kereta Api, Bus Umum dan kendaraan roda 4 lainnya) untuk menuju BIM. Sarana prasarana perhubungan ini dibutuhkan

untuk mempelancar mobilitas orang (penumpang), barang dan jasa untuk mendukung perdagangan, pendidikan dan pariwisata Kota Padang.

Kerjasama pembangunan kawasan industri; kerjasama antara Kabupaten Padang Pariaman dengan pemko Padang dalam rangka meningkatkan peran industri di Propinsi Sumatera Barat, seperti Padang Idustrial Park (PIP), namun sampai saat ini belum efektif berjalan sesuai rencana dan tujuannya.

Mewujudkan pembangunan infrastruktur, terutama jalan secara terpadu sesuai Rencana Tata Ruang untuk meningkatkan akses transportasi dan perhubungan dengan memperhatikan aspek kebencanaan.

Menciptakan iklim perekonomian inklusif berbasis sektor perdagangan dan pariwisata, termasuk transportasi. Produk-produk dari Kabupaten Padang Pariaman, baik hasil pertanian maupun olahan hasil pertanian, serta produk non pertanian dipasarkan di Kota Padang. Sementara Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki Kawasan Wisata Mandeh sebagai kawasan strategis nasional juga akan melintas Kota Padang untuk mencapai destinasi wisata.

Visi Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok dan Kota Solok sama sama ingin mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui masyarakat yang agamis dan menjunjung tinggi kearifan lokal. Visi ini akan mempercepat terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing Kota Padang. Adapun Visi, Misi dimaksud disandingkan pada tabel berikut:

Tabel 4-4 Keselarasan Visi Misi Daerah Tetangga

Kota Solok	Kabupaten Solok	Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026	Tahun 2021 - 2026	Tahun 2021 - 2026	Tahun 2021 - 2026
VISI: Terwujudnya kota solok yang diberkahi, maju dan sejahtera melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang modern	VISI: Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok terbaik di Sumatera Barat	VISI: Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan Berbudaya	VISI: “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, Dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional”
Misi: 1. membangun masyarakat yang berkepribadian religius dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai-nilai budaya	Misi: 1. Mengelola Anggaran berbasis kebutuhan masyarakat	Misi: 1. Mewujudkan pengelolaan wisata kota yang maju, religius, tertib dan berbudaya	Misi: 1. Sejahtera : Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Kota Solok	Kabupaten Solok	Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026	Tahun 2021 - 2026	Tahun 2021 - 2026	Tahun 2021 - 2026
2. peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang kelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi	2. Meningkatkan Infrastruktur yang berkeadilan	2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas	2. Maju: Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
3. peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata	3. Mewujudkan pemerintah yang andal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	3. Bermatabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
4. optimalisasi penataan ruang dan penyediaan infrastruktur kota berwawasan lingkungan	4. mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan benar	4. Mewujudkan kota pesisir modern, dinamis, dan berwawasan lingkungan	4. Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

Kota Solok	Kabupaten Solok	Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026	Tahun 2021 - 2026	Tahun 2021 - 2026	Tahun 2021 - 2026
5. peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien	5. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas	5. Memperkuat ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat	5. Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)
	6. meningkatkan tatanan hidup masyarakat berlandaskan adat basandi syara' syara' basandi kitabullah		

4.2.6 Telaah Isu Strategis terhadap RTRW Kota Padang tahun 2010-2030

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang memiliki peran penting dalam pembangunan Kota Padang. RTRW Kota Padang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain:

1. Kebijakan Strategis Nasional (PSN) yang terkait dengan Kota Padang dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah Kota Padang;
2. Terjadinya perkembangan wilayah yang pesat melebihi perkiraan dalam RTRW terdahulu;
3. Masih adanya potensi sumber daya yang belum dikembangkan secara optimal sehingga belum dapat mendukung upaya pengembangan wilayah secara maksimal;
4. Adanya prioritas pengembangan wilayah, yaitu melalui pengembangan wilayah tertentu di kota; dan
5. Adanya masalah-masalah lingkungan yang terjadi di wilayah Kota Padang yang memerlukan penanganan prioritas agar tidak menjadi kendala dalam upaya pengembangan wilayah, yaitu masalah kebencanaan.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, dan

pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW.

Kota Padang telah memiliki Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Padang.

Adapun rencana program pembangunan wilayah menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 mencakup:

I. Rencana Struktur Ruang Kota,

Rencana Struktur Ruang Kota meliputi Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana.

A. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota.

Rencana sistem pusat pelayanan kota di Kota Padang sampai tahun 2030 direncanakan terdiri atas, yaitu:

1. Dua pusat pelayanan kota yang diarahkan di Kawasan Air Pacah dan Kawasan Padang Lama.
2. Lima sub pusat pelayanan kota yang diarahkan di Lubuk Buaya, Bandar Buat, Bungus, Limau Manis dan Anak Air.
3. Empat pusat lingkungan yang diarahkan di Sungai Pisang, Lubuk Minturun, Gunung Sarik dan Air Manis.

B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana, yang terdiri dari:

1. rencana sistem jaringan transportasi;
2. rencana sistem jaringan energi/kelistrikan;
3. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
4. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
5. rencana infrastruktur perkotaan

II. Rencana Pola Ruang Kota, yang meliputi:

A. Kawasan peruntukan lindung.

Berdasarkan peruntukan ruang, Kota Padang didominasi oleh kawasan peruntukan lindung dengan luasan yaitu sekitar 66% dari luas wilayah Kota Padang. Kawasan peruntukan lindung di Kota Padang meliputi hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan konservasi (kawasan suaka alam dan kawasan

pelestarian alam), kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan ruang terbuka hijau. Berdasarkan rencana tata ruang Kota Padang, luas peruntukan ruang terbuka hijau publik di Kota Padang telah lebih dari 20% dari luas wilayah Kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Padang telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengamanatkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.

Untuk lebih jelasnya, peruntukan ruang kawasan lindung di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, sebagai berikut:

Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 12.625,50 hektar tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Bungus

Kawasan resapan air seluas kurang lebih 158,67 hektar yang berfungsi sebagai prasarana pengendali banjir dan kawasan pantai berhutan bakau yang tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Kawasan konservasi (kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam) seluas kurang lebih 25.142,47 hektar yang tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Kawasan sempadan sungai seluas kurang lebih 476,19 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan sempadan pantai seluas kurang lebih 362,50 hektar yang tersebar di Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dan Kecamatan Koto Tengah.

Kawasan ruang terbuka hijau seluas kurang lebih 7.984,30 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan.

B. Kawasan peruntukan budidaya.

Kawasan peruntukan budidaya di Kota Padang berdasarkan rencana tata ruang adalah seluas 34% dari luas wilayah Kota Padang. Kawasan peruntukan budidaya di Kota Padang meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energy, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertanahan dan kemanan. Kawasan peruntukan budidaya yang paling luas adalah untuk kawasan permukiman, yaitu seluas 50,92% dari luas kawasan peruntukan budidaya yang direncanakan di Kota Padang.

Untuk lebih jelasnya, peruntukan ruang kawasan budidaya di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, sebagai berikut:

1. *Kawasan Perumahan*

seluas kurang lebih 11.962,36 hektar, dimana pengembangan kawasan perumahan tersebar di seluruh kecamatan. Sementara itu, pengembangan perumahan nelayan dikembangkan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Koto Tengah.

2. *Kawasan perdagangan dan jasa*

seluas kurang lebih 2.240,75 hektar yang diarahkan di tersebar di pusat kegiatan kecamatan, dan berada pada pusat kota dan sub pusat pelayanan kota, koridor jalan arteri, dan jalan kolektor.

3. *Kawasan perkantoran*

seluas kurang lebih 271,89 hektar yang tersebar, yaitu:

1. Perkantoran pemerintahan kota dikembangkan terpusat dan terpadu di Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tengah dan Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji.
2. Perkantoran pemerintah kecamatan dan kelurahan dikembangkan tersebar pada pusat-pusat kecamatan dan kelurahan.
3. Pengembangan kawasan peruntukan perkantoran swasta tersebar pada seluruh wilayah Kota Padang dan koridor sepanjang jalan utama.
4. Kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, dan kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, diarahkan tersebar di seluruh wilayah kota berdasarkan skala pelayanan dengan memperhatikan fungsi, letak, aksesibilitas dan daya dukung lingkungan.

4. *Kawasan pertanian, yang meliputi:*

a. *Kawasan tanaman pangan*

seluas kurang lebih 2.817,86 hektar berada di sebagian kecamatan Koto Tengah, kecamatan Kuranji, kecamatan Pauh, kecamatan Lubuk Kilangan, kecamatan Lubuk Begalung, kecamatan Bungus Teluk Kabung, kecamatan Nanggalo; dan kecamatan Padang Timur.

b. *Kawasan hortikultura*

seluas kurang lebih 1.004,76 hektar dikembangkan di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

c. Kawasan perkebunan

seluas kurang lebih 1.524,79 hektar tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

d. Kawasan peternakan

seluas kurang lebih 92,01 hektar tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

e. Kawasan pertambangan

seluas kurang lebih 824,32 hektar ditetapkan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dan Kecamatan Pauh yang meliputi kawasan pertambangan batu kapur, tanah liat, silika dan bahan tambang lainnya.

f. Kawasan perikanan

seluas kurang lebih 127,33 hektar, dimana kawasan budi daya perikanan air laut yang diarahkan di pesisir kota, kawasan budi daya perikanan darat diarahkan terpadu dengan usaha pertanian; dan kawasan minapolitan dan industri perikanan diarahkan di Kecamatan Koto Tengah dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung

g. Kawasan industri

seluas kurang lebih 795,16 hektar terdiri, dengan sebaran sebagai berikut:

1. Kawasan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan berada pada Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Bungus Teluk Kabung; dan Kecamatan Koto Tengah.
2. Sentra industri kecil dan menengah diarahkan tersebar di kecamatan yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa serta terbatas pada industri yang tidak mencemari lingkungan.
3. Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 341,18 hektar meliputi wisata alam, wisata sejarah, wisata makanan, wisata belanja dan wisata konvensi.

4.2.7 Telaah Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2004-2025

Rancangan perubahan RPJMD Kota Padang 2019-2024 yang disusun ini adalah periode RPJMD Kota Padang tahap IV sebagai tahap akhir dari satu periode RPJP, sehingga akan menjadi penentu capaian indikator atau keberhasilan untuk mengawal tercapainya tujuan RPJP Kota Padang di akhir peroidenya yakni tahun 2025. Visi dan Misi pembangunan Kota Padang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang adalah: “Terwujudnya masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur.” Visi ini selaras dengan visi pembangunan nasional dan propinsi yang bercita-cita untuk mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas yakni madani, berdaya saing

melalui keunggulan kompetitif wilayah dan memperkuat struktur ekonomi dengan meletakkan basis ekonomi pada industri, perdagangan dan jasa.

Dalam upaya mewujudkan Visi misi pembangunan jangka panjang daerah Kota Padang, maka telah dirumuskan sasaran umum arah pembangunan jangka panjang Kota Padang sebagai berikut:

1. Penurunan angka kemiskinan dalam arti luas yang menyangkut aspek fisik dan mental makin berkurang sehingga berbagai faktor ikutannya dapat diatasi.
2. Pengangguran semakin berkurang melalui perluasan kesempatan berusaha dan bekerja sehingga berbagai faktor ikutannya dapat diatasi.
3. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan antar kelas ekonomi dapat dikurangi melalui regulasi sehingga berbagai faktor ikutannya dapat diatasi.

Isu utama RPJP Kota Padang 2004-2025 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pelestarian dan pewarisan budaya, adat dan agama
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan kompetensi daya saing internasional
3. Peningkatan ekonomi berbasis industri, Perdagangan dan Jasa sesuai potensi sumber daya lokal
4. Sistem informasi dan teknologi tinggi yang mendukung daya saing
5. Perubahan pola aktifitas sosial, ekonomi dan pemerintahan.
6. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan
7. Reformasi birokrasi belum optimal
8. Lemahnya kepedulian masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana

Berikut tabel ringkasan hasil telaahan terhadap RPJPD Kota Padang tahun 2004-2025 berdasarkan periode tahap IV RPJMD tahun 2019-2024.

Tabel 4-5 Ringkasan Hasil Telaahan Terhadap RPJPD Kota Padang Tahun 2004-2025 Berdasarkan Periode Tahap IV RPJMD Tahun 2019-2024

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Satuan	Realisasi 2014-2019	Target 2019-2025
1	Mewujudkan pemahaman terhadap adat, agama dan pengamalan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat	Terbangunnya kehidupan beradat dan beragama secara harmonis	Persentase Konflik dan kekerasan bernuansa SARA yang tertangani	%	-	100
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Terwujudnya kualitas pendidikan keluarga dan masyarakat	IPM	%	78,44	83,46
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing tinggi	Terwujudnya investasi daerah yang berbasis perdagangan dan pariwisata	Laju pertumbuhan ekonomi	%	6,21	7,00

No	Misi	Sasaran Pokok	Indikator	Satuan	Realisasi 2014- 2019	Target 2019- 2025
4	Meningkatkan penataan ruang, prasarana dan sarana secara terpadu kearah keseimbangan pembangunan kawasan yang berkelanjutan	Terwujudnya kesesuaian penataan ruang dengan pemanfaatannya	Persentase Bangunan berIMB	%	-	70
			Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	%	75	100
		Tersedianya sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	-	100
5	Membangun kehidupan kota metropolitan yang tertib dan teratur	Terciptanya kehidupan kota metropolitan yang aman, nyaman dan tertib	Penurunan Angka Kriminalitas	jumlah	-	2500
			Prosentase ketersediaan sarana prasarana perkotaan dan sistem Informasi Teknologi	%	50	85
6	Menata sistem pemerintahan yang baik dan bersih	Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	-	Baik
		Terwujudnya implementasi budaya integritas di kalangan ASN dan masyarakat	Zona integritas	Jumlah zona	-	15
		Terwujudnya peran APIP yang efektif	Leveling APIP	Levelling APIP	-	3
7	Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana	Tercapainya penurunan risiko bencana	Indeks risiko bencana	Indeks	-	190

4.2.8 Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu global dan pembangunan berkelanjutan, Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030, tahapan pelaksanaan RPJM Nasional, RIPD Nasional dalam PP No.70 Tahun 2019, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2024, RPJPD Kota Padang 2004-2025, perubahan regulasi, kebijakan dan kondisi yang terjadi baik di tingkat nasional

maupun daerah, yaitu terjadinya pandemi covid-19, Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024 serta identifikasi permasalahan pembangunan daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis Kota Padang dalam pembangunan daerah tiga tahun kedepan (2022-2024) untuk menjadikan Kota Padang sebagai kota madani yang berbasis pada pendidikan, perdagangan dan pariwisata, adalah:

1. Penanganan dan Penuntasan Pandemi Covid-19
2. Pemulihan dan Pertumbuhan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19
3. Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang kreatif dan inovatif yang adaptif terhadap kondisi new normal
4. Optimalisasi pembangunan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah dalam rangka mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal
5. Pembangunan Ekonomi Inklusif berbasis pertumbuhan ekonomi berkualitas, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
6. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
7. Peningkatan Daya Saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dan sumber daya daerah
8. Pelestarian lingkungan hidup, peduli bencana berbasis partisipasi masyarakat dan budaya daerah
9. Optimalisasi Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
10. Optimalisasi Pengelolaan Pasar Raya dan Pasar Pembantu
11. Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk Membiayai Pembangunan

1. Penanganan dan Penuntasan Pandemi Covid-19

Ancaman global Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona saat ini penyebarannya sudah semakin masif. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Sumatera Barat, Pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Padang sudah melakukan beberapa kebijakan, diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun sudah pernah dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya.

Gugus tugas daerah sudah dibentuk sejak 14 Maret 2020 dengan Ketua Harian Kalaksa BPBD Sumbar, sedangkan Ketua Harian untuk Kabupaten/Kota adalah Sekda. Tugas dari gugus tugas tersebut antara lain: melakukan pendataan, koordinasi, melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait, dan tindak lanjutnya. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga sudah diterapkan di Sumatera Barat termasuk Kota Padang. Kebijakan ini berlaku selama 14 hari sejak ditetapkan dan bisa diperpanjang bila diperlukan. Selain itu diberikan kesadaran untuk peningkatan kewaspadaan dan disiplin guna mencegah resiko COVID-19 dengan menjaga jarak aman dalam berinteraksi. Untuk penjagaan di berbagai tempat, seperti di BIM sendiri pada kedatangan domestik sudah disediakan termogun untuk memeriksa orang yang datang dari luar sumbar. Sedangkan

yang datang dari luar negeri pengawasan nya lebih ketat. Untuk pelabuhan-pelabuhan sudah dilakukan SOP melalui KKP di teluk bayur, pelabuhan Muaro, Bunguih, dan juga Mentawai.

Saat memasuki fase Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) ketika kebijakan PSBB tidak bisa lagi dilakukan karena banyak faktor, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Perwako Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tatanan Pola Hidup Baru dan sudah melakukan sosialisasi secara cukup gencar. Sebagai contoh, Sosialisasi Perwako Nomor 49 Tahun 2020 dilakukan ke pedagang dan konsumen serta di pusat-pusat perbelanjaan modern. Sosialisasi juga dilakukan ke restoran, hotel, destinasi wisata dan lain-lain. Dinas Perdagangan melakukan usaha memutus rantai Covid-19 di pasar melalui langkah-langkah seperti pembersihan kios dengan *disinfectant*, razia masker sekali 2 jam, pelaksanaan *test swab* massal di pasar raya, menjaga kebersihan lingkungan pasar, penyediaan tempat cuci tangan dan sabun di area pasar, penerapan jaga jarak dan lain-lain.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian virus corona Pemerintah Sumatera Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Perda ini juga mengatur sanksi hukum. Sanksi yang diatur adalah sanksi administratif dan pidana. Untuk pidana diterapkan bagi pihak-pihak yang tidak mengindahkan sanksi administratif. Untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan Pemerintah Kota Padang sudah mengawalinya dengan melakukan sosialisasi, baru pada selanjutnya melakukan penegakan aturan dan pemberian sanksi.

Selanjutnya yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang dalam upaya penanganan Covid-19, perlu peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, SDM kesehatan, peningkatan kapasitas surveilan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha terhadap penerapan protokol kesehatan tapi juga dampak yang dirasakan masyarakat dari pandemi.

II. *Pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi akibat dampak pandemi Covid -19*

Dampak negatif yang pertama kali bisa langsung dirasakan akibat wabah virus corona ini adalah merosotnya pertumbuhan ekonomi. Pembatasan aktivitas dan mobilitas secara ekonomi menimbulkan *trade off*. Aktivitas ekonomi di sektor perdagangan dan transportasi, dan pariwisata serta berbagai sektor turunannya terimbas seperti akomodasi/makan minum, pergudangan, listrik dan gas dan jasa lainnya. Secara mikro, rumah tangga juga menjadi sektor yang terkena imbas berat dalam kesulitan ekonomi. Dampaknya dapat juga dilihat pada kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan yang bekerja pada sektor informal dengan pendapatan harian dan tidak pasti yang juga akan mengalami penurunan pendapatannya secara relatif dibanding sebelumnya. Penurunan pendapatan tersebut pada akhirnya akan membuat konsumsi pada masyarakat yang bekerja

di sektor informal juga akan menurun. Tak dapat diketahui kapan Covid-19 berakhir sementara kehidupan dan program pembangunan harus tetap berjalan.

Terdapat kenaikan angka kemiskinan sebesar 150,28% dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini disebabkan masyarakat di Kota Padang banyak yang hidup di garis rentan miskin. Ketika terjadi goncangan terhadap perekonomian Kota Padang, maka akan terasa imbasnya kepada masyarakat yang berada di garis rentan miskin, dan jumlah penduduk pada kelompok ini sangat banyak, sehingga membutuhkan perhatian yang serius. Dari sisi BLT, terdapat peningkatan penerima dari 57 ribu KK menjadi 144 ribu KK. Di saat yang sama pada bulan April dan Mei PAD Kota Padang juga berkurang sekitar 25% atau Rp. 250 M.

Pengaruh krisis kesehatan ini terhadap Kota Padang sangat besar karena Kota Padang ekonominya didominasi oleh 3 sektor besar yaitu: Perdagangan/Jasa, Transportasi/ Pergudangan dan Industri Pengolahan. Sektor besar ini yang sangat terpengaruh dan membuat kondisi ekonomi Kota Padang turun secara tajam. Dampak Covid-19 terlihat pada makro ekonomi Kota Padang dimana pertumbuhan ekonomi menurun dari 6,09% di awal periode RPJMD menjadi 2,20% selama pandemi, dan angka kemiskinan juga meningkat dari 4,48% menjadi 9,05%. Dampak ekonomi yang menonjol antara lain terdapat 172 perusahaan yang merumahkan sekitar 5 ribu lebih karyawannya; tidak ada kunjungan di destinasi wisata dan berkurangnya pendapatan dari retribusi objek wisata; transaksi PKL di destinasi wisata berkurang Rp.7 M hanya dalam waktu 2 bulan; transaksi harian di 9 lokasi pasar juga berkurang Rp.11 M per hari; dan 12 ribu UKM (ritel, kuliner, jasa, kerajinan, ultra mikro) mengalami pengurangan transaksi sebesar Rp.17,6 M dalam kurun waktu 2 bulan saja.

Beberapa tantangan pembangunan pasca Covid-19 meliputi pertumbuhan ekonomi terkoreksi menjadi rendah, berkurangnya PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan, meningkatnya pembiayaan pembangunan sektor kesehatan, meningkatnya pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, harus menghidupkan kembali lebih dari 12 ribu UKM yang terdampak, dan menguatkan kesiapan masyarakat untuk membiasakan dengan tatanan hidup baru. Oleh sebab itu, kondisi Pandemi Covid-19 menuntut perubahan mendasar terhadap strategi dalam perencanaan pembangunan kota kedepan terutama di sektor perdagangan, jasa, pariwisata transportasi, dan pendidikan, yang tentu berujung pada revisi RPJMD.

Upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi dan sektor manufaktur dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam menyusun strategi dan program pemulihan secara terarah dan fokus dan terintegrasi, maka kedepan perlu dibuat Matrik Strategi dan Program Pemulihan Sektor, yang memuat strategi pemulihan, program kegiatan, perangkat daerah pelaksana kegiatan. Matrik ini menjadi pedoman untuk strategi dan pelaksanaan program oleh perangkat daerah terkait dalam upaya pemulihan ekonomi kota dalam menghadapi dampak covid 19 pada masa adaptasi kebiasaan baru. Kemudian program kegiatan yang tertuang dalam matrik tersebut agar terakomodir dalam program kegiatan perangkat daerah pada APBD setiap tahunnya. Ada 3 strategi untuk pemulihan ekonomi yang perlu

dilaksanakan dan dituangkan dalam matrik: peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kesempatan berusaha, dan peningkatan transaksi UMKM.

Selain itu, beberapa strategi yang dapat dilakukan Pemko Padang dalam menggerakkan ekonomi pada masa Pandemi ini antara lain adalah melakukan inisiatif dan proaktif untuk menjemput dana Program Pemulihan Ekonomi (PEN) dari Pusat, percepatan realisasi belanja pembangunan (infrastruktur) padat karya dan *refocusing* anggaran untuk kesehatan dan ekonomi, serta membangun dan menjaga *public trust* partisipasi CSR, Lembaga Zakat dan filantropi. Pada pembangunan pariwisata daerah, Pemerintah Kota dapat meluncurkan konsep *City branding* sebagai ikon pariwisata yang khas, meningkatkan kemitraan dan hubungan antar lembaga dalam pengelolaan pariwisata, dukungan regulasi serta pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada sisi moneter, kebijakan ekspansif dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga di pasar uang. Tingkat suku bunga merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan saat akan melakukan investasi. Hal tersebut karena saat perusahaan akan melakukan investasi, salah satu caranya jika perusahaan tidak memiliki modal adalah dengan melakukan pinjaman ke pasar uang. Pinjaman di pasar uang akan memiliki biaya sebesar suku bunga yang berlaku. Penurunan tingkat suku bunga memberikan implikasi bahwa biaya investasi akan relatif lebih murah. Kondisi tersebut akan menjadi insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan investasinya. Peningkatan investasi perusahaan dapat digunakan untuk melakukan ekspansi produksi dan efisiensi dalam perusahaan, sehingga kapasitas output dapat ditingkatkan. Peningkatan pada kapasitas output pada gilirannya akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga permintaan tenaga kerja akan meningkat dan produktivitas meningkat.

Untuk mendorong roda ekonomi dari daya beli masyarakat, pasar-pasar tradisional perlu direvitalisasi dengan memperhatikan prinsip aksesibilitas dan universal design untuk menciptakan kenyamanan masyarakat dan memotivasi mereka untuk berbelanja ke pasar tradisional yang dekat dari tempat tinggal. Aplikasi *go shop* dan pasar tani online juga perlu terus diimplementasikan di pasar raya untuk akses aman Covid-19 bagi masyarakat dalam berbelanja. Dinas perdagangan juga dapat terus menggalakkan perdagangan melalui *e-commerce* serta bekerja sama dengan Link Aja untuk program *cashless society* di pasar raya.

Dapat Disimpulkan situasi pandemi menghadapkan pemerintah pada pilihan sulit, antara prioritas kesehatan dengan ekonomi. Dengan demikian perlu kebijakan yang memadukan aspek menjaga sumber daya kesehatan dengan tetap menggerakkan ekonomi. Salah satu contoh memadukan Strategi Kesehatan-Ekonomi yaitu menggerakkan UMKM dalam penyediaan APD, masker, *hand sanitizer*; penggunaan tingkat kandungan lokal dan penyediaan pangan bagi penyintas Covid-19.

UMKM adalah salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 di Kota Padang. Tantangan dan strategi selama pandemi. Tantangan yang dihadapi untuk pemulihan ekonomi sektor UMKM antara lain menurunnya daya beli masyarakat, belum maksimalnya UMKM dalam memanfaatkan media sosial dan *e-commerce*, banyak UMKM yang belum memiliki legalitas dan

standarisasi produk, kurangnya inovasi produk dll. Sementara UKM dan IKM yang ada saat ini merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Padang, karena Kota Padang masih mempunyai banyak KK miskin.

Beberapa strategi pemulihan yang sudah dilakukan terkait UMKM antara lain mendorong pembuatan masker kain oleh UMKM, pemasaran *offline* dan *online*, pengembangan *skill* dan *knowledge* UMKM melalui berbagai pelatihan, serta fasilitasi permodalan, legalitas dan standarisasi mutu produk UMKM. Menghadapi dampak Covid-19 dan untuk tetap bertahan di masa Adaptasi Kebiasaan Baru, maka UMKM harus bersikap responsive dengan mencari peluang-peluang usaha baru serta meningkatkan SDM dengan mengikuti pelatihan. Sebagai contoh, untuk pembinaan UMKM Kota Padang, Dinas Pasar bekerja sama dengan BEDO-Sampoerna untuk pelatihan 3 bulan tentang pengembangan bisnis dan memasarkan produk dalam dan luar negeri bagi para pelaku UMKM di Kota Padang, serta menggalakkan pengadaan snack rapat dari UMKM.

Namun demikian, pembinaan oleh Perangkat daerah kepada UMKM tentunya tidak hanya dalam bentuk pelatihan tetapi perlu melakukan pendampingan sampai usaha UMKM tersebut berhasil. Misalnya perlu pendampingan kepada pelaku UMKM di bidang kuliner untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam menjalankan usaha sesuai dengan protokol kesehatan. Selanjutnya juga penting pemberian penghargaan atau *Award* kepada pelaku UMKM yang menerapkan protokol kesehatan secara baik dan menjadi role model bagi pelaku UMKM lainnya dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

Di sisi lain, peningkatan pemulihan ekonomi melalui UMKM dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat melalui kebijakan KUR, penerapan Kartu Prakerja, meningkatkan TKL (tingkat kandungan lokal) dari UMKM, dan kemudahan Sertifikasi Halal untuk UMK serta percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah. Namun sebagai langkah awal perlu dilakukan pemetaan potensi dan kondisi UKM/IKM oleh perangkat Daerah yang menjadi leading sector dalam pembinaan UKM/IKM. Juga perlu adanya dukungan kebijakan dalam bentuk regulasi dalam rangka pemberdayaan dan penggunaan produk lokal hasil produksi UKM.

III. Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang kreatif dan inovatif yang adaptif terhadap kondisi new normal

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja, baik local, nasional dan bahkan internasional. Untuk itu sektor pendidikan merupakan salah satu pilar pemabangunan utama kota Padang., dengan dan lewat pendidikan diharapkan akan tercipta generasi-generasi yang berkualitas dan tangguh serta berdaya saing dan tetap memegang nilai-nilai moral yang sesuai dengan tuntunan adat dan agama.

Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berkecakupan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

Semua daerah termasuk Kota Padang mempunyai tantangan besar dalam bidang peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sesuai dengan tantangan kedepan, kualitas SDM yang kreatif dan inovatif adalah yang mampu beradaptasi dengan kondisi *New-Normal*. Misal SDM yang mampu menciptakan ide ide bisnis yang beradaptasi dengan situasi yang ada sebagai dampak terjadinya covid 19.

Terkait arah kebijakan pendidikan selama pandemi dan masa adaptasi kebiasaan baru, ada beberapa hal yang tetap perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Desain kurikulum Pendidikan harus diubah dan dirancang menghadapi segala situasi agar tidak terjadi kegaduhan dan kegagapan; Kemampuan kolaborasi rumah (orangtua) dan sekolah (guru) yang harus dijaga serta adaptasi keberadaan sekolah dan guru agar tidak ditinggalkan muridnya. Hal ini menuntut inovasi dan pembaharuan dalam pelajaran dengan tetap memperhatikan keragaman peserta didik seperti Anak Berkebutuhan Khusus (ABK); dan untuk menjadi catatan bagi OPD terkait selama masa Adaptasi Kebiasaan Baru, agar pemerintah harus melihat keberadaan/status dari daerah per daerah masing-masing untuk menerapkan suatu kebijakan pendidikan karena saat pandemi Covid-19 ini, ada beberapa daerah dengan kategorisasi zona merah, kuning atau hijau.

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan isu strategis ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar untuk semua (*education for all*).
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI)

IV. *Optimalisasi pembangunan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah dalam rangka mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal*

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin mudah akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Pembangunan dan Pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan

sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan daya dorong yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik dan aksesibel untuk semua akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan Infrastruktur Kota Padang merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang mengutamakan prinsip aksesibilitas dan lingkungan tanpa hambatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Pembangunan sarana dan prasarana kedepan juga perlu mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur yang mampu beradaptasi dengan situasi new normal, seperti sarana pariwisata yang menjamin keselamatan masyarakat dan turis yang datang baik dari risiko kesehatan maupun risiko bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Sehingga terwujud Kota Padang yang layak huni, yang mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga kota.

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan isu strategis ini adalah:

1. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan yang aksesibel dan inklusif sehingga dapat dinikmati oleh semua masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
2. Menurunnya luas kawasan banjir dan genangan
3. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan didalam masyarakat.

V. *Pembangunan Ekonomi Inklusif berbasis pertumbuhan ekonomi berkualitas, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan*

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan ekonomi yang melibatkan semua masyarakat yang berbeda latar belakang, karakteristik, status sosial, kondisi, kemampuan, etnik, budaya dan lainnya. Hal inilah yang akan diwujudkan dalam pembangunan daerah kota padang. Untuk itu, keadilan dalam pembangunan perekonomian akan terus diupayakan dalam pembangunan kota, dengan memperhatikan dan menyerap aspirasi dari kelompok masyarakat penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Konsep pembangunan ekonomi inklusif lahir dari komitmen untuk mendorong pertumbuhan dengan melibatkan warga sehingga dalam prosesnya terjadi penyebaran manfaat yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang

lebih luas. Pertumbuhan ekonomi inklusif ditandai oleh pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan; dan jaring pengaman sosial untuk mencegah kerugian ekstrim, yang ditandai dengan menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan serta ketimpangan ekonomi. Hal inilah yang akan diraih dalam peningkatan kegiatan ekonomi kota Padang ke depan.

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan isu strategis ini adalah:

1. Meningkatnya peluang dan kesempatan kerja yang dapat diakses oleh semua masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
2. Meningkatnya tingkat perekonomian penduduk

VI. *Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*

Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif, inklusif dan akuntabel. Untuk itu, partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya. Birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Dengan ini diharapkan kinerja pemerintah dapat lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal, efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan birokrasi. Jika berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, setidaknya sudah menuju ke arah upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Jadi keberhasilan reformasi birokrasi akan mewujudkan pada tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga upaya pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten.

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan isu strategis ini adalah:

1. Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Meningkatnya kinerja birokrasi
3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang inklusif dan berkualitas

VII. Peningkatan Daya Saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dan sumber daya daerah

Kota Padang memiliki potensi unggulan sumber daya daerah yang sangat beragam, seperti gambir, teh, kopi, palawija, rempah dan lainnya. Meski sebagai kawasan perkotaan, produktivitas hasil pertanian dalam arti luas masih diharapkan dapat bergerak ke arah positif secara berkelanjutan. Untuk itu, dalam upaya mempercepat pergerakan perekonomian daerah dan peningkatan daya saing maka perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan.

Disamping itu, potensi unggulan daerah lainnya perlu lebih dioptimalkan, yaitu peran lapangan usaha industri, perdagangan, transportasi dan komunikasi, pariwisata serta jasa pendukung lainnya, sebagai lapangan usaha yang mendominasi perekonomian daerah. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan peran dan investasi swasta. Dengan adanya peran investasi swasta maka pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan secara maksimal. Untuk itu peningkatan kemudahan melakukan usaha harus menjadi fokus kebijakan dalam pengembangan ekonomi daerah.

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan isu strategis ini adalah: Mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan Pariwisata yang unggul dan berdaya saing.

VIII. Pelestarian lingkungan hidup, peduli bencana berbasis partisipasi masyarakat dan budaya daerah

Pelestarian Lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan. Serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup Manusia, hewan dan Tumbuhan. Manusia sebagai penghuni lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayangnya, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hasil alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai dimasa yang akan datang. Untuk itu, peran serta dan kesadaran semua pihak sangat diperlukan agar kualitas lingkungan terus terjaga dengan baik dengan dukungan nilai-nilai adat dan budaya dan norma-norma sesuai tuntunan agama.

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan isu strategis ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sanitasi.
2. Menurunnya ancaman
3. Menurunnya penduduk terpapar
4. Menurunnya tingkat kerugian
5. Meningkatnya kapasitas SDM

IX. *Optimalisasi Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*

TPB merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan TPB tersebut, mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB tidak hanya sangat penting bagi rakyat bagi Indonesia dan tetapi juga bagi komunitas global. Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memimpin sendiri pelaksanaan TPB sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana.

Komitmen yang sama diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-462-2018 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Dan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, Pemerintah kota Padang juga harus membangun komitmen yang kuat untuk mendorong terlaksana dan tercapainya agenda TPB di kota Padang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dalam penyusunan RPJMD Kota Padang 2019-2024, rencana pembangunan daerah harus selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan, dengan kata lain harus terwujud sinergi antara RPJMD Kota Padang dengan tujuan TPB.

X. *Optimalisasi Pengelolaan Pasar Raya dan Pasar Pembantu*

Dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi, khususnya melalui peningkatan sektor perdagangan, Pemerintah Kota Padang berupaya untuk meningkatkan kembali aktivitas pasar Raya dan Pasar Pembantu sebagai basis kekuatan ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasar memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, setidaknya dalam 3 hal, yaitu:

Sebagai entitas ekonomi, pasar merupakan penggerak roda ekonomi melalui kegiatan perdagangan, industri dan jasa;

Sebagai entitas sosial, pasar merupakan sarana yang sangat kuat dalam mempertahankan budaya dan nilai sosial lokal, seperti gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan. Karena pertemuan penjual dan pembeli di pasar bukan hanya melaksanakan transaksi ekonomi, tetapi sekaligus menjadi media interaksi sosial.

Sebagai aset pembangunan, pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan tersebut berasal dari retribusi para pedagang dan pelaku jasa yang beraktifitas di dalam dan sekitar pasar.

Perkembangan pasar semakin menurun karena adanya persaingan dengan semakin banyaknya *Supermarket*, *Hypermarket* dan *Mall*. Sehingga pasar harus diberdayakan atau direvitalisasi, agar tidak kalah bersaing dengan pasar modern atau *hypermarket*. Karena bila pasar dibiarkan menurun aktifitasnya, akan berdampak pada bertambahnya pengangguran dan menurun kontribusinya dalam PDRB. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberdayakan kembali pasar adalah dengan cara memaksimalkan pengelolaannya melalui Perusahaan Daerah Pasar.

XI. Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk Membiayai Pembangunan

Setiap Pemda memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Salah satu jalan untuk mencapai hal tersebut yaitu melalui penyediaan infrastruktur publik di daerah. Penyediaan infrastruktur di daerah saat ini masih banyak mengandalkan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Alokasi belanja proyek infrastruktur saat ini masih rendah sedangkan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur di Indonesia sangatlah besar. Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat berupaya mendorong Pemerintah Daerah agar bisa memanfaatkan alternatif pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur daerah yang menjadi kewenangannya. Pembiayaan kreatif tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah, membentuk dan mendorong sumber baru pertumbuhan ekonomi di daerah serta meningkatkan investasi di daerah terutama dalam penanggulangan dampak ekonomi akibat Covid-19.

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019-2024



BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD KOTA
PADANG TAHUN 2019-2024

Daftar Isi

5	BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	5-1
5.1	Misi	5-3
5.2	Tujuan dan Sasaran.....	5-11
5.2.1	Tujuan 1. Mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing	5-12
5.2.2	Tujuan 2. Terwujudnya Kota Padang yang Layak Huni	5-13
5.2.3	Tujuan 3. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	5-14
5.2.4	Tujuan 4. Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat	5-14
5.2.5	Tujuan 5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan.....	5-15
5.2.6	Tujuan 6. Meningkatnya kapasitas Kota Padang dalam penanggulangan bencana.....	5-16
5.2.7	Tujuan 7. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	5-16
5.3	Konsistensi	5-17

Daftar Tabel

Tabel 5-1 Keselarasan Misi pada RPJPD Kota Padang Tahun 2005 -2025 dengan Misi RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024.....	5-9
Tabel 5-2 Misi dan Tujuan Pembangunan Kota Padang Tahun 2019-2024	5-11
Tabel 5-3 Tujuan dan Sasaran pada Misi 1	5-12
Tabel 5-4 Tujuan dan Sasaran pada Misi 2	5-13
Tabel 5-5 Tujuan dan Sasaran pada Misi 3	5-14
Tabel 5-6 Tujuan dan Sasaran pada Misi 4	5-15
Tabel 5-7 Tujuan dan Sasaran pada Misi 5	5-15
Tabel 5-8 Tujuan dan Sasaran pada Misi 6	5-16
Tabel 5-9 Tujuan dan Sasaran pada Misi 7	5-17
Tabel 5-10 Konsistensi Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang pada Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024	5-18

Daftar Gambar

Gambar 5-1 Tahapan Visi Pembangunan Kota Padang menuju pembangunan jangka panjang berdasarkan periode pembangunan jangka menengah	5-1

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan arah pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang ini akan mengarahkan pembangunan jangka menengah Kota Padang tahap ke empat sebagai tahap akhir dalam periode RPJPD Kota Padang 2005-2025.

Visi yang ditetapkan dalam RPJMD ini selaras dengan visi RPJPD Kota Padang untuk mewujudkan Masyarakat Madani yang Berbasis Industri, Perdagangan dan Jasa yang Unggul dan Berdaya Saing Tinggi Dalam Kehidupan Perkotaan Tertib dan Teratur. Dengan demikian, Visi RPJMD periode ini merupakan kelanjutan dari visi RPJMD periode ketiga tahun 2014-2019 yaitu Terwujudnya Kota Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya. Berdasarkan analisis potensi dan permasalahan, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan lima tahun kedepan, serta isu-isu strategis pembangunan Kota Padang yang dihadapi lima tahun kedepan, maka Visi Pembangunan Daerah Kota Padang pada RPJMD periode 2019-2024 adalah:

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA PADANG YANG MADANI
BERBASIS PENDIDIKAN, PERDAGANGAN, DAN PARIWISATA UNGGUL SERTA
BERDAYA SAING”**

Visi ini menunjukkan tujuan yang akan dicapai Kota Padang pada akhir tahun 2024. Dari pentahapan RPJPD Kota Padang, maka Visi ini merupakan kelanjutan Visi RPJMD ketiga periode 2014-2019 atau periode terakhir dalam RPJPD Kota Padang periode 2005-2025. Hubungan pentahapan RPJMD periode 2019-2024 dengan RPJPD periode 2005-2025 Kota Padang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5-1 Tahapan Visi Pembangunan Kota Padang Menuju Pembangunan Jangka Panjang Berdasarkan Periode Pembangunan Jangka Menengah



Visi RPJMD Kota Padang memperlihatkan konsistensi keinginan untuk mewujudkan Visi RPJPD Kota Padang yakni masyarakat madani melalui pembangunan sektor perdagangan, pendidikan dan pariwisata yang unggul. Visi memiliki kata-kata yang bermakna spesifik dan memerlukan penjelasan agar setiap stakeholders memiliki satu pemahaman dan satu interpretasi terhadap visi pembangunan Kota Padang, sehingga Visi menjadi lebih komunikatif dan tersosialisasi dengan mudah untuk mewujudkannya. Penjelasan visi RPJMD Kota Padang periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Masyarakat Madani

Masyarakat Madani diartikan sebagai masyarakat perkotaan yang beradab yang memiliki tatanan kehidupan yang beragama, demokratis dan menghargai kearifan lokal. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan, kearifan lokal dan peradaban. Masyarakat madani disebut juga *civil society* karena tata krama kehidupan mereka diatur oleh hukum dan undang-undang berdasarkan kesepakatan tentang kesetaraan untuk kemajuan yang membentuk budaya perkotaan (*urban culture*). Masyarakat madani memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dalam mendiskusikan isu-isu dan permasalahan pembangunan untuk kepentingan bersama dan menyampaikan ke lembaga dan institusi yang relevan. Masyarakat madani selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter, berpengetahuan dan paham tentang adat, agama, etika dan moral yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebut dengan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Pendidikan Unggul dan Berdaya saing

Pendidikan unggul dan berdaya saing adalah pendidikan yang berkualitas dan berkarakter yang menghasilkan siswa-siswa berprestasi dan berkarakter dari sekolah-sekolah di Kota Padang. Pengelolaan Institusi Pendidikan yang baik menjadikan Kota Padang sebagai tujuan utama pendidikan di Sumatera Barat dan regional sumatera. Keunggulan dan daya saing institusi pendidikan tidak terlepas dari sumberdaya manusia yang kompeten dan sarana prasarana pendidikan yang cukup dalam mengelola proses pendidikan sehingga menghasilkan siswa yang unggul dan berdaya saing di Sumatera Barat dan Nasional.

Perdagangan Unggul dan Berdaya Saing

Perdagangan unggul dan berdaya saing adalah perdagangan produk-produk unggul yang dihasilkan oleh industri besar dan UMKM dari usaha-usaha ekonomi kreatif di Kota Padang dan sekitarnya. Kota Padang mempunyai keunggulan sebagai pusat aktivitas perdagangan dan bisnis di wilayah pantai barat Sumatera yang didukung oleh sentra-sentra pasar modern, mall, supermarket, mini market, pergudangan, hotel dan restoran yang tersebar di Kota Padang. Posisi Kota Padang sebagai pusat perdagangan ekonomi kreatif yang unggul di Sumatera Barat dan regional, juga didukung oleh sarana dan prasarana transportasi seperti jalan by pass yang menghubungkan Bandara Internasional

Minangkabau (BIM) dengan Pelabuhan Internasional Teluk Bayur, Kereta Api Bandara, dan Bus Trans Padang serta sarana dan prasarana lainnya yang mendukung aktivitas perdagangan di Kota Padang.

Pariwisata Unggul dan Berdaya saing

Pariwisata unggul dan berdaya saing adalah pariwisata yang berorientasi wisata halal (*halal tourism*). Wisata halal yang dimaksud berpedoman kepada sebelas standar pariwisata halal yang ditetapkan *Global Muslim Travel Index (GMTI)*.

Keunggulan dan daya saing pariwisata Kota Padang juga ditunjukan dengan konsep *MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition)*. Kota Padang menjadi tujuan utama stakeholder yang mengadakan kegiatan-kegiatan pertemuan, seminar, workshop, pelatihan dan pameran baik yang bersifat akademis, pemerintahan maupun umum. Disamping itu Pemerintah Kota Padang juga melaksanakan acara atau event wisata yang dalam skala internasional, nasional dan lokal bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya.

Pariwisata yang unggul dan berdaya saing akan menarik sektor atau memiliki hubungan ke belakang (*backward linkage*) yakni sektor primer pertanian (tanaman dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan), dan akan mendorong sektor lain atau memiliki hubungan kedepan (*forward linkage*) untuk tumbuhnya industri, perdagangan dan jasa melalui hubungan pemasaran yang luas. Pariwisata akan mempercepat integrasi pembangunan lintas sektor sehingga pertumbuhan ekonomi kota Padang dapat dipercepat.

5.1 Misi

Untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Kota Padang periode 2019-2024 seperti yang dijelaskan di atas, telah disusun 7 Misi Pembangunan Kota Padang sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing

Pendidikan merupakan pilar utama untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing. Pendidikan berkualitas di Kota Padang adalah pendidikan karakter yang berorientasi pada penguatan kepribadian, bermoral dan beriman. Pendidikan karakter dikembangkan melalui tiga jenis pendidikan yaitu pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan karakter melalui pendidikan formal adalah dengan menambahkan kurikulum muatan lokal. Pendidikan non formal seperti kegiatan pesantren ramadhan, tahfidz qur'an. Pendidikan in formal, melalui selebaran, televisi dan media massa lokal.

Pendidikan karakter di Kota Padang diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkreaitifitas, berinovasi dan

berdaya saing. Dengan keimanan yang semakin baik diharapkan kota semakin tertib, angka kriminalitas dan penyakit masyarakat di Kota Padang akan menurun. Sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter juga akan menghasilkan produktifitas yang semakin baik melalui daya kreatifitas yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian memperluas akses pendidikan formal dan informal, membangun pusat kegiatan belajar bagi masyarakat, mempersiapkan Kota Padang merupakan upaya-upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. Pendidikan karakter akan menghasilkan siswa-siswa berprestasi dan berkarakter terpuji dari sekolah-sekolah di Kota Padang. Untuk melaksanakan pendidikan karakter dibutuhkan sumberdaya manusia yang kompeten dan sarana prasarana pendidikan yang cukup dalam mengelola proses pendidikan sehingga menghasilkan siswa yang unggul dan berdaya saing di Sumatera Barat dan Nasional.

Pendidikan yang berkualitas juga membutuhkan sumber daya yang sehat. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus menunjukkan sumber daya yang sehat yang dimiliki suatu daerah. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan berdaya saing ini selain pendidikan yang berkualitas perlu juga diwujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Misi 2 : Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal

Misi ini bertujuan untuk mempercepat persiapan Kota Padang sebagai kota metropolitan dengan konsep *Smart City* sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kota Padang pada RPJPD Kota Padang pada tahap ke empat RPJMD Kota Padang periode 2019-2024. Kota metropolitan tidak hanya dilihat dari populasi penduduk tetapi juga dilihat dari faktor lain yang terkait. Kegiatan-kegiatan di Kota Padang selama ini sudah mengarah sebagai Kota Metropolitan, yaitu sebagai tempat pertemuan penting aktivitas ilmiah dan budaya baik nasional maupun internasional, tujuan wisata internasional yang sudah terkenal ke manca negara.

Sejalan dengan konsep *Smart City*, Kota Padang juga terus berbenah menjadi kota layak huni yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal sebagai salah satu keunggulan yang dimiliki Kota Padang. Selanjutnya pemerintah Kota Padang berusaha memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik melalui mall pelayanan publik dan IT yang terintegrasi. Selanjutnya integrasi IT akan meningkatkan keterbukaan informasi layanan serta efisiensi dalam pemberian layanan kepada publik. Untuk mewujudkan Padang sebagai Kota Metropolitan dengan konsep *Smart City*, pemerintah akan melibatkan

seluruh pihak, seperti swasta, masyarakat dan stakeholder lain yang peduli dengan konsep ini.

Kota Padang sebagai Kota layak huni, harus mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia (*basic needs*) yaitu sandang, pangan, dan papan. Namun demikian sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat saat ini, kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, ketertiban dan keamanan dan ketersediaan fasilitas umum yang baik dan cukup menjadi hal yang utama.

Keamanan yang dimaksud dalam misi ini adalah situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan fisik yang teratur, tertib sesuai norma kearifan lokal yang dipercaya dan berlaku sehingga menimbulkan rasa aman bagi penghuni Kota Padang. Ketertiban merupakan keadaan yang sesuai dengan hukum, norma serta kesepakatan bersama, dan relevan dengan upaya penegakan hukum dan sanksi sosial pemenuhan norma dalam kehidupan masyarakat.

Ketentraman didefinisikan sebagai suasana batin dari individu dan atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma yang berlaku. Ajaran agama yang belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan dapat menyebabkan perilaku masyarakat menjadi tidak sesuai dengan norma sosial, seperti terjadi tindak kekerasan, luntarnya perilaku sopan santun, kurangnya rasa kasih dan sayang kepada sesama, berkurangnya toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang Inklusif

Misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif adalah upaya pemerintah Kota Padang untuk mengawal pertumbuhan ekonomi memberi dampak riil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar memberi dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Pertumbuhan ekonomi inklusif juga akan mendorong usaha ekonomi berskala besar untuk terus berkembang, sekaligus menarik usaha ekonomi berskala kecil, koperasi dan menengah untuk tumbuh. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan harus dijaga oleh pemerintah Kota Padang. Pertumbuhan ekonomi inklusif juga dapat menciptakan berbagai peluang diberbagai kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga kondisi ini menjadikan perekonomian Kota Padang yang lebih baik dan berkelanjutan dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Misi 4 : Mewujudkan Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan dan Ekonomi Kreatif

Misi keempat ini bertujuan untuk menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan pusat ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Sebagai ibukota

Propinsi, Kota Padang memiliki banyak potensi untuk mengoptimalkan aktivitas perdagangan dan ekonomi kreatif. Bandara Internasional Minangkabau (BIM), sebagai pintu masuk pelaku ekonomi yang akan melakukan transaksi dan aktivitas perdagangan di Kota Padang terus berkembang dan meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan bagi pelaku ekonomi. Selanjutnya Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pintu masuk barang dan jasa juga menjadi potensi untuk meningkatkan perdagangan ke luar daerah atau manca negara (ekspor-impor). Perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara-negara kerjasama IORA sekaligus promosi bagi Kota Padang sebagai pusat perdagangan di kawasan Pantai Barat Sumatera. Fasilitas transportasi dan jalan by pass yang baik juga mendukung distribusi barang dan jasa yang diperdagangkan di Kota Padang.

Produk-produk unik dan kreatif yang dihasilkan pelaku ekonomi kreatif UMKM di Kota Padang akan menjadi salah satu keunggulan produk yang diperdagangkan. Perkembangan produk ekonomi kreatif yang dihasilkan sangat ditentukan oleh pemikiran baru, inovasi, ide dan pengetahuan dari berbagai sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. Dengan demikian, perkembangan ekonomi kreatif akan membutuhkan banyak sumber daya manusia yang terlibat, menyerap tenaga kerja, meningkatkan volume dan transaksi ekonomi. Kondisi ini akan menyebabkan ekonomi kreatif yang potensial berbasis lokal di Kota Padang antara lain, seperti kuliner, kerajinan, fashion, film animasi dan video akan berkembang dan berdampak terhadap sektor perdagangan dan PDRB Kota Padang.

Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan

Kondisi industri pariwisata di Kota Padang yang terus berkembang seperti wisata alam, pantai dan kuliner memberi peluang bagi pemerintah Kota Padang untuk mengemas pengelolaan pariwisata yang lebih nyaman dan berkesan. Konsep pengelolaan pariwisata yang unggul dan berdaya saing yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang adalah *MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition)*. Konsep ini sejalan dengan Kota Padang yang menjadi tujuan utama kegiatan-kegiatan pertemuan, seminar, workshop, pelatihan dan pameran baik serta event wisata skala internasional, nasional dan lokal. Kegiatan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya, seperti *Tour de Singkarak*, Pawai Telong-Telong, Festival Siti Nurbaya, Dragon Boat, Selaju Sampan, Padang Internasional Music Festival dan event-event nasional dan internasional lainnya. Kondisi ini berdampak terhadap kunjungan tamu hotel dan restoran di Kota Padang.

Pemerintah Kota juga memberi insentif dalam bentuk jamuan makan malam bersama kepala daerah kepada peserta kegiatan yang menginap di Kota Padang jika kegiatan MICE itu melibatkan 100 orang dari luar daerah dan menginap di Hotel di Kota Padang. Kondisi dan kebijakan ini secara tidak langsung telah berdampak terhadap pengembangan dan pelaku wisata di Kota Padang. Untuk menjadikan Padang sebagai Kota Transit bagi para jemaah Umroh yang

berasal dari luar Kota Padang, maka Pemerintah Kota memberikan insentif dalam bentuk souvenir berupa rendang kepada para jemaah umroh yang menginap di hotel-hotel yang ada di Kota Padang.

Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Kota Padang yang diharapkan menjadi industri dan basis pembangunan Kota Padang untuk lima tahun mendatang. Pemerintah Kota Padang mewujudkan visi pembangunan melalui pengelolaan pariwisata halal, nyaman dan berkesan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama, budaya Islami dan menghargai kearifan lokal.

Misi 6 : Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana

Kota Padang sesuai dengan kondisi geografisnya yang berada di kawasan rawan bencana. Kota Padang yang terletak di bagian pantai barat Pulau Sumatera berhubungan langsung dengan Samudera Hindia sehingga memiliki ombak cukup besar yang berpotensi terjadinya gelombang ekstrim dan abrasi. Wilayah Barat Indonesia, dimana Kota Padang terletak, secara tektonik merupakan wilayah yang sangat dinamis, karena adanya proses subduksi/ interaksi dua lempeng, yaitu Lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Dengan adanya proses tersebut, daerah Padang menjadi rawan terhadap peristiwa gempa bumi dan tsunami. Selain itu, bencana alam lain seperti banjir, longsor, abrasi pantai, angin kencang, kekeringan dan kebakaran juga sering terjadi di Kota Padang. Namun informasi yang sering menjadi viral di media sosial dan media massa adalah informasi tentang gempa bumi. Sehingga dengan kondisi demikian prioritas penanganan bencana alam lebih terfokus untuk bencana gempa bumi. Namun tetap melakukan penanganan yang baik untuk bencana alam lainnya seperti banjir dan kebakaran yang sering juga terjadi.

Berdasarkan kondisi Kota Padang yang rawan gempa tersebut, maka Pemerintah Kota Padang telah membuat kebijakan dan perencanaan penanganan bencana alam di Kota Padang. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah terlebih dahulu menciptakan masyarakat cerdas bencana yaitu masyarakat yang sadar, peduli dan tangguh menghadapi bencana.

Kesadaran masyarakat terhadap bencana dimulai dari sekolah dasar dengan adanya kegiatan-kegiatan sadar dan peduli bencana serta muatan lokal tentang bencana dalam kurikulum SD dan SMP, dengan demikian masyarakat sadar dan peduli bencana sudah dimulai sejak dini. Dengan demikian edukasi masyarakat untuk tangguh terhadap bencana menjadi lebih mudah dipahami dan disosialisasikan. Selain melalui pendidikan formal kegiatan sadar, peduli dan tangguh bencana juga dilakukan melalui kerjasama pemerintah daerah dengan stakeholder lain yang peduli dengan kebencanaan di Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang secara intens dan terprogram memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan menumbuhkan sikap peduli dan tangguh terhadap resiko bencana. Cakupan peduli dan tangguh ini meliputi pencegahan (preventif), pengurangan

(mitigasi), kesiapsiagaan (*preparedness*), tanggap darurat (*response*), pemulihan (*recovery*) dan rekonstruksi. Selain itu juga diperlukan regulasi, panduan, perencanaan yang matang untuk keadaan darurat bencana, sistem peringatan bencana dan kemampuan untuk memobilisasi sumberdaya ketika terjadi bencana.

Masyarakat yang sadar bencana artinya memahami bahwa Kota Padang tempat mereka berada, merupakan daerah dengan potensi bencana beragam, sehingga masyarakat perlu berusaha untuk mengenal ciri dan kondisi alam di sekitarnya. Masyarakat yang peduli bencana artinya adalah masyarakat memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap dampak bencana yang menimpa baik terhadap dirinya, masyarakat dan lingkungannya. Masyarakat yang tangguh bencana adalah masyarakat yang tanggap dan terlatih menghadapi segala bentuk potensi bencana serta tabah dan tahan dalam menghadapi bencana yang terjadi.

Misi 7: Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima

Tata kelola (*governance*) pemerintah yang baik meliputi prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang harus mengedepankan keterbukaan tentang program dan kegiatan yang dilakukan sehingga bisa diakses seluruh lapisan masyarakat. Kemudian masyarakat dan stakeholder juga dilibatkan dalam penyusunan dokumen dan pelaksanaan kegiatan sehingga program yang dilakukan oleh pemerintah kota merupakan program yang dibutuhkan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dan dikoordinasikan dengan seluruh stakeholder yang terlibat baik institusi pemerintah maupun non pemerintah.

Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima adalah misi pemerintah Kota Padang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi yang dipimpin oleh kepala daerah sehingga memberi dampak terhadap kepuasan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya untuk pelayanan publik yang prima, Pemerintah Kota Padang selalu berusaha meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandaskan prinsip *good and clean government*. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan prima adalah dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai budaya kerja dan integritas birokrasi, peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja dan peningkatan kualitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme aparatur. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima akan diperoleh melalui reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan bisa mewujudkan pelayanan publik yang semakin dinamis, efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan serta profesionalisme.

Efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Kedepan pemerintahan Kota Padang sebagai pemerintahan yang bersih, harus transparan dan didukung oleh inovasi dan teknologi informasi. Disamping itu, kedepan kita tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja yang berorientasi hasil atau *outcome*. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan sejak dimulainya proses perencanaan, pelaksanaan hingga hasil.

Untuk dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dibutuhkan organisasi yang tepat dan didukung oleh profesionalisme aparatur. Profesional aparatur diperoleh dari integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika integritas pribadi dan institusi. Tata kelola pemerintahan yang bersih bisa diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang reponsif.

Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan bentuk pelayanan prima. Pelayanan prima atau *excellent service* adalah suatu sikap atau cara aparatur dalam melayani masyarakat secara memuaskan yang memenuhi standar kualitas. Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan yaitu pelayanan dan kualitas. Pelayanan publik yang akan dilakukan pemerintah Kota Padang adalah melayani dengan kemampuan yang profesional dan teguh dengan sikap yang ikhlas, tulus, senang membantu, menyelesaikan kepentingan dan keluhan masyarakat, serta memuaskan kebutuhan masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik.

Tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan. Keselarasan hubungan antara Misi RPJPD Kota Padang 2005 - 2025 dengan Misi RPJMD Kota Padang 2019 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 5-1 berikut ini.

Tabel 5-1 Keselarasan Misi pada RPJPD Kota Padang Tahun 2005 -2025 dengan Misi RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

Misi RPJPD 2005 - 2025	Misi RPJMD 2019 - 2024
Meningkatkan pemahaman terhadap adat dan agama dan pengamalan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat. (Selaras dgn Misi 1 RPJMD)	Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing (Selaras dengan Misi 1 dan 2 RPJPD)
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. (Selaras dgn Misi 1 RPJMD)	Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal (Selaras dengan Misi 1 dan 2 RPJPD)
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi. (Selaras dengan Misi 3, 4 dan 5 RPJMD)	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Padang yang inklusif (Selaras dengan Misi 3 RPJPD)

Misi RPJPD 2005 - 2025	Misi RPJMD 2019 - 2024
Meningkatkan penataan ruang, prasarana dan sarana secara terpadu kearah keseimbangan pembangunan kawasan yang berkelanjutan. (Selaras dengan Misi 2 RPJMD)	Mewujudkan kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif (Selaras dengan Misi 3 RPJPD)
Membangun kehidupan kota metropolitan yang tertib dan teratur. (Selaras dengan Misi 2 RPJMD)	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman Dan Berkesan (Selaras dengan Misi 3 RPJPD)
Menata sistem pemerintahan yang baik dan bersih. (Selaras dengan Misi 7 RPJMD)	Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana (Selaras dengan Misi 7 RPJPD)
Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana. (Selaras dengan Misi 6 RPJMD)	Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima (Selaras dengan Misi 6 RPJPD)

5.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab Isu Strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peranan penting sebagai rujukan utama dalam pembangunan daerah, dimana rumusan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah menjadi landasan perumusan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pada Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 dilakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran dan indikator untuk percepatan perwujudan Visi dan Misi RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024. Penyesuaian lainnya juga disebabkan akibat dampak dari Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua aspek kinerja Kota Padang.

Tujuan Kota Padang sesuai dengan tujuh misi pembangunan kota adalah sebagai berikut:

Tabel 5-2 Misi dan Tujuan Pembangunan Kota Padang Tahun 2019-2024

No.	Misi	Tujuan
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing	1. Mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing
2	Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal	2. Terwujudnya Kota Padang yang layak huni
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang Inklusif	3. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
4	Mewujudkan Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan dan Ekonomi Kreatif	4. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat.
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan	5. Meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian
6	Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana	6. Meningkatnya kapasitas Kota Padang dalam penanggulangan bencana
7	Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima	7. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

5.2.1 Tujuan 1. Mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing

Tujuan yang ingin dicapai dalam Misi Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing adalah mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman dan berdaya saing. SDM yang beriman dan berdaya saing merupakan perwujudan SDM berkualitas. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Padang yang berkualitas tidak hanya dari pendidikan saja, tetapi juga termasuk didalamnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kesetaraan gender dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Keempat hal tersebut menjadi sasaran-sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan ini. Untuk mengukur pencapaian tujuan ini diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM).

Ada 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai dari tujuan satu diatas yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya kesetaraan gender.
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Tujuan beserta empat sasaran diatas diukur pencapaiannya dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 5-3 Tujuan dan Sasaran pada Misi 1

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	1. Rata-rata lama sekolah. 2. Harapan lama sekolah 3. Rata-rata nilai Kelulusan SD (dihapus) 4. Rata-rata nilai Kelulusan SMP (dihapus)
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka harapan hidup. 2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
		3. Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Meningkatnya Daya Saing Daerah (dihapus)	Indeks Inovasi Daerah (dihapus)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran Per Kapita

5.2.2 Tujuan 2. Terwujudnya Kota Padang yang Layak Huni

Tujuan yang ingin dicapai dalam Misi Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal adalah terwujudnya Kota Padang yang layak huni yang dapat diukur dengan menggunakan indikator indeks kota layak huni (*Liveable city index*).

Untuk tercapainya tujuan 2 ini ada 4 (empat) sasaran yang ditetapkan yaitu:

5. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan
6. Meningkatnya pemukiman layak huni
7. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat
8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sanitasi.

Tabel 5-4 Tujuan dan Sasaran pada Misi 2

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Kota Padang yang layak huni	Indeks Kota Layak huni (Liveable city Index)	5. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan
		Menurunnya Luas Kawasan Banjir dan Genangan (dihapus)	Persentase Luas kawasan bebas banjir (dihapus)
		6. Meningkatnya Pemukiman Layak Huni	Persentase perumahan dan permukiman yang layak (indikator baru)
		7. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan didalam masyarakat.	Angka Kriminalitas
		8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sanitasi.	1 Indeks kualitas lingkungan hidup (nilai)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			) Luas kawasan kumuh yang ditangani) Indeks Sanitasi (dihapus)

5.2.3 Tujuan 3. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan Misi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif adalah Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dapat diukur dengan menggunakan indikator Pertumbuhan ekonomi dan Gini Ratio.

9. Meningkatnya Kesempatan Kerja
10. Meningkatnya tingkat perekonomian penduduk
11. Meningkatnya investasi

Tabel 5-5 Tujuan dan Sasaran pada Misi 3

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Gini Ratio	9. Meningkatnya Kesempatan Kerja.	Tingkat Pengangguran Terbuka
		10. Meningkatnya tingkat perekonomian penduduk	) Tingkat kemiskinan) PDRB per-kapita (ADHB)
		11. Meningkatnya investasi	) Peningkatan nilai PMA) Peningkatan nilai PMDN (indikator baru)

5.2.4 Tujuan 4. Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat

Tujuan yang ingin dicapai dalam Misi mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif adalah menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat yang dapat diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB.

12. Menjadikan sektor perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian
13. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat ekonomi kreatif

Tabel 5-6 Tujuan dan Sasaran pada Misi 4

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan di Sumatera Barat.	Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	12. Menjadikan sektor perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
		13. Menjadikan kota Padang sebagai pusat ekonomi kreatif	Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (ekraf)

5.2.5 Tujuan 5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Misi Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan adalah Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian yang dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

14. Mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan Pariwisata yang unggul dan berdaya saing
15. Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi

Tabel 5-7 Tujuan dan Sasaran pada Misi 5

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	14. Mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan Pariwisata yang unggul dan berdaya saing	Kontribusi sektor pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata Propinsi Sumatera Barat
		15. Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi	) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara) Jumlah kunjungan wisatawan domestik) Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (indikator baru)) Rata-rata lama tinggal wisatawan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			domestik (indikator baru)

5.2.6 Tujuan 6. Meningkatnya kapasitas Kota Padang dalam penanggulangan bencana

Tujuan yang ingin dicapai dalam Misi Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana adalah Meningkatnya kapasitas Kota Padang dalam penanggulangan bencana yang dapat diukur dengan menggunakan indikator Indeks Ketahanan Daerah

16. Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana

17. Berkurangnya dampak kebakaran dan penyelamatan kedaruratan lainnya

Tabel 5-8 Tujuan dan Sasaran pada Misi 6

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya kapasitas Kota Padang dalam penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana (dihapus)	Meningkatnya Kelurahan tangguh dan tanggap bencana (dihapus)	Peningkatan Kelurahan tangguh dan tanggap bencana (dihapus)
	Indeks Ketahanan Daerah	16. Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana	) Persentase peningkatan kelurahan tangguh bencana) Persentase bencana yang ditangani (dihapus)
		17. Berkurangnya dampak kebakaran dan penyelamatan kedaruratan lainnya	Persentase bencana yang ditangani
		Menurunnya tingkat resiko bencana (dihapus)	Indeks Ketahanan Daerah (dihapus)
		Menurunnya jumlah kerugian akibat kebakaran (material) (dihapus)	Respon Time (dihapus)

5.2.7 Tujuan 7. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Misi Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima adalah terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang dapat diukur dengan menggunakan indikator indeks reformasi birokrasi (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi).

18. Meningkatnya kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
19. Meningkatnya kinerja birokrasi
20. Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas

Tabel 5-9 Tujuan dan Sasaran pada Misi 7

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel (dihapus)	
		18. Meningkatnya kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan
		19. Meningkatnya kinerja birokrasi	) Nilai SAKIP) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota
		20. Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas	) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik) Indeks Kemudahan Berusaha (dihapus)) Indeks kemudahan Perizinan Daerah (indikator baru)) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

5.3 Konsistensi

Keselaran Misi, Tujuan dan indikator tujuan, Sasaran dan indikator sasaran Pembangunan Kota pada Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 beserta perubahan target yang ditetapkan pada masing-masing indikator tujuan dan sasaran dapat dilihat konsistensinya pada tabel berikut:

Tabel 5-10 Konsistensi Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang pada Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi akhir	
					2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing																		
	Tujuan 1: Mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing		<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	Indeks	82,25	82,68	82,40	82,82	82,50	82,15	82,60	83,43	82,70	84,11	82,75	84,65	82,75	84,65
		Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar																
			1. Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,33	11,34	11,45	11,58	11,5	11,45	11,55	11,72	11,75	11,77	12,00	12,01	12,00	12,01
			2. Harapan lama Sekolah	Tahun	16,50	16,51	16,70	16,52	16,8	16,6	16,9	16,93	16,95	17,14	17	17,35	17	17,35
			Rata-rata nilai Kelulusan SD**	Tahun	76,62	76,65	76,70	-	76,85									
			Rata-rata nilai Kelulusan SMP**	Tahun	55,25	56,00	56,10	-	56,25									
		Sasaran 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																
			3. Angka Harapan Hidup	Tahun	73,35	73,57	73,37	73,65	73,4	73,4	73,6	73,60	73,8	73,64	74,00	73,68	74,00	73,68
			4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	-	-	-	9,10	-	-	-	7,5	-	7	-	6,5	-	6,5

Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi akhir	
					2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Sasaran 3 Meningkatkan kesetaraan gender															
			5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,77	93,48	94,82	93,64	95,17	93,77	95,52	93,85	95,87	93,48	96,00	94,3	96,00	94,3
			Sasaran 4 Meningkatkan Daya Saing Daerah**															
			Indeks Inovasi Daerah**	Angka	2.530	6.550	10.000	3.779	15.000									
			Sasaran 4 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat															
			6. Pengeluaran perkapita*	Rp. (juta)	14,31	14,72	-	14,48	-	14,8	-	14,728	-	14,987	-	15,302	-	15,302
Misi 2. Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal																		
	Tujuan 2 : Terwujudnya Kota Padang yang Layak Huni		<i>Indeks Kota Layak huni</i>	Indeks	56,00	56,50	57,00	67,98	57,50	68,03	58,00	68,08	59,00	68,15	60,00	68,30	60,00	68,30
			Sasaran 5. Meningkatkan layanan transportasi perkotaan															

Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi akhir	
					2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan	Poin	81,53	82,00	83,00	79,00	84,00	84,00	84,50	83,50	85,00	84,00	85,50	84,70	85,50	84,70
			Sasaran : Menurunnya Luas Kawasan Banjir dan Genangan **															
			Persentase Luas kawasan bebas banjir **	Persen	46,77	53,49	57,22	-	61,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sasaran 6. Meningkatkan Permukiman Layak Huni															
			8. Persentase perumahan dan permukiman yang layak*	Persen	-	-	-	74,16	-	75,37	-	76,58	-	78,95	-	81,16	-	81,16
			Sasaran 7. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan didalam masyarakat.															
			9. Angka Kriminalitas	Angka	3710	3500	3300	3.300	3150	3.150	2900	2.175	2730	2.045	2500	1.875	2500	1.875
			Sasaran 8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sanitasi															
			10. Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	68,69	68,00	68,20	68,41	68,30	68,30	68,50	68,50	68,60	68,60	68,80	68,60	68,60	68,60
			11. Luas Kawasan kumuh yang ditangani	Ha	61,19	27,18	6,12	10,29	24,47	34,76	30,58	63,95	30,58	93,14	30,58	122,33	30,58	122,33
			Indeks Sanitasi**	angka	85	87	90	-	95									
Misi 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif																		
	Tujuan 3 Terwujudnya		<i>1. Pertumbuhan ekonomi</i>	%	6,09	5,65	6,15	-1,86	6,20	2,50	6,25	3,14	6,30	4,43	6,35	4,77	6,35	4,77

Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi akhir	
					2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan																	
			2. Gini Ratio	Poin	0,340	0,31	0,330	0,310	0,330	0,310	0,330	0,309	0,320	0,308	0,320	0,307	0,320	0,307
			Sasaran 9. Meningkatnya kesempatan kerja															
			12. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,18	8,76	9,10	13,64	8,83	11,01	8,39	13,30	7,98	13,09	7,80	12,86	7,80	12,86
			Sasaran 10. Meningkatnya tingkat perekonomian penduduk															
			13. Tingkat kemiskinan	%	4,74	4,68	4,65	4,40	4,60	4,60	4,58	4,33	4,56	4,22	4,54	4,10	4,54	4,10
			14. PDRB per-kapita (ADHB)	ribu	62.050	65.000	67.500	64.660	70.500	65.000	73.000	73.620	75.500	77.230	78.000	82.040	78.000	82.040
			Sasaran 11. Meningkatnya investasi															
			15. Peningkatan nilai PMA, PMDN*															
			- Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA)*	US \$	341.312,84	18.601,8	48.609.00	48.609.00	950.000	17.123.287,67	17.123.287,67	17.123.288	17.123.287,67	17.123.288	17.123.287,67	17.123.288	17.123.287,67	17.123.288
			- Peningkatan Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*	Juta Rupiah	767.647,6	1.417.802,60	435.150	435.150	950.000	950.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Misi 4. Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat Perdagangan dan ekonomi kreatif																		
	Tujuan 4: Kota Padang sebagai		Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	%	6,20	6,23	6,50	6,20	6,65	6,23	6,80	6,25	6,95	6,28	7,10	6,29	7,10	6,29

Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi akhir	
					2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	pusat perdagangan di Sumatera Barat																	
			Sasaran 12. Menjadikan sektor perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian															
			16. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	16,92	16,97	17,06	16,41	17,09	16,90	17,13	17,25	17,16	17,75	17,19	17,85	17,19	17,85
			Sasaran 13. Menjadikan kota Padang sebagai pusat ekonomi kreatif															
			17. Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (e-kraf)	%	7,5	8	8,5	8,5	9	9	9,5	9,5	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan																		
	Tujuan 5 : Meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	18,59	19,30	20,40	15,00	21,30	18,75	22,21	19,10	23,11	20,25	24,01	20,50	24,01	20,50

Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi akhir	
					2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Sasaran 14. Mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan Pariwisata yang unggul dan berdaya saing															
			18. Kontribusi sektor pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata Propinsi Sumatera Barat	%	27,46	27,73	28,00	20,00	28,27	23,50	28,54	28,50	28,82	30,00	28,90	31,50	28,90	31,50
			Sasaran 15. Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi															
			19. Jumlah kunjungan wisata mancanegara	Orang	71.054	73.284	76.956	21.650	80.628	22.743	84.300	23.880	87.972	25.790	91.645	28.369	91.645	28.369
			20. Jumlah kunjungan wisata domestik	orang	5.076.581	5.184.590	5.590.810	2.562.966	5.997.030	2.691.102	6.403.249	2.879.479	6.809.469	3.138.632	7.215.689	3.164.222	7.215.689	3.164.222
			21. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara*	Hari	4,3	3,15	-	1,73	-	1,6	-	1,7	-	1,8	-	1,9	-	1,9
			22. Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik*	Hari	1,91	1,13	-	1,50	-	1,75	-	2	-	2,15	-	2,5	-	2,5
Misi 6 Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana																		
	Tujuan 6: Meningkatnya kapasitas Kota Padang dalam		Indeks Resiko Bencana**	Angka	0,65	0,65	0,63	0,63	0,61	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-

Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi akhir	
					2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	penanggulanga n bencana																	
			Indeks Ketahanan Daerah *	Level	3,00	3,00	-	3,05	-	3,05	-	3,05	-	3,05	-	3,05	-	3,05
			Sasaran : Meningkatnya Kelurahan tangguh dan tanggap bencana **															
			Peningkatan Kelurahan tangguh dan tanggap bencana **	Persen	0	0	3	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sasaran 16. Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana															
			23. Persentase peningkatan kelurahan tangguh bencana	%	0	0	3	2	5	1	5	5	5	5	5	5	5	18
			Persentase bencana yang ditangani **	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sasaran 17. Berkurangnya dampak kebakaran dan penyelamatan kedaruratan lainnya															
			24. Persentase bencana yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Sasaran : Menurunnya tingkat resiko bencana **															
			Indeks Ketahanan Daerah **	%	3,04	3,04	3,05	3,05	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sasaran : Menurunnya jumlah kerugian akibat kebakaran (material) **															
			Respon Time**	menit	15	15	15	-	15									

Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi akhir	
					2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi 7 Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima																		
	Tujuan 7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	68,08	69,58	82,00	69,87	83,00	71,00	84,00	72,00	85,00	73,00	86,00	74,00	74,00	74,00
		Sasaran : Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel **																
		Sasaran 18. Meningkatnya kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel																
			25. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Sasaran 19. Meningkatnya kinerja birokrasi																
			26. Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	A	A	A
			27. Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kota	Nilai	3,13	3,15	3,18	3,18	3,20	3,15	3,23	3,16	3,26	3,17	3,30	3,20	3,30	3,20
		Sasaran 20. Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas																
			28. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (IKM)	Angka	80,23	80,50	80,75	79,83	81,00	80,00	81,25	80,10	81,50	80,20	81,75	80,30	81,75	80,30
			29. Indeks Kemudahan Perizinan Daerah*	Angka	-	-	-	-	-	-	-	75,00	-	78,00	-	80,00	-	80,00

Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi akhir	
					2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			30. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,67	2,73	2,78	2,78	2,83	2,83	2,87	2,87	2,93	2,93	2,97	2,97	2,97	2,97
			Indeks Kemudahan Berusaha**	Angka	77,73	N/A	92,26	-	95,13									

Keterangan: * Indikator Baru
 ** Sasaran/Indikator Sasaran dihapus
 Target dihapus

Beberapa Indikator Sasaran pada Pencapaian Tujuan 1 dihilangkan antara lain karena tidak tersedia data kedepannya. Indikator yang dihilangkan ini adalah “Rata-rata nilai Kelulusan SD” dan “Rata-rata nilai Kelulusan SMP” pada sasaran 1 **Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar**. Pada tujuan ini Sasaran 4 Meningkatnya Daya Saing Daerah dengan Indikatornya Indeks Inovasi Daerah diganti dengan **“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”** dengan indikator “Pengeluaran Perkapita. Sasaran 4 ini diganti karena sasaran sebelumnya diturunkan ke sasaran Perangkat Daerah di Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Sasaran 6 pada Tujuan 2 yakni Meningkatnya Permukiman Layak Huni adalah penyempurnaan dari Sasaran sebelumnya yakni **Menurunnya luas kawasan banjir dan genangan** dengan indikator Persentase luas kawasan bebas banjir. Dimana sasaran dan indikator tersebut cukup digunakan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah terkait. Sasaran yang digunakan adalah Meningkatnya Permukiman yang layak dengan Indikator Persentase perumahan dan permukiman yang layak. Pada Sasaran 8 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sanitasi dihilangkan satu indikatornya yakni Indeks Sanitasi.

Di tujuan 6 Meningkatnya kapasitas Kota Padang dalam Penanggulangan Bencana merupakan penyempurnaan Pernyataan tujuan sebelumnya yaitu Terwujudnya Kota Padang yang tanggap dan tangguh bencana. Pada tujuan ini Sasaran “Meningkatnya ketangguhan kawasan dalam penanggulangan bencana diganti dengan sasaran Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana dengan indikator yang sama yakni Persentase Kelurahan Tangguh Bencana. Indikator Persentase bencana yang ditangani pada sasaran Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana dihilangkan, begiu juga sarasan Menurunnya Tingkat Resiko Bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah dan sasaran Menurunnya Jumlah Kerugian Akibat Kebakaran (material) dengan indikator Respon Time dihilangkan karena kurang terukur.

Pada Tujuan 7 sasaran Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel diganti dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator Opini BPK Atas Laporan Keuangan. Dan ada satu indikator yang dihilangkan yakni Indeks Kemudahan Berusaha pada Saaran Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas karena indikator ini tidak dapat diukur sepenuhnya oleh Kota Padang mengingat luasnya cakupan data yang menyusun indikator ini diganti dengan Indeks Kemudahan Perizinan Daerah.

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019-2024



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD KOTA
PADANG TAHUN 2019-2024

Daftar Isi

6	BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	6-1
6.2	Arah Kebijakan	6-24
6.2.1	Arah kebijakan selaras tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Tahun 2019-2024.....	6-24
6.2.2	Arah Kebijakan Kewilayahan.....	6-37
6.2.3	Cluster Wilayah.....	6-37
6.2.4	Penyelarasan RPJMN 2019-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dengan RPJMD Kota Padang 2019-2024.....	6-49
6.3	Program Pembangunan Daerah	6-53
6.3.1	Program Pembangunan Daerah pencapaian tujuan pembangunan Kota Padang 2019-2024.	6-53
6.3.2	Program Unggulan Kota.....	6-61
6.3.3	Program pembangunan inklusif Melalui konsep padang inspiratif	6-68

Daftar Tabel

Tabel 6-1	Tema Pembangunan Kota Padang	6-24
Tabel 6-2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padang Tahun 2019-2024	6-26
Tabel 6-3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Padang	6-50
Tabel 6-4	Program Pembangunan Daerah Selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat	6-55
Tabel 6-5	Indikator dan Target Program Unggulan 1	6-62
Tabel 6-6	Indikator dan Target Program Unggulan 2	6-63
Tabel 6-7	Indikator dan Target Program Unggulan 3	6-64
Tabel 6-8	Indikator dan Target Program Unggulan 4	6-65
Tabel 6-9	Indikator dan Target Program Unggulan 5	6-65
Tabel 6-10	Rencana Koridor Trans-Padang.....	6-65
Tabel 6-12	Indikator dan Target Program Unggulan 6	6-66
Tabel 6-13	Indikator dan Target Program Unggulan 7	6-66
Tabel 6-14	Indikator dan Target Program Unggulan 8	6-67
Tabel 6-15	Indikator dan Target Program Unggulan 9	6-67
Tabel 6-16	Indikator dan Target Program Unggulan 10	6-68
Tabel 6-17	Indikator dan Target Program Unggulan 11.....	6-68

Daftar Gambar

Gambar 6-1	Penerapan Model Manajemen Strategis yang Komprehensif dalam merumuskan Perubahan RPJMD Kota Padang	6-2
Gambar 6-2	Padang Beltline beserta Cluster Pengembangan Wilayah.....	6-39
Gambar 6-3	Cluster Wilayah 1	6-41
Gambar 6-4	Cluster Wilayah 2	6-45
Gambar 6-5	Cluster Wilayah 3	6-48

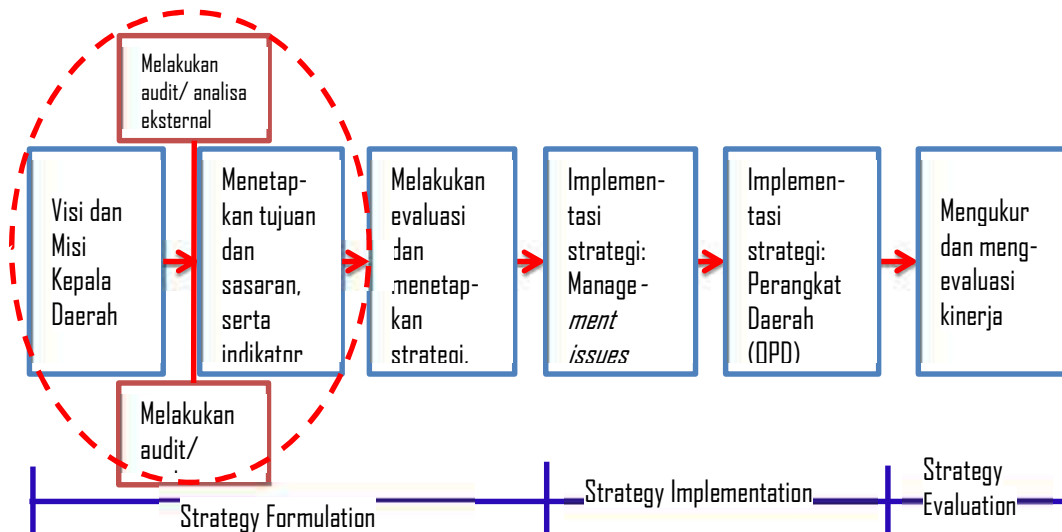
BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Padang dan akan diwujudkan dalam lima tahun kedepan, perlu disusun strategi yang akan menjamin bahwa misi dapat dilaksanakan dan dapat pula mencapai tujuan dan sasarnya dengan baik. Selanjutnya strategi juga membutuhkan ketetapan arah kebijakan agar tujuan dan sasaran menjadi tepat dan tidak salah arah. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan didalam RPJMD Kota Padang 2019-2024 ini harus dipedomani dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan untuk lima tahun ke depan.

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola setiap program kegiatan melalui proses, cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi yang ditetapkan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan Kota Padang yang ditetapkan. Strategi yang disusun menunjukkan dan sekaligus mensyaratkan adanya komitmen dan konsistensi Kepala Daerah dan Pemerintah Kota Padang yang memposisikan masyarakat subyek utama dari visi dan misi pembangunan, serta memantapkannya sebagai prinsip dalam pelayanan masyarakat.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan wujud pelaksanaan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang direncanakan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan Perubahan RPJMD Kota Padang yang dibuat ini mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis (analisa internal dan eksternal) yang ada di Kota Padang, dan berpedoman kepada prioritas nasional yang sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Padang. Dari proses tersebut diharapkan sasaran pembangunan dapat tercapai melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih dan selaras.



Gambar 6-1 Penerapan Model Manajemen Strategis yang Komprehensif dalam merumuskan Perubahan RPJMD Kota Padang

Dari **Gambar 6-1**, terlihat bahwa perumusan strategi dibuat berdasarkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindakan. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, maka strategi setiap sasaran RPJMD sebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing.

Kekuatan Kota Padang dalam konteks misi ini adalah memiliki 52 (lima puluh dua) perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dengan demikian Kota Padang memiliki kekuatan tersedianya sumber daya manusia untuk dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi kewenangannya.

Kota Padang juga sudah memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan, terbukti dengan tingginya angka indeks pembangunan gender (IPG) Kota Padang. Namun Kota Padang belum optimal dalam menata sistem pendidikan karakter, termasuk pengembangan kurikulum yang diharapkan akan menghasilkan manusia beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing seperti yang diharapkan.

Tantangan kedepan Kota Padang adalah persaingan di pasar kerja internasional, sementara ancamannya adalah melemahnya nilai sosial, adat dan budaya serta kearifan lokal karena ketidakmampuan menyaring teknologi dan informasi yang datang dari luar.

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing

1. Strategi 1 : Meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan pendidikan karakter sejak dini

Pendidikan karakter akan berjalan efektif dan utuh jika melibatkan tiga institusi yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan karakter tidak akan berjalan dengan baik jika mengabaikan salah satu institusi terutama keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Perkembangan seorang anak dalam keluarga ditentukan oleh situasi dan kondisi keluarganya dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh orangtuanya. Pendidikan informal dalam keluarga mempunyai peran penting dalam proses pembentukan karakter anak sejak dini karena keluarga merupakan lingkungan tumbuh dan berkembangnya anak sejak usia dini hingga menjadi dewasa. Mengingat peran keluarga yang sangat besar dalam pembentukan karakter anak maka perlu pembinaan bagi keluarga dalam mewujudkan pendidikan karakter anak di usia dini.

2. Strategi 2 : Meningkatkan kolaborasi antara dunia pendidikan dan keluarga untuk pembentukan karakter anak sejak dini

Untuk mewujudkan karakter anak yang berkualitas sejak dini memerlukan kolaborasi antara dunia pendidikan dengan keluarga melalui suatu sistem yang melibatkan secara aktif orang tua, guru dan anak dalam melaksanakan proses pendidikan. Orang tua perlu ikut andil dalam membantu sekolah untuk mengembangkan semua aspek yang dimiliki anak terutama anak sejak usia dini dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Pola-pola kolaborasi perlu dikembangkan seperti pembentukan perkumpulan orang tua siswa dan pola lainnya.

3. Strategi 3 : Pemerataan kualitas Pendidikan di seluruh kecamatan

Pemerataan kualitas pendidikan diseluruh kecamatan merupakan suatu keharusan. Pemerataan kualitas tersebut tidak hanya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana tetapi juga meliputi pemerataan kuantitas dan kualitas dari tenaga pendidik pada semua sekolah yang berada di seluruh kecamatan. Pemerataan tenaga pendidik sangat diperlukan karena tenaga pendidik memegang tongkat yang sangat besar dalam upaya mencapai keberhasilan dari tujuan pendidikan. Pelatihan terhadap tenaga pendidik dalam meningkatkan profesionalitas yang sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya perlu dilakukan.

4. Strategi 4 : Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan harus dilaksanakan dengan baik, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pada masing-masing sekolah agar dimanfaatkan secara optimal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sarana prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan secara terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Strategi 5 : Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan harus ditingkatkan secara berencana dan berkala dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Pemetaan dan pemerataan pendidik juga perlu diterapkan sehingga terdapat kesimbangan jumlah dan kualitas pendidik pada tiap-tiap sekolah. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

6. Strategi 6 : Meningkatkan budaya baca

Budaya baca seseorang adalah suatu sikap atau tindakan atau perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Menumbuhkan minat baca merupakan langkah awal dari upaya menciptakan budaya baca masyarakat. Membaca diajarkan mulai dari jenjang pendidikan terendah seperti pendidikan anak usia dini dan

taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan budaya baca adalah melalui peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan di Kota Padang.

7. Strategi 7 : Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh faktor yang mencakup akses dan kualitas layanan kesehatan yang terus membaik. Akses layanan kesehatan ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah jaringan dan kualitas fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan pos kesehatan kelurahan.

8. Strategi 8: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

Dalam upaya penurunan prevalensi stunting, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat sektor Pertanian memiliki peran penting dan berkontribusi dalam penyediaan pangan yang cukup dan beragam, penyediaan infrastruktur pendukung produksi pangan, mendekatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemberdayaan kelompok wanita untuk penyediaan pangan sehingga gizi keluarga dapat terpenuhi.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah, harus dimulai dari ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan untuk mewujudkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga, Badan Ketahanan Pangan, melalui kementerian pertanian dan dinas pangan di daerah telah melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

9. Strategi 9 : Meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap gender

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan tidak diskriminatif atau responsive gender.

responsif gender dapat disematkan kepada kebijakan yang telah mengintegrasikan perspektif gender di dalamnya, baik pada proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. sebuah kebijakan dapat disebut responsif gender apabila mengakomodasi faktor-faktor kesenjangan gender, yaitu akses, kontrol, manfaat, dan partisipasi.

Untuk menghadapi persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan dan melihat berbagai penyebab sebagaimana diuraikan pada Bab 2 dan 4 sebelumnya, kedepan tentu perlu lebih ditingkatkan

perhatian dan kebijakan yang dapat mengantisipasi dan mengatasi kejadian-kejadian serupa terus terjadi ditengah-tengah masyarakat kita. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan kepada masyarakat yang masih berada digaris kemiskinan harus terus ditingkatkan. Pendidikan dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat dan anak-anak usia sekolah, baik pengetahuan umum dan sosial, adat budaya dan etika, dan yang sangat penting peningkatan pengetahuan dan pengamalan ajaran agama harus semakin ditanamkan kepada masyarakat. Selain itu yang juga sangat penting, harus ditingkatkan peranan berbagai elemen dan struktur dimasyarakat untuk senantiasa memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada keluarga serta semakin mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kehidupan masyarakat dan keluarga diwilayah masing-masing.

10.Strategi 10 : Meningkatkan Standar Hidup Layak Masyarakat

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat diperlukan strategi untuk meningkatkan standar hidup layak masyarakat, Indikator standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita ataupun daya beli masyarakat (Purchasing Power Parity/ PPP).

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan standar hidup layak masyarakat Kota Padang dengan menjaga stabilitas pengeluaran masyarakat dengan menjamin ketersediaan bahan pokok (pangan) dan stabilitas harga (inflasi) harga barang pokok (pangan) di Kota Padang Serta meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Padang melalui peningkatan usaha (produksi) masyarakat.

Misi 2 : Mewujudkan Kota Padang yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal

Kekuatan Kota Padang dalam konteks misi 2 ini adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kebersihan serta keindahan kota. Disisi lain, masih ada masyarakat yang memiliki kesadaran yang rendah untuk memelihara sarana dan prasarana publik. Saat ini Kota Padang sudah memiliki sarana transportasi publik berupa bus dan kereta api, serta prasarana perkotaan lainnya yang makin membaik. Namun demikian masih terjadi kemacetan, kecelakaan, dan polusi udara serta polusi suara. Masyarakat kota belum sepenuhnya menggunakan sarana prasarana transportasi publik dan masih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Curah hujan yang tinggi di Kota Padang serta kondisi wilayah kota Padang yang sejajar dengan muka air laut menyebabkan sering terjadi genangan air dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini menjadi gangguan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Tentunya hal ini akan berdampak buruk terhadap ketentraman kota.

Pertumbuhan penduduk kota yang terus bertambah dari tahun ke tahun menyebabkan terus bertambahnya kepadatan penduduk, kebutuhan perumahan, sanitasi, dan sarana prasarana kota yang mampu melayani kebutuhan masyarakat.

11.Strategi 11 : Memperluas cakupan layanan angkutan umum massal

Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi memiliki arti penting bagi Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai pusat kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah perlu membangun konektivitas antar wilayah berbatasan. Layanan angkutan umum massal menjadi penting dalam upaya menjembatani daerah berbatasan masuk ke Kota Padang. Perluasan cakupan layanan transportasi harus didukung dengan sarana dan prasarana untuk meningkatkan aksesibilitas.

Peningkatan aksesibilitas didalam kota Padang menuju pusat-pusat pertumbuhan, pusat ekonomi seperti pertanian, industri manufaktur, pertambangan, kehutanan, dan jasa lainnya yang telah berkembang perlu dipersiapkan fasilitas transportasi yang efisien dan maju. Kota Padang telah memiliki Transportasi massal yaitu Bus Trans Padang yang saat ini baru melayani Dua Koridor yaitu Koridor I Pasar Raya Batas Kota dan Koridor 4 Terminal Anak Air Teluk Bayur. Perluasan cakupan amat diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas ke seluruh penjuru kota Padang dengan membuka koridor baru.

Selain membuka koridor baru perluasan cakupan layanan dapat dilakukan juga dengan menyediakan kendaraan pengumpan atau feeder menuju halte trans Padang yang tentunya perlu dukungan dan kebijakan dari Masyarakat dan Pemerintah Daerah

12.Strategi 12 : Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum massal

Kebijakan nasional terkait pelayanan angkutan massal antara lain meningkatkan pelayanan angkutan umum massal di Indonesia baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Tujuannya agar angkutan massal semakin nyaman sehingga semakin banyak masyarakat yang beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal.

Kota Padang yang beraglomerasi seperti kota besar lainnya di Indonesia perlu mengakomodasi sejumlah program dan strategi pembangunan transportasi secara terpadu antara lain strategi dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi; transportasi ramah lingkungan; jaringan prasarana; sistem transportasi berbasis jalan; sistem transportasi berbasis rel; manajemen rekayasa dan pengawasan lalu lintas; sistem transportasi terintegrasi; sistem pembiayaan; dan keterpaduan transportasi dan tata ruang.

13.Strategi 13 : Penyediaan, penataan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman secara berkelanjutan

Pengembangan permukiman perkotaan pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kondisi perkotaan yang layak huni (livable), aman, nyaman, damai

dan sejahtera serta berkelanjutan. Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan. Perkembangan permukiman hendaknya juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial budaya yang berkembang di Kota Padang agar pengembangannya dapat sesuai dengan kondisi masyarakat dan alam lingkungannya. Khusus untuk mewujudkan permukiman yang layak, dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu pencegahan (antisipatif/preventif) dan peningkatan kualitas (kuratif). Pencegahan, dilakukan sebagai upaya mencegah tumbuhnya permukiman kumuh serta mencegah tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak terstruktur. Sedangkan peningkatan kualitas kawasan permukiman, adalah dengan melakukan pemugaran dan paling tinggi adalah permukiman kembali

14.Strategi 14: Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Jalan dan drainase Perkotaan

Jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah serta mendorong terwujudnya permukiman yang layak. Jaringan jalan di Kota Padang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sepanjang 624,691 Km. Kondisi permukaan jalan di Kota Padang masih ada yang dalam kondisi rusak dan sedang yaitu sekitar $\pm 35,12\%$ dari total panjang jalan yang ada di Kota Padang. Untuk mendukung permukiman yang layak maka perlu ditetapkan strategi peningkatan kualitas jaringan jalan, pembukaan jaringan jalan serta pembangunan jaringan jalan terutama di lingkungan permukiman.

Sistem drainase di Kota Padang dibagi atas 19 (sembilan belas) areal yang pada umumnya merupakan drainase pasangan batu dan drainase alam yang pembuangan akhirnya terkumpul pada sungai. Drainase di Kota Padang tidak hanya diperuntukkan sebagai penyaluran air hujan namun juga sebagai pengendali banjir di wilayah perkotaan dan permukiman serta berfungsi juga sebagai saluran pembuangan air limbah.

Kondisi drainase pada pusat-pusat permukiman dan kawasan pasar, banyak yang tidak berfungsi dengan baik akibat tumbukan sedimen, sampah dan jaringan utilitas kota seperti pipa PDAM, drainase yang ada belum terintegrasi dan banyak terputus, serta kapasitas/dimensi jaringan drainase kota yang tidak memadai karena terjadinya penyempitan drainase. Kondisi ini menyebabkan lambatnya laju air sehingga terjadi banjir dan genangan. Banjir dan genangan yang terjadi di Kota Padang, cenderung merupakan pola yang berulang pada kawasan yang sama dan jenis ancaman yang relatif permanen dikala musim penghujan tiba.

Untuk mengurangi kawasan rawan banjir/genangan di Kota Padang maka ditetapkanlah salah satu strategi mengurangi kawasan

rawan banjir/genangan yaitu mengelola dan mengembangkan sistim drainase dengan baik

15.Strategi 15: Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang

Kota Padang telah memiliki Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 yang merupakan pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Padang. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang terkait pengurangan luas kawasan banjir dan genangan tertuang di dalam rencana struktur ruang dan pola ruang Kota Padang. Oleh karena itu untuk mengurangi kawasan rawan banjir/genangan di Kota Padang maka perlu meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang dengan melakukan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

16.Strategi 16: Meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya, apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman, akan mengganggu tatanan pada kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya akan menyebabkan pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula. Ketertiban dan keamanan masyarakat dapat diciptakan dengan meningkatkan penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum serta meningkatkan peran serta masyarakat/swasta.

17.Strategi 17 : Meningkatkan cakupan sanitasi layak bagi masyarakat

Sanitasi yang layak berdasarkan kepemilikan sarana adalah rumah tangga yang sudah megggunakan fasilitas tempat buang air besar yang dimiliki sendiri, berjenis leher angsa yang ditampung di dalam tangki septik. Saat ini akses sanitasi layak berdasarkan kepemilikan sarana baru mencapai 73,2%, Pemerintah Kota padang menargetkan pada tahun 2024 sudah mencapai 100% dibidang sanitasi. Untuk mencapai target tersebut maka diperlukan upaya peningkatan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk memperoleh akses sanitasi layak dan aman.

18.Strategi 18 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Pencemaran dan pengrusakan lingkungan (air, udara dan kerusakan tanah). Pencemaran lingkungan melalui media air, udara dan

tanah menjadikan kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Pencemaran ini bersumber dari kegiatan usaha/ industri, rumah tangga maupun transportasi, harus dapat ditanggulangi dengan pencegahan, pengendalian, pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan. Dampak pencemaran yang bersifat akut dan kronis perlu segera diantisipasi agar sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat, sebagai kota besar, pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa sehingga memberikan daya tarik yang besar pada masyarakat untuk datang ke Padang sekedar mengadu nasib atau menikmati keindahan kotanya, yang pada akhirnya banyak masalah sosial yang terjadi. Permasalahan sosial masyarakat yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah penyakit masyarakat yang masih banyak membuang sampah di sungai, mencuci, aktivitas mandi dan buang hajat pun dilakukan di sungai. Untuk mengatasinya, antara lain dengan perubahan paradigma terhadap pengelolaan lingkungan hidup, sosialisasi tentang hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta diikuti perubahan budaya tingkah laku menuju masyarakat yang bertanggungjawab terhadap lingkungannya.

Misi 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang Inklusif

Kota Padang memiliki kekuatan sosial budaya yang kental untuk mendukung misi ini, yakni hukum kekerabatan matrilineal sebagai bagian dari masyarakat adat Minangkabau. Adat Minangkabau memiliki nilai-nilai sosial egaliter yang cocok dengan pemahaman inklusif, yaitu yang kuat menolong yang lemah, saling mengikutsertakan, membuat keputusan berdasarkan konsensus, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam keputusan yang dibuat. Jiwa wirausaha yang diwariskan secara turun temurun dalam keluarga Minangkabau (atau lebih dikenal dengan orang Padang) adalah berdagang dan berwirausaha. Namun kelemahannya adalah regulasi investasi yang adakalanya membuat wirausaha muda yang baru tumbuh dan usaha berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) sulit mengakses sumber-sumber pembiayaan dan teknologi produksi yang tinggi. Potensi yang dapat diraih Kota Padang dalam misi ini adalah tersedianya pasar yang luas yang didukung oleh akses transportasi laut, darat, dan udara yang tinggi untuk ekspor dan impor produk barang dan jasa dari dan ke luar Kota Padang. Namun demikian ancamannya adalah lemahnya daya saing (competitive advantage) pengusaha dan produk yang dihasilkan.

19.Strategi 19: Mengembangkan ekonomi inklusif dengan penguatan sektor unggulan

Masyarakat Kota Padang banyak berusaha sektor-sektor informal seperti jadi pedagang dan pelaku UKM/IKM, maka diperlukan penguatan usaha bagi pedagang kecil, usaha mikro, industri kecil, seperti membangun setra produksi (industri), penguatan permodalan, pelatihan

dan pendampingan serta mengembangkan potensi unggulan masing masing daerah melalui program Kampung Tematik.

20.Strategi 20: Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif

Sukses tidaknya suatu daerah dalam menarik arus dana investasi dipengaruhi baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi, di antaranya: pemberian fasilitas yang mendorong adanya investasi seperti insentif retribusi, faktor keamanan daerah penting untuk menjamin ketentraman hidup dan keamanan usaha serta kekayaan investor. Kemudian peraturan perundang-undangan seperti aturan perizinan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang baru tanggal 2 November 2020, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pelayanan perizinan berusaha di daerah semakin ditingkatkan mutu dan kualitasnya melalui penggunaan aplikasi OSS yang berbasis resiko. Setiap permohonan izin usaha yang memenuhi persyaratan teknis menurut peraturan yang berlaku, wajib diterbitkan izinnya sampai batas waktu yang ditentukan, kecuali jika penerbitan izin tersebut harus memenuhi persyaratan kearifan lokal. Peraturan yang mengatur perizinan berusaha berbasis resiko di daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Faktor lain juga menentukan dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif adalah infrastruktur yang menunjang dan memadai. Fasilitas transportasi memungkinkan orang, barang, dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui:

- i. Pemberian kemudahan perizinan investasi
- ii. Memperbaiki sistem dan layanan perizinan mudah, murah, cepat, tepat, dan transparan;
- iii. Mengembangkan *digital investment promotion*;
- iv. Mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota;
- v. Mendorong perwujudan investasi hijau.

21.Strategi 21: Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru

Kota Padang terus berkembang menjadi kota urban dan menjadi pusat pendidikan tinggi yang menghasilkan ribuan calon tenaga kerja pada tiap tahunnya, mengakibatkan Kota Padang kelebihan *supply* tenaga kerja, maka diperlukan penciptaan lapangan kerja baru dengan mengembangkan kawasan industri, perluasan lapangan kerja padat karya, serta melakukan program pelatihan bagi calon tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

22.Strategi 22: Mendorong daya saing koperasi dan Usaha Mikro untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Pelaku usaha mikro di Kota Padang mayoritas merupakan pelaku usaha informal yang belum memiliki izin usaha yang mengakibatkan

kesulitan dalam mencari tambahan modal usaha, untuk itu akan dibentuk lembaga koperasi untuk para pelaku usaha mikro agar mudah mendapatkan pinjaman modal usaha. Pelaku usaha mikro juga perlu didorong untuk memiliki daya saing produk agar dapat bersaing dengan produk sejenis yang berada dari luar Kota Padang.

Berdasarkan data jumlah koperasi aktif di Kota Padang jumlahnya semakin menurun yang disebabkan banyaknya tunggakan kredit dari anggota koperasi yang akhirnya berimbas pada jumlah modal koperasi yang dikelola, untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan koperasi di Kota Padang.

23.Strategi 23: Pembinaan pengembangan usaha sektor formal dan informal

Penduduk Kota Padang mayoritas banyak yang berusaha sendiri baik itu usaha informal maupun usaha yang telah formal, dan tren transaksi perdagangan menuju digital, untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan usaha dari usaha konvensional menuju perdagangan digital, diharapkan pelaku usaha Kota Padang mampu memperluas akses pemasaran sampai perdagangan internasional.

24.Strategi 24 : Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan.

Ketahanan pangan dikonsepsikan terpenuhinya kebutuhan pangan pada saat ini dan yang akan datang. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan pangan, kesejahteraan petani dan perbaikan lingkungan jasa ekosistem. Sedangkan yang dimaksud dengan pangan tidak hanya ketersediaan beras, tetapi juga daging, ikan dan sayuran. Tidak hanya nasi yang dapat digunakan sebagai sumber makanan pokok bagi masyarakat Kota Padang. Banyak sekali aneka olahan pangan Kota Padang seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, gandum dan jagung yang dapat digunakan sebagai sumber makanan pokok. Tujuan pembangunan pangan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- i. Mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan berbasis kemandirian untuk menyediakan ketersediaan energi: melalui kegiatan peningkatan ketersediaan pangan, pengelolaan cadangan pangan, Penanganan daerah rawan pangan, stabilisasi harga pangan.
- ii. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan masyarakat: melalui kegiatan penganeekaragaman pangan.
- iii. Meningkatkan keamanan mutu dan hygiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menurunkan dan meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan: melalui kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan segar.

Berdasarkan arahan kebijakan Menteri Pertanian terdapat lima cara bertindak untuk mendukung transformasi struktural di

sektor pertanian di antaranya peningkatan kapasitas produksi seperti pengembangan lahan, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik, pengembangan pertanian modern seperti pengembangan smart farming, dan gerakan tiga kali ekspor atau yang lebih sering disebut GRATIEKS.

Praktek Pertanian perkotaan berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara:

- i. Memanfaatkan sumberdaya lokal.
- ii. Aplikasi teknologi sederhana dan tepat guna yang mudah dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat.

Manfaatkan kembali (*reuse*) limbah organik Kota Padang sebagai sumber hara dan nutrisi bagi tanaman, kotoran-kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai sumber biogas. Sehingga limbah-limbah organik dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

25.Strategi 25 : Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

Berbagai strategi dan kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun senantiasa disempurnakan agar pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai secara efektif.

Penanganan kemiskinan yang sering menempatkan warga miskin sebagai objek pembangunan perlu dikoreksi. Artinya, bahwa dalam upaya penanganan kemiskinan perlu lebih melibatkan penduduk miskin sebagai subjek pembangunan, dan diharapkan penanganan kemiskinan nantinya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat yang akan membuat masyarakat miskin bisa mandiri secara ekonomi.

Misi 4: Mewujudkan Kota Padang Sebagai Pusat Perdagangan dan Ekonomi Kreatif

Kekuatan yang dapat diandalkan untuk misi Kota Padang sebagai pusat perdagangan adalah posisi Kota Padang yang merupakan Ibukota Propinsi Sumatera Barat, di Kota Padang juga terdapat Pelabuhan Teluk Bayur serta Bandara Internasional Minang Kabau yang berbatasan langsung dengan Kota Padang dan juga letak geografis Padang yang mudah diakses dari semua propinsi di pulau Sumatera, termasuk luar pulau. Kota Padang sebagai pusat kerjasama negara-negara yang tergabung dalam IORA juga merupakan kekuatan yang akan

membangun ekonomi kreatif. Namun demikian kelemahannya adalah kualitas sumberdaya manusia yang belum memenuhi kompetensi untuk membangun dan memelihara hubungan kerjasama perdagangan luar negeri secara berkelanjutan, jumlah volume, kualitas, dan kontinuitas produk yang belum optimal karena belum terbangun pusat-pusat ekonomi kreatif yang lebih luas dan berbasis komunitas atau pelaku ekonomi kreatif. Peluang yang dapat diraih adalah tersedianya pasar dan tersedianya kerjasama negara-negara yang tergabung dalam IORA. Ancaman yang mungkin menghambat misi ini adalah daya saing produk yang masih belum kuat untuk diperdagangkan secara internasional, termasuk dalam negara yang tergabung dalam IORA.

26.Strategi 26 : Peningkatan transaksi perdagangan dalam dan luar negeri negeri

Kota Padang merupakan Kota Perdagangan hal ini dapat dilihat pada kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Padang sangat tinggi, hal ini disebabkan Kota Padang merupakan simpul perdagangan di wilayah barat pulau sumatera dan Sumatera Barat, untuk itu diperlukan pengembangan pusat-pusat perdagangan, Pasar Modern, Pergudangan, Pelabuhan sebagai jalur transportasi barang, Pasar rakyat (Pasar raya dan Pasar Pembantu).

Melihat perkembangan transaksi perdagangan pada beberapa tahun terakhir di dunia, Indonesia maupun Kota Padang telah menuju sistem perdagangan digital, untuk itu perlu mengarahkan perdagangan Kota Padang juga menuju perdagangan digital melalui *marketplace-marketplace* yang telah ada.

27.Strategi 27 : Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif

Dengan beragamnya produk ekonomi kreatif yang dihasilkan di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang dan sistem perdagangan menuju perdagangan digital, maka perlu mempersiapkan produk ekonomi kreatif Kota Padang agar memiliki daya saing dengan membangun pusat inkubator bisnis, perlindungan hak cipta pelaku ekonomi kreatif, pemenuhan standarisasi produk ekspor, mendorong ketersediaan bahan baku yang terjangkau, membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar, maupun komunitas ataupun lembaga/asosiasi yang bergerak di usaha perdagangan seperti Asosiasi Eksportir Indonesia, HIPMI, Komunitas Tangan Di Atas, dan lain sebagainya.

28.Strategi 28 : Meningkatkan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif Kota Padang

Dengan beragamnya produk ekonomi kreatif Kota Padang, perlu dilakukan promosi dan pemasaran yang masih baik itu dengan mendirikan Pusat Promosi dan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif, melalui teknologi informasi (digital) serta menyebarkan informasi kegiatan melalui media sosial, media publikasi, jejaring ekonomi kreatif yang telah terbangun.

29.Strategi 29 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku usaha ekonomi kreatif

Dengan menjadikan Kota Padang sebagai pusat ekonomi kreatif Sumatera Barat, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan Kuantitas pelaku usaha ekonomi kreatif Kota Padang, diharapkan nantinya dapat menjadi pelopor inovasi dalam pengembangan produk ekonomi kreatif Kota Padang. Upaya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas pelaku usaha ekonomi kreatif akan dilakukan melalui penguatan kelembagaan, membangun kolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi dan asosiasi/lembaga profesi, penguatan jejaring antar pelaku usaha ditingkat lokal, regional dan internasional serta mefasilitasi kemudahan akses perizinan dan permodalan peku ekonomi kreatif Kota Padang.

Misi 5: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan

Kekuatan yang dimiliki Kota Padang dalam misi ini adalah terbangunnya destinasi-destinasi wisata alam baru dalam lima tahun terakhir (terutama wisata pantai), wisata olah raga, wisata kuliner dan wisata budaya yang semakin ramai dikunjungi wisatawan karena adanya mesjid Raya dan Batu Malin Kundang yang makin tertata. Namun kelemahannya adalah belum terkelolanya perparkiran dan pedagang di lokasi destinasi wisata, serta fasilitas MCK yang belum memenuhi standar kenyamanan wisatawan. Peluang untuk misi lima ini adalah wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat sekaligus juga akan mengunjungi Kota Padang sebagai ibu kota Propinsi. Ancaman yang akan menghambat adalah sikap masyarakat yang belum mencerminkan sikap Sapta Pesona yang menjadi dasar dalam menerima wisatawan.

30.Strategi 30 : Penataan dan pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Berbagai data terkait kepariwisataan di Kota Padang menunjukkan bahwa pertumbuhan pada pembangunan kepariwisataan di Kota Padang telah berkembang secara positif dan mengikuti pula tren pertumbuhan yang seiring dengan Prov. Sumbar. Kebijakan kepariwisataan yang ada pada level nasional dan provinsi yang telah dibangun pun secara langsung maupun tidak langsung ternyata telah memberikan pengaruh yang baik terhadap kondisi kepariwisataan di Kota Padang.

Peran strategis Kota Padang bersamaan dengan potensi pariwisata yang besar di Kota Padang pun telah mendudukkan Kota Padang berada dalam posisi teratas dalam kebijakan kepariwisataan di level provinsi. Kota Padang menjadi Kawasan Utama Pariwisata Provinsi (KUPP).

Kota Padang menduduki peran strategis sebagai hub (pusat berkumpulnya) wisatawan ketika hendak mengakses destinasi-destinasi unggulan di Sumbar. Maka, komponen 3A di dalam pengembangan destinasi pariwisata, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan

amenitas menjadi amat penting terkait dengan pembangunan kepariwisataan di Kota Padang. Hal tersebut sejalan dengan salah satu strategi atau pendekatan yang hendak didorong oleh Kementerian pariwisata terhadap pariwisata berbiaya rendah atau low cost tourism (LCT) di mana komponen 3T menjadi amat krusial untuk dilihat pengembangannya. Komponen 3T tersebut, antara lain transportasi (transportation) mencakup aspek transportasi, terutama kuantitas penerbangan, kerja sama maskapai, dan penerbangan murah; telekomunikasi (telecommunication) mencakup aspek digitalisasi promosi, digitalisasi informasi destinasi, dan digitalisasi informasi perjalanan; dan pariwisata (tourism) mencakup aspek kuantitas hotel murah, homestay, dan desa wisata.

31.Strategi 31 : Meningkatkan daya saing pariwisata.

Kota Padang dalam sepuluh tahun terakhir ini telah menampilkan keunggulan komparatif dan kompetitif-nya sebagai destinasi wisata unggulan yang patut mendapatkan perhatian pada skala lokal dan nasional dalam menarik wisman serta wisnus. Adanya pembangunan sektor pariwisata di Kota Padang juga menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata itu sendiri maupun pembangunan Kota Padang secara menyeluruh, terutama terkait erat dengan tingkat pendapatan daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat. Saat ini, pembangunan secara bertahap sedang berlangsung di Kota Padang melalui pembenahan dan pembangunan baru terhadap sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang tersebar di sejumlah titik, di antaranya Pantai Padang, Pantai Air Manis, Pelabuhan Muara (Jembatan Siti Nurbaya), dan Kawasan Wisata Bungus Teluk Kabung juga pengembangan kawasan wisata timur Kota Padang dan pulau pulau kecil serta mendorong konsep pariwisata berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata.

Misi 6: Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana

Kekuatan untuk misi ini adalah Kota Padang memiliki masyarakat yang berpengalaman mengalami, menghadapi, dan mengatasi bencana, sehingga sudah memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar penyelamatan diri melalui pendidikan dan pelatihan mitigasi bencana yang rutin diberikan oleh Dinas terkait dan juga sekolah-sekolah. Kelemahannya adalah tidak terpeliharanya bangunan mitigasi (shelter) bencana, masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam memelihara lingkungan yang juga akan berdampak kepada terjadinya bencana seperti banjir, serta belum terbangun kelembagaan masyarakat tangguh bencana. Sementara yang menjadi peluang dalam misi ini adalah terbukanya perhatian dan bantuan dunia untuk mendukung gerakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana. Namun ancamannya adalah semakin rusaknya planet bumi yang menimbulkan panas global dan perubahan iklim yang tidak

dapat diramalkan dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan dan perekonomian masyarakat.

32.Strategi 32 : Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana

Semua orang mempunyai risiko terhadap potensi bencana, sehingga penanganan bencana merupakan urusan semua pihak (*everybody's business*). Oleh sebab itu, perlu dilakukan berbagi peran dan tanggung jawab (*shared responsibility*) dalam peningkatan kesiapsiagaan di semua tingkatan, baik anak, remaja, dan dewasa.

Komunitas dan Kelembagaan yang sadar dan peduli bencana mengingat tren bencana global ke depan cenderung meningkat karena pengaruh beberapa faktor, seperti 1) Meningkatnya jumlah penduduk, 2) Urbanisasi, 3) Degradasi lingkungan, 4) Kemiskinan, dan 5) Pengaruh perubahan iklim global.

Salah satu faktor penyebab banyaknya korban jiwa, kerusakan, dan kerugian yang timbul akibat bencana adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap risiko bencana di wilayahnya. Selain itu, dukungan mitigasi struktural yang belum memadai juga menjadi faktor tak terpisahkan. Hal ini mengakibatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masih sangat kurang.

Kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dapat tumbuh dan berkembang melalui komunitas dan kelembagaan yang sadar dan peduli bencana di tengah – tengah masyarakat. Selain peningkatan kemampuan diri sendiri melalui komunitas diharapkan dapat pula berkembang dan meluas di masyarakat suatu daerah. Dengan adanya komunitas dapat meningkatkan solidaritas sosial dan kepedulian terhadap daerah dan masyarakatnya terhadap resiko bencana di daerahnya.

33.Strategi 33 : Meningkatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terkait dengan usaha mengurangi resiko kebakaran antara lain standarisasi instalasi listrik pada bangunan gedung dan perumahan.

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat, dengan tingkat intensitas perkembangan kota yang cukup tinggi. Kondisi ini ditandai dengan banyaknya bangunan gedung dan perumahan yang berdiri selama beberapa tahun terakhir ini. Agar pembangunan fisik bangunan gedung dan bangunan perumahan sesuai dengan standar teknis yang berlaku, maka diperlukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Salah satu tujuan diharuskannya Persetujuan Bangunan Gedung adalah agar pembangunan yang dilakukan telah memenuhi standar teknis seperti telah mengakomodir kebutuhan

instalasi listrik sesuai dengan standarisasi instalasi listrik pada bangunan gedung dan perumahan guna mengurangi resiko bencana.

34.Strategi 34 : Meningkatkan penyediaan sarana penanggulangan bencana kebakaran di bangunan gedung dan perumahan.

Keselamatan penghuni bangunan gedung dan perumahan dari kebakaran adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu perlu penyediaan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanganan terhadap ancaman bahaya kebakaran di bangunan gedung dan perumahan.

Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.Untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.

Meminimalisir kerugian akibat bencana kebakaran perlu tindakan cepat (*respon time*) ke lokasi kejadian dalam waktu sesingkat singkatnya. Ketersediaan sarana dan prasarana amat diperlukan antara lain; sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran untuk bangunan gedung. Bangunan tinggi yang memiliki banyak lantai diperlukan adanya mobil tangga, sehingga dapat menjangkau ke puncak bangunan.

Kita dapat mencegah terjadinya kebakaran dengan melakukan kesiapsiagaan dengan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran di lingkungan perumahan dan perkantoran seperti menyediakan alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda, Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran.

Dengan adanya kesadaran masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran dapat meringankan beban Negara dan masyarakat sendiri terhadap resiko bencana kebaran yang akan timbul.

Misi 7: Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Yang Prima

Kekuatan Kota Padang dalam misi ini adalah sudah mulai terbangunnya semangat aparat sipil negara (ASN) untuk menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima yang makin berkualitas, serta sudah ada institusi yang menerapkan zona integritas. Namun, masih ditemukan kelemahan karena penerapan insentif dan disinsentif belum dilaksanakan di setiap institusi pemerintah sehingga semangat ASN juga belum stabil untuk selalu memperjuangkan tata kelola yang bersih dan pelayanan publik

yang prima di setiap lini. Peluang yang dapat diraih adanya penghargaan Pemerintah secara nasional kepada pemerintah kota/kabupaten yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik prima. Namun demikian juga ada ancaman yakni kalah bersaing dengan pemerintah kota lain dalam Propinsi Sumatera Barat, maupun kota dari luar Sumatera Barat dan Sumatera, yang semakin baik dan lebih bersih karena menggunakan teknologi informasi yang update dan canggih dalam menerapkan sistem good governance dan pelayanan publik di daerahnya.

35.Strategi 35 : Menerapkan 8 area perubahan reformasi birokrasi

reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja. Birokrasi yang baik harus didukung oleh profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, tanggung jawab, dan kesanggupan memberikan pelayanan prima.

Pada intinya, ketika pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah, maka setelah dilakukan reformasi birokrasi akan tercipta pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Jika saat ini pemerintahan belum efektif dan efisien, maka setelah reformasi birokrasi lahir pemerintahan yang efektif dan efisien. Jika saat ini pelayanan publik masih buruk, maka setelah reformasi birokrasi diharapkan pelayanan publik semakin baik dan berkualitas.

Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu:

1. Mental aparatur: terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel.
2. Organisasi: organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
3. Tata laksana: sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
4. Peraturan perundang-undangan: regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.
5. Sumber daya manusia aparatur: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.
6. Pengawasan: meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN.
7. Akuntabilitas: meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
8. Pelayanan publik: pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

36.Strategi 36 : Melakukan Career path, sebagai bagian dari reward dan punishment

Career path atau jenjang karir didefinisikan sebagai rangkaian posisi yang harus dilalui oleh masing-masing Aparatur Sipil Negara untuk mencapai tingkatan posisi tertentu dalam organisasi. Umumnya, *career path* ini disusun berdasarkan profil kompetensi posisi yang perlu dimiliki seseorang untuk menjabat suatu posisi tertentu.

Pengembangan karir bagi Aparatur Sipil Negara memang sangat penting untuk dilakukan, sebagai salah satu faktor utama dalam mendorong motivasi kerja dari pegawai itu sendiri. Jenjang karir yang lebih jelas akan dapat menjadikan Aparatur Sipil Negara semakin mengetahui tentang bagaimana sebuah institusi menghargai kinerja mereka untuk kurun waktu tertentu.

Pada era keterbukaan informasi publik membuat kinerja pemerintah semakin mudah untuk diawasi oleh masyarakat. Akibatnya, lembaga pemerintahan semakin dituntut untuk mengupayakan perbaikan tata kelola birokrasi, khususnya dalam manajemen sumber daya aparaturnya. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan memberi *reward* (penghargaan) atau *punishment* (hukuman) untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara. Motivasi *reward* dan *punishment* ini sangat berguna untuk menaikkan kepercayaan diri dan motivasi ASN dalam bekerja dan *career path* perlu dilakukan sebagai bagian dari *reward* dan *punishment* bagi Aparatur Sipil Negara.

37.Strategi 37 : Meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah

Kinerja Pemerintah Daerah didukung oleh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing – masing Perangkat Daerah. kinerja tersebut dibagi atas 2 bagian besar yakni : Kinerja *Outcome* (manfaat) dan kinerja *output* (keluaran). Untuk meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah pada periode Renstra 2019 – 2024 perlu disusun program dan kegiatan yang terencana, sistematis dan terukur guna mewujudkan target – target Pembangunan Kota Padang dengan tetap memperhatikan konsep *Sustainable Development*.

38.Strategi 38 : Memantapkan implementasi pelimpahan kewenangan pelayanan publik ke tingkat kecamatan dan kelurahan

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dewasa ini keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat yang menilai pelayanan publik yang diberikan kepada mereka terkendala akibat masih belum tingginya sikap atau perilaku sumber daya manusia aparatur yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia aparatur dan keprofesionalan pegawai ini juga mengakibatkan sering terjadinya diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagian besar masyarakat ada yang menerima pelayanan itu dengan maksimal akan tetapi sebagian lagi hanya mendapatkan pelayanan yang sekedarnya karena itulah peningkatan sumber daya manusia dan profesionalitas pegawai menjadi suatu aspek yang patut diperhatikan dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

Satu hal lagi yang perlu dicermati dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan

keprofesionalan pegawai adalah masalah *attitude* atau perilaku. Diperlukan sikap dan mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam pemberian layanan.

Langkah selanjutnya sebagai salah satu strategi peningkatan pelayanan publik adalah dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Diharapkan dengan penerbitan kebijakan mengenai peningkatan pelayanan publik itu akan semakin mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Salah satu bentuk kebijakan itu adalah dengan menerbitkan atau membuat standar pelayanan minimal (SPM). Standar pelayanan minimal merupakan sebuah kebijakan publik yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap masyarakat. Sehingga apa yang menjadi tujuan kedatangan masyarakat untuk dilayani dan terlayani dapat tercapai.

Sisi lain yang patut diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang menunjang kualitas pelayanan publik tersebut. Sebab, tanpa didukung tersedianya fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap maka proses penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat akan terhambat.

Ketersediaan prasarana ini disadari atau tidak akan semakin mempercepat sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan untuk mewujudkannya maka diperlukan alokasi dana untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat tersebut. Dengan begitu maka segala kendala-kendala yang menghalangi penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat akan dapat teratasi dengan baik dan maksimal.

39.Strategi 39 : Memperluas cakupan pelayanan publik yang berbasis IT

Memperluas cakupan pelayanan publik yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT) ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian (*strategic issue*) yaitu peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan operasional. Dalam kategori peraturan perundang-undangan, sangat memerlukan undang-undang perlindungan transaksi elektronik, dan pedoman yang jelas dalam pengembangan Informasi Teknologi di Kota Padang. Dalam kategori kebijakan, diperlukan kebijakan untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk pengembangan Informasi Teknologi bila layanan ini dipandang sebagai salah satu kunci utama dalam menjawab kebutuhan layanan prima yang cepat, tepat, terpadu, serta akurat. Di samping itu, diperlukan juga kebijakan untuk memberi peluang, mendorong, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta kalangan perguruan tinggi dalam layanan Informasi Teknologi.

Faktor-faktor internal Pemerintah Kota Padang sebagai unsur kekuatan atau kelemahan seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana/anggaran, dan budaya organisasi perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang.

Unsur-unsur yang menjadi kekuatan bagi Pemerintah Kota Padang saat ini adalah tersedianya operator komputer di unit kerja, Adanya upaya ketersediaan tenaga ahli komputer, terdapat tuntutan pimpinan akan penggunaan IT dan tersedianya diklat peningkatan kemampuan aparatur dan Ketersediaan peralatan penunjang komunikasi tersebar ke seluruh kecamatan dan Kelurahan dan ketersediaan portal website pemerintah daerah.

Strategi yang dapat dilakukan antara lain 1) Pengembangan organisasi dan tata kerja, 2) Pembuatan aturan perundangan dan kebijakan, 3) Pengembangan SDM untuk menerapkan teknologi informasi, 4) Pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai, 5) Pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan, 6) Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras/jaringan, dan 7) Pengembangan dan koordinasi layanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif serta menarik investasi ke Kota Padang sehingga semakin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Strategi-strategi yang telah disebutkan diatas adalah upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam penerapan teknologi informasi, sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Dampak yang diharapkan dengan adanya pengembangan Informasi Teknologi adalah pelayanan publik dengan menggunakan media teknologi informasi semakin memberikan kontribusi yang positif.

40.Strategi 40 : penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis

Ada permasalahan menahun dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia yang terus dibahas tetapi minus penerapan konkretnya, yakni strukturnya yang begitu gemuk tetapi irit menjalankan fungsi. Akibatnya, resolusi “miskin struktur, kaya fungsi” kian kandas sebagai wacana semata.

Struktur organisasi menentukan bagaimana *business process* berjalan dalam tubuh birokrasi. Bagai sebuah sistem, setiap bagian struktur tersebut memiliki fungsi-fungsi tersendiri yang terkait satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Semakin besar strukturnya maka semakin kompleks *business process* yang terjadi dalam organisasi tersebut.

Struktur birokrasi yang gemuk dinilai menyulitkan birokrasi dalam bergerak dan berubah sesuai tuntutan lingkungannya. Banyak tugas di lingkup pemerintah daerah yang seharusnya dikerjakan satu orang, namun kenyataan justru dilakukan lebih dari yang seharusnya. Hal

ini kemudian berimbas pada rendahnya kinerja serta kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. Perampingan struktur birokrasi dimaksudkan untuk memangkas serta menghilangkan bagian-bagian organisasi yang dianggap tidak vital. Perampingan struktur birokrasi juga dimaksudkan

untuk melebur bagian-bagian dalam birokrasi yang memiliki fungsi yang hampir sama. Semuanya ditujukan untuk menciptakan birokrasi dengan banyak fungsi, namun dengan struktur yang sederhana.

Untuk melakukan perampingan struktur birokrasi, perlu diperhatikan satu aspek penting yaitu pemahaman dan penaksiran (*assessment*) terhadap kondisi lingkungan dan sifat alamiah dari organisasi birokrasi terkait. Pemahaman terhadap kondisi dan sifat organisasi terkait dapat membantu proses restrukturisasi birokrasi untuk mendapatkan bangunan struktur yang terbaik, bahkan mendukung upaya pengembangan organisasi selanjutnya.

41.Strategi 41 : Penguatan budaya pembaharuan kepemimpinan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, perlu dilakukan pembaharuan kepemimpinan melalui aksi perubahan organisasi. Aksi perubahan dapat dilaksanakan melalui agen perubahan di setiap organisasi. Untuk memastikan bahwa organisasi yang dipimpinnya berjalan dengan dinamis, seorang pemimpin harus mempunyai nilai-nilai tertentu yang dapat menjadi teladan.

Penguatan budaya pembaharuan kepemimpinan dapat ditingkatkan dan ditanamkan pada Aparatur Sipil Negara dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Melalui Diklat Kepemimpinan diharapkan ASN menunjukkan kinerja nyata dengan pengetahuan dan keterampilan memimpin, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

6.2.1 Arah kebijakan selaras tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Tahun 2019-2024

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan pembangunan Kota Padang 2019-2024 dirumuskan berdasarkan pertimbangan untuk pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankan.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu priode RPJMD, perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran pada setiap misi, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan Kota Padang yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2019-2024 yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, pembangunan kota, janji politik, serta pertimbangan strategis lainnya yang dinilai penting. Hasil perumusan arah kebijakan yang menjadi prioritas dapat dilihat pada Tabel 6-2.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kota Padang, maka tema pembangunan Kota Padang untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada Tabel 6-1.

Tabel 6-1 Tema Pembangunan Kota Padang

No.	Tahun	Semula/ Setelah	Tema Pembangunan
1.	2020	Semula	Penyediaan pelayanan dasar, infrastruktur kota, peningkatan perekonomian kota serta tata kelola pemerintahan yang bersih untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul.
		Setelah	Penyediaan infrastruktur kota dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas
2.	2021	Semula	Peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur dan perekonomian kota serta tata kelola pemerintahan yang bersih untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul.
		Setelah	Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Birokrasi Sosial untuk mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata
3.	2022	Semula	Pemantapan pelayanan dasar, infrastruktur dan perekonomian kota serta tata kelola pemerintahan yang bersih untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul.

No.	Tahun	Semula/ Setelah	Tema Pembangunan
		Setelah	Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Sumber Daya Lokal dan Pengembangan Potensi Wisata
4.	2023	Semula	Pemantapan kualitas pelayanan dasar, peningkatan perekonomian kota dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul
		Setelah	Pemantapan kualitas pelayanan dasar, peningkatan perekonomian kota dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul
5.	2024	Semula	Pemantapan kualitas infrastruktur dan lingkungan dalam mendukung perekonomian kota, untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul
		Setelah	Pemantapan kualitas infrastruktur dan lingkungan dalam mendukung perekonomian kota, untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul

Tabel 6-2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padang Tahun 2019-2024

No	Tujuan	NO	Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing	1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	1.1.1	Meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan pendidikan karakter sejak dini	1.1.1.1	Pembinaan keluarga dalam mewujudkan pendidikan karakter anak di usia dini
1		1.1		1.1.2	Meningkatkan kolaborasi antara dunia pendidikan dan keluarga untuk pembentukan karakter anak sejak dini	1.1.2.1	Peningkatan kualitas/mutu pendidikan karakter anak usia dini
1		1.1		1.1.3	Pemerataan kualitas Pendidikan di seluruh kecamatan	1.1.3.1	Penyediaan sarana prasarana dan SDM yang berkualitas
1		1.1		1.1.4	Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan	1.1.4.1	Peningkatan sarana dan prasarana sekolah
1		1.1		1.1.5	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1.1.5.1	Peningkatan Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1		1.1		1.1.6	Meningkatkan budaya baca	1.1.6.1	Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan
1		1.1		1.1.6		1.1.6.2	Peningkatan aktifitas gebyar membaca dan literasi
1		1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.2.1	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat	1.2.1.1	Pemenuhan sarana dan prasarana dan kualitas penerapan standar pelayanan minimal kesehatan
1		1.2		1.2.1		1.2.1.2	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
1		1.2		1.2.1		1.2.1.3	Meningkatkan kualitas lingkungan dan budaya hidup bersih dan sehat

No	Tujuan	NO	Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan
1		1.2		1.2.1		1.2.1.4	Meningkatkan keikutsertaan masyarakat kota dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1		1.2		1.2.1		1.2.1.5	Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan
				1.2.2	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	1.2.2.1	Perbaikan gizi masyarakat
						1.2.2.2	Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, ,
						1.2.2.3	mutu dan keamanan pangan
						1.2.2.4	Perilaku hidup bersih dan sehat
						1.2.2.5	Koordinasi pembangunan pangan dan gizi.
1		1.3	Meningkatnya kesetaraan gender	1.3.1	Meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap gender	1.3.1.1	Pemenuhan dan peningkatan pelayanan publik yang inklusif
1		1.4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1.4.1	Meningkatkan Standar Hidup Layak Masyarakat	1.4.1.1	Menjaga ketersediaan bahan pangan yang terjangkau
1		1.4		1.4.1		1.4.1.2	Menjaga stabilitas harga
1		1.4		1.4.1		1.4.1.3	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan usaha (produksi) masyarakat
2	Terwujudnya Kota Padang yang layak huni	2.1	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	2.1.1	Memperluas cakupan layanan angkutan umum massal	2.1.1.1	Penyediaan sarana dan infastruktur transportasi umum yang aman, nyaman dan ramah lingkungan

No	Tujuan	NO	Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan
2		2.1		2.1.2	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum massal	2.1.2.1	Penyediaan, peningkatan dan pemerataan pelayanan transportasi umum yang nyaman dan berkelanjutan serta inklusif
		2.2	Meningkatnya Permukiman layak huni	2.2.1	Penyediaan, penataan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman secara berkelanjutan	2.2.1.1	Peningkatan kualitas jalan dan drainase lingkungan
						2.2.1.2	Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
2		2.2		2.2.2	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Jalan dan drainase Perkotaan	2.2.2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Drainase Perkotaan terpadu dan terintegrasi
2		2.2		2.2.3	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	2.2.3.1	Mengendalikan pemanfaatan ruang
2		2.3	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan didalam masyarakat	2.3.1	Meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat	2.3.1.1	Melakukan pembatasan waktu aktifitas hiburan
2		2.3		2.3.1		2.3.1.2	Meningkatkan penerangan di tempat-tempat publik
2		2.3		2.3.1		2.3.1.3	Meningkatkan penegakan perda tentang ketertiban umum

No	Tujuan	NO	Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan
2		2.3		2.3.1		2.3.1.4	Mengkatkan peran serta masyarakat/swasta
2		2.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sanitasi	2.4.1	Meningkatkan cakupan sanitasi layak bagi masyarakat	2.4.1.1	Pembangunan sanitasi layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah
2		2.4		2.4.2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	2.4.2.1	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2		2.4		2.4.2		2.4.2.2	Peningkatan penanganan sampah
2		2.4		2.4.2		2.4.2.3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengembangkan “Bank Sampah”
2						2.4.2.4	Melakukan Penanganan kawasan kumuh perkotaan secara terpadu
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	3.1	Meningkatkan kesempatan kerja	3.1.1	Mengembangkan ekonomi inklusif dengan penguatan sektor unggulan	3.1.1.1	Optimalisasi usaha ekonomi masyarakat berbasis kemitraan di kawasan sentra produksi dan sentra industri
3		3.1		3.1.1		3.1.1.2	Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah Koperasi (BLUD Koperasi)
3		3.1		3.1.1		3.1.1.3	Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) bagi Usaha Kecil Menengah
3		3.1		3.1.1		3.1.1.4	Pengembangan kampung tematik
3		3.1		3.1.2	Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru	3.1.2.1	Pengembangan industri

No	Tujuan	NO	Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan
3		3.1		3.1.2		3.1.2.2	Perluasan lapangan kerja produktif dan padat karya
3		3.1		3.1.2		3.1.2.3	Menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pencari kerja
3		3.1		3.1.3	Mendorong daya saing koperasi dan Usaha Mikro untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif.	3.1.3.1	Memperkuat akses usaha Mikro sektor informal dalam melakukan usaha produktif melalui pengembangan koperasi dan penyediaan lahan berusaha
3		3.2	Meningkatnya tingkat perekonomian penduduk	3.2.1	Pembinaan pengembangan usaha sektor formal dan informal	3.2.1.1	Melakukan penataan pedagang kaki lima
3		3.2		3.2.1		3.2.1.2	Meningkatkan kapasitas usaha
3		3.2		3.2.2	Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan.	3.2.2.1	Penyediaan dan pemenuhan ketahanan pangan serta mempertahankan pertanian perkotaan yang berkelanjutan
3		3.2		3.2.3	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi	3.2.3.1	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin
		3.3	Meningkatnya Investasi	3.3.1	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif	3.3.3.1	Penyediaan sarana pelayanan perizinan terpadu yang representatif
						3.3.3.2	Penyesuaian regulasi dalam memberikan kemudahan berinvestasi
						3.3.3.3	Mengoptimalkan Teknologi Informasi dalam pelayanan perizinan

No	Tujuan	NO	Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan
						3.3.3.4	Meningkatkan tata kelola kemudahan dan keamanan berusaha
4	Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat	4.1	Menjadikan sektor perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian	4.1.1	Peningkatan transaksi perdagangan dalam dan luar negeri negeri	4.1.1.1	Mengembangkan pasar raya dan pasar pembantu sebagai pasar modern
4		4.1		4.1.1		4.1.1.2	Meningkatkan promosi perdagangan dalam rangka Memperkuat posisi Kota Padang sebagai hub/simpul perdagangan di pantai barat sumatera
4		4.1		4.1.1		4.1.1.3	Meningkatkan daya saing produk unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif
4		4.1		4.1.1		4.1.1.4	Mengoptimalkan kerjasama luar negeri
4		4.1		4.1.1		4.1.1.5	Penguatan kelembagaan sektor perdagangan dan ekonomi kreatif unggulan berbasis inovasi, potensi lokal dan teknologi ramah lingkungan
4		4.2	Menjadikan kota Padang sebagai pusat ekonomi kreatif	4.2.1	Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif	4.2.1.1	membangun pusat inkubator ekonomi kreatif (Youth Center)

No	Tujuan	NO	Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan
4		4.2		4.2.1		4.2.1.2	perlindungan terhadap hak cipta pelaku ekonomi kreatif
4		4.2		4.2.1		4.2.1.3	pemenuhan standarisasi produk (khususnya produk pangan) melalui rumah produksi dan kemasan
4		4.2		4.2.1		4.2.1.4	mendorong ketersediaan bahan baku yang memiliki harga yang kompetitif
4		4.2		4.2.1		4.2.1.5	membangun program kemitraan dengan pengusaha yang telah mapan
4		4.2		4.2.1		4.2.1.6	mendorong pemanfaatan aset pemerintah daerah, propinsi maupun pusat yang ada di Kota Padang sebagai tempat produksi ekraf
4		4.2		4.2.2	Meningkatkan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif Kota Padang	4.2.2.1	Pengembangan usaha (Promosi dan Pemasaran) melalui Teknologi Informasi (digital)
4		4.2		4.2.2		4.2.2.2	Membangun pusat promosi dan pemasaran produk ekraf
4		4.2		4.2.2		4.2.2.3	Menyebarkan informasi kegiatan ekraf secara masif;
4		4.2		4.2.3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku usaha ekonomi kreatif	4.2.3.1	Penguatan kelembagaan pelaku ekonomi kreatif (Akademisi, Pelaku bisnis, Komunitas, pemerintah, media dan lembaga keuangan)
4		4.2		4.2.3		4.2.3.2	Membangun kolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi dan asosiasi/lembaga profesi
4		4.2		4.2.3		4.2.3.3	Penguatan jejaring antar pelaku usaha di tingkat lokal, regional dan internasional

No	Tujuan	NO	Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan
4		4.2		4.2.3		4.2.3.4	Fasilitasi kemudahan akses perizinan dan permodalan pelaku ekraf
5	Meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian	5.1	Mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan pariwisata yang unggul dan berdaya saing	5.1.1	Penataan dan pengembangan Daerah Tujuan Wisata	5.1.1.1	Pengembangan destinasi wisata
5		5.1		5.1.1		5.1.1.2	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
5		5.1		5.1.1		5.1.1.3	Menigkatkan tata kelola kepariwisataan
5		5.1		5.1.1		5.1.1.4	Mengembangkan Mass Tourism (Pariwisata Massal)
5		5.1		5.1.1		5.1.1.5	Menyediakan pusat informasi pariwisata guna mendukung posisi kota padang sebagai simpul pariwisata regional
5		5.1		5.1.1		5.1.1.6	Menyediakan sarana prasarana pendukung pariwisata seperti fasilitas kesehatan, akomodasi, tour guide dan lain lain
5		5.1		5.1.1		5.1.1.7	Mendorong partisipasi masyarakat dalam menyediakan akomodasi bagi wisatawan
5		5.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi	5.1.2	Meningkatkan daya saing pariwisata.	5.1.2.1	Pengembangan kawasan wisata terpadu Gunung Padang, pulau-pulau kecil, wilayah timur Kota Padang

No	Tujuan	NO	Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan
5		5.1		5.1.2		5.1.2.2	Pengembangan konsep pariwisata berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata
5		5.1		5.1.2		5.1.2.3	Pengembangan jejaring kepariwisataan (Padang Beltline)
6	Meningkatnya kapasitas Kota Padang dalam penanggulangan bencana	6.1	Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana	6.1.1	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	6.1.1.1	Penyiapan infrastruktur kota berbasis mitigasi bencana
6		6.1		6.1.1		6.1.1.2	Meningkatkan ketahanan dan kekuatan bangunan melalui penyediaan desain standar bangunan
6		6.1		6.1.1		6.1.1.3	Pemetaan potensi kawasan resiko bencana dan penataan kawasan resiko bencana dalam rangka pengembangan cakupan unit wilayah manajemen bencana
6		6.1		6.1.1		6.1.1.4	Peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat secara menyeluruh
6		6.1		6.1.1		6.1.1.5	Menyediakan meeting point di bangunan dan sarana publik
6		6.1		6.1.1		6.1.1.6	Penyediaan data dan informasi kebencanaan yang komprehensif
6		6.1		6.1.1		6.1.1.7	Menyediakan jalur evakuasi sebagai akses evakuasi ketika terjadi bencana gempa yang berpotensi tsunami

No	Tujuan	NO	Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan
6		6.2	Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana	6.2.1	Meningkatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terkait dengan usaha mengurangi resiko kebakaran antara lain standarisasi instalasi listrik pada bangunan gedung dan perumahan.	6.2.1.1	Peningkatan pengawasan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
6		6.3	Berkurangnya dampak kebakaran dan penyelamatan kedaruratan lainnya	6.3.1	Meningkatkan penyediaan sarana penanggulangan bencana kebakaran di bangunan gedung dan perumahan.	6.3.1.1	Peningkatan pengawasan berkala terhadap sistem proteksi kebakaran pada bangunan publik
7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	7.1	Meningkatnya kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	7.1.1	Menerapkan 8 area perubahan reformasi birokrasi	7.1.1.1	Mewujudkan manajemen ASN sesuai dengan sistem merit
7		7.1		7.1.1		7.1.1.2	Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan yang terintegrasi
7		7.1		7.1.1		7.1.1.3	Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap tatakelola pemerintahan daerah

No	Tujuan	NO	Sasaran	No	Strategi	No	Arah Kebijakan
7		7.2	Meningkatnya kinerja birokrasi	7.2.1	Melakukan Career path, sebagai bagian dari reward dan punishment	7.2.1.1	Pembangunan sistem keamanan informasi dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja individu dalam rangka meningkatkan ketersediaan, kehandalan dan kerterkinian data statistik daerah
7		7.2		7.2.2	Meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah	7.2.2.1	Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan yang terintegrasi
7		7.2		7.2.3	Memantapkan implementasi pelimpahan kewenangan pelayanan publik ke tingkat kecamatan dan kelurahan	7.2.3.1	Penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan serta peningkatan sarana prasarana pemerintahan
7		7.3	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	7.3.1	Memperluas cakupan pelayanan publik yang berbasis IT	7.3.1.1	Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas prosedur operasional berstandar
7		7.3		7.3.1		7.3.1.2	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
7		7.3		7.3.1		7.3.1.3	Mendorong penerapan smart city di Kota Padang
7		7.3		7.3.2	penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis	7.3.2.1	Melaksanakan penataan Organisasi Perangkat
7		7.3		7.3.2		7.3.2.2	akuntabel yang sesuai dengan peraturan perundang undangan
7		7.3		7.3.3	Penguatan budaya pembaharuan kepemimpinan	7.3.3.1	penguatan sarana dan prasana pelayanan publik
7		7.3		7.3.3		7.3.3.2	peningkatan kompetensi ASN

6.2.2 Arah Kebijakan Kewilayahan

Kota Padang merupakan daerah yang sangat luas, dengan berbagai potensi sosial, ekonomi dan fisik lingkungan yang tersebar di setiap kecamatan. Fokus pertumbuhan dan perkembangan Kota Padang selama ini berorientasi ke wilayah barat Kota Padang. Sementara jika dilihat dari potensi yang ada, wilayah timur Kota Padang memiliki juga potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Kota Padang ke depan, seperti potensi pariwisata, perikanan, pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kondisi ini mengakibatkan adanya ketimpangan pengembangan wilayah antar wilayah barat dan wilayah timur Kota Padang. Guna menghindari terjadinya ketimpangan perkembangan wilayah barat dan wilayah timur Kota Padang tersebut, maka perlu ditetapkan arah kebijakan kewilayahan. Arah kebijakan kewilayahan sampai tahun 2024, diarahkan dengan mengintegrasikan pengembangan wilayah barat dan timur Kota Padang secara terpadu dalam lingkup kawasan yang saling terhubung.

Untuk menciptakan pemerataan pembangunan perlu dilakukan upaya dalam menghubungkan potensi setiap aktifitas ekonomi wilayah seperti; potensi pariwisata, perikanan, pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM). Keterhubungan setiap wilayah tersebut dapat dikaitkan dengan rencana strategis infrastruktur pendukung seperti pengembangan koridor trans Padang dan betonisasi jalan lingkungan.

Melihat bentangan geografis Kota Padang, maka untuk strategi pengembangan dan pemerataan pembangunan dikelompokkan ke dalam **wilayah administrasi yang saling berdekatan** untuk memudahkan percepatan peningkatan aksesibilitas dalam pemerataan pembangunan berdasarkan potensi ekonomi lokal yang ada. Salah satu tantangan dalam pembangunan daerah adalah masalah kesenjangan pembangunan antara kawasan perkotaan dengan daerah disekitarnya yang sering disebut dengan istilah pinggiran atau daerah *hinterland*. Untuk itu dalam arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Padang melakukan percepatan pembangunan terhadap kawasan-kawasan *hinterland* sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Salah satu konsep pengembangan wilayah adalah konsep pengembangan wilayah berdasarkan *cluster*.

6.2.3 Cluster Wilayah

Pengembangan wilayah berdasarkan cluster merupakan konsep yang terfokus kepada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. *Cluster* yang berhasil adalah *cluster* yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal.

Untuk mengembangkan *cluster*, perlu dilakukan beberapa strategi antara lain:

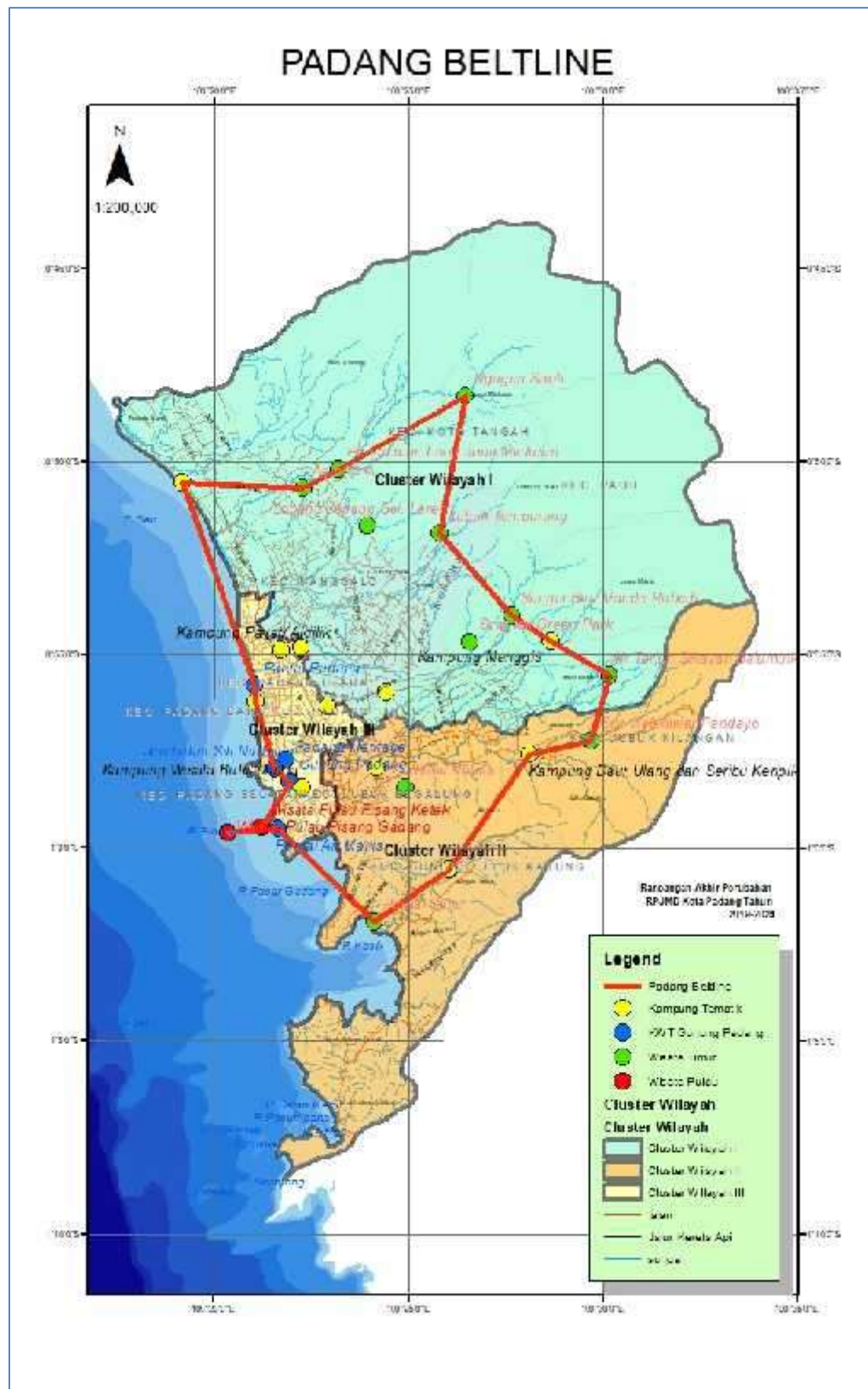
- (1) memahami kondisi dan standar ekonomi kawasan;
- (2) menjalin kerjasama;
- (3) mengelola dan meningkatkan pelayanan;

- (4) mengembangkan sumberdaya manusia;
- (5) mendorong inovasi dan kewirausahaan; dan
- (6) mengembangkan pemasaran dan memberi label khas bagi kawasan (*branding*)

Pemerintah Kota Padang mengadakan program inovasi yaitu dengan program kampung tematik. Program ini merupakan program yang memadukan potensi/ciri khas setiap wilayah dengan masalah ketertinggalan secara ekonomi dari wilayah perkotaan. Setiap wilayah di Kota Padang mempunyai potensi/ciri khas yang berbeda beda. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Kota Padang yang meliputi dataran tinggi hingga pesisir. Kampung Tematik merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Padang untuk mengatasi permasalahan lambatnya perkembangan pembangunan pada daerah pingiran perkotaan (*hinterland*).

Pengembangan masyarakat di dalam program kampung tematik mengangkat potensi dan kearifan lokal wilayah yang sudah ada, didasarkan pada asumsi, nilai, dan prinsip-prinsip agar dalam pelaksanaannya dapat memberdayakan masyarakat berdasarkan inisiatif, kemampuan, dan partisipasi masyarakat sendiri didalam mewujudkan dan mensukseskan program kampung tematik dimaksud. Karena partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengembangan masyarakat dan keberhasilan program kampung tematik sebagai program penanggulangan kemiskinan. Partisipasi masyarakat itu sendiri akan terwujud jika masyarakat secara sukarela berpartisipasi. Dengan cara memberi kebebasan masyarakat berpartisipasi, adanya kemampuan masyarakat berpartisipasi, dan adanya peluang serta kesempatan berpartisipasi.

Cluster Wilayah terdiri atas tiga Cluster Wilayah, yaitu I, II , dan III sebagaimana terlihat pada Gambar 6.2 berikut ini.



Gambar 6-2 Padang Beltline beserta Cluster Pengembangan Wilayah

1. Cluster Wilayah I

Cluster Wilayah 1 meliputi Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Nanggalo. Potensi yang ada di Cluster Wilayah 1 antara lain :

a. Kampung Tematik

Penetapan Kampung tematik pada masing-masing kecamatan di Cluster Wilayah I dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.3. Potensi Kampung Tematik di Cluster Wilayah I

No	Nama	Kecamatan	Kelurahan	Potensi
1	Kampung Nelayan Bestari	Koto Tengah	Pasir Nan Tigo	Industri Perikanan Tangkap
2	Kampung Adat	Kuranji	Gunung Sarik	1. Pelestarian Adat 2. Wisata Minat Khusus
3	Kampung Manggis	Pauh	Limau Manis	Produksi Buah Manggis komoditi ekspor
4	Kampung Lobang Jepang	Nanggalo	Tabing Banda Gadang	Wisata Sejarah

b. Tujuan Wisata Wilayah Timur Kota

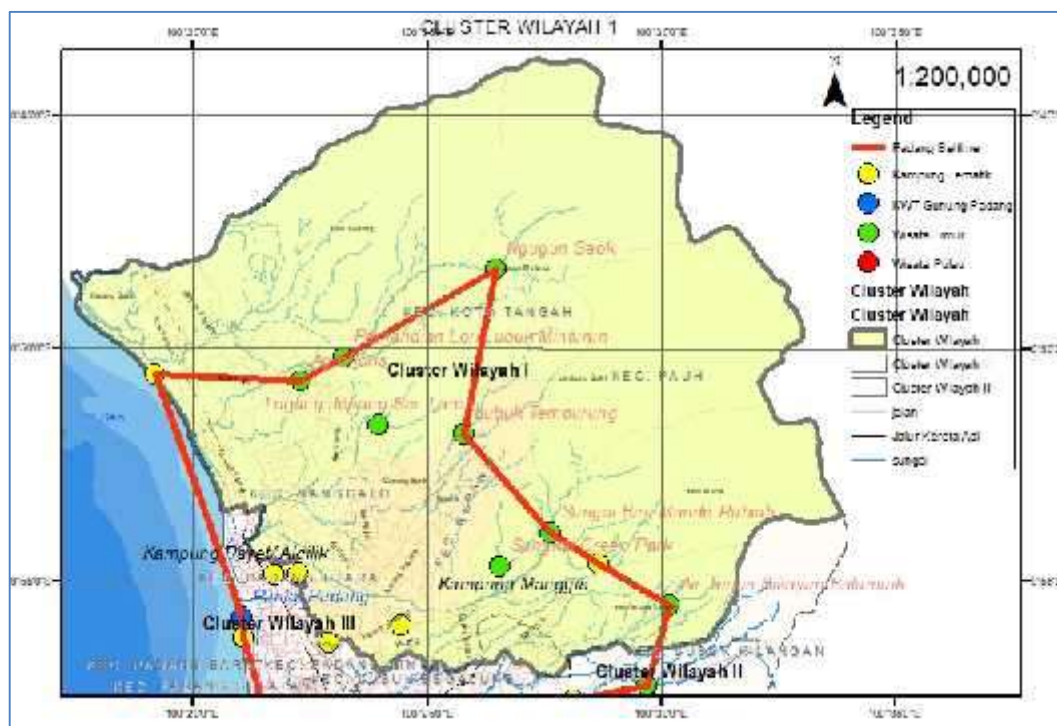
Penetapan Tujuan Wisata Wilayah Timur Kota pada masing-masing kecamatan di Cluster Wilayah I dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6.4. Potensi Wisata Wilayah Timur Kota di Cluster Wilayah I

No	Nama	Kecamatan	Kelurahan	Potensi
1	Agroflorist	Koto Tengah	Sungai Lareh	Industri Agroflorist
2	Sungkai Green Park	Pauh	Lambuung Bukik	Wisata Alam Industri Obat Herbal Sungkai Teknopark (Pertanian)
3	Air Terjun Sikayan Balumuik	Pauh	Limau Manih Selatan	Wisata Alam
4	Ngungun Saok (Koto Tengah)	Koto Tengah	Lubuk Minturun	Wisata Alam
5	Lubuk Tampuruang	Koto Tengah	Lubuk Minturun	Wisata Alam
6	Sungai Biru Mande Rubiah Batu Busuak	Pauh	Lambuung Bukik	Wisata Alam
7	Pemandian Lori Lubuk Minturun	Koto Tengah	Lubuk Minturun	Wisata Alam

Selain dari dua tema diatas, beberapa potensi juga terdapat di lokus berikut:

1. Mina Padi (Koto Tengah)
2. Kampung Manggis (Pauh)
3. Kampung Jamur (Pauh)
4. Sungai Biru Mande Rubiah Batu Busuak (Pauh)
5. Kampung Inggris, (Pauh),
6. Pantai Pasir Jambak (Koto Tengah)
7. Pantai Morgan Bangau Putih Parupuak Tabiang (Koto Tengah)
8. Kampung Tematik Lobang Jepang (Nanggalo)



Gambar 6-3 Cluster Wilayah I

Di Kecamatan Koto Tengah potensi yang dapat dikembangkan antara lain Kampung Nelayan Bestari, Kampung Agro (*florist*) termasuk Lobang Jepang Sei Lareh, Ngungun Saok, Mina Padi, Pantai Pasir Jambak, Pantai Morgan Bangau Putih Parupuak Tabiang serta Pemandian Lori Lubuak Minturun. Potensi ekonomi yang ada di Kampung Nelayan Bestari antara lain potensi wisata, budaya, tradisi dan kearifan lokal. Potensi ini juga didukung oleh ciri khas daerah setempat yang lebih kuat dengan adanya usaha yang dominan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah tersebut yakni usaha hasil olahan ikan, jual ikan segar dan rumah makan lauk pukek.

Agro wisata merupakan unggulan Kecamatan Koto Tengah yang keterkaitannya dengan sektor lain dalam pengembangan ekonomi sangat besar. Disamping itu sektor agro wisata tanaman hias dapat menciptakan lapangan kerja serta dapat memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Koto Tengah, destinasi wisatanya sudah menunjukkan daya saing yang tinggi karena prospeknya sangat tinggi terhadap pemasaran tanaman hias. Disamping itu

dukungan lokasi wisata yang melegenda lainnya seperti Pantai Pasir Jambak, pemandian Lori Lubuk Minturun, dapat menjadikan Kecamatan Koto Tangah dapat meningkatkan potensi ekonominya baik dari sektor perdagangan maupun industri.

Sistem mina padi merupakan budi daya ikan yang memanfaatkan sawah sebagai sarana tempat pembibitan ikan. Ada dua sistem dalam mina padi yaitu palawija dan tumpang sari. Sistem Palawija adalah dengan budi daya ikan dilakukan setelah panen, sedangkan sistem tumpang sari dilakukan ketika padi berumur satu Minggu. Untuk di Kota Padang sendiri mina padi yang sering diterapkan adalah sistem palawija, karena sistem tersebut lebih menguntungkan dari tumpang sari dalam mengontrol air lebih bebas dan tidak perlu memikirkan akan berpengaruh terhadap tanaman padi. Budi daya ikan dengan mina padi ini sangat bermanfaat untuk petani selain bisa menambah nilai kegunaan dari sawah, juga dapat meningkatkan perekonomian.

Ngungun Saok merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat favorit bagi masyarakat Kota Padang dan sekitarnya. Objek wisata ini dikelola oleh masyarakat setempat atau sekitar lokasi wisata. Air Terjun Ngungun Saok memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pantai Morgan Bangau Putih Parupuk Tabiang merupakan destinasi wisata baru dimana menyuguhkan pemandangan pantai yang masih sepi dan tenang. Di sekitar pantai terdapat usaha kuliner seperti gulai ikan karang, selanjutnya karena masih baru, maka potensi ekonomi penduduk sekitar pantai belum terlalu menggeliat di sekitar kawasan ini.

Di Kecamatan Kuranji potensi yang dapat dikembangkan antara lain Kampung Adat dan Objek Wisata Lubuk Tampuruang. Kampung Adat Kuranji memiliki potensi ekonomi karena terdapatnya kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan di sekitar rumah adat. Air terjun Lubuk Tempurung terletak di daerah Guo Kuranji. Potensi yang ada di Lubuk Tampuruang yaitu panorama alam dan air terjun. Di bukit-bukitnya terdapat ladang-ladang masyarakat yang ditanami dengan tanaman tua seperti durian, rambutan, pala, pinang dan berbagai jenis kayu-kayuan.

Di Kecamatan Pauh potensi yang dapat dikembangkan antara lain Kampung Manggis, Kampung Jamur, serta potensi pariwisata antara lain Sungai Biru Mande Rubiah Batu Busuak, Kampung Inggris, Ekowisata Sungkai Green Park (Pauh) serta Wisata Air Terjun Sikayan Balumuik. Daerah Kecamatan Pauh merupakan salah satu daerah yang potensi pertaniannya besar di Kota Padang karena itu sesuai dengan RTRW Kota Padang maka wilayah Kecamatan Pauh merupakan Kawasan perkebunan pengembangan budi daya pertanian kota. Hasil komoditi yang ada di kecamatan ini juga cukup banyak antara lain manggis, padi sawah dan palawija, selain itu hasil perkebunan berupa buah dan sayur juga banyak mendominasi kegiatan masyarakat. Dengan melihat nilai tingkat daya saing, sumbangan terhadap pendapatan atau perekonomian masyarakat maka komoditi manggis merupakan **komoditi** unggulan Kecamatan Pauh yang keterkaitannya dengan sektor lain dalam pengembangan ekonomi sangat besar. Disamping itu sektor pertanian tersebut dapat menciptakan lapangan kerja serta dapat memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pauh dimana komoditi tersebut sudah menunjukkan daya saing yang tinggi karena

permintaan ekspor tinggi bahkan berdasarkan informasi dari bagian UPTD komoditi manggis sudah diminta dan belum sempat diolah. Mesin pengolah belum dimanfaatkan karena tingginya permintaan pasar.

Di wilayah kampung manggis terdapat Potensi tanaman manggis yang sangat luas sekitar 200 ha dimana hasil Produksi, di Tahun 2020 yakni 11.575 Ton. Untuk Tahun 2021 disiapkan 1.400 bibit manggis. Hanya saja, belum terdapat pasar untuk memasarkan buah manggis yang tidak lolos seleksi untuk ekspor ke china dan belum ada pengolahan buah manggis. Disini juga terdapat budidaya jamur.

Kawasan Sungkai mempunyai potensi sumber daya lokal yang bisa dikembangkan dengan konsep pertanian alami dan pertanian terpadu (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan rakyat, agroforestri, perikanan darat). Kawasan Sungkai potensial sebagai kampung Tematik dan Ekowisata Unggulan di Wilayah Timur Kota Padang. Komunitas Potensial untuk Destinasi Ekowisata Sungkai antara lain Rumah Pintar Sungkai, P4S Sungkai Permai, Kelompok Tani Sungkai Permai, *Youth English Camp Sungkai*, Komunitas Wirausaha Muda Pertanian Sungkai dan Sanggar Seni dan Budaya Sungkai Sakato. Dampak secara ekonomi sudah ada memberikan nilai manfaat, namun manfaat ekonomi masih skala mikro.

Sungai Biru Mande Rubiah serta Wisata Air Terjun Sikayan Balumuik memiliki potensi wisata alam yang menakjubkan. Jika lokasi wisata air terjun itu bisa dilewati kendaraan, maka Sarasah Sikayan Balumuik akan menjadi salah satu objek wisata alam yang banyak dikunjungi para wisatawan. Baik lokal maupun mancanegara.

Di Kecamatan Nanggalo potensi yang dapat dikembangkan yaitu Kampung Tematik Lobang Jepang. **Lubang Jepang Gunung Pangilun** adalah salah satu kawasan Pertahanan Jepang ketika menjajah Indonesia yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat pada era Perang Dunia II, khususnya sekitar tahun 1942-1945. Bangunan pertahanan Jepang ini berada di kawasan perbukitan Gunung Pangilun. Kondisi area nya yang berada di atas bukit merupakan kondisi yang sangat cocok untuk pertahanan dan mengawasi kawasan penduduk yang berada di bawahnya pada saat itu. Selain itu di puncak bukit dapat diamati pesisir pantai barat Padang dan Kota Padang secara menyeluruh. Potensi ekonomi masyarakat sekitar belum terlihat karena belum adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar lokasi.

2. Cluster Wilayah II

Cluster Wilayah II meliputi Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung

a. Kampung Tematik

Penetapan Kampung tematik pada masing-masing kecamatan di Cluster Wilayah II dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6.5. Potensi Kampung Tematik di Cluster Wilayah II

No	Nama	Kecamatan	Kelurahan	Potensi Pengembangan
1	Kampung Daur Ulang Sampah dan Seribu Keripik	Lubuk Kilangan	Batu Gadang	Kerajinan dari Bahan Sampah
2	Kampung Wisata Bukit Nobita	Lubuk Begalung	Batung Taba Nan XX	Wisata Alam
3	Kampung Ikan Hias	Bungus Teluk Kabung	Bungus Timur	budidaya ikan hias

b. Tujuan Wisata Wilayah Timur Kota

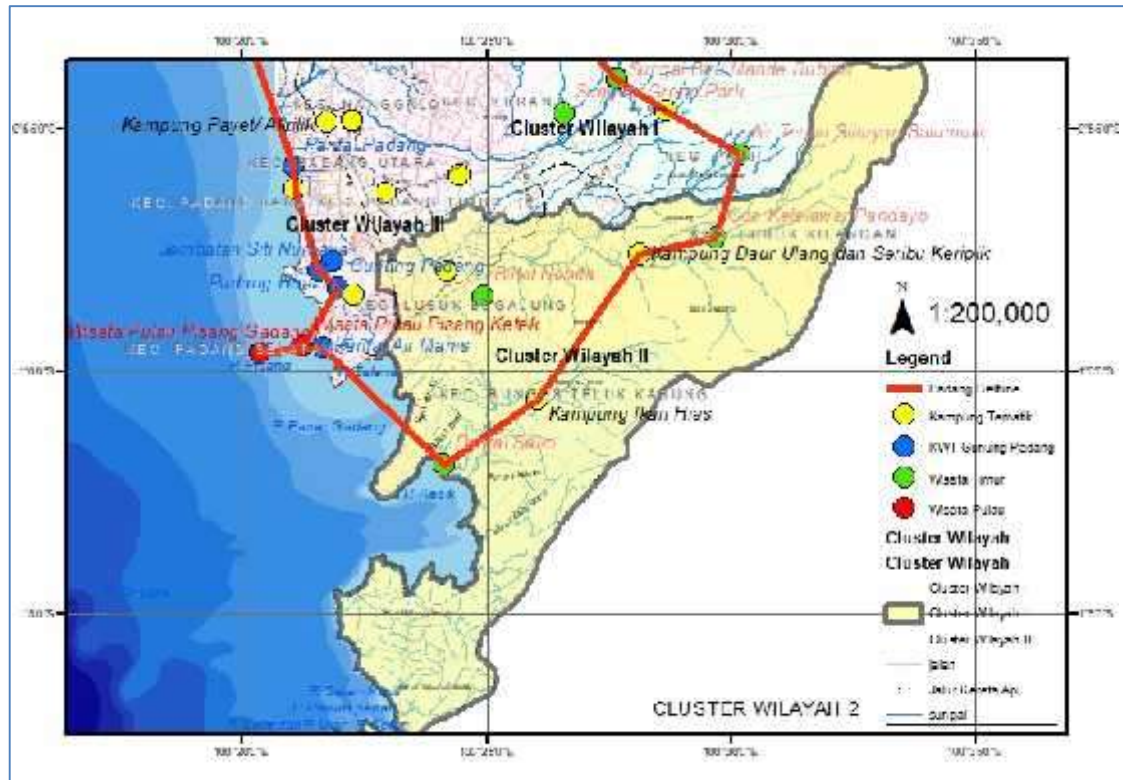
Penetapan Tujuan Wisata Wilayah Timur Kota pada masing-masing kecamatan di Cluster Wilayah II dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.6. Potensi Wisata Wilayah Timur Kota di Cluster Wilayah II

No	Nama	Kecamatan	Kelurahan	Potensi
1	Goa Kelelawar	Lubuk Kilangan	Sungai Lareh	Wisata Alam
2	Bukit Nobita	Lubuk Begalung	Kampung Jua Nan XX	Wisata Alam
3	Pantai Sako	Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	Wisata Alam

Selain dua tema diatas, potensi lain yang ada di CW II ini antara lain:

1. Sentra sulaman benang emas (Lubeg)
2. Sentra rotan (lubeg)
3. Kampung Bahari (Bungus)
4. Kampung Warna Warni Sei. Pisang (Bungus)
5. Wisata Lubuk Hitam (Bungus)
6. Pantai Nirwana (Bungus)
7. Pantai Caroline (Bungus)
8. Tujuan Wisata Pulau Sikuai (Bungus)
9. Tujuan Wisata Pulau Sibonta (Bungus)
10. Tujuan Wisata Pulau Bintagur (Bungus)
11. Tujuan Wisata Pulau Sinyaru (Bungus)
12. Tujuan Wisata Pulau Setan (Bungus)



Gambar 6-4 Cluster Wilayah II

Di Kecamatan Lubuk Kilangan potensi yang dapat dikembangkan antara lain Goa Kelelawar serta Kampung Daur Ulang Sampah dan Seribu Keripik. Goa Kelelawar di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, merupakan salah satu objek wisata yang masih eksotis. Berada di ketinggian sekitar 100 Mdpl, Goa alam atau yang sangat familiar disebut masyarakat sekitar dengan nama Goa Kalilawa itu, menyimpan berbagai potensi wisata yang layak dikunjungi wisatawan. Terkait pengembangannya, beberapa lembaga dan instansi yang ada di Kelurahan Indarung juga ikut mengembangkan potensi wisata yang ada di Goa Kelelawar, salah satunya adalah PT Semen Padang .

Potensi Ekonomi yang ada di Kampung Daur Ulang Sampah dan Seribu Keripik antara lain terdapat 15 pelaku usaha makanan ringan/keripik, terdapat bank sampah dan kerajinan dari bahan sampah, juga terdapat kerajinan dari bahan akrilik, membatik, menyulam dan menenun songket. Selain itu, juga telah ada bantuan CSR dari PLN UIP Sumbagteng.

Di Kecamatan Lubuk Begalung potensi yang dapat dikembangkan antara lain Objek Wisata Bukit Nobita, kampung Wisata Bukit Nobita, Sentra Sulaman Benang Mas dan Sentra Rotan. Bukit Nobita menawarkan keindahan alam yang sangat luar biasa. Terlebih di atas Bukit Nobita sudah dibangun sejumlah fasilitas seperti replika kapal besar dan juga kolam renang. Replika kapal besar ini bisa menjadi ikon dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang ke sini. Kampung Wisata Bukit Nobita sudah menjadi tujuan wisata, hanya saja dari segi peningkatan ekonomi masyarakat belum optimal.

Produk Sulaman Benang emas merupakan unggulan Kecamatan Lubuk Begalung yang keterkaitannya dengan sektor lain dalam pengembangan ekonomi sangat besar. Disamping itu industri sulaman benang emas dapat menyerap tenaga kerja serta dapat memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di kecamatan Lubuk Begalung. Industri kerajinan sulaman benang emas seperti usaha Sekuntum Bunga, CV. Modelman, Putri Sari Pelaminan, Nurbaiti, Karya Indah, Usaha Sejati, Usaha Mar, Wani Indah, Usaha Ibu, Ria Ayu, Leni dan lain-lain dikecamatan Lubuk Begalung dapat mendorong berkembangnya sektor lain diantaranya sektor pariwisata. Disamping industri sulaman benang emas ada juga industri lain yang potensinya dominan seperti kerajinan rotan.

Di Kecamatan Bungus Potensi yang dapat dikembangkan antara lain Kampung Ikan Hias, Kampung Bahari, Kampung Warna Warni, serta untuk potensi wisata alam antara lain Wisata Lubuk Hitam, Pantai Sako, Pantai Nirwana, Pantai Caroline, Tujuan Wisata Pulau Sikuai, Tujuan Wisata Pulau Pasumpahan, Tujuan Wisata Pulau Sirandah, Tujuan wisata Pulau Sibonta, Tujuan Wisata Pulau Bintagur, Tujuan Wisata Pulau Sinyaru, Tujuan Wisata Pulau Setan. Di Kampung Ikan Hias sarasah terdapat 15 pelaku budidaya ikan hias. Akan tetapi Sarana produksi banyak yang belum layak/masih sangat sederhana.

3. Cluster Wilayah III:

Cluster Wilayah III meliputi Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Barat dan kecamatan Padang Utara.

a. Kampung Tematik

Penetapan Kampung tematik pada masing-masing kecamatan di Cluster Wilayah I dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.7. Potensi Kampung Tematik di Cluster Wilayah III

No	Nama	Kecamatan	Kelurahan	Potensi Pengembangan
1	Kampung Wisata Bukit Matoa	Padang Selatan	Mata Air	Wisata Alam
2	Kampung Eko Enzim	Padang Timur	Andalas	Daur Ulang Sampah
3	Kampung Nelayan Elo Pukek	Padang Barat	Purus	Wisata Atraksi
4	Kampung Akrilik	Padang Utara	Gunung Pangilun	Kerajinan

b. Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang

Penetapan KWT Gunung Padang pada masing-masing kecamatan di Cluster Wilayah III dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.8. Potensi Kawasan Wisata Terpadu Gubung Padang di Cluster Wilayah III

No	Nama	Kecamatan	Kelurahan	Potensi
1	Heritage	Padang Selatan	Batang Arau	Wisata Sejarah (Bangunan Cagar Budaya)
2	Pantai Air Manis	Padang Selatan	Air Manis	Wisata Alam
3	Gunung Padang	Padang Selatan	Bukit Gado-Gado	Wisata Alam
4	Pantai Padang	Padang Barat	Purus	Wisata Alam
5	Jembatan Siti Nurbaya	Padang Selatan	Batang Arau	Wisata Legenda

c. Kawasan Wisata Pulau

Kawasan Wisata Pulau akan dikembangkan pada dua pulau berikut:

Tabel 6.9. Potensi Kawasan Wisata Pulau di Cluster Wilayah III

No	Nama	Kecamatan	Kelurahan	Potensi
1	Pulau Pisang Ketek	Padang Selatan	Air Manis	Wisata Alam
2	Pulau Pisang Gadang	Padang Selatan	Air Manis	Wisata Alam

Selain yang disebutkan diatas, potensi lain yang ada di Cluster Wilayah III ini antara lain adalah pengembangan Kampung Payet di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara dengan kategori potensi kerajinan.



Gambar 6-5 Cluster Wilayah III

Orientasi kegiatan ekonomi di Kecamatan Padang Selatan berbasis pada sektor pariwisata. Sektor wisata bahari dapat menciptakan lapangan kerja serta dapat memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Padang Selatan dimana destinasi wisatanya sudah menunjukkan daya saing yang tinggi karena sudah merupakan daerah tujuan wisata yang melegenda di daerah Minang dengan lokasi Batu Malin Kundang dan Jembatan Siti Nurbaya Di kecamatan Padang Selatan Potensi yang dapat dikembangkan antara lain Kampung Wisata Bukit Matoa, Kota Tua/*Heritage*, Pantai Air Manis, Gunuang Padang, Jembatan Siti Nurbaya, Tujuan Wisata Pulau Pisang Ketek dan Tujuan Wisata Pulau Pisang

Gadang. Untuk Kawasan Bukit Matoa, potensi yang terdapat pada kawasan ini adalah potensi view Kota Padang.

Di Kecamatan Padang Timur, potensi yang dapat dikembangkan yaitu Kampung Eco Enzym. Disini terdapat pelaku daur ulang sampah dan terdapat masyarakat yang mengolah sampah menjadi produk kerajinan.

Di Kecamatan Padang Barat potensi yang dapat dikembangkan yaitu Pantai Padang. Potensi ekonomi yang terdapat di wilayah ini yaitu pemberdayaan hasil tangkapan nelayan pukek dan potensi wisata elo pukek.

Di kecamatan Padang Utara potensi yang dapat dikembangkan yaitu Kampung Tematik Payet dan Kampung Akrilik. Potensi ekonomi yang terdapat di wilayah ini yakni pelaku usaha kerajinan akrilik .

6.2.4 Penyeragaman RPJMN 2019-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dengan RPJMD Kota Padang 2019-2024

Untuk mencapai keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, maka dokumen RPJMN Tahun 2019-2024 dan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024. Untuk itu dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah Kota Padang, telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan dan 10 (sepuluh) program prioritas Provinsi Sumatera Barat.

Agenda Pembangunan RPJMN 2019-2024 :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Prioritas pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat secara nasional, selaras dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, mental dan karakter. Selaras juga dengan prioritas pembangunan daerah Kota Padang Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan. Sedangkan untuk perumahan dan pemukiman selaras dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat pada prioritas pembangunan infrastruktur.

Prioritas pada dimensi pembangunan sektor unggulan nasional, juga selaras dan menjadi prioritas pembangunan daerah karena merupakan potensi unggulan daerah yang diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi yang terkait dengan kedaulatan pangan, pengembangan energi, pengembangan kemaritiman dan kelautan, serta pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi.

Prioritas pada dimensi pemerataan dan kewilayahan yang terkait dengan pembangunan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah secara nasional, selaras dengan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengentaskan daerah tertinggal, pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran. Begitu juga selaras prioritas pembangunan Kota Padang Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan Dan Penguatan Kemitraan Dalam Perdagangan, serta Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Potensi Sumberdaya Dan Kearifan Lokal.

Selanjutnya keselarasan antara prioritas berdasarkan dimensi pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada Tabel 6-.

Tabel 6-10 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Padang

No	Prioritas Pembangunan Nasional Berdasarkan 3 Dimensi Pembangunan	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Pembangunan Kota Padang
1	Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pendidikan Kesehatan Perumahan Mental dan Karakter Peningkatan kualitas kependudukan	Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan.
2	Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri	Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur/Sarana Prasarana Perkotaan Dan Transportasi Kota Yang Berbasis Ramah Lingkungan. Peningkatan Penataan Ruang Dan Pembangunan Kawasan

No	Prioritas Pembangunan Nasional Berdasarkan 3 Dimensi Pembangunan	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Pembangunan Kota Padang
		Pengembangan kemaritiman dan kelautan Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	Permukiman Yang Ramah Lingkungan. Optimalisasi Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas Cerdas Bencana. Peningkatan Iklim Investasi Dan Kemudahan Berusaha. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
3	Dimensi pemerataan dan kewilayahan Antar kelompok Pendapatan Antar wilayah: (Desa, Pinggiran, Luar Jawa, Kawasan Timur)	Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal	Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan Dan Penguatan Kemitraan Dalam Perdagangan. Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Potensi Sumberdaya Dan Kearifan Lokal.

Indikasi rencana program prioritas merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh dan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan indikator kinerja tersebut dikelompokkan ke dalam 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan : Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Arsip. Terkait dengan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama dengan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan untuk mencapai target tersebut. Pada target kinerja diperkirakan *output* dan *outcome* yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Penulisan *outcome* selain *output* pada indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam merumuskan kegiatan-kegiatan pada setiap program prioritas pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta Perangkat Daerah penanggung jawabnya.

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.3.1 Program Pembangunan Daerah pencapaian tujuan pembangunan Kota Padang Tahun 2019-2024.

Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Selama periode RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024, program prioritas pembangunan Kota Padang adalah :

1. Peningkatan dan pengembangan kualitas sistem pendidikan karakter berbasis keluarga dan lingkungan yang sehat.

Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat.

2. Peningkatan dan penataan infrastruktur/sarana prasarana perkotaan dan transportasi kota berbasis ramah lingkungan

Prioritas ini diarahkan untuk peningkatan layanan transportasi perkotaan, pengurangan kawasan yang terdampak banjir dan genangan, terciptanya ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat, terwujudnya kualitas lingkungan yang berkelanjutan di kota padang, terwujudnya kota padang yang bersahabat dan menghargai kearifan lokal.

3. Peningkatan penataan ruang dan pembangunan kawasan permukiman yang ramah lingkungan

Prioritas ini diarahkan untuk terlaksananya penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan rtrw, terwujudnya sanitasi perkotaan secara terpadu, peningkatan layanan air minum, dan penataan kawasan kumuh permukiman berwawasan lingkungan secara partisipatif.

4. Pembangunan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan ekonomi kreatif

Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota padang yang berkualitas, meningkatkan pertumbuhan sub sektor ekonomi kreatif, peningkatan transaksi ekonomi kreatif, peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan peningkatan perluasan akses dan kesempatan semua pemangku kepentingan dalam perekonomian.

5. Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan penguatan kemitraan dalam perdagangan

Prioritas ini diarahkan untuk peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dan menjadikan sektor perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian serta menjadikan negara-negara iora sebagai tujuan ekspor utama.

6. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi sumberdaya dan kemitraan

Prioritas ini diarahkan untuk peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap pdrb, terwujudnya kota padang menjadi tujuan wisata halal yang berdaya saing serta peningkatan lama tinggal wisatawan.

7. Optimalisasi mitigasi bencana berbasis komunitas cerdas bencana

Prioritas ini diarahkan untuk menurunkan indeks resiko bencana kota padang, meningkatkan kelurahan tangguh dan tanggap bencana, menurunkan tingkat resiko bencana, meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana dan menurunkan jumlah kerugian material dan jiwa akibat kebakaran.

8. Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem budaya kerja dan pemanfaatan teknologi informasi

Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi kota padang, meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, meningkatkan kinerja birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

9. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha

Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan investasi, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan lapangan pekerjaan.

Tabel 6-11 Program Pembangunan Daerah Selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2019-2024	Sasaran Pembangunan	Indikator	Program	OPD
1.	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	4. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.	Menjadikan sektor perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil / menengah serta ekonomi berbasis digital Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
						Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan
						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan
						Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskop UKM
		Program Pengembangan UMKM				Diskop UKM	
				Menjadikan kota Padang sebagai pusat Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Usaha ekonomi kreatif (E-Kraf)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata			
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata			
			5. Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan Dan	menjadikan sektor perdagangan sebagai		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2019-2024	Sasaran Pembangunan	Indikator	Program	OPD
			Penguatan Kemitraan Dalam Perdagangan.	penggerak utama perekonomian	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
						Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan
						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan
						Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan
				menjadikan kota Padang sebagai pusat ekonomi kreatif	pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (E-Kraf)		
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskop UKM
						Program Pengembangan UMKM	Diskop UKM
			6. Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Potensi Sumberdaya Dan Kearifan Lokal.	mewujudkan Kota Padang menjadi Tujuan Pariwisata yang unggul dan berdaya saing	kontribusi sektor pariwisata kota Padang terhadap Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
						Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2019-2024	Sasaran Pembangunan	Indikator	Program	OPD
2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	3. Peningkatan penataan ruang dan pembangunan kawasan pemukiman yang ramah	Meningkatnya Pemukiman Layak Huni	Persentase Perumahan Pemukiman layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim
						Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perkim
				meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sanitasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2019-2024	Sasaran Pembangunan	Indikator	Program	OPD
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
					luas kawasan kumuh yang ditangani	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perkim
3	SDM berkualitas dan berdaya saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	1. Peningkatan dan pengembangan kualitas sistem pendidikan karakter berbasis keluarga dan lingkungan yang sehat	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	Rata – rata lama sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Harapan lama sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	1. Peningkatan dan pengembangan kualitas sistem pendidikan karakter berbasis keluarga dan lingkungan yang sehat	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	Rata – Rata Lama sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Harapan lama sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2019-2024	Sasaran Pembangunan	Indikator	Program	OPD
						Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
5	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	2. Peningkatan dan penataan infrastruktur/sarana prasarana perkotaan dan transportasi kota yang ramah lingkungan	meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
						Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
						Program penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PUPR
						Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
						Program Pengembangan jasa Konstruksi	Dinas PUPR
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
						Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas PUPR
6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	7. Optimalisasi mitigasi bencana berbasis komunitas cerdas bencana	meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana	persentase peningkatan kelurahan tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
						Program Pencegahan , Penanggulangan,	BPBD

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2019-2024	Sasaran Pembangunan	Indikator	Program	OPD
						penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
7	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem budaya kerja dan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	semua OPD
				meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Organisasi
					Nilai laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan
			9. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha	meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Semua OPD Pelayanan Publik
					Indeks Kemudahan Perizinan Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
					indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo

Selain dukungan terhadap prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi sebagaimana tabel diatas, Perubahan RPJMD Kota Padang juga mendukung Rencana Pengembangan Sektor Strategis Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Pengembangan Sektor Pertanian

Pengembangan Kampung Manggis di kecamatan Pauh dan Pengembangan Kawasan Agroforist di Lubuk Minturun diarahkan untuk pengembangan kampung Tematik dalam upaya mengangkat ekonomi masyarakat

2. Pengembangan Sektor Peternakan

Pengembangan kawasan peternakan seluas 92,01 Ha tersebar di kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung. Surat Keputusan Gubernur No. 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang penetapan kawasan pengembangan peternakan provinsi Sumatera Barat ditetapkan Kawasan pengembangan peternakan di Kabupaten/Kota Kota Padang antara lain”

- Ayam Potong (Koto Tangah, Pauh dan Kuranji)
- Ayam Buras (Koto Tangah)
- Itik (Koto Tangah dan Kuranji)

3. Pengembangan Sektor Industri

Pengembangan kawasan industri seluas kurang lebih 795,16 hektar terdiri, dengan sebaran sebagai berikut:

- i. Kawasan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan berada pada Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Bungus Teluk Kabung; dan Kecamatan Koto Tangah.
- ii. Sentra industri kecil dan menengah diarahkan tersebar di kecamatan yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa serta terbatas pada industri yang tidak mencemari lingkungan.

6.3.2 Program Unggulan Kota

Disamping pelaksanaan Program Prioritas, dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Padang juga melaksanakan Program Unggulan dengan rincian sebagai berikut:

1. Melanjutkan betonisasi jalan lingkungan, pengaspalan dan pelebaran jalan serta perbaikan drainase dan pengendalian banjir terpadu
2. Meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi, budaya kerja aparatur dan pelayanan publik
3. Melanjutkan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang, pulau-pulau kecil, wilayah timur kota Padang.

4. Melanjutkan penyelenggaraan pesantren Ramadhan, kegiatan keagamaan, seni budaya dan olahraga yang lebih berkualitas
5. Melanjutkan penataan angkutan umum dengan pembukaan koridor baru Trans Padang serta melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar pergerakan orang dan barang
6. Membangun 500 Ruang Kelas Baru untuk SD dan SMP
7. Merevitalisasi sarana prasarana olah raga tingkat RT/RW dan membuat taman kota perkecamatan serta membangun pusat kreatifitas dan inovasi pemuda (youth center)
8. Meningkatkan dana stimulan kecamatan minimal 1 Milyar, dan dana kelurahan minimal 100.000.000 serta Meningkatkan dana operasional RT, RW, Guru TPA/MDA, Imam Masjid.
9. Meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Kota Padang
10. Mendorong penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat penghasilan rendah
11. Membangun kampung tematik dalam pengembangan ekonomi lokal masyarakat berdasarkan potensi wilayah.

Selanjutnya penjelasan dan penjabaran indikator dari masing-masing Program Unggulan tersebut beserta target capaian sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan betonisasi jalan lingkungan, pengaspalan dan pelebaran jalan serta perbaikan drainase dan pengendalian banjir terpadu

Progul ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan dari pusat kota hingga ke pelosok daerah di Kota Padang, dengan tujuan utama untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran aktivitas masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi dan meningkatkan aktifitas ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6-12 Indikator dan Target Program Unggulan 1

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	SKPD
1	2	3	4	5	6	7		8	10	11	12
a	Panjang jalan kota yang dibangun	km	2,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
b	Panjang jalan kota yang dipelihara	km	20	4	4	4	7,5	4	4	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	SKPD
1	2	3	4	5	6	7		8	10	11	12
c	Panjang Drainase Kota Yang Dibangun	km	15,5	2,5	2,8	2,4	3	5,4	2,6	2,6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d	Panjang Drainase Kota Yang Dipelihara	km	25,3	7	7,2	3,4	5,15	5,5	4,9	4,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
e	Panjang jalan lingkungan yang dipelihara	km	210	42	46,76	42	32,04	42	42	42	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
f	Panjang Drainase Lingkungan yang dibangun	km	10	2	3,26	2	2,590	2	2	2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
g	Panjang Drainase Lingkungan yang dipelihara	km	1	0,2	0,77	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2. Meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi, budaya kerja aparatur dan pelayanan publik

Birokrasi merupakan wajah utama dari bentuk pelayanan aparatur pemerintahan kepada masyarakat, pada taraf pimpinan pusat terdapat 3 lembaga tinggi yang turut memantau kinerja daerah yakni BPK melalui penilaian Opini atas Laporan Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Kementerian dalam Negeri, melalui penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Kota Padang selalu berupaya untuk meraih predikat terbaik dari penilaian tersebut, yang mana kinerja terbaik mendapatkan *reward* dari pemerintah pusat berupa penambahan Dana Infrastruktur Daerah, pada tahun 2020 mendapatkan Dana DID tahun sebesar Rp. 58 Milyar, dan tahun 2021 sebesar Rp. 24 Milyar.

Tabel 6-13 Indikator dan Target Program Unggulan 2

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
a	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
b	Nilai AKIP	-	A	BB	BB	BB	A	A	A	Bagian Organisasi
c	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota	-	3,15	3,18	3,18	3,2	3,23	3,2	3,23	Bagian Tata Pemerintahan
d	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (IKM)	-	80,5	80,75	79,83	80	80,10	80,2	80,3	Bagian Organisasi

3. Melanjutkan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang, pulau-pulau kecil, wilayah timur Kota Padang

Kondisi Alam Kota Padang yang diapit oleh perbukitan dan pantai disebelah barat, menjadikan banyaknya potensi objek wisata yang dapat untuk dikembangkan. Pada dokumen RPJMD yang kemudian diperjelas dengan Renstra Perangkat Daerah, diharapkan pengembangan objek wisata dapat menjadi nilai tambah daya tarik kunjungan wisata di Kota Padang.

Tabel 6-14 Indikator dan Target Program Unggulan 3

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	SKPD
1	2	3	4	5	6	7		8	10	11	12
a	Jumlah fasilitas wisata di KWT Gunung Padang	unit	149	2	33	43	43 unit	16	39	49	Dinas Pariwisata
b	Jumlah pulau-pulau kecil dan pesisir pantai yang berkembang menjadi Objek Daerah Tujuan Wisata	DDTW	4	-	-	1	1	2	1	1	Dinas Pariwisata
c	Jumlah objek wisata wilayah timur Kota Padang yang dikembangkan	DDTW	4	-	1	1	1	3	1	1	Dinas Pariwisata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Melanjutkan penyelenggaraan pesantren Ramadhan, kegiatan keagamaan, seni budaya dan olahraga yang lebih berkualitas

Sesuai dengan misi Kota Padang “Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif, Inovatif Dan Berdaya Saing”, progul ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mencapai misi tersebut melalui pembinaan generasi muda melaui pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan bagi masyarakat dan dukungan Pemerintah Kota terhadap pembinaan olahraga.

Tabel 6-15 Indikator dan Target Program Unggulan 4

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
a	Jumlah siswa yang mengikuti pesantren ramadhan	siswa	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.Bagian Kesejahteraan Rakyat
b	Jumlah event keagamaan.	kali	43	9	9	8	9	8	9	Bagian Kesejahteraan Rakyat
c	Jumlah kegiatan seni dan budaya	kali	3	3	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
d	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	cabor	34	30	0	31	32	33	34	Dinas Pemuda dan Olahraga

5. Melanjutkan penataan angkutan umum dengan pembukaan koridor baru Trans Padang serta melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar pergerakan orang dan barang

Sebuah kota tidak akan terlepas dari kepadatan lalu lintas pada jam-jam sibuk, Kelancaran lalu lintas menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi kepada masyarakat. Upaya yang telah dilakukan antara lain penambahan penyediaan koridor transportasi massal setiap tahun.

Tabel 6-16 Indikator dan Target Program Unggulan 5

No	Program Unggulan	Satuan	Target RPJMD	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2024
1.	Jumlah koridor trans padang	Koridor	6	2	2	4	5	6		Penambahan Armada dan Feeder
2.	Jumlah pengurangan kawasan macet	Kawasan	9	3	2	1	1	1	1	1

Tabel 6-17 Rencana Koridor Trans-Padang

No	Koridor	Lintasan	Jumlah Armada	Jenis Kendaraan	Rencana Operasi
1	K1	Pusat Kota - Lubuk Buaya - Batas Kota	34	Bus Sedang /Bus Besar	2014
2	K2	Pusat Kota- Bungus Teluk Kabung	24	Bus Sedang	2023
3	K3	Pusat Kota - Pusat Pemerintahan/ Aia Pacah	32	Bus Sedang	2022
4	K4	Terminal Anak Air - By Pass - Teluk Bayur	25	Bus Sedang /Bus Besar	2020
5	K5	Pusat Kota - Indarung	26	Bus Sedang	2021
6	K6	Pusat Kota - Kampus UNAND Limau Manis	25	Bus Sedang	2021
Jumlah			166		

6. Membangun Ruang Kelas Baru untuk SD dan SMP

Sistem sekolah 2 shift masih terjadi di Kota Padang, hal ini sebagai akibat dari masih kurangnya jumlah ruang kelas yang ada, pada tahun 2020 telah dialokasikan anggaran untuk mengerjakan target Progul ini, namun dikarenakan adanya kebijakan untuk pemulihan dampak covid 19, pada tahun 2020 dan 2021 alokasi anggaran ini menjadi salah satu bagian yang difokuskan. Untuk melengkapi jumlah ruang kelas, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Padang mengajukan usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebanyak 58 Milyar untuk mengejar target Program Unggulan pembangunan RKB ini.

Tabel 6-18 Indikator dan Target Program Unggulan 6

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
a	Jumlah RKB yang Dibangun	Unit kelas	500	76	38	109	73	280	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

7. Merevitalisasi sarana prasarana olah raga tingkat RT/RW dan membuat taman kota perkecamatan serta membangun pusat kreatifitas dan inovasi pemuda (*youth center*)

Salah satu upaya pemerintah kota untuk mewujudkan visi masyarakat Madani adalah melalui pemberian prasarana untuk kreativitas Pemuda. Disamping itu revitalisasi sarana olahraga di tingkat RT/RW turut menjadi prioritas untuk difasilitasi pada Rencana Pembangunan ini.

Tabel 6-19 Indikator dan Target Program Unggulan 7

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	SKPD
1	2	3	4	5	6	7		8	10	11	12
a	Jumlah sarana prasarana olah raga tingkat RT/RW yang direvitalisasi	lokasi	20	0	0	5		5	10	0	Dinas Pemuda dan Olahraga/ Kecamatan- Kecamatan
b	Jumlah taman kota yang dibangun	lokasi	12	4	0	2		7	3	0	Dinas Lingkungan Hidup/ Dinas Perkim/ CSR Kecamatan- Kecamatan
c	Jumlah youth center yang disediakan (Pemanfaatan gedung Bagindo Aziz Chan / kantor Dinas Pendidikan)	lokasi	1	0	0	0	Finalisasi Desain	1	0	0	- Dinas Pemuda dan Olahraga - Kecamatan- Kecamatan

8. Meningkatkan dana stimulan kecamatan minimal 1 Milyar, dan dana kelurahan minimal 100.000.000 serta Meningkatkan dana operasional RT, RW, Guru TPA/MDA, Imam Masjid

Dana stimulan kecamatan dimaksudkan untuk mendukung operasional dalam pemberdayaan masyarakat di kecamatan, dapat dikembangkan untuk kegiatan pengembangan kreativitas ekonomi, maupun untuk peningkatan prasarana di kecamatan. Disamping itu pendidikan agama anak-anak yang kerap dilakukan di mesjid mesjid melalui TPA perlu untuk ditingkatkan operasionalnya guna meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik.

Tabel 6-20 Indikator dan Target Program Unggulan 8

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
a	Dana stimulan kecamatan yang dianggarkan	Rp.	1 milyar	1 milyar	1 milyar	1 milyar	1 milyar	1 milyar	1 milyar	Kecamatan
b	Dana kelurahan yang dianggarkan	Rp.	100 juta	100 juta	100 juta	100 juta	100 juta	100 juta	100 juta	Kecamatan
c	Operasional RT/RW:	Σ	@	Σ	@	Σ	@	Σ	@	Kecamatan
		unit	Rp.	3.412	420.000	3.412	280.000	3.412	280.000	
		unit	Rp.	885	480.000	885	340.000	885	375.000	
		unit	Rp.	885	480.000	885	340.000	885	375.000	
		unit	Rp.	885	480.000	885	340.000	885	375.000	
c	Guru TPQ/TQA, MDT/MDTA:	Σ	@	Σ	@	Σ	@	Σ	@	Kecamatan
		Sertifikasi A	Rp.	865	650.000	365	500.000	365	550.000	
		Sertifikasi B	Rp.	1.112	500.000	1.112	350.000	1.112	400.000	
		Sertifikasi C	Rp.	1.800	400.000	2.300	250.000	2.300	300.000	
		Sertifikasi C	Rp.	1.800	400.000	2.300	250.000	2.300	300.000	
d	Imam Masjid/ Mushala:	Σ	@	Σ	@	Σ	@	Σ	@	Kecamatan
		org	Rp.	1.005	200.000	650	150.000	650	150.000	

9. Meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Kota Padang

Kota Padang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang terus berkembang tentunya akan membutuhkan investasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Regulasi perizinan menjadi salah satu prasyarat dalam memulai usaha / bisnis, indeks pelayanan perizinan menjadi salah satu tolak ukuran dalam menilai perbaikan pelayanan perizinan pada unit pelayanan perizinan di perangkat daerah Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 6-21 Indikator dan Target Program Unggulan 9

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
a	Indeks pelayanan perizinan	-	100	71,398	71,398	71,398	75,00	78,00	80,00	DPMPSTP

10. Mendorong penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat penghasilan rendah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat melalui mendorong dunia usaha untuk mengembangkan dan memasarkan perumahan bersubsidi dengan target utama masyarakat

penghasilan rendah. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan kualitas hunian dan kesehatan masyarakat melalui penataan perumahan dan permukiman yang memenuhi syarat ramah lingkungan.

Tabel 6-22 Indikator dan Target Program Unggulan 10

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
a	Jumlah fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah	unit	5000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

11. Membangun kampung tematik dalam pengembangan ekonomi lokal masyarakat berdasarkan potensi wilayah

Kampung tematik menjadi salah satu upaya untuk mendorong ekonomi masyarakat dengan fokus pemberdayaan pada potensi kampung/ daerah tersebut, oleh karena itu perangkat daerah terkait akan mengambil bagian dalam mengembangkan potensi kampung tematik seperti aksesibilitas, bantuan permodalan usaha kecil, serta pembinaan dan pelatihan untuk mengajak masyarakat dalam mengolah potensi yang ada.

Tabel 6-23 Indikator dan Target Program Unggulan 11

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
A	Jumlah Kampung Tematik yang terbentuk	lokasi	11	2	2	4	2	3	0	Perangkat Daerah Terkait

6.3.3 Program Pembangunan Inklusif Melalui Konsep Padang Inspiratif

Diratifikasinya Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan diikuti oleh pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat perubahan paradigma dan persepsi dari belas kasih (*charity based*) menjadi pemenuhan hak (*human-rights based*) terhadap Penyandang Disabilitas.

Dengan terjadinya perubahan cara pandang tersebut dalam melihat isu disabilitas, pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Sosial semata, namun oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, bahkan juga oleh Pemerintah Daerah dengan semua perangkat daerah terkaitnya. Pendekatan HAM ini juga mendesak pemerintah membuat kebijakan untuk menciptakan masyarakat inklusif serta mengakomodir beragam karakteristik manusia. Oleh karenanya, perlu terdapat suatu sistem perencanaan,

penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara terpadu.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia, cukup banyak diterbitkannya berbagai peraturan pelaksana dari Undang-undang tersebut guna memastikan pengarusutamaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pembangunan. Salah satu peraturan turunan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, juga sudah diterbitkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kedua peraturan ini mengamanatkan perlu segera disiapkannya Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas di tingkat provinsi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ke dalam program/kegiatan masing-masing. Hal yang sama juga diamanatkan oleh Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Menyikapi hal tersebut dan untuk mewujudkan pendekatan perencanaan teknokratik, partisipatif, holistik, integratif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dilahirkan konsep inklusif pelayanan publik di Kota Padang yang disebut dengan: Padang Inspiratif (Inklusi Disabilitas dan Gender dalam Pembangunan Partisipatif). Padang Inspiratif (Inklusi Disabilitas dan Gender dalam Pembangunan Partisipatif) adalah inisiatif dan inovasi pemerintah Kota Padang untuk pengarusutamaan hak disabilitas secara konkrit dalam berbagai program/kegiatan pembangunan Kota Padang yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multi sektor (melibatkan semua OPD terkait Pemko dan Masyarakat).

Padang Inspiratif sebagai upaya pengarusutamaan disabilitas secara kolektif dan partisipatif di Kota Padang bertujuan untuk:

1. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran Pembangunan Kota Padang yang responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas;
2. Terselenggaranya pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas dan untuk semua;
3. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan masyarakat lainnya; dan
4. Menciptakan lingkungan yang inklusif disabilitas dan ramah untuk semua.

Padang inspiratif diwujudkan dalam bentuk perencanaan pembangunan inklusif dan partisipatif dengan pendekatan *twin-track*. *Twin-track* berarti pendekatan melalui mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah ada (*mainstreaming*) dan mekanisme tersendiri atau tematik (*targeting*). Dengan

demikian pelibatan aktif penyandang disabilitas didorong mulai dari Rakorbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang RKPD tingkat Kota dan Musrenbang RPJMD. Disamping itu, Musrenbang Tematik Disabilitas juga dilaksanakan setiap tahunnya dengan peserta dari perwakilan semua Organisasi Penyandang Disabilitas dan LSM yang fokus ke isu inklusi dan kesetaraan gender yang ada di Kota Padang serta stakeholder terkait lainnya. Musrenbang tematik disabilitas pertama dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 2021 di Kota Padang meski masih terbatas.

Dalam musrenbang tematik disabilitas dan gender setiap tahun akan difokuskan isu-isu:

1. Pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas;
2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas;
3. Pewujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas;
4. Pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas dan kelompok perempuan marginal; dan
5. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dan kelompok perempuan marginal.

Isu- isu tersebut didiskusikan dan dirumuskan dalam Musrenbang Tematik Disabilitas dan Gender setiap tahun terkait identifikasi masalah, strategi pemecahan masalah, target capaian, bentuk kegiatan untuk dapat masuk ke Rencana Kerja Pemerintah Kota, indikator capaian, kerangka waktu pelaksanaan dan Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab. Berbagai permasalahan dan kebutuhan yang disuarakan langsung oleh masyarakat disabilitas dari hasil pelaksanaan musrenbang tersebut, diakomodir dalam Rancangan Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 dan secara lebih konkrit ditampung dalam berbagai program kegiatan Perangkat Daerah terkait.

Padang Inspiratif sebagai bagian dari proses perencanaan yang *partisipatif, holistic dan integrative* dalam upaya mendukung pencapaian target visi, misi kota dan SDGs dalam mewujudkan kota yang inklusif, akan memberikan manfaat untuk dampak kehidupan masyarakat dan pembangunan kota antara lain :

1. **Meningkatnya kesadaran masyarakat** tentang isu dan hak disabilitas,
2. **Terlibatnya** penyandang disabilitas secara aktif dalam **proses perencanaan** pembangunan kota;
3. Tersedianya **basis data disabilitas** yang reliable dan dapat diakses dengan mudah;
4. Terasilinasinya penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam **mengakses layanan publik**

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019-2024



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD KOTA
PADANG TAHUN 2019-2024

Daftar Isi

7	BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	7-1

Daftar Tabel

Tabel 7-1	Data Realisasi dan Proyeksi Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019-2024.....	7-3
Tabel 7-3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Padang Tahun 2021 s/d Tahun 2024	7-5

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kota Padang menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten untuk melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Demikian juga peraturan yang sifatnya mandatory sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi urusan Pendidikan minimal 20 % dari Belanja Daerah, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Urusan Kesehatan minimal 10 % dari Belanja Langsung, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) Pasal 230 yang menyatakan pemerintah kabupaten atau kota wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang ditindaklanjuti dengan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Di situ dinyatakan bahwa anggaran kelurahan di kawasan kota yang tidak memiliki desa minimal 5 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping itu juga wajib memenuhi alokasi anggaran untuk anggaran infrastruktur yang bersumber dari DAU sebesar 25% / Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 25 % dari DAU, Anggaran Peningkatan Kapasitas SDM sekurang-kurangnya 0,16% dari total Belanja Daerah, serta Anggaran Penguatan APIP sebesar 0,3-0,9% dari Total Belanja Daerah.

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (supporting).

Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja Perangkat Daerah berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap Perangkat Daerah beberapa tahun sebelumnya. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya.

Dalam hal ini pola pengeluaran per Perangkat Daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah yang sudah di perhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun, baik untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga, maupun Belanja Transfer. Adapun Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 disajikan pada Tabel 7-1.

Selanjutnya pada tabel **Error! Reference source not found.** disajikan Perubahan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Padang untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 7-1 Data Realisasi dan Proyeksi Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019-2024

Kode	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	2.350.116.615.607	2.167.554.544.656	2.519.934.973.332	2.585.904.500.866	2.799.821.675.132	2.879.063.551.886
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	546.108.570.690	499.825.024.810	808.184.679.649	989.902.818.000	1.001.015.450.000	1.026.953.140.000
4.1.01	Pajak Daerah	388.095.396.286	344.680.260.161	640.526.276.598	770.526.276.598	783.415.500.000	787.016.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	48.243.550.480	37.157.893.443	69.307.060.256	96.049.541.402	86.599.900.000	85.045.235.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.711.218.378	12.326.936.083	12.747.769.449	20.000.000.000	20.400.000.000	28.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	98.058.405.546	105.659.935.123	85.603.573.346	103.327.000.000	110.600.050.000	126.891.905.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.696.988.903.351	1.551.955.503.097	1.575.943.393.683	1.473.655.482.866	1.676.806.225.132	1.727.110.411.886
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.576.511.032.667	1.458.585.538.356	1.467.289.885.817	1.367.001.975.000	1.566.953.112.030	1.613.961.705.391
4.2.01.x	Dana Perimbangan	1.524.369.871.667	1.414.136.103.356	1.441.907.890.817		1.541.858.196.150	1.588.113.942.035
4.2.01.x.a	Dana Transfer Umum	1.223.594.595.526	1.134.703.936.865	1.102.183.826.817		1.145.504.594.490	1.179.869.732.325
4.2.01.x.a.i	Dana Alokasi Umum	1.176.301.985.000	1.061.387.887.000	1.044.871.353.000	1.044.871.353.000	1.076.217.493.590	1.108.504.018.398
4.2.01.x.a.ii	Dana Bagi Hasil	47.292.610.526	73.316.049.865	57.312.473.817	57.261.143.000	69.287.100.900	71.365.713.927
4.2.01.x.b	Dana Transfer Khusus	300.775.276.141	279.432.166.491	339.724.064.000		396.353.601.660	408.244.209.710
4.2.01.x.b.i	Dana Alokasi Khusus	300.775.276.141	279.432.166.491	339.724.064.000	220.420.044.000	396.353.601.660	408.244.209.710
4.2.01.x.b.i.a	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		68.878.598.492	118.740.033.000		59.432.696.410	61.215.677.302
4.2.01.x.b.i.b	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		210.553.567.999	220.984.031.000		336.920.905.250	347.028.532.408
4.2.01.y	Dana Insentif Daerah	52.141.161.000	44.449.435.000	25.381.995.000	44.449.435.000	25.094.915.880	25.847.763.356
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.477.870.684	93.369.964.741	108.653.507.866	106.653.507.866	109.853.113.102	113.148.706.495
4.2.02.x	Pendapatan Bagi Hasil	108.375.673.684	93.169.964.741	106.653.507.866	106.653.507.866	109.853.113.102	113.148.706.495
4.2.02.y	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota	12.102.197.000	200.000.000	2.000.000.000	0	0	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.019.141.566	115.774.016.749	135.806.900.000	122.346.200.000	122.000.000.000	125.000.000.000
4.3.1	Dana Darurat						
4.3.2	Hibah	107.019.141.566	19.281.498.779	15.000.000.000	15.000.000.000	122.000.000.000	125.000.000.000
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan		96.492.517.970	120.806.900.000	107.346.200.000		
5	BELANJA	2.351.499.268.940	2.139.909.477.474	2.590.820.702.112	2.671.764.906.033	2.777.471.675.132	2.877.913.551.886
5.1	BELANJA OPERASI	1.856.148.418.661	1.693.588.449.833	2.133.958.553.643	2.197.014.799.940	2.270.501.539.657	2.352.217.597.965
5.1.01	Belanja Pegawai	1.067.507.780.938	1.022.368.138.151	1.158.202.297.656	1.281.037.301.595	1.375.935.029.041	1.426.343.417.048
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	686.566.245.667	639.809.762.519	858.662.266.677	840.189.433.616	845.408.494.322	875.281.582.003
5.1.03	Belanja Bunga	4.198.402.972	1.619.535.715	274.240.551		1.942.541.431	2.013.707.860
5.1.04	Belanja Subsidi			17.208.143.843	24.500.000.000	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	89.864.999.084	29.126.513.448	89.350.004.916	32.799.923.249	35.229.702.751	36.520.368.726
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.010.990.000	664.500.000	10.261.600.000	18.488.141.480	11.985.772.112	12.058.522.328
5.2	BELANJA MODAL	491.009.055.950	304.984.047.899	437.290.134.807	463.820.817.984	496.970.135.475	515.695.953.921
5.2.x	Belanja Modal	491.009.055.950	304.984.047.899	437.290.134.807	463.820.817.984	496.970.135.475	515.695.953.921
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.341.794.329	140.472.556.743	19.572.013.662	10.929.288.109	10.000.000.000	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.341.794.329	140.472.556.743	19.572.013.662	10.929.288.109	10.000.000.000	10.000.000.000
5.X	Belanja Transfer	0	864.423.000	0	0	0	0
5.X.0x	Belanja Bantuan Keuangan		864.423.000	0	0	0	0
(4-5)	Surplus/Defisit	(1.382.653.333)	27.645.067.182	(70.885.728.780)	(85.860.405.167)	22.350.000.000	1.150.000.000

Kode	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	PEMBIAYAAN	56.167.525.607	17.118.435.211	70.885.728.780	85.860.405.167	(22.350.000.000)	(1.150.000.000)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.996.762.655	53.947.672.274	102.486.728.780	122.860.405.167	30.000.000.000	50.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.996.762.655	53.947.672.274	44.824.375.310	122.860.405.167	30.000.000.000	50.000.000.000
6.1.0x	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	57.662.353.470		0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.829.237.048	36.829.237.063	31.601.000.000	37.000.000.000	52.350.000.000	51.150.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.000.000.000	10.000.000.000	31.601.000.000	37.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
6.2.0x	Pembayaran Pokok Utang	26.829.237.048	26.829.237.063	0	0	17.350.000.000	16.150.000.000
(6.1-6.2)	Pembiayaan Netto	56.167.525.607	17.118.435.211	70.885.728.780	85.860.405.167	(22.350.000.000)	(1.150.000.000)
[(4-5)-(6.1-6.2)]	SILPA	54.784.872.274	44.763.502.393	(0)	0	0	0

Tabel 7-2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Padang Tahun 2019-2024

**Tabel 7-2 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kota Padang
Tahun 2019 - 2024**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		periode RPJMD		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	2.493.118.002								100	20.093.292.800	DINAS PENDIDIKAN	
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	701.064.000								100	790.885.030	DINAS PENDIDIKAN	
X.XX.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	%	100	100	100									100	97.560.200	DINAS PENDIDIKAN	
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang Meningkatkan Kapasitas / Kemampuannya	%	100	100	100									100	553.795.250	DINAS PENDIDIKAN	
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	318.520.400								100	655.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	%	100	100	100	98.746.750								100	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Terlaksananya Kegiatan PAUDNI	%	100	100	100									100	2.395.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Dasar	%	100	100	100	515.170.035								100	5.129.722.400	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Non Formal	%	100	100	100	382.737.800								100	865.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan	%	100	100	100	166.797.900								100	38.804.230.900	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	%	100	100	100									100	2.125.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.23	Program Pelayanan Administrasi Sekolah	Jumlah bulan terselenggaranya Pelayanan Administrasi Sekolah	bulan	12	12	12	996.589.743								0	2.340.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	%	100	100	100	35.360.081.855								100	58.882.529.920	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.27	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah bulan Penyaluran BOS Sekolah SD dan SMP	bulan	12	12	12									12	109.753.000.000	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	%	0	20	35	536.036.000								62	535.036.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	564.584.108.344	-	617.868.098.657	-	629.750.914.993	-	631.186.057.256	-	2.454.440.246.586	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- Jumlah bulan Penyaluran BOS Sekolah SD dan SMP - Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan - Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan - Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Dasar - Persentase Terlaksananya Kegiatan Manajemen Pelayanan Pendidikan - Jumlah bulan terselenggaranya Pelayanan Administrasi Sekolah - Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Non Formal - Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan		-	-	-	-	305.221.145.928	- bulan - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	341.650.032.266	- bulan - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	305.455.346.458	- bulan - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	309.702.329.845	- bulan - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	1.191.722.316.218	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		periode RPJMD		
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	2.404.126.600									100	4.600.000.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	%	100	100	100	39.599.750									100	70.000.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu (%)	%	100	100	100	26.670.000									100	50.000.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase/ cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	%	100	100	100	2.728.418.928									100	3.416.351.165	DINAS KESEHATAN
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	100	100	224.394.500									100	425.000.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi yang terlaksana dengan baik	%	100	100	100	8.173.414.248									100	7.203.178.600	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	567.908.804									100	837.975.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	140.657.800									100	530.400.966	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan .	%	100	100	100	46.793.800									100	55.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	%	100	100	100	36.670.600									100	50.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Jumlah kasus kematian ibu (kasus)	kasus	17	17	12	1.578.260.000									8	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan KLB 1 x 24 jam (%)	%	100	100	100	15.932.006.400									100	1.273.600.000	DINAS KESEHATAN
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase status kurang gizi Balita (< 15 %) (%)	%	13	12	9	1.250.125.000									5	384.250.000	DINAS KESEHATAN
1.02.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Jumlah kasus kematian anak balita (orang)	%	14	14	10	14.580.000									6	125.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	%	88,25	90	95	26.064.168.950									100	16.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kunjungan baru di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) (%)	%	10	12	15	28.786.179.977									25	200.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase lansia yang dilayani (%)	%	59	100	100	36.060.000									100	75.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (%)	%	60	60	60	85.257.500									70	575.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah	Persentase anak sekolah sehat (usia pendidikan dasar) (%)	%	75	78	80	119.309.000									88	75.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (%)	%	56	60	44,2	66.095.000									100	377.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.35	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai IKM Puskesmas (skor)	skor	80,98	81	82	35.821.250.805									84	32.141.860.870	DINAS KESEHATAN
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)	%	95	95	95	4.409.179.500									95	820.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pengawasan peredaran obat dan makanan serta bahan berbahaya (%)	%	10,5	15	20	176.863.401									40	358.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase laporan sumber daya kesehatan yang disusun	%	100	100	100	205.858.500									100	588.583.835	DINAS KESEHATAN
1.02.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase sarana dan prasarana yang disediakan dan diperbaiki (%)	%	100	100	100	13.446.243.492									100	7.058.573.750	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		periode RPJMD		
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan	%	100	100	0	244.568.717									0	684.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan pada penduduk miskin	%	100	100	0	1.222.237.016									0	200.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM yang diadakan	%	100	100	0	14.103.081.569									0	12.030.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.38	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah	Persentase sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM yang dipelihara	%	0	0	0	1.303.106.620									0	861.376.500	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.38	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	Persentase Peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD	%	100	100	100	24.618.214.548									100	30.673.919.934	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	-	-	-	-	100	175.899.582.739	100	285.373.077.707	100	161.564.193.131	100	163.290.193.131	100	725.411.523.173	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-Jumlah kasus kematian anak balita - Persentase anak sekolah sehat (usia pendidikan dasar) - Visite Rate - Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Jumlah kasus kematian ibu- Nilai IKM Puskesmas - Persentase kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan - Persentase kunjungan baru di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) - Persentase laporan sumber daya kesehatan yang disusun - Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas - Persentase status kurang gizi Balita (< 15 %)	-	-	-	-	-	98.693.820.178	8 orang - 0,84 - 2.1 konstanta - 1 - 10 Kasus - 83 skor - 0,711 - 0,2 - 1 - 0,95 - 0,07	65.311.949.818	6 orang - 0,86 - 2.1 konstanta - 1 - 8 Kasus - 84 skor - 0,855 - 0,23 - 1 - 0,95 - 0,06	57.599.863.628	6 orang - 0,88 - 2.1 konstanta - 1 - 8 Kasus - 84 skor - 1 - 0,25 - 1 - 0,95 - 0,05	59.188.579.703	orang - % - konstanta - % - Kasus - skor - % - % - % - %	264.021.205.235	DINAS KESEHATAN	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase legalitas tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan	%	-	-	-	-	7.213.800.940	100	126.235.100	100	160.000.000	100	190.000.000	%	865.214.578	DINAS KESEHATAN	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	- persentase pangan industri rumah tangga dan farmasi yang aman - Persentase pengawasan peredaran obat dan makanan serta bahan berbahaya	%	-	-	-	-	422.321.950	100 30	474.560.000	100 35	250.000.000	100 40	270.000.000	%	1.505.084.050	DINAS KESEHATAN	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase PHBS	%	-	-	-	-	2.071.609.200	0,7	1.230.533.700	0,7	840.000.000	0,7	910.000.000	%	4.035.484.300	DINAS KESEHATAN	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	-	-	-	-	100	104.582.553.822	100	0	100	97.658.240.902	100	98.691.391.552	100	420.025.073.696	RSUD dr. RASIDIN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	%	-	-	-	-	100	12.313.189.802	100	0	100	17.835.363.497	100	18.199.753.367	100	55.016.566.466	RSUD dr. RASIDIN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	%	-	-	-	-	100	7.347.500.000	100	0	100	202.904.000	100	202.904.000	100	7.972.051.000	RSUD dr. RASIDIN
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	41.815.481.576									100	38.893.279.700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aaparatur	%	100	100	100	2.833.895.800									100	5.049.632.100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024				
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang Meningkatkan kapasitas/ kemampuannya	%	100	10	0	100.000.000									100	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disusun tepat waktu	%	100	100	100	25.000.000									100	25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Dokumen perencanaan dan Penganggaran disusun tepat waktu	%	100	100	100	19.402.000									100	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase pemenuhan Infrastruktur Kebinamargaan	%	0	0	100	33.081.120.686									100	59.473.897.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase pemenuhan Infrastruktur Kebinamargaan	%	0	0	0	55.826.205.414									0	34.735.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase pemenuhan Infrastruktur Kebinamargaan	%	0	0	0	1.277.641.600									0	1.250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase pengurangan Kawasan genangan	%	0	0	0	35.781.058.334									0	42.365.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.17	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Persentase pengurangan kawasan yang terdampak banjir	%	0	0	0	4.170.000.000									0	4.670.660.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.46	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Rehabilitasi Konservasi Sungai, Danau Sumber Daya Air Lainnya	Persentase pengurangan kawasan yang terdampak banjir	%	0	0	0	9.795.000.000									0	9.795.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	persentase layanan daerah irigasi	%	0	0	0	7.355.557.940									0	9.395.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.41	Program Perencanaan Bidang ke-PU an	Persentase terlaksananya Perencanaan, evaluasi dan monitoring Bidang Ke-PU-an	%	0	0	0	2.537.269.430									0	3.695.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.40	Program Inspeksi, Pengawasan, dan Monitoring Bidang Ke PU-an	Persentase terlaksananya Perencanaan, evaluasi dan monitoring Bidang Ke-PU-an	%	0	0	0	127.113.500									0	145.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.45	Program Penataan Penerangan Jalan dan Taman Kota	Persentase cakupan pelayanan penerangan kota	%	0	0	0	13.163.607.042									0	13.794.365.450	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.42	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	0	0	0	541.940.000									0	3.975.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.48	Program Perencanaan Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	0	0	0	637.232.950									0	637.232.950	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.44	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	0	0	0	321.250.000									0	475.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	-	-	-	-	19.637.985.281	100	26.035.439.595	100	24.247.941.334	100	30.433.239.867	100	100.990.939.737	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan sumber daya air	%	-	-	-	-	26.072.692.876	100	15.866.878.862	100	16.060.000.000	100	21.710.000.000	%	79.726.777.562	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	%	-	-	-	-	38.432.501.315	100	39.645.848.746	100	48.924.574.656	100	54.500.000.000	%	182.032.344.067	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis	%	-	-	-	-	143.246.150	100	38.882.099	100	120.000.000	100	120.000.000	%	433.246.095	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		periode RPJMD		
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	%	-	-	-	-	K	40.015.549.375	100	66.078.635.320	100	130.205.000.000	100	86.720.000.000	%	320.684.971.695	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	%	-	-	-	-	100	0	100	3.392.674.400	100	1.500.000.000	100	12.500.000.000	100	17.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pemenuhan Infrastruktur Kebinamargaan	%	-	-	-	-		64.927.437.000	100	86.996.265.440	100	110.570.297.200	100	77.223.849.086	%	331.731.703.555	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	%	-	-	-	-		596.138.600	100	1.073.672.100	100	1.160.000.000	100	1.160.000.000	%	4.086.138.600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	%	-	-	-	-		0	100	893.522.000	100	1.400.000.000	100	2.100.000.000	100	4.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	%	-	-	-	-		0	100	93.055.200	100	275.000.000	100	6.100.000.000	100	6.475.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	0	0	100	1.906.990.000	100								100	1.906.990.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	0	0	100	777.000.000	100								100	777.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitas/kemampuannya	%	0	0	100	30.000.000	100								100	30.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	0	0	100	135.000.000	100								100	135.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	0	0	100	50.000.000	100								100	50.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan	%	0	0	61,16	49.152.012.900	100								45,41	49.152.012.900	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Lingkungan Sehat Perumahan	%	0	0	88,35	2.550.000.000	100								90,07	2.550.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase pemberdayaan komunitas perumahan	%	0	0	100	150.000.000	100								100	150.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.21	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Publik	persentase pembangunan dan peningkatan sarana prasarana publik	%	0	0	50	19.700.000.000	100								100	19.700.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.22	Program Inspeksi, Pengawaan, dan Monitoring Bidang Perumahan, Cipta Karya, dan Pertanian	Persentase Inspeksi, Pengawasan, dan Monitoring Bidang Perumahan, Cipta Karya dan Pertanian	%	0	0	100	200.000.000	100								100	200.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024				
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1.04.23	Program Perencanaan Bidang Ke-Cipta Karya-an	Persentase Perencanaan Bidang ke-Cipta Karya-an	%	0	0	100	500.000.000	100							100	500.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1.04.24	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah	persentase pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pemerintah	%	0	0	60,9	39.352.227.440	100							75	39.352.227.440	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1.04.19	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	%	100	0	100	7.237.038.002								100	379.477.500	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	9.015.658.298	100	11.043.461.193	100	12.679.952.404	100	12.862.735.363	-	46.659.125.362	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	%	-	-	-	-		2.011.555.651	100	10.650.901.402	100	7.532.156.000	100	9.853.937.500	100	31.052.648.853	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	%	-	-	-	-	20	17.388.285.011	41,67	20.408.122.209	63,33	24.404.375.000	83,33	26.357.950.461	-	79.774.981.511	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	%	-	-	-	-	0	0	15	583.253.500	20	400.000.000	25	400.000.000	25	1.404.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan	%	-	-	-	-	30	36.619.877.641	33	29.105.785.512	35	21.340.031.019	37	19.056.277.444	37	106.484.235.966	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.06	PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan pelayanan perizinan pengembang perumahan	%	-	-	-	-	0	0	20	68.621.500	35	100.000.000	45	100.000.000	-	300.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1.05.21	Program penanggulangan bencana Kebakaran dan Kedaruratan lainnya	Persentase bencana Kebakaran dan Kedaruratan lainnya yang ditanggulangi	%	100	0	100	6.632.877.000								100	6.632.877.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase/Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	1	0	100	1.108.017.525								100	3.671.259.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	0	100	2.716.922.835								100	2.664.912.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
X.XX.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan pegawai	%	100	0	100	147.669.570								100	240.650.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitas/kemampuannya	%	100	0	100	207.828.900								100	286.886.500	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	0	100	28.245.000								100	30.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggggaran disusun tepat waktu	%	100	0	100	48.874.900								100	50.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	98,95	100	100	14.200.322.658								100	14.200.322.658	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	%	95,92	100	100	654.811.000								100	654.811.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase masyarakat yang diberdayakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan	%	98,99	100	100	1.636.874.310								0	1.636.874.310	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase/cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	88,85	100	100	1.499.925.820								100	1.499.925.820	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	88,85	100	100	1.479.127.712								100	1.479.127.712	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		periode RPJMD		
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	%	100	100	100	871.300.000									100	871.300.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitas/kemampuannya	%	92,5	100	100	243.547.000									100	243.547.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan yang capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	100	100	30.000.000									100	30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	100	100	100	50.000.000									100	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasana aparatur dalam kondisi baik	%	0	0	100	954.827.389									0	761.297.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya Disiplin Aparatur	%	0	100	100	162.835.000									100	106.900.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	-	-	-	-		14.095.989.708	1	19.524.007.048	1	24.966.060.122	1	25.140.325.965	%	83.023.707.262	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	%	-	-	-	-	100	11.812.294.736	100	13.557.797.711	100	5.840.305.196	100	7.059.989.241	100	31.367.509.431	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	-	-	-	-		3.931.313.759	1	5.313.379.150	1	9.196.360.000	1	9.891.248.642	%	28.756.602.401	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	%	-	-	-	-	100	6.413.180.002	100	8.047.286.800	100	10.704.830.000	100	8.694.611.108	100	34.382.941.110	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	-	-	-	-		7.114.068.787	1	7.302.810.205	1	7.414.344.260	1	11.436.566.660	%	28.498.837.325	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	%	-	-	-	-	100	9.228.208.587	100	9.675.361.602	100	9.817.654.913	100	11.673.892.492	100	40.718.962.087	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																0	
1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penduduk miskin yang keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	%	24,04	%	0,03	1.765.000.000									2389	1.765.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penduduk Rentan Sosial yang meningkat fungsi sosialnya	%	100	%	100	1.645.000.000									100	1.645.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.25	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Persentase penyandang disabilitas yang meningkat aksesibilitas sosialnya	%	100	100	100	385.000.000									100	385.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.23	Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Persentase penduduk beresiko darurat sosial terjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya	%	100	%	100	1.332.819.100									100	1.332.819.100	DINAS SOSIAL
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	50	50	60	1.205.699.900									75	1.205.699.900	DINAS SOSIAL
1.06.24	Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Laju pertumbuhan pihak yang terlibat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	%	5	5	5	465.000.000									5	465.000.000	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		periode RPJMD		
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penduduk miskin yang keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	%	24,04	%	0,03	1.765.000.000									23,89	1.765.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penduduk Rentan Sosial yang meningkat fungsi sosialnya	%	100	%	100	1.645.000.000									100	1.645.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.25	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Persentase penyandang disabilitas yang meningkat aksesibilitas sosialnya	%	100	100	100	385.000.000									100	385.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.23	Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Persentase penduduk beresiko darurat sosial terjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya	%	100	%	100	1.332.819.100									100	1.332.819.100	DINAS SOSIAL
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	50	50	60	1.205.699.900									75	1.205.699.900	DINAS SOSIAL
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	1.615.203.000									100	1.615.203.000	DINAS SOSIAL
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	1.073.337.000									100	1.073.337.000	DINAS SOSIAL
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkatkan kapasitas/kemampuannya	%	100	100	100	100.000.000									100	100.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	%	100	30.000.000									100	30.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	100	100	100	50.000.000									100	50.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	-	-	-	-		11.470.293.831	0,65	8.879.722.503	0,7	2.092.434.480	0,75	1.825.000.000	%	26.000.456.686	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penduduk beresiko darurat sosial terjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya	%	-	-	-	-		1.763.203.383	1	1.827.384.435	1	3.875.000.000	1	3.880.000.000	%	11.941.539.452	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penduduk miskin yang terfasilitasi	%	-	-	-	-		1.685.147.950	1	1.246.832.569	1	3.065.000.000	1	3.425.000.000	%	9.941.711.950	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	-	-	-	-	-		489.378.654	1	421.880.217	1	1.675.000.000	1	1.850.000.000	%	4.577.714.396	DINAS SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Laju pertumbuhan pihak yang terlibat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	-	-	-	-	-		70.657.747	0,05	64.765.054	0,05	160.000.000	0,05	175.000.000	%	479.657.747	DINAS SOSIAL
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	-	-	-	-	100	6.564.099.859	100	6.685.335.913	100	10.493.000.000	100	8.562.000.000	100	32.926.399.622	DINAS SOSIAL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	11,86	11,86	12	407.000.000									12	407.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan Kewirausahaan	%	74,6	74,6	77,4	2.248.440.000									89,7	2.248.440.000	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	%	3	3	4	972.777.350									8	972.777.350	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	1.166.572.650									100	1.166.572.650	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana-prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	321.461.000									100	321.461.000	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		periode RPJMD		
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitas/kemampuannya	%	0	0	100	71.669.000									100	71.669.000	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	100	100	25.000.000									100	25.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	persentase Dokumen perencanaan dan Penganggaran yang disusun tepat waktu	%	0	0	100	50.000.000									100	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	-	-	-	-		87.699.700	0,12	143.275.300	0,12	50.000.000	0,12	200.000.000	%	497.949.700	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	%	-	-	-	-		1.485.826.300	0,815	1.307.858.000	0,877	1.340.000.000	0,897	1.575.000.000	%	6.162.421.300	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	-	-	-	-		319.091.050	0,04	1.582.934.500	0,04	925.000.000	0,04	1.585.000.000	%	4.509.541.050	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	%	-	-	-	-		540.366.960	0,06	916.497.680	0,07	918.853.000	0,08	1.342.636.088	%	4.167.936.533	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	80	8.229.925.366	80	11.340.862.928	81	11.860.992.939	82	12.314.484.496	82	43.533.678.518	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
2.02.23	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data terpilah	%	10	0	15	43.672.500									50	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB
2.02.27	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	30	0	40	182.633.100									75	1.520.573.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB
2.02.26	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase indikator penilaian KLA yang terpenuhi	%	70	0	75	865.508.100									85	1.269	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB
2.02.24	Program Perlindungan Hak Perempuan	Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan sesuai standar oleh P2TP2A	%	0,8	0	0,8	416.932.850									1	610.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB
2.02.25	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Anak termasuk anak berhadapan dengan hukum (ABH) sesuai standar oleh P2TP2A	%	80	0	85	175.702.250									100	425.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan administrasi perkantoran	%	100	0	100	771.028.493									100	978.010.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024				
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100		0	100	377.093.704								100	403.141.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang meningkat kapasitas/kemampuannya	%		0	0	100	25.000.000								100	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100		0	100	29.935.000								100	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	100		0	100	49.940.000								0	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase anggaran Responsif gender di lingkungan DP3AP2KB	%	-	-	-	-		905.216.458	60	450.621.510	70	850.000.000	0	1.040.000.000	0	3.308.141.118	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A		-	-	-	-		268.459.100	1	272.717.850	1	423.530.000	1	603.530.000	%	1.597.999.100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase indikator penilaian KLA yang terpenuhi	%	-	-	-	-		873.473.350	0,8	818.130.223	0,8	805.000.000	0,85	1.425.000.000	%	3.690.023.023	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyajikan data terpilih	%	-	-	-	-		47.224.000	0	42.691.797	0	140.000.000	0	140.000.000	0	379.223.797	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		K	Rp.	
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	%	-	-	-	-		587.548.896	75	665.779.550	0	610.000.000	0	710.000.000	0	2.683.998.596	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A		-	-	-	-		759.253.376	1	496.048.700	1	870.075.000	1	970.075.000	%	3.120.128.376	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	7.048.415.338	100	8.650.581.170	100	7.272.567.410	100	8.256.605.410	100	30.889.143.150	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
2.03.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	%		95	0	100	1.882.240.000								100	1.882.240.000	DINAS PANGAN
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase/cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	0	100	532.800.000								100	532.800.000	DINAS PANGAN
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%		100	0	100	125.050.000								100	125.050.000	DINAS PANGAN
X.XX.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	%		0	0	0	0								22	0	DINAS PANGAN
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitas/kemampuannya	%		100	0	100	25.000.000								100	25.000.000	DINAS PANGAN
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%		100	100	100	25.000.000								100	25.000.000	DINAS PANGAN
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%		100	0	100	50.000.000								100	50.000.000	DINAS PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi Pangan	%	-	-	-	-		1.065.909.650	0,94	776.269.700	0,96	2.550.000.000	0,98	2.600.000.000	%	8.455.064.150	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan tingkat kerawanan pangan	%	-	-	-	-		93.516.550	1	77.916.850	1	500.000.000	1	550.000.000	%	1.598.337.550	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	9.155.197.743	100	9.584.556.822	100	11.520.150.912	100	12.921.662.230	100	45.457.659.989	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
2.04.20	Program Penyediaan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Peningkatan Administrasi dan Fasilitas Pengadaan Tanah	%		100	100	100	68.509.250								0	10.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
2.04.20	Program Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase tersedianya lahan untuk infrastruktur		0	0	0	0	18.815.000.000								0	18.815.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.04.21	Program Peningkatan Administrasi dan Fasilitas Pengadaan Tanah	Persentase tanah milik pemerintah dengan status yang jelas	%		0	0	80	470.000.000								100	470.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		K	Rp.	
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2.04.22	Program Pelayanan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang ditindaklanjuti	%	0	0	46,67	586.525.560									46,67	586.525.560	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	-	-	-	-		4.024.147.975	100	1.909.968.930	100	1.900.000.000	100	4.950.000.000	%	12.989.147.705	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Lokasi yang Diterbitkan	%	-	-	-	-		0	10	40.234.350	10	70.000.000	10	80.000.000	30	210.000.000	DINAS PERTANAHAN
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	-	-	-	-		255.848.500	1	219.502.600	1	290.000.000	1	325.000.000	%	1.150.848.500	DINAS PERTANAHAN
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	%	-	-	-	-		328.887.700	1	395.247.750	1	186.606.000	1	220.000.000	%	1.017.493.700	DINAS PERTANAHAN
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		-	-	-	-		52.520.250	1	59.663.950	1	100.000.000	1	110.000.000	%	342.520.250	DINAS PERTANAHAN
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	%	-	-	-	-		111.658.000	10 persil	86.039.050	10 persil	160.000.000	10 persil	165.000.000	persil	546.658.000	DINAS PERTANAHAN
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Jumlah Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	%	-	-	-	-		202.742.500	20	169.528.250	30	175.000.000	35	200.000.000	35	777.742.500	DINAS PERTANAHAN
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Izin yang Diterbitkan	%	-	-	-	-	5	61.419.250	5	58.662.700	5	80.000.000	5	80.000.000	20	306.419.250	DINAS PERTANAHAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	3.916.296.396	100	4.150.170.300	100	5.082.500.000	100	5.400.000.000	100	18.741.796.396	DINAS PERTANAHAN
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
2.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume sampah yang tereduksi (ton/tahun)		0	0	0	11.026.479.255									0	11.026.479.255	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik cemar sungai dan jumlah titik cemar udara ambient		0	0	0	915.000.000									0	915.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.05.35	Program Perlindungan Sumber Daya Alam	Persentase perubahan luas penggunaan lahan untuk fungsi perlindungan dan konservasi SDA dari tahun sebelumnya	%	0	0	0	185.000.000									0	185.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.05.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Ruang terbuka Hijau	%	0	0	0	4.465.000.000									0	4.465.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.05.34	Program pengembangan komunikasi dan kelembagaan lingkungan	Tingkat partisipasi masyarakat dan pelaku usahadalam pengelolaan lingkungan hidup		0	0	0	2.178.850.000									0	2.178.850.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.05.36	Program Perlindungan Sumber Daya Alam, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan	Jumlah titik cemar sungai dan jumlah titik cemar udara ambient,Persentase perubahan luas penggunaan lahan untuk fungsi perlindungan dan konservasi SDA dari tahun sebelumnya		0	0	0	0									0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.05.37	Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Lainnya	Persentase terpenuhinya pelayanan pada UPTD	%	0	0	0	0									0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase/Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	0	0	0	11.589.700.000									0	11.589.700.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	0	0	0	11.732.610.745									0	11.732.610.745	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Pemenuhan prasarana disiplin pegawai	%	0	0	0	400.000.000									0	400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	0	0	0	65.000.000									0	65.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Presentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	0	0	0	50.000.000									0	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024				
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	jenis	-	-	-	-		100.000.000	-	0	1	200.000.000	-	0	-	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah titik cemar sungai dan jumlah titik cemar udara ambient		-	-	-	-		4.788.189.806	1	1.191.074.800	1	1.888.200.000	1	1.737.200.000	%	9.643.936.631	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	%	-	-	-	-		5.705.093.600	1	4.844.964.384	1	5.920.650.000	1	5.538.850.000	%	23.850.602.934	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	-	-	-	-		407.447.088	1	477.639.100	1	299.600.000	1	299.600.000	%	1.336.924.388	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	-	-	-	-		345.717.842	1	392.766.230	1	607.400.000	1	702.400.000	%	2.069.499.242	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	prsentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	-	-	-	-		364.797.500	1	450.793.800	1	1.557.400.000	1	1.622.400.000	%	4.022.328.350	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah pengaduan lingkungna hidup yang ditangani		-	-	-	-		276.133.000	20 kasus	380.777.000	20 kasus	483.800.000	20 kasus	534.800.000	kasus	1.678.029.700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah yang tereduksi		-	-	-	-		22.085.571.067	0,75	25.581.098.295	0,8	22.005.915.600	0,85	22.411.049.255	%	88.384.821.487	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	41.000.918.415	100	42.759.660.269	100	41.348.148.420	100	42.055.186.925	100	167.076.707.559	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
2.06.16	Program pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase/Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	%	98,71	98	99	3.508.687.974									99,75	2.933.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.06.17	Program Pelayanan pencatatan sipil	Persentase/Cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	%	95	98	98	326.184.150									99	400.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.06.15	Program penataan administrasi kependudukan	Persentase Tingkat akurasi data kependudukan	%	80	95	98	1.252.600.150									99	805.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.06.18	Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	%	50	95	95	340.208.950									99	416.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	505.298.953									100	1.025.886.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	208.677.515									100	197.900.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang yang meningkat kapasitas/kemampuannya	%	100	100	100	56.137.125									100	74.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	100	100	18.894.900									100	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024				
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	100	100	100	27.203.600									100	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Tingkat perekaman KTP elektronik Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		-	-	-	-	30 30	529.774.704 40	40 40	418.662.700 50	50 50	2.210.285.045 60	60 60	2.075.000.000	-	5.276.038.353	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	%	-	-	-	-	98,33%	215.106.650	99,25%	139.359.800	99,50%	320.000.000	99,75%	372.343.059	99,75%	1.065.949.709	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat	%	-	-	-	-	98	361.479.596	98	260.517.420	98	575.000.000	98	530.000.000	98	1.807.179.596	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersedianya profil kependudukan	%	-	-	-	-		50.937.500	96	42.329.600	96,5	250.000.000	97	275.000.000	97	635.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	8.392.853.104	100	9.501.281.912	100	10.085.144.955	100	10.092.936.941	100	38.508.206.433	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
2.07.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Sosialisasi TTG dan Gelar Pameran Tk. Nasional	0	2 kali	2 kali	2 kali	80.000.000									0	80.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB
2.08.26	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan.	%	30	0	40	474.589.800									70	1.213.427.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB
2.08.27	Program Pengelolaan data dan informasi kependudukan Berbasis Keluarga	Persentase data dan informasi keluarga yang akurat dan mutakhir	%	0,9	0	0,9	85.955.000									1	271.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB
2.08.28	Program Promosi Kependudukan, Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Pembangunan Keluarga	Cakupan penyediaan Layanan KIE	%	75	0	75	1.904.996.900									95	1.049.064.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB
2.08.15	Program keluarga Berencana	Jumlah peserta KB baru	0	30,99	0	30,99	664.163.200									30,99	735.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB
2.08.29	Program Ketahanan dan Pembangunan Keluarga	Persentase Kampung KB aktif	%	50	0	55	1.700.310.000									70	2.085.900.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		periode RPJMD		
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyajian data dan informasi keluarga yang akurat dan mutakhir		-	-	-	-		133.787.850	0,92	272.990.200	0,93	300.000.000	0,95	375.000.000	%	1.015.037.850	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB aktif MKJP		-	-	-	-		5.108.035.807	0,65	5.012.906.395	0,7	3.669.791.590	0,7	4.608.791.590	%	17.071.080.401	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Poktan (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif		-	-	-	-		1.028.462.975	0,75	4.348.212.264	0,8	722.400.000	0,8	1.077.400.000	%	3.658.112.739	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase/ cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	0	0	3.734.745.000									100	3.734.745.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	0	0	905.000.000									100	905.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplin an pegawai	%	100	0	0	372.355.000									100	372.355.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitas/ kemampuannya.	%	100	0	0	90.000.000									90	90.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	0	0	90.000.000									100	90.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	100	0	0	105.000.000									100	105.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.09.21	Program Peningkatan kinerja lalu lintas	Persentase daerah rawan macet yang terselesaikan	%	50	55	60	733.500.000									75	733.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.09.22	Program Pembangunan dan Perawatan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas	Persentase faslitas lalu lintas yang berfungsi dengan baik	%	0,65	0	0,7	1.600.000.000									-	1.600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.09.23	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah pelanggaran lalu lintas	kasus	29868	29912	29800	3.083.000.000									28800	3.083.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.09.25	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan umum	Persentase angkutan yang melayani sesuai dgn standar pelayanan	%	60	65	70	22.004.241.000									80	22.004.241.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.09.24	Program Pembangunan dan Perawatan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Orang dan Barang	Persentase prasarana transportasi umum yang berfungsi dengan baik	%	0,15	0	0,39	160.000.000									-	160.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah pelanggaran lalu lintas		-	-	-	-		44.820.695.889	29200 kasus	52.577.634.226	29000 kasus	65.226.989.553	28800 kasus	66.174.775.462	kasus	236.189.374.550	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	62.660.398.525	100	64.934.400.013	100	61.540.006.725	100	61.525.557.025	100	259.205.692.953	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		periode RPJMD		
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
2.10.23	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	%	100	0	100	4.735.800.000									100	4.735.800.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.24	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	%	100	0	100	1.243.000.000									100	1.243.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.25	Program Penyelenggaraan Pengamanan Infomrasi Pemerintah Daerah	Persentase kualitas penyelenggaraan persandian daerah	%	100	0	100	443.100.000									100	443.100.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	%	100	0	100	1.029.264.000									100	1.029.264.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	0	100	547.180.000									100	547.180.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	0	100	30.000.000									100	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	100	0	0	50.000.000									100	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.20	Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase perangkat daerah yang mengoperasikan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan baik	%	1,88E+09	0	0	2.867.391.925									0	2.867.391.925	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	-	-	-	-		893.626.350	1	753.831.250	1	893.626.350	1	2.000.000.000	%		4.730.055.050	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	-	-	-	-		5.363.193.796	1	5.693.714.596	1	5.363.193.796	1	7.250.000.000	%		23.671.847.588	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	6.099.600.525	100	7.609.685.248	100	6.505.440.759	100	8.919.295.831	100	28.537.800.891	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan volume penjualan produk UMKM	%	100	0	0	2.390.000.000									0	2.390.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Persentase Perumbuhan Aset Koperasi	%	100	0	0	988.017.950									0	988.017.950	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.11.21	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase Kelengkapan dan Ketersediaan Data dan Informasi Pendukung	%	100	0	0	5.737.394.000									0	5.737.394.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.11.22	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syari'ah	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Memiliki NPL Sesuai Standar	%	100	0	0	874.500.000									0	874.500.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.11.23	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Telah Menerapkan Tata Kelola Koperasi Yang Baik	0	100	0	0	522.500.000									0	522.500.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	0	0	1.024.276.000									0	1.024.276.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	0	0	284.114.000									0	284.114.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	0	0	25.000.000									0	25.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	100	0	0	50.000.000									0	50.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH		
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024						
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat peringkat kepatuhannya	%	-	-	-	-	K	227.963.255	10	205.440.150	K	15	550.000.000	15	550.000.000	15	1.607.963.255	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan KSP / USP yang ikut Penilaian Kesehatan	%	-	-	-	-	K	214.953.350	10	324.093.100	K	10	350.000.000	10	300.000.000	10	1.139.953.500	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengurus dan pengelola koperasi yang difasilitasi peningkatan kompetensi (persentase peningkatan dari koperasi aktif)	%	-	-	-	-	K	459.000.000	5	404.198.700	K	10	459.000.000	12	459.000.000	27	1.831.829.600	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan produktivitas Koperasi	%	-	-	-	-	K	5	4.073.343.100	5	2.983.393.107	K	5	1.151.900.000	15	1.151.900.000	-	9.552.042.857	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan volume penjualan (omset) produk UMKM kategori ultra mikro	%	-	-	-	-	K	2	3.441.036.690	2	3.117.576.300	K	2	4.720.000.000	2	5.220.000.000	8	16.801.036.690	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omset Usaha mikro Potensial	%	-	-	-	-	K	330.235.830	1	5.405.595.198	-		563.265.000	-	635.684.395	-	6.472.238.360	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	K	100	6.179.030.944	100	7.535.295.670	K	100	9.407.210.000	-	10.134.376.230	-	33.757.789.221	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																			
2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%		0	0	40	2.439.913.000									90	2.439.913.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.12.20	Program pengawasan penanaman modal	Persentase Tingkat Kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Pelaku Usaha dan pelaksanaan Online Single Submission	%		0	0	60	375.000.000									0	375.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.12.21	Program pengembangan data dan teknologi informasi	Persentase Tercapainya Pengembangan Data dan Teknologi Informasi	%		0	0	75	500.000.000									0	500.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.12.22	Program administrasi perizinan dan pengaduan	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengaduan	%		0	0	70	495.000.000									0	495.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.12.23	Program perizinan ekonomi dan pembangunan	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Perizinan Ekbang	%		0	0	70	690.000.000									0	690.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.12.24	Program perizinan kesra dan lingkungan	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Perizinan Kesraling	%		0	0	70	400.000.000									95	400.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase/ cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	0	100	2.388.700.000									100	2.388.700.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024				
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	0	100	860.187.000									100	860.187.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	%	100	0	100	101.650.000									100	101.650.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkatkan kapasitas/kemampuannya	%	100	0	100	100.000.000									100	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	0	100	34.500.000									100	34.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	100	0	100	50.000.000									100	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Terkendalinya Pelaksanaan Kegiatan Investasi	%	100	100	100	98.385.000									100	98.385.000	BAGIAN KERJASAMA
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Fasilitas Penanaman Modal	%	-	-	-	-		0	-	272.022.200	-	100.000.000	-	100.000.000	-	310.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	%	-	-	-	-		133.007.550	0,6	326.797.941	0,7	350.000.000	0,8	400.000.000	%	1.217.286.941	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Fasilitas Pelayanan Penanaman Modal	%	-	-	-	-		1.067.064.700	-	955.540.400	-	1.450.000.000	-	1.500.000.000	-	5.496.656.050	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	%	-	-	-	-		714.888.850	1	727.773.060	1	500.000.000	1	550.000.000	%	2.612.109.860	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengaduan	%	-	-	-	-		537.930.040	0,8	402.276.216	0,85	1.000.000.000	0,9	1.000.000.000	%	3.045.943.006	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-		8.276.126.093	100	8.724.964.282	100	10.730.600.000	100	12.355.300.000	-	40.697.270.876	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAHA																	
2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	0	0	13,7996	1.895.400.000									58,56417	1.895.400.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA
2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	%	0	0	14,70588	3.119.000.000									83,23529	3.119.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		K	Rp.	
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang dikelola	%	0	0	81,22	1.552.816.000									12	1.552.816.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.13.17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup Pemuda	Persentase Pemuda berwirausaha	%	0	0	45	80.000.000									0	80.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.13.19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase event olah raga rekreasi yang dilaksanakan secara aktif	%	0	0	80	200.000.000									0	200.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.13.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	0	0	45	245.000.000									0	245.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase/ Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	0	0	100	2.177.802.000									100	2.177.802.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	0	0	100	388.298.000									100	388.298.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	0	0	100	30.000.000									100	30.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	0	0	100	50.000.000									100	50.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepemudaan	-	-	-	-	-		2.884.265.588	0,1447	19.008.713.542	0,1481	1.810.200.000	0,1515	1.810.200.000	%	24.856.405.588	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	-	-	-	-	-		17.146.769.374	0,2059	12.464.072.462	0,21	8.525.877.608	0,24	23.503.823.438	%	60.768.248.028	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	-	-	-		0	-	1.169.980.964	-	1.805.762.392	-	1.200.000.000	-	4.185.762.392	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	-	-	-	-	-	100	5.946.116.210	100	5.726.468.665	100	5.825.360.000	100	5.800.360.000	100	23.372.196.210	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
2.14.16	Program Penyelenggaraan Statistik Daerah	Persentase kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	%	100	0	100	415.000.000									100	415.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	-	-	-	-	-		328.088.200	1	392.500.000	1	328.688.200	1	750.400.000	%	1.919.865.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-		279.659.111	1	400.000.000	1	279.059.111	1	1.000.000.000	%	1.987.259.222	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2.16.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	%	100	100	100	402.000.000									1	402.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.16.20	Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah	Persentase peningkatan Pembinaan Seni dan Budaya Daerah	%	100	100	100	2.795.000.000									100	2.795.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.16.21	Program peningkatan sarana dan prasarana ibadah	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah	%	0	0	1	344.131.000									1	344.131.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	-	-	-	-	-		2.358.647.328	1	1.602.062.750	1	1.495.874.000	1	1.500.000.000	%	7.080.395.328	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	-	-	-		81.650.250	1	81.812.650	1	100.000.000	1	100.000.000	%	452.524.250	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Terlaksananya Pemgelolaan Permuseuman	-	-	-	-	-		218.014.702	1	235.804.950	1	300.000.000	1	300.000.000	%	1.118.014.702	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	559.240.000									100	559.240.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		periode RPJMD		
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	385.000.000									100	385.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	100	100	30.000.000									100	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Presentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	0	0	100	50.000.000									100	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	-	-	-	-		231.758.625	0,53	431.611.830	0,62	625.000.000	0,65	575.000.000	%	2.009.757.955	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	5.413.417.874	100	5.645.349.100	100	5.901.100.000	100	6.325.340.000	100	23.350.676.055	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
2.18.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan dinamis	%	0	0	13	160.050.000									100	160.050.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Arsip/Dokumen penting yang tertata dengan baik	%	0	6	17	429.964.000									41	429.964.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan dinamis	-	-	-	-		550.842.000	0,28	679.620.760	0,34	730.000.000	0,41	550.000.000	%	2.351.023.740	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip/dokumen penting yang tertata dengan baik	-	-	-	-		103.037.500	0,6	115.114.300	0,75	110.240.000	0,85	116.000.000	%	444.277.450	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
3.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi Perikanan Budidaya Per Tahun	Ton	2239	0	2240	2.177.537.650									2260	2.177.537.650	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01.34	Program Pengembangan Usaha dan Kelembagaan	Persentase Usaha dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan yang mandiri	%	20	0	50	2.834.787.604									0,75	2.834.787.604	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap Per Tahun	Ton	19896,3	0	20095,26	4.305.740.000									22000	4.305.740.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Tata Kelola Perencanaan, administrasi aset, kepegawaian dan keuangan	%	0,75	0	80	931.146.746									91	931.146.746	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja internal	%	35	0	40	414.760.000									55	414.760.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	10	0	10	13.000.000									10	13.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	85	0	85	25.000.000									95	25.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Perencanaan dan Penganggaran yang akurat, akuntabel dan berdaya saing	%	0	0	70	50.000.000									79	50.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	-	-	-	-		64.600.000	0,85	49.726.500	0,9	225.000.000	0,95	230.000.000	%	744.600.000	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	-	-	-	-		3.017.968.758	20499 ton	1.883.911.398	20704,16 ton	950.000.000	22000 ton	1.000.000.000	ton	5.521.706.936	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya	-	-	-	-		1.666.316.826	2250 ton	2.692.240.544	2255 ton	4.100.000.000	2260 ton	4.100.000.000	ton	13.834.334.450	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan sumberdaya perikanan dalam satu periode	-	-	-	-		152.809.988	0,9	153.272.000	0,9	225.000.000	1	230.000.000	%	839.999.988	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Laju Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	-	-	-	-		2.242.452.032	65 Ton	8.863.592.887	75 Ton	4.500.000.000	75 Ton	5.000.000.000	Ton	17.464.245.191	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021	2022		2023		2024		periode RPJMD			
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.02.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan Jumlah Kunjungan wisatawan	%	100	100	0	2.400.000.000									0	2.400.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.02.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan sarana prasarana di objek wisata	%	100	100	100	2.456.218.000									100	2.456.218.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.02.17	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Meningkatnya kemitraan antar stakeholders pariwisata	%	100	100	100	688.287.000									100	688.287.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.02.18	Program Pengembangan Produk Kepariwisata Daerah	Persentase Pengembangan Produk Kepariwisata Daerah	%	100	100	100	220.000.000									100	220.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	%	100	100	100	1.512.823.000									100	1.512.823.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	323.839.000									100	323.839.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	100	100	25.000.000									100	25.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Meningkatnya pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran	%	100	100	100	50.000.000									100	50.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang memenuhi saptapesona	%	-	-	-	-	11.576.778.578	1	5.341.458.486	1	5.360.388.000	1	5.282.546.500	%		27.655.088.608	DINAS PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi		-	-	-	-	2.890.810.650	1	3.390.810.578	1	3.150.000.000	1	3.720.000.000	%		14.190.051.150	DINAS PARIWISATA
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							71.402.500		0								DINAS PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusiapariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang usahanya	%	-	-	-	-	1.462.294.250	1	902.399.579	1	570.000.000	1	580.000.000	%		2.036.640.000	DINAS PARIWISATA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	6.946.263.184	100	6.938.332.140	100	8.369.977.000	100	6.651.720.875	100	17.266.402.201	DINAS PARIWISATA
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
3.03.26	Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan serta Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	70766,08	0	74574,58	1.252.475.000									86341,17	1.252.475.000	DINAS PERTANIAN
3.03.27	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Penurunan Luas Areal Sawah	%	0,9	0	0,9	1.050.625.000									90	1.050.625.000	DINAS PERTANIAN
3.03.28	Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perkebunan	Persentase Produksi Perkebunan Yang Diolah dan Dipasarkan	%	100	0	100	325.000.000									100	325.000.000	DINAS PERTANIAN
3.03.29	Program Pemberdayaan Penyuluhan dan Kelompok Tani Tanaman Pangan, Holtikura, Peternakan dan Perkebunan	Persentase Penyuluh Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Yang Naik Kelas Jabatan	%	30	0	40	8.540.625.000									70	8.540.625.000	DINAS PERTANIAN
3.03.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Kasus Penyakit Hewan Yang Ditangani	%	30	0	45	1.401.632.408									65	1.401.632.408	DINAS PERTANIAN
3.03.30	Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan Serta Pemasaran Hasil Peternakan	Persentase Produksi Peternakan Yang Diolah dan Dipasarkan	%	100	0	100	2.839.415.000									100	2.839.415.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase/cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	68	0	100	3.379.415.895									100	3.379.415.895	DINAS PERTANIAN
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	0	0	100	1.423.889.000									100	1.423.889.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	80	0	90	130.000.000									100	130.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggarrann disusun tepat waktu	%	100	0	100	50.000.000									100	50.000.000	DINAS PERTANIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024				
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Tanaman Pangan		-	-	-	-		5.150.957.720	82361 ton	5.713.808.482	86341 ton	6.205.100.000	86341 ton	7.215.100.000	ton	13.420.200.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Sawah yang mengalami alih fungsi lahan	%	-	-	-	-		6.769.344.735	0,009	2.357.708.821	0,009	1.367.086.233	0,009	1.447.611.201	%	13.317.718.195	DINAS PERTANIAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase hewan dan hasil olahan hewan yang bebas dari penyakit zoonosis	%	-	-	-	-		574.054.588	1	722.463.775	1	596.875.000	1	600.125.000	%	2.131.589.864	DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Organisme PenggangguTanaman (OPT) yang dapat ditangani	%	-	-	-	-		287.722.175	1	266.752.215	1	150.000.000	1	150.000.000	%	701.472.175	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah Kelompok tani yang naik kelas kelompok	%	-	-	-	-		998.741.732	0,03	1.490.851.254	0,03	1.258.400.000	0,03	1.258.400.000	%	5.251.062.943	DINAS PERTANIAN
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase luas kawasan Tahura Bung Hatta yang lestari	%	-	-	-	-		167.630.889	0,92	104.414.430	0,92	150.000.000	0,92	150.000.000	%	567.961.889	DINAS PERTANIAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	19.036.731.586	100	18.860.341.808	100	19.269.401.584	100	19.441.401.664	100	64.570.276.082	DINAS PERTANIAN
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																	
3.04.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Taman Hutan Raya Bung Hatta	Luas Kawasan Tahura Bung Hatta Yang Lestari	???		0,6	0	0,71	247.834.697								0,92	247.834.697	DINAS PERTANIAN
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
3.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase permasalahan terkait perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	%		0	0	100	3.532.429.500								100	3.532.429.500	DINAS PERDAGANGAN
3.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Volume ekspor			0	0	100	100.000.000								100	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	%		0	0	100	517.000.000								100	517.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.06.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	%		0	0	100	2.755.063.300								100	2.755.063.300	DINAS PERDAGANGAN
3.06.20	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	%		0	0	100	6.572.358.480								100	6.572.358.480	DINAS PERDAGANGAN
3.06.21	Program Pengembangan dan Perluasan Pangsa Pasar	Laju Pertumbuhan Pangsa Pasar	%		0	0	100	802.604.000								100	802.604.000	DINAS PERDAGANGAN
3.06.24	Program Pengendalian Ketersediaan Stabilitas Harga dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau	%		0	0	100	314.000.000								100	314.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		0	0	100	7.279.974.720								100	7.279.974.720	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%		0	0	100	2.540.000.000								100	2.540.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan di susun tepat waktu	%		0	0	100	100.000.000								100	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaeran di susun tepat waktu	%		0	0	100	50.000.000								100	50.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Bina Kelompok Pedagang		-	-	-	-		69.996.000	1	57.381.250	1	150.000.000	1	175.000.000	%	525.145.755	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	%	-	-	-	-		20.250.536.006	1	17.236.568.388	1	15.826.807.286	1	16.540.464.416	%	69.714.020.635	DINAS PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PFNTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau	%	-	-	-	-		96.874.200	1	653.450.334	1	725.000.000	1	900.000.000	%	2.801.962.230	DINAS PERDAGANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH		
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		K	Rp.			
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Laju Pertumbuhan Pangsa Pasar		-	-	-	-			0	1	602.249.900	1	500.000.000	1	900.000.000	%	2.099.999.690	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase permasalahan terkait perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	%	-	-	-	-			274.800.350	1	1.314.028.793	1	650.817.970	1	950.000.000	%	3.517.556.628	DINAS PERDAGANGAN	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan		-	-	-	-			802.554.483	1	2.062.414.512	1	500.000.000	1	1.678.075.061	%	5.512.711.828	DINAS PERDAGANGAN	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase terselesaikan administrasi keuangan perangkat daerah	%	-	-	-	-	100	28.519.800			0					100	24.999.800	DINAS PERDAGANGAN	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	22.190.810.012	100	25.810.050.018	100	27.527.486.043	100	29.115.580.169	100	107.048.130.894	100	107.048.130.894	DINAS PERDAGANGAN
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																			
3.07.18	Program Penataan Struktur Industri	Jumlah kelompok dan sentra IKM yang mendapat pembinaan struktur industri		0	0	0	5	250.000.000									25	250.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
3.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Peningkatan produk IKM binaan yang memenuhi standar	%		14	14	15	3.621.500.000									20	3.621.500.000	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
3.07.21	Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah pengunjung website Dinas Nakerin	%		200	200	300	60.000.000									3800	60.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri potensial yang tumbuh di Kota Padang		-	-	-	-			29.147.349.350	1 lokasi	10.420.520.050	1 lokasi	1.067.000.000	1 lokasi	1.700.520.050	lokasi	42.335.389.450	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah		-	-	-	-			87.668.500	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	%	387.668.500	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5.01	PERENCANAAN																			
4.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	%		100	100	100	2.208.750.240									100	2.355.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
4.01.15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase keterisian data SIPD	%		30	30	30	62.124.800									50	311.692.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
4.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	% program RPJMD yang terkomodir dalam RKPD bidang Perekonomian dan sumber daya alam	%		0	0	95	258.921.490									95	1.600.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
4.01.18	Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	IK1:% program RPJMD yang terkomodir dalam RKPD bidang Infrastruktur dan kewilayahan	%		0	0	95	286.950.550									95	770.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
4.01.23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	IK1:% program RPJMD yang terkomodir dalam RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%		0	0	95	298.760.250									95	425.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase/cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	100	100	2.573.992.299									100	3.167.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%		100	100	100	530.490.578									100	899.501.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		periode RPJMD		
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase SDM yang meningkat kapasitas/kemampuannya	%	100	100	100	0									100	235.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu	%	100	100	100	33.141.225									100	25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu	%	100	100	100	33.141.225									100	25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	%	-	100	100	556.905.000									100	556.905.000	BAGIAN KERJASAMA
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	%	-	-	-	-	2.400.137.300	1	1.293.480.050	1	1.825.000.000	1	2.817.687.500	%		8.380.733.600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian program perangkat daerah	%	-	-	-	-	1.353.044.050	0,8	1.231.416.190	0,8	2.300.000.000	0,8	2.325.000.000	%		7.603.044.050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	10.589.733.046	100	11.726.673.815	100	12.820.500.000	100	13.020.000.000	100	48.768.324.246	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01	KEUANGAN																	
4.02.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapran Capaian Kinerja dan Keuangan	%	0	0	100	225.000.000									0	225.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.02.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	1,06E+10	0	0	14.203.366.752									0	16.024.834.530	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	3,7E+09	0	0	3.652.733.256									0	3.837.419.575	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	5,95E+08	0	0	724.899.297									0	4.628.009.320	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang yang meningkat kapasitas/kemampuannya	%	100	0	0	1.155.832.098									0	2.367.344.650	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	29558500	0	0	16.152.250									0	25.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	0	0	0	39.100.250									0	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.02.38	Program Penelitian, Pengembangan dan Sistem Informasi	Persentase peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Informasi pendapatan daerah	%	0	1	100	1.886.991.300									100	1.886.991.300	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4.02.33	Program Pengendalian dan Pelaporan	Persentase peningkatan pengendalian dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah	%	0	100	100	248.835.225									100	248.835.225	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		periode RPJMD		
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.02.39	Program Penagihan dan Pemeriksaan	Persentase peningkatan penagihan dan pemeriksaan pajak daerah	%	0	100	100	7.453.173.000									100	7.453.173.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4.02.40	Program Pendataan dan Penetapan	Persentase peningkatan pendataan dan penetapan wajib pajak	%	0	100	100	1.950.514.500									100	1.950.514.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4.02.38	Program Penelitian, Pengembangan dan Sistem Informasi	Persentase peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Informasi pendapatan daerah	%	0	1	100	1.886.991.300									100	1.886.991.300	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase/cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	0	100	100	2.978.337.265									100	2.978.337.265	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana	%	0	100	100	2.112.282.000									100	2.112.282.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitas/ kemampuannya	%	0	100	100	955.246.900									100	955.246.900	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	0	100	100	75.000.000									100	75.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4.02.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	%	0	100	100	50.000.000									100	50.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	%	0	100	100	50.000.000									100	50.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4.02.33	Program Pengendalian dan Pelaporan	Persentase peningkatan pengendalian dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah	%	0	100	100	248.835.225									100	248.835.225	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4.02.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	0	0	100	40.000.000									100	40.000.000	BAGIAN ORGANISASI
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	-	-	-	-	-		29.527.384.924	1	25.974.002.845	1	30.340.601.431	1	34.615.644.000	%	136.658.265.732	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	-	-	-	-	-		8.909.654.329	1	11.384.468.475	1	8.602.863.100	1	8.602.863.100	%	37.642.220.279	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	18.800.783.466	100	16.433.872.643	100	15.447.768.962	100	15.751.768.049	100	66.632.693.690	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Laju peningkatan PAD	-	-	-	-	-		12.661.165.000	0,1016	17.970.337.173	0,0497	210.000.000	0,0204	250.000.000	%	863.792.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	27.818.215.661	100	38.380.236.554	100	39.282.129.340	100	39.703.681.240	100	145.749.820.688	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02	KEPEGAWAIAN																	
4.03.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		0	0	0	80	973.437.000								0	973.437.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
4.03.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		0	0	0	80	973.437.000								0	973.437.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024				
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
4.03.28	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	0	0	0,5	1.130.405.000									0	1.130.405.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	0	0	0	5.541.361.000									0	5.541.361.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
4.03.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	0	0	0	80	973.437.000									0	973.437.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
4.03.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	0	0	0	80	973.437.000									0	973.437.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	%	0	0	75	1.632.419.000									90	1.632.419.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja internal yg mendapatkan layanan sarana & prasarana aparatur	%	0	0	0,75	128.100.000									0,95	128.100.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai	0	0	A	85.000.000									A	85.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
4.03.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	0	0	0	80	973.437.000									0	973.437.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
4.03.72	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian akurat	%	0	0	0	105.000.000									0	105.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		-	-	-	-		4.950.256.159	1	7.304.537.110	1	8.855.000.000	1	9.710.000.000	%	32.323.726.424	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah		-	-	-	-	100	28.190.856.566	100	36.638.200.976	100	15.336.074.081	100	16.476.231.081	100	72.420.192.367	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya pengembangan SDM ASN sesuai dengan regulasi		-	-	-	-		5.558.707.830	20 JP/Th/org	8.329.163.570	20 JP/Th/org	10.600.000.000	20 JP/Th/org	10.600.000.000	JP/Th/org	36.475.273.850	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
4.05.01	Program Penelitian dan Pengembangan	IK1:Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	60	60	65	730.193.000									67	1.251.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-		370.477.550	0,65	434.219.400	0,67	910.000.000	0,67	885.000.000	%	2.690.477.550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024				
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH																	
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitas/ kemampuannya	%	0	0	0	236.825.800									100	695.085.000	INSPEKTORAT
4.06.21	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase ASN APIP yang mendapatkan peningkatan profesionalisme	Persen	0	100	100	6.182.100									100	180.500.000	INSPEKTORAT
4.06.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal dalam periode tertentu	%	0	100	100	1.920.645.803									100	2.466.543.500	INSPEKTORAT
4.06.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Dokumen Pengawasan	0	0	0	1	9.558.000									1	25.000.000	INSPEKTORAT
4.06.23	Program Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja dan keuangan baik	%	0	100	100	1.551.105.925									100	1.587.416.300	INSPEKTORAT
4.06.24	Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	%	0	100	100	0									100	1.508.450.600	INSPEKTORAT
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase/ cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	0	100	100	612.199.794									100	944.514.000	INSPEKTORAT
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	0	100	100	316.081.234									100	324.162.000	INSPEKTORAT
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	0	100	100	62.743.900									100	69.461.900	INSPEKTORAT
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	0	100	100	24.673.650									100	50.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK dan Apip Lainnya	%	-	-	-	-	2.344.374.039	88	2.600.539.383	89	1.381.587.651	0	1.381.587.651	0	8.624.271.364	INSPEKTORAT	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	%	-	-	-	-	631.390.416	1	429.984.780	1	336.707.180	1	336.707.180	%	1.995.282.982	INSPEKTORAT	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	12.752.999.568	100	14.691.523.691	100	12.533.765.169	100	12.533.765.169	100	54.717.938.547	INSPEKTORAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.01	KECAMATAN																	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	1.005.998.600									100	1.005.998.600	KECAMATAN PADANG BARAT
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	0	100	617.479.900									100	617.479.900	KECAMATAN PADANG BARAT
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitas/kemampuannya	%	100	100	100	56.315.300									100	56.315.300	KECAMATAN PADANG BARAT
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	100	100	100	50.000.000									100	50.000.000	KECAMATAN PADANG BARAT
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	40.000.000									100	40.000.000	KECAMATAN PADANG BARAT
4.08.62	Program Pengembangan Kecamatan	Tingkat capaian kinerja sasaran Kecamatan	%	100	100	100	9.739.643.000									0	9.772.643.000	KECAMATAN PADANG BARAT
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase/ Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	699.331.602									9167	1.059.450.000	KECAMATAN PADANG TIMUR
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	303.449.182									100	348.920.000	KECAMATAN PADANG TIMUR
X.XX.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mematuhi aturan	%	100	100	100	4.000.000									100	4.000.000	KECAMATAN PADANG TIMUR
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	100	100	148.106.600									450	81.612.500	KECAMATAN PADANG TIMUR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024				
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	100	100	27.965.000								100	25.000.000	KECAMATAN PADANG TIMUR	
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	100	100	100	43.098.000								100	50.000.000	KECAMATAN PADANG TIMUR	
4.08.62	Program Pengembangan Kecamatan	Tingkat capaian kinerja sasaran Kecamatan	%	100	100	100	13.561.217.500								0	13.561.217.500	KECAMATAN PADANG TIMUR	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase/ cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	1.110.642.674								100	1.193.722.000	KECAMATAN PADANG UTARA	
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	318.992.396								100	314.419.000	KECAMATAN PADANG UTARA	
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitas/ kemampuannya	%	0	100	100	0								100	50.823.000	KECAMATAN PADANG UTARA	
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	100	100	35.053.000								100	37.000.000	KECAMATAN PADANG UTARA	
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	0	0	100	48.256.000								100	50.000.000	KECAMATAN PADANG UTARA	
4.08.62	Program Pengembangan Kecamatan	Tingkat capaian kinerja sasaran Kecamatan	%	100	100	100	4.159.058.520								0	9.974.428.900	KECAMATAN PADANG UTARA	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	0	0	100	1.188.397.226								100	1.480.710.000	KECAMATAN PADANG SELATAN	
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	0	0	100	894.661.000								100	799.782.000	KECAMATAN PADANG SELATAN	
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitas / kemampuannya	%	0	0	100	75.000.000								100	75.000.000	KECAMATAN PADANG SELATAN	
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	0	0	100	38.822.500								100	30.000.000	KECAMATAN PADANG SELATAN	
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	0	0	100	45.070.700								0	50.000.000	KECAMATAN PADANG SELATAN	
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	0	0	100	45.070.700								0	50.000.000	KECAMATAN PADANG SELATAN	
4.08.62	Program Pengembangan Kecamatan	Tingkat capaian kinerja sasaran Kecamatan	%	100	0	100	4.622.975.912								0	6.945.196.320	KECAMATAN PADANG SELATAN	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	0	0	100	1.362.800.000								0	1.362.800.000	KECAMATAN NANGGALO	
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	0	0	100	880.000.000								0	880.000.000	KECAMATAN NANGGALO	
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitas / kemampuannya	%	0	0	100	95.317.000								100	95.317.000	KECAMATAN NANGGALO	
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	100	100	39.000.000								100	39.000.000	KECAMATAN NANGGALO	
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	0	0	100	50.000.000								100	50.000.000	KECAMATAN NANGGALO	
4.08.62	Program Pengembangan Kecamatan	Persentase peningkatan pelaksanaan	%	0	100	100	15.580.579.892								100	15.580.579.892	KECAMATAN NANGGALO	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	1.157.830.899								100	1.171.331.520	KECAMATAN KURANJI	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021	2022		2023		2024		periode RPJMD			
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	201.423.807								100	415.906.588	KECAMATAN KURANJI	
4.08.62	Program Pengembangan Kecamatan	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	%	0	0	0	6.141.771.555								0	18.073.033.658	KECAMATAN KURANJI	
X.XX.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	%	0	0	0	0								0	48.000.000	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitas / kemampuannya	%	0	0	0	0								0	68.000.000	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	0	0	0	44.960.000								0	30.000.000	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	0	0	0	49.687.000								0	50.000.000	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	
4.08.62	Program Pengembangan Kecamatan	Persentase Tingkat Pengembangan Kecamatan	%	0	0	0	7.450.058.315								0	8.957.034.000	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	0	0	0	731.289.675								0	929.942.000	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	135.000.000								100	280.626.850	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang yang meningkat kapasitas/kemampuannya	%	70	70	75	0								95	80.500.000	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	100	100	37.000.000								100	30.000.000	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	100	100	100	50.000.000								100	50.000.000	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	
4.08.62	Program Pengembangan Kecamatan	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan	%	100	100	100	4.314.850.447								100	12.314.576.400	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	699.331.602								100	855.955.000	KECAMATAN PAUH	
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	0	0	0	303.449.182								0	802.284.000	KECAMATAN PAUH	
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran		0 %	0	0	0	56.120.500								0	60.000.000	KECAMATAN PAUH	
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	0	0	0	42.120.400								0	42.628.000	KECAMATAN PAUH	
4.08.62	Program Pengembangan Kecamatan	1.Tingkat capaian kinerja sasaran Kecamatan 2. Nilai SAKIP Kecamatan	%	0	0	0	4.510.016.321								0	21.747.538.000	KECAMATAN PAUH	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	0	0	0	1.023.842.000								0	1.023.842.000	KECAMATAN KOTO TANGAH	
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	0	0	0	833.404.450								0	833.404.450	KECAMATAN KOTO TANGAH	
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	0	0	0	30.000.000								0	30.000.000	KECAMATAN KOTO TANGAH	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		periode RPJMD		
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	0	0	0	50.000.000									0	50.000.000	KECAMATAN KOTO TANGAH
4.08.62	Program Pengembangan Kecamatan	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	100	8.282.851.750									0	8.282.851.750	KECAMATAN KOTO TANGAH
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	0	0	0	1.054.230.000									0	1.023.842.000	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	0	0	0	440.309.200									0	833.404.450	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	0	0	0	47.650.000									0	30.000.000	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	0	0	0	73.100.000									0	50.000.000	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
4.08.62	Program Pengembangan Kecamatan	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	100	3.330.104.550									0	8.282.851.750	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	%	-	-	-	-		213.985.750	1	118.335.000	1	395.000.000	1	410.000.000	%	1.278.985.750	KECAMATAN PADANG BARAT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	%	-	-	-	-		1.961.909.312	1	2.015.749.267	1	5.040.468.309	1	6.792.531.520	%	15.847.933.441	KECAMATAN PADANG BARAT
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	-	-	-	-		40.500.000	-	30.800.000	-	115.000.000	-	120.000.000	-	320.500.000	KECAMATAN PADANG BARAT
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	-	-	-	-		728.629.750	-	1.200.653.650	-	1.100.000.000	-	1.600.000.000	-	4.573.088.850	KECAMATAN PADANG BARAT
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di desa	%	-	-	-	-		1.343.800.850	-	1.661.725.770	-	1.550.000.000	-	1.860.000.000	-	6.404.830.450	KECAMATAN PADANG BARAT
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-		9.761.704.742	-	10.188.581.491	-	10.780.623.191	-	11.195.366.700	-	42.339.596.633	KECAMATAN PADANG BARAT
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat capaian kinerja sasaran Kecamatan	%	-	-	-	-		535.744.762	1	822.566.140	1	831.218.000	1	845.673.950	%	3.036.962.986	KECAMATAN PADANG TIMUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	%	-	-	-	-		2.229.494.288	2,35	2.044.475.582	2,15	6.362.308.357	2,15	6.349.520.470	%	17.456.045.015	KECAMATAN PADANG TIMUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	-	-	-	-		159.331.750	-	110.721.150	-	270.720.000	-	284.256.000	-	888.798.500	KECAMATAN PADANG TIMUR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	-	-	-	-		1.408.094.200	-	1.771.283.000	-	1.644.575.625	-	1.951.284.406	-	7.012.640.431	KECAMATAN PADANG TIMUR
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	%	-	-	-	-		1.756.250.400	1	2.214.145.750	1	2.266.058.718	1	2.379.361.653	%	8.601.251.171	KECAMATAN PADANG TIMUR
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	10.805.334.326	100	11.826.450.788	100	11.623.536.011	100	12.747.800.488	100	47.211.775.301	KECAMATAN PADANG TIMUR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	%	-	-	-	-		203.392.400	1	148.726.000	1	345.000.000	1	480.000.000	%	1.313.392.400	KECAMATAN PADANG UTARA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	%	-	-	-	-		2.058.533.524	1	1.793.506.207	1	4.486.213.899	1	4.950.562.450	%	13.319.309.873	KECAMATAN PADANG UTARA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		periode RPJMD		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi tramtibmas kecamatan dan kelurahan	%	-	-	-	-		52.811.750	1	26.574.900	1	55.000.000	1	60.000.000	%	222.811.750	KECAMATAN PADANG UTARA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	-	-	-	-		930.804.000	-	1.461.091.350	-	1.372.000.000	-	1.655.000.000	-	5.550.804.000	KECAMATAN PADANG UTARA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	-	-	-	-	100	1.632.570.750	100	1.905.978.700	100	2.000.000.000	100	2.050.000.000	100	7.642.570.750	KECAMATAN PADANG UTARA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	10.028.438.448	100	10.927.626.499	100	11.433.112.000	100	11.464.912.000	100	44.108.022.448	KECAMATAN PADANG UTARA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	%	-	-	-	-		485.119.845	1	507.344.004	1	680.000.000	1	715.000.000	%	2.399.313.849	KECAMATAN PADANG SELATAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	%	-	-	-	-		3.862.437.855	1	5.765.194.062	1	4.965.638.361	1	4.662.359.067	%	19.265.319.345	KECAMATAN PADANG SELATAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	-		44.948.350	1	44.999.760	1	45.000.000	1	45.000.000	%	179.948.110	KECAMATAN PADANG SELATAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	-	-	-	-		1.221.764.025	1	1.703.782.852	1	1.264.800.000	1	1.664.800.000	%	5.990.041.877	KECAMATAN PADANG SELATAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	%	-	-	-	-		1.561.713.075	1	1.919.190.768	1	1.428.000.000	1	1.728.000.000	%	6.936.903.843	KECAMATAN PADANG SELATAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	11.700.416.828	100	12.472.086.140	100	12.261.567.200	100	12.461.567.200	100	49.095.637.368	KECAMATAN PADANG SELATAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	%	-	-	-	-		348.406.560	1	572.922.204	1	600.000.000	1	600.000.000	%	2.216.699.514	KECAMATAN NANGGALO
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	%	-	-	-	-		2.234.763.110	1	1.782.316.954	1	3.621.714.571	1	6.195.814.571	%	13.868.855.606	KECAMATAN NANGGALO
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi tramtibmas kecamatan dan kelurahan	%	-	-	-	-		36.440.000	1	40.001.000	1	70.000.000	1	70.000.000	%	226.440.000	KECAMATAN NANGGALO
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase lembaga keagamaan yang dibina	%	-	-	-	-	100	1.022.564.000	100	1.424.295.017	100	1.470.000.000	100	1.480.000.000	100	5.433.292.117	KECAMATAN NANGGALO
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	%	-	-	-	-		1.176.263.225	1	1.533.330.300	1	1.550.000.000	1	1.550.000.000	%	5.822.583.525	KECAMATAN NANGGALO
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	8.469.974.359	100	10.304.146.664	100	11.976.813.222	100	12.031.813.222	-	43.492.135.817	KECAMATAN NANGGALO
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat capaian kinerja sasaran Kecamatan	%	-	-	-	-		425.261.650	1	467.396.200	1	385.000.000	1	410.000.000	%	1.687.657.850	KECAMATAN KURANJI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	%	-	-	-	-		4.387.963.693	1	3.649.954.521	1	4.343.206.926	1	4.634.000.000	%	17.029.290.140	KECAMATAN KURANJI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi tramtibmas kecamatan dan kelurahan	%	-	-	-	-		43.742.500	1	21.074.000	1	45.000.000	1	45.000.000	%	154.816.500	KECAMATAN KURANJI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	-	-	-	-	100	2.205.553.250	100	4.238.284.100	100	2.550.000.000	100	4.950.000.000	100	13.943.837.350	KECAMATAN KURANJI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di kecamatan	%	-	-	-	-	100	2.225.687.640	100	2.779.996.990	100	2.500.000.000	100	2.739.744.079	100	10.288.717.709	KECAMATAN KURANJI
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	11.190.166.258	100	12.051.488.031	100	14.665.731.845	100	14.609.579.649	100	52.543.837.020	KECAMATAN KURANJI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021	2022		2023		2024					
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	-	-	-	-	-	778.389.890	-	439.368.290	-	640.000.000	-	638.997.773	-	2.773.825.203	LUBUK BEGALUNG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	%	-	-	-	-	-	3.985.485.881	-	4.214.053.254	-	4.003.240.950	-	3.653.240.950	-	14.861.569.957	LUBUK BEGALUNG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	-	-	-	-	-	66.503.500	-	55.065.400	-	94.739.100	-	94.739.100	-	350.720.800	LUBUK BEGALUNG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	-	-	-	-	-	2.007.164.265	-	2.745.380.700	-	2.806.568.200	-	3.507.199.200	-	11.513.096.165	LUBUK BEGALUNG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di kecamatan	%	-	-	-	-	-	2.675.342.570	-	3.618.460.300	-	3.604.335.000	-	4.174.815.000	-	14.435.482.370	LUBUK BEGALUNG
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	-	14.539.352.183	-	16.247.110.891	-	14.752.259.384	-	14.224.565.040	-	60.102.299.341	LUBUK BEGALUNG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Pengembangan Kecamatan	%	-	-	-	-	-	254.066.200	1	574.084.690	1	515.000.000	1	465.000.000	%	2.016.083.200	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	%	-	-	-	-	-	1.951.887.140	1	1.754.794.562	1	4.680.000.000	1	4.702.000.000	%	12.768.754.156	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi tramtibmas kecamatan dan kelurahan	%	-	-	-	-	-	26.510.000	1	55.228.200	1	50.000.000	1	50.000.000	%	199.224.900	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	-	-	-	-	-	1.227.826.043	1	1.962.271.110	1	1.350.000.000	1	3.150.000.000	%	7.687.272.043	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	%	-	-	-	-	-	1.041.408.750	1	1.281.062.062	1	1.300.000.000	1	1.300.000.000	%	4.899.728.750	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	-	7.801.758.026	-	8.931.686.306	-	11.407.000.000	-	11.857.000.000	-	41.028.532.685	KECAMATAN LUBUK KILANGAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	%	-	-	-	-	-	446.303.745	1	436.972.730	1	510.000.000	1	515.000.000	%	2.061.939.283	KECAMATAN PAUH
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	-	-	-	-	-	2.413.897.594	0,65	2.180.640.279	0,7	2.950.000.000	0,75	4.000.000.000	%	11.668.887.768	KECAMATAN PAUH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	-	-	-	-	-	116.554.825	-	37.913.460	-	145.000.000	-	245.000.000	-	561.554.735	KECAMATAN PAUH
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	-	-	-	-	-	1.571.952.250	-	2.114.807.404	-	2.500.000.000	-	2.750.000.000	-	8.964.189.740	KECAMATAN PAUH
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	%	-	-	-	-	-	1.219.224.500	1	1.553.309.830	1	1.750.000.000	1	2.000.000.000	%	6.569.224.480	KECAMATAN PAUH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	-	9.253.106.877	-	10.237.589.648	-	11.610.393.920	-	12.672.033.312	-	44.359.751.017	KECAMATAN PAUH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	%	-	-	-	-	-	708.413.800	1	463.904.560	1	580.000.000	1	460.000.000	%	2.769.758.387	KECAMATAN KOTO TANGAH
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	-	-	-	-	-	4.296.145.831	1	3.889.009.892	1	5.410.000.000	1	1.300.000.000	%	14.275.897.051	KECAMATAN KOTO TANGAH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	-	-	-	-	-	49.999.850	-	33.758.650	-	50.000.000	-	50.000.000	-	199.999.850	KECAMATAN KOTO TANGAH
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	-	-	-	-	-	3.374.466.294	-	4.101.404.569	-	4.900.000.000	-	4.900.000.000	-	18.620.928.463	KECAMATAN KOTO TANGAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021	2022		2023		2024					
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	%	-	-	-	-		4.384.455.250	-	4.539.055.300	-	4.200.000.000	-	4.200.000.000	-	17.601.053.400	KECAMATAN KOTO TANGAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-		15.302.908.790	-	16.226.795.710	-	26.213.590.000	-	26.554.090.000	-	83.591.245.954	KECAMATAN KOTO TANGAH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	%	-	-	-	-		97.721.700	1	188.084.039	1	415.000.000	1	500.000.000	%	1.404.223.500	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	%	-	-	-	-		1.568.319.100	1	1.471.253.442	1	2.000.000.000	1	2.450.000.000	%	7.787.189.538	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya koordinasi tramtibmas kecamatan dan kelurahan	%	-	-	-	-		77.022.000	1	64.717.600	1	115.000.000	1	150.000.000	%	455.544.000	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	-	-	-	-		585.460.000	1	1.034.047.590	1	760.000.000	1	1.100.000.000	%	3.254.510.000	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	-	-	-	-		703.006.625	1	787.640.200	1	1.000.000.000	1	1.200.000.000	%	3.888.893.250	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-		7.999.391.641	-	7.482.896.113	-	10.694.545.244	-	12.309.012.674	-	38.700.169.496	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH																	
5.01.74	Program Pengembangan Informasi, Media Massa, dan Koordinasi Kehumasan	Persentase pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa dan koordinasi kehumasan	%		100	100	100	3.018.247.855								100	3.018.247.855	BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase/cakupan pelayanan adminstrasi perkantoran	%		100	100	100	616.022.545								100	616.022.545	BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%		100	100	100	120.988.000								100%	120.988.000	BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%		100	100	100	29.641.600								100	29.641.600	BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%		0	0	100	50.000.000								100	50.000.000	BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN
5.01.67	Program Administrasi dan Koordinasi Bidang Pembangunan	Persentase pembangunan daerah yang terlaksana dengan baik	%		100	100	100	719.076.350								100	719.076.350	BAGIAN PEMBANGUNAN
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	100	100	373.137.900								100	373.137.900	BAGIAN PEMBANGUNAN
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitas/kemampuannya	%		100	100	100	69.513.750								100	69.513.750	BAGIAN PEMBANGUNAN
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%		100	100	100	20.000.000								100	20.000.000	BAGIAN PEMBANGUNAN
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%		100	100	100	50.000.000								100	50.000.000	BAGIAN PEMBANGUNAN
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%		100	100	100	40.200.000								100	40.200.000	BAGIAN PEMBANGUNAN
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	%		0	0	100	370.660.000								100	370.660.000	BAGIAN PEREKONOMIAN
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	%		100	100	100	25.000.000								100	25.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%		100	100	100	15.000.000								100	15.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		periode RPJMD		
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Tingkat ketepatan waktu Penyusnsa Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	%	100	100	100	40.000.000									0	40.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN
5.01.68	Program Administrasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian	Persentase kegiatan administrasi dan koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100	808.377.000									100	808.377.000	BAGIAN PEREKONOMIAN
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	351.010.000									100	351.010.000	BAGIAN KERJASAMA
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	46.700.000									100	46.700.000	BAGIAN KERJASAMA
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	100	100	25.000.000									100	25.000.000	BAGIAN KERJASAMA
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	-	100	100	50.000.000									100	50.000.000	BAGIAN KERJASAMA
5.01.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Akses Kerjasama Luar Negeri	%	1	1	100	55.033.000									100	55.033.000	BAGIAN KERJASAMA
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	386.448.350									100	386.448.350	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	71.360.000									100	71.360.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	100	100	10.000.000									100	10.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	100	100	100	50.000.000									100	50.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5.01.69	Program Administrasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan administrasi dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100	1.580.815.500									100	1.580.815.500	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5.01.73	Program Pembinaan Mental dan Keagamaan	Presentasi peningkatan perbaikan mental dan perbaikan rumah ibadah	%	100	100	100	6.199.867.000									100	6.199.867.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase /cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	493.718.950									100	493.718.950	BAGIAN HUKUM
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	30.896.000									100	30.896.000	BAGIAN HUKUM
X.XX.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	%	0	0	100	13.500.000									100	13.500.000	BAGIAN HUKUM
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan di susun tepat waktu	%	100	100	100	11.000.000									100	11.000.000	BAGIAN HUKUM
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran di susun tepat waktu	%	100	100	100	40.000.000									100	40.000.000	BAGIAN HUKUM
5.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	persentase rancangan produk hukum daerah yang diharmonisasi	%	100	100	100	1.553.126.050									100	1.553.126.050	BAGIAN HUKUM
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	494.781.000									100	494.781.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	56.968.000									100	56.968.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
X.XX.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	%	100	0	100	20.000.000									100	20.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	100	100	243.000.000									100	243.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		K	Rp.	
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	1	0	1	37.500.000									1	37.500.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
5.01.66	Program Administrasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan	SKPD	115	115	115	1.312.175.000									115	1.312.175.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	350.119.400									100	350.119.400	BAGIAN ORGANISASI
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	34.846.000									100	34.846.000	BAGIAN ORGANISASI
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	0	0	100	84.980.000									100	84.980.000	BAGIAN ORGANISASI
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	10.000.000									100	10.000.000	BAGIAN ORGANISASI
5.01.64	Program Administrasi dan Koordinasi Bidang Organisasi	Persentase kegiatan administrasi dan koordinasi bidang organisasi rakyat yang dilaksanakan dengan baik	%	0	0	100	1.542.984.790									100	1.542.984.790	BAGIAN ORGANISASI
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	88,06136	0,772745	1	18.374.113.000									1	18.374.113.000	BAGIAN UMUM
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%	79,89857	0,611374	100	3.913.570.000									100	3.913.570.000	BAGIAN UMUM
X.XX.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	%	100	0,90374	100	342.000.000									100	342.000.000	BAGIAN UMUM
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disusun Tepat Waktu	%	100	100	100	260.629.000									100	260.629.000	BAGIAN UMUM
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran disusun Tepat Waktu	%	0	0	100	50.000.000									100	50.000.000	BAGIAN UMUM
5.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Tingkat Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	%	48,38	0,40601	100	1.474.671.000									100	1.474.671.000	BAGIAN UMUM
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase/ Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	556.400.000									100	556.400.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	1	1	100	90.000.000									100	90.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Disusun Tepat Waktu	%	100	100	100	25.000.000									100	25.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Disusun Tepat Waktu	%	-	100	100	50.000.000									100	50.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
5.01.65	Program Peningkatan Pelayanan pengadaan barang / jasa	Persentase Paket Pekerjaan Perangkat Daerah yang Ditender	Persen	100	100	100	1.108.641.000									100	1.108.641.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang Meningkatkan Kapasitas/ Kemampuannya	%	-	100	100	115.000.000									100	115.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terwujudnya koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat yang baik	%	-	-	-	-	100	661.916.050	100	33.448.073.922	100	1.263.523.000	100	2.159.704.000	100	8.511.499.350	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024				
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	1.071.442.200	100	57.866.305.772	100	2.475.318.000	100	1.944.503.000	100	5.637.200.300	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terwujudnya koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat yang baik	%	-	-	-	-	100	34.021.943.720	100	0	100	1.446.415.300	100	1.542.565.300	100	82.155.047.684	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	1.236.947.200	100	1.705.870.850	100	11.194.595.300	100	8.740.299.700	100	5.383.582.646	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terwujudnya koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat yang baik	%	-	-	-	-	100	1.980.596.257	100	0	100	833.798.900	100	922.266.300	100	5.612.987.257	BAGIAN HUKUM
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	895.560.243	100	0	100	1.175.050.000	100	1.218.550.000	100	4.318.624.957	BAGIAN HUKUM
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terwujudnya koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat yang baik	%	-	-	-	-	100	263.674.790	100	0	100	1.289.000.000	100	1.329.000.000	100	2.720.374.090	BAGIAN KERJASAMA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	745.427.682	100	0	100	1.286.601.100	100	1.347.101.100	100	4.428.495.782	BAGIAN KERJASAMA
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase pembangunan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan ekonomi kreatif	%	-	-	-	-	100	666.235.750	100	0	100	555.980.650	100	575.000.000	100	4.364.235.750	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	986.762.750	100	0	100	1.589.926.168	100	1.629.926.168	100	5.639.115.086	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase pembangunan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan ekonomi kreatif	%	-	-	-	-	100	510.400.100	100	0	100	560.000.000	100	560.000.000	100	2.205.719.200	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	1.479.459.908	100	0	100	1.893.282.950	100	1.925.000.000	100	6.969.454.658	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase pembangunan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan ekonomi kreatif	%	-	-	-	-	100	431.409.600	100	0	100	2.708.888.155	100	2.725.725.964	100	2.065.970.600	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	938.498.000	100	533.941.350	100	1.162.443.800	100	1.173.443.800	100	4.322.824.600	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	1.708.094.400	100	0	100	44.106.209.768	100	49.521.371.846	100	9.227.223.169	BAGIAN ORGANISASI
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	41.745.290.249	100	0	100	5.515.254.641	100	6.004.669.047	100	169.475.030.209	BAGIAN UMUM
8.01	SEKRETARIAT DPRD																	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		0	100	100	5.878.184.585								100	7.167.606.550	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	%		0	100	100	1.865.140.500								100	6.200.198.600	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kepatuhan Aparatur	%		0	100	100	610.462.500								100	949.249.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%		0	100	80	160.000.000								100	300.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024				
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tingkat ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	0	100	100	30.000.000								100	30.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran disusun tepat waktu	%	0	0	85	50.000.000								100	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD	
5.02.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah	%	0	100	100	27.521.758.877								100	38.590.806.850	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	-	-	-	-	-	39.429.901.681	-	39.077.674.555	-	36.689.000.184	-	37.882.228.564	-	150.520.556.231	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	41.585.496.529	-	41.649.155.585	-	41.256.095.298	-	45.781.095.298	-	171.300.182.620	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
6.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pengembangan wawasan kebangsaan	%	0	0	0	30.000.000								0	30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
6.01.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pengembangan wawasan kebangsaan	%	100	0	100	25.000.000								100	25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
6.01.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	%	0	0	100	55.000.000								0	55.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
6.01.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase tingkat kepatuhan aparatur	%	0	0	100	16.000.000								1	16.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase / cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	768.132.000								100	768.132.000	SEKRETARIAT DPRD	
X.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	220.000.000								100	220.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
X.XX.05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitas/ kemampuannya	%	1	1	100	65.000.000								100	65.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
X.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan disusun tepat waktu	%	100	100	100	30.000.000								100	30.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
X.XX.09	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran disusun tepat waktu	%	100	100	100	50.000.000								100	50.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.01.27	Program Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Persentase potensi Konflik yang ditangani	%	100	100	100	1.694.100.000								100	1.694.100.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.01.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase tokoh masyarakat yang mendapat pemahaman wawasan kebangsaan	%	100	100	100	612.135.000								100	612.135.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.01.26	Program Pembinaan Politik dan Kewaspadaan Nasional	Persentase ormas yang mendapat pemahaman politik	%	100	100	100	800.652.000								100	800.652.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.01.22	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0	100	100	811.271.994								100	2.453.048.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
6.01.28	Program Kedaruratan dan Logistik bencana	Persentase penanganan penanggulangan bencana	%	0	0	100	2.645.454.552								100	2.424.235.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PERANGKAT DAERAH
				2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		periode RPJMD		
				K	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase/cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	0	100	100	713.919.597									100	831.200.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	-	-	-	-	100	577.853.950	100	443.547.625	100	577.853.950	100	1.745.220.000	100	3.478.781.850	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase terlaksananya program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melaluo Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	-	-	-	-	100	1.031.255.250	100	1.618.812.500	100	1.031.255.250	100	47.405.937.360	100	16.108.765.750	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	-	-	-	-	100	889.965.800	100	872.651.100	100	889.965.800	100	1.889.965.800	100	4.559.863.200	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	-	-	-	-	100	1.352.163.300	100	932.168.500	100	952.163.300	100	1.518.910.200	100	5.575.400.100	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	-	-	-	-	100	665.658.150	100	527.308.900	100	665.658.150	100	841.000.000	100	4.837.974.450	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	%	-	-	-	-	100	4.018.533.847	100	3.600.773.525	100	3.618.533.847	100	3.970.152.000	100	14.025.753.541	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019-2024



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD KOTA
PADANG TAHUN 2019-2024

Daftar Isi

8	BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	8-1
8.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	9-3
8.2	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	9-7
8.2.1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	9-8
8.2.2	Aspek Daya Saing Daerah	9-12
8.2.3	Aspek Pelayanan Umum	9-12

Daftar Tabel

Tabel 8-1	Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Kota Padang Tahun 2019-2024	9-2
Tabel 8-2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Sebagai Indikator Sasaran Pembangunan Kota Padang Tahun 2019 – 2024	9-4
Tabel 8-3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Padang	9-8

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun kedepan menurut tujuan dan sasaran pada setiap Misi yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9-1 Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Kota Padang Tahun 2019-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD	
			2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,25	82,68	82,40	82,82	82,50	82,15	82,60	83,43	82,70	84,11	82,75	84,65	82,75	84,65
2	Indeks Kota Layak huni	Indeks	56,00	56,50	57,00	67,98	57,50	68,03	58,00	68,08	59,00	68,15	60,00	68,30	60,00	68,30
3	Pertumbuhan ekonomi	%	6,09	5,65	6,15	-1,86	6,20	2,50	6,25	3,14	6,30	4,43	6,35	4,77	6,35	4,77
4	Gini Ratio	Poin	0,340	0,31	0,330	0,310	0,330	0,310	0,330	0,309	0,320	0,308	0,320	0,307	0,320	0,307
5	Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	%	6,20	6,23	6,50	6,20	6,65	6,23	6,80	6,25	6,95	6,28	7,10	6,29	7,10	6,29
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	18,59	19,30	20,40	15,00	21,30	18,75	22,21	19,10	23,11	20,25	24,01	20,50	24,01	20,50
7	Indeks Resiko Bencana **	Angka	0,65	0,65	0,63	0,63	0,61	0,61								
	Indeks Ketahanan Daerah *	Level	3,00	3,00	-	3,05	-	3,05	-	3,05	-	3,05	-	3,05	-	3,05
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	68,08	69,58	82,00	69,87	83,00	71,00	84,00	72,00	85,00	73,00	86,00	74,00	74,00	74,00

Keterangan: *Indikator Baru

** Indikator dihapus

Target dihapus

9.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Target indikator kinerja utama pembangunan Kota Padang Tahun 2019-2024 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu lima tahun kedepan sampai dengan tahun 2024, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 9-2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Sebagai Indikator Sasaran Pembangunan Kota Padang Tahun 2019 – 2024

Urutan Sasaran	Indikator	Satu-an	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD	
			2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target
1.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,33	11,34	11,45	11,58	11,50	11,45	11,55	11,72	11,75	11,77	12,00	12,01	12,00	12,01
	Harapan lama Sekolah	Tahun	16,50	16,51	16,70	16,52	16,80	16,60	16,90	16,93	16,95	17,14	17,00	17,35	17,00	17,35
	Rata-rata nilai Kelulusan SD**	Tahun	76,62	76,65	76,70	-	76,85									
	Rata-rata nilai Kelulusan SMP**	Tahun	55,25	56,00	56,10	-	56,25									
2.	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,35	73,57	73,37	73,65	73,40	73,40	73,60	73,60	73,80	73,64	74,00	73,68	74,00	73,68
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	-	-	-	9,10	-	-	-	7,5	-	7,0	-	6,5	-	6,5
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,77	93,48	94,82	93,64	95,17	93,77	95,52	93,85	95,87	93,48	96,00	94,30	96,00	94,30
	Indeks Inovasi Daerah**	Angka	2.530	6.550	10.000	3.779	15.000									
4.	Pengeluaran perkapita*	Rp. (juta)	14,31	14,72	-	14,48	-	14,80	-	14,728	-	14,987	-	15,302	-	15,302
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan	Poin	81,53	82,00	83,00	79,00	84,00	84,00	84,50	83,50	85,00	84,00	85,50	84,70	85,50	84,70
6.	Persentase perumahan dan permukiman yang layak*	Persen	-	-	-	74,16	-	75,37	-	76,58	-	78,95	-	81,16	-	81,16
7.	Angka Kriminalitas	Angka	3.710	3.500	3.300	3.300	3.150	3.150	2.900	2.175	2.730	2.045	2.500	1.875	2.500	1.875
8.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	68,69	68,00	68,20	68,41	68,30	68,30	68,50	68,50	68,60	68,60	68,80	68,60	68,60	68,60
	Luas Kawasan kumuh yang ditangani	Ha	61,19	27,18	6,12	10,29	24,47	34,76	30,58	63,95	30,58	93,14	30,58	122,33	30,58	122,33
	Indeks Sanitasi**	angka	85	87	90	-	95									
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,18	8,76	9,10	13,64	8,83	11,01	8,39	13,30	7,98	13,09	7,80	12,86	7,80	12,86
10.	Tingkat kemiskinan	%	4,74	4,68	4,65	4,40	4,60	4,60	4,58	4,33	4,56	4,22	4,54	4,10	4,54	4,10
	PDRB per-kapita (ADHB)	ribu	62.050	65.000	67.500	64.660	70.500	65.000	73.000	73.620	75.500	77.230	78.000	82.040	78.000	82.040
11.	Peningkatan nilai PMA, PMDN*															
	PMA*	US \$	341.312,84	18.601,8	48.609.00	48.609.00	950.000	17.123.287,67	17.123.287,67	17.123.288	17.123.287,67	17.123.288	17.123.287,67	17.123.288	17.123.287,67	17.123.288

Urutan Sasaan	Indikator	Satu-an	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD	
			2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target
	PMDN*	Juta Rupiah	767.647,6	1.417.802,60	435.150	435.150	950.000	950.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
12.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	16,92	16,97	17,06	16,41	17,09	16,90	17,13	17,25	17,16	17,75	17,19	17,85	17,19	17,85
13.	Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (e-kraf)	%	7,5	8,0	8,5	8,5	9,0	9,0	9,5	9,5	10,0	10,0	10,5	10,5	10,5	10,5
14.	Kontribusi sektor pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata Propinsi Sumatera Barat	%	27,46	27,73	28,00	20,00	28,27	23,50	28,54	28,50	28,82	30,00	28,90	31,50	28,90	31,50
15.	Jumlah kunjungan wisata mancanegara	Orang	71.054	73.284	76.956	21.650	80.628	22.743	84.300	23.880	87.972	25.790	91.645	28.369	91.645	28.369
	Jumlah kunjungan wisata domestik	orang	5.076.581	5.184.590	5.590.810	2.562.966	5.997.030	2.691.102	6.403.249	2.879.479	6.809.469	3.138.632	7.215.689	3.164.222	7.215.689	3.164.222
	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara*	Hari	4,3	3,15	-	1,73	-	1,6	--	1,7	-	1,8	-	1,9	-	1,9
	Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik*	Hari	1,91	1,13	-	1,50	-	1,75	--	2,0	-	2,15	-	2,5	-	2,5
16.	Persentase peningkatan kelurahan tangguh bencana	%	0	0	3	2	5	1	5	5	5	5	5	5	5	18
17.	Persentase bencana yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Indeks Ketahanan Daerah**	%	3,04	3,04	3,05	-	3,10									
	- Respon Time**	menit	15	15	15	-	15									
18.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	A	A	A
	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota	Nilai	3,13	3,15	3,18	3,18	3,20	3,15	3,23	3,16	3,26	3,17	3,30	3,20	3,30	3,20
20.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (IKM)	Angka	80,23	80,50	80,75	79,83	81,00	80,00	81,25	80,10	81,50	80,20	81,75	80,30	81,75	80,30
	Indeks Kemudahan Berusaha**	Angka	77,73	N/A	92,26	-	95,13									
	Indeks Kemudahan Perizinan Daerah*	Angka	-	-	-	-	-	-	-	75,00	-	78,00	-	80,00	-	80,00

Urutan Sasaan	Indikator	Satu-an	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD	
			2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,67	2,73	2,78	2,78	2,83	2,83	2,87	2,87	2,93	2,93	2,97	2,97	2,97	2,97

Keterangan: * Indikator Baru



Sasaran/Indikator Sasaran dihapus



Target dihapus

9.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode Tahun 2019 – 2024 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Kota Padang tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9-3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Padang

9.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pertumbuhan PDRB	%	$\frac{P_{(t+1)} - P_{(t)}}{P_{(t)}} \times 100\%$ Dimana t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	6,09	5,68	6,15	(1,86)	6,20	2,50	6,25	3,14	6,30	4,43	6,35	4,77	6,35	4,77	Seluruh OPD
2	Laju inflasi	%	$\left[\frac{(1 + \Delta h_{(t)}) (1 + \Delta h_{(t-1)}) \dots (1 + \Delta h_{(t-n)})}{1} \right]^{1/n} - 1$ dimana: $\Delta h_{(t)} = \frac{h_{(t+1)} - h_{(t)}}{h_{(t)}} \times 100\%$ Dimana Inf(n) = tahun pengamatan PDRB Inf(n+1)= tahun pengamatan PDRB sebelumnya n= tahun ...	0,21	1,72	0,18	0,23	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	Seluruh OPD
3	PDRB per kapita (ADHB)	Rp ribu	$\frac{P}{P_{(t)} h_{(t)} T_{(t)} h_{(t)}}$ Dimana: Pi = tahun pengamatan PDRB Qi = tahun pengamatan PDRB sebelumnya n= tahun ...	62.050	65.000	67.500	64.660	70.500	65.000	73.000	73.620	75.500	77.230	78.000	82.040	78.000	82.040	Seluruh OPD
4	Indeks Gini	nilai	$G = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(Q_i + Q_{i+1})$ Dimana : Pi: persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1, jika : G < 0,3 = Ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang	0,340	0,31	0,330	0,310	0,330	0,310	0,330	0,309	0,320	0,308	0,320	0,307	0,320	0,307	Seluruh OPD

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	$G > 0,5$ = Ketimpangan tinggi 100 - angka kemiskinan	95,26	95,32	95,15	95,60	95,40	95,40	95,20	95,67	95,44	95,78	95,46	95,90	95,46	95,90	1. Bappeda 2. Dinas Sosial 3. Dinas Dikbud 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Pertanian 6. Dinas Perikanan dan Pangan 7. Dinas Koperasi dan UKM 8. Dinas P3AP2KB 9. Dinas Perkim 10. Dinas Nakerin 11. RSUD 12. Bagian Kesra 13. Bagian Hukum
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	nilai	$\frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Dimana $X_{(1)} = I \quad H \quad H$ $X_{(2)} = I \quad P$ $= \frac{2}{3} (I \quad m \quad hu)$ $+ \frac{1}{3} (I \quad r \quad r \quad la \quad s \quad h)$ $X_{(3)} = I \quad S \quad H \quad L$ $I \quad X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)min}}{[X_{(i)max} - X_{(i)min}]}$ dimana: $X_{(i)} = I \quad k - i \quad (i = 1,2,3)$	82,25	82,68	82,40	82,82	82,50	82,15	82,60	83,43	82,70	84,11	82,75	84,65	82,75	84,65	1. Dinas Dikbud 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas P3AP2KB
7	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	11,33	11,34	11,45	11,58	11,5	11,45	11,55	11,72	11,75	11,77	12,00	12,01	12,00	12,01	Dinas Dikbud

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Angka usia harapan hidup	tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	73,35	73,57	73,37	73,65	73,4	73,4	73,6	73,60	73,8	73,64	74,00	73,68	74,00	73,68	Dinas Kesehatan
9	Persentase balita gizi buruk	%	$\frac{\sum_{j=0}^n \frac{h b}{j b} \frac{g b}{h b}}{\sum_{j=0}^n \frac{h b}{j b}} \times 100\%$	0,07	0,18	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	Dinas Kesehatan
10	Prevalensi balita gizi kurang	%	$\frac{\sum_{j=0}^n \frac{b}{j b} \frac{b}{h b} \frac{g}{h b} \frac{K}{h b}}{\sum_{j=0}^n \frac{b}{j b} \frac{h b}{h b}} \times 100\%$	1,04	6,73	4,50	4,50	4,40	4,40	4,30	4,30	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	Dinas Kesehatan
11	Cakupan Desa Siaga Aktif		$\frac{\sum_{j=0}^n \frac{h a}{h d} \frac{s}{h d} \frac{a}{h d}}{\sum_{j=0}^n \frac{h a}{h d} \frac{s}{h d} \frac{a}{h d}} \times 100\%$	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
12	Tingkat pengangguran terbuka	%	$\frac{\sum_{j=0}^n \frac{a}{a} \frac{k}{k}}{\sum_{j=0}^n \frac{a}{a} \frac{k}{k}} \times 100\%$	9,18	8,76	9,10	13,64	8,83	11,01	8,39	13,30	7,98	13,09	7,80	12,86	7,80	12,86	Dinas Nakerin
13	Rasio penduduk yang bekerja	%	$\frac{\sum_{j=0}^n \frac{a}{a} \frac{y}{y} \frac{b}{b}}{\sum_{j=0}^n \frac{a}{a} \frac{y}{y} \frac{b}{b}} \times 100\%$	90,82	91,24	90,90	60,00	91,17	70,00	91,61	87,50	92,02	88,00	92,20	88,50	92,20	88,50	Dinas Nakerin
14	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	nilai	$\frac{\sum_{j=0}^n \frac{N}{N} \frac{p}{p} \frac{p}{p} \frac{u}{u}}{\sum_{j=0}^n \frac{N}{N} \frac{p}{p} \frac{p}{p} \frac{u}{u}} \times 100\%$	80,23	80,50	80,75	79,83	81,00	80,00	81,25	80,10	81,50	80,20	81,75	80,30	81,75	80,30	Bag. Organisasi
15	Persentase PAD terhadap pendapatan		$\frac{\sum_{j=0}^n \frac{P}{P} \frac{A}{A} \frac{E}{E} \frac{h}{h}}{\sum_{j=0}^n \frac{P}{P} \frac{A}{A} \frac{E}{E} \frac{h}{h}} \times 100\%$	%	23,24	34,32	28,10	35,17	33,88	38,28	38,28	35,78	35,78	35,23	35,23	35,23	35,23	1. Bapenda 2. BPKAD 3. Dinas Perdagangan 4. Dinas Pertanian 5. Dinas Pariwisata 6. Dinas Kelautan dan Pangan 7. Dispora 8. Diskominfo 9. Dinas Perhubungan 10. Dinas LH 11. Dinas Nakerin 12. Dinas Damkar 13. Dinas Perkim 14. Dinas PUPR 15. RSUD

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		16. Dinas Kesehatan
16	Opini BPK	opini	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
17	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	91,50	87,30	94,00	88,88	95,20	90,40	96,40	91,90	96,50	93,50	96,60	95,00	96,60	95,00	Dinas Pangan
18	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	$\frac{\sum s \frac{K}{P} \frac{P}{P}}{\sum P} \times 100\%$	5,48	5,30	6,30	5,41	6,50	5,70	6,70	6,00	7,00	6,30	7,30	6,60	7,30	6,60	Dinas Pertanian
19	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	$\frac{\sum s \frac{K}{P} \frac{P}{P}}{\sum P} \times 100\%$	1,46	1,50	1,58	1,00	1,64	1,12	1,69	1,24	1,72	1,33	1,78	1,46	1,78	1,46	Dinas Pariwisata
20	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	$\frac{\sum s \frac{K}{K} \frac{P}{P}}{\sum P} \times 100\%$	5,48	5,30	6,30	5,41	6,50	5,70	6,70	6,00	7,00	6,30	7,30	6,60	7,30	6,60	Dinas Kelautan dan Pangan
21	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	$\frac{\sum s \frac{K}{P} \frac{P}{P}}{\sum P} \times 100\%$	16,92	16,97	17,06	16,41	17,09	16,90	17,13	17,25	17,16	17,75	17,19	17,85	17,19	17,85	Dinas Perdagangan
22	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	$\frac{\sum s \frac{K}{I} \frac{P}{P}}{\sum P} \times 100\%$	14,12	11,74	13,08	11,87	12,62	12,62	12,15	7,64	11,69	8,08	11,23	8,79	11,23	8,79	Dinas Nakerin

9.2.2 Aspek Daya Saing Daerah

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Angka kriminalitas yang tertangani	angka	$\frac{Jumlah\ kasus\ yang\ tertangani}{Jumlah\ penduduk} \times 10.000$	3.710	3.500	3300	3.300	3150	3.150	2900	2.175	2730	2.045	2500	1.875	2500	1.875	1. Satpol PP 2. Kesbangpo
2	Rasio ketergantungan	rasio	$\frac{\sum P < 15 th + \sum > 64 th}{\sum P 15 - 64} \times 100\%$	42,12	42,03	41,79	41,79	41,64	41,64	41,49	41,49	41,33	41,33	41,18	41,18	41,18	41,18	Dinas Dukcapil

9.2.3 Aspek Pelayanan Umum

1. Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2	Angka Partisipasi Kasar																	
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	$\frac{Jumlah\ h S P (T / R / K / S / T)}{Jumlah\ h a u 0 - 6 t h u}$	62,3	26,86	62,35	27	62,45	25,5	62,5	22,35	62,55	22,35	62,55	22,36	62,55	22,36	Dinas Dikbud
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	$\frac{Jumlah\ h S P A}{Jumlah\ h P 7 - 12 T h u} \times 100\%$	102,47	101,01	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Dikbud
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	$\frac{Jumlah\ h S P B}{Jumlah\ h P 13 - 15 T h u} \times 100\%$	90,88	91,73	100	91,1	100	91,15	100	98,97	100	98,97	100	98,98	100	98,98	Dinas Dikbud

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3	Angka Partisipasi Murni																	
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	$\frac{J_u \quad h \quad s \quad u \quad 7-12 \quad t \quad h u}{J_u \quad h \quad P \quad S / M / P \quad A} \times 100\%$	91,84	90,73	96,2	91	96,25	91,05	96,3	96,64	96,35	96,64	96,12	96,65	96,12	96,65	Dinas Dikbud
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	$\frac{J_u \quad h \quad s \quad u \quad 7-12 \quad T \quad h u}{J_u \quad h \quad P \quad S / M / P \quad B} \times 100\%$	69,52	70,82	80,05	70,85	80,2	70,9	80,25	81,4	80,3	81,4	88,1	81,41	88,1	81,41	Dinas Dikbud
1.4	Angka Putus Sekolah																	
1.4.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	$\frac{J_u \quad h \quad P \quad u \quad 7-12 \quad t \quad h u}{J_u \quad h \quad P \quad T \quad h u \quad y \quad p \quad h / s \quad b \quad h \quad u} \times 100\%$	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Dikbud
1.4.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	$\frac{J_u \quad h \quad P \quad u \quad 13-15 \quad t \quad h u}{J_u \quad h \quad P \quad T \quad h u \quad y \quad p \quad h / s \quad b \quad h \quad u} \times 100\%$	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Dikbud
1.5	Angka Kelulusan																	
1.5.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	$\frac{J_u \quad h \quad u \quad p \quad j \quad S / M}{J_u \quad h \quad S \quad t \quad t \quad h u \quad S t} \times 100\%$	100	98,66	100	98,7	100	98,75	100	98,68	100	98,68	100	98,69	100	98,69	Dinas Dikbud
1.5.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	$\frac{J_u \quad h \quad u \quad p \quad j \quad S / M}{J_u \quad h \quad S \quad t \quad t \quad h u \quad S t} \times 100\%$	100	99,96	100	100	100	100	100	99,98	100	99,98	100	99,98	100	99,98	Dinas Dikbud
1.6	Angka Melanjutkan (AM)																	
1.6.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	$\frac{J_u \quad h \quad s \quad b \quad t \quad I \quad p}{J_u \quad h \quad u \quad p \quad j \quad S / M} \times 100\%$	100	95,67	100	95,7	100	95,75	100	95,69	100	95,69	100	95,7	100	95,7	Dinas Dikbud

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.6.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	$\frac{J_t \text{ h s } b \text{ ti } p}{J_t \text{ h s } S / S_i / M} \times 100\%$	100	109,66	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Dikbud
1.7	Fasilitas Pendidikan																	
1.7.1	Ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik	%	$\frac{J_t \text{ h r } k \text{ p } S / M}{J_t \text{ h s } h r \text{ k } S / M} \times 100\%$	100	69,95	100	70	100	70,05	100	69,97	100	69,97	100	69,98	100	69,98	Dinas Dikbud
1.7.2	Ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	$\frac{J_t \text{ h r } k \text{ p } S / M}{J_t \text{ h s } h r \text{ k } S / M} \times 100\%$	100	83,61	100	83,65	100	83,7	100	83,63	100	83,63	100	83,64	100	83,64	Dinas Dikbud
1.8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	rasio	$\frac{J_t \text{ h s } h S / M}{J_t \text{ h P } u (7 \text{ s.d } 12) \text{ thn}}$	0	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0	0,005	0	0,005	0	0,005	0	0,005	Dinas Dikbud
1.9	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	rasio	$\frac{J_t \text{ h s } h S / M}{J_t \text{ h P } u (13 \text{ s.d } 15) \text{ thn}}$	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0	0,003	0	0,003	0	0,003	0	0,003	Dinas Dikbud
1.10	Rasio siswa/guru sekolah SD	rasio	$\frac{J_t \text{ h s } S / M}{J_t \text{ h g } S / M}$	18,18	16,99	17,79	17,8	20,42	17,82	21,22	17,01	21,99	17,01	22,7	17,02	22,7	17,02	Dinas Dikbud
1.11	Rasio siswa/guru sekolah SMP/MI	rasio	$\frac{J_t \text{ h s } S / M}{J_t \text{ h g } S / M}$	15,51	13,99	17,98	14	19,46	14,05	20,7	14,01	22	14,01	23,36	14,02	23,36	14,02	Dinas Dikbud
1.12	Rasio siswa per kelas jenjang SD/MI	rasio	$\frac{J_t \text{ h s } S / M}{J_t \text{ h k } j_t \text{ p } S / M}$	25	25,27	28,87	25,3	29,8	25,32	30,92	25,29	31,98	25,29	33,01	25,3	33,01	25,3	Dinas Dikbud
1.13	Rasio siswa per kelas jenjang SMP/MTs	rasio	$\frac{J_t \text{ h s } S / M}{J_t \text{ h k } j_t \text{ p } S / M}$	30	30,78	29,78	30,8	29,52	30,81	29,5	30,8	29,42	30,8	29,28	30,81	29,28	30,81	Dinas Dikbud
1.14	Persentase Sekolah SD/MI Akreditasi A & B	%	$\frac{J_t \text{ h s } h S / M}{J_t \text{ h s } h S / M} \times 100\%$	76,67	94,75	85	94,8	85	94,85	85	94,77	85	94,77	85,22	94,78	85,22	94,78	Dinas Dikbud
1.15	Persentase Sekolah SMP/MTs Akreditasi A & B	%	$\frac{J_t \text{ h s } h S / M}{J_t \text{ h s } h S / M} \times 100\%$	64,96	89,83	70	89,85	70	89,9	70	89,85	70	89,85	70,54	89,86	70,54	89,86	Dinas Dikbud
1.16	Persentase Guru Layak SD/MI	%	$\frac{J_t \text{ h s } h S / M}{J_t \text{ h s } h S / M} \times 100\%$	89,48	91,65	100	91,7	100	91,75	100	91,67	100	91,67	100	91,68	100	91,68	Dinas Dikbud
1.17	Persentase Guru Layak SMP/MTs	%	$\frac{J_t \text{ h s } h S / M}{J_t \text{ h s } h S / M} \times 100\%$	94,15	95,28	100	95,35	100	95,4	100	95,3	100	95,3	100	95,31	100	95,31	Dinas Dikbud

2. Kesehatan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	angka	$AKB = \frac{D_{0-5}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ Dimana : D_{0-5} = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. $\sum \text{Lahir Hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.	5,65	6,67	5,05	5,05	4,95	4,95	4,85	5,8	4,75	5,7	4,75	5,6	4,75	5,6	Dinas Kesehatan
2.2.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	angka	$AKB = \frac{D_{0-5}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ Dimana: D_{0-5} = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu. $\sum \text{Lahir Hidup}$ = Jumlah	6,51	7,3	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	7	0,05	6,9	0,05	6,8	0,05	6,8	Dinas Kesehatan
2.3.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	angka	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Lahir Hidup}} \times 100.000$	17	16	12	12	11	11	10	13	8	12	8	11	8	11	Dinas Kesehatan
2.4.	Rasio posyandu per satuan balita	rasio	$\frac{\text{Jumlah Posyandu}}{\text{Jumlah Balita}} \times 1000$	11,21	11,31	11,6	11,6	11,8	11,8	12	12	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	Dinas Kesehatan
2.5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,23	0,09	0,23	0,09	0,24	0,09	0,24	Dinas Kesehatan
2.6.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	$\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$	0,02	0,01	0,015	0,015	0,015	0,015	0,02	0,015	0,02	0,015	0,02	0,015	0,02	0,015	Dinas Kesehatan
2.7.	Rasio dokter per satuan penduduk	rasio	$\frac{\text{Jumlah Dokter}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$	2,14	1,74	2,54	2,54	2,74	2,74	2,94	1,74	3,14	1,75	3,14	1,76	3,14	1,76	Dinas Kesehatan
2.8.	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	rasio	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Paramedis}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$	3,43	3,71	4,03	4,03	4,33	4,33	4,63	4,63	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	Dinas Kesehatan
2.9.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	$\frac{\text{Jumlah Komplikasi Kebidanan yang Ditangani}}{\text{Jumlah Komplikasi Kebidanan}} \times 100\%$	44,6	46,65	100	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.10.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	$\frac{\text{Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan}}{\text{Jumlah persalinan}} \times 100\%$	93,23	91,72	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan
2.11.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang cakupan UCI}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	89,42	90,38	91	80	92	82	93	93,00	94	94,00	94	94,00	94	94,00	Dinas Kesehatan
2.12.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan}}{\text{Jumlah balita gizi buruk}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan
2.13.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	$\frac{\text{Jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak}}{\text{Jumlah anak usia 1 tahun}} \times 100\%$	91,85	90,7	93,5	93	94	93	94,5	94,5	95	95,00	95	95,00	95	95,00	Dinas Kesehatan
2.14.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah Non Polio AFP}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	4,16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
2.15.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	$\frac{\text{Jumlah balita pneumonia yang ditangani}}{\text{Jumlah balita pneumonia}} \times 100\%$	100	85,84	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.16.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	%	$\frac{J_t \text{ h p i b T B (+) } d d d s i w h}{J_t \text{ h p i b T B (+) } d a k w y s m} \times 100\%$	48,4	39,07	52	50	56	52	58	58,00	60	60,00	60	60,00	60	60,00	Dinas Kesehatan
2.17.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	nilai	$\frac{B T (b d l a)}{J_t \text{ h p w y s i k}} \times 100.000$	251,1	275,22	250	250	249	249	248	248,00	247	247,00	247	247,00	247	247,00	Dinas Kesehatan
2.18.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	nilai	$\frac{J_t \text{ h p T y m}}{J_t \text{ h p k w y s i}} \times 1000$	6,07	7,99	5,5	5,5	5	5	4,5	4,50	4	4,00	4	4,00	4	4,00	Dinas Kesehatan
2.19.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	$\frac{J_t \text{ h p t i B y m p e m D}}{J_t \text{ h P d b T p B y d i w h t e i}} \times 100\%$	14,4	11,93	14	14	13,5	13,5	13	13,00	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	Dinas Kesehatan
2.20.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	$\frac{J_t \text{ h p t i p B y s i h d w h s i 1 t i h u}}{J_t \text{ h P p B y d w h d p k w y s i}} \times 100\%$	76,05	75,04	77	85	78	85	79	79,00	80	80,00	80	80,00	80	80,00	Dinas Kesehatan
2.21.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	$\frac{J_t \text{ h p i D y d i s S d w h k s i 1 t i h u}}{J_t \text{ h P i D y d i d w h d i k w y s a}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.22.	Penderita diare yang ditangani	%	$\frac{J_{\text{d d k d w s t h u}}}{J_{\text{p s w d i h t}} \times 100\%$ $\frac{d \text{ x } j_{\text{t k h p}}}{d \text{ w h k p}} \times 100\%$	34,3	36,82	34	34	33,6	33,6	33,2	33,20	33	33,00	33	33,00	33	33,00	Dinas Kesehatan
2.23.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	$\frac{k \text{ w t e}}{J_{\text{h p d}} \times 100\%$ $\frac{p \text{ k w y s t}}{J_{\text{h k i p}} \times 100\%$	0,06	0,04	4,6	4,6	4,5	4,5	4,44	0,028	4,3	0,028	4,3	0,027	4,3	0,027	Dinas Kesehatan
2.24.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	$\frac{J_{\text{h k i p}}}{J_{\text{h s h p}} \times 100\%$ $\frac{m \text{ d k h a s 1}}{a \text{ K / K m}} \times 100$	17,76	18,53	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Dinas Kesehatan
2.25.	Cakupan kunjungan bayi	%	$\frac{J_{\text{h k b m h}}}{J_{\text{h s h b l i h i h i t}} \times 100\%$ $\frac{p \text{ s w h k p}}{k \text{ w y s t}} \times 100\%$	90,01	86,99	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan
2.26.	Cakupan puskesmas	%	$\frac{J_{\text{h p i}}}{J_{\text{h s h k i}} \times 100\%$	23	23	25	25	25	25	25	218,18	25	218,18	25	227,27	25	227,27	Dinas Kesehatan
2.27.	Cakupan pembantu puskesmas	%	$\frac{J_{\text{h i l h a y}}}{J_{\text{h p i l h a d s i}} \times 100\%$ $\frac{a \text{ m K4 d w h}}{k \text{ p w t e}} \times 100\%$	61	61	61	61	62	61	62	58,65	62	58,65	62	58,65	62	58,65	Dinas Kesehatan
2.28.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	$\frac{J_{\text{h p i p i}}}{J_{\text{h s h d}} \times 100\%$	92,48	90,23	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.29.	Cakupan pelayanan nifas	%	$\frac{\text{Jumlah ibu yang mendapat pelayanan nifas}}{\text{Jumlah ibu yang melahirkan}} \times 100\%$	89,57	88,76	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan
2.30.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	$\frac{\text{Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani}}{\text{Jumlah neonatus dengan komplikasi}} \times 100\%$	59,37	58,91	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan
2.31.	Cakupan pelayanan anak balita	%	$\frac{\text{Jumlah anak balita yang mendapat pelayanan}}{\text{Jumlah anak balita}} \times 100\%$	83,14	79,57	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan
2.32.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	$\frac{\text{Jumlah anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin yang mendapat makanan pendamping ASI}}{\text{Jumlah anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan
2.33.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	$\frac{\text{Jumlah siswa SD dan setingkat yang mendapat penjangkaran kesehatan}}{\text{Jumlah siswa SD dan setingkat}} \times 100\%$	94,15	74,26	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan
2.34.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	$\frac{\text{Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar}}{\text{Jumlah masyarakat miskin}} \times 100\%$	112,6	112,8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.35.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	$\frac{J_k \cdot h \cdot K \cdot d \cdot d}{J_k \cdot h \cdot K \cdot d \cdot d} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan
2.36.	Persentase balita gizi buruk	%	$\frac{J_k \cdot h \cdot b \cdot g \cdot b}{J_k \cdot h \cdot b \cdot g \cdot b} \times 100\%$	0,07	0,18	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	Dinas Kesehatan
2.37.	Prevalensi balita gizi kurang	%	$\frac{J_k \cdot h \cdot b \cdot g \cdot k}{J_k \cdot h \cdot b \cdot g \cdot k} \times 100\%$	1,04	6,73	4,5	4,5	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	Dinas Kesehatan
2.38.	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	$\frac{J_k \cdot h \cdot d \cdot s \cdot y \cdot a}{J_k \cdot h \cdot d \cdot s \cdot y \cdot a} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Dinas Kesehatan

3. Penataan Ruang

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	$\frac{P \cdot j \cdot k \cdot b}{P \cdot j \cdot k \cdot b}$	1.372,60	1375,2	1374,63	1354,99	1374,63	1354,99	1.374,63	0,728	1.374,63	0,728	1.383,59	0,731	1.383,59	0,731	Dinas PUPR
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	rasio	$\frac{J_k \cdot h \cdot p \cdot j}{J_k \cdot h \cdot p \cdot j}$	465,9	465,8	465,6	465,6	465,4	465,4	465,2	465,2	465	465	465,1	465,1	465,1	465,1	Dinas PUPR
3.1.3.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	$\frac{P \cdot d \cdot k \cdot b}{P \cdot d \cdot k \cdot b} \times 100\%$	69,9	69,9	70	47,6	70	47,6	70	70	70	70	70,47	70,47	70,47	70,47	Dinas PUPR

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1.4.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	$\frac{P_{td} \text{ j l y m} (K)}{P_{s h j r} (K)} \times 100\%$	12,1	12,1	12,6	12	12,9	11	13,2	13,2	13,6	13,6	13,41	13,41	13,41	13,41	Dinas PUPR
3.1.5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	$\frac{j l h r i h t i}{j l h r i h t i} \times 100\%$	92,4	92,88	95	93	95	95	95	76,58	100	78,95	100	81,16	100	81,16	Dinas Perkim
3.1.6	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	$\frac{P_{d s i s l i} (K)}{P_{s h s i s} (K)} \times 100\%$	2,36	2,36	2,2	2,2	2,1	2	2	2	1,9	1,9	1,95	1,95	1,95	1,95	Dinas PUPR
3.1.7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	$\frac{P_{p i a t e l i} (K)}{P_{s h d d h} (K)} \times 100\%$	71,8	71,8	72,5	72,6	72,8	72,9	73,2	73,2	73,6	73,6	74,97	74,97	74,97	74,97	Dinas PUPR
3.1.8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	$\frac{L_{a b} h y t i}{L_{a b} h r i t i} \times 100\%$	0,31	0,31	0,3	0,3	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,07	0,07	0,07	0,07	Dinas PUPR
3.1.9	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	$\frac{L_{i r k b} k b}{L_{i r k} k} \times 100\%$	67	67	77	74	80	76	85	85	90	90	91,67	91,67	91,67	91,67	Dinas PUPR
3.1.10	Rasio Jaringan Irigasi	rasio	$\frac{p_{l h a b p}}{L_{l h a b p}}$	90	90	90	85	90	83	90	90	90	90	90	90	90	90	Dinas PUPR
3.1.11	Persentase penduduk berakses air minum	%	$\frac{P_{j l h p a m}}{j l h p} \times 100\%$	71,8	92,6	85	92,68	90	95	95	95	100	100	100	100	100	100	Dinas Perkim
3.1.12	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan	%	$\frac{j l h p d a}{j l h p s h n} \times 100\%$	75,85	92,6	76,8	92,68	77,2	95	78	78	78,5	78,5	79,78	79,78	79,78	79,78	Dinas Perkim

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan																	
3.1.1.3	Persentase areal kawasan kumuh	%	$\frac{L_{Kw}}{L_{Wk}} \times 100\%$	61,19	0	0,17	0,18	0,13	0,17	62,85	62,85	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
3.1.1.3	Persentase areal kawasan kumuh	%	$\frac{L_{Kw}}{L_{Wk}} \times 100\%$	82,1	20	24,79	24,79	25,94	25,94	75,71	75,71	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07	Dinas LH
3.1.1.4	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	$\frac{V_{gdu}}{T_{sths}} \times 100\%$	0,81	0,88	0,95	0,95	1,02	1,02	1,08	1,08	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	Dinas LH
3.1.1.5	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	$\frac{J_{hpu}}{J_{hp}} \times 100\%$	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	Dinas LH
3.1.1.6	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	rasio	$\frac{J_{hte}}{J_{hp}} \times 100\%$	1.372,60	1375,2	1374,63	1354,99	1374,63	1354,99	1.374,63	0,728	1.374,63	0,728	1.383,59	0,731	1.383,59	0,731	Bag Kesra
3.2.	Penataan Ruang:																	
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	$\frac{L_{rt}}{L_{w}} \times 100\%$	0,2	0,2	0,2	0,15	0,2	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Dinas PUPR
3.2.2	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	rasio	$\frac{J_{hb}}{J_{b}} \times 100\%$	1,01	1,01	1,96	0,78	2,2	0,8	2,68	0,82	3,04	0,83	3,33	0,85	3,33	0,85	Dinas PUPR
3.2.3	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	$\frac{J_{hp}}{J_{y}} \times 100\%$	0,35	0,35	0,29	0,25	0,28	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	Dinas PUPR

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.2.4	Ketaatan terhadap RTRW	%	$\frac{R}{R} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUPR

4. Perumahan dan Permukiman

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.1.	Rasio rumah layak huni	rasio	$\frac{J_{\text{r}}}{J_{\text{p}}} \times 100$	0,21	0,21	0,208	0,208	0,206	0,206	0,2	0,204	0,2	0,202	0,2	0,2	0,2	0,2	Dinas Perkim
4.2.	Rasio permukiman layak huni	rasio	$\frac{L_{\text{p}}}{L_{\text{w}}} \times 100$	1	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	$\frac{J_{\text{r}}}{J_{\text{p}}} \times 100\%$	92,52	92,9	92,32	91,2	91,63	89,63	91,53	74,63	90,83	73,13	90,04	71,63	90,04	71,63	Dinas Perkim
4.4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	$\frac{M_{\text{p}}}{M_{\text{r}}} \times 100\%$	1,68	2,07	2,41	2,41	2,77	2,77	3,13	3,13	3,48	3,48	3,84	3,84	3,84	3,84	Dinas Perkim
4.5.	Persentase pemukiman yang tertata	%	$\frac{L_{\text{a}}}{L_{\text{p}}} \times 100$	0,47	0,64	0,63	0,63	0,71	0,71	0,79	0,79	0,87	0,87	0,95	0,95	0,95	0,95	Dinas Perkim

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.6.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	$\frac{L \text{ II } p \text{ KI } h}{L \text{ w } h} \times 100\%$	25,18	0,1	0.94	0.94	0.66	0.66	0,28	0,28	0	0	0	0	0	0	Dinas Perkim
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	$\frac{L \text{ II } p \text{ KI } h}{L \text{ p } \text{ KI } h} \times 100\%$	0,24	0	0	0	0	5	-	50	-	75	-	100	-	100	Dinas Perkim

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	$\frac{100 \text{ } d \text{ K } p \text{ L}}{1 \text{ W } h \text{ k } K} \times 100\%$	40	40	40	40	41	41	42	40	43	40	44	40	44	40	Satpol PP
5.2.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Tibum & Tranmas	%	$\frac{P \text{ y } d_i \text{ T}_i}{j_i \text{ h } p \text{ y } t_i} \times 100\%$	80	87	76	76	74	74	72	70	70	68	68	65	68	65	Satpol PP
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	%	$\frac{L \text{ w } h \text{ m } k}{L \text{ w } h \text{ k}} \times 100\%$	40,56	48,88	65,09	48,88	80,98	65,09	93,17	77,28	98,91	93,18	100	98,91	100	98,91	Dinas Damkar
5.4.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	$\frac{j_i \text{ h } k \text{ k}}{d_i \text{ W } y \text{ t}_i} \times 100\%$	82,89	87,94	83,75	83,54	84,33	83,75	85,71	84,33	86,58	85,71	98,66	86,59	98,66	86,59	Dinas Damkar

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	%	$\frac{J_t - h P}{J_t - h p} \times 100\%$	1	3,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	0,75	1,6	0,7	1,7	0,66	1,7	0,66	Satpol PP

6. Sosial

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	$\frac{J_t - h P}{J_t - h P} \times 100\%$	76,74	85,65	79	72	80	74	81	78	82	79	83	80	83	80	Dinas Sosial
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	$\frac{J_t - h P}{J_t - h P} \times 100\%$	79,28	86	81	74	82	76	83	78	84	80	85	81	85	81	Dinas Sosial
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	$\frac{J_t - h P}{J_t - h P} \times 100\%$	76,74	86,9	79	73	80	75	81	78	82	80	83	81	83	81	Dinas Sosial
6.4.	Persentase KUBE PMKS yang dapat berkembang secara mandiri	%	$\frac{J_t - h K}{J_t - h K} \times 100\%$	68,54	78	76,27	76,27	78	78	80	80	82	82	82	82	82	82	Dinas Sosial
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	$\frac{J_t - h P}{J_t - h P} \times 100\%$	7,14	6,25	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	Dinas Sosial

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.6.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana yang meninggal dunia}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.7.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap}}{\text{Jumlah korban bencana yang meninggal dunia}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.8.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial}} \times 100\%$	14,44	16,43	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26	26	26	Dinas Sosial

II. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	angka	$\frac{Jumlah\ kasus\ sengketa\ pengusaha-pekerja\ per\ tahun}{Jumlah\ pengusaha\ terdaftar} \times 1000$	49,31	37	31,3	31,3	26,96	26,96	24,05	27,79	21,02	29,11	18,62	28,88	18,62	28,88	Dinas Nakerin
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	$\frac{\sum kasus\ yang\ diselesaikan\ dengan\ PB}{\sum kasus\ yang\ diajukan} \times 100\%$	77,33	52,78	54,17	54,17	54,79	54,79	55,26	46,05	56,41	47,37	57,5	47,5	57,5	47,5	Dinas Nakerin
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	$\frac{\sum pencari\ kerja\ yang\ terdaftar\ yang\ ditempatkan}{\sum pencari\ kerja\ yang\ terdaftar} \times 100\%$	11,12	10,8	11	11	11,2	11,2	11,5	4	11,8	4	12	4	12	4	Dinas Nakerin
1.4.	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	angka	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	92.902	93652	94452	94452	95352	95352	96.252	89,802	97.102	90,7	97.992	91,607	97.992	91,607	Dinas Nakerin
1.5.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	$\frac{Jumlah\ perselisihan\ buruh\ dan\ pengusaha\ terhadap\ kebijakan\ pemerintah\ daerah}{Jumlah\ perselisihan\ buruh\ dan\ pengusaha\ terhadap\ kebijakan\ pemerintah\ daerah} \times 100\%$	-	1	1	1	1	1	1	100	1	100	1	100	1	100	Dinas Nakerin
1.6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	$\frac{\sum tenaga\ kerja\ yang\ mendapatkan\ pelatihan\ berbasis\ kompetensi}{\sum tenaga\ kerja} \times 100\%$	88,13	74,6	77,4	77,4	79,4	79,4	81,5	40	87,7	36,6	89,7	37,9	89,7	37,9	Dinas Nakerin

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	$\frac{\sum T_{k y d h}}{\sum P_{p h a b m}} \times 100$	-	0	0	0	0	0	-		-		-		-		Dinas Nakerin
1.8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	$\frac{\sum T_{k y d h}}{\sum P_{p h a k h a}} \times 100\%$	96,15	84,44	90,91	90,91	91,3	91,3	91,89	0	93,84	0	96	0	96	0	Dinas Nakerin
1.9.	Rasio lulusan S1/S2/S3	rasio	$\frac{J_{h h} S1, S2, S3}{J_{h p} h p} \times 100\%$	17,93	16,54	19,04	19,04	21,57	21,57	24,1	24,1	26,63	26,63	29,16	29,16	29,16	29,16	Dinas Nakerin
1.10.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	$\frac{J_{h p} A k}{J_{u k} (15 - 64 T h u)} \times 100\%$	62,25	65,25	62,3	30	62,45	40	62,55	62,55	62,8	62,8	63,09	63,09	63,09	63,09	Dinas Nakerin
1.11.	Tingkat pengangguran terbuka	%	$\frac{J_{u p a k}}{J_{h p a k}} \times 100\%$	9,18	8,76	9,10	13,64	8,83	11,01	8,39	13,30	7,98	13,09	7,80	12,86	7,80	12,86	Dinas Nakerin
1.12.	Rasio penduduk yang bekerja	rasio		90,82	91,24	90,9	88,21	91,17	70	91,6	87,5	91,7	88	91,88	89	91,88	89	Dinas Nakerin

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	$\frac{P}{Jl} \times 100\%$	4,9	4,7	5,4	5,4	5,6	5,6	5,8	4,93	6,2	4,95	6,2	4,97	6,2	4,97	DINAS P3AP2KB
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	$\frac{D}{D} \times 100\%$	15,55	13	13	13	13	13	13	13,33	13	13,33	13	17,77	13	17,77	DINAS P3AP2KB
2.3.	Persentase partisipasi perempuan di lingkup pemerintah Kota Padang	%	$\frac{P}{Jl} \times 100\%$	70	69,86	72	69,86	73	69,86	74	70	75	70	75,42	70	75,42	70	DINAS P3AP2KB
2.4.	Rasio KDRT	rasio	$\frac{R}{R} \times 100\%$	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	DINAS P3AP2KB
2.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	$\frac{P}{Jl} \times 100\%$	49,55	73,2	49,55	73,2	49,55	73,2	49,55	73,2	49,55	73,2	53,86	73,2	53,86	73,2	DINAS P3AP2KB
2.6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	$\frac{P}{Jl} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS P3AP2KB

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit}}{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS P3AP2KB
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	$\frac{\text{Jumlah layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah layanan rehabilitasi sosial}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-	%	$\frac{\text{Jumlah penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-}}{\text{Jumlah kasus}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS P3AP2KB

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak																	
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	jumlah	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum (pendampingan)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS P3AP2KB
2.11	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	$\frac{\text{Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum (pendampingan)}}{\text{Jumlah korban kekerasan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS P3AP2KB
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	$\frac{\text{Jumlah korban mendapat layanan reintegrasi sosial}}{\text{Jumlah korban kekerasan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS P3AP2KB

3. Pangan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1	Ketersediaan pangan utama	%	$\frac{R - r_j \cdot h k p}{u p T h u (k)} \times 10$	135,86	135,86	133,21	133,21	134,34	134,34	135,71	135,71	136,72	136,72	136,09	136,09	136,09	136,09	Dinas Pangan
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita		$\frac{K p / h p}{100} \times 100$	3.427,00	2842	3712	3712	3812	3812	3.923,00	3.923,00	4.231,00	4.231,00	4.182,53	4.182,53	4.182,53	4.182,53	Dinas Pangan
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	$\frac{j u h j u h s i p}{d p y a d s i d s i y b t e s s i n w t i n} \times 1$	91,25	100,26	93,23	93,23	94,45	94,45	95,2	95,2	96,4	96,4	96,5	96,5	96,5	96,5	Dinas Pangan
3.4	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	60	70,00	85	85	90	90	90	90	90	90	90,73	90,73	90,73	90,73	Dinas Pangan
3.5	Penguatan cadangan pangan	%	$\frac{j u h c p}{K a K} \times 100\%$	91,5	87,30	94	88,88	95,2	90,40	96,4	91,9	96,5	93,5	96,6	95	96,6	95	Dinas Pangan

4. Pertanian

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat dalam satu tahun	%	$\frac{J_{hs} - J_{hs-1}}{J_{hs}} \times 100\%$	40	67,5	81,5	81,5	85,25	85,25	87	100	88	100	90	100	90	100	Dinas Pertanahan
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	$\frac{J_{hk} - J_{hk-1}}{J_{hk}} \times 100\%$	100	80	80	80	80	80	80	50	80	50	80	50	80	50	Dinas Pertanahan

5. Lingkungan Hidup

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		Ada/ tidak ada	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas LH
5.2.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	indeks	$Ipj = \sqrt{\frac{(\frac{Ci}{M})^2}{n} + (\frac{Ci}{A})^2}$ Ipj = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j Ci = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata)	61,25	57,92	61	57,92	62	58	63	61,83	64	62,05	65	62,5	65	62,5	Dinas LH
5.3.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	indeks	$IKU = 100 - ((\frac{1}{11,5} \times (I_i - 0,1))$ Ieu = 50% Indeks SO2 + 50% Indeks NO2	69,08	73,77	69,1	73	69,2	73,1	69,3	69,3	69,4	69,4	69,5	69,5	69,5	69,5	Dinas LH
5.4.	Hasil Pengukuran	indeks	$IKL = 100 - ((84,3 - ((\frac{1}{1} - D) \times 100)) \times \frac{5}{1,1})$	72,98	72,98	72,84	72,84	72,86	72,86	72,89	72,89	72,9	72,9	73	73	73	73	Dinas LH

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Indeks kualitas Tutupan Lahan		$DKK = \sum R_i \frac{W_d T}{H} + R \frac{W_d T}{H}$ Rumus di Tutupan Hutan; W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{L}{T} \times \frac{F}{K}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{L}{T} \times \frac{F}{K}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{L}{T} \times \frac{F}{K}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{L}{T} \times \frac{F}{K}$ Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung; W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{L}{T} \times \frac{F}{K}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{L}{T} \times \frac{F}{K}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{L}{T} \times \frac{F}{K}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{L}{T} \times \frac{F}{K}$															
5.5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	$\frac{\sum P_i \frac{L_d E}{y} \times d \times h}{\sum T \times p \times n} \times 100\%$	79	82	87	80	90	87	94	86	98	89	98	90	98	90	Dinas LH
5.6	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana		- Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina - Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	-	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	Dinas LH

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota																	
5.7	Monitoring Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	jumlah	Jumlah Kecamatan di monitoring kerusakan tanah	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Dinas LH
5.8	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	jumlah	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	14	10	10	1	11	11	12	12	13	13	14	14	14	14	Dinas LH
5.9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		Ada/ tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas LH
5.10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	$\frac{P}{m} \times \frac{m}{T} \times \frac{y}{h} \times \frac{d}{p} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas LH
5.11	Timbulan sampah yang ditangani	%	$\frac{t}{h} \times \frac{t}{i} \times \frac{s}{s} \times \frac{h}{h} \times 100\%$	26,2	80	78,99	78,99	77,26	77,26	26,9	26,9	27,75	27,75	28,45	28,45	28,45	28,45	Dinas LH
5.12	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	Sampah yang berkurang melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	20,19	1,27	1,94	1,94	3,07	3,07	4,9	4,9	2,85	2,85	3	3	3	3	Dinas LH

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.13	Persentase cakupan area pelayanan	%	$\frac{Jumlah\ area\ pelayanan\ yang\ terlayani}{Total\ area\ pelayanan} \times 100\%$	81	83	85	85	87	87	88	88	90	90	90	90	90	90	Dinas LH
5.14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	$\frac{Jumlah\ sampah\ yang\ tertangani}{Total\ jumlah\ sampah} \times 100\%$	73	80	75	75	74	74	73	73	72	72	68,31	68,31	68,31	68,31	Dinas LH
5.15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten / kota	nilai	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71	73	80	75	75	74	74	73	73	72	72	73,78	73,78	73,78	73,78	Dinas LH

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	rasio	$\frac{Jumlah\ penduduk\ ber-KTP}{Jumlah\ penduduk}$	98,71	99,24	99,74	95	99,77	96	99,8	98	99,83	98	99,94	98	99,94	98	Dinas Dukcapil
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	rasio	$\frac{Jumlah\ bayi\ berakte\ kelahiran}{Jumlah\ bayi\ lahir}$	15,92	18,85	22,51	20,25	25,81	21,1	29,11	20,25	32,41	21,1	35,55	22	35,55	22	Dinas Dukcapil
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	rasio	$\frac{Jumlah\ pasangan\ berakte\ nikah}{Jumlah\ pernikahan}$	9,91	11,47	13,22	11,5	15,16	12,25	17,19	13,22	19,33	15,1	20,11	16,2	20,11	16,2	Dinas Dukcapil
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada/tidak ada	ada	Tidak ada	ada	Tidak ada	ada	Tidak ada	ada	Tidak ada	ada	Tidak ada	ada	Tidak ada	ada	Tidak ada	Dinas Dukcapil

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah/belum	100	100	100	100	100	100	100	sudah	100	sudah	100	sudah	100	sudah	Dinas Dukcapil
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	$\frac{J_k - h K - b - N - y - d_i}{J_k - h p - w - K} \times 100\%$	98,71	99,24	99,74	95	99,77	96	99,77	98	99,83	98	99,94	98	99,94	98	Dinas Dukcapil
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	$\frac{J_k - h p - l - h - d - m - h}{J_k - h k - h i - d - h u - b} \times 100\%$	23,62	25,48	30,3	27,1	33,64	30,25	37,04	27,1	40,37	28	40,93	30	40,93	30	Dinas Dukcapil

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	angka	$\frac{J_k - h K - b - L_i}{J_k - h L_i}$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	angka	$\frac{J_k - h K - b - P}{J_k - h P} \times 100\%$	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Kecamatan
7.3.	Persentase LPM aktif	%	$\frac{J_k - h L_i - a}{J_k - h L_i} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7.4.	Persentase PKK aktif	%	$\frac{J_k - h P - a}{J_k - h P - h P} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	10	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
7.5.	Persentase Posyandu aktif	%	$\frac{J_k - h P - a}{J_k - h P - h P} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	10	100	100	100	100	100	100	Kecamatan

8. *Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		$r = \left\{ \left(\frac{P_t}{P_0} \right) \times \left(\frac{1}{t} \right) - 1 \right\} \times 100$ <i>r</i> = laju pertumbuhan penduduk <i>P_t</i> = Jumlah penduduk pada tahun <i>t</i> <i>P₀</i> = Jumlah penduduk pada tahun dasar <i>t</i> = selisih tahun <i>P_t</i> dengan <i>P₀</i> <i>P_t</i> = <i>P₀</i> + (<i>B</i> - <i>D</i>) + (<i>M_i</i> - <i>M_o</i>) <i>P_t</i> = Jumlah penduduk pada tahun ke <i>t</i> <i>P₀</i> = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) <i>B</i> (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - <i>t</i> <i>D</i> (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - <i>t</i> <i>M_o</i> = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - <i>t</i> <i>M_i</i> = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - <i>t</i>	1,29	1,47	1,2	1,44	1,2	1,44	1,2	1,44	1,2	1,44	1,2	1,48	1,2	1,48	DINAS P3AP2KB
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)		$T = 5 \sum_{i=1}^5 A_i$ Dimana: $A_i = \frac{b_i}{P_i} \times K$ $T = \frac{A}{K} \times \frac{h}{m} \times \frac{T}{K_i} \times \frac{U}{U}$	2,4	2,83	2,3	2,65	2,2	2,65	2,2	2,1	2,2	2,1	2,2	2,1	2,2	2,1	DINAS P3AP2KB
8.3.	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 aspek	dokumen	Jumlah dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	DINAS P3AP2KB
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	DINAS P3AP2KB
8.5	Jumlah sektor yang menyepakati dan	angka	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	DINAS P3AP2KB

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan																	
8.6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	angka	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan	1	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	DINAS P3AP2KB
8.7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	angka	$\frac{J_k \quad h a}{J_k \quad h s \quad h k}$	2,8	2,8	2,7	2,8	2,6	2,8	2,6	2,8	2,6	2,7	2,6	2,7	2,6	2,7	DINAS P3AP2KB
8.8	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	angka	$\frac{J_k \quad h p \quad K a}{J_k \quad h p \quad u s} \times 100\%$	65,68	62,28	67	61,55	68	61,55	69	63	70	63	70	63,5	70	63,5	DINAS P3AP2KB
8.9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	$\frac{J_k \quad h p \quad u s \quad d}{J_k \quad h p \quad u s} \times 100\%$	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	DINAS P3AP2KB
8.10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	$\frac{J_k \quad h p \quad y u b - K t}{J_k \quad h p \quad u s} \times 100\%$	16,8	20,55	15	20,55	14	20,55	13	19	13	19	13	18	13	18	DINAS P3AP2KB

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8.11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	$\frac{J_n \quad h \alpha \quad K \quad y}{m \quad M} \times 100\%$	11,05	26,83	13,05	26,83	13,05	26,83	14,05	27	14,05	27	14,11	28	14,11	28	DINAS P3AP2KB
8.12	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	$\frac{J_n \quad h p \quad u \quad s \quad y}{t \quad k \quad m}{K} \times 100\%$	31,33	37,98	28	37	26	37	24	38	24	38	24	38,5	24	38,5	DINAS P3AP2KB
8.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	$\frac{J_n \quad h \alpha \quad k_i}{B \quad y \quad b - K}{K_i \quad B} \times 100\%$	70,52	69,01	71	69,01	72	69,01	73	71	73	71,00	73	72	73	72	DINAS P3AP2KB
8.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	$\frac{J_n \quad h \alpha \quad k_i}{B \quad y \quad b - K}{K_i \quad B} \times 100\%$	66,14	66,98	67	67	67	67	68	67	68	67	68	68	68	68	DINAS P3AP2KB
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	$\frac{J_n \quad h \alpha \quad k_i}{B \quad y \quad b - K}{K_i \quad B} \times 100\%$	57,27	58,76	57,77	57,77	58	58	60	58	61	58	61	59	61	59	DINAS P3AP2KB
8.16	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	angka	Jumlah PPKS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	DINAS P3AP2KB
8.17	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	angka	Jumlah kelompok PIK Remaja	65,5	73	83,25	73	87,5	73	96,38	74	96,38	74	96,38	74	96,38	74	DINAS P3AP2KB
8.18	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	%	$\frac{J_n \quad h P \quad d \quad P \quad y \quad d}{J_n \quad h P \quad a \quad P} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS P3AP2KB

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	daerah di bidang pengendalian penduduk																	
8.19	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	$\frac{J_u \quad h \alpha \quad k_i \quad U \quad \bar{y}}{J_u \quad h \alpha \quad k_i \quad U} \times 100\%$	62,23	64,6	65	65	65	65	66	65	66	65	66	65	66	65	DINAS P3AP2KB
8.20	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	$\frac{J_u \quad h p \quad p_i \quad p_i \quad K \quad D}{J_u \quad h d \quad a \quad R \quad h \alpha} \times 100\%$	28,84	27,88	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84	28	28,84	29	28,84	29	28,84	29	DINAS P3AP2KB
8.21	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota	%	$\frac{P}{R - R \quad p_i \quad a \quad d \quad \bar{O} \quad K} \times 100\%$	1,46	1,88	2	2	2,5	2,5	2,77	2,77	3,08	2,8	3,08	2,8	3,08	2,8	DINAS P3AP2KB
8.22	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	%	$\frac{P}{R - R \quad K \quad p_i \quad a \quad d} \times 100\%$	1,46	1,88	2	2	2,5	2,5	2,77	2,77	3,08	2,8	3,08	2,8	3,08	2,8	DINAS P3AP2KB
8.23	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan	%	$\frac{J_u \quad h F \quad d \quad j_i \quad \bar{y}}{J_u \quad h F \quad d \quad j_i} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS P3AP2KB

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8.24	standarisasi pelayanan Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	angka	Jumlah jenis data mikro keluarga yang tersedia	40	45	50	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	55	DINAS P3AP2KB
8.25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	$\frac{\sum_{j=1}^n \frac{h_j (u_k p_m)}{w_x j u_h w_p m}}{\sum_{j=1}^n \frac{h_j a_u u_p}{j u_h a_u u_p}} \times 100\%$	23,5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	DINAS P3AP2KB
8.26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	$\frac{\sum_{j=1}^n \frac{h_j a_u u_p}{j u_h a_u u_p}}{\sum_{j=1}^n \frac{h_j a_u u_p}{j u_h a_u u_p}} \times 100\%$	0,02	0,35	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	DINAS P3AP2KB

9. Perhubungan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9.1	Jumlah Uji KIR angkutan umum	angka	Jumlah Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	14.585,00	9340	16655	9340	17294	9340	18.329,00	18329	19.497,00	19497	20.470,00	20470	20.470,00	20470	Dinas Perhubungan
9.2	Jumlah dermaga	angka	Jumlah dermaga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	angka	Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	14.585	9340	16655	9340	17294	9340	18.329	18329	19.497	19497	20.470	20470	20.470	20470	Dinas Perhubungan
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	angka	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
9.5	Persentase layanan angkutan darat (load factor)	%	$\frac{J_{\text{h p}} \cdot r_{\text{t}} - r_{\text{t}} \cdot a}{K \cdot k_{\text{t}}}$	40,2	41	51	36,4	56	45	61	61	66	66	71	71	71	71	Dinas Perhubungan
9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	$\frac{J_{\text{h a}} \cdot u \cdot y}{m \cdot K \cdot p \cdot T \cdot h_{\text{u}} \cdot n}$ $\frac{J_{\text{h a}} \cdot u \cdot p \cdot t \cdot h_{\text{u}} \cdot r}{J_{\text{h a}} \cdot h \cdot r_{\text{t}} - r_{\text{t}} \cdot y}$	91	75	92	75	93	75	93	93	94	94	95	95	95	95	Dinas Perhubungan
9.7	Pemasangan Rambu-rambu	%	$\frac{J_{\text{h p}} \cdot r_{\text{t}} - r_{\text{t}} \cdot p}{J_{\text{h a}} \cdot h \cdot r_{\text{t}} - r_{\text{t}} \cdot y}$	26	32	21	11	17	17	14	14	6	6	4	4	4	4	Dinas Perhubungan
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	$\frac{J_{\text{h j}}}{J_{\text{h k}}}$	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Perhubungan
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	angka	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	92.436.000	92485 000	93630 000	79585 500	94686 000	93630 000	95.136.000	95136 000	96.786.000	96786 000	97.786.000	97786 000	97.786.000	97786 000	Dinas Perhubungan
9.10	Jumlah orang melalui dermaga	angka	Jumlah orang melalui dermaga per tahun	62.005	62014	62040	52740	62060	62060	62.077	62077	62.090	62090	62.104	62104	62.104	62104	Dinas Perhubungan
9.11	Jumlah barang melalui dermaga	angka	Jumlah barang melalui dermaga per tahun	1.381,00	1380	1384	1384	1385	1385	1.386,00	1386	1.387,00	13387	1.388,00	1388	1.388,00	1388	Dinas Perhubungan

10. Komunikasi dan Informatika

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10.1	Cakupan layanan jaringan komunikasi	%	$\frac{J_{hjt} - y_{te}}{J_{hu} - R} \times 100\%$	70	75	80	80	85	85	90	85	100	95	100	100	100	100	Dinas Kominfo
10.2	Persentase penanganan permasalahan jaringan	%	$\frac{J_{hg} - y_{ja}}{J_{hg} - ja} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo
10.3	Cakupan integrasi aplikasi/sistem informasi	%	$\frac{J_{ha} - y_{a}}{J_{ha} - y_{a}} \times 100\%$	34	50	59,33	55	70,33	60	81,33	65	92,33	70	100	75	100	75	Dinas Kominfo
10.4	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	$\frac{J_{hK} - a}{J_{hK} - ha} \times 100\%$	46	44,23	68	50	75	68	80	79	85	83	90	89	90	89	Dinas Kominfo
10.5	Persentase penanganan serangan siber	%	$\frac{J_{hs} - y_{ti}}{J_{hs} - y_{ti}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo
10.6	Jumlah akses masyarakat terhadap informasi publik secara digital	angka	Jumlah masyarakat / publik yang mengakses informasi publik pada media website padang.go.id selama 1 tahun	16873 view	109.381 view	20200 view	20200 view	20400 view	20400 view	20600 view	20600 view	20800 view	20800 view	30000 view	30000 view	30000 view	30000 view	Dinas Kominfo

11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	$\frac{Jumlah\ koperasi\ aktif}{Jumlah\ h S\ h R} \times 100\%$	94,23	56	96,31	57	97,06	60	97,82	62	98,58	64	99,34	66	99,34	66	Dinas Koperasi dan UKM
11.2.	Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan	angka	Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan	10.211,00	10211	10211	10211	10211	10211	10.211	10211	10.211	10211	10.211	10211	10.211	10211	Dinas Koperasi dan UKM

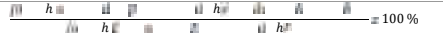
12. Penanaman Modal

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	angka	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	19,5	37	28	15	33	20	37	32	42	31	46	30	46	30	DPMTSP
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	angka	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	27	44	51	21	63	25	75	43	87	42	99	41	99	41	DPMTSP
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	5.837.325.000	279.027.000.000	9.156.368.000	18.601.800	10.815.889.500	48.609.000	12.475.411.000	17.123.287,67	14.134.932.500	17.123.287,67	15.794.454.000	17.123.287,67	15.794.454.000	17.123.287,67	DPMTSP

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Rp	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	781.243.394.000	1.417.802.600.000	1.562.129.182.000	1.417.802,60	1.952.572.076.000	435.150,20	2.343.014.970.000	1.000.000	2.733.457.864.000	1.000.000	3.123.900.758.000	1.000.000	3.123.900.758.000	1.000.000	DPMPTSP
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	rasio	$\frac{J_u \cdot h \cdot t \cdot R \cdot D}{J_u \cdot h \cdot s \cdot h \cdot P} \times 100\%$	27,19	19,76	23,53	0,75	21,7	1,66	19,87		18,04		16,22		16,22		DPMPTSP

13. Kepemudaan dan Olah Raga

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	$\frac{J_u \cdot h \cdot o \cdot p_i \cdot y \cdot \bar{a}}{J_u \cdot h \cdot s \cdot h \cdot a \cdot p_i} \times 100\%$	90,24	91,3	91,3	59,38	91,3	68,75	95,65	76,3	95,96	89,5	95,96	96,2	95,96	96,2	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.2.	Persentase Wirausaha Muda	%	$\frac{J_u \cdot h \cdot w \cdot h \cdot a \cdot m}{J_u \cdot h \cdot s \cdot h \cdot w \cdot h \cdot a} \times 100 \%$	360	364	370	61,54	381	68,53	392	70,2	403	75,8	412	78,2	412	78,2	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.3.	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	$\frac{J_u \cdot h \cdot o \cdot \bar{a} \cdot h \cdot \bar{a} \cdot y \cdot \bar{a}}{J_u \cdot h \cdot s \cdot h \cdot o \cdot \bar{a} \cdot h \cdot \bar{a} \cdot y \cdot \bar{a} / \bar{a}} \times 100 \%$	14,71	14,71	17,65	17,65	17,65	17,65	21	17,65	21	20,59	24	20,59	24	20,59	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	$\frac{J_u \cdot h \cdot p \cdot h \cdot b}{J_u \cdot h \cdot s \cdot h \cdot p \cdot h} \times 100 \%$	62,5	65	67,5	67,5	2,83	2,83	70	50	71,5	60	72,5	70	72,5	70	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.5.	Cakupan Pembinaan atlet muda	%	$\frac{J_u \cdot h \cdot \bar{a} \cdot p \cdot y \cdot \bar{a}}{J_u \cdot h \cdot s \cdot h \cdot \bar{a} \cdot p} \times 100 \%$	9,72	9,72	0,43	0,43	11,67	11,67	11,67	0,43	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		%	a. Pelajar	0,07	2,91	2,91	2,91	3,89	3,89	3,89	3,79	3,89	3,83	3,89	3,87	3,89	3,87	Dinas Pemuda dan Olahraga
		%	b. Lainnya	8,75	6,8	6,5	6,5	7,78	7,78	7,78	7,74	7,78	7,75	7,78	7,77	7,78	7,77	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	angka	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional dalam satu tahun	24	79,83	0	0	34	34	37	34	41	35	37,93	36	37,93	36	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.7.	Jumlah Prestasi Olahraga	angka	Jumlah Prestasi cabang Olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun tingkat Nasinal dan Internasional	7	8	8	8	10	10	10	8	12	10	12,53	12	12,53	12	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.8.	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	%		75,75	76,14	79,7	79,7	81,22	81,22	82,49	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	Dinas Pemuda dan Olahraga

14. Statistik

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14.1.	Jumlah produk statistik sektoral	dokumen	Jumlah analisis/tinjauan statistik sektoral yang diterbitkan selama 1 tahun	2 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	Dinas Kominfo
14.2.	Buku "Kota Padang Dalam Angka"		Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kominfo

15. Persandian

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kominfo

16. Kebudayaan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	angka	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	8	6	2	7	1	8	3	9	4	9,53	5	9,53	5	Dinas Dikbud
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya}} \times 100\%$	-	33	20	10	25	20	25	20	30	20	30	20	30	20	Dinas Dikbud
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	angka	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	117	117	56	56	56	-	56	-	56	-	56	-	56	Dinas Dikbud
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	angka	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	12	12	17	5	17	5	17	5	17	5	20	5	20	5	Dinas Dikbud

17. *Perpustakaan*

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	angka	$\frac{\text{Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun}}{\text{Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun}}$	18.769	0,03	0,035	0,031	0,039	0,035	28.500	0,028	30.000	0,0308	35.845	0,0322	35.845	0,0322	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	angka	$\frac{\text{Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah}}$	28634 eks	0,289	0,907	0,289	0,965	0,298	40.989	0,344	43.037	0,351	45.085 eks	0,355	45.085 eks	0,355	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.3.	Jumlah perpustakaan yang dikelola dengan baik	angka	Jumlah Perpustakaan yang dikelola dengan baik pada tahun n	70	42	60	50	60	60	60	65	60	65	60	65	60	65	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	angka	Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan/ tahun	18.769	19245	23000	18000	25500	18000	28.500	20.000	30.000	22.000	35.845	23.000	35.845	23.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	angka	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	8.059	10059	9090	10059	9350	10392	11.595	12.000	12.107	12.250	12.619	12.360	12.619	12.360	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	angka	Jumlah Pustakawan yang bersertifikat	2	2	4	2	5	2	7	5	9	5	10	5	10	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

18. Kearsipan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	$\frac{\text{Jumlah hpt d h y}}{\text{Jumlah h m s b}} \times 100\%$	-	38	36,53	38	59,61	59	75	36	100	36	100	36	100	36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	2 kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

III. Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.	Kunjungan wisata Mancanegara	%	$\frac{\text{Jumlah h K K W}}{\text{Jumlah h K y d W M}} \times 100\%$		126	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pariwisata
		angka	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang berkunjung dalam 1 Tahun	71.054	73.284	76.956	21.650	80.628	22.743	84.300	23.880	87.972	25.790	91.645	28.639	91.645	28.639	Dinas Pariwisata

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2.	Kunjungan wisata Nusantara	%	$\frac{J_t \cdot h \cdot C \cdot K \cdot W}{J_t \cdot h \cdot K \cdot W \cdot N} \times 100\%$		134	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pariwisata
		angka	Jumlah Wisatawan Nusantara yang berkunjung dalam 1 Tahun	5.076.581,00	5.184.590	5.590.810	2.562.966	5.997.030	2.691.102	6.403.249	2.879.479	6.809.469	3.138.632	7.215.689	3.164.222	7.215.689	3.164.222	Dinas Pariwisata
1.3.	Lama kunjungan Wisata	angka	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun (hari)	3	3,5	3,6	1	3,7	1,5	3,8	1,6	3,9	1,7	5,14	1,8	5,14	1,8	Dinas Pariwisata
1.4.	PAD sektor pariwisata	Rp	Jumlah PAD Sektor Pariwisata (Rupiah)	90132462479	104.989.824.498	94132462481	26247456124	96132462482	28872201736	98.132,46	58.000.000.000	100.132,46	60.000.000.000	117.455,96	62.000.000.000	117.455,96	62.000.000.000	Dinas Pariwisata
1.5.	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	$\frac{P \cdot S \cdot P}{T \cdot P} \times 100\%$	10,9	19,2	11,2	4,75	11,5	5	11,7	6,6	11,9	6,8	12	7	12	7	Dinas Pariwisata

2. Pertanian

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.	Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	%	$\frac{J_t \cdot h \cdot K \cdot P \cdot d \cdot s}{J_t \cdot h \cdot P} \times 100\%$	104,56	86,54	105,6	86,55	105	87,6	105	105,82	105	105,92	111,21	111,21	111,21	111,21	Dinas Pertanian

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	$\frac{J_k \quad h \quad K \quad s \quad p}{p \quad J_k \quad h \quad P \quad s} \times 100\%$	47,59	48	48	48	48	48	47,59	47,59	47,59	47,59	46,58	47,59	46,58	47,59	Dinas Pertanian
2.3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	$\frac{J_k \quad h \quad K \quad p}{p \quad J_k \quad h \quad P \quad s} \times 100\%$	2,39	2	2	2	2	2	2,39	2,39	2,39	2,39	2,41	2,41	2,41	2,41	Dinas Pertanian
2.4.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	$\frac{J_k \quad h \quad P \quad p \quad a \quad b \quad h \quad a}{h \quad a \quad k \quad p \quad p \quad (t) \quad T \quad h \quad u \quad n} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian
2.5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	$\frac{P \quad b \quad h \quad a \quad p \quad u}{L \quad a \quad t \quad a \quad p \quad a} \times 100\%$															
	- Padi	%		56	56	56,5	56	57	56,5	58	56,75	6	56,85	38,31	57,25	38,31	57,25	Dinas Pertanian
	- Jagung	%		-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	Dinas Pertanian
	- Ubi Kayu	%		17,1	27,5	17,3	17,3	17,33	17,4	17,34	17,34	17,34	17,34	16,87	17,35	16,87	17,35	Dinas Pertanian
	- Ubi Jalar	%		14,6	20,9	14,64	14,62	14,65	14,63	14,6	14,66	14,6	14,68	15,94	15	15,94	15	Dinas Pertanian
	- Kacang Tanah	%		2,7	1,23	2,71	1,23	2,72	1,3	2,73	2,73	2,73	2,73	3,33	3,33	3,33	3,33	Dinas Pertanian
	- Kedelele	%		1,21	0,8	1,22	0	1,23	0	1,24	1,24	1,25	1,25	1,53	1,53	1,53	1,53	Dinas Pertanian
2.6.	Cakupan bina	%	$\frac{J_k \quad h \quad k \quad p \quad y \quad m}{J_k \quad h \quad k \quad p \quad T \quad h \quad u \quad n} \times 100\%$	16,5	16,51	16,63	16,68	16,67	16,67	16,68	16,67	16,67	16,68	16,2	16,68	16,2	16,68	Dinas Pertanian

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	kelompok petani																	

3. Perdagangan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp (juta)	nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	1.548.805,00	1.052.272,64	1.611.377,00	900.822,99	1.643.604,00	900.822,99	1.645.732,00	944.174,00	1.645.947,00	958.337,00	1.827.661,00	972.712,00	1.827.661,00	972.712,00	Dinas Perdagangan
4.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	$\frac{\text{Jumlah bina pedagang/usaha informal}}{\text{Jumlah pedagang/usaha informal}} \times 100\%$	4	4	2	2	3	3	3	3	2	4	2	4	2	4	Dinas Perdagangan

4. Kelautan dan Perikanan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.1	Produksi perikanan	%	$\frac{f_h}{T} \frac{h P}{D} \frac{n (T)}{h (T)} \times 100\%$	95,75	92,56	90,26	80,41	87,53	90,17	84,81	84,81	82,08	82,08	79,36	79,36	79,36	79,36	Dinas Kelautan dan Pangan
5.2	Konsumsi ikan	%	$\frac{f_h}{T} \frac{h K}{D} \frac{n (K)}{h (K)} \times 100\%$	100,35	100,54	100,55	92,15	100,6	102,17	100,65	100,65	100,7	100,7	100,66	100,66	100,66	100,66	Dinas Kelautan dan Pangan
5.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	$\frac{f_h}{D} \frac{y k_i}{p_i} \frac{n}{T h u n} \times 100\%$	90	91,11	91,5	89,28	92	100,81	92,7	92,7	92,8	92,8	93	93	93	93	Dinas Kelautan dan Pangan
5.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	$\frac{f_h}{D} \frac{y k_i}{p_i} \frac{n}{T h u n} \times 100\%$	80,13	80	84,55	81,04	84,65	90,04	84,8	84,8	90	90	3,77	3,77	3,77	3,77	Dinas Kelautan dan Pangan
5.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	$\frac{f_h}{80\% d} \frac{h k_i}{t_i} \frac{n}{m u} \times 100\%$	123	125	124	116,07	125	125	126	126	127	127	125,53	125,53	125,53	125,53	Dinas Kelautan dan Pangan
5.6	Nilai tukar nelayan		$\frac{f_h}{T} \frac{y d_i}{y d} \frac{n}{n} \times 100\%$	105,88	99,08	106	94,94	107	101,83	107,55	107,55	107,8	107,8	109,11	109,11	109,11	109,11	Dinas Kelautan dan Pangan
5.7	Persentase Peningkatan Industri Hulu Sektor Kelautan Perikanan	%	$\frac{f_h}{T} \frac{H y b}{I n H T R} \times 100\%$	63,67	66,67	64,15	57,73	64,45	66,67	65,15	65,15	66,14	66,14	83,07	83,07	83,07	83,07	Dinas Kelautan dan Pangan
5.8	Persentase Peningkatan Industri Hilir Sektor Kelautan Perikanan	%	$\frac{f_h}{T} \frac{H y b}{I n H T R} \times 100\%$	1.336,86	167	1338	174	1338	200	1.338,45	1.338,45	1.338,75	1.338,75	1.782,18	1.782,18	1.782,18	1.782,18	Dinas Kelautan dan Pangan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.9	Persentase Peningkatan Pendapatan Nelayan	%	$\frac{h P - T}{T} \times 100\%$	1,27	1,11	1,29	2	1,3	3,3	1,31	1,31	1,32	1,32	1,49	1,49	1,49	1,49	Dinas Kelautan dan Pangan
5.10	Persentase Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan	%	$\frac{h P - T}{T} \times 100\%$	1,75	2,01	1,8	4,5	1,88	4,76	1,9	1,9	2,1	2,1	2,57	2,57	2,57	2,57	Dinas Kelautan dan Pangan
5.11	Persentase Peningkatan Pendapatan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	%	$\frac{h P - T}{T} \times 100\%$	2,98	4,54	6,52	5,87	2,04	2,04	3,5	3,5	3,68	3,68	3,86	3,86	3,86	3,86	Dinas Kelautan dan Pangan

IV. Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah		Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ditetapkan dengan PERDA/PERKADA																	
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	$\frac{Jumlah\ Program\ RPJMD\ yang\ terjabarkan\ dalam\ RKPD}{Jumlah\ Program\ RPJMD} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	$\frac{Jumlah\ Program\ RKPD\ yang\ terjabarkan\ dalam\ APBD}{Jumlah\ Program\ RKPD} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	$\frac{Kesesuaian\ rencana\ pembangunan\ dengan\ RTRW}{Jumlah\ rencana\ pembangunan} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda

2. Keuangan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan		Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
2.2.	Persentase SILPA	%	$\frac{Total\ SILPA}{Total\ Anggaran} \times 100\%$	6,08	4	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	BPKAD
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	$\frac{Total\ SILPA}{Total\ APBD} \times 100\%$	6,08	4	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	BPKAD

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	$\frac{\sum_{i=1}^n \frac{P_i}{D_i} \cdot A_i}{\sum_{i=1}^n \frac{P_i}{D_i} \cdot A_i} \times 100\%$	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	$\frac{\sum_{i=1}^n \frac{B_i}{U_i} \cdot P_i}{\sum_{i=1}^n \frac{B_i}{U_i} \cdot P_i} \times 100\%$	34,09	28	30	25	30	30	30	30	30	32	30	34	30	34	BPKAD
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	$\frac{\sum_{i=1}^n \frac{B_i}{U_i} \cdot K_i}{\sum_{i=1}^n \frac{B_i}{U_i} \cdot K_i} \times 100\%$	12,13	11	12	20	12	15	12	15	12	15	12	15	12	15	BPKAD
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	$\frac{\sum_{i=1}^n \frac{B_i}{L_i} \cdot T_i}{\sum_{i=1}^n \frac{B_i}{L_i} \cdot T_i} \times 100\%$ $\frac{\sum_{i=1}^n \frac{B_i}{T_i} \cdot L_i}{\sum_{i=1}^n \frac{B_i}{T_i} \cdot L_i} \times 100\%$	51,01	49,94	53,66	45	55,43	55	57,21	-	58,98	-	60,76	-	60,76	-	BPKAD
		%		48,99	39,15	42,1	55	38,44	45	34,78	-	31,11	-	27,45	-	27,45	-	BPKAD
2.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	$\frac{\sum_{i=1}^n \frac{B_i}{K_i} \cdot H_i}{\sum_{i=1}^n \frac{B_i}{K_i} \cdot H_i} \times 100\%$	4,39	4,1	4,22	4	4,26	4,26	4,3	4	4,34	4	4,38	4	4,38	4	BPKAD
2.9	Penetapan APBD		Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD

3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan	tahun		20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	BKPSDM

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.2.	pendidikan dan pelatihan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	0,93	2,7	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	1,50	2,21	1,7	2,39	2	2,39	2	BKPSDM
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	$\frac{\text{Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural}}{\text{Jumlah Pejabat ASN}} \times 100\%$	76,5	59,1	84,21	83,15	89,45	86,41	94,69	87,1	99,93	87,5	100	88,5	100	88,5	BKPSDM
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	angka		34	36	37	37	37	37	37	36	37	36	37	36	37	36	BKPSDM
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	angka		178	178	178	178	178	178	178	180	178	180	178	180	178	180	BKPSDM
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	angka		5.553	5124	7110	7110	7110	7110	7.110	11.777	7.110	11.777	7.110	11.777	7.110	11.777	BKPSDM

4. Penelitian dan Pengembangan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	$\frac{J_k - h k_i}{J_k - h k_i} \frac{d_i}{d_i} \frac{R}{R} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	$\frac{J_k - h k_i}{J_k - h k_i} \frac{y}{p} \frac{d_i}{d_i} \frac{h}{h} \times 100\%$	0,3	20	0	20	0	25	0,4	20	0,4	20	0,45	20	0,45	20	Bappeda
	Penerapan SIDA:																	
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	$\frac{J_k - h p}{J_k - h p} \frac{d}{p} \frac{h y}{d} \frac{d}{h} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda

5. Pengawasan

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab [Data]
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	$\frac{J_k - h t_i}{J_k - h t_i} \frac{y}{t_i} \frac{d}{d} \times 100\%$	95	84	83	83	85	85	75	86	70	88	65	90	65	90	Inspektorat
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	%	$\frac{J_k - h A}{J_k - h A} \frac{y}{A} \frac{d}{d} \times 100\%$	1,2	0,07	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	Inspektorat
5.3.	Jumlah temuan BPK	angka		15	15	14	22	13	20	9	20	7	19	5	19	5	19	Inspektorat

6. *Sekretariat Dewan*

No	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Satuan	Rumus	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	Target	Capaian	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	Target	Perubahan Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019-2024



BAB IX PENUTUP

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD KOTA
PADANG TAHUN 2019-2024

Daftar Isi

9	BAB IX penutup	9-1
9.1	Kaidah Pelaksanaan.....	9-1

BAB IX PENUTUP

9.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/ program-program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Perubahan RPJMD menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan Urusan Pilihan.

Dokumen Perubahan RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Padang periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) di lingkup Pemerintah Kota Padang. Perubahan Renstra PD adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra PD di lingkup Pemerintah Kota Padang harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra PD yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
2. Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kota Padang yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. Perubahan RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidak sesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidak patuhan bahkan pelanggaran.
4. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Padang, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *corporate social responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
5. Pasca penetapan Perubahan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut

harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat Renstra baru.

6. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Perubahan Renstra/ Renja serta konsistensinya dengan Perubahan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PADANG TAHUN 2019-2024**



LAMPIRAN

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD KOTA PADANG TAHUN 2019-2024

LAMPIRAN 1

Tabel 1 PENYELARASAN TARGET INDIKATOR MAKRO KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT DAN NASIONAL

NO	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					Indikator Pembangunan	RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026					Indikator Pembangunan	Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024				
		Target						Target						Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	5,50	5,80	6,00	6,10	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,60	3,44	3,40	4,57	4,60	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,86	2,50	3,14	4,43	4,77
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,94	5,46	5,13	4,85	4,55	Tingkat Kemiskinan (%)	6,56	6,40	6,28	6,16	6,03	Tingkat Kemiskinan (%)	4,40	4,60	4,33	4,22	4,10
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,50	5,30	5,20	4,70	4,40	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,88	6,70	6,60	6,45	6,31	Tingkat Pengangguran Terbuka	13,64	11,01	13,30	13,09	12,86
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	-	-	-	75,54	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,38	72,56	72,74	73,18	73,62	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,82	82,15	83,43	84,11	84,65
5	Rasio Gini	-	-	-	-	0,360-0,370	Rasio Gini	0,301	0,299	0,298	0,296	0,293	Gini Ratio	0,310	0,310	0,309	0,308	0,307
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	-	-	-	-	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PADANG TAHUN 2019-2024**



LAMPIRAN

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD KOTA PADANG TAHUN 2019-2024

LAMPIRAN 2

Tabel 1 Penyelesaian Program Prioritas RPJMN dan RPJMD Provinsi dengan RPJMD

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2019-2024	Sasaran Pembangunan	Indikator	Program	OPD
1.	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	4. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.	Menjadikan sektor perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor				Dinas Perdagangan	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen				Dinas Perdagangan	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri				Dinas Perdagangan	
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil / menengah serta ekonomi berbasis digital Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan					

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2019-2024	Sasaran Pembangunan	Indikator	Program	OPD
				Menjadikan kota Padang sebagai pusat Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Usaha ekonomi kreatif (E-Kraf)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskop UKM
						Program Pengembangan UMKM	Diskop UKM
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
						Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
			5. Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan Dan Penguatan Kemitraan Dalam Perdagangan.	menjadikan sektor perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2019-2024	Sasaran Pembangunan	Indikator	Program	OPD
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
						Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan
						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan
						Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan
				menjadikan kota Padang sebagai pusat ekonomi kreatif	pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (E-Kraf)		
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan	Diskop UKM

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2019-2024	Sasaran Pembangunan	Indikator	Program	OPD
						Usaha Mikro (UMKM)	
						Program Pengembangan UMKM	Diskop UKM
			6. Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Potensi Sumberdaya Dan Kearifan Lokal.	mewujudkan Kota Padang menjadi Tujuan Pariwisata yang unggul dan berdaya saing	kontribusi sektor pariwisata kota Padang terhadap Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
						Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	3. Peningkatan penataan ruang dan pembangunan kawasan permukiman yang ramah	Meningkatnya Permukiman Layak Huni	Persentase perumahan dan permukiman yang layak		
						Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim
						Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkim

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2019-2024	Sasaran Pembangunan	Indikator	Program	OPD
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perkim
				meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sanitasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2019-2024	Sasaran Pembangunan	Indikator	Program	OPD
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
					luas kawasan kumuh yang ditangani	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perkim
3	SDM berkualitas dan berdaya saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia,	1. Peningkatan dan pengembangan kualitas sistem pendidikan karakter	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	Rata – rata lama sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2019-2024	Sasaran Pembangunan	Indikator	Program	OPD
		sehat, unggul dan berdaya saing	berbasis keluarga dan lingkungan yang sehat		Harapan lama sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	1. Peningkatan dan pengembangan kualitas sistem pendidikan karakter berbasis keluarga dan lingkungan yang sehat	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	1. Rata – Rata Lama sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Harapan lama sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2019-2024	Sasaran Pembangunan	Indikator	Program	OPD
					Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
5	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	2. Peningkatan dan penataan infrastruktur/sarana prasarana perkotaan dan transportasi kota yang ramah lingkungan	meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
						Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
						Program penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PUPR
						Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
						Program Pengembangan jasa Konstruksi	Dinas PUPR
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
						Program Penyelesaian Ganti	Dinas PUPR

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2019-2024	Sasaran Pembangunan	Indikator	Program	OPD
						Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	7. Optimalisasi mitigasi bencana berbasis komunitas cerdas bencana	Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana	persentase peningkatan kelurahan tangguh bencana		
						Program Penanggulangan Bencana	BPBD
						Program Pencegahan , Penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	BPBD
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2019-2024	Sasaran Pembangunan	Indikator	Program	OPD
7	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem budaya kerja dan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	semua OPD
				meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Organisasi
					Nilai laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan
			9. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha	meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Semua OPD Pelayan Publik
					Indeks Kemudahan Perizinan Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
					indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo